



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026



**Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang
Sehat, Cerdas dan Sejahtera**



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 263 ayat (3) dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan Daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
12. Pedoman adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
16. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
17. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sulawesi Tengah.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/ kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
22. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
23. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah menyusun RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan masyarakat Morowali Utara secara keseluruhan.

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan :

- a. penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD; dan
- b. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

(2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

- (3) Dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman kepada RPJPD dan RTRW daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, RPJMD Kabupaten lainnya.

Pasal 5

RPJMD bertujuan untuk :

- a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan Daerah jangka menengah; dan
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, kota, serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 selanjutnya dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RKP.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan Renstra PD, RKPD dan Renja PD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. visi dan misi;
 - d. strategi pembangunan daerah;
 - e. arah kebijakan dan kebijakan umum;
 - f. program pembangunan daerah; dan
 - g. indikasi program dan kerangka pendanaan.

(2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
- e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. Bab IX Penutup.

Pasal 9

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (5) Penyampaian hasil evaluasi RPJMD oleh Bupati kepada Gubernur berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya.
- (6) Evaluasi RKPD pada tahun ke-5 pelaksanaan RPJMD sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah.

Pasal 11

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah peraturan daerah ini diundangkan maka harus dibaca dan dimaknai sebagai nomenklatur perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang baru menurut peraturan pemerintah tentang perangkat daerah;
 - d. terjadi perubahan yang mendasar; dan
 - e. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup hal :
- a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan Daerah untuk masa 1 (satu) tahun ke depan dapat mengacu kepada Program yang tertuang di dalam RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

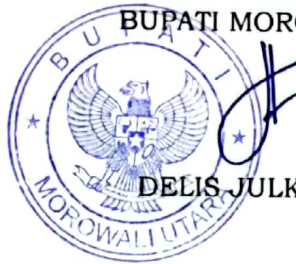
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai Tahun 2026 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2030 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,


MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021
NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 90,07/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021–2026

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 ini, disamping memperhatikan aspirasi masyarakat, juga tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021–2026 serta dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai Amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pendekatan penyusunan RPJMD ini bersifat Teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pembangunan diberbagai sektor yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.

Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026 ini akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu RPJMD ini, juga merupakan implementasi yang menjadi cita - cita pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, serta menjadi tolak ukur publik dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

“Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

“Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

“Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

“Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

“Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

“Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

“Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sector, pendapatan, gender dan usia.

“Berwawasan Lingkungan” adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan

lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 54.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum	I-4
1.3	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-7
1.3.1	RPJMD dan RPJPD Kabupaten Morowali Utara	I-9
1.3.2	RPJMD dan RTRW Kabupaten Morowali Uta....	I-10
1.3.3	RPJMD, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional 2020-2024	I-10
1.3.4	RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-12
1.3.5	RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)	I-12
1.3.6	RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	I-13
1.3.7	RPJMD dengan KLHS RPJMD.....	I-13
1.4	Maksud dan Tujuan	I-13
1.4.1	Maksud	I-13
1.4.2	Tujuan	I-14
1.5	Sistematika Penulisan	I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2	Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.2	Kondisi Topografi	II-3
2.1.3	Kondisi Klimatologi	II-4
2.1.4	Kondisi Geologi	II-4
2.1.5	Kondisi Hidrologi	II-5
2.1.6	Penggunaan Lahan	II-6
2.1.7	Kondisi Geologi Lainnya	II-31
2.1.8	Potensi Pengembangan Wilayah	II-31
2.1.9	Kawasan Rawan Bencana	II-36
2.1.10	Demografi	II-37
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-43
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-43
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB	II-43
2.2.1.2	PDRB per Kapita	II-46



2.2.1.3 Inflasi	II-48
2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) ...	II-49
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-51
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	II-51
2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	II-53
2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-55
2.2.2.4. Persentase Penduduk Miskin	II-57
2.2.2.5. Tingkat Pengangguran	II-64
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II-66
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-68
2.3.1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-68
2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan dasar	II-68
2.3.1.2. Urusan Wajib Tidak terkait Pelayanan	II-120
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan	II-148
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan	II-148
2.3.2.2. Pariwisata	II-151
2.3.2.3. Pertanian	II-158
2.3.2.4. Kehutanan	II-162
2.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral	II-163
2.3.2.6. Perdagangan	II-168
2.3.2.7. Perindustrian	II-170
2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	II-175
2.3.3.1. Perencanaan	II-175
2.3.3.2. Keuangan	II-177
2.3.3.3. Kepegawaian, Pendidikan dan	
Pelatihan	II-180
2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan	II-191
2.3.3.5. Fungsi Lainnya	II-191
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-192
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-193
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-193

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2. Neraca Daerah	III-12
3.1.2.1. Analisis Neraca Daerah	III-13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-16
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-17
3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah	III-18
3.3. Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah	III-32
3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-37

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Daerah Kabupaten Morowali Utara	IV-1
4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	IV-2
4.1.2 Pelayanan Umum	IV-7



4.1.3. Penunjang Urusan	IV-17
4.1.4. Aspek Daya Saing	IV-22
4.2. Isu Strategis	IV-24
4.2.1. Isu Internasional	IV-24
4.2.2. Isu Strategis Nasional	IV-27
4.2.3. Isu Strategis Provinsi	IV-34
4.2.4. Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode Ke-Empat Kabupaten Morowali Utara	IV-40
4.2.5. Penelaahan RTRW Kabupaten Morowali Utara	IV-44
4.2.6. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	IV-53

BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

5.1 Visi dan Misi	V-1
5.1.1 Visi	V-1
5.1.2 Misi	V-5
5.2 Tujuan dan Sasaran	V-13
5.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Makro Daerah	V-13
5.2.2 Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan.....	V-15

BAB VI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi	VI-1
6.1.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesatu	VI-1
6.1.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua	VI-3
6.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga	VI-7
6.1.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat	VI-10
6.1.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima	VI-13
6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mengembangkan Wilayah	VI-15
6.1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa	VI-15
6.1.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan	VI-16
6.2 Prioritas Pembangunan Daerah	VI-29
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-32



**BAB VII STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

7.1	Kerangka Pendanaan	VII-1
7.1.1	Perkiraan Belanja Daerah	VII-2
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-4

**BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

8.1	Indikator Kinerja Utama	VIII-2
8.2	Indiaktor Kinerja Daerah	VIII-5

BAB IX PENUTUP

9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2
9.3	Pengendalian dan Evaluasi	IX-3



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan, Tahun 2020	II-1
Tabel 2.2	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020	II-4
Tabel 2.3	Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara	II-5
Tabel 2.4	Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara	II-7
Tabel 2.5	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-8
Tabel 2.6	Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-8
Tabel 2.7	Luas Kawasan Hutan Produksi Konversi Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-9
Tabel 2.8	Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-10
Tabel 2.9	Luas Kawasan Pertanian Hortikultura Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-10
Tabel 2.10	Luas Kawasan Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-11
Tabel 2.11	Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-14
Tabel 2.12	Luas Kawasan Permukiman Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-16
Tabel 2.13	Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri	II-22
Tabel 2.14	Luas Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Morowali Utara	II-24
Tabel 2.15	Luas Kawasan Sempadan Sungai Kabupaten Morowali Utara	II-24
Tabel 2.16	Luas Kawasan Sekitar Danau Kabupaten Morowali Utara	II-25
Tabel 2.17	Luas Kawasan Cagar Alam Kabupaten Morowali Utara	II-27
Tabel 2.18	Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-32
Tabel 2.19	Luas Kawasan Perkebunan Menurut	



Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-33
Tabel 2.20 Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	II-35
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010, 2018, 2019, dan 2020	II-38
Tabel 2.22 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019	II-40
Tabel 2.23 Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	II-41
Tabel 2.24 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	II-41
Tabel 2.25 Penduduk Menurut Umur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	II-42
Tabel 2.26 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2020	II-43
Tabel 2.27 Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2015-2020	II-46
Tabel 2.28 Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2015-2020	II-48
Tabel 2.29 Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-69
Tabel 2.30 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-71
Tabel 2.31 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-72
Tabel 2.32 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-74
Tabel 2.33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-76
Tabel 2.34 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-78
Tabel 2.35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-	II-79



2019	
Tabel 2.36 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-81
Tabel 2.37 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-82
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2019	II-83
Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2019	II-84
Tabel 2.40 Angka Kelulusan semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-84
Tabel 2.41 Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-86
Tabel 2.42 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019	II-88
Tabel 2.43 Rasio guru/murid sekolah pendidikan Menengah Tahun 2015-2019	II-88
Tabel 2.44 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Tahun 2015-2019	II-96
Tabel 2.45 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Tahun 2015-2019	II-97
Tabel 2.46 Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-98
Tabel 2.47 Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-98
Tabel 2.48 Cakupan Puskesmas Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-106
Tabel 2.49 Proporsi Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2020	II-108
Tabel 2.50 Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-110
Tabel 2.51 Jumlah Penyandang Masalah Sosial Menurut Jenisnya Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017- 2018.....	II-119
Tabel 2.52 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-121
Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-122
Tabel 2.54 Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-201.....	II-131
Tabel 2.55 Terintegrasinya RPPLH dalam rencana	



pembangunan kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-132
Tabel 2.56 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-132
Tabel 2.57 Terselaksananya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-133
Tabel 2.58 Ketersediaan database kependudukan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-134
Tabel 2.59 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-135
Tabel 2.60 Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-137
Tabel 2.61 Jumlah arus penumpang umum terminal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-140
Tabel 2.62 Jumlah arus penumpang angkutan laut/udara/ terminal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-140
Tabel 2.63 Jumlah arus penumpang angkutan laut/udara/ terminal Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019.....	II-141
Tabel 2.64 Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.65 Buku Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.66 Buku PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-145
Tabel 2.67 DTW Budaya Kabupaten Morowali Utara	II-146
Tabel 2.68 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019.....	II-149
Tabel 2.69 Produksi Perikanan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-150
Tabel 2.70 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-151
Tabel 2.71 DTW Alam Kabupaten Morowali Utara ...	II-153
Tabel 2.72 DTW Budaya Kabupaten Morowali Utara	II-155
Tabel 2.73 DTW Buatan (Mice) Kabupaten Morowali Utara	II-156
Tabel 2.74 Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-157
Tabel 2.75 Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-157
Tabel 2.76 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara	



Tahun 2015-2019	II-158
Tabel 2.77 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-159
Tabel 2.78 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Pangan) terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-160
Tabel 2.79 Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-161
Tabel 2.80 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Hektar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-161
Tabel 2.81 Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-162
Tabel 2.82 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-162
Tabel 2.83 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015- 2019	II-164
Tabel 2.84 Rasio Elektrifikasi RT Menurut Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-165
Tabel 2.85 Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN pada Cabang/ranting Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2012-2019	II-168
Tabel 2.86 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015- 2019	II-169
Tabel 2.87 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-170
Tabel 2.88 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-170
Tabel 2.89 Kontribusi Sektor Jasa Rumah Tangga terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019.....	II-172
Tabel 2.90 Pertumbuhan Industri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-173
Tabel 2.91 Industri Prioritas Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2040	II-173
Tabel 2.92 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-176
Tabel 2.93 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-176
Tabel 2.94 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD	



yang telah ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-177
Tabel 2.95 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-177
Tabel 2.96 Opini BPK Atas LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-178
Tabel 2.97 Penetapan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-180
Tabel 2.98 Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Gender	II-181
Tabel 2.98 Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan	II-181
Tabel 2.100 Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Golongan	II-181
Tabel 2.101 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Prajabatan.....	II-182
Tabel 2.102 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	II-182
Tabel 2.103 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2017-2021.....	II-182
Tabel 2.104 Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2017 – 2021	II-183
Tabel 2.105 Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat	II-183
Tabel 2.106 Jumlah Pemberian Penghargaan	II-184
Tabel 2.107 Jumlah Pegawai Yang Cuti	II-184
Tabel 2.108 Jumlah Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Tahun 2017-2021	II-184
Tabel 2.109 Jumlah Pemrosesan Ijin Perkawinan dan Perceraian Tahun 2017-2021	II-185
Tabel 2.110 Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar Daerah Tahun 2017-2021	II-185
Tabel 2.111 Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar SKPD Di Lingkungan Pemerintahan Morowali Utara.....	II-186
Tabel 2.112 Jumlah PNS Yang Pensiun	II-186
Tabel 2.113 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat	II-187
Tabel 2.114 Data Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar	II-187
Tabel 2.115 Data Pegawai Yang Ijin Belajar	II-188
Tabel 2.116 Data Capaian Kinerja Lainnya	II-188
Tabel 2.117 Daftar Prediksi Pensiun PNS Tahun 2021- 2026	II-189
Tabel 2.118 Gambaran Capaian Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-192
Tabel 2.119 Produktivitas Total Daerah Persektor Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-195
Tabel 2.120 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan	II-197
Tabel 2.121 Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan	



Listrik PLN pada Cabang/Ranting Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-198
Tabel 2.122 Arus Lalu Lintas Melalui Pelabuhan Per tahun Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-200
Tabel 2.123 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-201
Tabel 2.124 Evaluasi Capaian Terhadap Target Akhir Indikator Makro RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021	II-233
Tabel 2.124 Evaluasi Capaian Terhadap Target Akhir Indikator Makro RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021.....	II-238
Tabel 2.124 Evaluasi Capaian Terhadap Target Akhir Indikator Makro RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021	II-240
Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019	III-3
Tabel 3.2. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Rencana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020	III-4
Tabel 3.3. Persentase Realisasi Dana Perimbangan Terhadap Rencana Dana Perimbangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020	III-5
Tabel 3.4. Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Rencana Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020	III-6
Tabel 3.5 Perkembangan Pendapatan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 s/d Tahun 2020	III-7
Tabel 3.6. Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap Rencana Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	III-9
Tabel 3.7. Persentase Realisasi Pembiayaan Daerah terhadap Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019	III-10
Tabel 3.8 Perkembangan Realisasi Belanja dan Pembiayaan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 s/d 2020	III-11
Tabel 3.9 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Morowali Utara Tahun 2017-2019	III-12
Tabel 3.10 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019	III-14
Tabel 3.11 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019	III-17
Tabel 3.12 Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 s/d Tahun 2019	III-19



Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019	III-21
Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 s/d Tahun 2019	III-23
Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	III-31
Tabel 3.16 Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	III-36
Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s/d Tahun 2026	III-40
Tabel 3.18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s/d Tahun 2026	III-42
Tabel 4.1 Capaian Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah 2019-2020	IV-36
Tabel 4.2 Potensi Pengembangan Wilayah Belakang Kota Kecamatan	IV-49
Tabel 4.3 Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten Morowali Utara 2016-2036	IV-51
Tabel 5.1 Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJPD 2005- 2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	V-4
Tabel 5.2 Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	V-4
Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2025	V-8
Tabel 5.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	V-10
Tabel 5.5 Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	V-11
Tabel 5.6 Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	V-12
Tabel 5.7 Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	V-14
Tabel 5.8 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	V-18
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	VI-2
Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	VI-4
Tabel 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	VI-7



Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	VI-11
Tabel 6.5	Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	VI-14
Tabel 6.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mori Atas Tahun 2021-2026	VI-17
Tabel 6.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lembo Tahun 2021-2026	VI-18
Tabel 6.8	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lembo Raya Tahun 2021-2026.....	VI-19
Tabel 6.9	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Petasia Timur Tahun 2021-2026.....	VI-20
Tabel 6.10	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Petasia Tahun 2021-2026	VI-21
Tabel 6.11	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Petasia Barat Tahun 2021-2026	VI-23
Tabel 6.12	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mori Utara Tahun 2021-2026	VI-24
Tabel 6.13	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026	VI-26
Tabel 6.14	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Bungku Utara Tahun 2021-2026.....	VI-27
Tabel 6.15	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mamosalato Tahun 2021-2026	VI-28
Tabel 6.16	Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	VI-35
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.....	VII-3
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2021-2026.....	VII-5
Tabel 8.1	Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan indikator kinerja daerah terhadap kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 (Indikator Kinerja Kunci)	VIII-6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.....	I-8
Gambar 1.2 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara	II-3
Gambar 2.2 Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Morowali Utara	II-23
Gambar 2.3 Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara	II-37
Gambar 2.4 Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	II-39
Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	II-43
Gambar 2.6 Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-45
Gambar 2.7 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2019	II-46
Gambar 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-49
Gambar 2.9 Indeks Gini Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2018	II-50
Gambar 2.10 Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-51
Gambar 2.11 Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2018	II-51
Gambar 2.12 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2019	II-52
Gambar 2.13 Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019	II-53
Gambar 2.14 Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2019	II-53
Gambar 2.15 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2020	II-54
Gambar 2.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-54
Gambar 2.17 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	II-55



Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020	II-56
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-57
Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	II-57
Gambar 2.21 Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2020	II-58
Gambar 2.22 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-58
Gambar 2.23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng dan Nasional Tahun 2020	II-59
Gambar 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2020	II-60
Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-60
Gambar 2.26 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	II-61
Gambar 2.27 Indeks keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2019	II-62
Gambar 2.28 Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2020	II-62
Gambar 2.29 Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	II-63
Gambar 2.30 Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dan nasional Tahun 2015-2020	II-64
Gambar 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020	II-65
Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020	II-65
Gambar 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	II-66
Gambar 2.34 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-70
Gambar 2.35 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	II-71
Gambar 2.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	



Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-72
Gambar 2.37 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	II-73
Gambar 2.38 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-74
Gambar 2.39 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	II-75
Gambar 2.40 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-75
Gambar 2.41 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	II-76
Gambar 2.42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-77
Gambar 2.43 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	II-78
Gambar 2.44 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MTs Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-79
Gambar 2.45 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019	II-80
Gambar 2.46 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-81
Gambar 2.47 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-81
Gambar 2.48 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-82
Gambar 2.49 Angka Kelulusan Semua Jenjang Pendidikan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-85
Gambar 2.50 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-86
Gambar 2.51 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-87
Gambar 2.52 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015- 2019	II-89
Gambar 2.53 Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-90
Gambar 2.54 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-90
Gambar 2.55 Angka melek huruf penduduk usia 15-24 Tahun, perempuan dan laki-laki Kabupaten Morowali	



Utara Tahun 2015-2019	II-91
Gambar 2.56 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-92
Gambar 2.57 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015- 2019	II-93
Gambar 2.58 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-94
Gambar 2.59 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-95
Gambar 2.60 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-96
Gambar 2.61 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-99
Gambar 2.62 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-100
Gambar 2.63 Jumlah penderita penyakit TBC BTA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-100
Gambar 2.64 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-101
Gambar 2.65 Jumlah penderita penyakit DBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-102
Gambar 2.66 Jumlah Penderita Diare Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-102
Gambar 2.67 Jumlah Kejadian Malaria Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-103
Gambar 2.68 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-104
Gambar 2.69 Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-105
Gambar 2.70 Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-106
Gambar 2.71 Prevalensi Stunting Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-107
Gambar 2.72 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-109
Gambar 2.73 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-111
Gambar 2.74 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019.....	II-112
Gambar 2.75 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-113
Gambar 2.76 Proporsi rumah tangga dengan akses	



berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-113
Gambar 2.77 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-114
Gambar 2.78 Presentase RT Pengguna Listrik Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-115
Gambar 2.79 Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-116
Gambar 2.80 Jumlah Panti Asuhan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-118
Gambar 2.81 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-121
Gambar 2.82 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020.....	II-122
Gambar 2.83 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-124
Gambar 2.84 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-124
Gambar 2.85 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-125
Gambar 2.86 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-126
Gambar 2.87 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-127
Gambar 2.88 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-128
Gambar 2.89 Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-129
Gambar 2.90 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-130
Gambar 2.91 Rasio Bayi Berakut Kelahiran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-134
Gambar 2.92 Jumlah Kantor Desa Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-136
Gambar 2.93 Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-137
Gambar 2.94 Proporsi individu yang menggunakan internet Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-142
Gambar 2.95 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	II-143
Gambar 2.96 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-150
Gambar 2.97 Konsumsi Ikan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-151
Gambar 2.98 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-152



Gambar 2.99 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-163
Gambar 2.100 Rasio Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-163
Gambar 2.101 Persentase RT Pengguna Listrik Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-165
Gambar 2.102 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020	
Gambar 2.103 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-169
Gambar 2.104 Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap Sektor Industri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-171
Gambar 2.105 Persentase SiLPA Terhadap APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-172
Gambar 2.106 Persentase Belanja Pendidikan 20% Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-178
Gambar 2.107 Persentase Belanja Kesehatan 10% Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-179
Gambar 2.108 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-179
Gambar 2.109 Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-180
Gambar 2.110 Nilai Tukar Petani Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019	II-193
Gambar 2.111 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	II-194
Gambar 2.112 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2020	II-195
Gambar 4.1 Rencana Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024	II-199
Gambar 4.2 Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi	IV-29
Gambar 4.3 Wilayah Terdampai Gempa dan Tsunami.....	IV-30
Gambar 4.4 Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026	IV-40
Gambar 4.5 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	IV-42
Gambar 4.6 Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019	IV-54
Gambar 4.7 Keterkaitan Isu-Isu startegis International, Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara.....	IV-61
Gambar 5.1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali 2005-2025	IV-65
Gambar 5.2. Tema Pembangunan RPJPD Kabupaten Morowali	V-2



2005-2025	V-3
Gambar 5.3. Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	V-6
Gambar 5.4. Kerangka Pikir Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	V-8



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi dan budaya, Kabupaten Morowali Utara terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Morowali berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Morowali Utara secara bertahap telah diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja daerah. Berbagai kemajuan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus diatasi secara bersungguh-sungguh dan terpadu.

Tantangan pembangunan Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun (2021-2026) mendatang adalah menjaga momentum pembangunan dengan mendorong penanganan pandemi Covid-19 secara tepat dan tuntas, pemulihan kehidupan sosial ekonomi; serta percepatan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia. Permasalahan yang harus segera diatasi adalah masih terbatasnya jangkauan dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, masih adanya kemiskinan dan pengangguran, belum tuntasnya kesenjangan antarwilayah kecamatan dan antardesa, belum optimalnya pengelolaan pemerintahan, dan belum meratanya akses masyarakat terhadap pemenuhan hak dasar yang bermutu.

Selain itu, tantangan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah mendorong perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya yang lebih sehat, aman, maju, dan bermartabat; menjamin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs-*Sustainable Development Goals*); serta memperkuat keunggulan dan daya saing daerah. Berbagai tantangan tersebut perlu diatasi melalui strategi, kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang terencana, terukur, terpadu dan merata antardesa dan antarkecamatan.

Dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis yang ditandai oleh semakin luasnya perkembangan teknologi, meningkatnya kerjasama investasi dan berkembangnya perdagangan internasional, Kabupaten Morowali Utara perlu terus melakukan transformasi dan akselerasi pembangunan menjadi kabupaten yang



mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Sejalan dengan perubahan itu, pelaksanaan demokrasi mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Morowali Utara menjadi lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel yang memberikan peluang lebih luas bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Morowali Utara yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Sementara, pelaksanaan otonomi desa menegaskan komitmen untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah.

Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung dan telah terpilih Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS sebagai Bupati, dan H. Djira K, S.Pd, M.Pd sebagai Wakil Bupati Morowali Utara masa jabatan 2021-2026, dan dilantik pada tanggal 30 April 2021. Pelaksanaan Pilkada tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Morowali Utara.

Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bakti 2021-2026 mempunyai tekad dan semangat melaksanakan Gerakan Desa Sejahtera untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan melalui kerjasama dan kemitraan multipihak. Gerakan Desa Sejahtera merupakan gerakan bersama yang didasarkan pada semangat, harapan dan tindakan meraih masa depan membangun desa yang produktif, adaptif, partisipatif dan emansipatif. Gerakan Desa Sejahtera berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Morowali Utara harus dimulai dari desa. Desa adalah tempat dan komunitas masyarakat Morowali Utara. Desa yang sehat, cerdas, maju dan sejahtera adalah wujud nyata dari Kabupaten Morowali Utara yang maju dan sejahtera. Gerakan Desa Sejahtera adalah gerakan bersama membangun dan memajukan desa untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan menempatkan masyarakat



desa sebagai pelaku utama pembangunan dan mengembangkan partisipasi rakyat seluas-luasnya.

Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bakti 2021-2026 juga akan melaksanakan Gerarakn Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah. Gerakan Revitalisasi Kecamatan diarahkan untuk mendukung penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pengembangan kawasan ekonomi daerah.

Gerakan Inovasi Daerah diarahkan untuk setiap perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan dan kecamatan; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, media dan mitra pembangunan.

Sejalan dengan visi Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera, dan sesuai semangat, tekad dan memajukan desa, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyiapkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas program secara terencana, terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan Morowali Utara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara merupakan tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.

Dalam lima tahun ke depan, rencana pembangunan di Morowali Utara akan melalui Tahap Konsolidasi (2021) yang menekankan penyelesaian seluruh dokumen perencanaan sesuai peraturan perundangan, penataan organisasi pemerintahan daerah dan penguatan dukungan berbagai pihak; serta pemulihan ekonomi pascapandemik covid 19; Tahap Pelaksanaan (2022) yang mengutamakan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah dan pemenuhan standar pelayanan minimum; Tahap Pemantapan (2023) yang menitikberatkan keserasian dan kesesuaian langkah seluruh perangkat daerah kabupaten, para Camat, para Kepala Desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan prioritas daerah; Tahap Pencapaian (2024) yang menegaskan pencapaian awal dari tujuan dan sasaran utama pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Morowali Utara; serta Tahap Peningkatan dan Pengembangan (2025) yang mengutamakan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Morowali Utara



Sehat, Cerdas dan Sejahtera, dan meletakkan pondasi bagi pembangunan lima tahun berikutnya yang lebih berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 juga memuat skenario pembangunan untuk lima tahun mendatang termasuk tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta kerangka ekonomi dan investasi daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional, serta perubahan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta berbagai kebijakan nasional lainnya yang berkaitan dengan komitmen internasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4410);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- (11) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
- (15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - (17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - (18) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - (19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - (20) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - (21) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - (22) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;
 - (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan



- Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - (26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 - (27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 - (28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - (29) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);

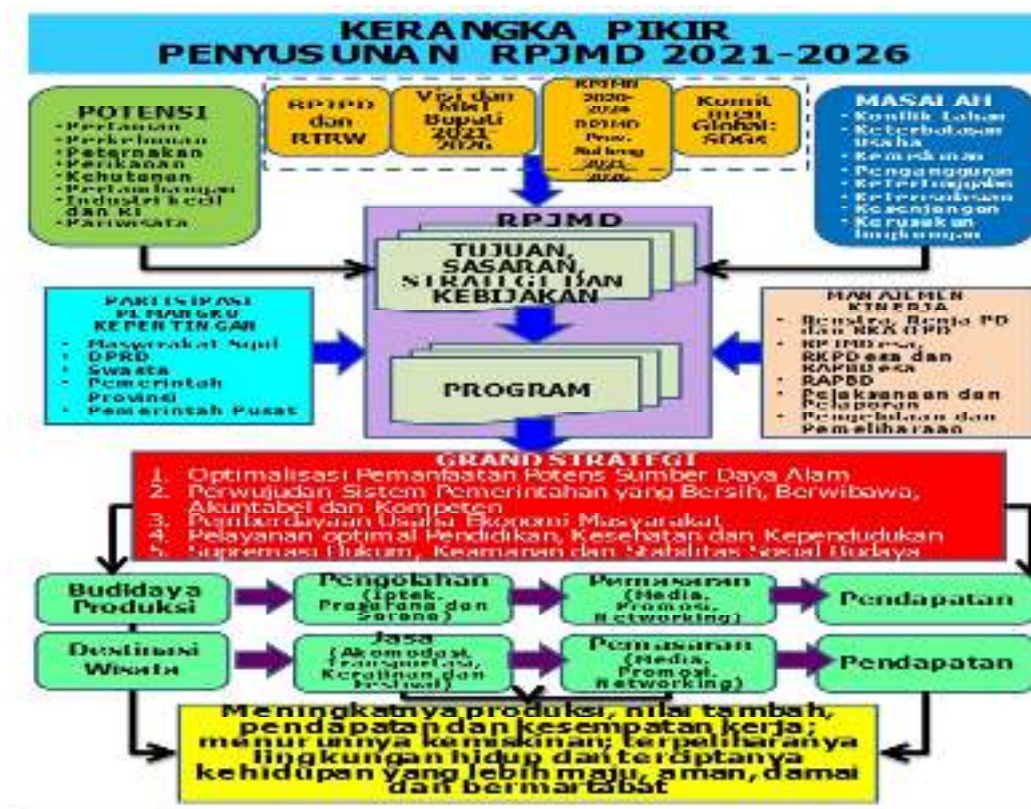
1.3 Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional, untuk memastikan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 memperhatikan hasil kajian terhadap potensi daerah baik sumber daya pertanian, pertambangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri kecil dan pariwisata terutama menyangkut ketersediaan lahan, kapasitas produksi dan pelaku usaha baik rumah tangga maupun swasta dalam mengelola sumber daya. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 juga memperhatikan kajian terhadap permasalahan daerah terutama keterbatasan usaha, kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, keterisolasian, kesenjangan dan kerusakan lingkungan.



Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026



Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 memperhatikan berbagai pandangan dari para pemangku kepentingan baik tokoh masyarakat, DPRD, masyarakat sipil, pelaku usaha, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dihimpun melalui diskusi, rapat koordinasi, dan media informasi.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.



Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.1 RPJMD dan RPJPD Kabupaten Morowali Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara 2005-2025 terutama visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. RPJMD 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bakti Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025.

Visi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Misi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 adalah (1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis (*good governance*); (2) mewujudkan pelayanan publik yang merata, terjangkau dan berkualitas; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas daerah, dan iklim investasi; (4) meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang baik dan memadai; (5) mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan pengentasan



kemiskinan; dan (6) mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan tahap keempat (2021-2025) adalah (1) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas; (2) peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kompetensi sumber daya aparatur; (3) peningkatan infrastruktur; (4) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut sebagai gerbang ekonomi maritim; (5) peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal; (6) peningkatan daya saing dan peningkatan investasi daerah; serta (7) pembangunan inklusif dan lingkungan berkelanjutan.

1.3.2 RPJMD dan RTRW Kabupaten Morowali Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan, serta prioritas pembangunan wilayah kecamatan. RPJMD Kabupaten Morowali Utara memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan. Keserasian dokumen RPJMD dan RTRW untuk menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara secara berkelanjutan.

1.3.3 RPJMD, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 memperhatikan dan mengacu tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah mempertimbangkan dan mengacu tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan nasional Nawacita yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara memperhatikan agenda pembangunan Nawacita yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomer 18 Tahun 200 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

RPJMN 2020-2024 menjelaskan visi pembangunan: *“Terwujudnya Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, dan misi pembangunan: (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3)



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 juga menegaskan arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; (2) Pembangunan Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; (3) Penyederhanaan Regulasi: Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua (2) undang-undang: UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM; (4) Penyederhanaan Birokrasi: Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan (5) Transformasi Ekonomi: Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJMN 2020-2024 juga memuat tujuh agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 menyebutkan visi, yaitu: “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”, dan misi: (1) Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar; (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM; (3) Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan; (4) Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah; (5)



Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan; (6) Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antarsesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan; (7) Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antardaerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga; (8) Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital; serta (9) Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam mendukung komitmen global terutama pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana.

1.3.4 RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis dari perwujudan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Renstra PD juga menjadi dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dengan koordinasi bersama koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Morowali Utara.

1.3.5 RPJMD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

RPJMD Kabupaten Morowali Utara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Morowali Utara. RPJMDesa juga memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran dan indikator kinerja, lokasi dan anggaran sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa dan urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan. RPJMDesa disusun oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Perwakilan Desa di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah



(Bappelitbangda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Morowali Utara.

1.3.6 RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rencanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.7 RPJMD dengan KLHS RPJMD

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1); “ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program”, dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM Daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang



terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 juga dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan prioritas Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bakti 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 bertujuan antara lain untuk:

- (1) Menyediakan acuan dan pedoman resmi bagi aparat Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa; serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Morowali Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Morowali Utara, APBD Provinsi Sulawesi Tengah, APBN dan sumber dana lainnya;
- (3) Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
- (4) Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;



- (5) Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- (6) Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran dan agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- (7) Mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
- (8) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antarPerangkat Daerah; antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Sulawesi Tengah; serta antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Pusat;
- (9) Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- (10) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- (11) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, pelaku usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan media.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antardokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategi



BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km² dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km². Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.362,39 Km². Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km² atau 24,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 480,30 Km² atau sebesar 4,80 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara. Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara
Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km)	Persentase (Persen)	Tinggi (m)
1.	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08	317
2.	Lembo	Beteleme	675,23	6,75	180
3.	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57	287
4.	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10	6
5.	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46	5
6.	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80	10
7.	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48	326
8.	Soyo Jaya	Lembah	605,51	6,05	11



No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km)	Persentase (Persen)	Tinggi (m)
		Sumara			
9.	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06	2
10.	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64	5
Morowali Utara			10.004,28	100	1149

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan Kabupaten/ Kota yang memiliki luas wilayah terbesar di Sulawesi Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 10.004,28 Km² atau sekitar 16,18 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara	• Kabupaten Tojo Una-Una
Sebelah Selatan	• Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
Sebelah Barat	• Kabupaten Poso
Sebelah Timur	• Kabupaten Banggai dan Laut Banda

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kedudukan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu daerah potensial di kawasan Timur dan Tenggara Teluk Tolo Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti penting dan bersifat strategis dipandang dari stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka secara geografis Kabupaten Morowali Utara terletak pada koordinat antara 01°31'12" Lintang Selatan 03°46'48" Lintang Selatan serta 121°02'24" Bujur Timur 123°15'36" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak di sekitar Teluk Tolo, Teluk Tomori sampai pada daerah pedalaman yang berbentuk lembah, perbukitan, dan pegunungan.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara



Sumber: Kabupaten Morowali dalam Angka, Tahun 2020

Saat dibentuk pertama kalinya, Kabupaten Morowali beribukota di Kolonodale (ibukota Morowali Utara sekarang). Ibukota definitif Kabupaten Morowali sekarang, yakni di Bungku (Bungku Tengah), sesuai dengan undang-undang dan telah difungsikan sejak 2 Mei 2006. Sedangkan Kolonodale telah menjadi ibukota Kabupaten Morowali Utara. Kondisi geografis Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota Kabupaten yang berkedudukan di Kolonodale berbatasan dengan laut (Perairan Teluk Tolo) sehingga dapat dicapai melalui laut, darat atau kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah lainnya.

2.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut.

Berdasarkan elevasi, 60 persen wilayah Kabupaten Morowali Utara berada pada ketinggian antara 0-100 meter dpl, sebesar 40 persen berada pada ketinggian antara 101-500 meter dpl (Tabel 2.1). Menurut tingkat kelerengan wilayah ini sebesar 52,30 persen memiliki kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam-sangat curam), sebesar 11,70 persen memiliki kemiringan di bawah 2 persen (datar agak landai), sebesar 12,56 persen memiliki kemiringan antara 3 persen -15 persen dan 23,30 persen luas wilayah memiliki kemiringan antara 16 persen-40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen. Akibat curah hujan yang tinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula



kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa.

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Morowali Utara dipengaruhi sirkulasi sistem global, munson, dan lokal. Secara Tahunan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bulan terbasah terjadi pada Juni (760,28 mm) dan bulan terkering (40,40 mm) terjadi pada Agustus. Berdasarkan klasifikasi **Schmidt-Fergusson**, Wilayah Kabupaten Morowali Utara, tergolong iklim A atau sangat basah dengan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara (26,5°C) sampai (27,4°C).

Tabel 2.2
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020

Bulan	Tahun 2019	
	Hari Hujan	Curah Hujan
	(hh)	(mm)
01. Januari	15	290,50
02. Pebruari	17	174,40
03. Maret	18	216,90
04. April	23	242,00
05. Mei	20	222,80
06. Juni	17	223,20
07. Juli	22	291,40
08. Agustus	13	125,00
09. September	19	249,10
10. Oktober	20	407,60
11. November	15	256,80
12. Desember	19	63,10

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2021

2.1.4 Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Morowali Utara tersusun atas beberapa jenis batuan antara lain, batuan Mollase, batuan Kapur, batuan Skiss, batuan Basik, Ultra basik dan Sedimen. Dari sisi geomorfologi, wilayah ini tersusun atas beberapa bentuk lahan (landform), yaitu bentuk lahan Aluvial (A), Marine (M), Volkanik (V), Tektonik dan Struktural (T). Bentuk lahan aluvial terbentuk dari proses fluvial yang umumnya tersebar di dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 persen, dan banyak dijumpai di sekitar sungai-sungai besar. Bentuk lahan marine tersebar pada wilayah datar agak cekung di sepanjang pantai. Bentuk lahan tektonik dan vulkanik tersebar pada relief yang bergelombang sampai bergunung.



2.1.5 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Morowali Utara memiliki banyak sungai dan Kecamatan yang memiliki sungai adalah Kecamatan Mori Atas (7 sungai) Kecamatan Bungku Utara (15 sungai) dan Kecamatan Mamosalato (12 sungai).Sungai terpanjang adalah sungai Laa yang melintasi 5 (lima) Kecamatan, yaitu 1). Kecamatan Mori Atas, 2) Kecamatan Petasia Timur, 3) Kecamatan Petasia, 4) Kecamatan Petasia Barat, 5) Kecamatan Mori Utara.

Sungai Bongka sebagai sungai terpanjang kedua melintasi Kecamatan Mamosalato. Sungai terpanjang ketiga melintasi Kecamatan Bungku Utara yaitu Sungai Tiworo. Sungai terpanjang keempat adalah Sungai Sumara yang melintasi Kecamatan Soyo Jaya. Data dan informasi mengenai nama-nama dan ukuran sungai di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3
Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan/Desa	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Mamosalato	S. Pangkape	3,00
		S. Kaia	2,00
		S. Kapali	2,00
		S. Manandar	15,00
		S. Uekauru	15,00
		S. Uefayau	4,00
		S. Tamarando	6,00
		S. Tomba	5,00
		S. Uekawoa	5,00
		S. Uewine	15,00
		S. Mumungi	5,00
		S. Bongka	60,00
2.	Bungku Utara	S. Kafuyu	22,00
		S. Lamuru	8,00
		S. Paididi	5,10
		S. Bongka	38,00
		S. Solato	29,00
		S. Siombo	18,00
		S. Tirongan	43,00
		S. Morowangu	9,00
		S. Morowali	37,00
		S. Ula	47,00
		S. Tiworo	53,00
		S. Nua-Nua	21,00
		S. Tofu	19,00
		S. Uemanu	22,00
		S. Samara	23,00
3.	Petasia	S. Laa	117,00
4.	Petasia Barat	S. Laa	117,00
5.	Petasia Timur	S. Laa	117,00
6.	Lembo	S. Tambalako	...
		S. Puawu	...



No.	Kecamatan/Desa	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
7.	Lembo Raya	S. Tambalako	...
		S. Sokita	...
		S. Tambalako	105,00
8.	Mori Atas	S. Ensa	17,00
		S. Kadata	15,00
		S. Kolaka	25,00
		S. Kuse	27,00
		S. Laa	37,00
		S. Talolae	20,00
		S. Yaintu	23,00
		S. Koromboyo	
		S. Towerio	
9.	Mori Utara	Koro Njaya	22,00
		Koro Mayumba	24,00
		Koro Sampa	7,00
		S. Kuse	27,00
		Korontiwa	8,00
		S. Laa	37,00
		S. Korompalia	10,00
		S. Karuru	15,00
		Koro Era	20,00
		S. Yaintu	23,00
		Koro Dolo	15,00
10.	Soyo Jaya	S. Busanga	20,00
		S. Sumara	45,00

Sumber: Statistik Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikelompokkan menjadi lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Penggunaan lahan untuk pertanian masih terbagi lagi menjadi pertanian sawah dan bukan sawah. Pada penggunaan lahan non pertanian didominasi oleh hutan, rawa dan lain-lain selain untuk bangunan dan pekarangan. Hutan rawa dan lainnya merupakan kelompok terbesar dalam klasifikasi ini yaitu sebesar 86,54 persen sedangkan lahan pertanian sebesar 13,46 persen dengan penggunaan lahan pertanian sawah sebesar 0,95 persen dan lahan pertanian bukan sawah sebesar 12,51 persen. Berdasarkan data potensi penggunaan lahan ini, maka berbagai jenis pertanian maupun kegiatan lainnya masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Data luas lahan menurut penggunaan dan kecamatan di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.4 sebagai berikut.



Tabel 2.4
Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)			
	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
Mamosalato	1.001,75	4.983,86	246.731	252.716,6
Bungku Utara	983	18.866	221.035	240.884
Soyo Jaya	1.241	10.338	48.972	60.551
Petasia	2.982*	22.345*	80.315*	105.642*
Petasia Barat				
Petasia Timur	1.274	9.019	47.874	58.167
Lembo	882	9.934,5	47.563,75	58.380
Lembo Raya	385	14.859	50.542	65.786
Mori Atas	615	22.756	127.585	150.956
Mori Utara	989	24.294	79.665	104.948
Morowali Utara	13.335	159.740	950.283	1.098.030

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036

Catatan: * Data masih bergabung antara Kecamatan Petasia dan Petasia Barat

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan Lahan Pangan Berkelanjutan dengan luas 8.394 Ha yang tersebar di 10 kecamatan yaitu;

- Kecamatan Mori Utara dengan luas 732 hektar;
- Kecamatan Mori Atas dengan luas 726 hektar;
- Kecamatan Lembo dengan luas 680 hektar;
- Kecamatan Lembo Raya dengan luas 306 hektar;
- Kecamatan Petasia dengan luas 16 hektar;
- Kecamatan Petasia Timur dengan luas 838 hektar;
- Kecamatan Petasia Barat dengan luas 937 hektar;
- Kecamatan Soyo Jaya dengan luas 1.372 hektar;
- Kecamatan Bungku Utara dengan luas 1.854 hektar;
- Kecamatan Mamosalato dengan luas 933 hektar;

Sedangkan untuk penetapan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Luas 146.100 hektar, yang tersebar d 10 kecamatan yakni:

- Kecamatan Mori Utara dengan luas 41.296,14 hektar;
- Kecamatan Mori Atas dengan luas 35.960,18 hektar;
- Kecamatan Lembo dengan luas 1.982,8 hektar;
- Kecamatan Lembo Raya dengan luas 12.049,31 hektar;
- Kecamatan Petasia dengan luas 38,64 hektar.
- Kecamatan Petasia Timur dengan luas 7.724,2 hektar;
- Kecamatan Petasia Barat dengan luas 1.257,42 hektar;
- Kecamatan Soyo Jaya dengan luas 13.753,36 hektar;
- Kecamatan Bungku Utara dengan luas 3.528,89 hektar;
- Kecamatan Mamosalato dengan luas 28.509,18 hektar;

Hal lain yang juga menjadi perhatian utama adalah kawasan hutan yang memegang peranan penting dalam menunjang



kelangsungan hidup seluruh mahluk hidup khususnya umat manusia. Kabupaten Morowali Utara dianugerahi sumber daya hutan yang melimpah baik ditinjau dari aspek kandungan sumberdaya hayati maupun dari aspek luas kawasan hutan. Penggolongan kawasan lindung dan Kawasan Budidaya di Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

1. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Morowali Utara hampir terdapat di semua wilayah Kecamatan dengan luasan kurang lebih 92.485,70 Ha. Luas dan sebaran kawasan hutan produksi terbatas dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Hutan Produksi Terbatas	
1.	Mamosalato	148.000,00	12.944	8,75
2.	Bungku Utara	240.679,00	6.289	2,61
3.	Soyo Jaya	60.551,00	12.881	21,27
4.	Petasia	64.634,00	2.318	3,59
5.	Petasia Barat	46.529,00	7.131,28	15,33
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.114,42	4,04
7.	Lembo	67.523,00	13.027	18,46
8.	Lembo Raya	65.761,00	15.970	24,28
9.	Mori Atas	104.893,00	6.731	5,98
10.	Mori Utara	150.881,00	13.080	22,69
Morowali Utara		1.001.812	92.484.70	9,23

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

- Kawasan Hutan Produksi (HP) Tetap

Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Morowali Utara terdapat di semua wilayah Kecamatan dengan luasan sekitar 104.831,61 Ha. Luas dan sebaran kawasan hutan produksi dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6
Luas Kawasan Hutan Produksi Tetap
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	
1.	Mamosalato	148.000,00	12.274	8,29
2.	Bungku Utara	240.679,00	10.913	4,53
3.	Soyo Jaya	60.551,00	28.974	47,85
4.	Petasia	64.634,00	4.789	14,51
5.	Petasia Barat	46.529,00	1.962	4,21



No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	
6.	Petasia Timur	52.361,00	10.094	19,27
7.	Lembo	67.523,00	4.280	6,33
8.	Lembo Raya	65.761,00	7.894	12,00
9.	Mori Atas	104.893,00	12.655	12,06
10.	Mori Utara	150.881,00	8.124	5,38
Morowali Utara		1.001.812	101.959	10,17

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2018

- Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK)
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di 4 wilayah Kecamatan Kabupaten dengan luas 20.831,28 Ha. Luasan dan sebaran wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.7
Luas Kawasan Hutan Produksi Konversi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Hutan Produksi Konversi	
1.	Mamosalato	148.000,00	2.083	1,40
2.	Bungku Utara	240.679,00	423	0,17
3.	Soyo Jaya	60.551,00	0	0,00
4.	Petasia	64.634,00	0	0,00
5.	Petasia Barat	46.529,00	0	0,00
6.	Petasia Timur	52.361,00	0	0,00
7.	Lembo	67.523,00	0	0,00
8.	Lembo Raya	65.761,00	0	0,00
9.	Mori Atas	104.893,00	1.080	1,02
10.	Mori Utara	150.881,00	15.449	10,23
Morowali Utara		1.001.812,00	19.035	1,90

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian terdiri atas peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara terdapat di seluruh Kecamatan seluas 31.578,38 ha. Sebaran dan luasan kawasan pertanian



tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	
1.	Mamosalato	148.000,00	6.682,96	4,52
2.	Bungku Utara	240.679,00	1.454,69	0,60
3.	Soyo Jaya	60.551,00	1.342	2,22
4.	Petasia	64.634,00	1.890	2,92
5.	Petasia Barat	46.529,00	2.006	4,31
6.	Petasia Timur	52.361,00	12.568,04	24,00
7.	Lembo	67.523,00	846	1,25
8.	Lembo Raya	65.761,00	2.421,69	3,68
9.	Mori Atas	104.893,00	1.444	1,38
10.	Mori Utara	150.881,00	923	0,61
Morowali Utara		1.001.812	31.578,38	3,15

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

- Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura di Kabupaten Morowali Utara terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara kecuali Bungku Utara dengan luasan kurang lebih 78,241.88 ha. Sebaran dan luasan kawasan hortikultura dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9
Luas Kawasan Pertanian Hortikultura
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara.

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (%)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Pertanian Hortikultura	
1.	Mamosalato	148.000,00	42	0,03
2.	Bungku Utara	240.679,00	62	0,03
3.	Soyo Jaya	60.551,00	70	0,12
4.	Petasia	64.634,00	49	0,08
5.	Petasia Barat	46.529,00	155	0,33
6.	Petasia Timur	52.361,00	30	0,06
7.	Lembo	67.523,00	38	0,06
8.	Lembo Raya	65.761,00	16	0,02
9.	Mori Atas	104.893,00	22	0,02
10.	Mori Utara	150.881,00	46	0,03
Morowali Utara		1.001.812	530	0,05

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, data diolah kembali, Tahun 2018

- Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara dengan luas sebesar 86,645.09 Ha. Komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:



- 1) Kakao, terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara dan Kecamatan Lembo;
- 2) Cengkeh, terdapat di Kecamatan Soyojaya, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo Raya dan Kecamatan Petasia Barat;
- 3) Kelapa, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Soyojaya, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia;
- 4) Jambu mete, terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Petasia Timur dan Kecamatan Soyojaya;
- 5) Nilam, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- 6) Sagu, terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
- 7) Karet, terdapat di Kecamatan Lembo, Lembo Raya;
- 8) Sawit, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

Uraian luas kawasan perkebunan beserta sebarannya di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10
Luas Kawasan Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Perkebunan	
1.	Mamosalato	148.000,00	923,8	0,62
2.	Bungku Utara	240.679,00	2.686,10	1,12
3.	Soyo Jaya	60.551,00	5.706,70	9,42
4.	Petasia	64.634,00	1.041	1,61
5.	Petasia Barat	46.529,00	1.682,50	3,62
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.884	5,51
7.	Lembo	67.523,00	2.526	3,74
8.	Lembo Raya	65.761,00	3.837,50	5,84
9.	Mori Atas	104.893,00	4.932,40	4,70
10.	Mori Utara	150.881,00	2.496,50	1,65
Morowali Utara		1.001.812	28.717,50	2,87

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2021 (Diolah kembali)



- Kawasan Peruntukan Peternakan

Kegiatan peternakan tidak mengalokasikan pada suatu kawasan tertentu, namun dapat saja dilakukan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan dan atau pada sekitar kawasan hortikultura. Adapun komoditas peternakan yang cukup dominan di Kabupaten Morowali Utara adalah seperti:

1. Ternak besar berupa:
 - a) Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;
 - b) Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Soyo Jaya;
2. Ternak sedang berupa:
 - a) Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Lembo, Kecamatan Mori Atas;
 - b) Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
3. Unggas berupa:
 - a) Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
 - b) Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

Persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Persentase kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara.

- Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukkan perikanan terdiri atas:

1) Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara tersebar pada perairan laut Kabupaten Morowali Utara.

2) Perikanan Budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

- a. Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- b. Kawasan budidaya Tambak, Kolam, Empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur;
- c. Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya; Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara dan Kecamatan Bungku Utara.



- Kawasan Peruntukan Minapolitan

Rencana Kawasan Minapolitan di Kabupaten Morowali Utara adalah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur dan Kawasan Minapolitan Bahoue Kecamatan Petasia.

- Kawasan Pengelolaan Ikan dan Rumput Laut

Pengolahan hasil produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara direncanakan pada Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumberdaya bahan galian yang sangat variatif dan potensial untuk dikembangkan, potensi sumberdaya yang ada dapat dikelompokkan kedalam jenis bahan galian strategis (golongan A) yaitu; Minyak bumi dan gas, batubara dan nikel, bahan galian vital (bahan galian golongan B) yaitu; Chromit serta bahan galian non strategis dan vital yaitu; lempung, marmer, onyx dan kaolin, dengan sebaran wilayah pertambangan sebagai berikut:

1. Kawasan Pertambangan Strategis:

- a) Minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara dengan luas area kurang lebih 47.500 Ha, Kecamatan Mamosalato, dan Perairan Teluk Tolo;
- b) Batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dengan luas area kurang lebih 300 Ha dan Kecamatan Bungku Utara;
- c) Nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Mamosalato, Kecamatan Petasia dengan luas area sebesar 15.355 Ha dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas area 4.494 Ha;

2. Kawasan Pertambangan Vital (Golongan B):

- a) Chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Soyo Jaya.
- b) Emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
- c) Batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara.

3. Kawasan Pertambangan non Strategis dan Vital (Golongan C):

- a) Lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas
- b) Marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia dan Kecamatan Mori Atas
- c) Onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Lembo;



d) Kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas

Rencana pengelolaan wilayah peruntukan kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilakukan sebagai berikut :

- Pemanfaatan kawasan wilayah pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya bagi upaya mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Pemanfaatan kawasan pertambangan yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat serta harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat;
- Pemanfaatan kawasan wilayah pertambangan harus dilakukan secara ketat, terbatas dan selektif dengan mentatati aturan perundang-undangan yang berlaku/diberlakukan dan harus mendahulukan kepentingan ekologis dan perlindungan terhadap ruang kelola rakyat.
- Melakukan pengawasan teknis dan lingkungan yang ketat, komprehensif dan berkelanjutan pada semua tahapan pemanfaatan kawasan pertambangan agar terciptanya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertambangan yang berkelanjutan
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan semua tahapan usaha pertambangan.

Sebaran bahan tambang yang dominan dan sebaran wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.11
Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	Marmer 1	Nikel 1	Nikel 3 C	Nikel 3b
Mamosalato	-	-	-	-	13,866.78
Bungku Utara	-	-	-	-	15,442.30
Soyo Jaya	-	-	-	-	-
Petasia	-	8,359.12	1,128.16	5,156.15	-
Petasia Barat	-	2,172.71	72.54	749.08	-
Petasia Timur	-	208.42	11,506.49	-	-
Lembo	-	-	10,986.74	-	-
Lembo Raya	-	-	5,523.97	-	-
Mori Atas	4,369.04	30.40	-	-	-
Mori Utara	5.04	2.06	-	-	-
Jumlah	4,374.08	10,772.71	29,217.89	5,905.23	29,309.09

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.



● **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Morowali Utara lebih diarahkan berlokasi mendekati sumber bahan baku (*raw material oriented*) yang terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan industri besar.
 - a) Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertanian terdapat di desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
 - b) Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur
 - c) Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.
2. Kawasan peruntukan industri rumah tangga yang tersebar di seluruh Kecamatan.

● **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kawasan yang peruntukan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu:
 - a) Situs Rumah Raja Mori, Kecamatan Petasia;
 - b) Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.
 - c) Makam Raja Mori Kecamatan Petasia Barat.
 - d) Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu:
 - a) Taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
 - b) Wisata Sungai/ Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
 - c) Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
 - d) Batu Payung di Kecamatan Petasia;
 - e) Pasir putih, Pantai Siliti, Air Terjun Warampadoa Kecamatan Bungku Utara;
3. Kawasan peruntukan pariwisata cagar alam yaitu:
 - a) Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan
 - b) Taman Buru Landasa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.
4. Kawasan yang peruntukan pariwisata buatan (pertanian/ agriwisata) yaitu:
 - a) Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.



5. Kawasan yang peruntukan pariwisata buatan (pertanian/ agriwisata) yaitu :

- a) Makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; dan
- b) Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

• **Kawasan Peruntukan Permukiman**

Luas peruntukan permukiman di Kabupaten Morowali Utara kurang lebih 5,116.98 Ha yang terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 1,981.06 Ha.
2. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan dengan luas kurang lebih 3,135.92 Ha.

Uraian sebaran lokasi permukiman dan besarnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 sebagai berikut.

Tabel 2.12
Luas Kawasan Permukiman
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Permukiman	
1.	Mamosalato	148.000,00	1166,17	0,79
2.	Bungku Utara	240.679,00	250,22	0,00
3.	Soyo Jaya	60.551,00	221,85	0,37
4.	Petasia	64.634,00	590,83	0,91
5.	Petasia Barat	46.529,00	349,3	0,75
6.	Petasia Timur	52.361,00	345,03	0,66
7.	Lembo	67.523,00	688,86	1,02
8.	Lembo Raya	65.761,00	476,78	0,73
9.	Mori Atas	104.893,00	701,37	0,67
10.	Mori Utara	150.881,00	326,57	0,22
Morowali Utara		1.001.812	5.116,98	0,51

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, data diolah kembali, Tahun 2021

Untuk kawasan permukiman di pinggir pantai di sekitar Kolonodale direncanakan untuk direlokasi karena pada kawasan pinggir pantai sepanjang garis pantai Kolonodale-Koya akan direklamasi yang akan digunakan sebagai penambahan jaringan jalan dan kawasan terminal peti kemas. Namun, dalam pelaksanaan reklamasinya harus mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan dan penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

• **Kawasan Peruntukan Lainnya**

1. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan secara



umum terdiri dari:

- a. Kompi Senapan B, Yonif 714/Sintuwu Maroso di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur.
 - b. Polres Morowali Utara yang berada di Desa Korowou Kecamatan Lembo;
 - c. Polsek yang berada di Kecamatan-Kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;
 - d. Kompi Brimob yang berada di Desa Lemboroma Kecamatan Lembo.
2. Kawasan peruntukan transmigrasi direncanakan terletak di wilayah; kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Mamosalato, dan Kecamatan Petasia.

2. Kriteria Penetapan Kawasan Budidaya

Penetapan kawasan budidaya di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

• Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Secara Umum definisi kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan metoda tebang pilih dan tanam. Kawasan ini memiliki skor 125-175 di luar hutan suaka alam, hutan wisata dan hutan konversi lainnya.

• Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan dengan kriteria memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat).

• Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi ditetapkan dengan kriteria: memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 (seratus dua puluh empat); dan/atau merupakan kawasan yang apabila dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

• Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dan memiliki:



- a. Ketinggian < 1.000 m
- b. Kelerengan < 3persen
- c. Kedalaman efektif > 50 cm
- d. Drainase terhambat
- e. Tingkat bahaya erosi sangat rendah sampai rendah
- **Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering**
Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk padi gogo, tanaman palawija dan hortikultura. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang memiliki :
 - a. Ketinggian < 1.000 m
 - b. Kelerengan < 8persen
 - c. Kedalaman efektif > 60 cm
 - d. Drainase terhambat sampai agak terhambat
 - e. Tingkat bahaya erosi sangat rendah sampai rendah
 - f. Letak tidak terlalu jauh dari permukiman.
- **Kawasan Perkebunan**
Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman Tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang sesuai untuk tanaman Tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:
 - a. Ketinggian < 1.000 m
 - b. Kelerengan 8-15persen
 - c. Kedalaman efektif > 75 cm
 - d. Drainase baik sampai agak terhambat
 - e. Tingkat bahaya erosi sangat rendah sampai sedang
- **Kawasan Peternakan**
Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak. Kriteria bagi penetapan kawasan ini adalah kawasan yang sesuai untuk peternakan/ penggembalaan hewan besar yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
 - a. Ketinggian < 1.000 m
 - b. Kelerengan < 8persen
 - c. Kedalaman efektif > 30 cm
 - d. Drainase baik sampai agak cepat
 - e. Letak tidak terlalu jauh dari permukiman

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan yang diperuntukkan bagi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengelolaan ikan.

- **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang



menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- **Pengelolaan perikanan** adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- **Kawasan Budidaya di Perairan Laut**

1. Zona Penyangga

Zona penyangga adalah area peralihan/transisi antara zona lindung laut dengan zona pemanfaatan umum. Zona penyangga ini ditujukan untuk memberikan fungsi perlindungan sekunder terhadap zona lindung laut. Dalam zona penyangga ini masyarakat setempat dapat melakukan pengaturan kegiatan penangkapan ikan, baik berupa penggunaan alat tangkap, cara penangkapan dan sebagainya untuk menjamin kelangsungan fungsi ekologis di zona lindung yang sangat berpengaruh penting terhadap keberadaan sumber daya ikan di perairan laut.

2. Zona Pemanfaatan

a) Kawasan Budi Daya Ikan Laut (kakap, kerapu)

Parameter yang diukur untuk menilai kesesuaian lokasi untuk pengembangan kegiatan budi daya jenis ini adalah faktor keamanan, arus pasang surut dan arus pantai, salinitas, temperatur air, kadar oksigen, kandungan logam berat, arah angin, bathymetri, substrat, kecerahan, transportasi dan pasar.

b) Kawasan Budi Daya Moluska (kerang mutiara, kerang darah, kerang hijau, tiram)

Parameter yang diukur untuk menilai kesesuaian kawasan untuk pengembangan kegiatan budi daya moluska adalah ; terlindung dari pengaruh angin musim, kondisi gelombang yang relatif tenang, arus, topografi pantai, substrat dasar perairan, salinitas, suhu, kecerahan, tingkat kesuburan, sumber benih



dan induk, pencemaran dan keamanan, pasar dan transportasi.

c) Kawasan Budi Daya Jenis-jenis Teripang

Paramater yang diukur untuk menilai kesesuaian lokasi untuk kegiatan budi daya teripang adalah kemiringan dasar perairan, substrat yang mendominasi, adanya jenis-jenis biota atau rumput laut tertentu yang menunjang kehidupan teripang, salinitas, temperatur, kesuburan perairan, keceraan perairan, keamanan, lokasi pengolahan/pengeringan, transportasi dan pasar.

d) Perikanan Tangkap

Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan tangkap pantai di Kabupaten Morowali Utara mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk ini maka kriteria wilayah perikanan tangkap pantai di perairan laut Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

e) Jalur I A (Perairan Pantai 0-3 mil)

- Perahu tanpa motor
- Panjang (perahu) < 10 m
- Warna putih
- Alat tangkap: menetap, Tidak dimodifikasi

f) Jalur I B (3-4 mil)

- Perahu tanpa motor atau dengan motor tempel
- Panjang > 10 m
- Motor tempel/kapal motor < 12 m/5 GT
- Warna merah
- Tidak menetap/modifikasi
- Alat tangkap: Pukat cincin panjang < 150 m
- Alat tangkap: Insang hanyut < 1.000 m

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Definisinya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan baik wilayah sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangannya (eksplorasi). Kriteria kawasan pertambangan ini adalah:

- a) Merupakan lokasi yang berpotensi pertambangan/bahan galian
- b) Di dalam areal Kuasa Pertambangan atau areal Kontrak Karya atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau areal Ijin Pertambangan Daerah, atau areal pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
- c) Di luar kawasan hutan konservasi
- d) Pertambangan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- e) Syarat pengembangan pertambangan berupa kegiatan penyelidikan dan eksplorasi akan mengacu pada peraturan



perundang-undangan di bidang pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan otonomi daerah.

- f) Dalam peta RTRW Kabupaten Morowali Utara, kawasan pertambangan akan digambarkan berupa area Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya/Wilayah Izin Usaha Pertambangan, atau Ijin Pertambangan Daerah atau area pertambangan rakyat atau Wilayah Pertambangan Rakyat. Sedangkan lokasi kegiatan eksplorasi pertambangan definitif mengacu pada rencana jangka panjang 20 Tahunan/rencana jangka menengah 5 Tahunan/ rencana jangka pendek 1 Tahunan pemrakarsa pertambangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

5. Kawasan Peruntukan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan hutan, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan. Kriteria lokasi pengembangan kawasan permukiman adalah:

- a) Tidak berada dalam kawasan lindung
- b) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah
- c) Berada pada daerah yang relatif datar dengan kemiringan lereng < 5 persen
- d) Tidak terletak pada lokasi berisiko banjir dan bencana alam lainnya (patahan/sesar)
- e) Lokasi terkait dengan kawasan permukiman yang telah ada/berkembang
- f) Dihubungkan oleh jaringan transportasi
- g) Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada
- h) Ketersediaan air terjamin

6. Kawasan Peruntukan Industri

Definisinya adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri. Kriterianya kawasan ini adalah:

- a) kawasan memenuhi persyaratan lokasi industri (luas minimal 50 Ha),
- b) tersedia sumber air baku cukup,
- c) diperlukan sistem pengelolaan dan pembuangan limbah,
- d) tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat,
- e) tidak berada dalam kawasan hutan
- f) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.



Tabel 2.13
Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri

Kriteria Pemilihan Lokasi	Faktor Pertimbangan
Jarak ke pusat kota	Maksimal 15-20 Km
Jarak ke permukiman	Maksimal 2 Km
Jaringan jalan yang dilayani	Arteri Primer
Sistem jaringan prasarana yang melayani	Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi
Prasarana angkutan	Tersedianya pelabuhan laut/outlet eksport-import
Topografi/kemiringan lahan	Maksimal 15 derajat
Jarak terhadap sungai	Maksimal 5 Km dan terlayani sungai Tipe C dan D atau kelas III dan IV
Daya dukung lahan	Sigma tanah
Kesuburan tanah	Relatif tidak subur (non irigasi teknis)
Peruntukan tanah	Non konservasi Non pertanian Non permukiman
Ketersediaan lahan	Minimal 25 Ha
Harga lahan	Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga tinggi di daerah tersebut)
Orientasi lokasi	Aksesibilitas tinggi Dekat dengan potensi tenaga kerja
Multiplier effect	Bangkitan lalu lintas 5,5 smp/hari Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 kali perencanaan industri Kebutuhan rumah (1,5 TK = 1 KK) Kebutuhan Fasos dan Fasum

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2016-2036

Alokasi kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten lebih merupakan salah satu cara untuk mengakomodasi kebutuhan ruang untuk kegiatan industri akibat semakin berkembangnya kegiatan ekonomi. Luasan kawasan peruntukan industri akan ditentukan berdasarkan kebutuhan riil dari industri yang akan berkembang. Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Morowali Utara lebih diarahkan untuk mendekati lokasi sumber bahan baku (*raw material oriented*), berupa kawasan industri pertanian, kawasan industri perikanan dan kawasan industri pertambangan.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Definisinya adalah kawasan yang diperuntukan bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Kriteria kawasan ini adalah :

- Merupakan lokasi yang berpotensi pariwisata (keindahan alam dan panorama),
- Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan,
- Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah yang tinggi.



- d) Merupakan lokasi sentra produksi pertanian yang menawarkan areal serta produksi pertanian sebagai daya tarik wisata (wisata agro).

Lokasi berpotensi pariwisata dapat berada dalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Dalam peta RTRW Kabupaten, lokasi objek pariwisata masih bersifat indikatif, dan pada umumnya dinotasikan dengan simbol tertentu.

3. Kawasan Lindung

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

• Hutan lindung

Hutan lindung di Kabupaten Morowali Utara dengan luas area kurang lebih 190.060 Ha yang tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan yakni, Kecamatan Mamosalato, Bungku Utara, Soyo Jaya, Petasia, Petasia Barat, Lembo, Lembo Raya, Mori Atas dan Mori Utara sedangkan di wilayah administrasi Petasia Timur tidak terdapat Hutan Lindung seperti yang diuraikan pada Gambar 2.2 sebagai berikut.

Gambar 2.2
Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Morowali Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036

b. Kawasan Perlindungan Setempat

• Kawasan sempadan pantai

Kawasan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratterdapat Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato, Petasia, Petasia Timur, dan Soyo Jaya dengan luasan kurang lebih 10,262.26 ha. Luas kawasan sempadan pantai di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 2.14 sebagai berikut.



Tabel 2.14
Luas Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Sempadan Pantai	
1.	Mamosalato	148.000,00	1.168,47	0,79
2.	Bungku Utara	240.679,00	2.018,18	0,00
3.	Soyo Jaya	60.551,00	648,63	1,07
4.	Petasia	64.634,00	5.320,20	8,23
5.	Petasia Barat	46.529,00	-	0,00
6.	Petasia Timur	52.361,00	1.106,79	2,11
7.	Lembo	67.523,00	-	0,00
8.	Lembo Raya	65.761,00	-	0,00
9.	Mori Atas	104.893,00	-	0,00
10.	Mori Utara	150.881,00	-	0,00
Morowali Utara		1.001.812	10.262,27	1,02

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036

• **Kawasan sempadan sungai**

Kawasan sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman meliputi seluruh wilayah Kecamatan yang dilalui sungai besar dan sungai kecil, seperti: Kecamatan Petasia Koro Tiu, Koro Langkei, Koro Laa, Koro Lamoito, Kecamatan Lembo Koro Tambaleko, dan Koro Puawu, Koro Pontangoa, dan Koro La, Kecamatan Mori Atas Sungai Koro Laa, Kecamatan Soyo Jaya Koro Soyo dan Koro Sumara, Kecamatan Bungku Utara Koro Morowali, Koro Ula, Koro Tiworo, dan Koro Tirongan, Kecamatan Mamosalato Kuala Bongka, Koro Sikoy, dan Koro Tanasumpu. Total luasan kawasan sempadan sungai mencapai 10,717.24 ha dengan sebaran wilayah seperti yang diuraikan pada Tabel 2.15 sebagai berikut.

Tabel 2.15
Luas Kawasan Sempadan Sungai Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Sempadan Sungai	
1.	Mamosalato	148.000,00	1.074,55	0,73
2.	Bungku Utara	240.679,00	1.749,64	0,73
3.	Soyo Jaya	60.551,00	303,78	0,50
4.	Petasia	64.634,00	434,24	0,67
5.	Petasia Barat	46.529,00	674,47	1,45
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.118,45	4,05
7.	Lembo	67.523,00	1.285,76	1,90



No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Sempadan Sungai	
8.	Lembo Raya	65.761,00	1.179,29	1,79
9.	Mori Atas	104.893,00	1.320,65	1,26
10.	Mori Utara	150.881,00	576,40	0,38
Morowali Utara		1.001.812	10.262,27	1,02

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

• **Kawasan Sekitar Danau**

Kawasan sekitar danau daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang terdapat di Kabupaten Morowali Utara adalah Kecamatan Petasia Timur yaitu Danau Tiu, dan Danau Sampalowo, Kecamatan Bungku Utara yaitu Danau Rano Bae dan Danau Rano Kodi kawasan sekitar Danau Rano di Kecamatan Sojo Jaya. Luas seluruh kawasan sekitar danau mencapai luasan kurang lebih 403.69 ha terdapat pada Tabel 2.16 sebagai berikut.

Tabel 2.16
Luas Kawasan Sekitar Danau Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Sekitar Danau	
1.	Mamosalato	148.000,00	0	0,00
2.	Bungku Utara	240.679,00	117,76	0,05
3.	Soyo Jaya	60.551,00	0	0,00
4.	Petasia	64.634,00	0	0,00
5.	Petasia Barat	46.529,00	285,93	0,61
6.	Petasia Timur	52.361,00	0	0,00
7.	Lembo	67.523,00	0	0,00
8.	Lembo Raya	65.761,00	0	0,00
9.	Mori Atas	104.893,00	0	0,00
10.	Mori Utara	150.881,00	0	0,00
Morowali Utara		1.001.812	403,69	0,04

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

• **Kawasan sekitar mata air**

Kawasan sekitar mata air sekurang-kurangnya dengan jarijari 200 meter di sekitar mata air yang terdapat di Kecamatan Petasia yaitu Danau Tiu, dan Danau Sampalowo dan Kecamatan Bungku Utara Danau Rano Bae dan Danau Rano Kodi;



c. Kawasan sekitar lindung spiritual

Kawasan sekitar lindung spiritual yang terdapat di Desa Tokala Atas Kecamatan Bungku Utara.

▪ **Kawasan kearifan lokal**

Kawasan sekitar kearifan lokal yang terdapat di Gunung Tokala Kecamatan Bungku Utara.

▪ **Kawasan Ruang Terbuka Hijau**

Kawasan sekitar Ruang Terbuka Hijau yang terdapat di seluruh Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Morowali Utara dengan luasan sekitar 30 persen luas wilayah yaitu 252.000 Ha.

Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan di Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Taman Rukun Tetangga (RT). Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu RT, khususnya untuk melayani kegiatan bermain anak usia balita, kegiatan sosial para ibu rumah tangga serta para manula di lingkungan RT tersebut. Luas Taman ini adalah 1 m² per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m². Lokasi Taman berada pada radius kurang dari 300 meter dari rumah- rumah penduduk yang dilayaninya.
2. Taman Rukun Warga (RW). Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas Taman ini adalah 0,5 m² per penduduk RW, dengan luas minimal 1.250 m². Lokasi Taman berada pada radius kurang dari 1000 meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.
3. Taman Kelurahan. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas Taman ini adalah 0,33 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal 10.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.
4. Taman Kecamatan. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan. Luas Taman ini adalah 0,2 m² per penduduk Kecamatan, dengan luas minimal 24.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
5. Taman Kota. Taman Kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani 480.000 penduduk dengan standar luas 0,3 m² per penduduk kota, dengan luas minimal 144.000 m². Taman ini dapat berupa stadion olahraga dengan dilengkapi dengan 4 unit atau lebih lapangan olah raga lainnya seperti lapangan basket, volly, atletik atau soft ball dan lain sebagainya. Semua fasilitas olah raga tersebut terbuka untuk umum.



d. Kawasan Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

• **Cagar alam**

Cagar Alam di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Mori Atas, Mori Utara dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas kurang lebih 183,270.60 Ha.

Tabel 2.17
Luas Kawasan Cagar Alam Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Cagar Alam	
1.	Mamosalato	148.000,00	-	0,00
2.	Bungku Utara	240.679,00	155.299,98	64,53
3.	Soyo Jaya	60.551,00	24.497,23	40,46
4.	Petasia	64.634,00	-	0,00
5.	Petasia Barat	46.529,00	-	0,00
6.	Petasia Timur	52.361,00	-	0,00
7.	Lembo	67.523,00	-	0,00
8.	Lembo Raya	65.761,00	-	0,00
9.	Mori Atas	104.893,00	865,94	0,83
10.	Mori Utara	150.881,00	2.607,46	1,73
Morowali Utara		1.001.812	183.270,61	18,29

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

• **Pantai Berhutan Bakau**

Kawasan hutan bakau di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Soyo Jaya 178.96 Ha dan Petasia Timur 105.46 Ha dengan total luas kurang lebih 284.42 Ha.

• **Kawasan Cagar budaya**

Kawasan Cagar budaya di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas; Makam Raja Mori di Kecamatan Petasia.

e. Kawasan lindung lain

• **Taman Buru**

Landasa Tomata dengan luas $\pm$ 5.000 Ha terdapat di Kecamatan Mori Atas.

• **Terumbu Karang**

Kecamatan Petasia, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

4. Kriteria Penetapan Kawasan Lindung

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.



1. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara, air tanah dan air permukaan. Adapun kriteria hutan lindung adalah:

- a. Kawasan dengan faktor-faktor kelerengan lapangan, jenis tanah dan curah hujan melebihi skor 175
- b. Kawasan yang mempunyai kelerengan lapangan 40 persen atau lebih, dan pada daerah yang keadaan tanahnya peka terhadap erosi, dengan kelerengan lapangan lebih dari 25 persen
- c. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih di atas permukaan laut.

2. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan ini meliputi dua jenis penggunaan yakni kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, serta kawasan sempadan danau dan mata air. maksud perlindungan kawasan ini untuk melindungi fungsi pantai, sungai, danau dan mata air dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kondisi pantai, sungai, danau dan mata air.

• Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kawasan kawasan lindung untuk sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

• Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan kanan-kiri sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Kriteria sempadan sungai:

- a. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan.
- b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan.
- c. Sekurang-kurang 10 meter dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih 3 meter



- d. Sekurang-kurang 15 meter dari tepi sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai 20 meter.
- e. Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mencakup kedalaman lebih dari 20 meter.
- f. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

- **Kawasan Sekitar Danau/Waduk**

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Kriteria kawasan sempadan danau / waduk mata adalah kawasan dengan radius antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan ini merupakan kawasan yang memberikan fungsi perlindungan dan pelestarian keaslian ekosistem. Yang termasuk dalam Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya ini antara lain;

- **Kawasan Pantai Berhutan Bakau**

Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan. Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan pasang tertinggi dan terendah Tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

- **Cagar Alam**

Kriteria Cagar Alam adalah:

- a. kawasan yang ditunjuk memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipememiliki keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa, dan tipe ekosistemnya;
- b. memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunnya;
- c. memiliki kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli atau belum diganggu manusia;
- d. memiliki luas dan bentuk tertentu; atau
- e. memiliki ciri khas yang merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi.

- **Suaka Margasatwa**

Kriteria Suaka Margasatwa adalah:

- a. merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;



- b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrant tertentu; atau
- d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan

4. Kawasan Cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas. Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan atau sarana kota, dan atau pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian. RTH terdiri dari ruang terbuka hijau privat, yaitu RTH milik pemerintah, institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas dan ruang terbuka hijau publik, yaitu RTH milik pemerintah atau institusi tertentu, yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat dan terbuka untuk umum. Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah:

- a. RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH Privat (milik perorangan atau institusi).
- b. Proporsi RTH baik privat maupun publik pada wilayah kota, disesuaikan dengan potensi kota tersebut atau mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- c. Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari wilayah kota.
- d. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan lebih dari 30 (tiga puluh) persen dari luas kota, maka proporsi ini harus tetap dipertahankan keberadaannya.

6. Kawasan lindung lain

▪ Terumbu karang

Kawasan lindung terumbu karang adalah kawasan yang mem-berikan fungsi perlindungan kepada ekosistem terumbu karang, sebagai daerah dengan tingkat produktivitas primer yang tinggi yang merupakan tempat pemijahan (*spawning ground*), tempat pengasuhan (*nursery*



ground) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya.

▪ **Taman buru**

Kriteria taman buru adalah

- a. memiliki luas yang cukup dan tidak membahayakan untuk kegiatan berburu; dan
- b. terdapat satwa buru yang dikembangkan yang memungkinkan perburuan secara teratur dan berkesinambungan dengan mengutamakan segi aspek rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa.

Berdasarkan rincian luas kawasan hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 869/MENHUT-II/2014, Kabupaten Morowali Utara memiliki luas hutan yang diperuntukan sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) mencapai 215.042,91 Ha, Hutan Lindung (HL) 1982.43,92 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 75.233,15 ha, Hutan Produksi (HP) 93.534,84 ha dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 20.862,47 Ha.

2.1.7 Kondisi Geologi Lainnya

Wilayah Kabupaten Morowali Utara tersusun atas beberapa jenis batuan antara lain, batuan Mollase, batuan Kapur, batuan Skiss, batuan Basik, Ultra basik dan Sedimen. Dari sisi geomorfologi, wilayah ini tersusun atas beberapa bentuk lahan (*landform*), yaitu bentuk lahan *Aluvial* (A), *Marine* (M), *Volkanik* (V), Tektonik dan Struktural (T). Bentuk lahan aluvial terbentuk dari proses fluvial yang umumnya tersebar di dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 persen, dan banyak dijumpai di sekitar sungai-sungai besar. Bentuk lahan marine tersebar pada wilayah datar agak cekung di sepanjang pantai. Bentuk lahan tektonik dan vulkanik tersebar pada relief yang bergelombang sampai bergunung.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian

Potensi pengembangan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara seluas 32,458.88 Ha, dan masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 19,035 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun secara teknis dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000



m, kelerengan kawasan di bawah 3 persen, dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 50 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada pengembangan padi gogo, palawija dan hortikultura dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 8% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 60 cm. Data luas kawasan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.18 sebagai berikut.

Tabel 2.18

**Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara**

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	
1.	Bungku Utara	150.881	1.454,69	0,96
2.	Lembo	67.523	318,66	0,47
3.	Lembo Raya	65.761	2.421,69	3,68
4.	Mamosalato	52.361	6.682,96	12,76
5.	Mori Atas	64.634	701,58	1,09
6.	Mori Utara	48.030	550,40	1,15
7.	Petasia	104.893	887,27	0,85
8.	Petasia Barat	60.551	6.507,78	10,75
9.	Petasia Timur	240.679	12.568,04	5,22
10.	Soyo Jaya	146.499	365,81	0,25
Morowali Utara		1.001.812	32.458,88	3,24

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, diolah Tahun 2021

B. Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara dengan luas sebesar 86,645.09 Ha. Komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:

1. Kakao, terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia.
2. Cengkeh, terdapat di Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara.
3. Kelapa, terdapat di Kecamatan Bungku Utara
4. Jambu mete, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
5. Vanili, terdapat di Kecamatan Soyo Jaya;
6. Sagu, terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
7. Karet, terdapat di Kecamatan Lembo;
8. Sawit, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.



Uraian luas kawasan perkebunan beserta sebarannya di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 2.19 sebagai berikut.

Tabel 2.19
Luas Kawasan Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (Persen)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Perkebunan	
1.	Mamosalato	148.000,00	923,8	0,62
2.	Bungku Utara	240.679,00	2.686,10	1,12
3.	Soyo Jaya	60.551,00	5.706,70	9,42
4.	Petasia	64.634,00	1.041	1,61
5.	Petasia Barat	46.529,00	1.682,50	3,62
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.884	5,51
7.	Lembo	67.523,00	2.526	3,74
8.	Lembo Raya	65.761,00	3.837,50	5,84
9.	Mori Atas	104.893,00	4.932,40	4,70
10.	Mori Utara	150.881,00	2.496,50	1,65
Morowali Utara		1.001.812	28.717,50	2,87

Sumber: Kabupaten Morowali Utara dalam Angka 2021

C. Peternakan

Kegiatan peternakan tidak mengalokasikan pada suatu kawasan tertentu, namun dapat saja dilakukan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan dan atau pada sekitar kawasan hortikultura. Adapun komoditas peternakan cukup dominan di Kabupaten Morowali Utara adalah:

Ternak besar berupa:

- Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Soyo Jaya;

Ternak sedang berupa:

- Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas;
- Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;

Unggas berupa:

- Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

D. Perikanan

Kawasan peruntukkan perikanan di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:



1) Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara tersebar pada perairan laut Kabupaten Morowali Utara.

2) Perikanan Budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas :

- Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- Kawasan budidaya Tambak, Kolam, Empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur;
- Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya; Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara; dan Kecamatan Bungku Utara.

3) Kawasan Minapolitan

Rencana Kawasan Minapolitan di Kabupaten Morowali Utara adalah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur dan Kawasan Minapolitan Bahoue Kecamatan Petasia.

4) Kawasan Pengolahan Ikan dan rumput laut

Pengolahan hasil produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara direncanakan pada Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

E. Pertambangan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumber daya bahan galian yang sangat variatif dan potensial untuk dikembangkan, potensi sumberdaya yang ada dapat dikelompokkan kedalam jenis bahan galian strategis (golongan A) yaitu; minyak bumi dan gas, batubara dan nikel, bahan galian vital (bahan galian golongan B) yaitu; Chromit serta bahan galian non strategis dan vital yaitu; lempung, marmer, onyx dan kaolin, dengan sebaran wilayah pertambangan sebagai berikut:

1). Kawasan Pertambangan Strategis:

- a. Minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara dengan luas area kurang lebih 47.500 Ha, Kecamatan Mamosalato, dan Perairan Teluk Tolo;
- b. Batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dengan luas area kurang lebih 300 Ha dan Kecamatan Bungku Utara;
- c. Nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Mamosalato, Kecamatan Petasia dengan luas area sebesar 15.355 Ha dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas area 4.494 Ha;

2). Kawasan Pertambangan Vital (Golongan B):

- a. Chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Soyo Jaya.



- b. Emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
 - c. Batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara.
- 3). Kawasan Pertambangan non Strategis dan Vital (Golongan C):
- a. Lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas;
 - b. Marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia dan Kecamatan Mori Atas;
 - c. Onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Lembo;
 - d. Kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas

Tabel 2.20
Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	Marmer 1	Nikel 1	Nikel 3 C	Nikel 3b
Bungku Utara	-	-	-	-	15,442.30
Lembo	-	-	10,986.74	-	-
Lembo Raya	-	-	5,523.97	-	-
Mamosalato	-	-	-	-	13,866.78
Mori Atas	4,369.04	30.40	-	-	-
Mori Utara	5.04	2.06	-	-	-
Petasia	-	8,359.12	1,128.16	5,156.15	-
Petasia Barat	-	2,172.71	72.54	749.08	-
Petasia Timur	-	208.42	11,506.49	-	-
Soyo Jaya	-	-	-	-	-
Jumlah	4,374.08	10,772.71	29,217.89	5,905.23	29,309.09

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

F. Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Morowali Utara lebih diarahkan berlokasi mendekati sumber bahan baku (*raw material oriented*) yang terdiri atas:

- 1) Kawasan peruntukan industri besar.
 - a. Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertanian terdapat di desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
 - b. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur.



- c. Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.
- 2) Kawasan peruntukan industri rumah tangga yang tersebar di seluruh Kecamatan.

G. Pariwisata

Kawasan yang peruntukan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

- 1). Kawasan peruntukan pariwisata budaya yaitu:
 - a. Situs Rumah Raja Mori, Kecamatan Petasia Barat;
 - b. Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara;
 - c. Makam Raja Mori Kecamatan Petasia;
 - d. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
- 2). Kawasan peruntukan pariwisata alam yaitu:
 - a. Taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
 - b. Wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
 - c. Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
 - d. Batu Payung di Kecamatan Petasia; dan
 - e. Pasir putih Pantai Siliti, Air Terjun Warampadoa Kecamatan Bungku Utara;
- 3). Kawasan peruntukan pariwisata cagar alam yaitu:
 - a. Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan
 - b. Taman Buru Landasa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- 4). Kawasan yang peruntukan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata) yaitu:
 - a. Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.
- 5). Kawasan yang peruntukan pariwisata buatan (pertanian/agriwisata) yaitu:
 - a. Makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; dan
 - b. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

2.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana antara lain:

- 1). Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
- 2). Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kriteria Kawasan rawan gelombang pasang/Tsunami adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang



dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.

3). Kawasan Rawan Banjir

Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.

4). Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami.

Gambar 2.3
Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

Khusus untuk penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), di daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu di daerah eks tambang yang tidak direklamasi, sehingga menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor dan banjir (khususnya pada musim penghujan) daerah rawan bencana tersebut dapat di masukkan ke dalam daerah lahan kritis, maupun ditetapkan menjadi daerah rawan bencana.

2.1.10 Demografi

a. Laju Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2020 sebanyak 120.789 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk periode Tahun 2019-2020 sebesar 1,50



persen. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010, Tahun 2019, dan Tahun 2020 tersaji pada Tabel 2.21 sebagai berikut.

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2010, 2018, 2019, dan 2020

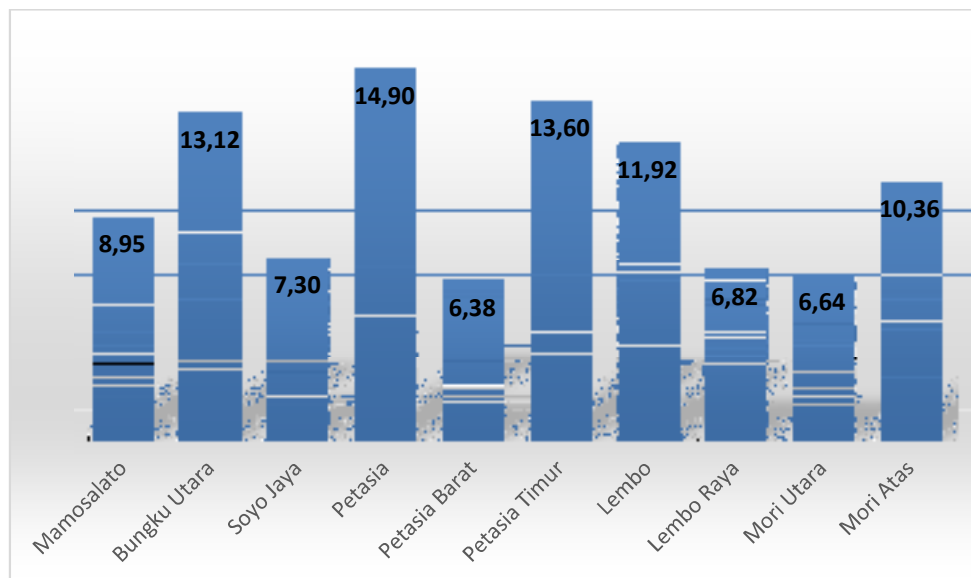
Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	2010	2018	2019	2020	2010-2020
Mamosalato	10,269	12,212	12,447	10,809	0,51
Bungku Utara	14,699	16,568	16,776	15,853	0,76
Soyo Jaya	7,884	10,385	10,720	8,821	1,13
Petasia	33,705	19,228	19,876	17,997	6,08
Petasia Barat	...	8,461	8,652	7,711	...
Petasia Timur	...	15,855	16,319	16,428	...
Lembo	20,300	15,152	15,435	14,396	3,38
Lembo Raya	...	8,237	8,315	8,241	...
Mori Utara	6,819	7,569	7,648	8,023	1,64
Mori Atas	10,418	11,957	12,135	12,510	1.85
Morowali Utara	104,094	125,624	128,323	120,789	1,50

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Petasia pada Tahun 2020 berjumlah 17,997 jiwa, Kecamatan Petasia Timur sebesar 16,428 jiwa, Kecamatan Bungku Utara sebanyak 15,853 jiwa dan Kecamatan Lembo sebanyak 14,396 jiwa , serta Kecamatan Mori Atas sebanyak 12,510 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Mori Utara mencapai 4,9 % dan terdapat laju pertumbuhan yang minus paling rendah yaitu Kecamatan Mamosalato mencapai -13,2 %



Gambar 2.4
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu di Mori Utara sebanyak 8,024 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Petasia Timur, Yaitu 32 orang per Km² dengan luas wilayah hanya 509,77 km² sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Morowali Utara Sebagian besar sudah diatas 100. Data mengenai persentase jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara menurut Kecamatan terlihat pada Gambar 2.4.

Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah penduduk Sulawesi Tengah hingga Tahun 2020 sebesar 2.985,7 juta jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 berada urutan kesepuluh penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Penduduk terbanyak yakni Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk yang terendah yakni Kabupaten Banggai Laut. Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Tabel 2.22 sebagai berikut.



Tabel 2.22
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara
Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah,
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bangkep	116,01	116,81	117,63	118,40	120,14
Banggai	360,02	365,62	371,32	376,81	362,27
Morowali	115,20	117,33	119,29	121,30	161,73
Poso	240,81	245,99	251,18	256,39	244,88
Donggala	296,38	299,17	301,59	304,11	300,44
Toli-Toli	228,50	231,00	233,40	235,80	225,16
Buol	152,30	155,59	158,79	162,18	145,25
Parigi Moutong	465,88	474,34	482,79	490,92	440,02
Tojo Una-una	149,21	150,82	152,47	153,99	163,83
Sigi	232,17	234,59	237,01	239,42	257,59
Banggai Laut	70,89	72,30	73,69	75,00	257,59
Morowali Utara	120,32	122,99	125,62	128,32	120,79
Palu	374,02	379,78	385,61	391,38	373,22
Sulawesi Tengah	2.921	2.966	3.010	3.054	2.985

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

b. Kepadatan Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduk, Kabupaten Morowali Utara tingkat kepadatan penduduknya pada Tahun 2020 sebesar 12,07 per km². Untuk wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yakni kecamatan Petasia Timur, yakni sebesar 32,23 jiwa per km². Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni kecamatan Bungku Utara sebesar 6,59 per km². Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini.



Tabel 2.23
Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Rata-rata Kepadatan
	(Km ²)	(Jiwa)	Per km ²
Mori Atas	657,61	10,809	8.29
Lembo	1.508,81	15,853	21.32
Lembo Raya	675,23	8,821	12.53
Petasia Timur	1048,93	17,997	32.23
Petasia	646,34	7,711	27.84
Petasia Barat	605,51	16,428	16.05
Mori Utara	523,61	14,396	7.65
Soyo Jaya	465,29	8,241	14.57
Bungku Utara	2406,79	8,023	6,59
Mamosalato	1480	12,510	7.38
Morowali Utara	10018,12	120,789	12.07

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, disebut "*sex rasio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenagakerjaan adalah TPAK sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Total jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2020 sebanyak 62.965 jiwa atau sebesar 52,12 persen, sedangkan perempuan sebanyak 57.824 jiwa atau sebesar 47,88 persen. Dengan komposisi penduduk tersebut, sex ratio Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebesar 108,98. Sex ratio penduduk menurut jenis kelamin penduduk Kabupaten Morowali Utara sebagian besar sudah di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Morowali Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.24 sebagai berikut.

Tabel 2.24
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Sex
	Laki-laki	Perempuan	
Mori Atas	6515	5995	108.7
Lembo	7504	6892	108.9
Lembo Raya	4272	3969	107.6



Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Sex
	Laki-laki	Perempuan	
Petasia Timur	8750	7678	114.0
Petasia	9266	8731	106.1
Petasia Barat	4101	3610	113.6
Mori Utara	4175	3848	108.5
Soyo Jaya	4674	4147	112.7
Bungku Utara	8157	7696	106.0
Mamosalato	5551	5258	105.6
Morowali Utara	62965	57824	108.9

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

d. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk dilihat dari sapek umur, diketahui bahwa 0-14 Tahun sebanyak 34.145 jiwa, usia > 64 Tahun sebanyak 6.339 jiwa. Total penduduk usia tidak produktif sebanyak 40.484 Jiwa atau sebesar 33,52 persen. Selanjutnya penduduk usia 15-64 Tahun sebanyak 80.305 jiwa atau sebesar 66,48 persen. Untuk *dependency ratio* penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 sebesar 50,41. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 50 orang penduduk yang belum/tidak produktif yang disajikan pada Tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25
Penduduk Menurut Umur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020

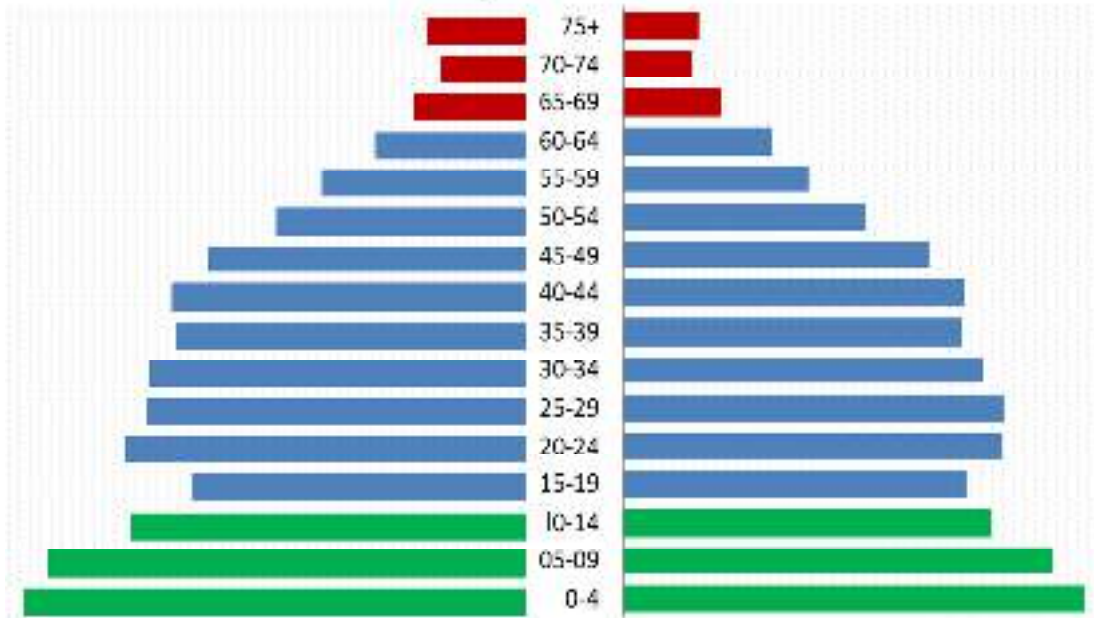
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	5935	5621	11556
05-09	5812	5708	11520
10-14	5789	5280	11069
15-19	5318	4852	10170
20-24	5206	4683	9889
25-29	5202	4816	10018
30-34	5261	4916	10177
35-39	4820	4264	9084
40-44	4467	4014	8481
45-49	3847	3439	7286
50-54	3325	2871	6196
55-59	2707	2435	5142
60-64	2071	1791	3862
65-69	1424	1355	2779
70-74	887	790	1677
75+	894	989	1883
Morowali Utara	62965	57821	120786

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

Selanjutnya komposisi penduduk Kabupaten Morowali Utara ditampilkan pada piramida kependudukan pada Gambar 2.5 berikut ini.



Gambar 2.5
Piramida Penduduk Kabupaten MÓrowali Utara Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelum-nya. Hal ini diakibatkan kebijakan ekspor pertambangan melalui proses industri pengolahan smelter, dimana menunjukan peningkatan ekspor tambang nikel Kabupaten Morowali Utara. Selain itu dengan semakin merebalnya Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja ekonomi daerah. Laju pertumbuhan PDRB Morowali Utara Tahun 2020 menurun cukup tajam mencapai 2,04 persen, sedangkan Tahun 2019 sebesar 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori industri pengolahan sebesar 45,19 persen, jasa komunikasi dan informasi sebesar 8,96 persen, pertambangan dan penggalian 7,35 persen. Penurunan pertambangan dan penggalian terutama dari penggalian nikel yang cukup besar diakibatkan berkurangnya permintaan ekspor luar negeri terhadap komoditas tambang nikel. Data laju pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.26 sebagai berikut.

Tabel 2.26
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.53	4.34	4.05	7.01	(1.84)



LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
B. Pertambangan dan Penggalan	20.12	43.73	24.69	18.61	7.35
C.Industri Pengolahan	16.12	27.49	5.92	3.55	45.19
D.Pengadaan Listrik dan Gas	5.56	6.67	7.96	9.04	6.87
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.98	11.29	12.55	2.32	(6.93)
F.Konstruksi	0.02	(20.87)	(92.01)	979.60	(3.64)
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.08	5.27	4.98	2.11	(6.40)
H.Transportasi dan Pergudangan	10.71	6.49	7.75	6.73	(33.70)
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.63	6.88	7.86	5.66	(16.15)
J.Informasi dan Komunikasi	7.50	10.59	9.92	6.81	8.96
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	22.60	10.33	8.11	6.67	6.52
L.Real Estat	5.06	2.15	3.03	4.12	(2.54)
M,N.Jasa Perusahaan	9.47	9.55	10.82	6.51	(1.99)
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.57	6.70	7.90	8.12	(0.41)
P.Jasa Pendidikan	6.78	6.91	4.74	4.88	(5.19)
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.34	6.38	5.30	7.11	5.74
R,S,T,U.Jasa lainnya	9.44	9.56	10.79	3.12	(5.90)
Produk Domestik Regional Bruto	5.76	7.95	6.49	10.91	2.04

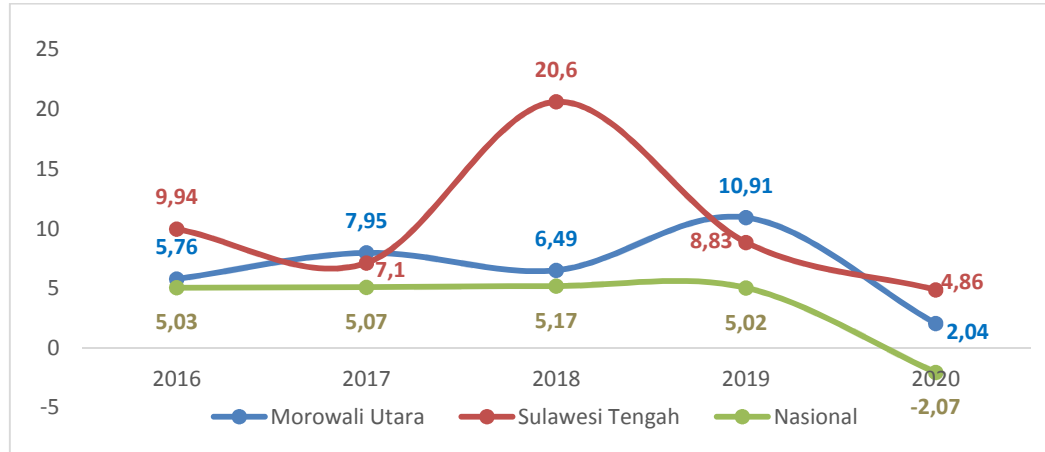
Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Peningkatan nilai tambah (*value added*) secara sektoral tersebut dari agregasi pertumbuhan subsektor-subsektor dalam sektor tersebut. Perke-embangan masing-masing subsektor juga berasal dari komoditas unggulan subsektor tersebut. Misalnya, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi perikanan, padi dan hortikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya (*multiplier effect*). Produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.6 sebagai berikut.



Gambar 2.6

Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

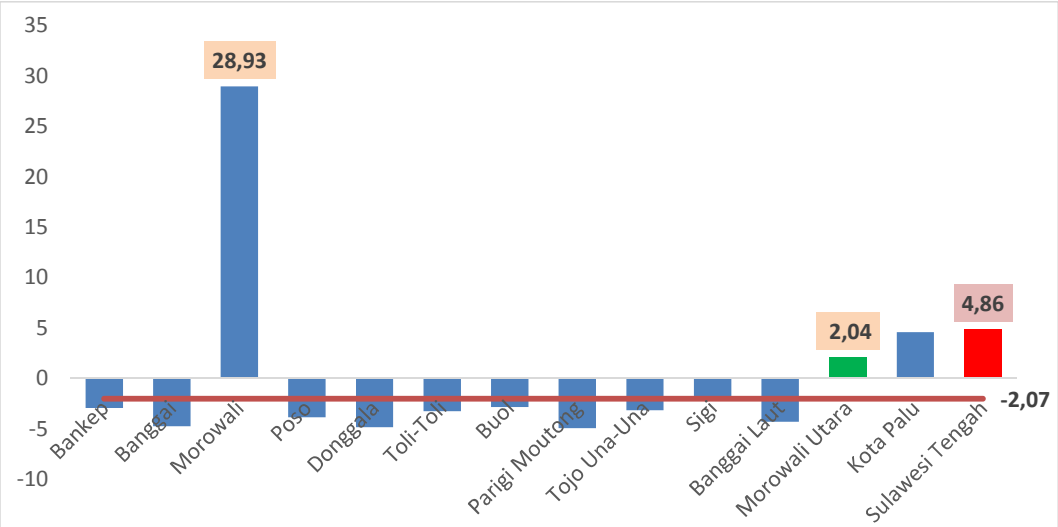


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 di bawah laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2020 sebesar 2,04 persen menurun dari tahun 2019 yang tumbuh 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Morowali Utara lebih rendah dari pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,86 persen, namun jauh berada di atas pertumbuhan nasional sebesar -2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2020 mengalami penurunan, namun masih tumbuh positif dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah, kecuali dengan Kabupaten Morowali yang tumbuh 28.93 %. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara sebesar 10,91 persen berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Morowali sebesar 14,51 persen, dan pertumbuhan ini berada di atas rata-rata provinsi sebesar 7,15 persen. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2019, dipercepat adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi tersebut adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pabrik smelter nikel. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke negara China. Data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.7 sebagai berikut.



Gambar 2.7
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2020 (Diolah Kembali)

2.2.1.2 PDRB per Kapita

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari kinerja ekonomi makro daerah ini. Dimana, laju perkembangan pemba-ngunan Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah (*value added*) yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/regional dalam kurun waktu satu Tahun. PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Gambaran perekonomian Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar Rp. 8.317.377 juta yang mengalami peningkatan cukup signifikan hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 11.203.762,00 juta. Data PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.27 sebagai berikut.

Tabel 2.27
Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,926,632	3,140,097	3,294,253	3,589,213	3,514,655
B. Pertambangan dan Penggalian	1,628,270	2,426,973	3,349,266	4,284,692	3,667,845
C.Industri Pengolahan	97,574	137,969	152,035	166,174	280,834
D.Pengadaan Listrik dan Gas	853	967	1,108	1,241	1,262
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,306	4,938	5,719	6,161	6,694



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

F.Konstruksi	2,260,986	1,869,649	1,576,967	1,798,184	1,824,664
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	571,958	641,277	721,382	786,448	770,822
H.Transportasi dan Pergudangan	28,352	31,259	34,947	39,140	27,021
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,103	21,812	23,907	26,776	24,117
J.Informasi dan Komunikasi	162,332	182,041	202,627	226,942	244,176
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	34,716	40,155	45,777	51,271	54,411
L.Real Estat	150,249	160,163	172,438	193,131	186,307
M,N.Jasa Perusahaan	1,231	1,410	1,630	1,826	1,795
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184,604	205,588	231,248	258,998	270,077
P.Jasa Pendidikan	124,492	137,357	151,068	163,491	155,291
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,863	75,640	81,915	91,744	101,754
R,S,T,U.Jasa lainnya	51,857	61,237	73,038	81,802	72,038
Produk Domestik Regional Bruto	8,317,377	9,138,534	10,119,324	11,767,234	11,203,762

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Kabupaten Morowali Utara memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Kondisi ini berdampak positif bagi perekonomian daerah, bahkan Sektor Pertambangan dan Penggalan menjadi salah satu sektor andalan. Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2016 didominasi 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 2.929.922 Juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp. 2.260.985,90 juta; Sektor Pertambangan dan Pengalihan Rp. 1.658.274 juta, sementara itu kontribusi Sektor Industri masih rendah hanya sebesar Rp. 97.573,70 juta. Pada Tahun 2020, ketiga sektor tersebut masih tetap dominan yakni Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 3.667.847; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 3.514.655, dan Sektor Konstruksi sebesar Rp.1.824.664.

Sementara itu, PDRB ADHK 2010 sebesar sebesar Rp. 6.247.646 juta tahun 2016 meningkat di Tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 6.709.481 juta dan Tahun 2020 mencapai sebesar Rp. 8.072.844. Dalam periode Tahun 2016-2020 terdapat tiga sektor dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2016, PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian sebesar Rp. 2.154.314,10 juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp1.527.787,70 juta; Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 1.476.337,90 juta. Pada Tahun 2017, ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor berkontribusi tinggi dalam PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara. Hingga Tahun 2020, Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar Rp. 3.298.171,00 juta; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 2.452.785,00 juta; dan Sektor Konstruksi sebesar Rp1.001.259,00 juta.

Ketiga sektor tersebut dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, meski beberapa Tahun terakhir terjadi pergeseran



sektor dominan dalam membentuk PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Utara. Seiring dengan mulai dikelolanya JOB Pertamina *Medco-Expan* Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan juga meningkatnya ekspor nikel hasil produksi perusahaan pertambangan yang tersebar di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat. Data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel berikut 2.28 sebagai berikut.

Tabel 2.28
Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,150,929	2,244,266	2,335,110	2,498,729	2,452,785
B. Pertambangan dan Penggalian	1,445,338	2,077,335	2,590,188	3,072,171	3,298,124
C.Industri Pengolahan	76,604	97,665	103,446	107,123	155,532
D.Pengadaan Listrik dan Gas	989	1,055	1,139	1,242	1,327
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,136	3,490	3,928	4,019	3,741
F.Konstruksi	1,522,788	1,204,974	96,247	1,039,080	1,001,259
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393,551	414,272	434,899	444,071	415,666
H.Transportasi dan Pergudangan	21,155	22,527	24,273	25,906	17,175
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,828	14,779	15,940	16,842	14,122
J.Informasi dan Komunikasi	143,198	158,367	174,083	185,941	202,607
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	25,470	28,100	30,378	32,405	34,518
L.Real Estat	109,577	111,936	115,326	120,077	117,024
M,N.Jasa Perusahaan	911	998	1,106	1,178	1,155
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	129,971	138,674	149,631	161,781	161,118
P.Jasa Pendidikan	83,694	89,475	93,718	98,287	93,181
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,678	51,782	54,527	58,405	61,759
R,S,T,U.Jasa lainnya	35,444	38,834	43,026	44,368	41,753
Produk Domestik Regional Bruto	6,205,261	6,698,529	7,133,186	7,911,624	8,072,844

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

2.2.1.3 Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

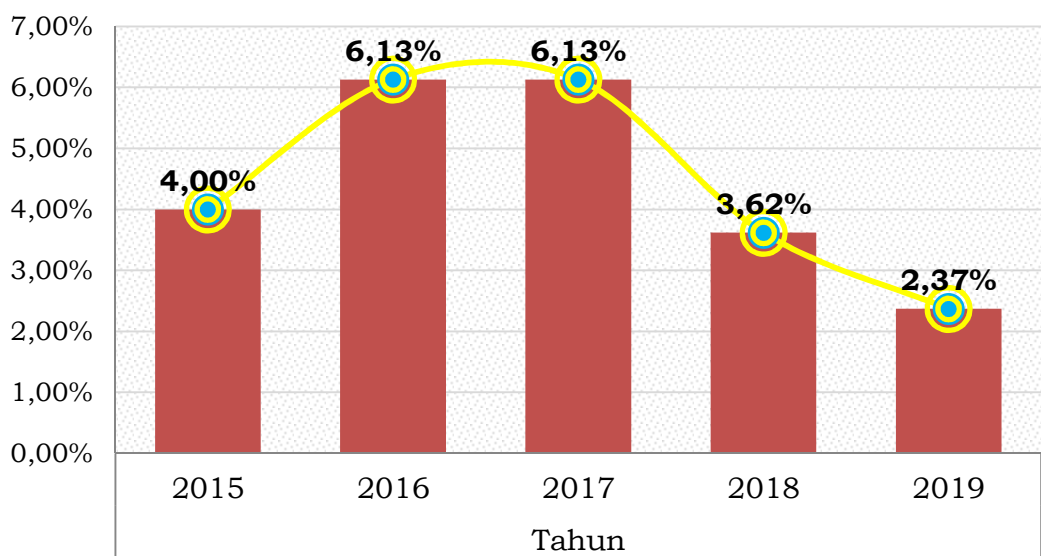
Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang me-mpengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masya-rakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi



menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Data laju inflasi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.8.

Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2015 inflasi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 4,00 persen; meningkat tahun 2017 menjadi 6,13 persen. Namun, periode Tahun 2018- 2019 inflasi menurun menjadi sebesar 2,37 persen.

Gambar 2.8
Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

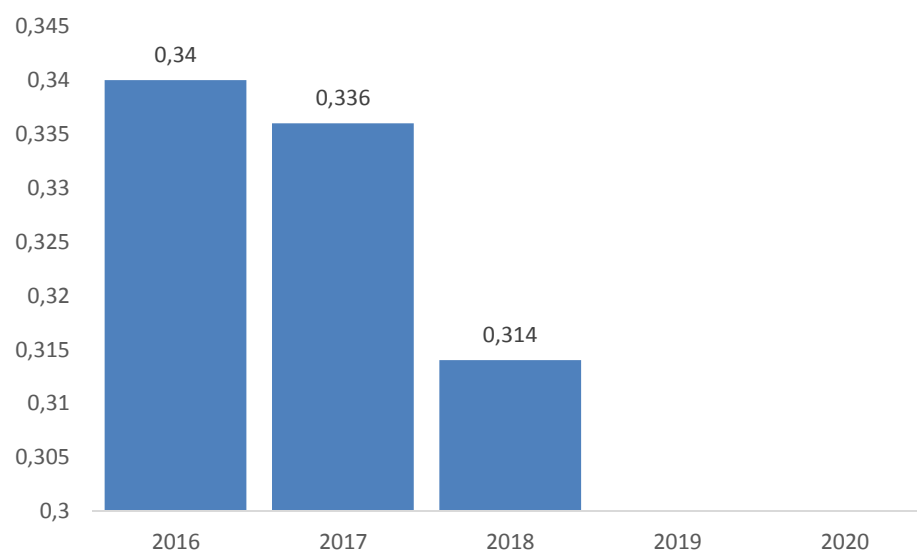
2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah distribusi pendapatan yang diterima masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks gini berada di antara 0-1, bila nilai indeks gini bernilai 0, maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna, dan indeks gini bernilai 1, maka ketidakmerataan distribusi pendapatan sempurna. Kesenjangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia dikategorikan: a) **Tinggi**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b) **Sedang**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan; c) **Rendah**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan. Sementara itu untuk kriteria Indeks Gini, yakni jika rasio Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempurna,



tetapi jika rasio Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total. Menurut kriteria H.T. Oshima; Ketimpangan “rendah” bila indeks Gini kurang dari 0,3; Ketimpangan “sedang” bila indeks Gini antara 0,3-0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Data indeks Gini Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.9 sebagai berikut. Data rasio gini 2019 dan 2020 belum tersedia.

Gambar 2.9
Indeks Gini Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

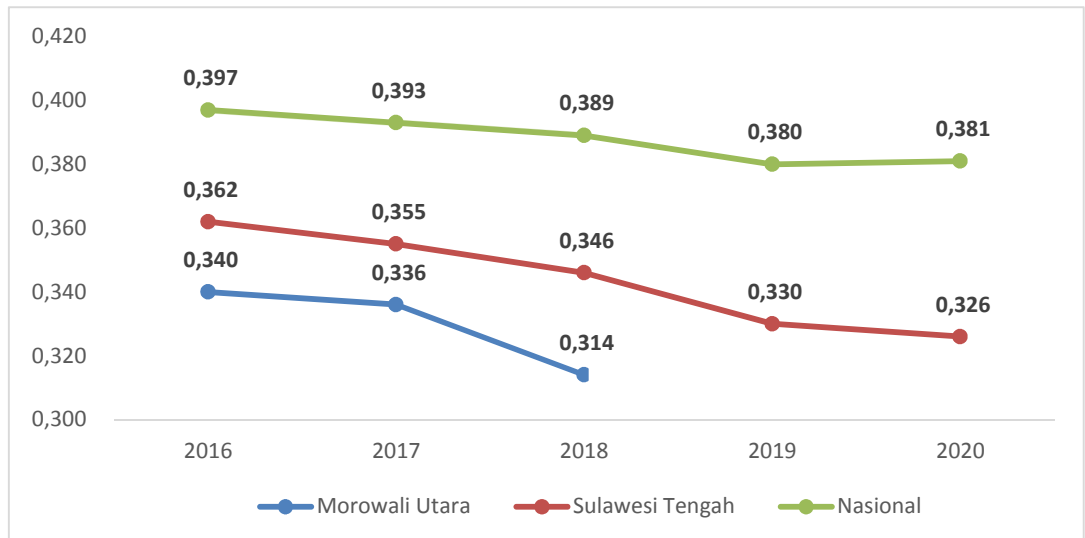


Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

Kondisi indeks Gini Kabupaten Morowali Utara lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan indeks Gini sebesar 0,326; dan lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 0,381, dan indeks gini Morowali Utara tergolong kedalam ketimpangan sedang, keadaan ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Morowali Utara masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk. Perkembangan dan perbandingan indeks Gini Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan nasional periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.10.



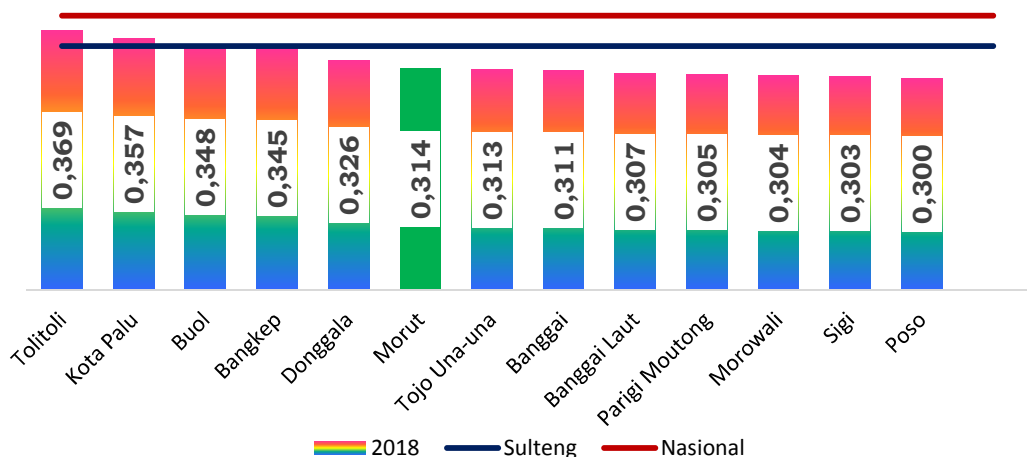
Gambar 2.10
Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Selanjutnya, untuk perbandingan indeks Gini menurut Kabupaten/ kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.11 sebagai berikut.

Gambar 2.11
Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2018



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

Indeks Gini tertinggi di Kabupaten Tolitoli sebesar 0,369. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara urutan ke-enam serta daerah dengan indeks Gini terendah adalah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

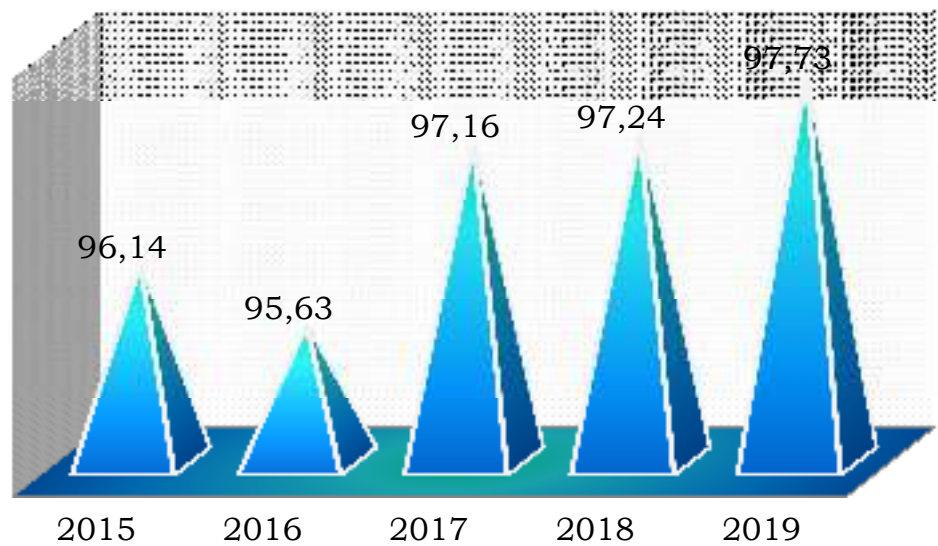
2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek



huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang dapat baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Gambar 2.12
Angka Melek Huruf (AMH)
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2019



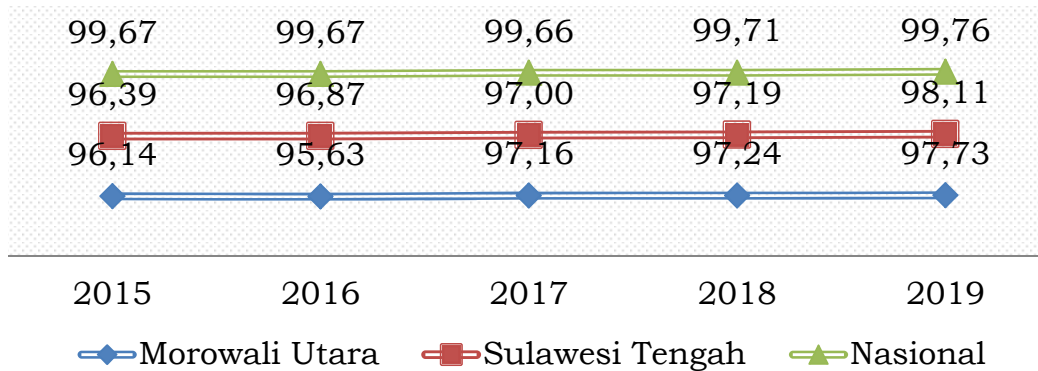
Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

AMH di Kabupaten Morowali Utara mengalami perbaikan dalam periode Tahun 2015-2019. Dimana, Tahun 2015 AMH Kabupaten Morowali Utara sebesar 96,14 persen; dan Tahun 2019 menjadi sebesar 97,73 persen. Masih terdapat sekitar 2,37 persen penduduk yang masih buta huruf. Data AMH Kabupaten Morowali disajikan pada Gambar 2.12.

Kondisi capaian AMH Kabupaten Morowali Utara, masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2019 AMH Kabupaten Morowali Utara sebesar 97,73 persen, dan berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan capaian sebesar 98,11 persen; dan nasional sebesar 99,76 persen yang ditampilkan pada Gambar 2.13 sebagai berikut.

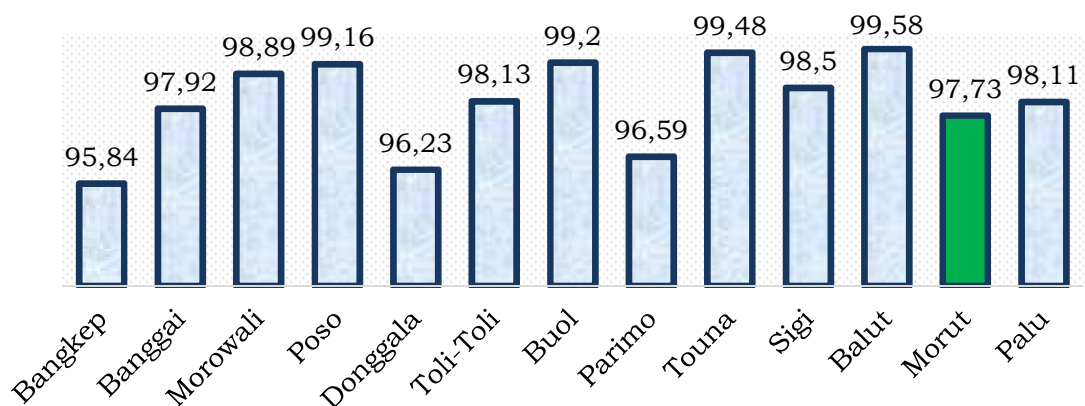


Gambar 2.13
Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Gambar 2.14
Angka Melek Huruf Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

Selanjutnya, AMH Kabupaten Morowali Utara dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dibahas pada Gambar 2.14. Kondisi AMH Kabupaten Morowali Utara dibanding dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah masih cukup rendah. kabupaten Morowali Utara terendah keempat. AMH tertinggi adalah Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Tojo Una-Una. Sebaliknya yang terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.

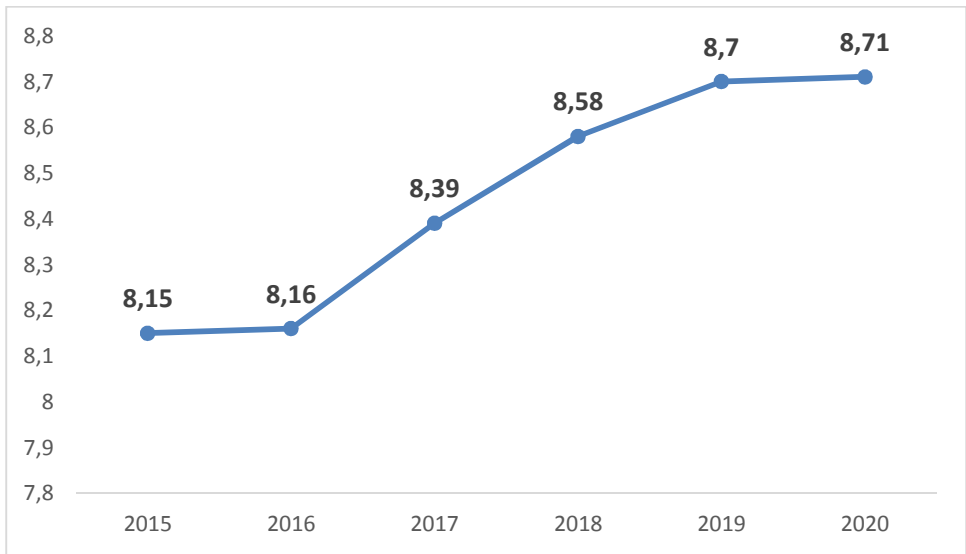
2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah (hubungan AMH dan RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 Tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi ditamatkan dan tingkat Pendidikan sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan PBB) adalah minimal 0 Tahun dan maksimal 15 Tahun. Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015 s/d Tahun 2020 meningkat setiap Tahunnya. Pada Tahun 2015, angka RLS sebesar 8,15 Tahun, dan



hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 8,71 Tahun yang ditampilkan pada Gambar 2.15 sebagai berikut ini.

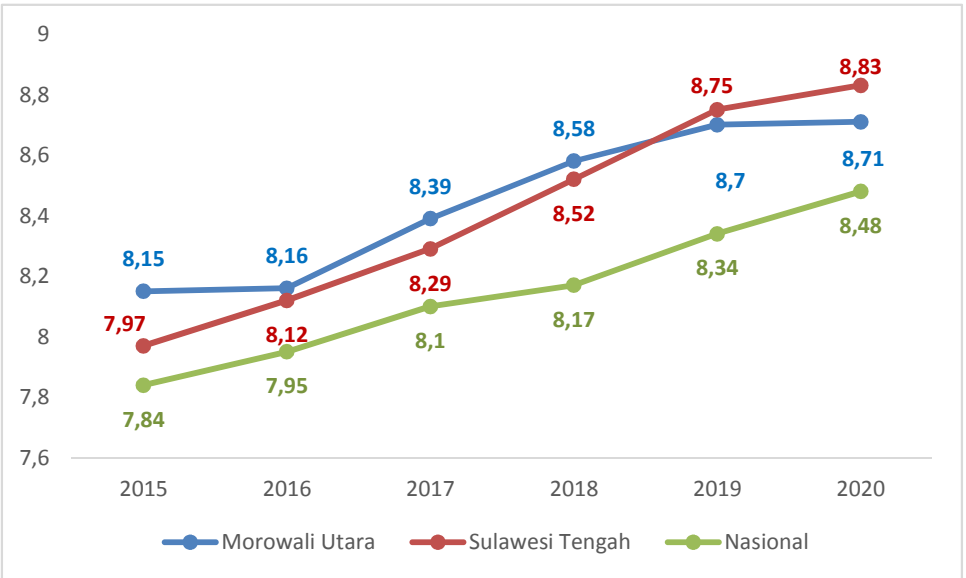
Gambar 2.15
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah. Dimana angka rata-rata sekolah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 mencapai 8,83 Tahun dan masih di atas rata-rata nasional selama 8,48 Tahun, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.16 sebagai berikut.

Gambar 2.16
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

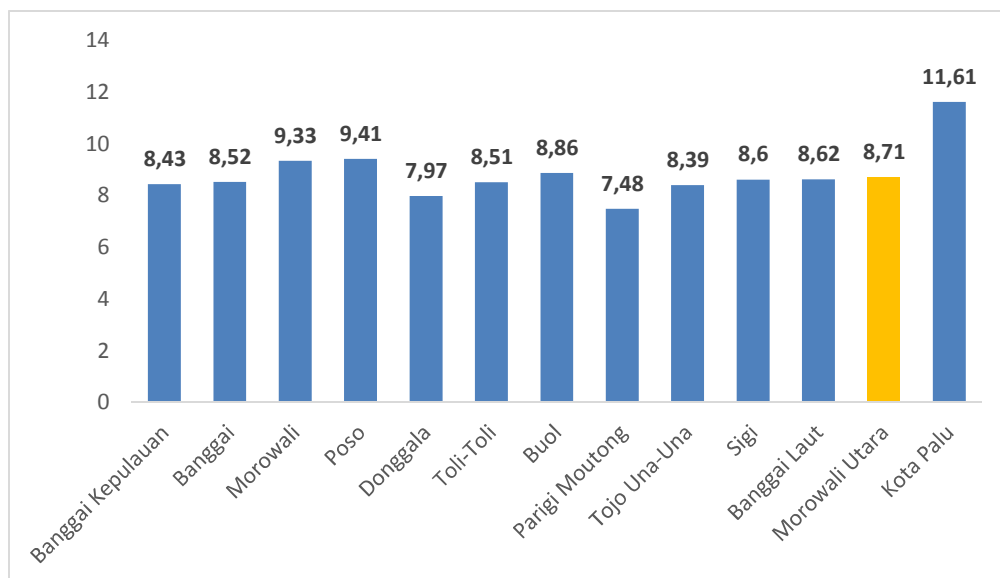


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



Perbandingan Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan pada Gambar 2.17 sebagai berikut.

Gambar 2.17
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

Berdasarkan data pada Gambar 2.17 di atas, diketahui bahwa angka RLS 2020 tertinggi yakni Kota Palu selama 11,61 Tahun; Kabupaten Poso selama 9,41 Tahun; dan Kabupaten Morowali selama 9,33 Tahun. Sedangkan terendah Kabupaten Parigi Moutong selama 7,48 Tahun. Untuk Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan kelima dengan angka RLS selama 8,71 Tahun.

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

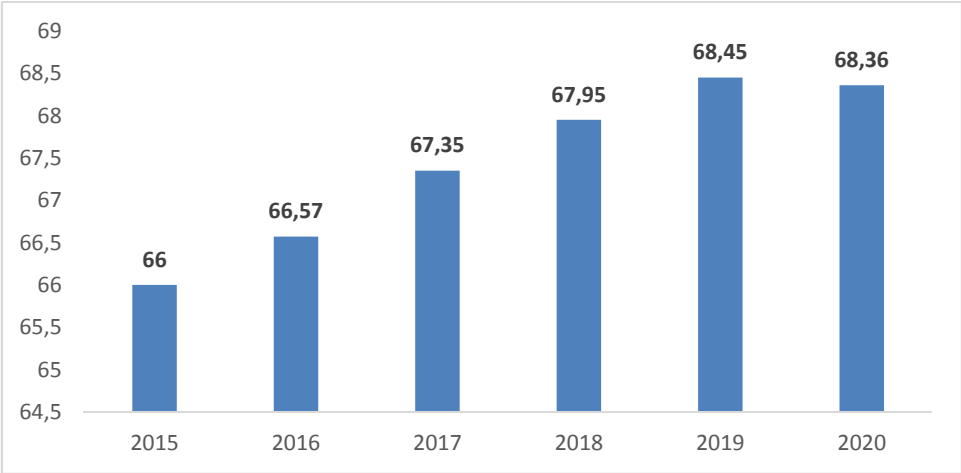
Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

IPM Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari



peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

Gambar 2.18
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2020

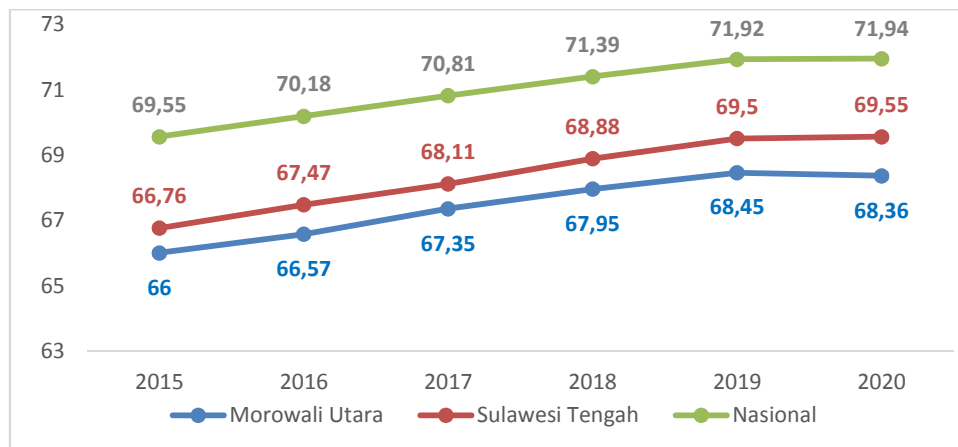


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kondisi IPM kabupaten Morowali Utara 6 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 IPM Kabupaten Morowali Utara sebesar 66,00; Tahun 2016 menjadi sebesar 66,57; Tahun 2017 menjadi sebesar 67,35 dan hingga Tahun 2020 sebesar 68,365. IPM Kabupaten Morowali Utara ini masuk dalam kategori sedang. Data IPM Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2020. Merujuk data pada Gambar 2.19 di atas, IPM Kabupaten Morowali Utara rata-rata meningkat dalam periode Tahun 2015-2020, namun capaiannya IPM tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

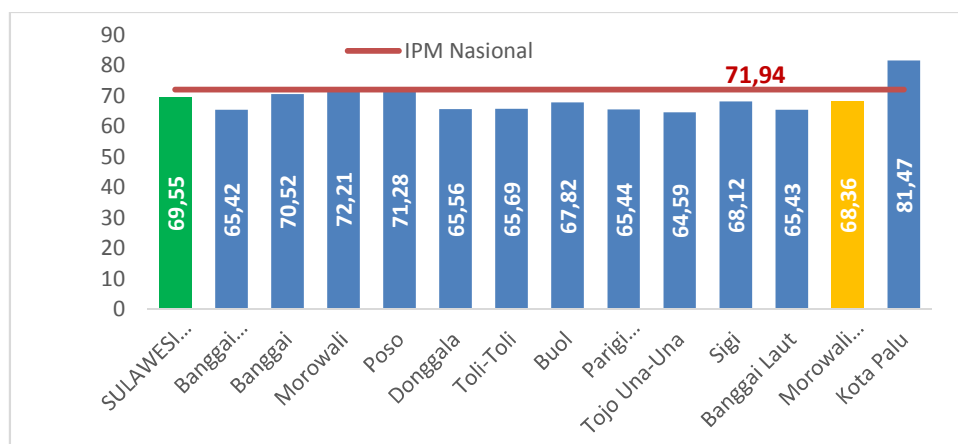


Gambar 2.19
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Gambar 2.20
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

Pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Morowali Utara sebesar 68,38 lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69,55, dan masih berada jauh dari rata-rata nasional sebesar 71,94 secara lengkap disajikan pada Gambar 2.19. Sedangkan, untuk perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dijelaskan pada Gambar 2.20. Kota palu adalah daerah dengan IPM tertinggi yakni sebesar 81,47 masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan kelima. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

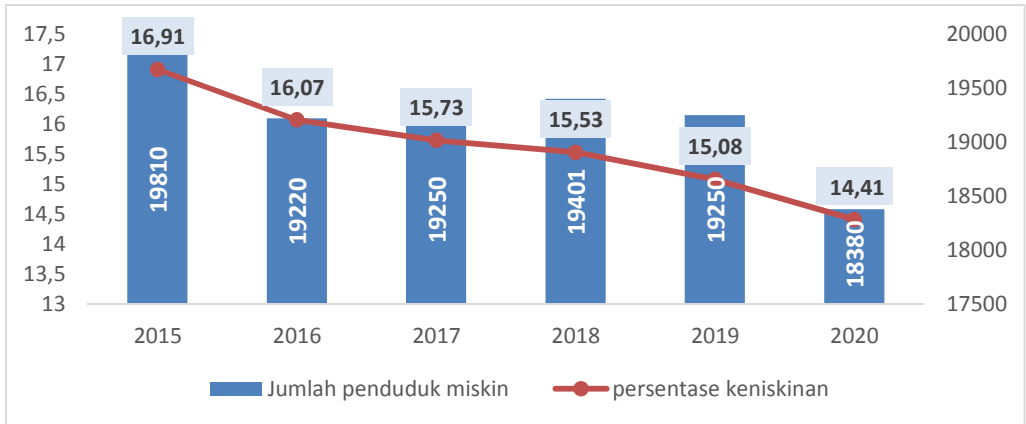
2.2.2.4. Persentase Penduduk Miskin

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda dunia yang disepakat dalam TPB/SDGs. Kemiskinan juga menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian khusus di Kabupaten Morowali Utara. Pengentasan kemiskinan masih cenderung melambat. Hal ini terlihat



dari penurunan persentase penduduk miskin yang sangat kecil yakni hanya sebesar 1,83 persen. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 19.810 orang atau sebesar 16,91 perse. Setiap Tahun angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara, mengalami penurunan hingga Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 14,41 persen atau sebanyak 18.380 jiwa. Salah satu faktor penyebab tingginya kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara adalah masalah kulturan/budaya, termasuk adanya Komunitas Adat Terpencil yang memerlukan pendekatan khusus dalam konteks pengentasan kemiskinan. Data jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terdapat pada Gambar 2.21 sebagai berikut.

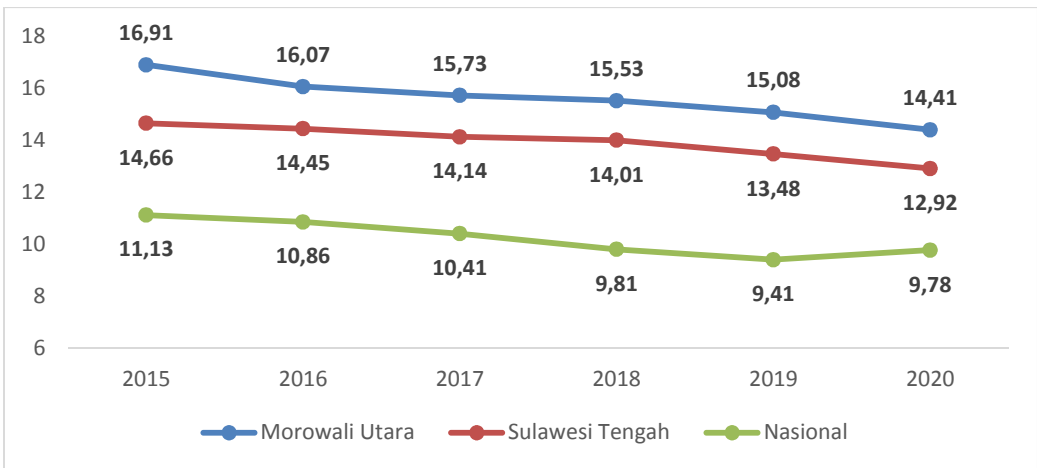
Gambar 2.21
Jumlah dan persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara hingga Tahun 2020 masih jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 12,92% dan Nasional sebesar 9,78%, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.22
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

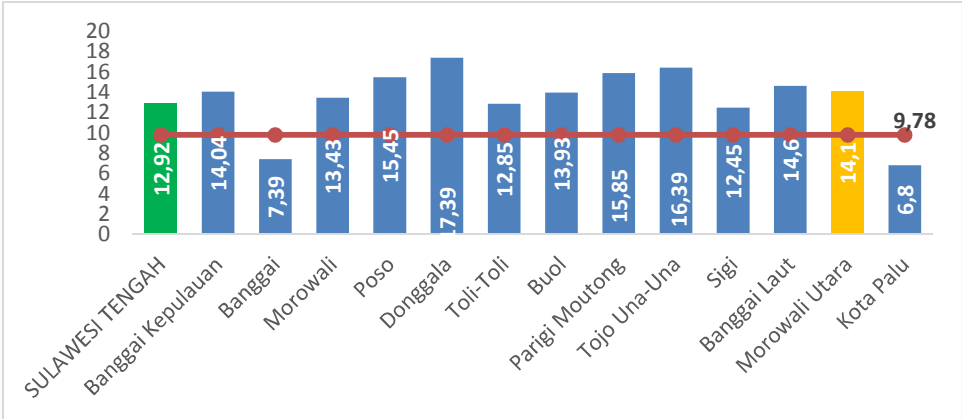


Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)



Perbandingan persentase penduduk miskin antar Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Posisi Kabupaten morowali Utara masih di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2.23
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng dan Nasional Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

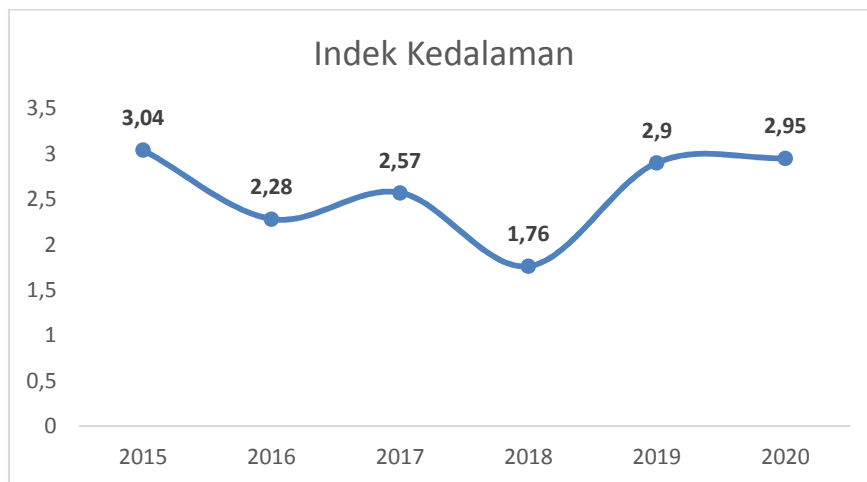
Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, posisi Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan tertinggi ketujuh. Sedangkan Kota Palu adalah kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Sulawesi Tengah yang ditampilkan pada Gambar 2.23.

• **Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan**

Mengetahui di mana warga miskin berada hingga tingkat wilayah yang kecil seperti desa dan kelurahan penting bagi pemerintah, karena akan membantu dalam membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Selain mengetahui jumlah orang miskin di desa dan kelurahan, pemerintah juga perlu mengetahui tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran peduduk dari garis kemiskinan.



Gambar 2.24
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2020

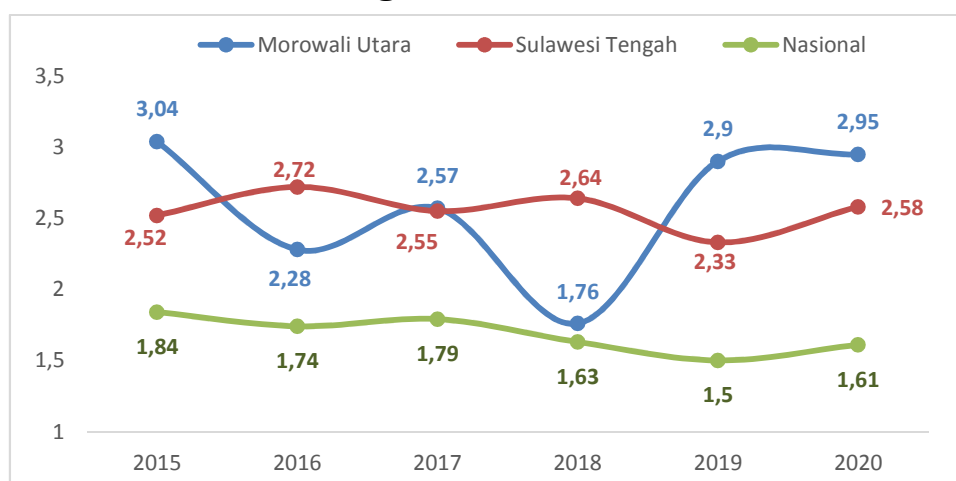


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Tingkat kedalaman ini mempengaruhi seberapa besar usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat seseorang keluar dari kemiskinan. Perkembangan P1 di Kabupaten Morowali Utara dalam 5 Tahun terakhir masih berfluktuatif. Pada Tahun 2015, P1 sebesar 3,04, menurun hingga pada Tahun 2017 menjadi sebesar 1,76. Namun P1 pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9 dan di akhir tahun 2020 menjadi 2,95, menunjukkan dalam 2 tahu terakhir rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin dalam atau semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.24 sebagai berikut.

Data perbandingan P1 Kabupaten Morowali Utara dengan kondisi Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada Gambar 2.25 berikut ini.

Gambar 2.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020

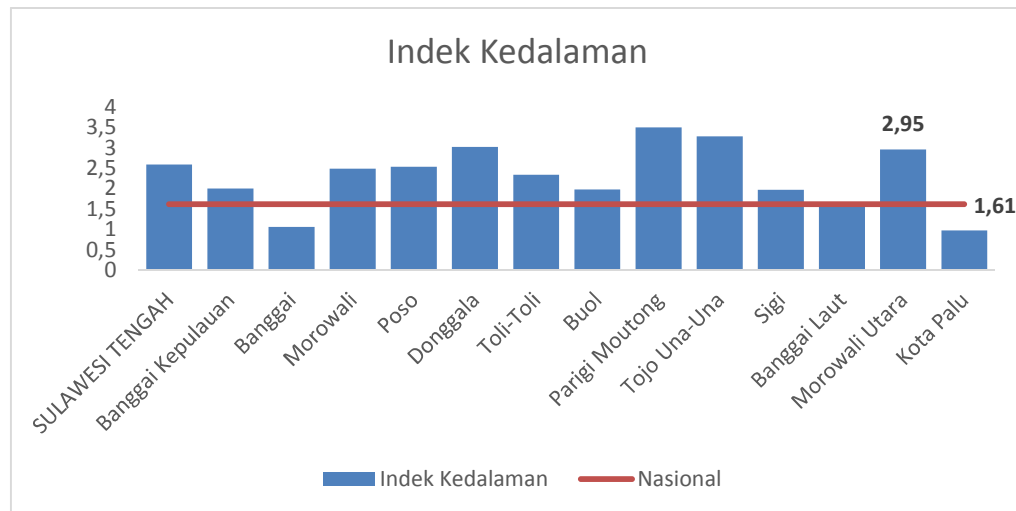


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



Data P1 Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan rata-rata nasional.

Gambar 2.26
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, kondisi P1 Kabupaten Morowali Utara tertinggi kedua, setelah Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan, P1 terendah adalah Kota Palu dan Kabupaten Banggai. Data perbandingan P1 Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional terdapat pada Gambar 2.26.

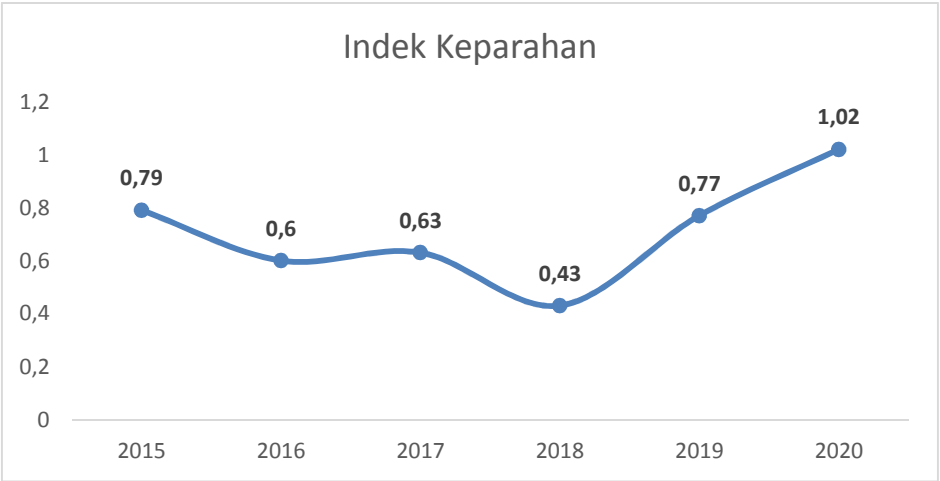
- **Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan**

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relative, terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di sana. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinan, sehingga harus semakin terukur dan tepat sasaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan di daerah tersebut. Kondisi P2 Kabupaten Morowali Utara juga masih tinggi. Pada Tahun 2015 sebesar 0,79; menurun hingga Tahun 2018 menjadi 0,43, namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat hingga akhir tahun 2020 P2 menjadi 1,02. Hal ini menunjuka bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Morowali Utara semakin melebar, kondisi ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali Utara yang tumbuh melambat pada tahun 2020. Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut, tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah daerah harus bersama semua stakeholders mengambil langkah strategis melalui berbagai kebijakan dan program intervensi, melalui multi sasaran antara lain melalui operasi pasar dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Upaya tersebut seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral lain. Data P2 Kabupaten Morowali Utara



periode Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.27 sebagai berikut.

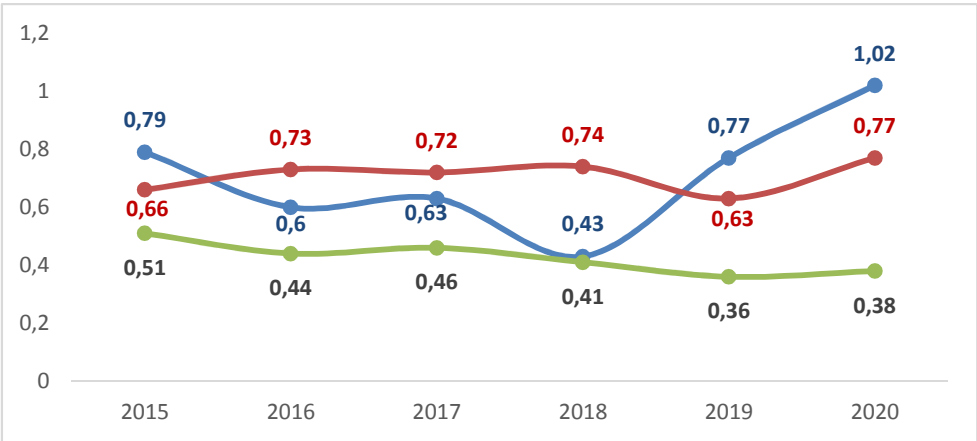
Gambar 2.27
Indeks keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Sementara itu, data perbandingan P2 Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan pada Gambar 2.28 sebagai berikut. P2 Kabupaten Morowali Utara lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2015, P2 sebesar 0,79 lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,66 dan Nasional sebesar 0,51.

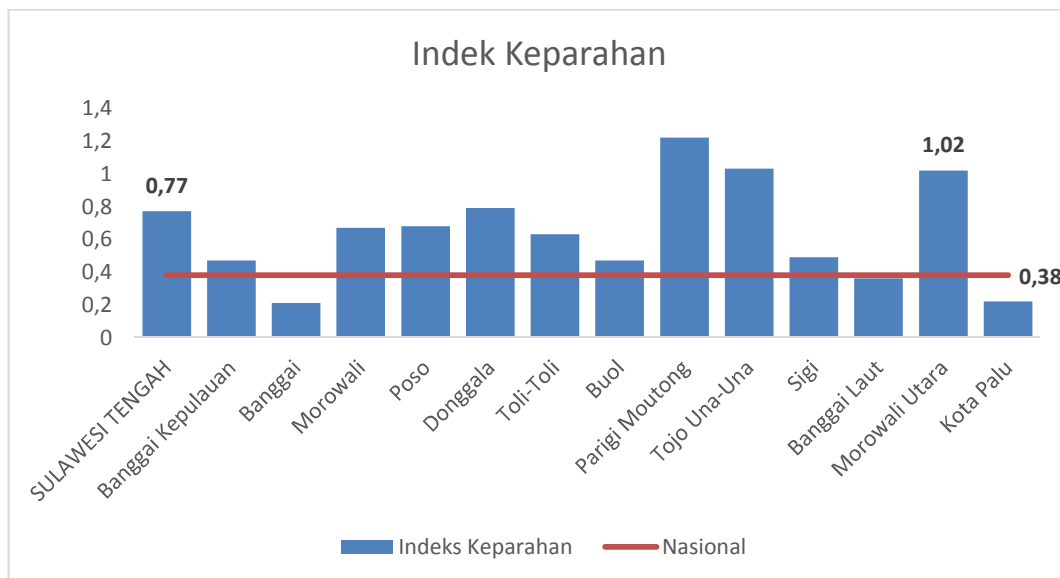
Gambar 2.28
Indeks Keparahanan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



Gambar 2.29
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Selanjutnya, hingga Tahun 2020, kondisi yang relatif sama, dimana P2 masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Data perbandingan P2 Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah ditampilkan pada Gambar 2.29.

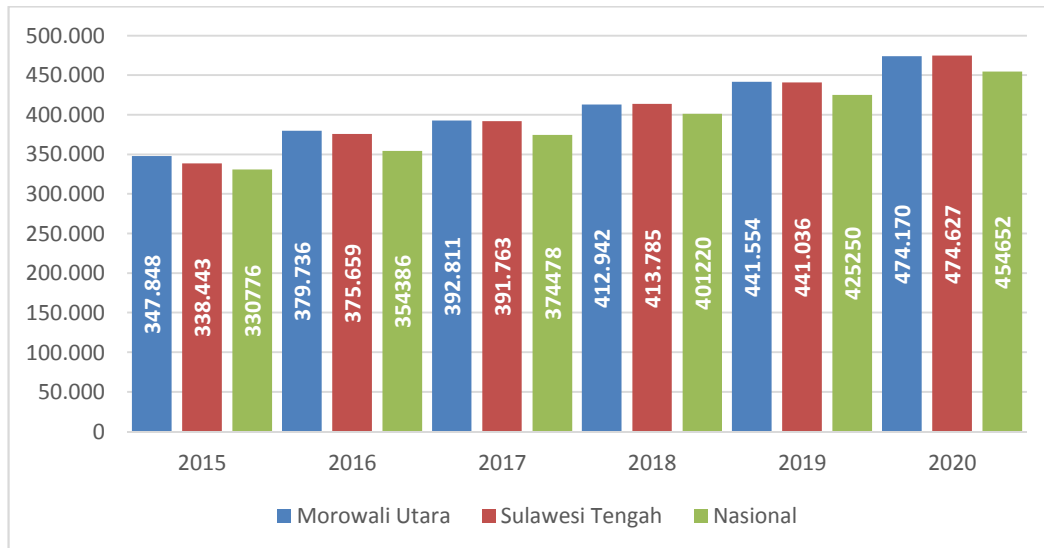
Merujuk pada Gambar 2.29 di atas, dimana rata-rata P2 di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,77. Beberapa daerah lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yakni Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Donggala termasuk Kabupaten Morowali Utara. Data P2 tertinggi berada di Kabupaten Morowali Utara, dan terendah di Kabupaten Banggai dan Kota Palu.

- **Penduduk di Atas Garis Kemiskinan**

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara, berbanding terbalik dengan persentase penduduk berada di atas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 474.170, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat perbandingan garis kemiskinan Kabupaten Morowali Utara dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional rata-rata masih berada di bawah. Data perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2020 ditampilkan pada Gambar 2.30 sebagai berikut.



Gambar 2.30
Garis Kemiskinan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dan nasional Tahun 2015-2020



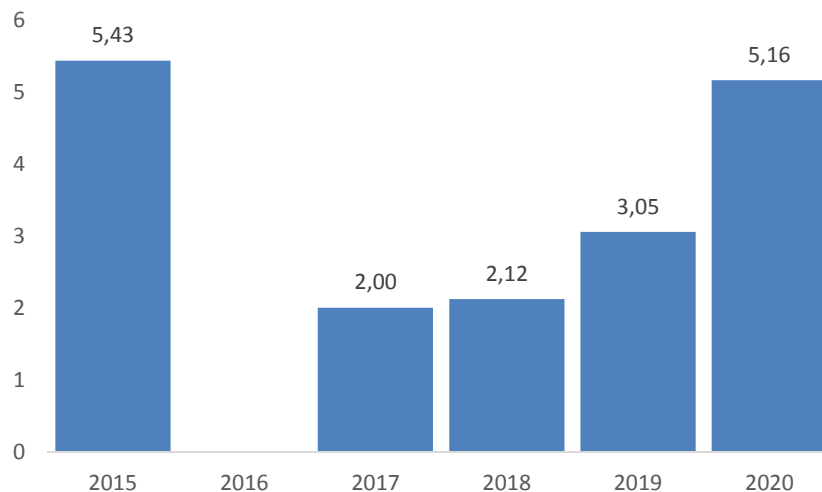
Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

2.2.2.5. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Pengangguran masih menjadi masalah yang dialami pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sampai saat ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tumbuh sangat baik, namun masih terdapat masyarakat yang masih belum terserap oleh pasar tenaga kerja di Kabupaten Morowali Utara. berbagai faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya diantaranya, tingkat pendidikan dan kompetensi masyarakat yang masih cukup rendah. Data mengenai perkembangan TPT di Kabupaten morowali Utara periode Tahun 2015-2020 disajikan pada Gambar 2.31 sebagai berikut. Pada Tahun 2015 TPT Kabupaten Morowali Utara sebesar 5,43 persen. Menurun signifikan pada Tahun 2017 menjadi sebesar 2,00 persen. Namun setelah Tahun 2017 TPT Kabupaten morowali Utara justru mengalami peningkatan dalam 3 Tahun terakhir.

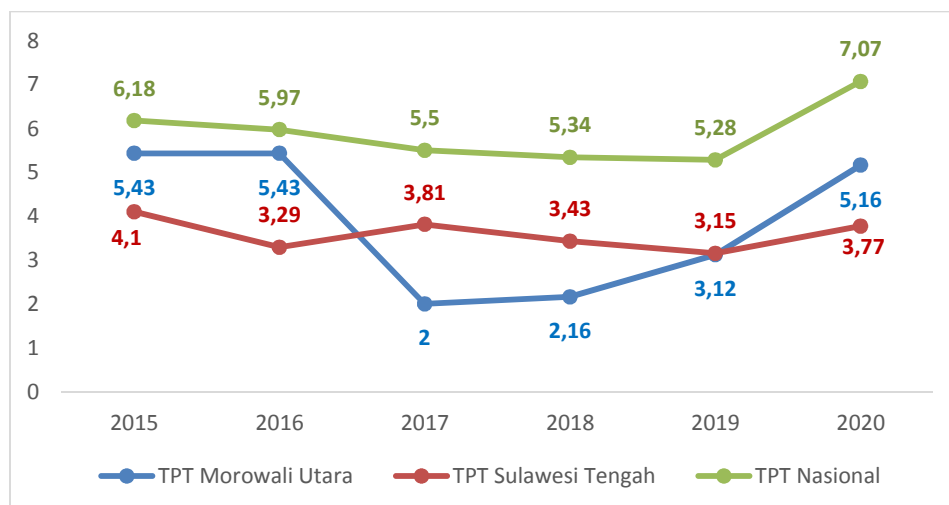


Gambar 2.31
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Gambar 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

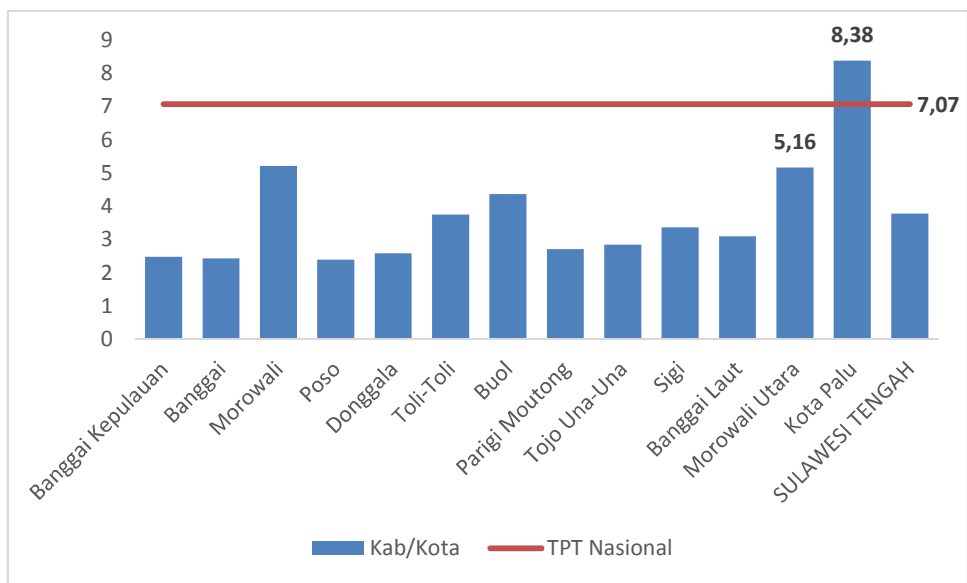
Pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 2,16 persen, Tahun 2019 meningkat cukup tinggi menjadi sebesar 3,12 persen, dan pada tahun 2020 meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 5,16 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, TPT di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2020 berada di atas dari TPT Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,77 persen dan namun masih lebih baik dari rata-rata Nasional dengan TPT yang cukup tinggi yakni sebesar 7,07 persen. Data perbandingan TPT Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional pada Gambar 2.33 sebagai berikut.

Kondisi TPT Kabupaten Morowali Utara dibandingkan dengan kondisi capaian Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk



melihat kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menangani masalah pengangguran di daerah setempat. Berdasarkan data TPT Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan keempat. TPT Tertinggi adalah Kota Palu sebesar 8,38 persen, Kabupaten Morowali Utara sebesar 5,16 persen, Kabupaten Morowali sebesar 5,21 persen. Sebaliknya, TPT terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 2,47 persen, Kabupaten Banggai sebesar 2,42 persen, dan Kabupaten Poso sebesar 2,39. Data TPT Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.33 sebagai berikut.

Gambar 2.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya, dan olahraga erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan yang meliputi; 1) dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan 2) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan bidang Seni dan Budaya di Kabupaten Morowali Utara ditujukan dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya khususnya di Kabupaten Morowali Utara sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah Mori.

Masyarakat Kabupaten Morowali Utara akomodatif terhadap perubahan. Namun, sistem budaya masyarakat setempat terkadang menolak masuknya budaya dari luar yang dipandang kurang



akomodatif terhadap nilai-nilai kultur dan kearifan lokal. Hal seperti ini umumnya dilatar belakangi oleh ekspansi para pemilik modal besar yang mengeksploitasi kawasan tanpa mempertimbangkan unsur kearifan lokal yang umumnya bersandar pada kepentingan *sustainable* sumberdaya alam setempat.

Tingkat kemajemukan warga yang membawa pengaruh terhadap ragam lapangan usaha pertanian, menjadi penciri antara kawasan pegunungan dengan beberapa daerah lain di kawasan Kabupaten Morowali Utara. Kesenian yang terdapat di Kabupaten Morowali Utara sangat berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat. Bentuk kesenian seperti upacara Momago yang dilaksanakan oleh Suku Wana. Bentuk benda-benda kesenian yang masih ditemukan berupa sumpit, rumah suku wana dan berbagai alat musik yang sampai saat ini masih dipelihara. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari 10 kecamatan, 3 kelurahan, dan 122 desa, memiliki adat istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dimasyarakat, sekaligus menjadi potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

1. Seni Budaya

Pembangunan bidang Seni dan Budaya di Kabupaten Morowali Utara ditujukan dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Masyarakat Kabupaten Morowali Utara akomodatif terhadap perubahan. Namun demikian, sistem budaya masyarakat setempat terkadang menolak masuknya budaya dari luar yang dipandang kurang akomodatif terhadap nilai-nilai kultur dan kearifan lokal. Hal seperti ini umumnya dilatar belakangi oleh ekspansi para pemilik modal besar yang mengeksploitasi kawasan tanpa mempertimbangkan unsur kearifan lokal yang umumnya bersandar pada kepentingan *sustainable* sumberdaya alam setempat.

Tingkat kemajemukan warga yang membawa pengaruh terhadap ragam lapangan usaha pertanian, menjadi penciri antara kawasan pegunungan dengan beberapa daerah lain di kawasan Kabupaten Morowali Utara. Kesenian yang terdapat di Kabupaten Morowali Utara sangat berkaitan dengan pelaksanaan upacara adat. Capaian pembangunan seni dan budaya dapat dilihat berdasarkan indikator; 1) Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dan 2) Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.

2. Olahraga

Indikator Pencapaian pembangunan bidang Olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator antara lain; 1) Jumlah klub olahraga



adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dan 2) Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

2.3.1. Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan pemerintah daerah yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang berkaitan dengan kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 6 (enam) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Morowali Utara dijabarkan secara detail sebagai berikut.

2.3.1.1.1. Pendidikan

Indikator kinerja pendidikan merupakan satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah. Tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada kondisi sosial budaya dan kemiskinan suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan kesulitan untuk memperoleh mata pencaharian yang lebih baik karena diperlukan pengetahuan dan skill yang baik. Dengan kata lain, tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi



pola hidup penduduk dalam suatu daerah. Keberhasilan proses pembangunan suatu wilayah memerlukan dukungan SDM berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu wahana dalam membentuk SDM yang berkualitas yang diharapkan mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja urusan pendidikan diantaranya PAUD, Angka partisipasi kasar, Angka pendidikan yang ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka partisipasi sekolah, Angka Putus Sekolah dan beberapa indikator lainnya. Gambaran capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Morowali Utara dijelaskan sebagai berikut.

a) Pendidikan Anak Usia Dini

PAUD/TK adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yakni pendidikan formal, non formal, dan informal.

PAUD menjadi satu fokus pendidikan ditujukan untuk membangun kesadaran pendidikan sejak usia dini bagi masyarakat. PAUD memiliki peran strategis dalam meletakkan nilai-nilai dasar pendidikan bagi anak usia dini. Pondasi dasar melalui PAUD ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang inovatif dan kreatif yang berguna bagi masa depan bangsa dan Negara. Secara khusus, pelaksanaan PAUD/TK di Kabupaten Morowali Utara sudah menjangkau sebagian besar masyarakat hingga kawasan pedesaan. Gambaran PAUD di Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu 2015-2020 disajikan pada Tabel 2.29 sebagai berikut.

Tabel 2.29
Pendidikan Anak Usia Dini
Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun					2020
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah Sekolah	227	145	148	228	221	127
2	Jumlah Siswa	3.294	2.773	4.005	4.750	5.060	3.926
3	Jumlah Guru	576	343	323	358	423	370
	Rasio Sekolah	14,51	19,12	27,06	20,83	22,90	30,91
	Rasio Guru	5,72	8,08	12,40	13,27	11,96	10,61

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Tabel 2.29 di atas menunjukkan jumlah PAUD di Kabupaten Morowali Utara selama 2015-2020. Dimana, Tahun 2020 PAUD sebanyak 127 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 3.926 siswa, dan jumlah guru sebanyak 370 orang. Sedangkan Tahun 2015 PAUD sebanyak 227 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 2.773 dan



jumlah guru sebanyak 576. Rasio murid terhadap jumlah sekolah pada tahun 2010 sebesar 30,91 meningkat dari tahun 2019 (22,90), dan rasio murid terhadap jumlah guru sebesar 10,61 menurun dari tahun 2019 (11,96).

b) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui APK. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berusia usia sekolah, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APK di Kabupaten Morowali Utara dari tiap jenjang pendidikan selalu meningkat tiap Tahunnya. APK untuk tiap tingkat pendidikan dijabarkan sebagai berikut..

• **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**

Angka partisipasi Kasar untuk jenjang sekolah dasar SD/MI mengalami perkembangan yang berfluktuatif, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.34 sebagai berikut.

Gambar 2.34
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Berdasarkan Gambar 2.34 di atas, selama periode 5 Tahun terakhir APK jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali Utara cenderung berfluktuatif. Pada Tahun 2015 APK



SD/MI sebesar 110,05 menurun pada Tahun 2016 menjadi 99,12, kembali meningkat hingga Tahun 2018 menjadi 105,17 dan menurun pada Tahun 2019 menjadi 103,25 dan tahun 2020 menjadi 99,72. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat siswa sekolah SD/MI yang bersekolah tidak pada usia sekolahnya.

Jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi dan Nasional, APK Jenjang Pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali Utara berada di bawah rata-rata Provinsi (103,95) dan juga rata-rata Nasional (106,32) pada tahun 2020. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

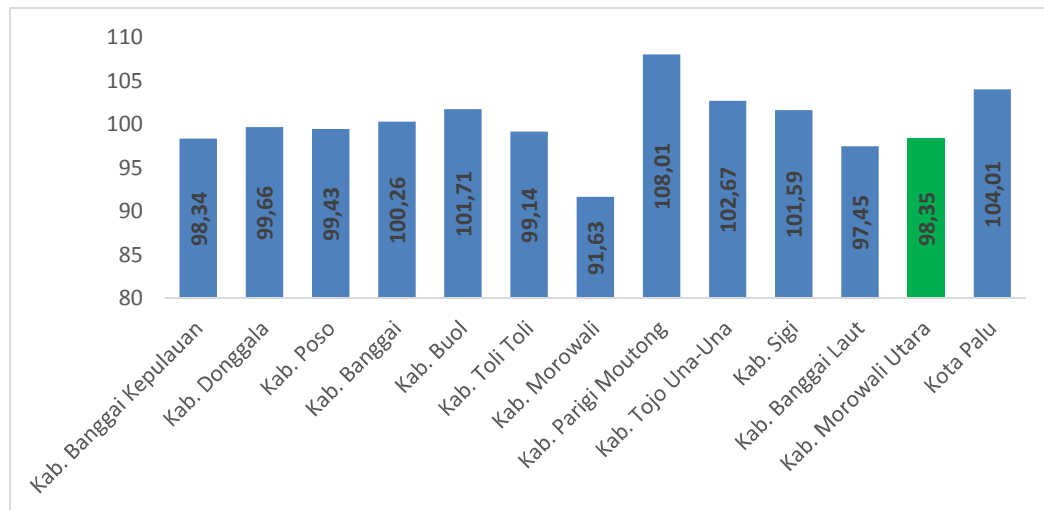
Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
MorowaliUtara	99,12	103,89	105,17	103,25	99,72
SulawesiTengah	118,52	104,19	105,28	105,13	103,95
Nasional	106,44	106,44	103,54	103,50	106,32

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Selanjutnya kondisi di Kabupaten Morowali Utara dibandingkan dengan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.35 sebagai berikut.

Gambar 2.35
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020/2021



Sumber: Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (Diolah Kembali)

APK jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 berada pada urutan ke-tujuh dari 10 kabupate/kota di

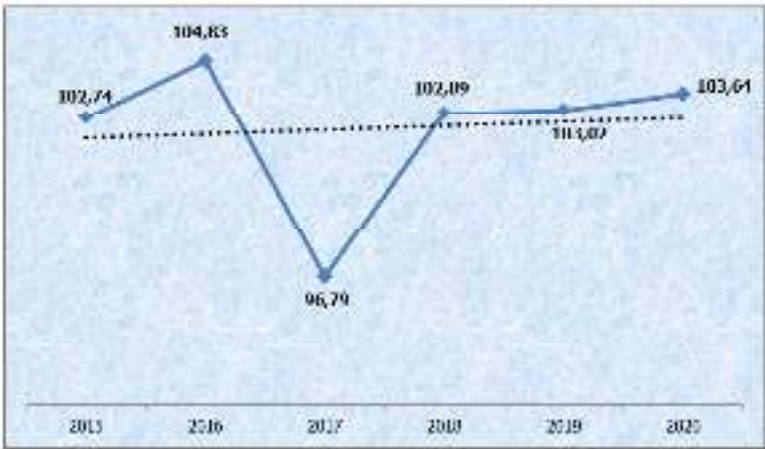


Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Parigi Moutong adalah tertinggi APK SD/MI, Kota Palu, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Buol. Sedangkan APK SD/MI terendah adalah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Laut.

• **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**

APK jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2020 berfluktuatif yang ditampilkan pada Gambar 2.36 ini.

Gambar 2.36
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Pada tahun 2015 APK SMP/MTs sebesar 102,74, tahun 2016 meningkat menjadi 104,83 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 96,79. Tahun 2018 APK SMP/MTs meningkat signifikan menjadi 102,89 dan hingga tahun 2020 kembali meningkat menjadi 103,64. Selanjutnya dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi dan Nasional menunjukkan bahwa APK Jenjang Pendidikan SMP/MTs Kabupaten Morowali berada di atas rata-rata Provinsi (91,98) dan juga rata-rata nasional (92,06) di tahun 2020. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

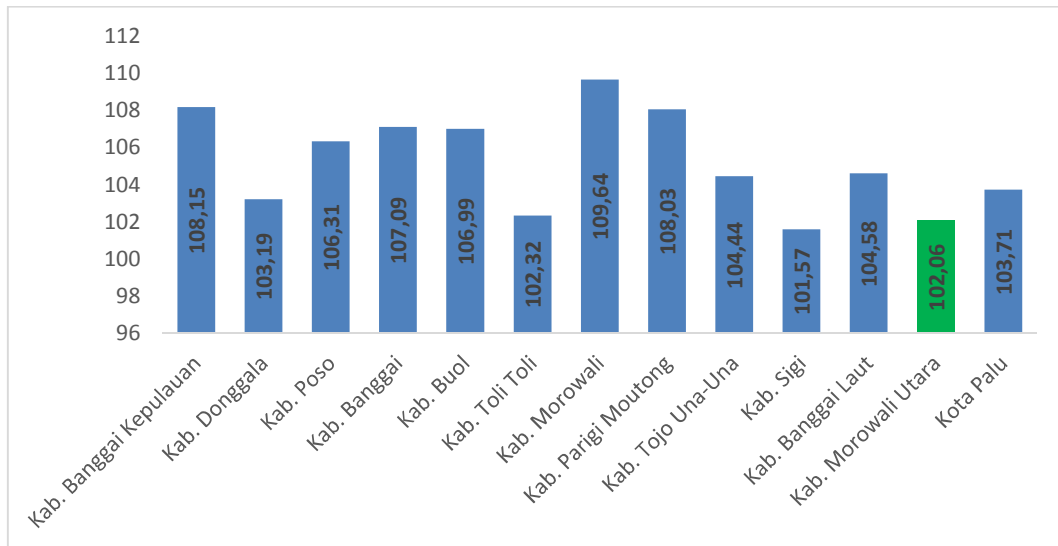
Tabel 2.31
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs						
Morowali Utara	102,74	104,83	96,79	102,89	103,02	103,64
Sulawesi Tengah	90,73	107,08	91,86	92,88	90,63	91,98
Nasional	106,72	101,05	101,05	100,86	90,57	92,06

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)



Gambar 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (Diolah Kembali)

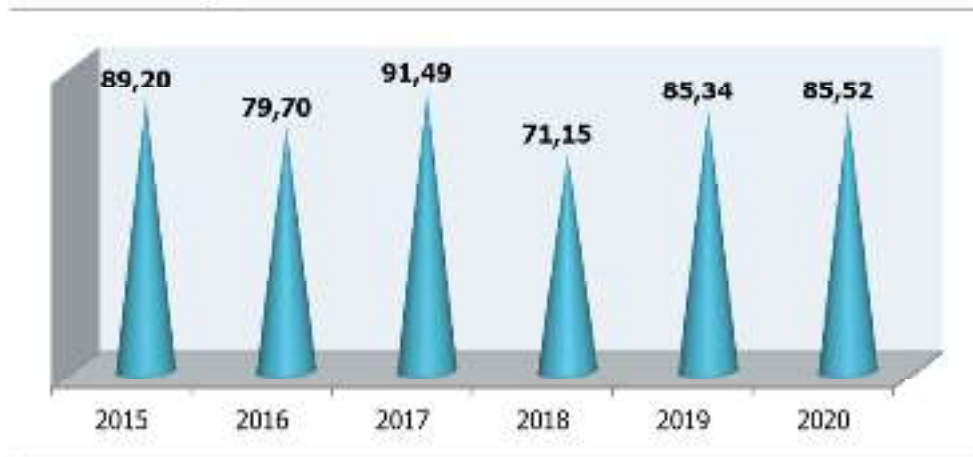
Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kondisi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah diketahui bahwa, APK jenjang pendidikan SMP/MTs tertinggi adalah Kabupaten Morowali sebesar 109,64; Kabupaten Parigi Mourong sebesar 108.03; dan Kabupaten Banggai sebesar 107,09. Sedangkan Kabupaten dengan APK SMP/MTs terendah adalah Kabupaten Sigi sebesar 101,57; dan Kabupaten Morowali Utara pada urutan kesebelas di antara 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Data APK SMP/MTs terdapat pada Gambar 2.37.

- **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA**

APK jenjang pendidikan SMA menunjukkan tingkat ketersesuaian pendidikan yang ditempuh oleh siswa dengan umur siswa tersebut. Data di Kabupaten Morowali Utara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020. Dimana pada Tahun 2015 APK SMA/SMK/MA sebesar 89,20 menurun pada Tahun 2016 menjadi 79,70 dan kemudian meningkat pada Tahun 2017 menjadi 91,49. Selanjutnya pada tahun 2018 menurun menjadi 71,15 dan tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dengan capaian 85,52 pada tahun 2020. Data APK SMA/SMK/MA terdapat pada Gambar 2.38 sebagai berikut ini.



Gambar 2.38
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten Morowali Utara di bawah rata-rata Provinsi dan di atas rata-rata Nasional namun masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2020 rata-rata APK SMA/SMK/MA Nasional sebesar 84,53; Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 88,42 sedangkan Kabupaten Morowali Utara 85,52 di tahun yang sama. Secara lengkap periode 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2020

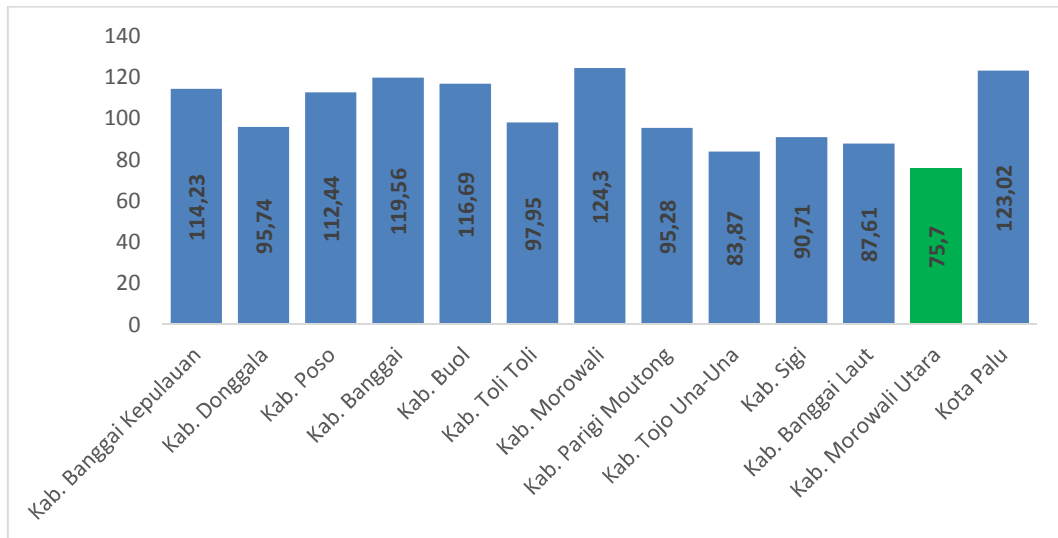
Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SMA/SMK/MA						
Morowali Utara	89,20	79,70	91,49	71,15	85,34	85,52
Sulawesi Tengah	82,87	75,47	84,85	83,53	87,35	85,42
Nasional	81,95	76,45	81,95	88,55	92,92	84,53

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Perbandingan kondisi APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.39 sebagai berikut.



Gambar 2.39
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020/2021

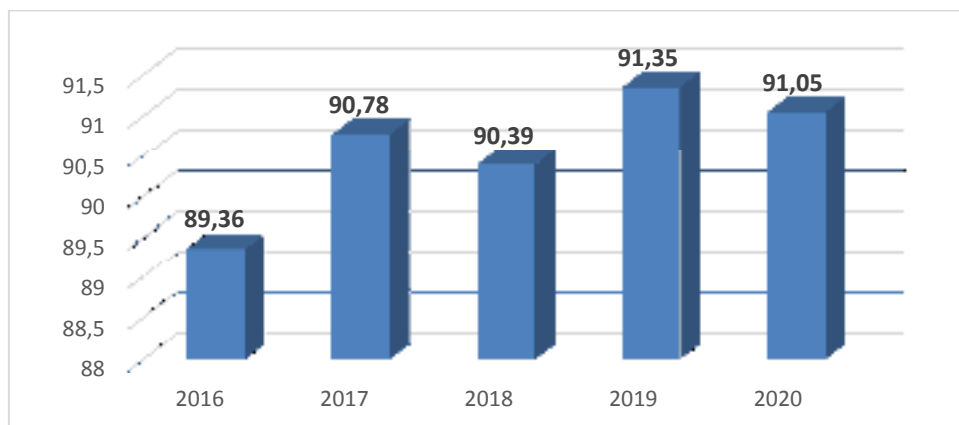


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (Diolah Kembali)

Merujuk gambar di atas, menunjukkan bahwa APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yang tertinggi adalah Kota Palu sebesar 123,02; kemudian Kabupaten Morowali sebesar 124,30; dan Kabupaten Banggai sebesar 119,56. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara berada urutan ke-13 atau terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) merupakan persentase siswa dengan usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD diperbandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun di Kabupaten Morowali Utara. APM jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Morowali Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 89,36; tahun 2017 meningkat menjadi 90,78 dan tahun 2020 sebesar 91,05. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.40 sebagai berikut.

Gambar 2.40
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)



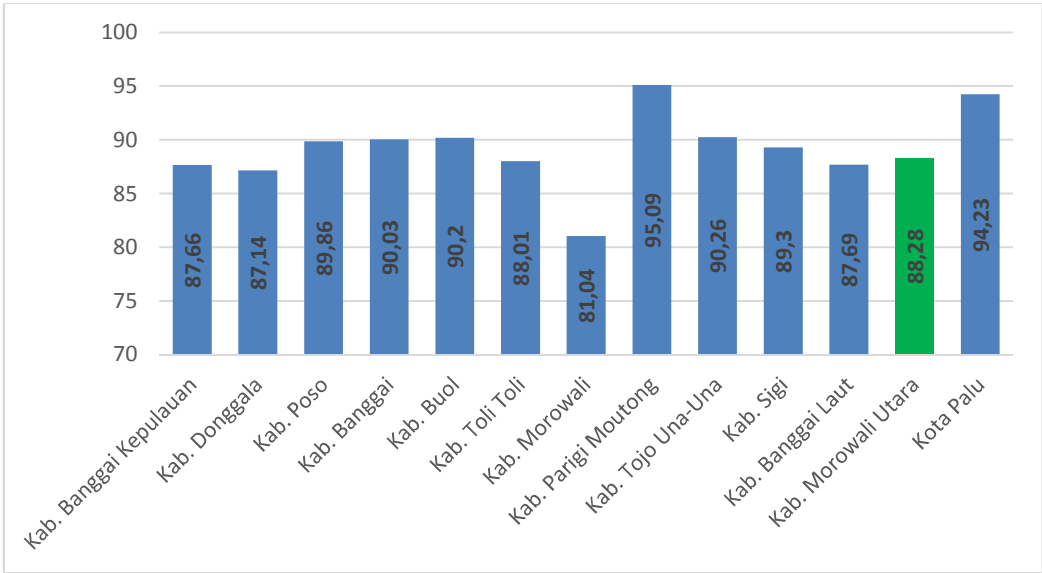
Tabel 2.33 menunjukkan kondisi Kabupaten Morowali Utara dibandingkan dengan kondisi rata-rata provinsi Sulawesi Tengah dan rata-rata Nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. Dalam tabel tersebut menunjukan bahwa APM jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali Utara masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional. Dimana pada tahun 2020 rata-rata APM jenjang pendidikan SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93,24 dan Nasional sebesar 97,69 sedangkan Kabupaten Morowali Utara yang lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional sebesar 91,05. Perbandingan capaian APM SD/MI Kabupaten Morowali Utara dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI					
Morowali Utara	89,36	90,78	90,39	91,35	91,05
Sulawesi Tengah	92,48	92,74	92,82	93,17	93,24
Nasional	93,38	93,73	91,94	92,88	97,69

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Gambar 2.41
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (Diolah Kembali)

Selanjutnya dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan kedelapan atau kelima keempat. Dimana yang berada pada urutan



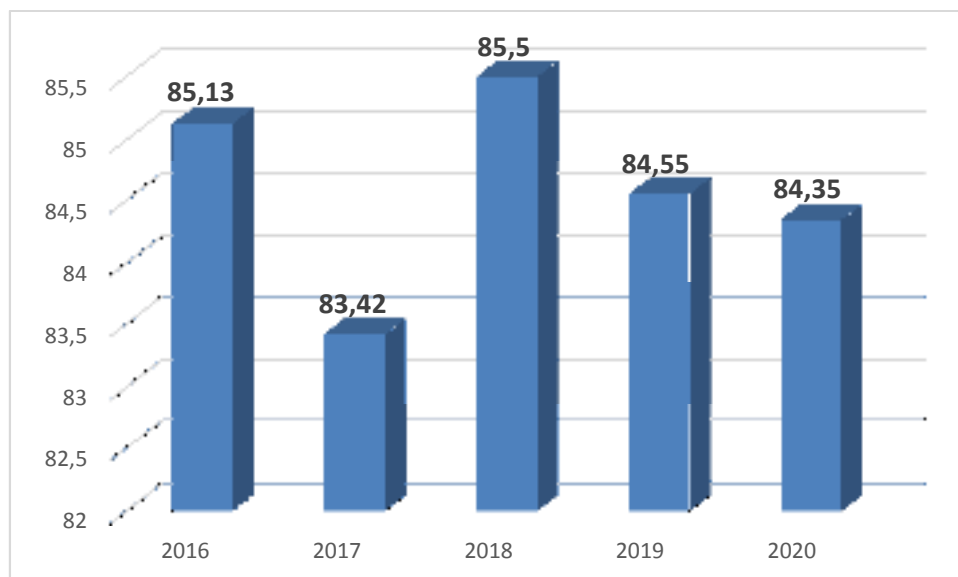
pertama adalah Kota Parigi Moutong sebesar 95,09; Kota Palu sebesar 94.23 dan Kabupaten Buol sebesar 90,03. Data APM SD/MI terdapat pada Gambar 2.41.

• **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SMP/MTs) merupakan persentase siswa dengan usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs diperbandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun di Kabupaten Morowali Utara.

Kondisi APM jenjang pendidikan SMP/MTs juga perkembangannya berfluktuatif namun meningkat dalam periode tahun 2016 s/d tahun 2020. Dimana pada tahun 2016 APM SMP/MTs sebesar 85,13; pada tahun 2017 menurun menjadi 83,42 dan meningkat di tahun 2018 menjadi 85,50 dan hingga tahun 2020 sebesar 84,35. Data mengenai APM jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.42
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Berbeda dengan kondisi capaian APM jenjang pendidikan SD/MI, capaian APM jenjang pendidikan SMP/MTs lebih tinggi dari rata-rata kondisi Nasional dan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana pada tahun 2020 rata-rata APM SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara sebesar 84,35 sedangkan capaian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 74,42 dan rata-rata Nasional sebesar 80,12 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini.



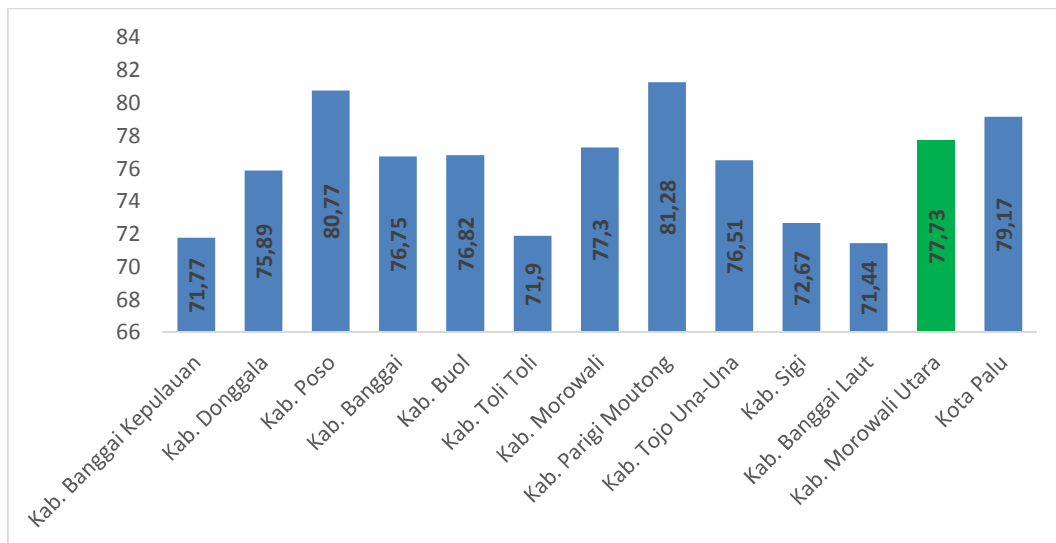
Tabel 2.34
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs					
Morowali Utara	85,13	83,42	85,5	84,55	84,35
Sulawesi Tengah	71,25	72,16	73,2	73,82	74,42
Nasional	81,01	76,29	75,57	77,21	80,12

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Selanjutnya di capaian APM jenjang pendidikan SMP/MTs seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa Kabu-paten Morowali Utara berada pada urutan keempat. Sedangkan yang tertinggi Kabupaten Parigi Moutong 81,29; Kabupaten Poso sebesar 80,77; dan Kota Palu sebesar 79,17. Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 terdapat pada Gambar 2.43.

Gambar 2.43
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (Diolah Kembali)

• **Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA**

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/SMK/MA (APM SMA/SMK/MA) merupakan persentase siswa dengan usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA diperbandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 16-18 tahun di Kabupaten Morowali Utara.

Kondisi APM pendidikan menengah atau SMA/SMK/MA di Kabupaten Morowali Utara dalam periode tahun 2016 s/d tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tampilan gambar berikut ini. Dimana pada tahun 2016 APM SMA/SMK/MA sebesar 72,93; pada tahun 2017 menurun menjadi 68,65; tahun 2018 meningkat menjadi 71,15



hingga tahun 2020 mencapai angka 70,29 seperti yang disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.44
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MTs
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Kondisi capaian APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA juga lebih tinggi dari rata-rata kondisi Nasional dan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana, Tahun 2020 rata-rata APM SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara sebesar 70,29, sedangkan capaian Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 65,02 dan rata-rata nasional sebesar 61,25 yang ditampilkan pada Tabel 2.35 sebagai berikut.

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2020

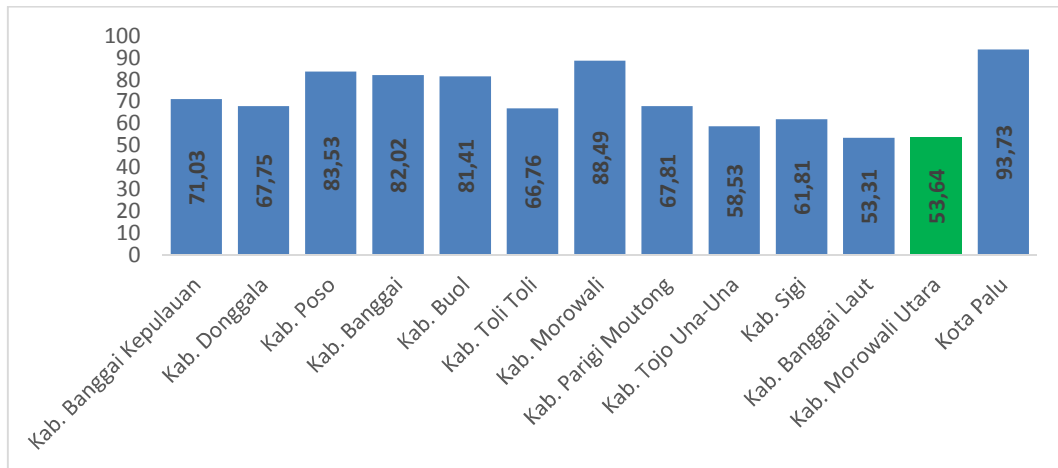
Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SMA/SMK/MA					
Morowali Utara	72,93	68,65	71,15	76,88	70,29
Sulawesi Tengah	63,61	63,8	64,25	64,66	65,02
Nasional	59,1	61,2	67,14	70,99	61,25

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Selanjutnya dari 13 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, capaian Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan ke-12. Dimana, tertinggi Kota Palu sebesar 93,73 dan Kabupaten Banggai sebesar 90,05. Data APM SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 2.45 sebagai berikut.



Gambar 2.45
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 (Diolah Kembali)

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi menurut jenjang pendidikan adalah ukuran banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan. Untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi/kesempatan/daya serap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SLTP serta pendidikan menengah, angka partisipasi sekolah merupakan indikator yang baik.

APS pada berbagai jenjang pendidikan menunjukkan proporsi penduduk usia tertentu dan sesuai dengan usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tersebut. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu.

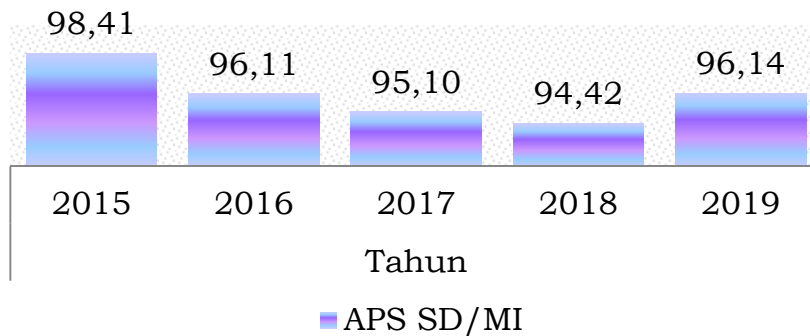
APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok-kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

• Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI

Angka partisipasi sekolah SD/MI sudah cukup tinggi, namun perkembangan dalam 5 tahun terakhir cenderung berfluktuatif dan menurun. Pada tahun 2015 APS SD/MI sebesar 98,41, menurun hingga tahun 2018 menjadi 94,42. Namun pada tahun 2019 APS jenjang pendidikan SD/MI meningkat menjadi 96,14. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.46
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

APS jenjang pendidikan SD/MI Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan rata-rata capaian Nasional yang ter dapat dilihat pada Tabel 2.36 sebagai berikut.

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI					
Morowali Utara	98,41	96,11	95,10	94,42	96,14
Sulawesi Tengah	98,02	98,00	98,15	98,24	98,40
Nasional	99,09	99,09	99,14	99,22	99,24

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

• **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs**

APS SMP/MTs kurun Tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2015, APS SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara sebesar 90,46 persen, meningkat Tahun 2018 menjadi sebesar 96,35 persen.

Gambar 2.47
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)



Namun, pada Tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 95,08 persen yang ditampilkan pada Gambar 2.47.

Selanjutnya untuk perbandingan dengan kondisi capaian Provinsi Sulawesi Tengah dan rata-rata Nasional. Pada Tahun 2019 APS SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 93,01, namun lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 95,51 persen yang terdapat pada Tabel 2.37 sebagai berikut.

Tabel 2.37
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019

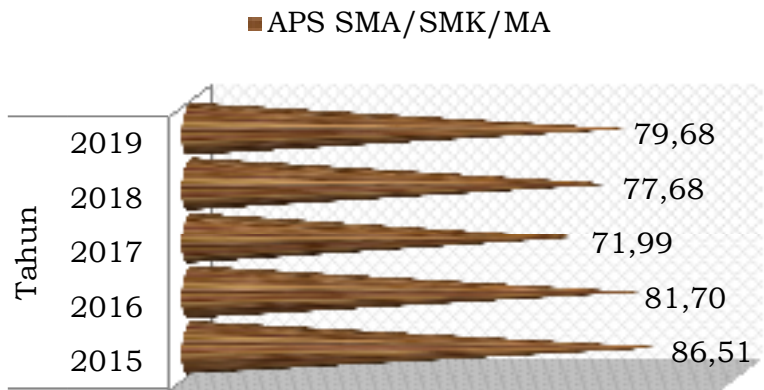
Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SMP/MTs					
Morowali Utara	90,46	94,98	95,27	96,35	95,08
Sulawesi Tengah	91,80	92,08	92,41	92,74	93,01
Nasional	94,72	94,88	95,08	95,36	95,51

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

• **Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA**

APS SMK/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan periode Tahun 2015-2019. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi yang penduduk usia 15-18 Tahun makin menurun. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut terjadi, mulai dari sarana, aksesibilitas yang muda dan faktor lainnya. Pada Tahun 2015 APS SMA/SMK/MA sebesar 86,51 persen menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 79,68 persen. Data APS SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Gambar 2.48.

Gambar 2.48
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)



Capaian APS jenjang pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dari rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 97,29, namun capaian tersebut masih tinggi dari rata-rata Nasional sebesar 72,3 persen. Data perbandingan APS SMA/SMK/MA di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional yang terdapat pada Tabel 2.38 sebagai berikut.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SMA/SMK/MA					
Morowali Utara	86,51	81,70	71,99	77,68	79,68
Sulawesi Tengah	96,44	96,60	96,86	97,05	97,29
Nasional	70,61	70,83	71,42	71,99	72,36

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

d) Angka Putus Sekolah

Putus sekolah menjadi masalah yang cukup serius karena ironis dengan usaha pemerintah yang gencar untuk memajukan pendidikan nasional. Putus sekolah merupakan jurang yang menghambat anak untuk mendapatkan haknya. Putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi, psikologis, serta lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Mayoritas anak-anak yang mengalami putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi, namun tidak sedikit pula putus sekolah yang disebabkan karena faktor psikologis dan lingkungan sosial.

Siswa yang putus sekolah masih terjadi di Kabupaten Morowali Utara, untuk jenjang pendidikan SD/MI periode Tahun 2015-2018 tidak ada siswa yang putus sekolah, namun pada Tahun 2019 terdapat sebesar 2,95 persen siswa yang putus sekolah. Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah mengalami penurunan. Pada Tahun 2015 jenjang pendidikan SMP/MTs angka putus sekolah sebesar 9,54 persen, menurun hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 4,92 persen. Untuk siswa SMA/SMK/MA yang putus sekolah cenderung meningkat dalam 5 (lima) Tahun terakhir. Pada Tahun 2015 sebesar 13,49 persen, meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar 19,18 persen terdapat pada Tabel 2.39 sebagai berikut.



Tabel 2.39
Angka Putus Sekolah Semua Jenjang Pendidikan
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	0	0	0	0	2,95
SMP/MTs	9,54	2,56	4,73	1,83	4,92
SMA/SMK/MA	13,49	17,08	25,45	22,32	19,18

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

e) Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan satu indikator yang menjelaskan dampak yang dicapai atau hasil yang diraih dalam proses belajar mengajar. Angka kelulusan sebagai media untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan proses belajar mengajar dalam satu kurun waktu tertentu. Angka kelulusan sebagai tolok ukur untuk melakukan pembenahan atas berbagai elemen yang berdampak pada proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah-sekolah. Data mengenai angka kelulusan untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.40 sebagai berikut.

Tabel 2.40
Angka Kelulusan semua Jenjang Pendidikan
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2015-2019

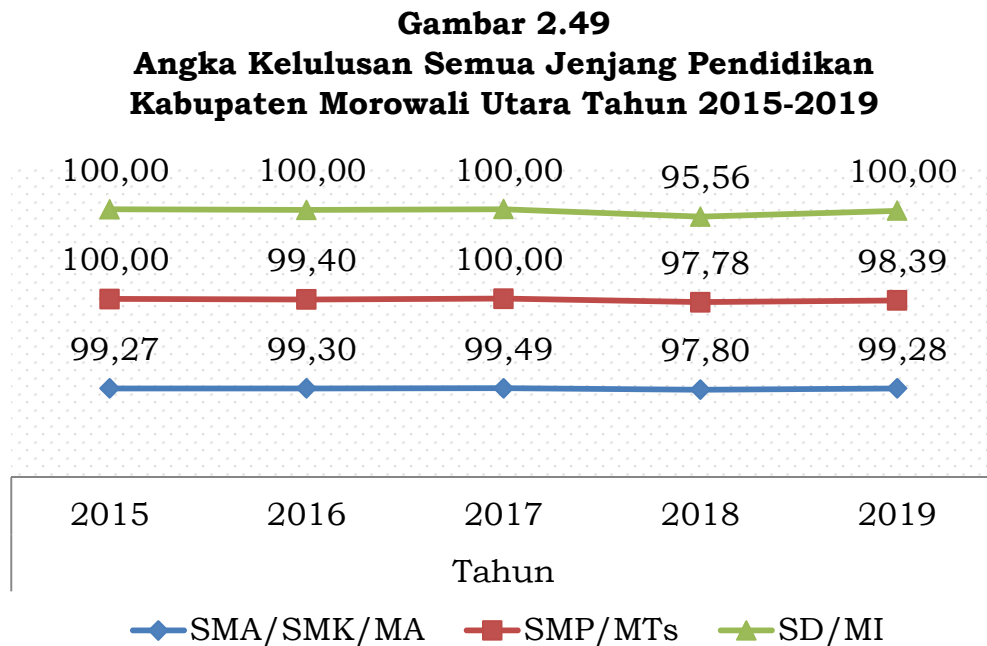
Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	100,00	100,00	100,00	95,56	100,00
Jumlah Peserta	2.265	2.155	2.292	2.322	2.404
Peserta Lulus	2.265	2.155	2.292	2.219	2.404
SMP/MTs	100,00	99,40	100,00	97,78	98,39
Jumlah Peserta	1.847	1.991	1.968	1.845	1.806
Peserta Lulus	1.847	1.979	1.968	1.804	1.777
SMA/SMK/MA	99,27	99,30	99,49	97,80	99,28
Jumlah Peserta	1.103	1.430	1.169	1.318	1.396
Peserta Lulus	1.095	1.420	1.163	1.289	1.386

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Merujuk pada Tabel 2.40 di atas, persentase kelulusan siswa yang mengikuti ujian nasional di Kabupaten Morowali Utara masuk kategori sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari rata-rata siswa yang lulus di setiap jenjang pendidikan. Untuk jenjang pendidikan SD/MI angka kelulusan diTahun 2019 mencapai 100 persen, untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 98,39 persen, dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 99,28 persen. Data angka



kelulusan untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.49 sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

f) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan (*education facilities*) yang memenuhi standar dan layak menjadi wadah untuk mendidikan siswa-siswi menjadi generasi masa depan yang cerdas, inovatif, kreatif, kompetitif dan berdaya saing. Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Dinas Pendidikan telah meningkatkan pelayanan bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dari PAUD hingga pendidikan menengah. Ketersediaan fasilitas sarana pendidikan menjadi faktor penentu kelancaran proses belajar mengajar pada semua jenjang pendidikan.

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Di tahun 2016 jumlah sekolah SD/MI sebanyak 155 sekolah dan tidak mengalami penambahan pada tahun 2020, yaitu sebanyak 155 sekolah. Kemudian untuk fasilitas sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di tahun 2016 sebanyak 48 sekolah bertambah sebanyak 3 sekolah hingga tahun 2020 menjadi 51 sekolah. Selanjutnya fasilitas pendidikan SMA/SMK/MA baik negeri dan swasta sebanyak 13 sekolah di tahun 2016, juga bertambah sebanyak 10 sekolah menjadi 23 sekolah pada tahun 2020. Perkembangan fasilitas pendidikan di Kabupaten morowali Utara ditampilkan pada tabel 2.41 berikut ini.



Tabel 2.41
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020

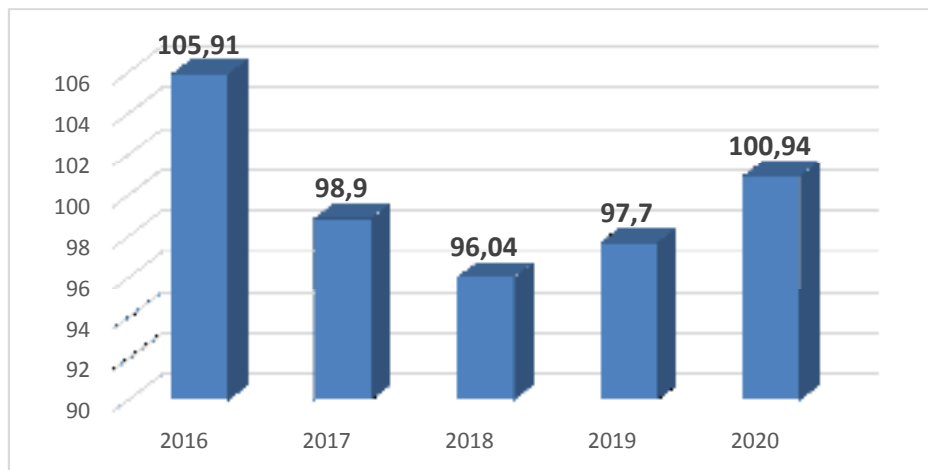
Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	155	152	152	156	155
SMP/MTs	48	48	51	51	51
SMA/SMK/MA	13	13	21	22	23
Total	216	213	224	229	229

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

g) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Gedung ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs yang sesuai dengan jenjang pendidikan dasar. Data mengenai ketersediaan sekolah di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 untuk jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang Pendidikan SMP/MTs disajikan pada Gambar 2.50 sebagai berikut.

Gambar 2.50
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Jumlah sekolah dasar di Kabupaten Morowali Utara hingga Tahun 2020 sebanyak 155 sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dan sebanyak 51 sekolah untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs, sedangkan jumlah Penduduk Usia sekolah pendidikan dasar sebanyak 20.409 jiwa. Sehingga rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar sebesar 100,94. Sebelumnya, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar pada Tahun 2019 sebesar 98,20.



h) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah adalah jumlah ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) Per 10.000 jumlah penduduk usia 16-19 Tahun atau yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Morowali Utara. Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 sebesar 18,53 meningkat hingga tahun 2020 menjadi 44,40. Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2020 disajikan sebagai gambar 2.51 berikut.

Gambar 2.51
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

i) Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa selama periode Tahun 2016-2020 terlihat rasio guru terhadap siswa mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, namun jumlah guru mengajar sejumlah murid belum maksimal. Data rasio guru terhadap murid terdapat pada Tabel 2.42 sebagai berikut.



Tabel 2.42
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Guru	1.958	1.998	1.811	2088	2119
SD/MI	1.351	1.410	1.238	1.360	1.388
SMP/MTs	607	588	573	728	731
Jumlah Murid	19.168	20.223	21.136	21.080	20.409
SD/MI	12.947	14.312	14.551	14.272	13.608
SMP/MTs	6.221	5.911	6.585	6.808	6.801
Rasio	1021,49	987,98	856,83	990,51	1038,27

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Selama kurun waktu tahun 2016-2020 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Morowali Utara untuk jenjang pendidikan dasar, baik SD/MI+SMP/MTs per 10.000 jumlah murid mengalami peningkatan pada tahun 2020 jika dibanding tahun sebelumnya dimana tahun 2020 rasio ketersediaan guru per 10.000 jumlah murid sebesar 1.038,27, angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2016-2019. Dengan semakin bertambahnya jumlah guru diharapkan dapat mencapai mutu pendidikan yang lebih baik..

j) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Selama kurun Tahun 2015-2019, rasio ketersediaan guru di Kabupaten Morowali Utara untuk jenjang pendidikan menengah SMA/MA/SMK per 10.000 jumlah murid bervariasi. Rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada Tahun 2015-2016 mengalami penurunan. Namun, kembali naik pada Tahun 2017 menjadi sebesar 9,47, namun periode Tahun 2018-2019 menurun menjadi sebesar 7,64. Kondisi ketersediaan guru/murid jenjang pendidikan Menengah di Kabupaten Morowali Utara per jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu Tahun 2015-2019 terdapat pada Tabel 2.43 sebagai berikut.

Tabel 2.43
Rasio guru/murid sekolah pendidikan Menengah
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Guru	135	236	343	365	380
Jumlah Murid	2.409	2.424	4.543	4.776	5.180
Rasio	560,40	974,60	755,01	749,85	733,59

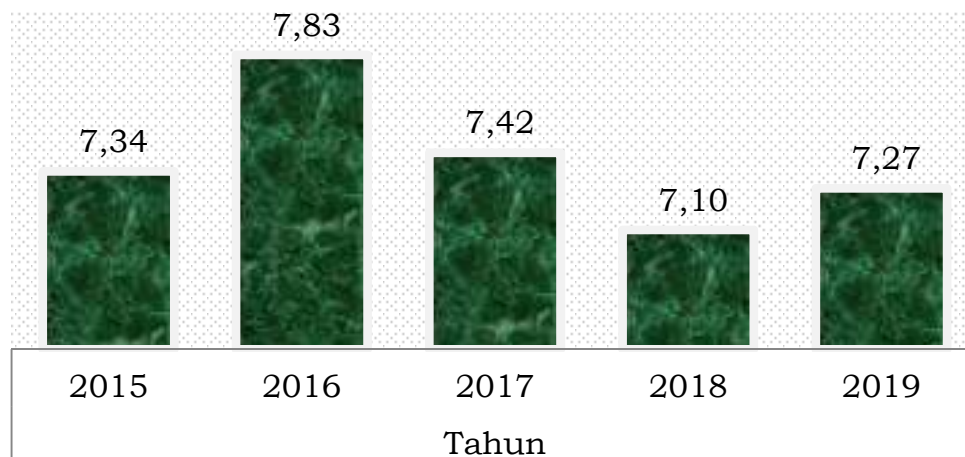
Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



k) Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata jenjang Pendidikan Dasar SD/MI di Kabupaten Morowali Utara merupakan perbandingan antar Guru dengan jumlah murid rata-rata perkelas pada jenjang pendidikan dasar. Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani kelas dalam suatu sekolah. Perkembangan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di Kabupaten Morowali Utara pada jenjang SD/MI, perkembangannya juga naik turun dalam periode Tahun 2015-2019. Kondisi tersebut terlihat dari capaian setiap Tahun. Pada Tahun 2015, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di Kabupaten Morowali Utara pada jenjang SD/MI sebesar 7,34, meningkat Tahun 2016 menjadi sebesar 7,83, namun menurun Tahun 2017 menjadi sebesar 7,42, hingga pada Tahun 2018 menurun menjadi sebesar 7,10 dan pada Tahun 2019 meningkat lagi menjadi sebesar 7,27. Data rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata di Kabupaten Morowali Utara pada jenjang Pendidikan dasar SD/MI disajikan pada Gambar 2.52 sebagai berikut.

Gambar 2.52
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



■ Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

l) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada jenjang pendidikan menengah SMA/MA/SMK di Kabupaten Morowali Utara merupakan perbandingan antar guru dengan jumlah murid rata-rata perkelas pada jenjang pendidikan menengah.

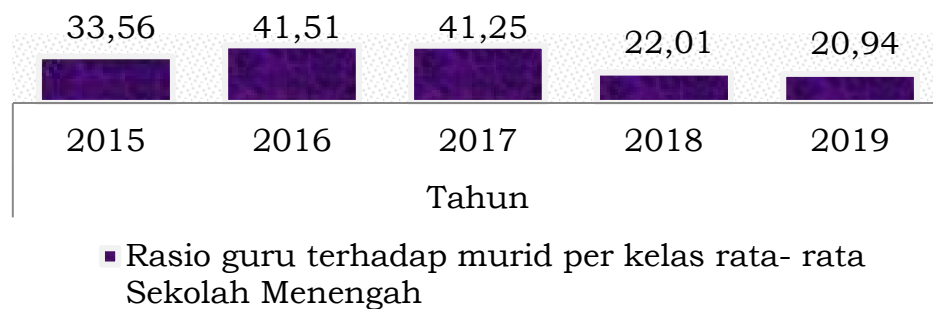
Angka tersebut diperlukan untuk mengetahui rata-rata ketersediaan guru yang dapat melayani kelas dalam suatu jenjang pendidikan. Pada Tahun 2015 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada jenjang pendidikan menengah SMA/MA/SMK di



Kabupaten Morowali Utara sebesar 33,56, meningkat pada Tahun 2016 menjadi sebesar 41,51, namun menurun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 22,01 dan juga kembali menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 20,94. Hal ini menunjukkan perkembangan yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan suasana belajar mengajar yang lebih kondusif di Kabupaten Morowali Utara. Data rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada jenjang pendidikan menengah SMA/MA/SMK di Kabupaten Morowali Utara tersebut terdapat pada Gambar 2.53 sebagai berikut.

Gambar 2.53

Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

m) Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar

Data mengenai Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, ditampilkan pada Gambar 2.54 proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 dimana perkembangan yang berfluktuatif. Pada Tahun 2015 sebesar 97,81 persen, kemudian menurun pada Tahun 2016 menjadi sebesar 91,01. Hingga Tahun 2019, meningkat menjadi sebesar 95,19 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat siswa pada jenjang pendidikan dasar yang berhenti dan tidak menyelesaikan sekolah hingga tamat.

Gambar 2.54

Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

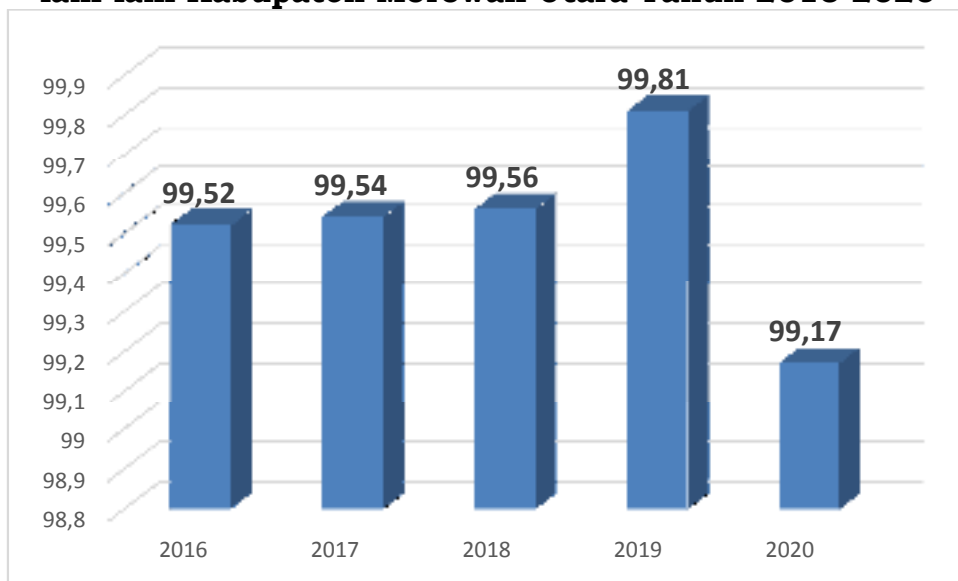


n) Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki

Penduduk usia 15-24 Tahun merupakan usia produktif dan kemampuan untuk membaca dan menulis menjadi wajib untuk dimiliki. Pada Tahun 2016 angka melek huruf penduduk usia 15-24 Tahun, perempuan dan laki-laki Kabupaten Morowali Utara sebesar 99,52 persen kemudian meningkat hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 99,81 persen, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,64 persen menjadi sebesar 99,17 persen yang selengkapnya ditampilkan pada Gambar 2.55 sebagai berikut.

Gambar 2.55

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 Tahun, perempuan dan laki-laki Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

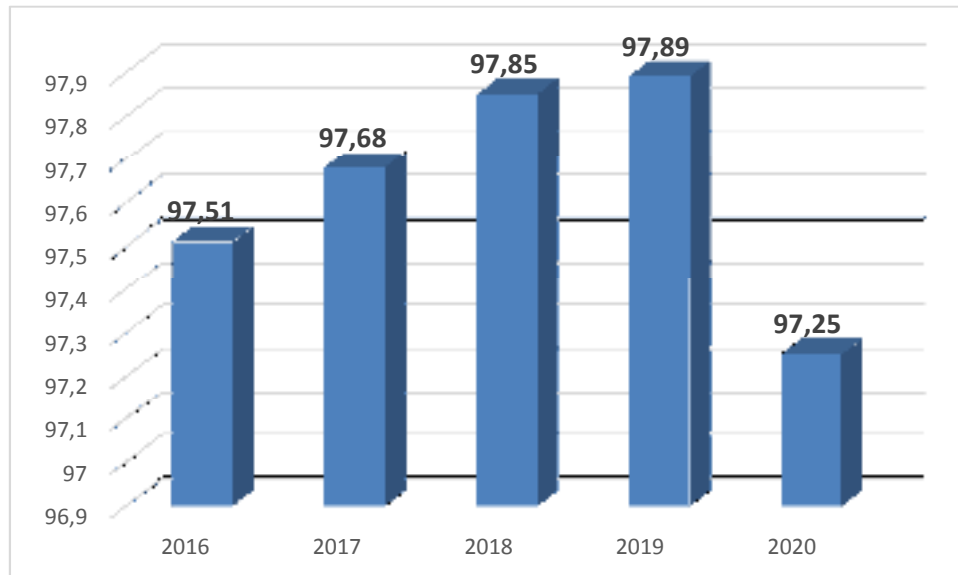
o) Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Penduduk yang berusia >15 Tahun, merupakan usia sekolah tingkat SMA/SMK/MA. Salah satu cara untuk meningkatkan AMH penduduk pada suatu daerah adalah dunia pendidikan. Jika pada usia > 15 Tahun penduduk bersekolah dan masih bersekolah, dapat mengindikasikan AMH penduduk. AMH merupakan refleksi atas partisipasi pendidikan oleh penduduk pada masa lampau. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam membaca dan menulis. Penduduk berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) di Kabupaten Morowali Utara meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2016 penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 97,51 persen, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 97,89 persen. Namun, pada tahun 2020 penduduk berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) mengalami penurunan sebesar 0,64 persen menjadi sebesar 97,25 persen. Data penduduk yang berusia >15 Tahun (tidak buta huruf)



di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 selengkapnya terdapat pada Gambar 2.56 sebagai berikut

Gambar 2.56
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

2.3.1.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator penting, karena dapat menggambarkan tingkat perbaikan kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi termuat pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 (BPS, Meneg Kependudukan/BKKBN, Depkes, DHS; 1997) yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup yang sehat. Peningkatan taraf hidup kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), sedangkan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

Pembangunan bidang kesehatan memegang peran penting dalam menyiapkan generasi mendatang yang inovatif dan kreatif. Tanpa pembangunan bidang kesehatan yang baik, tidak mungkin dapat menghasilkan sumberdaya yang andal dan berkualitas. Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara hingga Tahun 2020 terus menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi umum pembangunan kesehatan dapat dilihat melalui kondisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar masyarakat sebagai berikut.

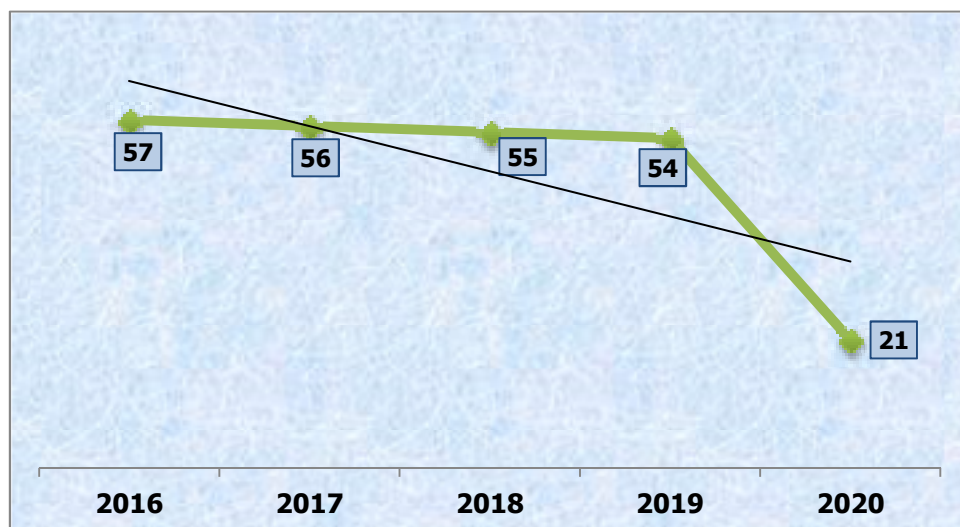


a) Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 Tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu, atau sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Penyebab utama dari kematian bayi adalah asfiksia kelahiran, pneumonia, komplikasi kelahiran infeksi neonatal, diare, malaria, campak dan malagizi. Beberapa faktor berkontribusi pada kema-tian bayi seperti tingkat pendidikan ibu, kondisi lingkungan, dan infra-struktur politik, dan pengobatan. Menyediakan sanitasi, akses air minum bersih, imunisasi melawan penyakit infeksi, dan langkah-langkah kesehatan publik lainnya dapat membantu mengurangi tingkat kematian bayi.

AKB Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016, AKB per 1000 kelahiran hidup sebanyak 57 kasus dan hingga tahun 2020 berkurang menjadi 21 kasus. Data AKB per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Gambar 2.57 sebagai berikut.

Gambar 2.57
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Hidup
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

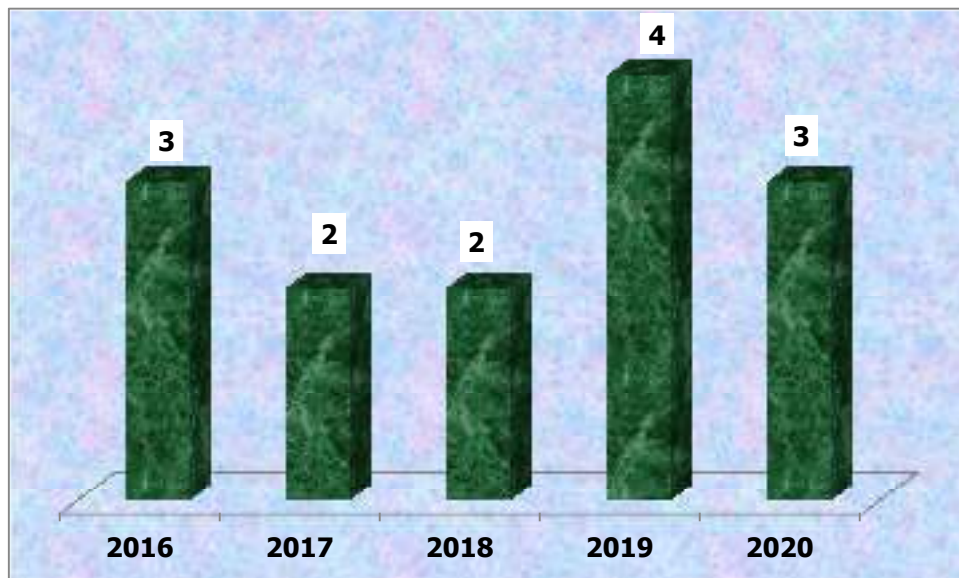
b) Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Penyebab kematian ibu terjadi saat melahirkan atau pasca melahirkan. Sebesar 75 persen kasus kematian ibu diakibatkan oleh perdarahan, infeksi, atau tekanan darah tinggi saat kehamilan. Persalinan aborsi yang tidak aman pun jadi penyebab dan sisanya disebabkan penyakit seperti malaria, jantung atau diabetes. Kasus AKI menunjukan akses dan pelayanan kesehatan yang terdapat di suatu daerah belum maksimal dan masih perlu perbaikan dan fokus stakeholders terkait. Pada Tahun 2016 Kabupaten Morowali Utara memiliki kasus AKI sebanyak 3 per 100.000 kelahiran hidup, tahun



2019 meningkat menjadi 4 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 sebanyak 3 kasus. Data AKI per 100.000 kelahiran hidup terdapat pada Gambar 2.58 sebagai berikut.

Gambar 2.58
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

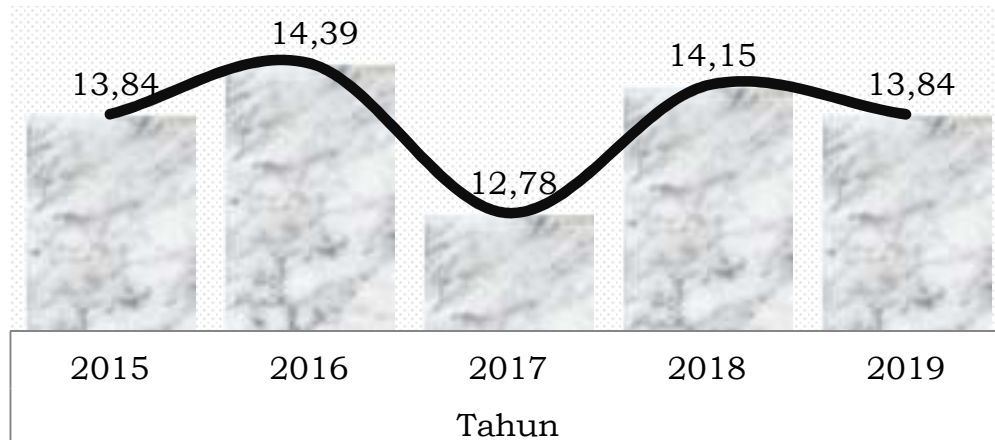
c) Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi: peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta), serta perlindungan anak. Fakta empiris di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB. Kehadiran posyandu mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan, penimbangan balita, konsultasi gizi dan konsultasi kesehatan. Data rasio ketersediaan sarana Posyandu di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.59 sebagai berikut.



Gambar 2.59
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

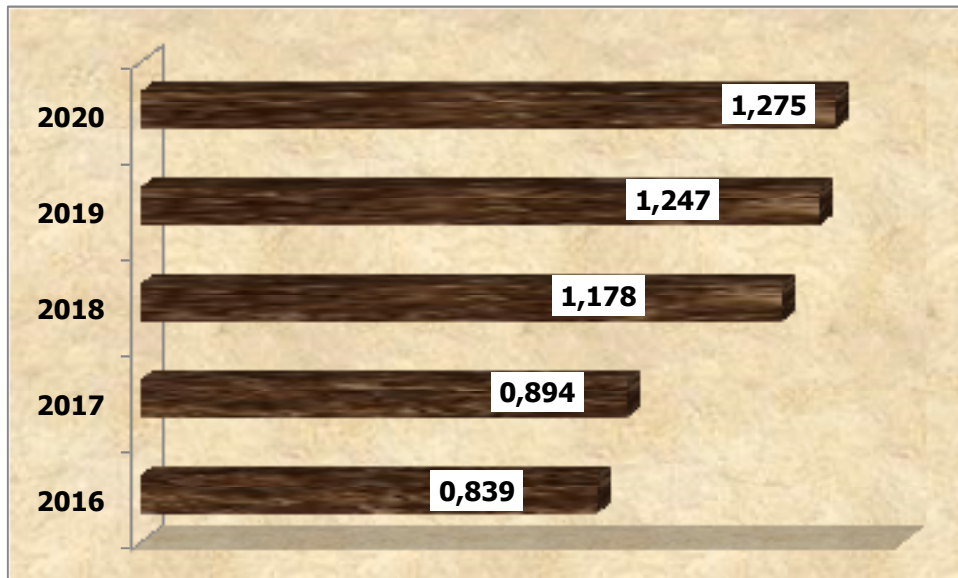
Berdasarkan data pada Gambar 2.59 di atas, rasio Posyandu per satuan balita di Kabupaten Morowali Utara menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Jumlah Posyandu hingga Tahun 2019 sebanyak 183 unit meningkat dari Tahun 2015 sebanyak 180 posyandu. Pada Tahun 2015 rasio Posyandu per satuan balita 13,84, meningkat pada Tahun 2016 sebesar 14,39, menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 12,78. Tahun 2018 kembali meningkat menjadi sebesar 14,15, namun Tahun 2019 sedikit menurun menjadi sebesar 13,84.

d) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, Pustu dan Polindes merupakan sarana pelayanan penunjang layanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu, Polindes maupun poliklinik maka semakin memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan. Data rasio sarana kesehatan terhadap penduduk di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.60 sebagai berikut.



Gambar 2.60
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Merujuk pada data Gambar 2.60 di atas, rasio sarana kesehatan (Puskesmas, Poliklinik, Pustu) per satuan penduduk mengalami peningkatan periode Tahun 2016-2020. Pada Tahun 2016 sebesar 0,839 meningkat hingga Tahun 2020 menjadi sebesar 1,275. Data rasio puskesmas, poliklinik dan pustu terdapat pada Tabel 2.44 sebagai berikut ini.

Tabel 2.44
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Puskesmas	13	13	13	14	14
Poliklinik	2	4	2	3	3
Polindes/Pustu	86	93	134	143	137
Total Sarana Kesehatan	101	110	148	160	154
Jumlah Penduduk	120.322	122.985	125.624	128.323	120.789
Rasio Puskesmas	0,108	0,106	0,096	0,109	0,116
Poliklinik	0,017	0,033	0,016	0,023	0,025
Polindes/Pustu	0,715	0,756	1,067	1,114	1,134
Rasio Sarana Kesehatan	0,839	0,894	1,178	1,247	1,275

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

e) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggara-rakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berke-sinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah



ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2020 memiliki 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah. Rumah Sakit ini adalah Rumah Sakit kelas C. Data rasio ketersediaan Rumah sakit per penduduk periode Tahun 2016-2020 tersaji pada Tabel 2.45 sebagai berikut.

Tabel 2.45
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	120.322	122.985	125.624	128.323	120.789
Rasio	0,0083	0,0081	0,0080	0,0078	0,0083

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Tabel 2.45 di atas menunjukkan cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 mencapai 0,0083. Artinya bahwa untuk 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2016 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,0083. Angka tersebut cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 0,0078 per 1.000 penduduk, namun tahun 2020 kembali mencapai angka 0,0083. Meskipun Rasio ketersediaan Rumah Sakit Umum per penduduk di Kabupaten Morowali Utara masih rendah, namun diimbangi dengan adanya fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Morowali Utara sehingga dapat merata dan terjangkau masyarakat secara lebih luas.

f) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan dokter terhadap penduduk suatu daerah. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, dimana kondisi idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Berbicara mengenai kesehatan suatu daerah tentu tak lepas dari berapa jumlah tenaga dokter yang tersedia di daerah tersebut. Semakin banyak tenaga dokter yang tersedia maka bisa dipastikan kebutuhan akan pengobatan semakin mudah dipenuhi. Untuk tahun 2020 jumlah dokter yang ada di Kabupaten Morowali Utara adalah 74 orang, dimana dokter umum ada 46 orang, dokter spesialis 14 orang dan dokter gigi 14 orang. Tabel 2.46 berikut menggambarkan secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu tahun 2016-2020.



Tabel 2.46
Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter	33	51	46	56	74
Jumlah Penduduk	120.322	122.985	125.624	128.323	120.789
Rasio	0,27	0,41	0,37	0,44	0,61

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Data pada Tabel 2.46 di atas, menunjukkan rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2020 mencapai 0,61. Hal ini berarti dari 1.000 jiwa penduduk Kabupaten Morowali Utara dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,41. Secara rata-rata 1 (satu) dokter di wilayah Morowali Utara melayani 1.610 jiwa.

g) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan tenaga dokter juga dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis. Rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Morowali Utara dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pula ketersediaan sumberdaya kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Data terkait ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Morowali Utara dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut.

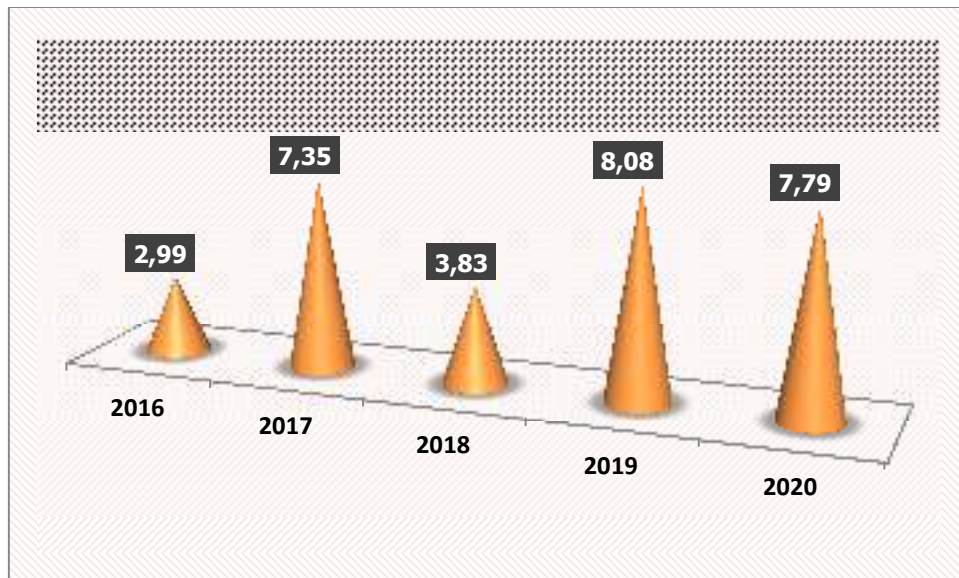
Tabel 2.47
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Morowali
Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Keperawatan	155	310	147	256	327
Tenaga Kebidanan	111	357	206	274	351
Tenaga Kefarmasian	9	10	19	61	64
Tenaga Kesehatan Lainnya	85	227	109	446	199
Total Tenaga Kesehatan	360	904	481	1037	941
Jumlah Penduduk	120.322	122.985	125.624	128.323	120.789
Rasio	2,99	7,35	3,83	8,08	7,79

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



Gambar 2.61
Rasio Tenaga Medis Per Satuan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

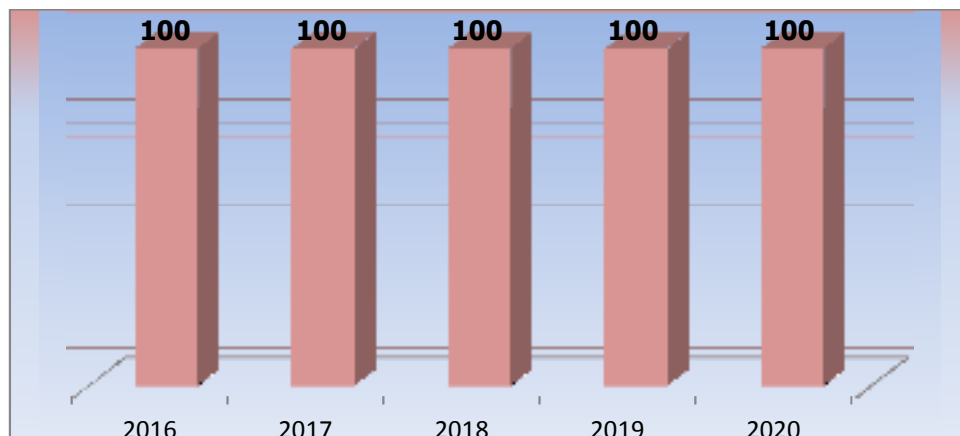
Pada tahun 2020, secara umum rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Morowali Utara mencapai 8,14. Ini berarti bahwa tersedia 8 (delapan) tenaga medis untuk melayani setiap 1.000 penduduk. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 8,46. Secara statistik, rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedis pada masing-masing Kecamatan sudah makin merata. Perbedaan antar Kecamatan dipandang tidak signifikan, karena ada beberapa Kecamatan yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang sulit sehingga memiliki aksesibilitas yang rendah terhadap tenaga medis.

h) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan Kesehatan balita. Untuk perawatan yang menyeluruh dan tuntas diperlukan dalam menyembuhkan balita yang mengalami kasus tersebut. Balita terdeteksi mengalami gizi diberikan pelayanan dan perawatan kesehatan serta diberikan asupan gizi yang baik. Sehingga, cakupan pelayanan gizi buruk di Kabupaten Morowali Utara sudah mencapai 100 persen yang terdapat pada Gambar 2.62.



Gambar 2.62
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

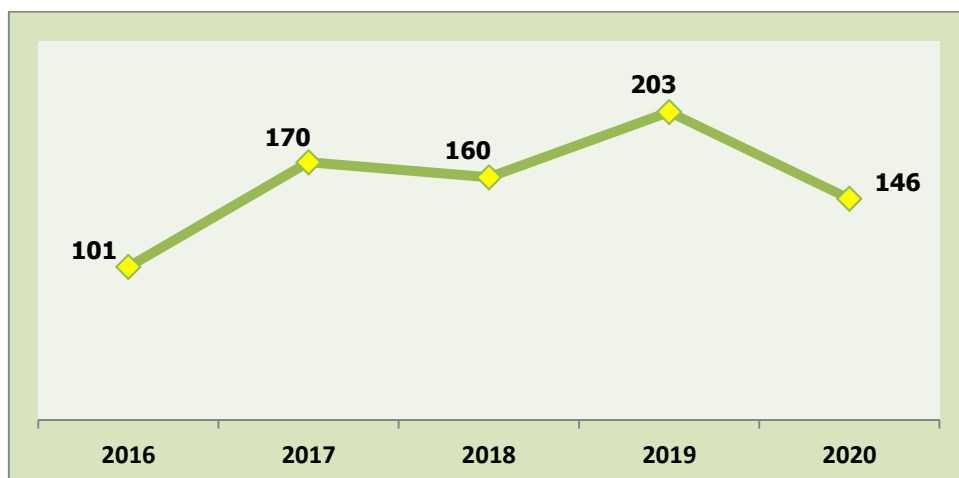


Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

i) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Data yang disajikan pada indikator ini yakni temuan terhadap jumlah kasus/penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan dalam 5 (lima) Tahun terakhir. Pada 2016 sebanyak 101 kasus penderita, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi 146 kasus penderita atau naik sebesar 44,55 persen selengkapnya ditampilkan pada Gambar 2.63 berikut.

Gambar 2.63
Jumlah penderita penyakit TBC BTA
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

j) Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

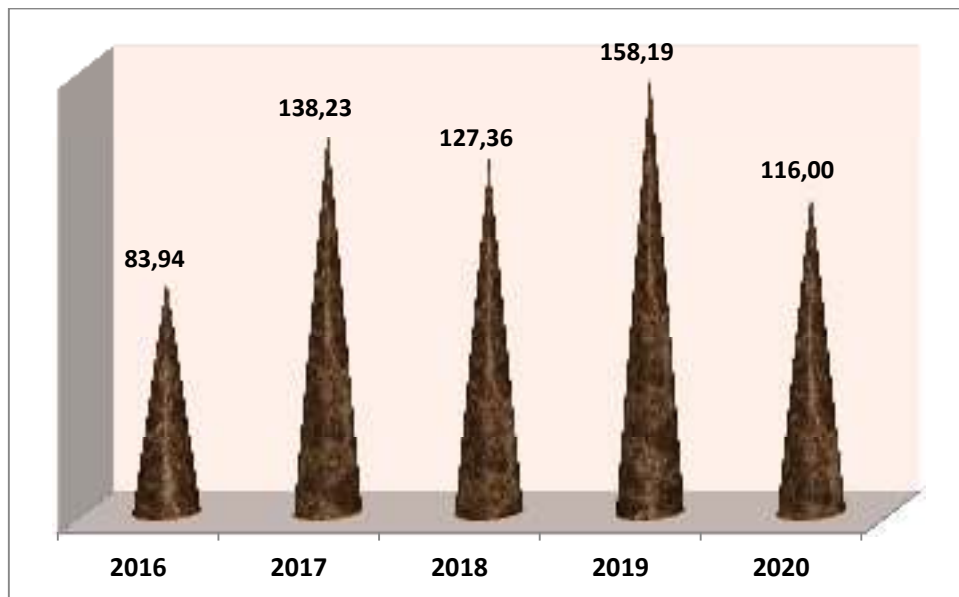
Seiring meningkatnya kasus penderita Tuberkulosis di Kabupaten Morowali Utara, juga meningkatkan tingkat prevalensi



Tuberkulosis (per 100.000 penduduk). Dimana, prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016 sebesar 83,94 kemudian meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 138,23 dan Tahun 2020 sebesar 116 seperti yang terdapat pada Gambar 2.64 berikut.

Gambar 2.64

**Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020**



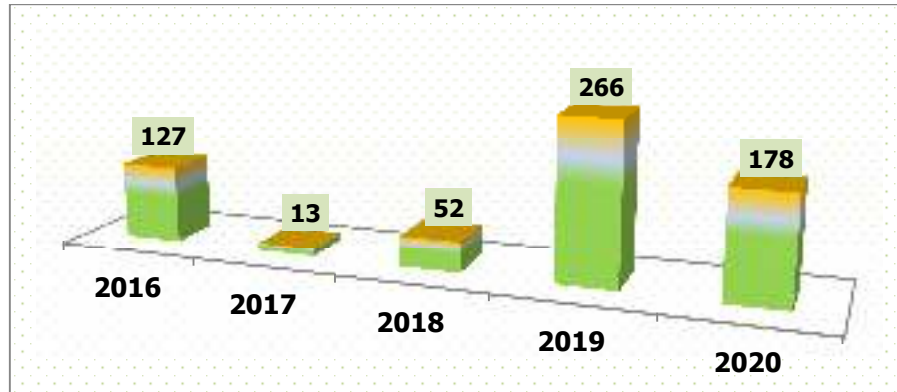
Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara (Diolah Kembali)

k) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD di Kabupaten Morowali Utara tergolong besar dimana tahun 2016 terdapat kasus DBD sebanyak 127 kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2018, yaitu sebanyak 52 kasus. Namun, tahun 2019 kembali meningkat tinggi menjadi 266 kasus dan tahun 2020 sebanyak 178 kasus penderita DBD. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 selengkapnya terdapat pada Gambar 2.65 sebagai berikut.



Gambar 2.65
Jumlah penderita penyakit DBD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

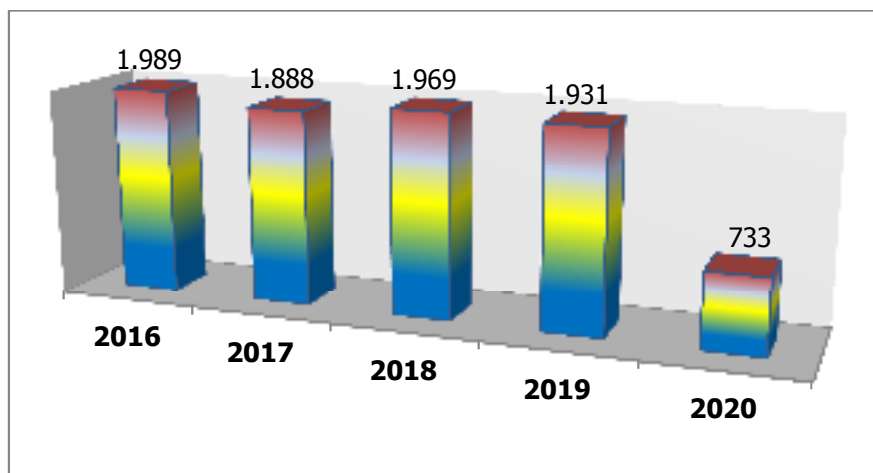


Sumber: BPS, 2021; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara (Diolah Kembali)

l) Penderita diare yang ditangani

Jumlah penderita diare di Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan dimana tahun 2016 jumlah penderita sebanyak 1.989 orang menurun hingga tahun 2020 menjadi 733 kasus. Jumlah penderita diare untuk periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.66 sebagai berikut.

Gambar 2.66
Jumlah Penderita Diare
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



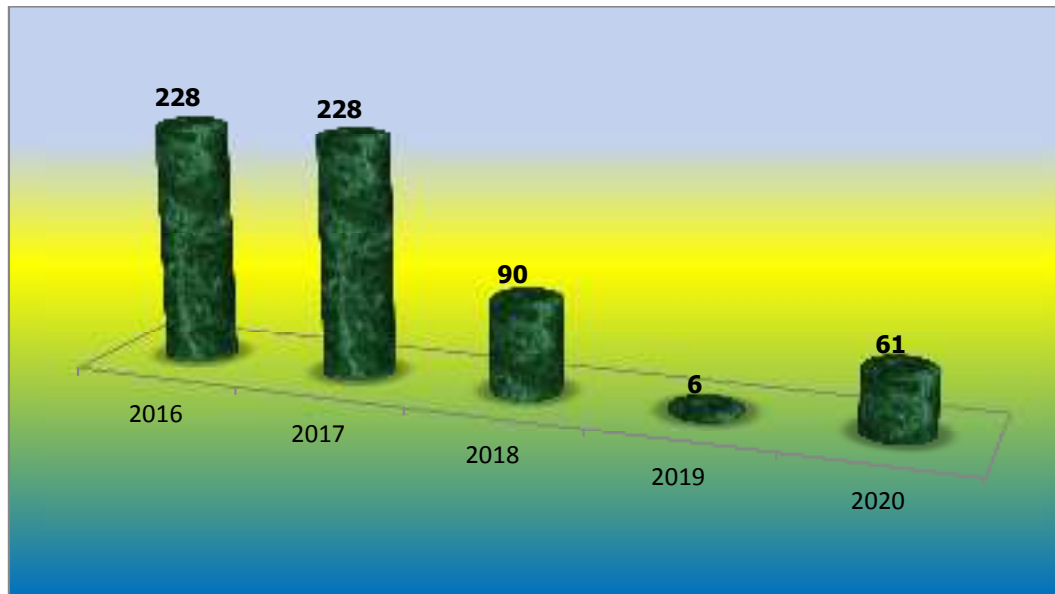
Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

m) Angka Kejadian Malaria

Jumlah penderita malaria di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dimana tahun 2016 sebanyak 228 kasus menjadi 61 kasus pada tahun 2020 seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.67 sebagai berikut.



Gambar 2.67
Jumlah Kejadian Malaria
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



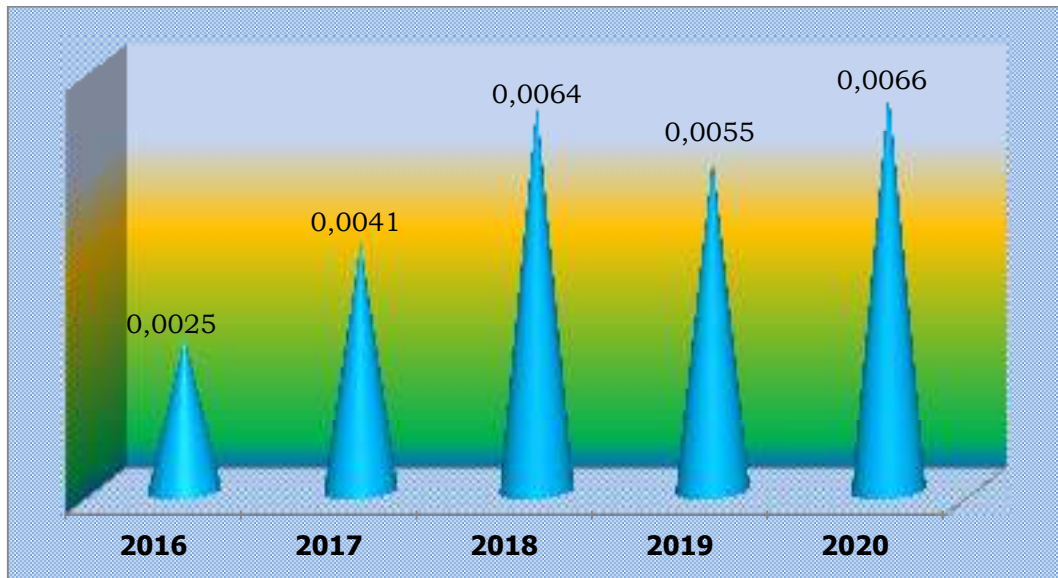
Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

n) Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

HIV/AIDS mendapatkan perhatian dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) tertuang pada tujuan ketiga. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus HIV/AIDS yang tinggi di dunia. Hal ini menyebabkan HIV/AIDS tetap sebagai beban kesehatan masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Morowali Utara hingga tahun 2020 sebanyak 8 orang dengan tingkat prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi pada tahun 2020 sebesar 0,0066. Data prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi penduduk di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.68 sebagai berikut.



Gambar 2.68
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

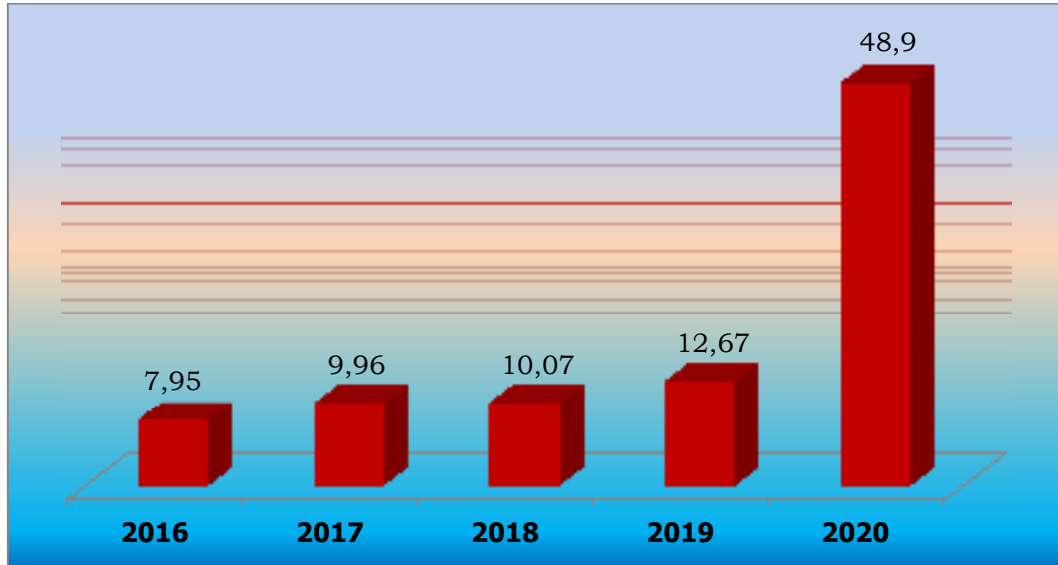
o) Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Remaja merupakan kelompok berisiko tinggi untuk terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS oleh karena itu, pengetahuan yang baik tentang penyakit HIV/AIDS akan membantu remaja untuk melakukan upaya pencegahan dan menjauhi untuk tertular. Tingginya perilaku berisiko pada remaja yang ditunjukkan dalam data-data merupakan *resultante* dari sifat khas remaja, pengetahuan remaja tentang kesehatan, nilai moral yang dianut serta ada atau tidaknya kondisi lingkungan yang kondusif.

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS pada Tahun 2016 sebesar 7,95 persen meningkat hingga tahun 2019 menjadi sebesar 12,67 persen. Kondisi ini juga terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 dengan capaian 48,9 persen. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS terdapat pada Gambar 2.69 berikut.



Gambar 2.69
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 Tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

p) Cakupan Puskesmas

Gambaran lain mengenai akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan adalah tersedianya Puskesmas yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah Kecamatan. Semakin tinggi tingkat ketersediaan Puskemas, maka semakin tinggi pula tingkat jangkauan layanan puskesmas terhadap masyarakat. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 mencapai 140,00 persen meningkat dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan ketersediaan Puskesmas di Kabupaten Morowali Utara sudah cukup baik, bahkan terdapat Kecamatan yang memiliki lebih dari satu Puskesmas. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.48 sebagai berikut.



Tabel 2.48
Cakupan Puskesmas Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020

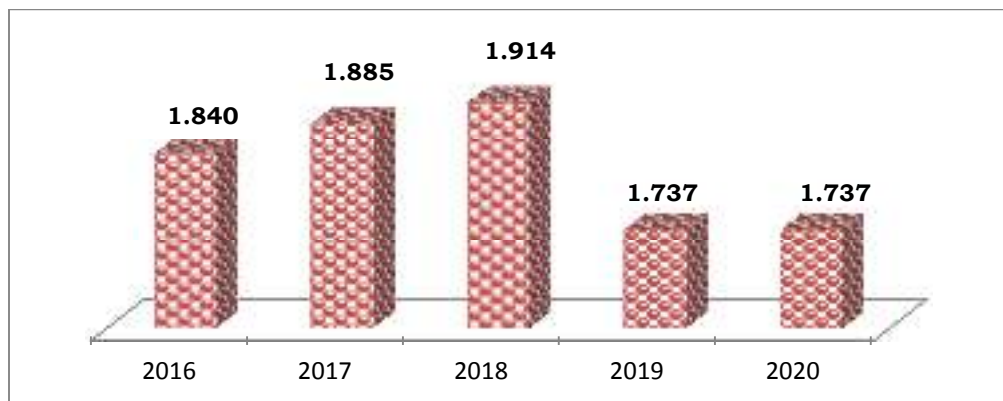
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	13	13	13	14	14
Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10
Cakupan Puskesmas	130	130	130	140	140

Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021
(Diolah Kembali)

q) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Indikator K4 adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil (ANC). K4 adalah indikator untuk melihat frekuensi yang merujuk pada periode trimester saat melakukan pemeriksaan kehamilan. Hal ini dijelaskan juga dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota bahwa salah satu tolok ukur pelayanan kesehatan adalah cakupan kunjungan K4. Jumlah kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016 sebanyak 1.840 kunjungan. Menurun hingga Tahun 2020 menjadi sebanyak 1.737 kunjungan seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.70 sebagai berikut.

Gambar 2.70
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020; Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021
(Diolah Kembali)

r) Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Balita

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan, dan baru nampak saat anak berusia dua Tahun. Balita pendek (*stunting*) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U, atau TB/U



dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada pada ambang batas (Z-Score) <-2 SD sampai dengan -3 SD (pendek/*stunted*) dan <-3 SD (sangat pendek/*severely stunted*).

Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan *catch-up growth* (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah *stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Data prevalensi *stunting* di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.71 sebagai berikut.

Gambar 2.71
Prevalensi Stunting
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Daerah Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali)

Berdasarkan Gambar 2.71 di atas, dapat diketahui angka prevalensi *stunting* mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 angka prevalensi *stunting* sebesar 20,30 persen, menurun pada tahun 2017 menjadi sebesar 18,70 persen. Pada tahun 2018 angka prevalensi *stunting* meningkat signifikan menjadi sebesar 26,00 persen. Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi sebesar 17,00 persen dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 17,40 persen. Angka ini masih cukup tinggi, sehingga diperlukan kerja seluruh unsur pemerintah daerah untuk fokus pada penyelesaian masalah ini.



2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

A.1. PU Bina Marga

1) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Jaringan jalan yang baik, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maupun terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal fisik (*physical capital*) bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan optimalisasi potensi sumber daya alam (*natural resources*), sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) serta sumber daya modal (*capital resources*) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana pada tahun 2020 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 52,54 Km, data tersebut sangat jauh jika dibanding pada tahun 2019 yang mencapai 328,65 Km. Data proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu Tahun 2015-2020 terdapat pada Tabel 2.49 sebagai berikut.

Tabel 2.49
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2020

Kondisi Jalan	Tahun		
	2018	2019	2020
Panjang (km)	938,76	938,76	938,76
Jenis Permukaan (km)			
Aspal (km)	133,12	149,23	146,03
Kerikil (km)	805,64	789,55	723,17
Tanah (km)	3.344,35		
Tidak dirinci (km)	-	-	69,56
Jumlah Total	938,76	938,76	938,76
Kondisi (km)			



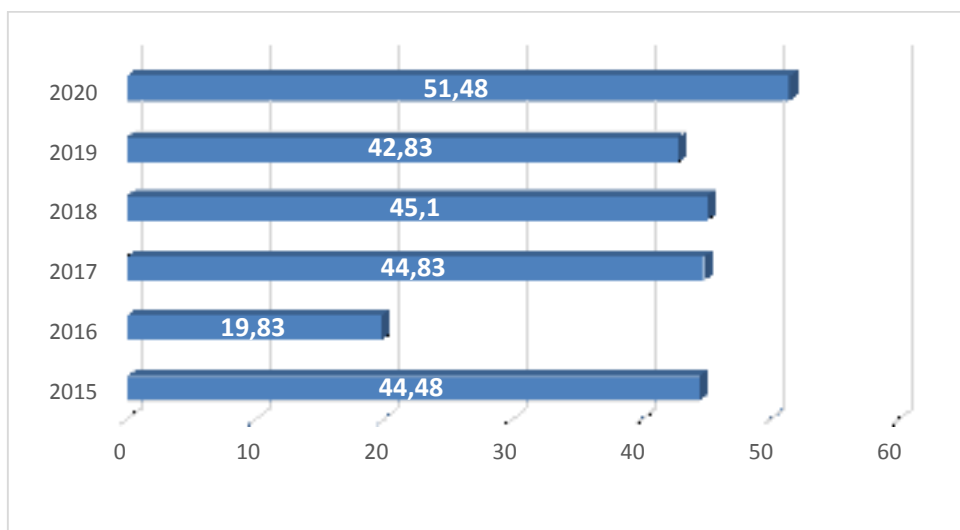
Kondisi Jalan	Tahun		
	2018	2019	2020
Baik (km)	281,54	328,65	52,54
Sedang (km)	45,24	73,46	430,77
Rusak (km)	105,66	82,8	296,61
Rusak Berat (km)	506,32	453,85	158,84
Jumlah Total	938,76	938,76	938,76

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Sementara Kinerja jaringan jalan berdasarkan tingkat kemantapan, jalan dikategorikan dengan jalan mantap dan tidak mantap. Jalan mantap terdiri jalan dengan kondisi baik dan sedang, jalan tidak mantap terdiri dari jalan kondisi rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2015 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 409,88 Km atau 44,84 persen dari panjang jalan keseluruhan 921,39 Km, data menurun sangat signifikan Tahun 2016 menjadi sebesar 19,06 persen atau sepanjang 181,13 Km dari panjang jalan 950,30 Km. Tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi baik mengalami peningkatan menjadi sebesar 42,83 persen, dan tahun 2020 sebesar 51,48 persen dari total Panjang jalan 938,78 km. Data proporsi panjang jalan mantap dan tidak mantap di Kabupaten Morowali Utara selama kurun waktu Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.7 sebagai berikut

Gambar 2.72

Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



2) Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk

Rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kabupaten Morowali Utara masih sangat rendah. Rasio panjang jalan per satuan penduduk Tahun 2015 sebesar 0,008. Dimana panjang jalan sebesar 921,39 dan jumlah penduduk sebesar 117.670 jiwa. Meningkat hingga Tahun 2019 menjadi menjadi 0,0101 dengan panjang jalan 1.292,09 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 128.323 jiwa, dan tahun 2020 meningkat menjadi 0.08 dengan Panjang jalan 938,78 dan jumlah penduduk sebanyak 120.789 jiwa yang tersaji pada Tabel 2.50 sebagai berikut.

Tabel 2.50

**Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020**

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan keseluruhan	921.39	950.30	1,331.53	1,292.00	938.78	938.78
Jumlah Penduduk	117,670	120,322	122,985	125,624	128,323	120,789
Rasio	0.008	0.008	0.011	0.010	0.007	0.008

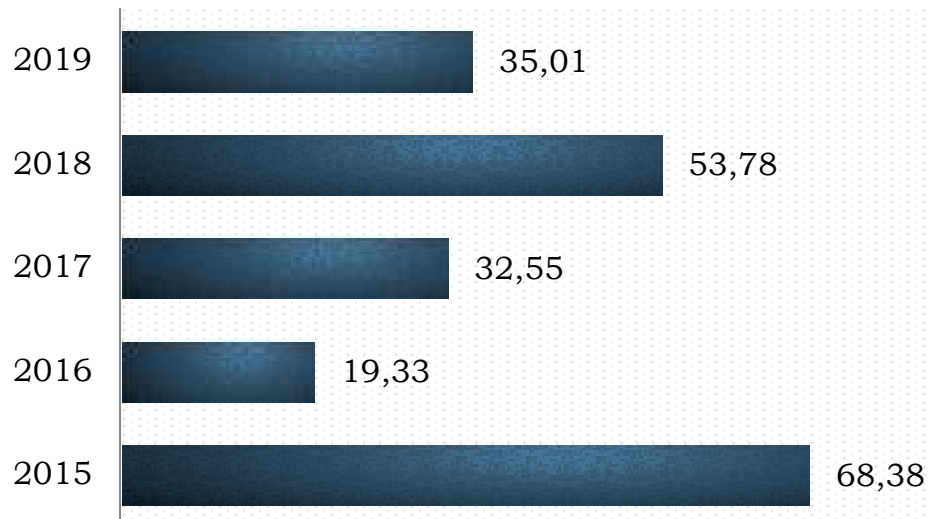
Sumber: BPS, 2021(Diolah Kembali)

3) Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Panjang jalan Kabupaten merupakan sarana jalan yang dibangun sendiri, dan dipelihara sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan kemampuan daerah Kabupaten, untuk meningkatkan ketersediaan sarana jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah-wilayah terpencil dan membuka daerah terisolasi, serta untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah (kecama-tan dan desa). Semakin panjang jalan Kabupaten semakin tinggi tingkat konektivitas antar wilayah, atau sebaliknya semakin pendek jalan Kabupaten semakin rendah tingkat konektivitas antar wilayah di daerah setempat. Semakin panjang jalan dilalui kendaraan roda empat, menunjukkan semakin luas daya jangkauan kendaraan roda empat melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin pendek jalan yang dilalui kendaraan roda empat, menunjukkan semakin pendek daya jangkauan kendaraan roda empat melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Data Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) di Kabupaten Morowali Utara selama kurun Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.73 sebagai berikut.



Gambar 2.73
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Berdasarkan data pada Gambar 2.83 di atas, persentase jalan kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) mengalami penurunan dalam periode tahun 2015-2019. Tahun 2015 persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) sebesar 68,38 persen, menurun tajam pada Tahun 2019 menjadi sebesar 35,01 persen.

A.2. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

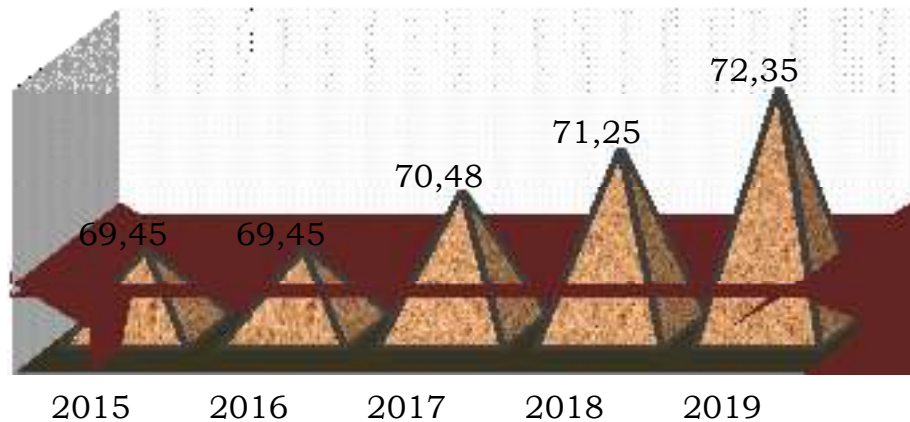
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat dilihat dari indikator kinerja diantaranya; Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Rumah Tangga Pengguna Listrik, Rumah Tangga Ber-Sanitasi, Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni.

a) Persentase Rumah Layak Huni

Persentase rumah layak huni di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup baik. Tahun 2015 rasio rumah layak huni sebesar 69,45 persen terus meningkat hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 72,35 persen terdapat pada Gambar 2.74.



Gambar 2.74
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

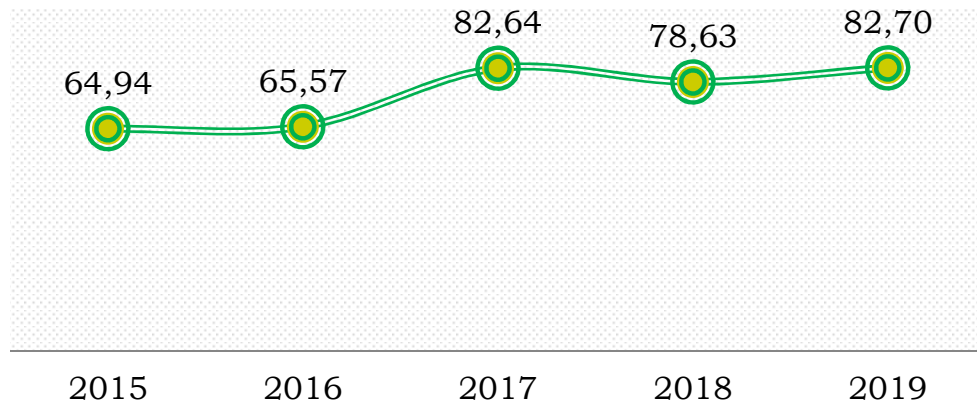
b) Persentase penduduk berakses air minum

Ketersediaan air bersih yang cukup bagi rumah tangga merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kondisi kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih terlihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.

Proporsi rumah tangga pengguna air bersih bertalian erat dengan urusan perumahan. Data perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019, mengalami perkembangan. Pada Tahun 2015 sebesar 64,94 persen meningkat menjadi 65,57 persen Tahun 2016, terus meningkat Tahun 2019 menjadi sebesar 82,70 persen. Data proporsi rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.75 sebagai berikut.



Gambar 2.75
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

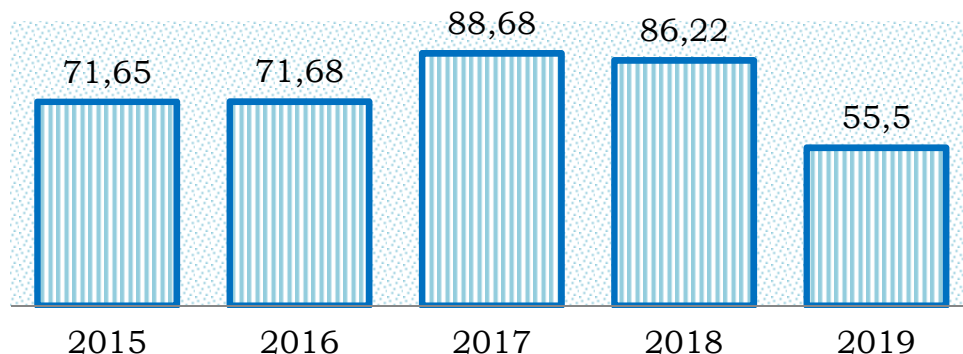


Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

c). Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-6 adalah Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.

Gambar 2.76
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Data Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan menunjukkan penurunan hingga Tahun 2019 hanya sebesar 55,5 persen yang ditampilkan pada Gambar 2.76.

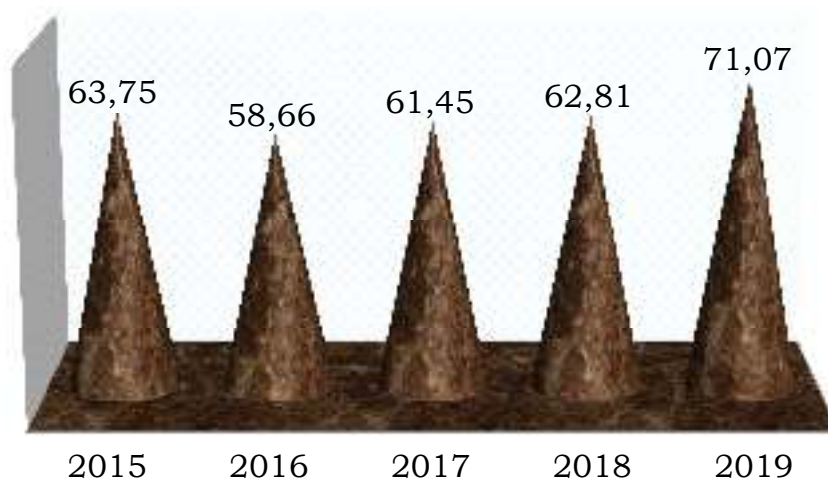
c) Persentase rumah tinggal bersanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha penyehatan lingkungan hidup



manusia. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Salah satu masalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat diperlukan adalah fasilitas sanitasi yang layak. Banyak manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat apabila terdapat pengelolaan sanitasi yang baik. salah satunya adalah mengurangi angka masyarakat yang sakit. Dengan sanitasi masyarakat dapat mengurangi terjadinya dan penularan penyakit pada masyarakat, sehingga derajat Kesehatan masyarakat dapat lebih optimal. Data mengenai Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.77 sebagai berikut.

Gambar 2.77
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Berdasarkan Gambar 2.87 di atas, dapat diketahui persentase RT bersanitasi layak mengalami peningkatan sedikit. Dimana pada Tahun 2015 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 63,75 persen, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 71,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak RT yang belum memiliki atau belum dapat mengakses sanitasi yang layak. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan fokus dari pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

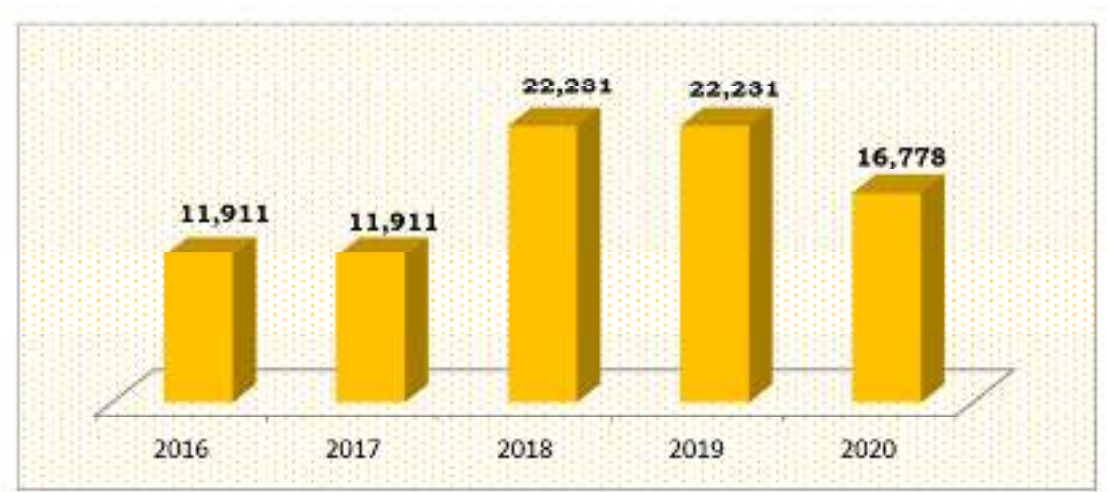
d) Rumah Tangga Pengguna listrik

Secara umum sumber energi listrik di Kabupaten Morowali Utara dihasilkan menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), selain itu juga terdapat beberapa pembangkit menggunakan tenaga air. Tenaga listrik yang diproduksi oleh PT. PLN Kolonodale pada tahun 2020 berhasil didistribusikan kepada pelanggan baik rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-lain.



Data jumlah rumah tangga di Kabupaten Morowali Utara yang menggunakan listrik disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.78
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



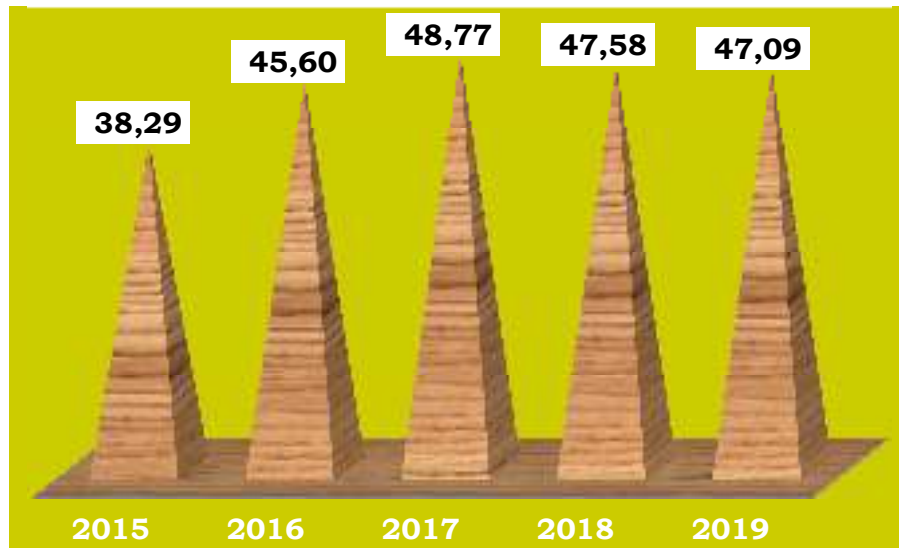
Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2021

A.3. PU Sumberdaya Air

Infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan adalah ketersediaan Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan penggunaannya. Luas lahan yang beririgasi di Kabupaten Morowali Utara masih terbatas atau kecil jumlahnya, jika dibanding dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Data persentase ketersediaan irigasi dan luas lahan budidaya di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 2.79 sebagai berikut.



Gambar 2.79
Persentase Jaringan Irigasi
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Merujuk data pada Gambar 2.79 di atas, diketahui bahwa perkembangan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Morowali Utara belfluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2015 jaringan irigasi sebesar 38,29 persen, meningkat Tahun 2017 menjadi sebesar 48,77 persen, dan menurun pada periode Tahun 2018-Tahun 2019 masing-masing menjadi sebesar 47,58 persen dan sebesar 47,09 persen.

A4. Penataan Ruang

Urusan penataan digambarkan dengan beberapa indikator berikut ini yaitu Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, Ruang publik yang berubah peruntukannya, Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, serta ketaatan terhadap RTRW.

a). Rasio Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu dan atau sarana kota, dan atau pengaman jaringan prasarana dan atau budidaya pertanian. RTH terdiri dari ruang terbuka hijau privat, yaitu RTH milik pemerintah, institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas dan ruang terbuka hijau publik, yaitu RTH milik pemerintah atau institusi tertentu,



yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat dan terbuka untuk umum. Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah adalah:

- RTH di perkotaan terdiri dari RTH Publik (milik pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH Privat (milik perorangan atau institusi).
- Proporsi RTH baik privat maupun publik pada wilayah kota, disesuaikan dengan potensi kota tersebut atau mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari wilayah kota.
- Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan lebih dari 30 (tiga puluh) persen dari luas kota, maka proporsi ini harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau adalah:

- a. dilarang bagi kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH;
- b. dibolehkan bagi kegiatan untuk menambah RTH;
- c. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- d. dibatasi bagi pendirian bangunan hanya untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
- e. dilarang bagi pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- f. diawasi dengan ketat bagi kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH

b). Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum

Dalam Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 pada Pasal 39 di sampaikan bahwa izin mendirikan bangunan merupakan salah ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Demikian pula dalam ketentuan umum peraturan zonasi untuk system transportasi diwajibkan untuk melakukan analisis dampak lalu lintas (andall) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas.



2.3.1.1.4. Sosial dan Linmas

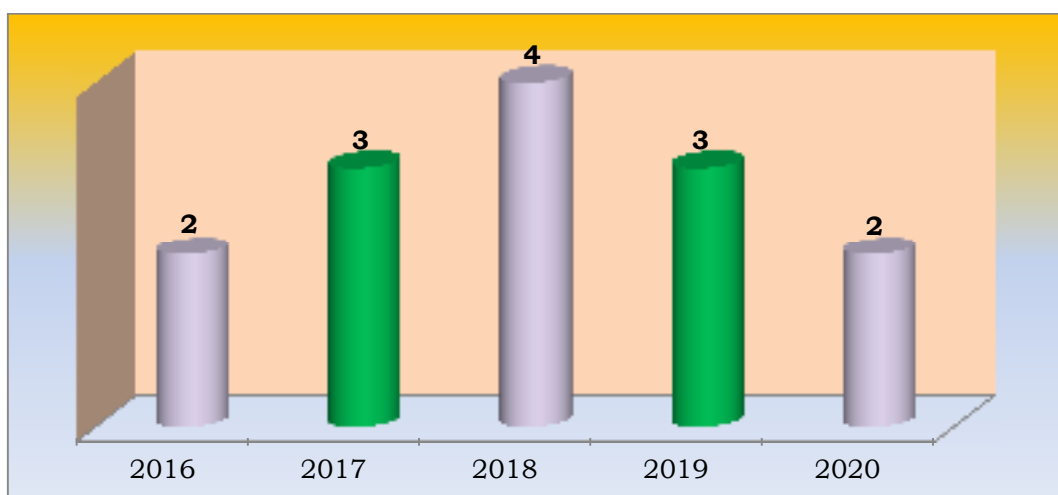
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Sosial secara umum meliputi; Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Pember-dayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Anak Terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma, pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat, Pengembangan Data dan Informasi Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga dan pelaku kesejahteraan sosial. Untuk indikator Kinerja Sosial di Kabupaten Morowali Utara yang diuraikan berikut ini diantaranya; Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi, Jumlah Penyandang Masalah Sosial (PMKS) dan Rasio Sarana Ibadah.

1. Jumlah Panti Asuhan

Ketersediaan sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dalam suatu daerah dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat. Panti asuhan sebagai lembaga sosial didirikan pemerintah guna membantu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai wujud upaya terjaminnya kesejahteraan sosial. Panti asuhan dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar terutama kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh supaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Data jumlah panti asuhan di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.80 sebagai berikut.

Gambar 2.80

**Jumlah Panti Asuhan Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020**



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2017-2020



Berdasarkan Gambar 2.80 di atas, ketersediaan panti asuhan di Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, dimana jumlah panti asuhan pada Tahun 2016 sebanyak 2 panti asuhan. Tahun 2017 sebanyak 3, Tahun 2018 sebanyak 4, pada Tahun 2019 sebanyak 3 panti asuhan dan Tahun 2020 sebanyak 2.

2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat/komunitas, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dengan meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Data jumlah penyandang masalah sosial menurut jenis di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2018 terdapat pada Tabel 2.51 sebagai berikut.

Tabel 2.51
Jumlah Penyandang Masalah Sosial Menurut Jenisnya
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2018

Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	Tahun	
	2017	2018
Anak Cacat	193	193
Bekas Napi dan Narkoba	47	24
Penyandang Cacat	952	952
Keluarg Fakir Miskin	10.734	10.940
Keluarga Tinggal Rumah Tak Layak	1.135	1.209
Keluarga Rentan	4	-
Lanjut Usia Terlantar		2
Rumah Kumuh	-	-
Komunitas Adat Terpencil (KAT)	5.670	6.237

Sumber: Dinas Sosial Kab.Morowali Utara (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 2.51 di atas digambarkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial.



2.3.1.2. Urusan Wajib Tidak terkait Pelayanan Dasar

Urusan pemerintah daerah bersifat Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 18 (delapan belas) Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait urusan Pemerintah pilihan berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Morowali Utara dijabarkan secara detail sebagai berikut.

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 Tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 Tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah, sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Angka partisipasi angkatan kerja; Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Pencari kerja yang ditempatkan; Tingkat pengangguran terbuka; Keselamatan dan perlindungan; Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek; Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, dan beberapa indikator lainnya yang dijelaskan sebagai berikut.

a). Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.52 di bawah ini, diketahui bahwa jumlah angkatan kerja > 15 Tahun ke atas di



Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 sebanyak 67.436 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia >15 Tahun sebanyak 86.644 jiwa. Sehingga angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Morowali Utara sebesar 69,85 persen, lebih tinggi dari Tahun sebelumnya yang mencapai 65,90 persen. Data angka partisipasi angkatan kerja Kabupaten Morowali Utara ditampilkan pada Tabel 2.52 berikut ini.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020

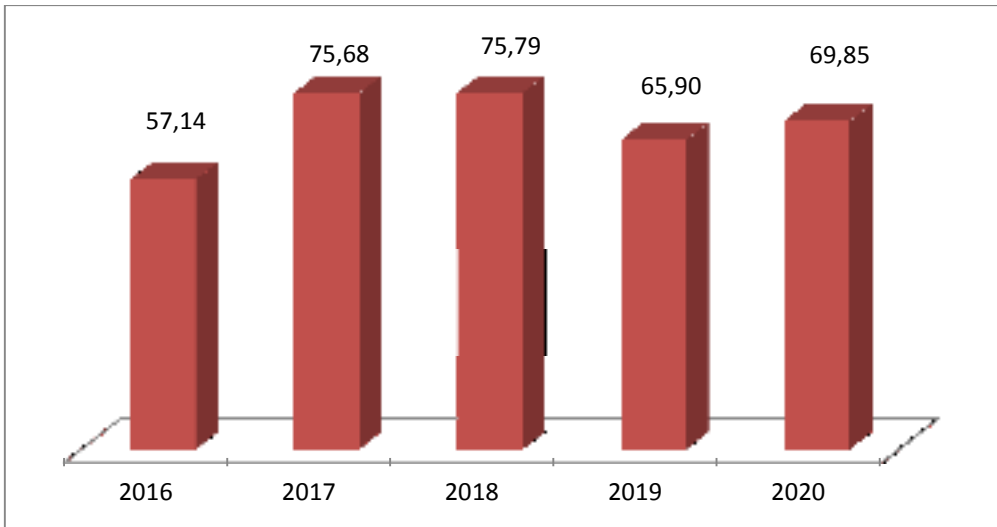
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja > 15 Tahun	48.947	66.462	68.159	60.693	67.436
Jumlah Penduduk Usia >15 Tahun	85.667	87.819	89.936	92.104	86.644
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	57,14	75,68	75,79	65,90	69,85

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Morowali Utara dalam periode Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang berfluktuatif seperti yang ditampilkan pada gambar 2.81. Pada Tahun 2016 sebesar TPAK Kabupaten Morowali Utara mencapai 57,14 persen, meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 75,68 persen. Namun, pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 69,85 persen.

Gambar 2.81
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



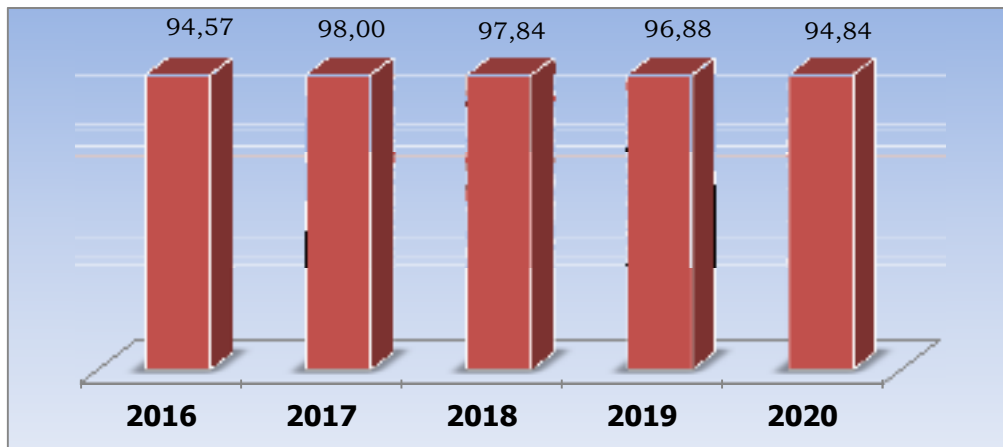
Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



c). **Rasio Penduduk yang Bekerja**

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara hingga tahun 2020 sebesar 94,84 persen dan menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 96,88 seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.82 berikut.

Gambar 2.82
Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

e). **Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja**

PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 untuk ADHB sebesar Rp. 11.203.762,00 juta, sedangkan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp. 8.072.844,00 juta. Hingga Tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 67.436 orang. Laju pertumbuhan PDRB ADH berlaku per tenaga kerja Tahun 2020 sebesar 166,14, sedangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 per tenaga kerja sebesar 119,71. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.53 sebagai berikut ini.

Tabel 2.53
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
ADH Berlaku	8.317.377,00	8.968.534,00	10.099.325,00	11.767.230,00	11.203.762,00
ADH Konstan 2010	6.205.261,00	6.578.529,00	7.163.186,00	7.911.624,00	8.072.844,00
Jumlah Tenaga Kerja	51.698	65.132	66.716	58.798	67.436
Laju Pertumbuhan PDRB Per tenaga Kerja					
ADH Berlaku	160,88	137,70	151,38	200,13	166,14
ADH Konstan 2010	120,03	101,00	107,37	134,56	119,71

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



2). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

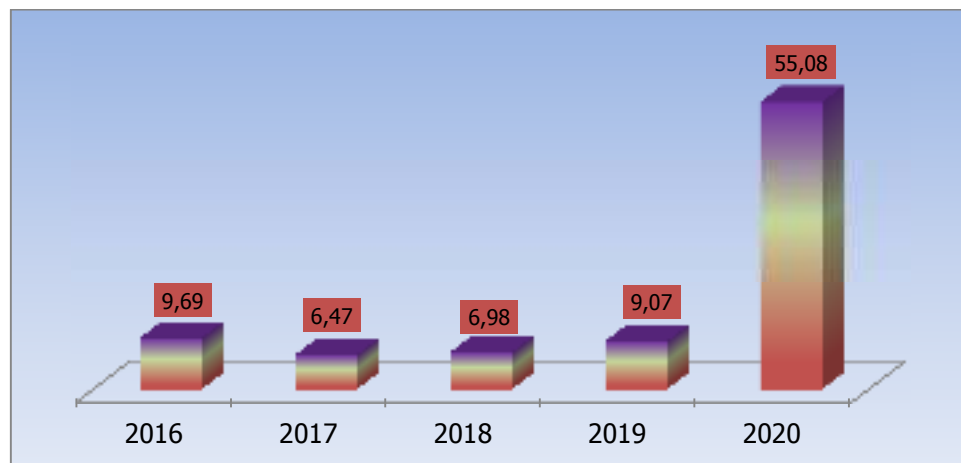
Indikator yang terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari: 1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, 2) Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, 3) Persentase partisipasi perempuan di lembaga Swasta, 4) Rasio KDRT, 5) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, 6) Partisipasi angkatan kerja perempuan, 7) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, 8) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, 9) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, 10) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 11) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, 12) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 13) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 14) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD, 15) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP, 16) Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA, 17) Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi, 18) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 Tahun dan 19) Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non-pertanian.

a). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Untuk menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan. Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Morowali Utara yang bekerja pada lembaga pemerintahan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan sikap yang menempatkan perempuan pada posisi penting yang strategis dengan tidak meragukan kapasitas dan kompetensinya. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan periode tahun 2016-2020 seperti tersaji pada Gambar 2.83, dimana persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 sebesar 9,69 persen dan hingga tahun 2020 meningkat menjadi 55,08 persen dengan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sebanyak 1.907 orang.



Gambar 2.83
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

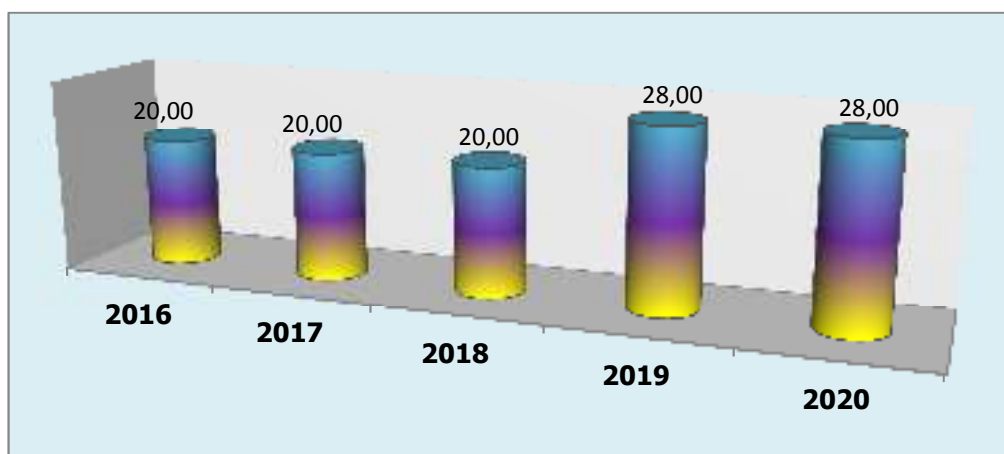


Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

b). Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang Kuota perempuan sebesar 30 persen dalam menduduki kursi DPRD. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menerapkan peraturan terkait Pemilu 2014 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Aturan Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain ditujukan untuk mengatur pencalonan anggota legislatif, peraturan itu juga disusun dengan mempertimbangkan *affirmative action* keterwakilan perempuan. Proporsi kursi diduduki perempuan di DPRD di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.84 sebagai berikut.

Gambar 2.84
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

Proporsi Perempuan yang menjadi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 berjumlah 5

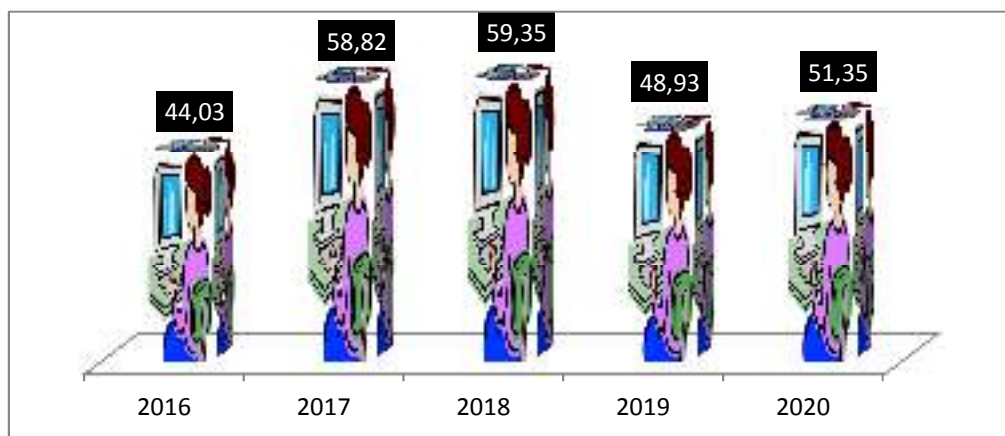


orang dari total 25 orang anggota legislatif Kabupaten Morowali Utara atau hanya sebesar 20,00 persen. Selanjutnya pada periode 2019-2024 jumlah anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara yang terpilih sebanyak 7 orang atau sebesar 28 persen, meningkat dari periode sebelumnya.

c). Partisipasi angkatan kerja perempuan

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan daya dorong yang potensial bagi peningkatan perekonomian. Perempuan terbukti memiliki kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 Tahun ke atas TPAK dapat menjadi indikator sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memberikan ruang bagi partisipasi kesetaraan gender dan peluang kerja bagi perempuan khususnya pendidikan dan pekerjaan di sektor formal. Selain itu, dapat terlihat pula seberapa besar motivasi perempuan untuk bekerja baik di desa maupun di kota. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 2.85 sebagai berikut.

Gambar 2.85
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

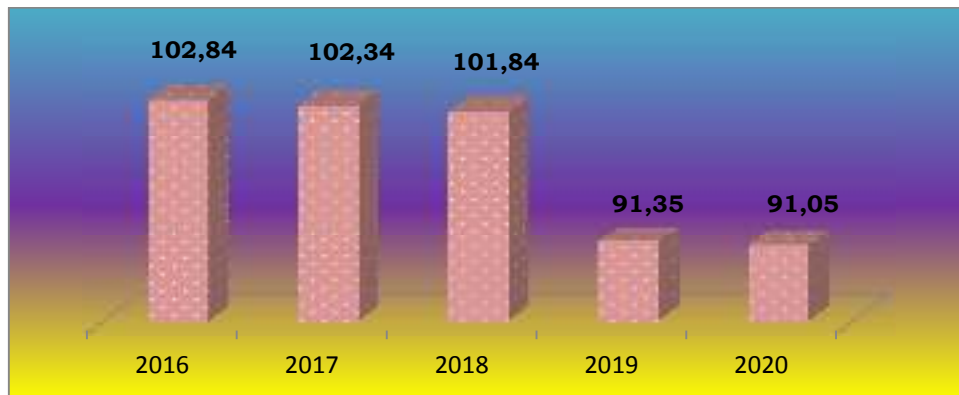
Berdasarkan Gambar 2.85 di atas, angka partisipasi kerja perempuan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Morowali Utara sebesar 44,03 persen, selanjutnya meningkat hingga tahun 2018 menjadi 59,35 persen. Namun pada Tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 48,93 persen dan tahun 2020 meningkat kembali dengan capaian 51,35 persen.



d). Rasio APM perempuan/laki-laki di SD

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender dalam aspek pendidikan adalah rasio Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat kesetaraan gender di institusi pendidikan juga telah terlaksana dengan baik. Pada Tahun 2016 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD sebesar 102,84, menurun hingga tahun 2020 menjadi 91,05. Data mengenai Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 pada Gambar 2.86 sebagai berikut.

Gambar 2.86
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

e). Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sementara keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami penurunan dimana pada Tahun 2016 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP/MTs sebesar 109,36, menurun hingga tahun 2020 menjadi 84,35. Data mengenai Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP/MTs Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 pada Gambar 2.87 berikut.



Gambar 2.87
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

2.3.1.2.3. Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan bahwa kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Adapun ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, harus mengutamakan produksi wilayah setempat dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal hal tersebut, terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah; 1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; 2) keterjangkauan pangan (distribusi) dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, terutama pada daerah rawan pangan, serta 3) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Capaian indikator urusan pangan dijelaskan sebagai berikut.



a). Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui kebutuhan, produksi, dan luas panen. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Informasi rasio pangan ini berguna sebagai masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Morowali Utara. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.88.

Gambar 2.88
Ketersediaan Pangan Utama
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

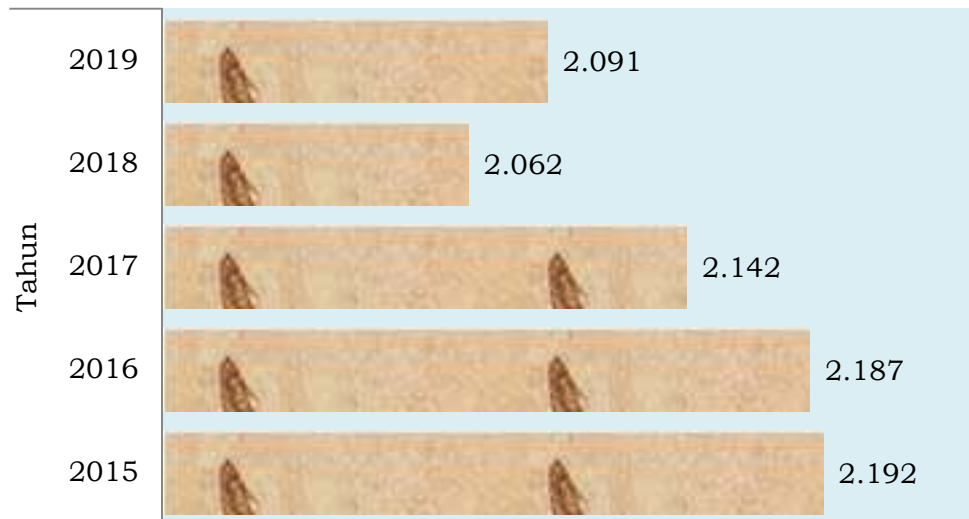
Berdasarkan data pada gambar di atas, rasio ketersediaan pangan utama di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan produksi tanaman pertanian mengalami penurunan produksi lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 ketersediaan pangan utama Kabupaten Morowali Utara sebesar 45,81 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 55,90 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 39,25 persen.

b). Ketersediaan energi dan protein perkapita

Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Morowali Utara dapat dijelaskan dari tingkat konsumsi ikan. Dimana berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan mengalami penurunan. Tahun 2015 sebesar 2.129 dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi 2.091 kg/kapita/tahun seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.89 berikut.



Gambar 2.89
Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

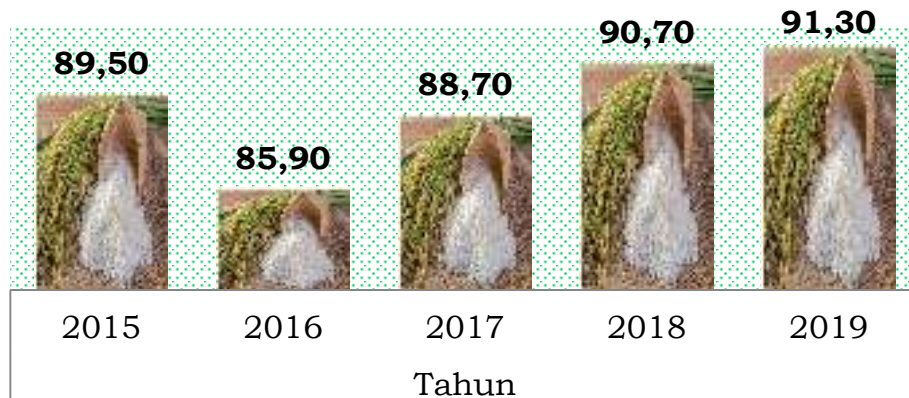
c). Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Perkembangan skor pola pangan harapan Kabupaten morowali Utara pada Tahun 2015 sebesar 89,50 persen; menurun pada Tahun 2016 menjadi 85,90 persen; pada Tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 88,70 persen; dan hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 91,30 persen. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.90 sebagai berikut ini.



Gambar 2.90
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Morowali Uara, 2020

2.3.1.2.4. Pertanahan

Kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah Negara, Penyelesaian izin lokasi.

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

Kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator yaitu; 1) Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten; 2) Tersusunnya RPPLH Kabupaten; 3) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah; 4) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air; 5) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara; 6) Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan; 7) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 8)Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten; 9) Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA; 10) Terverifikasi MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional; 11) Ter-verifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional; 12) Pene-tapan hak MHA; 13) Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan; 14) Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana; 15) Terlaksana-nya pendidikan dan pelatihan masyarakat; 16) Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup; 17) Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di



Daerah kabupaten/kota; 18) Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota; 19) Timbulan sampah yang ditangani; 20) Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R; 21) Persentase cakupan area pelayanan; 22) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 23) Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten; 24) Per-sentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan dan 25) Per-sentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Gambaran capaian indikator urusan lingkungan hidup dijelaskan sebagai berikut.

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2016-2020 belum disusun oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang ditampilkan pada Tabel 2.54 sebagai berikut.

Tabel 2.54
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusunnya RPPLH Kabupaten Morowali Utara	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Morowali Utara, 2021.

b. Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten Morowali Utara

Karena dokumen RPPLH Kabupaten Morowali Utara masih belum tersedia sehingga dalam integrasi dokumen terkait dengan pembangunan Kabupaten Morowali Utara belum ada untuk periode Tahun 2016-2020 yang ditampilkan pada Tabel 2.55 sebagai berikut.



Tabel 2.55

Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten Morowali Utara	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Morowali Utara, 2021.

c. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Morowali Utara

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 telah terselenggaranya KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah.

Pedoman penyusunan KLHS di atur dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Morowali Utara telah diselenggarakan baik untuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.56 sebagai berikut.

Tabel 2.56

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Morowali Utara	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Morowali Utara, 2021.



d. Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup

Penghargaan lingkungan hidup dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat memotivasi seluruh stakeholder untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Namun di Kabupaten Morowali Utara belum dilaksanakan pemberian lingkungan hidup Tahun 2016-2020 yang ditampilkan pada Tabel 2.57 sebagai berikut.

Tabel 2.57
Terlaksananya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Morowali Utara, 2021.

2.3.1.2.6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Optimalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Morowali Utara dilakukan melalui Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu. Ketersediaan data kependudukan tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Morowali Utara. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, meskipun hal itupun proporsinya masih sangat relatif rendah. Sementara akta-akta lainnya belum dapat berlangsung secara baik. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian, maupun perceraian yang terjadi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari sebagai berikut.

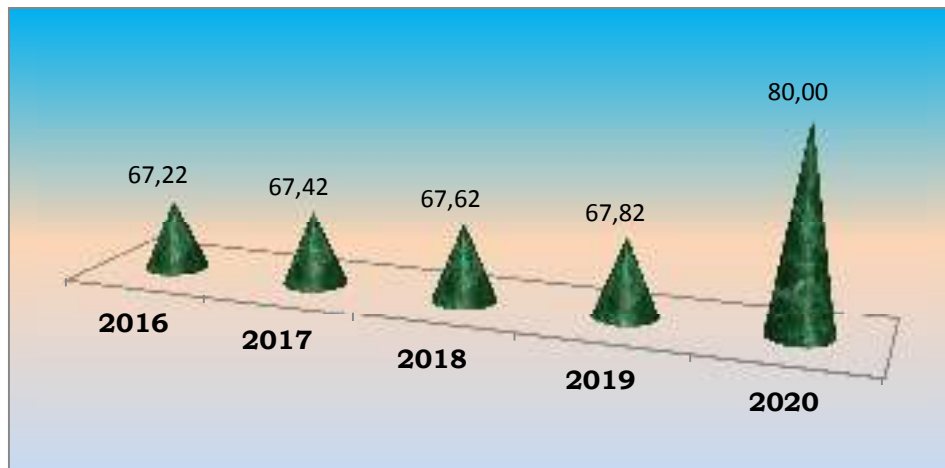
a). Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi yang memiliki akte kelahiran setiap Tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari Gambar 2.101 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 rasio bayi yang memiliki akte kelahiran sebesar 67,22 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana Tahun 2017 meningkat menjadi 67,42



persen dan hingga tahun 2020 meningkat menjadi 80,00 persen. Dalam periode Tahun 2016-2020 terjadi peningkatan sebesar 12,78 seperti yang tergambar pada grafik berikut ini.

Gambar 2.91
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

b). Ketersediaan database kependudukan

Ketepatan dan ketersediaan data-data tentang penduduk yang lengkap dalam pembangunan daerah merupakan aspek yang memegang peran yang sangatlah penting. Ini menuntut kerja keras para penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam mengumpulkan dan menjamin ketersediaan data penduduk yang dibutuhkan untuk dukungan informasi mengenai kependudukan yang baik untuk pihak yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan. Untuk Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2016-2020 telah tersedia database kependudukan yang disajikan pada Tabel 2.58 sebagai berikut.

Tabel 2.58
Ketersediaan database kependudukan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan database kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Morut, 2021

c). Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Jumlah penduduk yang cukup besar di Kabupaten Morowali Utara, serta untuk mencegah berbagai kejahatan



kriminal baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari Tahun ke Tahun dan terpadu secara nasional. Penerapan KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2016-2020 telah tersedia, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.59 sebagai berikut.

Tabel 2.59
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Morut, 2021

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan strategi penting dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Morowali Utara salah satunya dapat dilihat dari indikator Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik; Jumlah status desa maju dan desa mandiri; Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal; Jumlah Bumdesa yang aktif; Jumlah LPM; Persentase PKK aktif; Jumlah Posyandu aktif; Jumlah Bumdes yang bermitra dengan Perusahaan; Jumlah inovasi desa yang dikembangkan dan jumlah desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna. Gambaran capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut.

a). Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

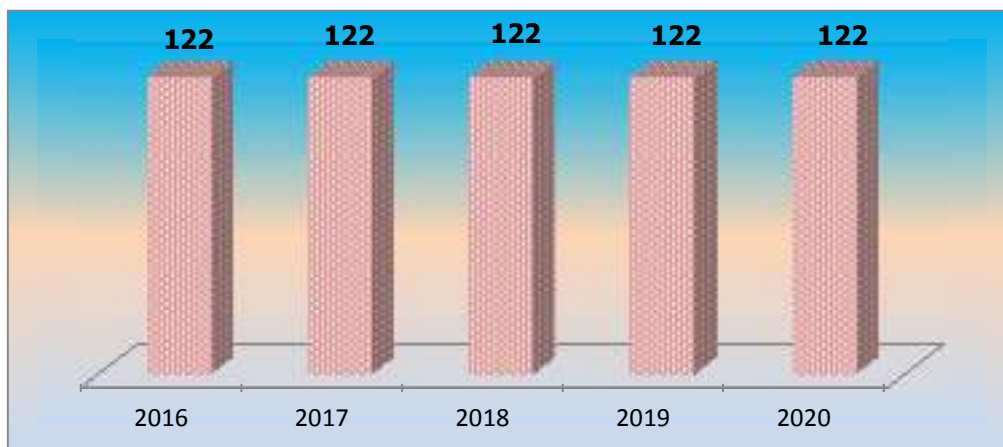
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Jumlah sarana prasarana kantor desa dalam kondisi baik di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 sebanyak 99 kantor desa dengan persentase 81,15%. Masih terdapat sarana prasarana



kantor desa dalam kondisi kurang baik sebanyak 23 Kantor desa dengan persentase 18,85%. Sebagian besar kondisi kantor desa di Kabupaten Morowali Utara juga dalam kondisi yang baik hal ini karena tersedianya dana desa yang telah dimanfaatkan pemerintah desa di Kabupaten Morowali Utara sarana dan prasarana pemerintah desa terdapat pada Gambar 2.92 sebagai berikut.

Gambar 2.92
Jumlah Kantor Desa
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

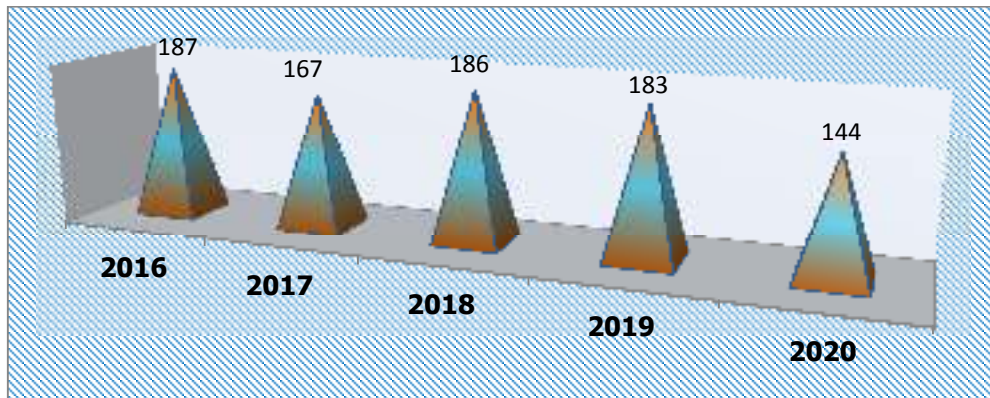
b). Persentase Posyandu Aktif

Pembangunan kesehatan masyarakat desa merupakan kegiatan swadaya masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perbaikan status kesehatan dan gizi. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Posyandu sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan melaksanakan pelayanan KB, gizi, imunisasi, penanggulangan diare dan KIA. Upaya keterpaduan pelayanan ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tujuan didirikannya Posyandu adalah untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita, angka kelahiran agar terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat yang dibantu petugas kesehatan. Kondisi posyandu di Kabupaten Morowali Utara dijelaskan pada Gambar 2.93 sebagai berikut.



Gambar 2.93
Persentase Posyandu Aktif
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Merujuk pada Gambar 2.93 di atas, jumlah Posyandu aktif di Kabupaten Morowali Utara perkembangannya naik turun. Tahun 2016 jumlah posyandu sebesar 187 Posyandu, menurun pada tahun 2017 menjadi 167 Posyandu. Selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 186 unit, namun menurun hingga tahun 2020 menjadi 144 unit.

c). Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2020 dapat dijelaskan pada table sebagai berikut.

Tabel 2.60
Indeks Desa Membangun
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

No.	Status	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mandiri	0	0	0	0	0
2	Maju	1	1	1	2	3
3	Berkembang	30	36	36	50	70
4	Tertinggal	79	75	75	59	46
5	Sangat Tertinggal	12	10	10	11	3
	Jumlah	122	122	122	122	122

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, 2021



Berdasarkan tabel di atas, IDM Kabupaten Morowali Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum ada desa dengan klasifikasi status desa mandiri. Tahun 2016 sampai tahun 2018 status desa maju 1 desa, tahun 2019 naik menjadi 2 desa dan pada tahun 2020 naik menjadi 3 desa. Sedangkan status desa sangat tertinggal tahun 2016 terdapat 12 desa, tahun 2017 dan tahun 2018 turun menjadi 10 desa, tahun 2019 naik menjadi 11 desa dan tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 3 desa.

2.3.1.2.8. Pengendalian penduduk dan KB

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik. Seperti telah diketahui bersama bahwa Gerakan Keluarga Berencana yang awalnya dimulai dengan Program Keluarga Berencana secara perlahan-lahan diharapkan akan menuju pada suatu kebutuhan yang sifatnya mendasar dalam suatu keluarga, yang pada akhirnya gerakan KB secara keseluruhan akan menjadi Keluarga Berencana Mandiri.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari indikator kinerja: Laju pertumbuhan penduduk (LPP); *Total Fertility Rate* (TFR); Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB; Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk; Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk; Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan; Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan; Rata-rata jumlah anak per keluarga; Ratio Akseptor KB; Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun; Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19); Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun; Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need); Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi; Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB; Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan; Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa; Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian



penduduk; Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri; Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan; Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat; Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan; Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa; Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS); Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga; Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; Rata-rata usia kawin pertama wanita; Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes.

2.3.1.2.9. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait urusan Perhubungan dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja antara lain; 1) Jumlah arus penu-m pang angkutan umum; 2) Rasio ijin trayek; 3) Jumlah uji kir angkutan umum; 4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis; 5) Persentase layanan angkutan darat; 6) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum; 7) Pemasangan Rambu-Rambu; 8) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; 9) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum; 10) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun yang diuraikan berikut.

a). Jumlah arus penumpang angkutan umum

Untuk jasa transportasi di Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari memanfaatkan moda transportasi laut dan transportasi darat. Moda transportasi untuk memperlancar arus aksesibilitas antar daerah termasuk dalam hal pemasokan terhadap barang-barang kebutuhan dan pengiriman hasil produksi daerah. Moda transportasi laut di Kabupaten Morowali Utara memiliki peran yang sangat vital karena berfungsi untuk transportasi penumpang dan barang. Tinggi rendahnya arus penumpang dan barang dalam suatu daerah memberikan gambaran dinamika perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial daerah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali Utara, frekuensi arus perpindahan orang melalui dermaga di Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah penumpang turun sebanyak 23.953; kemudian tahun 2017 sebanyak 22.632 dan pada tahun 2018 sebanyak 28.663. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penumpang turun berkurang menjadi sebanyak 20.616. Untuk jumlah penumpang berangkat, tahun 2016 sebanyak 19.565; Tahun 2017 sejumlah 22.789 dan pada Tahun 2018 sebanyak 26.090.



Sedangkan untuk Tahun 2020 jumlah penumpang berangkat turun menjadi 12.375.

Berdasarkan jumlah penumpang turun dan penumpang berangkat dari Tahun 2016-2020, terlihat bahwa perpindahan orang melalui dermaga di Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2016-2018 terus meningkat namun pada Tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Secara detail jumlah arus penumpang kapal laut turun dan berangkat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 pada Tabel 2.61 sebagai berikut.

Tabel 2.61
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penumpang Naik	19.565	22.789	26.090	18.346	12.375
Jumlah penumpang Turun	23.953	22.632	28.663	23.796	20.616
Total	43.518	45.421	54.753	42.142	32.991

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

b). Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kemampuan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur perhubungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara tidak langsung juga di nilai dari ketersediaan pelabuhan laut, dan terminal angkutan darat yang miliki. Hingga Tahun 2019, Kabupaten Morowali Utara memiliki masing-masing satu (1) pelabuhan laut, bandara udara dan 1 (satu) terminal Bis. Data mengenai ketersediaan Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bis di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 2.62 sebagai berikut.

Tabel 2.62
Jumlah arus penumpang laut/udara/terminal
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pelabuhan Udara	0	0	0	0	0
Pelabuhan Laut	5	5	5	5	5
Terminal	1	1	1	1	1

Sumber: BPS, 2021; Dinas Perhubungan Daerah Morowali Utara, 2021 (Diolah Kembali).

c). Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun

Frekuensi arus perpindahan orang melalui dermaga di Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2016 hingga Tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 jumlah penumpang turun sebanyak 23.953; kemudian Tahun 2017 sebanyak 23.632 dan pada Tahun 2018 sebanyak 28.663. Sedangkan Tahun 2020 jumlah



penumpang turun sebanyak 20.616. Untuk jumlah penumpang berangkat, Tahun 2016 sebanyak 19.565; Tahun 2017 sejumlah 22.789 dan pada Tahun 2018 sebanyak 26.090. Sedangkan untuk Tahun 2020 jumlah penumpang berangkat menurun menjadi 12.375.

Selanjutnya untuk arus barang, diketahui juga mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016-2020, dimana jumlah barang bongkar di Pelabuhan Kolonodale sebesar 1.930.892.459 pada tahun 2016 dan menurun menjadi 4.960.878 pada tahun 2020. Demikian pun jumlah barang muat tahun 2016 mencapai 149.092.484 dan tahun 2020 berkurang menjadi 1.716.053. Data mengenai jumlah arus penumpang dan barang pada angkutan umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63
Jumlah arus penumpang dan barang
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Barang					
Jumlah barang Bongkar	1.930.892.459	19.337.489	47.137.686	48.719.781	4.960.878
Jumlah barang Muat	149.092.484	1.643.094	2.279.588	4.659.628	1.716.053
Orang					
Jumlah penumpang Naik	19.565	22.789	26.090	18.346	12.375
Jumlah penumpang Turun	23.953	22.632	28.663	23.796	20.616

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

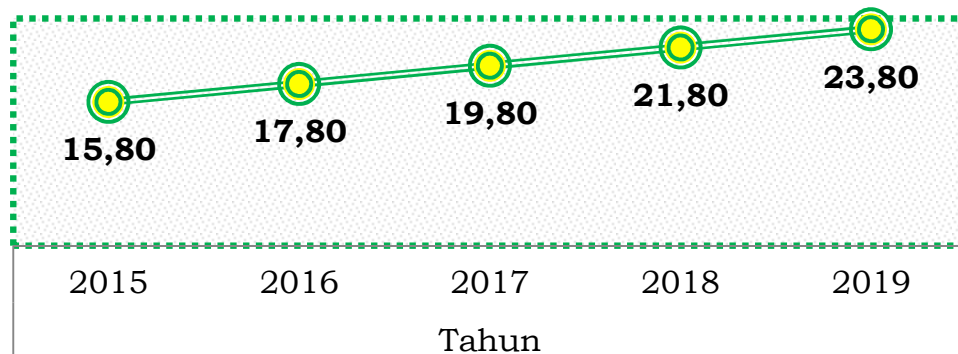
Perkembangan telekomunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara ber-komunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelak-sanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan lebih meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari indikator-indikator kinerja antara lain; 1) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelo-mpok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan; 2) Cakupan Layanan Telekomunikasi; 3) Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon; 4) Proporsi rumah tangga dengan akses internet; 5) Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi.



a). **Proporsi individu yang menggunakan internet**

Internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat di seluruh dunia termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Namun sebagai daerah baru dan cukup jauh dari pusat ibukota Provinsi, masalah jaringan internet masih belum mampu menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan data yang ada, proporsi individu yang menggunakan internet mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2015 proporsi individu yang menggunakan internet sebesar 15,80 persen, meningkat hingga tahun 2019 menjadi 23,80 persen seperti ditampilkan pada Gambar 2.94 berikut.

Gambar 2.94
Proporsi individu yang menggunakan internet
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Morowali Utara, 2020

3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Kabupaten Morowali Utara, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat (*pro poor*). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan *leader* perekonomian Indonesia, menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Gambaran umum kondisi daerah



terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: Jumlah koperasi aktif; Persentase UKM non BPR/LKM aktif; Persentase BPR/LKM aktif; Persentase Usaha Mikro dan kecil yang dijabarkan secara detail sebagai berikut.

a). Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan dari Tahun 2016-2020 dimana pada tahun 2016 persentase koperasi yang aktif sebesar 69,84 persen, menurun signifikan pada tahun 2020 menjadi 33,61 persen. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 pada Gambar 2.95 sebagai berikut.

Gambar 2.95
Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

2.3.1.2.11. Penanaman Modal

Peningkatan ekonomi daerah dan pengentasan angka pengangguran peran penting investasi yang masuk ke suatu daerah. Kehadiran para investor berskala nasional baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dianggap berperan dalam upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman modal dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA); 2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA); 3) Rasio daya serap tenaga kerja; 4) Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).

2.3.1.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan



kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat Kabupaten, yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu; 1) Persentase organisasi pemuda yang aktif; 2) Persentase wirausaha muda; 3) Cakupan pembinaan olahraga; 4) Cakupan Pelatih yang bersertifikasi; 5) Cakupan pembinaan atlet muda; 6) Jumlah atlet berprestasi; dan 7) Jumlah prestasi olahraga.

2.3.1.2.13. Statistik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/ perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/ informasi statistik (data statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/ pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Dokumen statistik sebagaimana dimaksud adalah Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Pembangunan Manusia, Nilai Tukar Petani, Inflasi, Indeks Kemahalan Konstruksi, Profil Kabupaten, Profil Kecamatan. Adapun ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Morowali Utara selama kurun Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

a). Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Di Kabupaten Morowali Utara sistem data statistik yang terintegrasi tersedia dan dijadikan sumber data utama oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah yang terdapat pada Tabel 2.64 sebagai berikut.



Tabel 2.64
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

b). Buku "Kabupaten dalam Angka"

Buku Kabupaten Morowali Utara dalam angka setiap tahunnya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang tersedia dan dapat didownload secara *online di website* BPS Morowali Utara. Selain buku Kabupaten dalam Angka juga dipublikasikan Buku kecamatan Dalam Angka yang terdapat pada Tabel 2.65 sebagai berikut.

Tabel 2.65
Buku Kabupaten Dalam Angka
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali).

c). Buku PDRB

Buku PDRB Kabupaten Morowali setiap Tahunnya dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang tersedia dan dapat di download secara *online di website* BPS Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.66 sebagai berikut.

Tabel 2.66
Buku PDRB Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

2.3.12.14. Persandian

Urusan persandian diukur dengan capaian indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.



2.3.1.2.14. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain: Penyelenggaraan festival seni dan budaya; Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi; dan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Kabupaten Morowali Utara adalah daerah tua dan baru mekar menjadi kabupaten baru. Dahulu kala, daerah ini memiliki kerajaan Mori yang dipimpin oleh Raja Marunduh dan daerah ini pula adalah bekas penjajahan Belanda. Berdasarkan perjalanan sejarah, banyak dijumpai peninggalan sejarah yang dirangkum sebagai Daya Tarik Wisata (DTW) Budaya), disajikan sebagai pada Tabel 2.67 sebagai berikut.

Tabel 2.67
DTW Budaya Kabupaten Morowali Utara

NO.	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI OBJEK	
		KECAMATAN WILAYAH/KOMUNITAS	DESA
1.	Rumah Raja Mori	Petasia	Bahontula
2.	Benteng Pa'antobu	Lemboraya	Lembobelala
3.	Benteng Wawomboto	Lemboraya	Lembobelala
4.	Makam Raja Mori	Petasia Barat	Sampalowo
5.	Festival Barong	Lemboraya	Dolupo Karya
6.	Festival Ogoh Ogoh	Lemboraya	Dolupo Karya
7.	Festival Teluk Tomori	Petasia	Kolonodale
8.	Makam Keramat	Bungku Utara	Desa Taranggo
9.	Marisa (Kampung Suku Wana)	Cagar Alam Morowali	
10.	Kampung suku wana	Bungku Utara	Desa Lemo
11.	Tarian Dero	Petasia, Lembo, Mori	
12.	Tarian Lumense Mpongae (Penyambutan Pahlawan)	Masyarakat Suku Mori	
13.	Tarian Dendelu	Masyarakat Wana	
14.	Tarian Solonde	Masyarakat Wana	
15.	Tarian Tendedomba	Masyarakat Wana	
16.	Upacara Pengobatan (Mamato)	Masyarakat Wana	
17.	Upacara Kematian (Momago)	Masyarakat Wana	
18.	Mowurake (pendewasaan anak gadis)	Masyarakat Suku Mori	
19.	Acara Duka (Moutombari)	Masyarakat Suku Mori	
20.	Molompa Inombo/ Mowoke (Upacara mengenang alharhum 40 hari/100 hari)	Masyarakat Suku Mori	
21.	Acara memining (Mesikeno)	Masyarakat Suku Mori	
22.	Perkawinan adat suku Mori (Inoule)	Masyarakat Suku Mori	
23.	Perkawinan adat suku Petasia	Petasia	
24.	Perkawinan Adat suku Kangua/Palili		



NO.	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI OBJEK	
		KECAMATAN WILAYAH/KOMUNITAS	DESA
25.	Perkawinan adat Wotu	Kecamatan Petasia Timur	
26.	Perkawinan Mekowei adat Impo	Kec. Lembo	
27.	Perkawinan adat Wulanderi	Kec. Lembo	
28.	Perkawinan Adat suku Kolo-kolo	Kec. Lembo	
29.	Perkawinan Molongkuni	Kec. Lembo	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Morowali Utara, 2020

Tabel 2.67 di atas, menggambarkan bahwa budaya yang turun temurun dari masyarakat Mori yang dibangun dari zaman kerajaan Mori, masih dapat dijumpai pada masyarakat suku mori pada kecamatan Lembo, Mori dan Petasia. Budaya ini dalam bentuk acara adat perkawinan, acara kematian, lagu dan tarian yang fenomenal mendapatkan rekor Muri yakni tarian Dero yang diiringi alat musik tradisional dan lagu-lagu khusus Dero.

Selanjutnya bukti zaman kerajaan Mori dengan adanya rumah raja Mori di Petasia dan Makam Raja Mori di daerah Tiu. Selain itu, ada pendapat kehidupan masyarakat wana, dengan kearifan lokalnya hidup dalam komunitasnya di cagar alam morowali. Komunitas masyarakat wana, melahirkan budaya yang unik dan khas dengan adanya upacara kematian (momago) dan upacara pengobatan (mamato). Uniknya pada upacara kematian ini, mereka melepas kematian orang tercinta dengan penguburan dan meninggalkan lokasi/rumah dan ladang mereka dan pindah pada tempat lain. Sementara yang unik pada upacara momago, sang dukun (walia) berintegrasi dengan makhluk gaib kemudian menjalankan ritual pengobatan. Masyarakat wana sangat percaya bahwa nenek moyang mereka turun dari langit.

Sumantri (2006) menceritakan bahwa tradisi tutur orang Wana asal usul mereka dimulai di Tundangtana sebuah daerah di Uewaju yang bagi orang Wana dianggap sebagai daerah mula munculnya nenek moyang mereka. Di daerah ini terdapat sebidang tanah yang permukaannya mempunyai lobang yang cukup besar dan dikeramatkan yang disebut Tundangweja. Disinilah pada dahulu kala terdapat sebuah tangga yang menghubungkan antara bumi ini dengan langit. Ketika langit semakin tinggi dan permukaan bumi semakin melebar, tangga tersebut kemudian putus. Tangga itulah yang dipakai oleh tokoh bernama Pololoisong sebagai jalan turun ke bumi. Begitu banyaknya cerita tentang masyarakat Wana dan tradisi-tradisinya (*indigenous people*).

2.3.1.2.16. Perpustakaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja;



Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun; Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; Rasio perpustakaan persatuan penduduk; Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/Tahun; Jumlah koleksi judul buku perpustakaan; dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

2.3.1.2.17. Kearsipan

Keberadaan arsip sesungguhnya teramat sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Pada jajaran pemerintahan daerah pengelolaan arsip secara baku dilaksanakan oleh masing-masing OPD dan kumpulan arsip yang dipandang penting namun karena keterbatasan sarana penyimpanan di OPD disediakan lembaga Kantor Arsip Daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Pengelolaan arsip secara baku; dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

a). Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Sub sektor Perikanan memberi kontribusi cukup besar terhadap PDRB dan nilai produksi di Kabupaten Morowali Utara. Sebagaimana data disajikan pada poin (A) menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Tahun 2019 sebesar 1833,8 Ton dan diharapkan akan semakin meningkat dari Tahun ke Tahun.

Potensi usaha perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara cukup tinggi dimana semua kecamatan telah mulai mengembangkan perikanan kolam dengan total produksi sebanyak 43,2 ton. Untuk budidaya laut hanya 2 (dua) kecamatan yang mengembangkan jenis budidaya ikan ini, yaitu Kecamatan Petasia dan Kecamatan Petasia Timur, sedangkan perikanan sawah hanya terdapat di Kecamatan Mori Utara dengan produksi sebesar 2,5 ton. Namun hingga Tahun 2019, hanya 1 (satu) kecamatan yang mengembangkan usaha budidaya perikanan tambak yaitu Kecamatan Petasia Timur dengan total produksi sebesar 1.787 ton. Potensi perikanan darat tambak dan kolam diharapkan akan meningkatkan kontribusi Sub sektor perikanan terhadap PDRB. Data kontribusi Sub-sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.68 sebagai berikut.



Tabel 2.68
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Sektor Kelautan Perikanan					
Nilai Sektor Kelautan Perikanan ADHB	540.761,81	607.712,78	672.260,69	745.656,37	750.522,82
Nilai Sektor Kelautan Perikanan ADHK 2010	395.914,37	433.551,85	467.602,12	474.392,55	498.569,39
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	7.804.988	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230
Nilai PDRB ADHK 2010	5.867.309	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	6,93	7,31	7,50	7,38	6,38
PDRB ADHK 2010	6,75	6,99	7,11	6,62	6,30

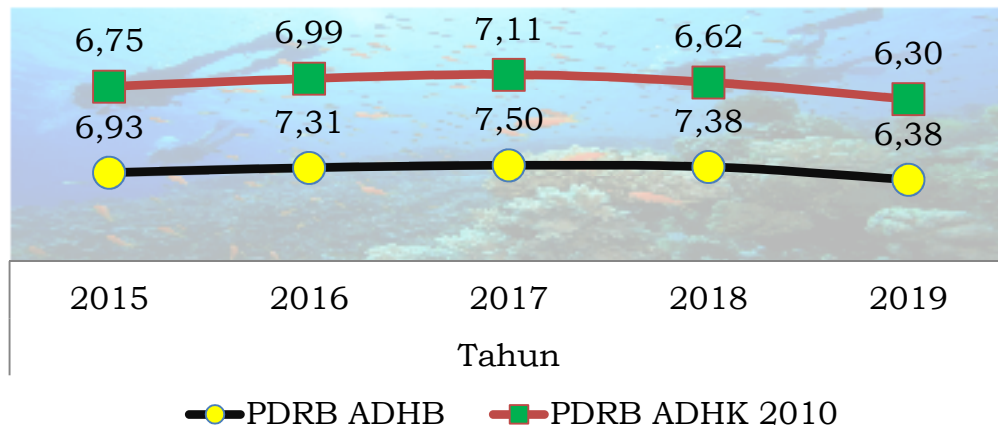
Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Nilai Sektor Kelautan dan Perikanan PDRB ADHB sebesar Rp750.522,82 juta, kemudian untuk nilai Sektor Kelautan dan Perikanan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp498.569,39 juta. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara sebesar 6,38 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 6,30 persen. Data Perkembangan kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Gambar 2.96.

Gambaran umum penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Morowali Utara diantaranya dapat dilihat dari Produksi perikanan (ton); Konsumsi ikan; Cakupan bina kelompok nelayan; Produksi perikanan kelompok nelayan; Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial; dan Nilai tukar nelayan.



Gambar 2.96
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

b). Produksi perikanan

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Upaya tersebut ditempuh melalui penangkapan maupun budidaya perikanan darat guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Sub-sektor Perikanan. Data perkembangan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2015 hingga Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69
Produksi Perikanan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun (ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Perikanan Tangkap (Perikanan tangkap laut dan Perairan umum)	320,00	368,00	1.198,00	1.847,0	1.833,8
Perikanan Budidaya (laut, tambak, kolam dst)	105,00	1.198,00	1.968,00	1.036,46	1.870,7

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

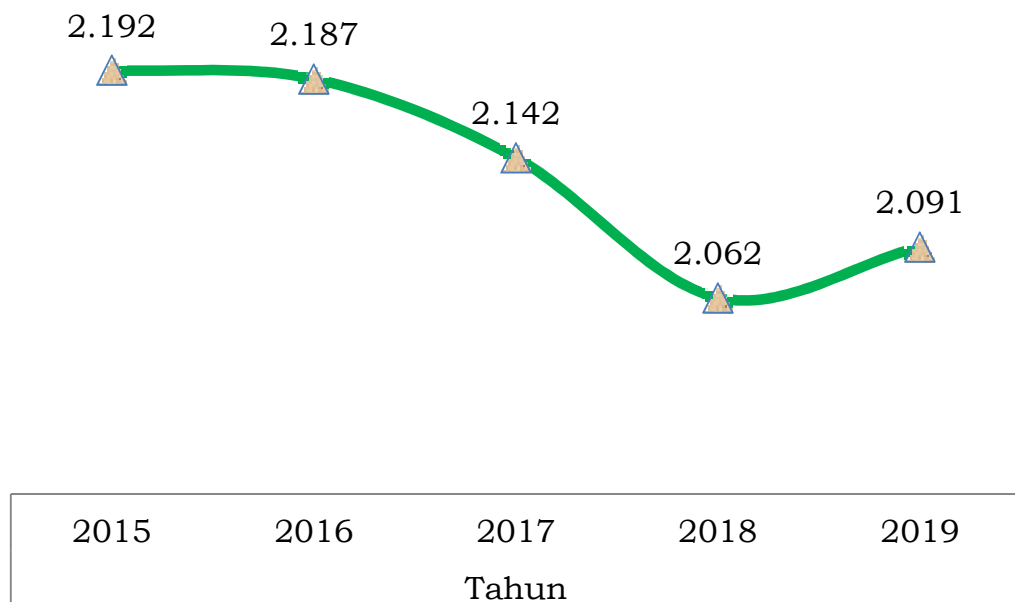
Berdasarkan Tabel 2.69 di atas, produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 untuk perikanan tangkap sebesar 320,00 Ton, meningkat Tahun 2019 menjadi 1.833,8 ton. Produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan produksi, hal ini terlihat pada Tahun 2015 sebesar 105,00 ton, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi 1.870,7 ton.

c). Konsumsi ikan

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan mengalami menurun. Dimana Tahun 2015 sebesar 2.129 ton, dan menurun hingga Tahun 2019 menjadi 2.091 kg/kapita/ton pada Gambar 2.97 sebagai berikut.



Gambar 2.97
Konsumsi Ikan Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

2.3.2.2. Pariwisata

a). Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Nilai Sektor Pariwisata PDRB ADHB pada tahun 2020 sebesar 24.116,8 juta, dan PDRB ADHK 2010 sebesar 14.122,1 juta. Kontribusi Sektor Pariwisata ini terhadap PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara sebesar 0,22 sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 0,17 persen. Data kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.70 sebagai berikut.

Tabel 2.70
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sektor Pariwisata					
Nilai Sektor Pariwisata ADHB	20.103	21.812	23.907	26.776	24.116,8
Nilai Sektor Pariwisata ADHK 2010	13.828	14.779	15.940	16.842	14.122,1
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230	11.203.762
Nilai PDRB ADHK 2010	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624	8.072.844



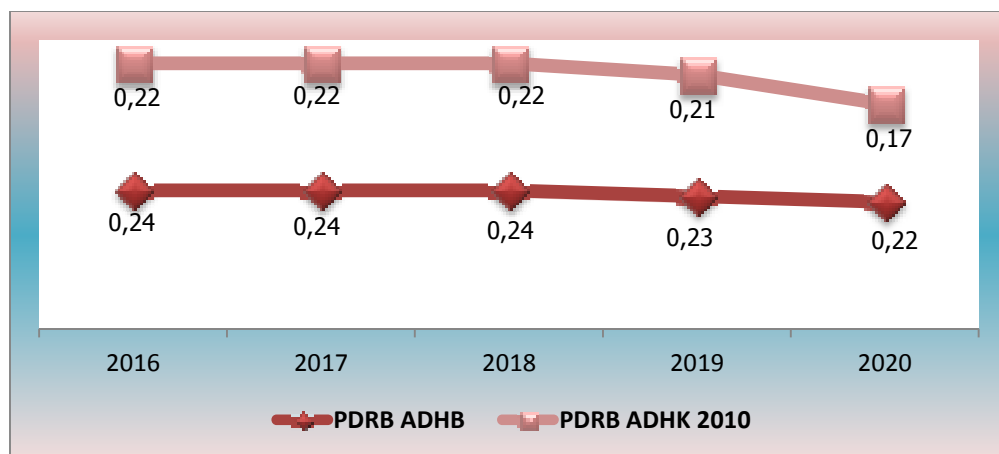
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Terhadap:					
PDRB ADHB	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22
PDRB ADHK 2010	0,22	0,22	0,22	0,21	0,17

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Kabupaten Morowali Utara dengan potensi pariwisata yang dimiliki sangat kompetitif dan menarik wisman maupun wisnus, terutama wisata bahari yang didukung objek dan atraksi. Destinasi wisata Morowali Utara saat ini masih tersembunyi dan belum dikenal. Padahal banyak objek wisata berada di Kabupaten Morowali Utara yang memiliki keunikan dinikmati wisatawan seperti *snorkeling* dan *diving*. Obyek wisata lain yang potensial adalah Taman Wisata Laut Teluk Tomori di Kecamatan Petasia. Sementara itu, berbagai jenis budaya seperti tarian dan rumat adat mendukung pariwisata daerah. Potensi wisata lain menarik dan memiliki nilai ekonomi dengan agrowisata (*agrotourism*). Beberapa objek wisata seperti Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo, Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas; Batu Payung di Kecamatan Petasia; Pasir Putih, Pantai Siliti, Air Terjun Waranpadoa Kecamatan Bungku Utara, Kawasan peruntukan pariwisata cagar alam yaitu:, Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya.

Perkembangan kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Gambar 2.98 sebagai berikut.

Gambar 2.98
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)



b). Potensi Pariwisata

Kabupaten Morowali Utara juga memiliki potensi wisata untuk dikembangkan dalam membantu perekonomian daerah. Sebagai daerah industri pertambangan yang besar, sektor pariwisata diharapkan dapat terdampak dari banyaknya manusia yang bekerja di sektoran wilayah pertambangan. Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Morowali Utara sangat beragam, wisata alam mulai dari darat, laut, sampai ke gunung. Dilengkapi dengan DTW keragaman budaya dan peninggalan zaman Belanda. Kekayaan wisata sebagai destinasi pariwisata, berpotensi untuk dikembangkan dan memiliki prospek untuk menarik wisatawan lokal maupun manca Negara. Jenis wisata dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, disajikan sebagai berikut.

1). Daya Tarik Wisata (DTW) Alam

DTW Alam memberikan kenikmatan yang berbeda dari wilayah lain. Keragaman DTW yang ada pada kabupaten Morowali Utara sangat lengkap. Mulai dari air, udara, darat dan kenangan-kenangan sejarah budaya dan zaman kolonial. Keragaman DTW Alam di Kabupaten Morowali, disajikan pada Tabel 2.71 sebagai berikut.

Tabel 2.71
DTW Alam Kabupaten Morowali Utara

NO.	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI OBJEK	
		KECAMATAN	DESA
1.	Danau Rano	Soyojaya	Dalam Cagar Alam
2.	Hutan Mangrove	Soyojaya	Dalam Cagar Alam
3.	Sungai Morowali	Soyojaya	Dalam Cagar Alam
4.	Goa Giililana	Petasia	Gililana
5.	Air Terjun Mataruttung	Petasia	Koya
6.	Danau Tiu	Petasia Barat	Tiu
7.	Pantai Ungkea	Petasia Timur	Ungkea
8.	Air Terjun Poaaha	Lemboraya	Dolupo Karya
9.	Air Terjun Kasitawa	Lemboraya	Dolupo Karya
10.	Air Terjun Buli	Lemboraya	Dolupo Karya
11.	Danau Impo	Lemboraya	Lembobelala
12.	Air Terjun Antabo	Lemboraya	Lembobelala
13.	Goa Pengkuburan Laemaka	Lemboraya	Lembobelala
14.	Goa Segitiga	Lemboraya	Petumbea
15.	Air Terjun Koromalino	Mori Atas	Tomata
16.	Pemandian Romuku	Mori Atas	Tomata
17.	Pinus	Mori Atas	Ensa
18.	Air Terjun Menduru	Mori Atas	Ensa
19.	Air Terjun Lolokoe	Mori Atas	Ensa
20.	Goa Menduru	Mori Atas	Ensa
21.	Goa Watuwayau	Mori Atas	Gontara
22.	Air Terjun Pesangke	Mori Utara	Tamanjengi
23.	Permandian Air Panas Beteleme	Lembo	Beteleme



NO.	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI OBJEK	
		KECAMATAN	DESA
24.	Goa Uluanso	Lembo	Uluanso
25.	Goa Burung Hantu	Lembo	Beteleme
26.	Gunung Kinedi	Lembo/Beteleme	Beteleme
27.	Ensa Ondau	Lembo	Korompe'eli
28.	Pengkuburan Suku Moiki/ Situs Morokopa	Lembo	Lemboroma
29.	Uwoi Lene	Lembo	Wawopada
30.	Sungai Panapa	Lembo	Wawopada
31.	Danau Kolo-Kolo	Lembo	Wara'a
32.	Mata Air Tingkia'o	Lembo	Wara'a
33.	Goa Powasu	Lembo	Wara'a
34.	Gunung Ponte'o'a	Lembo	Tingkia'o
35.	Puncak Siliti	Bungku Utara	Desa Siliti
36.	Tingku Baang (Sungai Salato)	Bungku Utara	Desa Taranggo
37.	Air terjun Werampedoa	Bungku Utara	Desa lemo
38.	Hutan Bakau	Bungku Utara	Desa Baturube
39.	Vatu Marando	Bungku Utara	Desa Vatu Marando
40.	Goa Cendana	Mamosalato	Desa Momo
41.	Goa Wayau	Mamosalato	Desa Winangabino
42.	Pantai Momo	Mamosalato	Desa Momo
43.	Pulau Togentoe	Mamosalato	Desa Tambale
44.	Sungai Air Panas	Soyojaya	Desa Tandoyondo
45.	Hutan Mangrove	Soyojaya	Desa Tambayoli
46.	Goa Tulung Kando	Soyojaya	Desa Tandoyondo
47.	Lokasi Penangkaran Burung Maleo	Soyojaya	Desa Sumara Jaya/Momo

Sumber: Dokumen Ripparda Morowali Utara

Berdasarkan Tabel 2.71 di atas menggambarkan DTW Alam di Kabupaten Morowali Utara, tersebar pada 9 Kecamatan (1 kecamatan Mori Utara, tidak teridentifikasi DTW Alam yang potensial). DTW Alam tersebut memiliki sifat keunikan, keaslian, dan kelangkaan, yang tidak bisa ditemui di wilayah lain. Daerah destinasi pada wilayah ini terdiri dari air terjun, danau, sungai, pantai, pulau, hutan, mangrove, gunung, goa, dan burung maleo. Alternatif bila ingin mengunjungi Goa dan Air Terjun, banyak dijumpai di kecamatan Mori Atas dan Lembo. Sementara bila menginginkan ke daerah pantai, pulau dan sungai, pada wilayah kecamatan Petasia, Soyojaya dan Bungku Utara. Yang menariknya pada DTW Alam ini, adalah adanya Cagar Alam Morowali, satu-satunya di dunia yang menawarkan keragaman flora dan fauna, dengan keragaman menikmati laut, sungai, hutan mangrove, gunung, danau, penangkaran Burung Maleo dan bertemu dengan masyarakat adat Wana.



2). Daya Tarik Wisata (DTW) Budaya

Kabupaten Morowali Utara adalah daerah tua dan baru mekar menjadi kabupaten Baru. Dahulu kala, daerah ini memilki kerajaan Mori, yang dipimpin oleh Raja Marunduh dan daerah ini pula adalah bekas penjajahan Belanda. Berdasarkan perjalanan sejarah, banyak dijumpai peninggalan sejarah, yang dirangkum sebagai Daya Tarik Wisata (DTW) Budaya), disajikan sebagai pada Tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72
DTW Budaya Kabupaten Morowali Utara

NO.	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI OBJEK	
		KECAMATAN WIILAYAH/KOMUNITAS	DESA
1.	Rumah Raja Mori	Petasia	Bahontula
2.	Benteng Pa'antobu	Lemboraya	Lembobelala
3.	Benteng Wawomboto	Lemboraya	Lembobelala
4.	Makam Raja Mori	Petasia Barat	Sampalowo
5.	Festival Barong	Lemboraya	Dolupo Karya
6.	Festival Ogoh Ogoh	Lemboraya	Dolupo Karya
7.	Festival Teluk Tomori	Petasia	Kolonodale
8.	Makam Keramat	Bungku Utara	Desa Taranggo
9.	Marisa (Kampung Suku Wana)	Cagar Alam Morowali	
10.	Kampung suku wana	Bungku Utara	Desa Lemo
11.	Tarian Dero	Petasia, Lembo, Mori	
12.	Tarian Lumense Mpongae (Penyambutan Pahlawan)	Masyarakat Suku Mori	
13.	Tarian Dendelu	Masyarakat Wana	
14.	Tarian Solonde	Masyarakat Wana	
15.	Tarian Tendedomba	Masyarakat Wana	
16.	Upacara Pengobatan (Mamato)	Masyarakat Wana	
17.	Upacara Kematian (Momago)	Masyarakat Wana	
18.	Mowurake (pendewasaan anak gadis)	Masyarakat Suku Mori	
19.	Acara Duka (Moutombari)	Masyarakat Suku Mori	
20.	Molompa Inombo/ Mowoke (Upacara mengenang alharhum 40 hari/100 hari)	Masyarakat Suku Mori	
21.	Acara memining (Mesikeno)	Masyarakat Suku Mori	
22.	Perkawinan adat suku Mori (Inoule)	Masyarakat Suku Mori	
23.	Perkawinan adat suku Petasia	Petasia	
24.	Perkawinan Adat suku Kangua/Palili		
25.	Perkawinan adat Wotu		
26.	Perkawinan Mekowei adat Impo		
27.	Perkawinan adat Wulanderi		
28.	Perkawinan Adat suku Kolo-kolo		
29.	Perkawinan Molongkuni		

Sumber: Dokumen Ripparda Morowali Utara

Merujuk pada data Tabel 2.72 di atas, menggambarkan bahwa budaya yang turun temurun dari masyarakat Mori yang dibangun dari zaman kerajaan Mori, masih dapat dijumpai pada masyarakat suku mori pada kecamatan Lembo, Mori dan Petasia. Budaya ini dalam bentuk acara ada perkawinan, acara kematian, lagu dan tarian



yang fenomenal mendapatkan rekor Muri yakni tarian Dero yang diiringi alat musik tradisional dan lagu-lagu khusus Dero. Selanjutnya bukti zaman kerajaan Mori dengan adanya rumah raja Mori di Petasia, dan Makam Raja Mori di daerah Tiu, Selain itu, ada perdatap kehidupan masyarakat wana, dengan kearifan lokalnya hidup dalam komunitasnya di cagar lama morowali. Komunitas masyarakat wana, melahirkan budaya yang unik dan khas, dengan adanya upacara kematian (momago) dan upacara pengobatan (mamato). Uniknya upacara kematian ini, mereka melepas kematian orang tercinta, dengan penguburan dan meninggalkan lokasi/rumah dan ladang mereka, pindah pada tempat lain. Sementara yang unik pada upacara momago, sang dukun (walia) berintegrasi dengan makhluk gaib, kemudian menjalankan ritual pengobatan. Masyarakat wana sangat percaya bahwa nenek moyang mereka turun dari langit. Sumantri (2006) menceritakan bahwa tradisi tutur orang Wana asal usul mereka dimulai di Tundangtana sebuah daerah di Uewaju yang bagi orang Wana dianggap sebagai daerah mula munculnya nenek-moyang mereka. Didaerah ini terdapat sebidang tanah yang permukaannya mempunyai lobang yang cukup besar dan dikeramatkan yang disebut Tundangweja. Di sinilah pada dahulu kala terdapat sebuah tangga yang menghubungkan antara bumi ini dengan langit. Ketika langit semakin tinggi dan permukaan bumi semakin melebar, tangga tersebut kemudian putus. Tangga itulah yang dipakai oleh tokoh bernama Pololoisong sebagai jalan turun ke bumi. Begitu banyaknya cerita tentang masyarakat Wana dan tradisi-tradisinya.

3). Daya Tarik Wisata (DTW) Buatan (Mice)

DTW *Mice* tidak sebanyak dengan DTW Alam dan Budaya. Siring dengan perkembangan kebutuhan berwisata bagi masyarakat di wilayah kabupaten Morowali utara dan masyarakat pendatang dari luar wilayah, dibutuhkan sarana dan prasarana pembangunan DTW *Mice*. Dukungan koneksitas dari stakeholder untuk mengembang pembangunan tersebut. DTW *Mice* pada daerah ini masih terbatas pada dua tempat, yakni pada wisata air pancuran Jompi dan Kolam permandian Korowalelo. Disajikan pada Tabel 2.73 di bawah ini.

Tabel 2.73
DTW Buatan (Mice) Kabupaten Morowali Utara

NO	NAMA OBYEK WISATA	LOKASI OBJEK	
		KECAMATAN	DESA
1	Wisata Jompi	Petasia	Ganda-Ganda
2	Permandian Korowalelo	Lembo	Korowalelo

Sumber: Dokumen Ripparda Morowali Utara

Berikut ini deskripsi beberapa daya tarik wisata yang memamerkan keragaman kekayaan alam hayati hingga nilai



historis/budaya (*heritage*) yang potensial untuk dikembangkan menjadi primadona wisata dunia di Kabupaten Morowali Utara di masa yang akan datang. Survey lapangan membagi 3 Kawasan berdasarkan kedekatan dan koneksitas Kawasannya, yakni:

- a. Kawasan 1 (Kecamatan Mori Atas, Mori Utara, Lembo dan Lembo Raya)
- b. Kawasan 2 (Kecamatan Petasia, Petasia Timur dan Petasia Barat)
- c. Kawasan 3 (Kecamatan Bungku Utara, Mamosalato dan Soyojaya)

4). **Kunjungan wisata**

Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Morowali Utara meningkat dari Tahun 2015-2019. Pada Tahun 2015 jumlah kunjungan wisata sebesar 1.865 orang. Meningkat hingga Tahun 2019 menjadi 5.010. Data mengenai jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Morowali periode 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.74 sebagai berikut.

Tabel 2.74
Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kunjungan Wisatawan	1865	13.865	4.405	4.506	5.010

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

5). **Lama kunjungan Wisata**

Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Morowali Utara secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan berkunjung maka transaksi ekonomi yang dilakukan oleh wisatawan juga akan semakin meningkat. Data mengenai lama kunjungan wisata di Kabupaten Morowali Utara sekitar 2-3 hari, seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.75 sebagai berikut.

Tabel 2.75
Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Lama kunjungan Wisata	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).



2.3.2.3. Pertanian

a) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting dan strategis dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan program pembangunan sektor pertanian menjadi faktor penting terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional dan ketahanan pangan daerah khususnya Kabupaten Morowali Utara. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dan kontribusinya terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan setiap tahunnya, hingga tahun 2020 sektor pertanian tidak menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Utara. Penjelasan terkait Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini, dapat dilihat pada Tabel 2.76 berikut ini.

Tabel 2.76
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*
Nilai Sektor Pertanian					
Nilai Sektor Pertanian ADHB	2.926.632	3.140.097	3.294.253	3.589.213	3.514.655
Nilai Sektor Pertanian ADHK 2010	2.150.929	2.244.266	2.335.110	2.498.729	2.452.785
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230	11.203.762
Nilai PDRB ADHK 2010	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624	8.072.844
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	35,19	35,01	32,62	30,50	31,37
PDRB ADHK 2010	34,66	34,12	32,60	31,58	30,38

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Catatan: *Data bergabung dengan Perikanan dan Kehutana

Berdasarkan Tabel 2.76 di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Utara perkembangannya selalu menurun setiap tahunnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADH Berlaku pada tahun 2016 sebesar 35,19%, menurun setiap tahunnya hingga tahun 2020



menjadi 31,37%. Sedangkan untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADH Konstan 2010 pada tahun 2016 sebesar 34,66%, menurun setiap tahunnya hingga tahun 2020 menjadi 30,38%. Pada tahun 2019 sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Utara setelah di tahun 2019 sektor pertambangan kontribusinya meningkat dan menjadi sektor yang berkontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tetap mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Morowali Utara, mengingat di sektor ini banyak melibatkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

b). Kontribusi sub sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sektor pertanian yang besar, khususnya Sub-sektor pertanian (Palawija), hal ini ditunjukkan kontribusi sektor tersebut terhadap capaian PDRB Kabupaten Morowali Utara. Data capaian kontribusi sub-sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara, periode Tahun 2015-2019 tersaji pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Sektor Palawija					
Nilai Sektor Palawija ADHB	128.671,32	133.442,62	140.297,06	149.478,61	161.930
Nilai Sektor Palawija ADHK 2010	99.215,32	99.809,73	102.554,72	105.729,08	114.784
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	7.804.988	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230
Nilai PDRB ADHK 2010	5.867.309	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	1,65	1,60	1,56	1,48	1,38
PDRB ADHK 2010	1,69	1,61	1,56	1,48	1,45

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Pada Tahun 2019 Kontribusi sektor ini, terhadap PDRB ADH Berlaku Kabupaten Morowali Utara mencapai 1,38 persen dari total PDRB ADH Berlaku Kabupaten Morowali Utara yang sebesar



Rp11.767.230 juta, sedangkan berdasarkan Harga Konstan mencapai 1,45 persen dari total PDRB ADH Konstan sebesar Rp7.911.624 juta.

c). Kontribusi Sub sektor Perkebunan terhadap PDRB

Nilai sektor perkebunan ADH Berlaku sebesar Rp. 2.267.041 juta, kemudian untuk nilai sektor perkebunan ADH Konstan 2010 sebesar Rp.1.602.368 juta. Kontribusi sektor ini terhadap nilai PDRB ADh Berlaku Kabupaten Morowali Utara sebesar 19,27% menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADH Konstan 2010 sebesar 20,25 persen. Data terkait terdapat dilihat pada Tabel 2.78 sebagai berikut ini.

Tabel 2.78
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Pangan) terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Sektor Perkebunan					
Nilai Sektor Perkebunan ADHB	1.905.981,25	1.858.559,29	1.961.673,78	1.986.233,13	2.267.041
Nilai Sektor Perkebunan ADHK 2010	1.420.022,43	1.378.048,83	1.415.409,84	1.471.240,18	1.602.368
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	7.804.988	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230
Nilai PDRB ADHK 2010	5.867.309	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	24,42	22,35	21,87	19,67	19,27
PDRB ADHK 2010	24,20	22,21	21,52	20,54	20,25

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

d). Produksi Sektor Pertanian

Produksi Sektor Pertanian juga cenderung mengalami penurunan dari periode Tahun 2015-2019. Hal ini terlihat dari penurunan yang terjadi, dimana produksi padi sawah Tahun 2015 sebesar 45.068,13 ton menurun di Tahun 2019 produksi padi sawah sebesar 29.631,00 ton; sementara padi ladang menunjukkan peningkatan di tahun 2019 menjadi 2.623,00 ton dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk produksi jagung dan kedelai menurun di tahun 2018, produksi jagung tahun 2019 sebesar 15.470,00 ton, dan produksi kedelai 636,00 ton. Produksi kacang tanah sebesar 130,00 ton; dan ubi kayu sebesar 1.516,00 ton; dan ubi jalar sebesar 355,00 ton. Data produksi Sektor Pertanian terdapat pada Tabel 2.79 sebagai berikut.



Tabel 2.79
Produksi Sektor Pertanian
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padi Sawah	45.068,13	45.068,13	45.068,13	44.447,00	29.631,00
Padi Ladang	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.437,00	2.623,00
Jagung	3.696,00	3.696,00	3.696,00	18.595,00	15.470,00
Kedelai	727,00	727,00	727,00	2.564,00	636,00
Kacang Tanah	178,74	178,74	178,74	66,00	130,00
Ubi Kayu	1.533,10	1.533,10	1.533,10	1.899,00	1.516,00
Ubi Jalar	499,86	499,86	499,86	215,00	355,00

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

1). Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produktivitas padi sawah pada Tahun 2019 sebesar 43,30, kemudian padi ladang sebesar 36,42, jagung sebesar 44,39, Kedelai 8,17, Kacang Tanah sebesar 10,72, kemudian untuk ubi kayu sebesar 280,82 serta ubi jalar sebesar 203,06. Data mengenai produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal terdapat pada Tabel 2.80 berikut ini.

Tabel 2.80
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per Hektar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Padi Sawah	46,44	46,44	46,44	42,90	43,30
Padi Ladang	24,51	24,51	24,51	31,27	36,42
Jagung	47,45	47,45	47,45	40,36	44,39
Kedelai	15,05	15,05	15,05	17,75	8,17
Kacang Tanah	13,54	13,54	13,54	8,39	10,72
Kacang Hijau	8,72	8,72	8,72	8,20	-
Ubi Kayu	8,72	8,72	8,72	311,25	280,82
Ubi Jalar	135,10	135,10	135,10	137,10	203,06

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

2). Produksi Sektor Perkebunan

Produksi setiap sektor perkebunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 yaitu kelapa sebanyak 404,56 ton; dan cengkeh sebesar 21,77 ton. Produksi terbesar kelapa sawit sebesar 13.702,75 ton; Kakao sebesar 5.710,6 ton, dan tanaman pala sebesar 4,2ton. Untuk produksi Lada sebesar 40,80 ton. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Morowali Utara yakni karet sebesar 2.948,4 ton. Produksi Sektor Perkebunan terdapat pada Tabel 2.81 sebagai berikut.



Tabel 2.81
Produksi Sektor Perkebunan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa	415,16	442,4	388,944	388,944	404,56
Cengkeh	26,32	22,5	18,008	18,008	21,77
Kelapa Sawit	383.378,50	10.032,90	13.167,21	13.167,21	13.702,75
Kakao	7.149,57	6.243	5.869,85	5.869,85	5.710,6
Pala	2,80	3,4	3,4	3,4	4,2
Lada	12,90	24,365	29,025	29,025	40,80
Karet	3.377,09	2.275,05	2.460,20	2.460,20	2.948,4

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

2.3.2.4. Kehutanan

a). Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

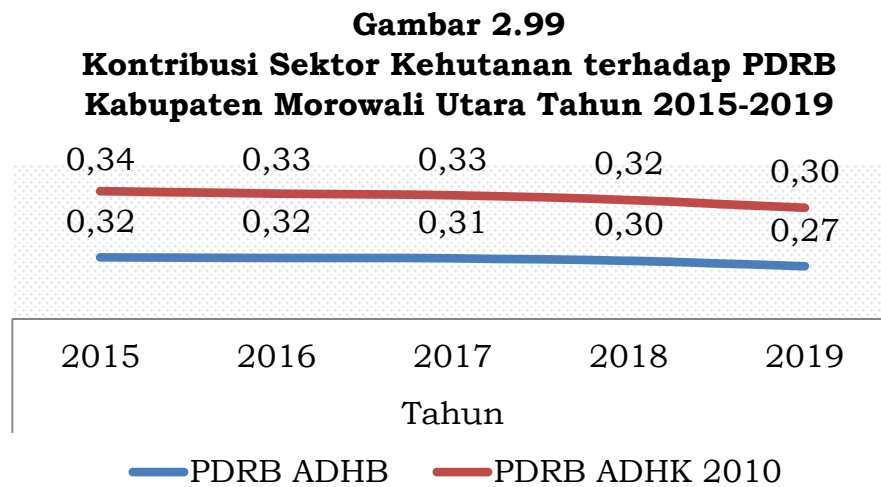
Nilai sektor Kehutanan PDRB ADHB sebesar Rp32.126,64 juta, dan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp23.923,96 juta. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHB sebesar 0,27 persen; dan PDRB ADHK 2010 sebesar 0,30 persen. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Morowali terdapat pada Tabel 2.82 sebagai berikut.

Tabel 2.82
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Sektor Kehutanan					
Nilai Sektor Kehutanan ADHB	24.857,85	26.274,93	28.106,07	30.365,47	32.126,64
Nilai Sektor Kehutanan ADHK 2010	20.140,93	20.697,55	21.507,77	22.600,03	23.923,96
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	7.804.988	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230
Nilai PDRB ADHK 2010	5.867.309	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	0,32	0,32	0,31	0,30	0,27
PDRB ADHK 2010	0,34	0,33	0,33	0,32	0,30

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

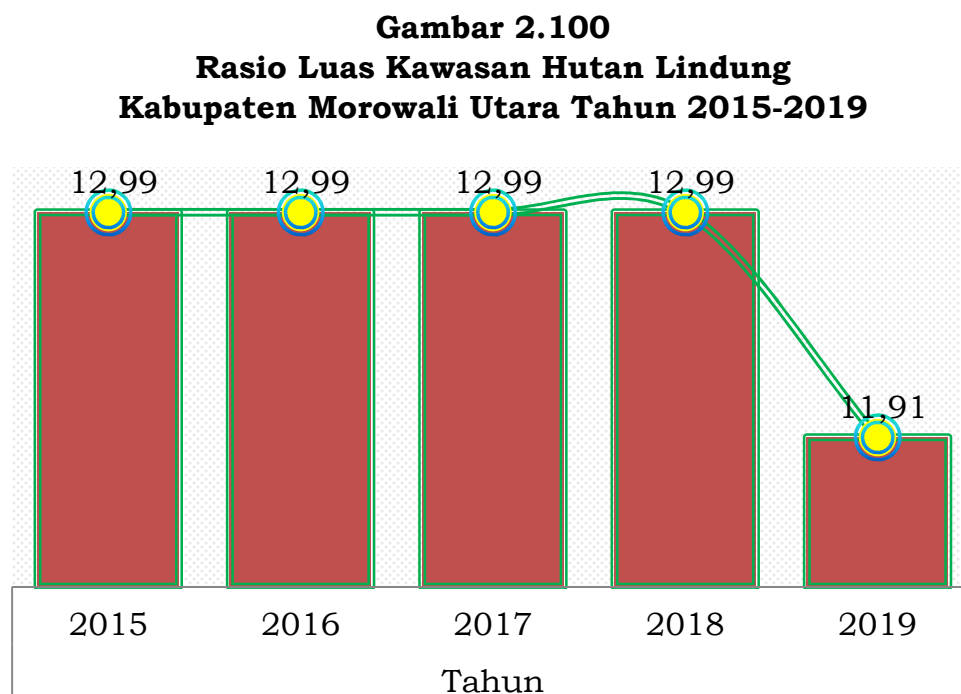
Perkembangan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Gambar 2.99 sebagai berikut ini.



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

b). Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Keberadaan hutan lindung berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Rasio luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2015-2018 sebesar 12,99 persen. Menurun pada Tahun 2019 menjadi 11,91 persen yang ditampilkan pada Gambar 2.100 sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

2.3.2.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten Morowali Utara merupakan daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan nikel dan mineral mengundang banyak investor asing maupun dalam negeri untuk mengelolah dan



mengangkan sektor ini. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2020 sebesar Rp 3.667.844,9 juta dengan kontribusi sebesar 32,74 persen sedikit menurun dari tahun 2019. Kontribusi sektor pertambangan tertinggi mengalahkan sektor pertanian yang selama ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar. Data mengenai kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.83 sebagai berikut.

Tabel 2.83
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sektor Pertambangan					
Nilai Sektor Pertambangan ADHB	1.628.270,00	2.426.974,00	3.279.266,00	4.284.692,00	3.667.844,9
Nilai Sektor Pertambangan ADHK 2010	1.445.338,00	2.077.335,00	2.590.188,00	3.072.171,00	3.298.124,3
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230	11.203.762
Nilai PDRB ADHK 2010	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624	8.072.844
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	19,58	27,06	32,47	36,41	32,74
PDRB ADHK 2010	23,29	31,58	36,16	38,83	40,85

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

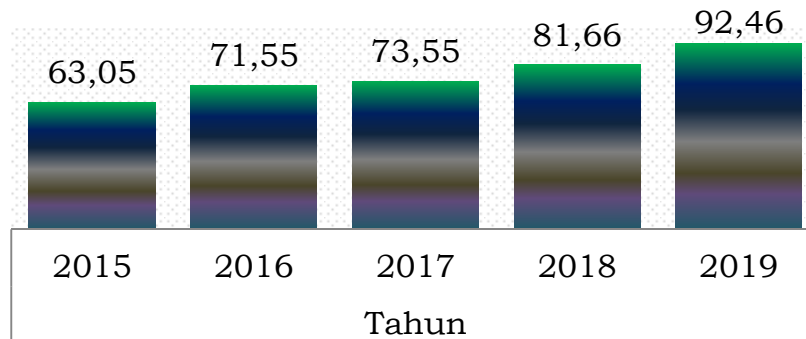
Kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Morowali Utara di tinjau dari beberapa indikator capaian kinerja antara lain; Persentase rumah tangga pengguna listrik; Rasio ketersediaan daya listrik; Persentase pertambangan tanpa ijin yang lebih detail sebagai berikut:

a). Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase RT pengguna listrik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam periode Tahun 2015-2019. Dimana pada Tahun 2015 sebesar 63,05 persen, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi 92,46 persen. Data terdapat pada Gambar 2.101 berikut ini.



Gambar 2.101
Persentase RT Pengguna Listrik
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

Selanjutnya sebaran rasio elektrifikasi di Kabupaten Morowali Utara pada setiap desa, sebagian besar desa di Morowali Utara memiliki rasio elektrifikasi di atas 90 persen. Sebaran rasio elektrifikasi setiap desa dilihat pada Tabel 2.84 berikut ini.

Tabel 2.84
Rasio Elektrifikasi RT Menurut Desa
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		JUMLAH KELUARGA PENGGUNA LISTRIK		JUMLAH KELUARGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
				PLN	NON PLN		
1	MORI ATAS	1	KASINGOLI	106	0	23	82,17
		2	LEE	173	0	3	98,30
		3	SAEMBA	197	0	0	100,00
		4	SAEMBA WALATI	144	0	0	100,00
		5	TOMUI KARYA	141	0	0	100,00
		6	TOMATA	252	0	0	100,00
		7	PAMBAREA	273	0	0	100,00
		8	LONDI	199	0	52	79,28
		9	GONTARA	135	0	8	94,41
		10	TAENDE	215	0	21	91,10
		11	ENSA	330	0	10	97,06
		12	LANUMOR	210	0	0	100,00
		13	PEONEA	381	0	14	96,46
		14	KOLAKA	302	4	4	98,71
		JUMLAH 1		3.058	4	135	95,78
2	LEMBO	1	WAWOPADA	295	0	0	100,00
		2	LEMBOBARU	78	0	7	91,76
		3	WARA'A	161	0	0	100,00
		4	TINGKEA'O	178	0	0	100,00
		5	KOROBONDE	369	0	13	96,60
		6	MORA	88	0	5	94,62
		7	ULUANSO	98	0	0	100,00
		8	BETELEME	970	0	0	100,00
		9	TINOMPO	390	0	25	93,98
		10	KORO WALELO	153	0	0	100,00
		11	KUMPI	139	29	0	100,00
		12	KOROMPEELI	134	0	0	100,00



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		JUMLAH KELUARGA PENGGUNA LISTRIK		JUMLAH KELUARGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
				PLN	NON PLN		
		13	LEMBOROMA	215	0	5	97,73
		14	KOROWOU	415	0	1	99,76
		JUMLAH 2		3.683	29	56	98,51
3	LEMBO RAYA	1	DOLUPO KARYA	386	0	0	100,00
		2	MANDULA	172	0	0	100,00
		3	LEMBOBELALA	126	0	0	100,00
		4	PO'ONA	224	0	0	100,00
		5	RONTA	198	56	0	100,00
		6	BINTANGOR MUKTI	155	0	0	100,00
		7	PETUMBEA	404	0	0	100,00
		8	PONTANGO'A	200	0	6	97,09
		9	JAMOR JAYA	328	0	1	99,70
		10	PA'AWARU	252	0	0	100,00
		JUMLAH 3		2.445	56	7	99,72
4	PETASIA TIMUR	1	MOLORES	313	0	1	99,68
		2	KEUNO	160	0	0	100,00
		3	MOHONI	383	0	1	99,74
		4	PEBOA	191	0	0	100,00
		5	BIMOR JAYA	144	13	49	76,21
		6	MOLINO	333	8	0	100,00
		7	UNGKEA	211	11	14	94,07
		8	TOWARA PANTAI	161	40	5	97,57
		9	TOWARA	259	116	0	100,00
		10	BUNGINTIMBE	570	17	0	100,00
		11	TOMPIRA	566	0	0	100,00
		12	BUNTA	679	49	0	100,00
		JUMLAH 4		3.970	254	70	98,37
5	PETASIA	1	KOROMATANTU	264	0	0	100,00
		2	KOROLOLAMA	264	0	0	100,00
		3	KOROLOLAKI	231	0	48	82,80
		4	KOYA	0	174	0	100,00
		5	GILILANA	0	192	0	100,00
		6	TANAUGE	0	123	0	100,00
		7	KOLONODALE	803	0	0	100,00
		8	BAHONTULA	1.057	0	0	100,00
		9	BAHOUE	448	0	0	100,00
		10	GANDA GANDA	536	0	95	84,94
		JUMLAH 5		3.603	489	143	96,62
6	PETASIA BARAT	1	MOLEONO	148	0	92	61,67
		2	ONEPUTE	194	0	0	100,00
		3	MONDOWE	174	0	24	87,88
		4	TADAKU JAYA	145	7	0	100,00
		5	SAMPALOWO	250	0	0	100,00
		6	MARALEE	130	0	15	89,66
		7	TOGO MULYO	228	0	45	83,52
		8	TIU	453	0	0	100,00
		9	ULU LAA	0	178	1	99,44
		10	TONTOWEA	187	0	44	80,95
		JUMLAH 6		1.909	185	221	90,45
7	MORI UTARA	1	TIWAA	132	0	0	100,00
		2	TABARANO	247	0	1	99,60
		3	WAWONDULA	313	0	0	100,00
		4	LEMBONTONARA	442	0	0	100,00



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		JUMLAH KELUARGA PENGGUNA LISTRIK		JUMLAH KELUARGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
				PLN	NON PLN		
		5	TAMONJENGI	132	0	1	99,25
		6	MAYUMBA	144	0	42	77,42
		7	PELERU	426	97	0	100,00
		8	ERA	235	0	2	99,16
		JUMLAH 7		2.071	97	46	97,92
8	SOYO JAYA	1	TAMAINUSI	57	79	46	74,73
		2	PANCA MAKMUR	637	0	4	99,38
		3	TODDOPOLI UEBANGKE	0	200	107	65,15
		4	TANDOYONDO	128	0	7	94,81
		5	LEMBAH SUMARA	128	0	32	80,00
		6	TAMBAYOLI	69	20	85	51,15
		7	SUMARA JAYA	83	22	19	84,68
		8	BAU	264	0	10	96,35
		9	MALINO	130	0	5	96,30
		10	MALINO JAYA	252	0	4	98,44
		JUMLAH 8		1.748	321	319	86,64
9	BUNGKU UTARA	1	TOKONANAKA	0	130	0	100,00
		2	MATUBE	0	140	60	70,00
		3	TARONGGO	100	0	265	27,40
		4	POSANGKE	147	0	5	96,71
		5	TOKALA ATAS	156	0	0	100,00
		6	UEWAJO	238	0	0	100,00
		7	BATURUBE	477	0	0	100,00
		8	POKEANG	129	0	49	72,47
		9	WOOMPARIGI	192	0	0	100,00
		10	TAMBAROBONE	286	0	0	100,00
		11	UEMASI	97	0	0	100,00
		12	TIRONGAN ATAS	124	0	74	62,63
		13	KALOMBANG	141	0	1	99,30
		14	TIRONGAN BAWAH	147	0	3	98,00
		15	SILITI	265	12	0	100,00
		16	OPO	89	0	78	53,29
		17	TANAKU RAYA	243	0	0	100,00
		18	LEMO	35	12	130	26,55
		19	UEMPANAPA	0	20	101	16,53
		20	UERURU	89	18	0	100,00
		21	BOBA	70	51	34	78,06
		22	LEMOWALIA	0	86	35	71,07
		23	SALUBIRO	0	110	247	30,81
		24	UPT TOKALA ATAS	60	40	0	100,00
		JUMLAH 9		3.085	619	1.082	77,39
10	MAMOSALATO	1	KOLO ATAS	53	10	146	30,14
		2	KOLO BAWAH	329	15	5	98,57
		3	MOMO	167	0	28	85,64
		4	GIRI MULYA	92	0	0	100,00
		5	TANANAGAYA	301	0	1	99,67
		6	TANA SUMPU	578	0	0	100,00
		7	PANDAUKE	350	78	5	98,85
		8	TAMBALE	129	1	0	100,00
		9	WINANGABINO	0	89	33	72,95
		10	SEA	0	30	155	16,22



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		JUMLAH KELUARGA PENGGUNA LISTRIK		JUMLAH KELUARGA BELUM BERLISTRIK	RASIO ELEKTRIFIKASI (%)
				PLN	NON PLN		
		11	UEPAKATU	0	42	27	60,87
		12	PARANGISI	0	67	0	100,00
		13	LIJO	0	141	0	100,00
		14	MENYO'E	0	285	0	100,00
		JUMLAH 10		1.999	758	400	87,33

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

b). Rasio ketersediaan daya listrik

Berdasarkan persebarannya, sumber daya listrik yang dikelola PT. PLN di Kabupaten Morowali Utara belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Tenaga listrik yang diproduksi oleh PLN di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2016 adalah sebesar 21,614,015 KWh dan data terakhir Tahun 2019 sebesar 35,644,279 KWh. Sementara daya terpasang dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan, tahun 2016 tercatat 99 dan pada tahun 2020 menjadi 13.700.000. Hal yang sama untuk energi listrik terjual meningkat dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 3.088.366 Kwh dan tahun 2020 sebesar 36.406.355 Kwh. Gambaran lebih jelas terdapat pada Tabel 2.85 di bawah ini.

Tabel 2.85
Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN pada
Cabang/ranting Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2016-2020

Tahun	Produksi (Kwh)	Daya Terpasang	Terjual (Kwh)	Nilai Terjual	Dipakai sendiri	Susut (Kwh)
2016	21.614.015	99	-		120.446	17,04
2017	3.090.220	7.000	3.088.366		1.854	16,66
2018	35.644.279	23.719.530	31.606.171		177.793	4.038.108,00
2019	35.644.279	23.719.530	31.606.171		177.793	4.038.108,00
2020	42.058.336	13.700.000	36.406.355		238.524	5.746.068

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

2.3.2.6. Perdagangan

Nilai Sektor Perdagangan PDRB ADHB selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan. Nilai PDRB ADHB sektor perdagangan tahun 2016 Rp571.958,00 juta dan tahun 2020 sebesar Rp. 770.821,8 juta, nilai sektor perdagangan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat adanya pandemi Covid 19. Kontribusi Sektor Perdagangan ini terhadap PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara sebesar 6,88 persen meningkat dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 sebesar 5,14 persen. Data kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten terdapat pada Tabel 2.86 sebagai berikut.



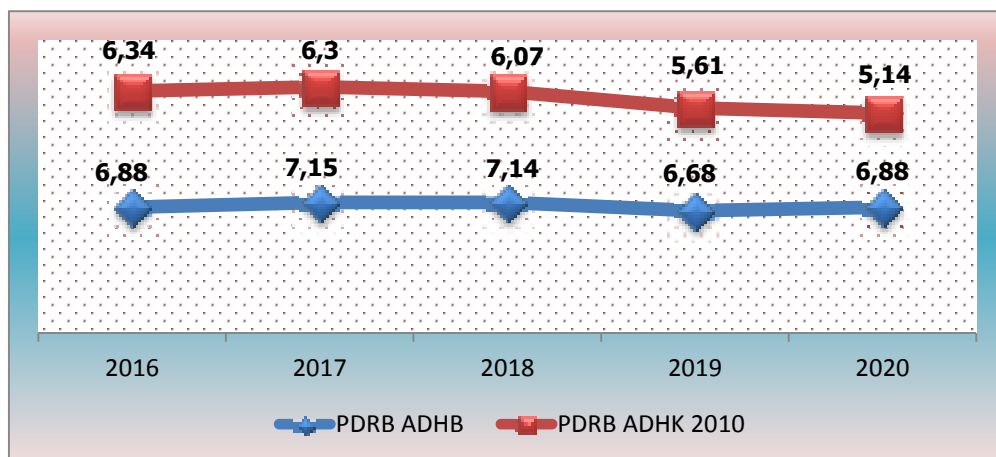
Tabel 2.86
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Sektor Perdagangan					
Nilai Sektor Perdagangan ADHB	571.958,00	641.277,00	721.382,00	786.448,00	770.821,8
Nilai Sektor Perdagangan ADHK 2010	393.551,00	414.272,00	434.899,00	444.071,00	415.665,6
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230	11.203.762
Nilai PDRB ADHK 2010	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624	8.072.844
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	6,88	7,15	7,14	6,68	6,88
PDRB ADHK 2010	6,34	6,30	6,07	5,61	5,14

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Perkembangan kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Gambar 2.102 sebagai berikut.

Gambar 2.102
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator kinerja yang meliputi; Ekspor Bersih Perdagangan; dan Cakupan bina kelompok pedangag/usaha informal.

Ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Morowali Utara surplus dalam periode Tahun 2015 s/d Tahun 2019. Untuk ekspor bersih perdagangan pada PDRB ADHB pada Tahun 2019 sebesar Rp3.304.856,45 juta, meningkat dari Tahun 2015 yang sebesar Rp1.884.434,05. Sedangkan untuk ekspor bersih perdagangan pada



PDRB ADHK 2020 surplus sebesar Rp7.911.623,87 yang tersaji pada Tabel 2.87 sebagai berikut.

Tabel 2.87
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADH Berlaku	1.884.434,05	1.730.930,63	1.849.653,15	2.159.335,48	3.304.856,45
PDRB ADH Konstan 2010	5.867.308,57	6.205.260,98	6.578.529,77	7.163.186,33	7.911.623,87

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

2.3.2.7. Perindustrian

a). Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Salah satu menyumbang dalam PDRB adalah sektor industri. Sektor industri merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Laju pertumbuhan sektor industri yang positif tetapi kontribusinya terhadap PDRB dari Tahun ke Tahun mengalami penurunan. Sektor industri merupakan sektor kunci (key sector) dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor Industri di Kabupaten Morowali Utara memberikan kontribusi signifikan terhadap perolehan PDRB Kabupaten Morowali Utara. Nilai Sektor Industri PDRB ADHB sebesar 280.833,80 juta, dan PDRB ADHK 2010 sebesar 155.532,20 juta. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara sebesar 2,50 persen meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB ADHK 2010 sebesar 2,51 persen. Data persentase kontribusi Sektor Industri terhadap total PDRB Kabupaten Morowali Utara selama kurun 2016-2020 terlihat pada Tabel 2.88 sebagai berikut.

Tabel 2.88
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	
Nilai Sektor Industri					
Nilai Sektor Industri ADHB	97.574,00	137.969,00	152.035,00	166.174,00	280.833,8
Nilai Sektor Industri ADHK 2010	76.604,00	97.665,00	103.446,00	107.123,00	155.532,2
Nilai PDRB					



Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	
Nilai PDRB ADHB	8.317.377	8.968.534	10.099.325	11.767.230	11.203.762
Nilai PDRB ADHK 2010	6.205.261	6.578.529	7.163.186	7.911.624	8.072.844
Kontribusi Terhadap					
PDRB ADHB	1,17	1,54	1,51	1,41	2,50
PDRB ADHK 2010	1,23	1,48	1,44	1,35	2,51

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Gambar 2.103 sebagai berikut.

Gambar 2.103
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

b). Kontribusi Sektor Jasa Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri

Nilai Sektor Jasa Rumah Tangga PDRB ADHB sebesar Rp166.174,00 juta, dan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp45.993,40 juta. Kontribusi Sektor Jasa Rumah Tangga ini terhadap Sektor Industri PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara sebesar 41,48 persen menurun dari Tahun sebelumnya. Sedangkan, untuk Sektor Industri PDRB ADHK 2010 sebesar 42,94 persen. Persentase kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Tabel 2.89 sebagai berikut.

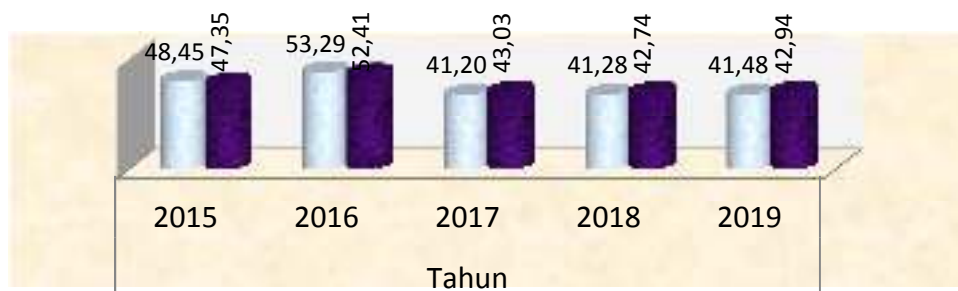


Tabel 2.89
Kontribusi Sektor Jasa Rumah Tangga terhadap PDRB
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Sektor Industri					
Nilai Sektor Industri ADHB	39.330,59	51.999,26	56.842,85	62.759,44	68.928,31
Nilai Sektor Industri ADHK 2010	31.240,09	40.150,77	42.028,96	44.207,79	45.993,40
Nilai PDRB					
Nilai PDRB ADHB	81.178,00	97.574,00	137.969,00	152.035,00	166.174,00
Nilai PDRB ADHK 2010	65.972,00	76.604,00	97.665,00	103.446,00	107.123,00
Kontribusi Terhadap					
Sektor industri PDRB ADHB	48,45	53,29	41,20	41,28	41,48
Sektor industri PDRB ADHK 2010	47,35	52,41	43,03	42,74	42,94

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Gambar 2.104
Kontribusi Sektor Industri Rumah Tangga terhadap Sektor Industri
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



■ Sektor industri PDRB ADHB ■ Sektor industri PDRB ADHK 2010

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Perkembangan kontribusi Sektor Jasa Rumah Tangga terhadap nilai Sektor Industri PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 terdapat pada Gambar 2.104.

c). **Pertumbuhan Industri**

Pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali Utara masih cukup rendah. Sektor Pertambangan belum mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Hal ini terlihat dari pertumbuhan industri negatif atau mengalami penurunan. Pertumbuhan industri di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 negatif (-32,65) persen. Pertumbuhan industri yang negatif tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam mendukung Sektor Pertambangan. Memaksimalkan multiplayer effect



dari Sektor Pertambangan dapat dijadikan sebagai strategi mengembangkan Sektor Industri di Kabupaten Morowali Utara. Data pertumbuhan industri Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 2.90 sebagai berikut.

Tabel 2.90
Pertumbuhan Industri
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri	166	166	151	98	66
Pertumbuhan Industri	-	-	(9,04)	(35,10)	(32,65)

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Strategi pengembangan industri di Kabupaten Morowali Utara dimuat dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2040 dengan fokus pada industri andalan terdapat pada Tabel 2.91 sebagai berikut.

Tabel 2.91
Industri Prioritas Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020-2040

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2020-2024	2025-2024	2030-2040	
1	2	3	4	5	6
1.	Industri Pangan	1. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian dan Peternakan			
		• Pengolahan Sagu • Pengolahan Makanan • Pengolahan hasil pertanian • Ayam Petelur dan Pedaging	• Pengembangan Pangan olahan bernahan baku Sagu, Kopi dan hasil pertanian lainnya.	• Daging Sapi Beku • Daging dalam kaleng • Industri Bakso ayam • Industri Kopi	Zona 1 : Kecamatan Lembo Zona 2: Kecamatan Petasia Barat dan Petasia Zona 3: Kecamatan Mamosalato, Bungku Utara, dan Soyojaya
		2. Industri berbahan baku Ikan dan Hasil Kelautan			
		• Pengolahan Ikan air tawar (Gabus) • Rumput Laut (carragenan, minyak ikan, dan suplemen ikan • Aneka olahan ikan (boto-boto, “Bajabu” ikan, abon ikan), dan hasil hasil laut lainnya.	• Pengembangan Industri Kecil pengolahan bahan baku ikan air tawar dan rumput laut.	• Aneka produk berbahan baku ikan • Tepung ikan • Ikan kaleng • Minyak Omega 3 • Pangan fungsional berbasis limbah industri hasil laut	Zona 1: Kecamatan Lembo Raya dan Lembo Zona 2: Kecamatan Petasia Barat Petasia, dan Petasia Timur. Zona 3: Bungku Utara



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2020-2024	2025-2024	2030-2040	
1	2	3	4	5	6
2.	Industri Hulu Agro	1. Industri Pengolahan Minyak Nabati			
		• Industri margarine • Olein • VCO • Asam lemak nabati	• Minyak goreng (Kelapa, kelapa sawit) Dan produk turunan hasil • Pengolahan minyak nabati	• Plastik bio berbasis limbah industri sawit • Polimer turunan minyak sawit	• Zona 1: Mori Atas, Mori utara, Lembo, Lembo Raya, • Zona 2: Kecamatan Petasia Timur, Petasia Barat • Zona 3: Kecamatan Mamolato dan Bungku Utara
		2. Industri Pengolahan Karet			
		• Pengolahan Getah Karet • Solid Lateks • Crumb Rubber • Olahan karet lainnya	• Industri pengolahan karet berbasis IKM getah karet	• Industri Pengolahan Ban • Bantalan kendaraan berbahan karet.	• Zona 1: Kecamatan Lembo Lembo Raya, dan Mori Atas • Zona 2: petasia barat, petasia timur,
		3. Industri Pengolahan Kakao			
		• Industri Coklat produk setengah jadi (pasta, lemak dan bubuk cokelat).	• Pengolahan Bubuk coklat • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kakao	• Makanan berbahan baku Coklat	Zona 1: Kecamatan Mori Utara, Zona 3: Sojojaya
3.	Industri Textil, kulit, Alas kaki dan Aneka	Industri Furnitur dan barang lainnya dari kayu, rotan dan Obat Herbal			
		• Kerajinan dan ukiran kayu • Kerajinan lainnya • Getah Damar • Getah Pinus • Furnitur kayu dan Rotan serta karet • Obat Herbal berbahan baku tumbuhan	• Pengembangan IKM kerajinan ukiran kayu dan lainnya • Furniture rotan dan kayu serta karet	• Kerajinan berbahan baku kayu • Kerajinan kayu dan Rotan serta karet yang memiliki nilai tinggi • Pakaian dan alas kaki bahan baku karet	- Zona 2: Kecamatan Petasia, Petasia Barat, - Zona 3: Kecamatan mamosalato, Bungku Utara dan Sojojaya
4	Industri Logam	1. Industri Logam			
		• Industri	• Industri	• Industri Baja	Zona 2:



No.	Industri Prioritas	Jenis Industri			Wilayah Potensial
		2020-2024	2025-2024	2030-2040	
1	2	3	4	5	6
	dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	pengolahan Biji Nikel (feronikel) • Nikematte • Nikel Murni	turunan berbahan baku stainless steel	dan Stainless steel • Industri Nikel Alloys	Kecamatan Petasia
		2. Industri Bahan Galian Bukan Logam			
		• Industri Semen • Batu bata dan Batako	• Industri granit, marmer dan Keramik	• Industri granit, marmer dan Keramik	Zona 2: Kecamatan Petasia, Petasia Timur

Sumber: Dokumen RPIK Morowali Utara, 2020

2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 45 Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah membagi unsur penunjang Urusan Pemerintahan urusan meliputi perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

2.3.3.1. Perencanaan

Kondisi daerah terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu 1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda; 2) Tersedianya Dokumen Perencanaan; RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada; 3) Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada; 4) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda; 5) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD; 6) Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan 7) Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW; yang dijelaskan sebagai berikut.

a) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 Tahun. Dalam kaitan tersebut seluruh produk perencanaan pembangunan di kabupaten Morowali Utara selama 5(lima) Tahun terakhir tersedia Dokumen RPJPD Kabupaten Morowali Utara telah tersedian dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010 Nomor 1) yang terdapat pada Tabel 2.92 sebagai berikut.



Tabel 2.92

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	20197	2018	2010	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten morowali Utara, 2021.

b) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) Tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi ,dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah tersedia dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4) terdapat pada Tabel 2.93 sebagai berikut.

Tabel 2.93

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	20197	2018	2010	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten morowali Utara, 2021.

c) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat. Setiap taunnya pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun dokumen RKPD oleh Badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.94 sebagai berikut.



Tabel 2.94

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	20197	2018	2010	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, 2021.

d) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen RTRW kabupaten Morowali Utara telah disusun pada Tahun 2016 dan ditetapkan melalui peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Utara terdapat pada Tabel 2.95 sebagai berikut.

Tabel 2.95

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	20197	2018	2010	2020
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara, 2021.

2.3.3.2. Keuangan

Kondisi daerah terkait dengan Keuangan Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu: Opini BPK terhadap laporan keuangan; Persentase SILPA; Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana; Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana; Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10 persen); Persentase belanja lang-sung; Persentase belanja belanja tidak langsung; Bagi hasil kabupaten/kota dan desa; dan Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu. Capaian indikator dijelaskan sebagai berikut.

a) Opini BPK terhadap laporan keuangan

Periode Tahun 2015-2017 BPK memberikan opini audit atas LKPD Kabupaten Morowali Utara “Tidak Memberikan Pendapat”. Perbaikan penatausahaan pengelolaan keuangan terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Morowali terlihat dari Opini LKPD Tahun 2018 menjadi “Wajar Dengan Pengecualian”. Tahun 2019 dan , LKPD Kabupaten Morowali Utara mendapat opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian”. Perkembangan Opini audit BPK atas LKPD Kabupaten Morowali Utara pada Tabel 2.96.



Tabel 2.96
Opini BPK Atas LKPD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

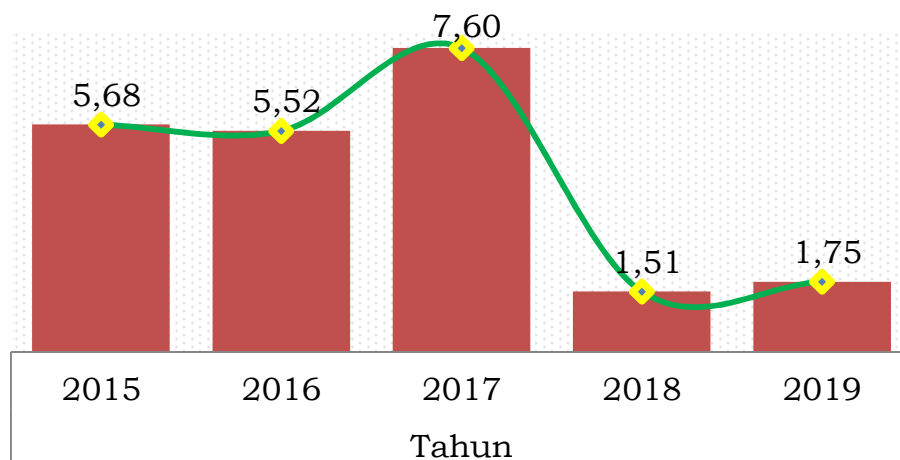
Tahun	Opini BPK
2016	Disclaimmer
2017	Disclaimmer
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, 2021

b) Persentase SiLPA terhadap APBD

Perkembangan Nilai SiLPA Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 perkembangannya berfluktuatif. Pada Tahun 2015 jumlah SiLPA sebesar Rp39.997.577.436,00 dan pada Tahun 2019 sebesar Rp18.525.161.964,12. Persentase SiLPA terhadap APBD Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2015 sebesar 5,68 persen, meningkat pada Tahun 2017 menjadi 7,60 persen. DiTahun 2019 persentase terhadap total APBD sebesar 1,75 persen. Data mengenai Persentase SiLPA terhadap APBD Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.105 sebagai berikut.

Gambar 2.105
Persentase SiLPA Terhadap APBD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



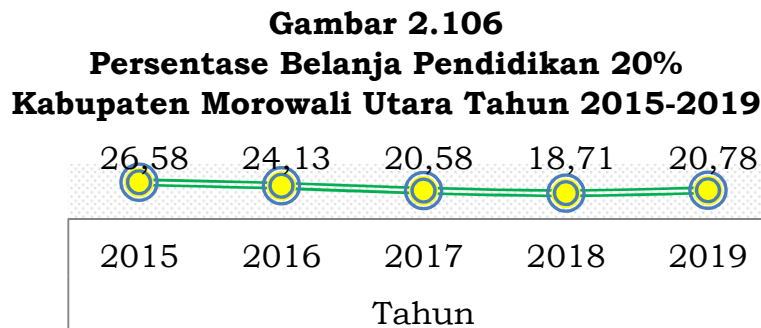
Sumber: BPKAD Kabupaten Morowali Utara, 2020 (Diolah Kembali).

c) Persentase belanja pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan dari total APBD sebesar 20% diatur dalam Undang-undang dasar. Total dana belanja pendidikan pada Tahun 2015 sebesar 26,58 persen atau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2018 alokasi belanja pendidikan dibawah 20% yakni sebesar 18,71 persen. Pada Tahun 2019 kembali meningkat dan di atas 20 persen yakni sebesar 20,78 persen. Data mengenai perkembangan persentase belanja urusan



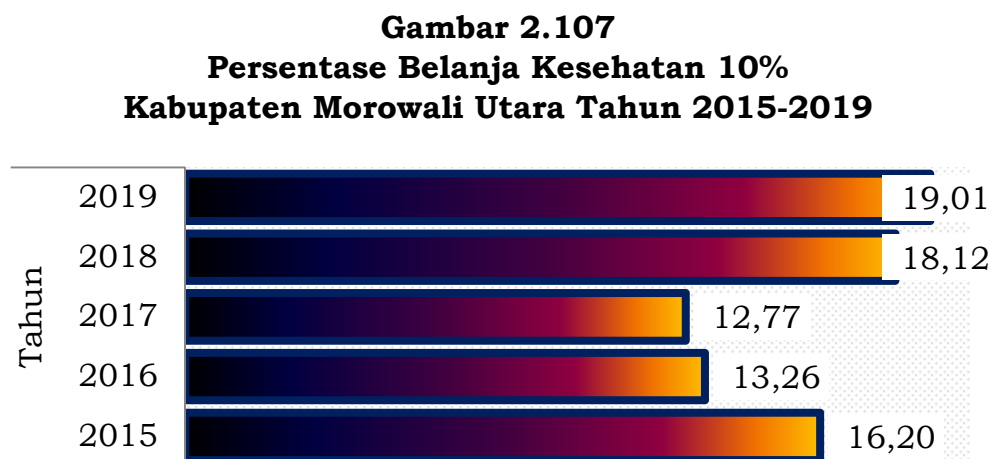
pendidikan di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 2.106.



Sumber: BPKAD Kabupaten Morowali Utara, 2020 (Diolah Kembali).

d) Persentase belanja kesehatan (10%)

Alokasi belanja kesehatan di Kabupaten Morowali Utara melekat pada dinas kesehatan dan RSUD Kabupaten Morowali Utara. Perkembangan data belanja kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Gambar 2.107 sebagai berikut.



Sumber: BPKAD Kabupaten Morowali Utara, 2020 (Diolah Kembali).

Merujuk pada Gambar 2.117 di atas, dapat diketahui bahwa, alokasi anggaran belanja kesehatan di Kabupaten Morowali Utara sudah cukup tinggi. Ini menunjukkan komitmen yang tinggi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan ke masyarakat. Pada Tahun 2015 alokasi belanja kesehatan sebesar 16,20 persen, meningkat pada Tahun 2019 menjadi 19,10 persen.

e) Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Alokasi belanja langsung di Kabupaten Morowali Utara lebih besar dari anggaran belanja tidak langsung. Dimana hingga Tahun 2019 besaran anggaran belanja langsung sebesar 53,44 persen, sedangkan untuk anggaran tidak langsung sebesar 46,56 persen, seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.108 sebagai berikut.



Gambar 2.108
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung



Sumber: BPKAD Kabupaten Morowali Utara, 2020 (Diolah Kembali).

f) Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2015-2019 selalu ditetapkan tepat waktu yang terdapat pada Tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97
Penetapan APBD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Morowali Utara, 2020 (Diolah Kembali)

2.3.3.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi daerah terkait dengan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan salah satunya dapat dilihat dari; Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan; Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah. Adapun Data Capaian Kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut :



A. Urusan Kepegawaian

1. Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Gender

Tabel 2.98
Data PNS Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Gender

No.	Gender	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Laki-laki	1336	1297	1537	1555	1509
2	Perempuan	1376	1532	1887	1907	1889
Jumlah		2712	2829	3424	3462	3398

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2. Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.99
Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	SD	3	3	3	3	2
2	SLTP	5	5	5	6	8
3	SLTA	883	862	841	775	722
4	D1	45	42	40	35	29
5	D2	148	141	135	121	105
6	D3	204	217	244	260	264
7	S1/D4	1324	1451	2042	2150	2132
8	S2	93	101	107	110	125
9	PROFESI	7	7	7	2	3
10	Lainnya	0	0	0	0	8
Jumlah		2712	2829	3424	3462	3398

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

3. Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Golongan

Tabel 2.100
Data PNS Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	I	11	11	8	6	5
2	II	712	722	765	699	643
3	III	1432	1491	1994	2082	2075
4	IV	557	605	657	675	675
Jumlah		2712	2829	3424	3462	3398

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021



4. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Prajabatan

Tabel 2.101
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Prajabatan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Golongan I		-		-	
2	Golongan II	67	-	43	-	17
3	Golongan III	4	-	494	-	80
4	Dokter	7	-		-	
Jumlah		78	0	537	0	97

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

5. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

Tabel 2.102
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Diklatpim Tk. II	2	2	-	-	-
2	Diklatpim Tk. III	-	15	-	-	3
3	Diklatpim Tk. IV	60	60	-	-	-
Jumlah		62	75	0	0	3

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

6. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis

Tabel 2.103
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Diklat teknis pelayanan prima	-	-	-	-	-
2	Diklat teknis dasar bagi polisi pamong praja	-	-	-	-	-
3	Diklat pengelolaan aset/barang daerah	-	-	-	-	-
4	Bimtek tata naskah dinas elektronik	-	-	-	-	-
5	Bimtek Penatausahaan keuangan berbasis akrual	-	-	-	-	-
6	Diklat teknis pengelolaan kepegawaian	-	-	-	-	-
7	Diklat teknis dasar bidang jalan dan jembatan	-	-	-	-	-
8	Diklat teknis Penyusunan Renstra	-	-	-	-	-
9	Diklat Revolusi Mental	-	-	-	-	-



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
10	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat dan pejabat strategis	-	-	-	-	-
11	Diklat teknis lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	0	0	0

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

7. Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Fungsional

Tabel 2.104
Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Fungsional Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Diklat P2UPD	-	-	-	-	-
2	Diklat Pembentukan Auditor Ahli	-	-	-	-	-
3	Diklat Substantif Pengawas Pemerintahan	-	-	-	-	-
4	Diklat Fungsional Peneliti Pratama I	-	-	-	-	-
5	Diklat Pembentukan Penjenjangan Auditor	-	-	-	-	-
11	Diklat fungsional lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		0	0	0	0	0

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

8. Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat

Tabel 2.105
Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat

No.	Jenis KP	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Gol.IV/d ke IV/e	0	0	0	0	0
2	Gol.IV/c ke IV/d	0	0	0	1	0
3	Gol.IV/b ke IV/c	1	0	1	3	2
4	Gol.IV/a ke IV/b	26	23	46	28	21
5	Gol.III/d ke IV/a	48	36	52	42	37
6	Gol.III/c ke III/d	52	52	57	53	44
7	Gol.III/b ke III/c	66	60	84	62	73
8	Gol.III/a ke III/b	57	58	73	59	63
9	Gol.II/d ke III/a	59	51	66	57	74
10	Gol.II/c ke II/d	42	46	47	43	49
11	Gol.II/b ke II/c	37	48	43	39	45
12	Gol.II/a ke II/b	37	35	46	44	38
13	Gol.I/d ke II/a	1	0	3	2	1
14	Gol.I/c ke I/d	0	1	0	0	0
15	Gol.I/b ke I/c	0	0	0	0	0
16	Gol.I/a ke I/b	0	0	0	0	0
Jumlah		426	410	518	433	447

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021



9. Jumlah Pemberian Penghargaan

Tabel 2.106
Jumlah Pemberian Penghargaan

No.	Jenis Penghargaan	Masa Kerja	Jumlah (Orang)/Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7
1	SATYALANCANA KARYA SATYA	XXX	10	15	9	0	0
2	SATYALANCANA KARYA SATYA	XX	40	30	10	0	0
3	SATYALANCANA KARYA SATYA	X	55	67	60	0	0
Jumlah			105	112	79	0	0

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

10. Jumlah Pegawai Yang Cuti

Tabel 2.107
Jumlah Pegawai Yang Cuti

No.	Uraian	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Cuti Karena Alasan Penting	8	7	10	20	60
2	Cuti Tahunan	125	163	570	273	254
3	Cuti Besar	0	0	4	2	4
4	Cuti di Luar Tanggungan Negara	0	0	0	-	0
5	Cuti Melahirkan	149	123	145	159	42
6	Cuti Bebas Tugas	0	0	0	0	0
7	Cuti Sakit	0	2	15	5	21
8	MPP	0	0	0	0	0
Jumlah		282	295	744	459	381

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

11. Jumlah Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin

Tabel 2.108
Jumlah Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin
Tahun 2017-2021

NO.	INDIKATOR		Jumlah (Orang)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7
1	SANKSI BERAT						
	a	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun	0	0	0	0	2
	b	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0	0	0



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO.	INDIKATOR		Jumlah (Orang)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7
	c	Pembebasan dari jabatan	2				1
	d	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	0	0	0	0	0
	e	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	10	0	1	0
2	SANKSI SEDANG						
	a	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun					
	b	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun					
	c	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun					
3	SANKSI RINGAN						
	a	Teguran Lisan	0	0	0	0	0
	b	Teguran Tertulis	0	0	20	18	0
	c	Pernyataan tidak puas secara tertulis	0	0	0	0	0
Jumlah			2	10	20	19	3

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

12. Jumlah Pemrosesan Ijin Perkawinan Dan Perceraian

Tabel 2.109
Jumlah Pemrosesan Ijin Perkawinan Dan Perceraian
Tahun 2017-2021

NO.		Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		3	4	5	6	7
1	Berkas Masuk	1	1	2	7	6
2	Terbit SK	1	1	2	7	6
3	Berkas yang dicabut (Rujuk)	-	1	1	-	2
Jumlah		2	3	5	14	14

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

13. Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar Daerah

Tabel 2.110
Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar Daerah
Tahun 2017-2021

NO.	MUTASI ANTAR DAERAH	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		3	4	5	6	7
1	Dari Kabupaten Morowali Utara ke Luar Kabupaten Morowali Utara					
	- Dalam Proses	0	0	0	0	7
	- Proses	5	13	5	10	1



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO.	MUTASI ANTAR DAERAH	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		3	4	5	6	7
	- Ditolak	0	0	0	0	0
2	Dari Luar Kabupaten Morowali Utara ke Kabupaten Morowali Utara	12	20	42	23	36
	- Dalam Proses	0	0	32	5	28
	- Proses	5	4	3	8	0
	- Ditolak	2	3	2	0	0
Jumlah		12	20	42	23	36

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

14. Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Tabel 2.111

Jumlah Pemrosesan Perpindahan Pegawai Antar Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

NO.	URAIAN	Jumlah (Orang)
1	2	3
1	TAHUN 2017	24
2	TAHUN 2018	38
3	TAHUN 2019	50
4	TAHUN 2020	27
5	TAHUN 2021	28

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

15. Jumlah PNS Yang Pensiun

Tabel 2.112

Jumlah Pns Yang Pensiun

No.	Jenis Pensiun	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Batas Usia Pensiun (BUP)	30	38	44	33	75
2	Atas Permintaan Sendiri (APS)	0	1	1	1	-
3	Janda/Duda/Meninggal Dunia	9	10	3	4	4
4	Mengundurkan Diri	0	0	0	0	0
Jumlah		39	49	48	38	79

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021



16. Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Tabel 2.113
Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat

NO.	TINGKAT UJIAN/JURUSAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	UJIAN DINAS TINGKAT I	0	17	19	0	0
2	UJIAN DINAS TINGKAT II	0	76	21	0	0
3	PASCA SARJANA (S2)	0	2	2	0	0
4	SARJANA (S1)	0	82	32	0	0
5	UJIAN PENYESUAIAN PAKET C	0	1	0	0	0
6	UJIAN PENYESUAIAN PAKET B	0	0	0	0	0
Jumlah		0	178	74	0	0

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

17. Data Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar

Tabel 2.114
Data Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar

NO.	PROGRAM/TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	D-III	3	1	1	0	0
2	D-IV	0	0	0	0	0
3	S-1	2	3	0	0	2
4	S-2	0	0	0	0	0
5	S-3	0	0	0	0	0
Jumlah		5	4	1	0	2

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021



18. Data Pegawai Yang Ijin Belajar

Tabel 2.115
DATA PEGAWAI YANG IJIN BELAJAR

NO.	PROGRAM/ TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	SMA Sederajat	13	23	23	5	8
2	D-III	1	26	10	8	1
3	D-IV	0	0	0	0	1
4	S-1	0	7	11	22	36
5	S-2	0	0	0	0	0
6	S-3	0	0	0	0	0
7	PROFESI	0	0	0	0	0
Jumlah		14	56	44	35	46

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

19. Data Capaian Kinerja Lainnya

Tabel 2.116
DATA CAPAIAN KINERJA LAINNYA

NO.	PROGRAM/TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemrosesan KARPEG	-	67	11	286	18
2	Pemrosesan KARIS	13	24	14	7	6
3	Pemrosesan KARSU	15	37	23	8	10
4	Pemrosesan Kartu TASPEN dan Taperum	-	78	-	632	-
5	Data Penempatan dan Perpindahan Jabatan Fungsional	2504	2529	2927	2950	2312
6	Evaluasi Kinerja PNS	-	78	-	537	-
7	Penempatan dan Perpindahan PNS dalam jabatan struktural	13	24	14	7	6
8	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan, peningkatan status CPNS menjadi PNS	15	37	23	8	10
JUMLAH		2532	2813	2975	4405	2346

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021



20. Daftar Prediksi Pensiun PNS Tahun 2021-2026

Tabel 2.117
Daftar Prediksi Pensiun PNS Tahun 2021-2026

NO.		UNIT KERJA	Jumlah (Orang)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
A		SEKRETARIAT DAERAH					
	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
		- Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-
		- Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-
		- Bagian Hukum	-	-	-	-	-
	2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-
		- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-
		- Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-
		- Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-
	3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	-	-	-	-	-
		- Bagian Umum	-	-	1	1	-
		- Bagian Organisasi	-	-	-	-	-
		- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1
B		SEKRETARIAT DPRD	1	-	1	-	1
C		INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-
D		BADAN	-	-	-	-	-
	1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-
	2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	1	1	-	-
	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	-	-	-	-
	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	1	3
	5	Badan Kesatuan Bangsa Daerah	1	-	-	-	-
	6	Badan Pendapatan Daerah	-	5	-	-	-
E		BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)					
	1	RSUD KOLONODALE	-	1	3	2	4
F		DINAS					
	1	Dinas Pendidikan dan	38	30	53	54	51



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO.		UNIT KERJA	Jumlah (Orang)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
		Kebudayaan Daerah					
	2	Dinas Kesehatan Daerah	2	-	2	4	3
	3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman Daerah	1	5	4	1	2
	4	Dinas Perhubungan Daerah	-	-	-	1	-
	5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	-	1	-	-	-
	6	Dinas Sosial Daerah	1	-	-	1	-
	7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	-	-	1	-	-
	8	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	-	1	2	4	5
	9	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1	-	-	-	-
	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	1	1	-	1	1
	11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	-	-	-	-	3
	12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	-	-	2	2
	13	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	-	-	-	2	-
	14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	-	-	2	1	-
	15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Daerah	2	1	-	-	-
	16	Dinas Perpustakaan Daerah	-	1	-	-	-
	17	Dinas Perikanan Daerah	-	-	1	-	1
	18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	1	-	-	1	-
G	KECAMATAN						
	1	Kecamatan Petasia	-	1	2	-	2
	2	Kecamatan Lembo	2	1	2	2	3
	3	Kecamatan Mori Atas	1	-	-	3	1
	4	Kecamatan Bungku Utara	-	1	-	1	2
	5	Kecamatan Soyo Jaya	1	1	-	-	-
	6	Kecamatan Mamosalato	-	1	2	1	2
	7	Kecamatan Lembo Raya	-	1	-	1	1



NO.		UNIT KERJA	Jumlah (Orang)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5	6	7
	8	Kecamatan Mori Utara	-	1	3	1	2
	9	Kecamatan Petasia Timur	-	-	3	2	-
	10	Kecamatan Petasia Barat	-	1	1	-	1
JUMLAH			55	55	84	87	91

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2021

2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan pengembangan yang mencakup ketersediaan Dokumen Penelitian dan pengembangan yang dapat mempermudah perencanaan sebagai sektor penunjang guna mendukung pembangunan pada sektor lainnya diantaranya pembangunan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa serta memicu daya saing ekonomi.

2.3.3.5. Fungsi Lainnya

1. Pengawasan

Urusan Pengawasan yang mencakup ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mempermudah akses masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut sebagai sektor penunjang guna mendukung pembangunan pada sektor lainnya diantaranya pembangunan pertanian, kegiatan perdagangan dan jasa serta memicu daya saing ekonomi.

2. Sekretariat Daerah

Kondisi daerah terkait dengan urusan Sekretariat Dewan salah satunya dapat dilihat dari indikator seperti 1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten; 2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); dan 3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Capaian urusan Sekretariat Dewan dapat dilihat pada Tabel 2.117 sebagai berikut.



Tabel 2.118
Gambaran Capaian Indikator Sekretariat Dewan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Morowali Utara	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Morowali Utara, 2020

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah di Kabupaten Morowali Utara meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagai berikut.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data mengenai Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya. Dimana pada Tahun 2015 sebesar 131,01 meningkat pada Tahun 2017 menjadi 143,06 hingga Tahun 2019 menjadi 157,58.



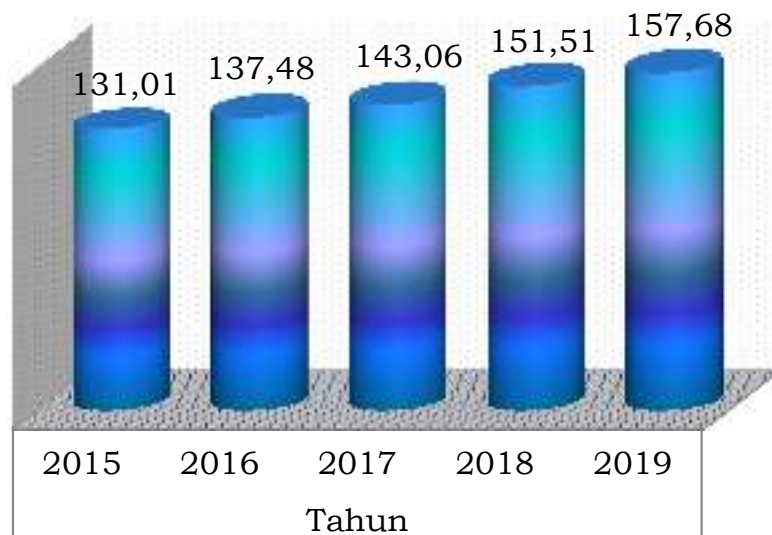
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kaitan fokus kemampuan ekonomi daerah dengan daya saing daerah yakni kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan yang akan masuk ke suatu daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita; Nilai Tukar Petani; Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan); Produktivitas total daerah; Rasio Ekspor+Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi); Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum; dan Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank BPR.

1). Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data mengenai Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya. Dimana pada Tahun 2015 sebesar 131,01 meningkat pada Tahun 2017 menjadi 143,06 hingga Tahun 2019 menjadi 157,58, yang dapat dilihat pada Gambar 2.109 berikut ini.

Gambar 2.109
Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

2). Nilai Tukar Petani

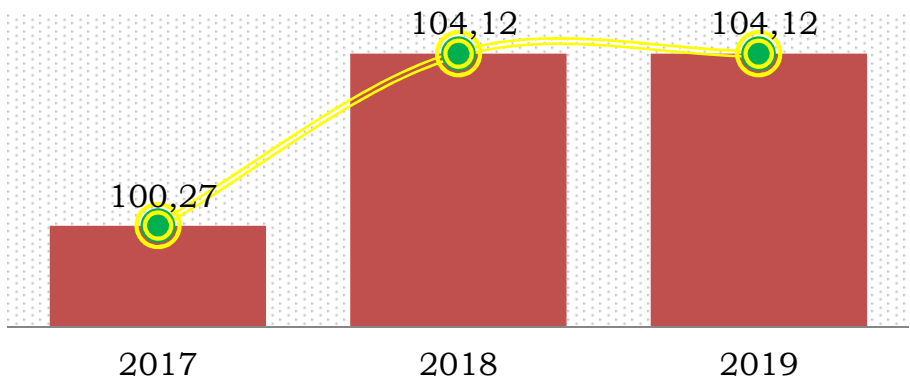
Nilai Tukar Petani juga memiliki manfaat sebagai tolak ukur kemampuan tukar produk yang dijual dari petani dengan berbagai produk yang dibutuhkan dalam segala produksi dan konsumsi



rumah tangga.

Perkembangan Nilai Tukar Petani di Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 NTP Kabupaten Morowali Utara sebesar 100,27, meningkat pada Tahun 2018 menjadi 104,12, dan hingga Tahun 2019 NTP Kabupaten Morowali Utara sebesar 104,12. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Gambar 2.110.

Gambar 2.110
Nilai Tukar Petani
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

3). Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Data Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) Tahun 2015-2020 terdapat pada Gambar 2.111 berikut ini. Berdasarkan pada gambar di atas, diketahui bahwa Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2015 sebesar Rp335.038, meningkat hingga Tahun 2020 menjadi Rp566.356, rata peningkatan dalam kurun Tahun 2015-2019 sebesar 7,98 persen.



Gambar 2.111
Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase
Konsumsi RT Non-Pangan) Kabupaten Morowali Utara Tahun
2015-2020



Sumber: BPS, 2020 dan 2021 (Diolah Kembali).

4). Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Lapangan Usaha di Kabupaten Morowali Utara yang menunjang pembentukan PDRB Kabupaten Morowali Utara. Data mengenai produktivitas total daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.119
Produktivitas Total Daerah Persektor
Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	52,52	53,53	47,25	48,33	59,14
Pertambangan dan Penggalian	26,00	29,78	36,52	48,11	70,60
Industri Pengolahan	1,48	1,78	2,08	2,23	2,74
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,07	0,08	0,10
Konstruksi	40,11	41,36	25,57	23,87	29,63



Lapangan Usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Perdagangan Besardan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,12	10,46	9,65	10,58	12,96
Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,52	0,47	0,51	0,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,37	0,33	0,35	0,44
Informasi dan Komunikasi	2,76	2,97	2,74	2,97	3,74
JasaKeuangan dan Asuransi	0,50	0,64	0,60	0,67	0,84
Real Estate	2,56	2,75	2,41	2,53	3,18
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	3,38	3,09	3,39	4,27
Jasa Pendidikan	2,01	2,28	2,07	2,22	2,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,11	1,26	1,14	1,20	1,51
Jasa lainnya	0,80	0,95	0,92	1,07	1,35
Produktivitas Total Daerah	142,77	152,14	134,94	148,17	193,88
Jumlah Angkatan Kerja	54.668	54.668	66.462	68.159	60.693

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Produktivitas total daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran dari Nilai PDRB dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Morowali Utara. Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2015 sebanyak 54.668 orang, hingga tahun 2019 meningkat menjadi 60.693 orang. Selanjutnya produktivitas total daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2015 sebesar 142,77 juta meningkat hingga tahun 2019 menjadi 193,88.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/ infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan (*competitiveness*).



Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari; aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan.

1). Perkembangan Infrastruktur

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan yang melintasi Kabupaten Morowali utara sesuai data BPS tahun 2021 meliputi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan negara sepanjang 207,39 km, kewenangan provinsi 145,940 km dan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 938,77 km. Berdasarkan data BPS tahun 2021, kondisi jalan Kabupaten Morowali Utara dalam keadaan baik adalah 52,54 km, dalam kondisi sedang 430,77 km, dalam kondisi rusak sepanjang 296,61 km dan rusak berat 158,86 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan terdiri dari jalan aspal sepanjang 146,03 km, tidak beraspal 792,74 km.

Infrastruktur Irigasi

Kondisi irigasi di Kabupaten Morowali Utara sesuai jenis irigasi yang fungsional sesuai luas lahan sawah (luas areal terolah) meliputi irigasi teknis 1.741 hektar, irigasi semi teknis 1.359 hektar, irigasi sederhana 2.243 hektar dan irigasi desa/non PU mencapai 611 hektar sehingga total luas areal irigasi fungsional mencapai 5.954 hektar. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.120
Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan

Kecamatan	Irigasi/Non Irigasi (Ha)							
	Lahan Sawah	Irigasi Teknis	Irigasi Semi Teknis	Irigasi sederhana	Irigasi desa/ non PU	Tadah Hujan	Pasang surut	Polder
Soyojaya	1.241	869	155	79	120	18	-	-
Petasia Timur	1.274	210	-	0	150	374	540	-
Petasia	2.982	75	-	300	-	605	2.002	2.004
Petasia Barat	2.982	75	-	300	-	605	2.002	2.004
Mori Utara	989	55	230	651	53	0	-	-
Mori Atas	615	75	445	28	0	67	-	-
Mamosalato	1.001,75	152	-	625	57	165,75	-	-



Kecamatan	Irigasi/Non Irigasi (Ha)							
	Lahan Sawah	Irigasi Teknis	Irigasi Semi Teknis	Irigasi sederhana	Irigasi desa/ non PU	Tadah Hujan	Pasang surut	Polder
Lembo Raya	385	25	-	260	169	481	-	-
Lembo	882	-	334	-	-	488	-	-
Bungku Utara	983	205	195	-	62	521	-	-
Jumlah	13.334,75	1.741	1.359	2.243	611	3.324,75	4.544	4.008

Sumber: Kecamatan dalam Angka Tahun 2018 (diolah kembali)

Infrastruktur Kelistrikan

Berdasarkan persebarannya, sumber daya listrik yang dikelola PT. PLN di Kabupaten Morowali Utara belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Tenaga listrik yang diproduksi oleh PLN di Kabupaten Morowali pada tahun 2016 adalah sebesar 21.614.015 KWh dan data terakhir tahun 2020 sebesar 42.058.336 KWh. Sumber energi listrik yang diproduksi tersebut didistribusikan kepada sebanyak 16.778 pelanggan. Pelanggan tersebut terdiri atas rumah tangga, instansi pemerintah, swasta, industri dan lain-lain dengan jumlah listrik terjual sebesar 36.406.355 KWh. Gambaran lebih jelas terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.121

Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN pada Cabang/Ranting Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Tahun	Produksi (Kwh)	Daya Terpasang	Terjual (Kwh)	Nilai Terjual	Dipakai sendiri	Susut (Kwh)
2016	21.614.015	9.900	N/A	N/A	120.446	17.04
2017	3.090.220	7.000	3.088.366	N/A	1.854	0,7125
2018	35.644.279	23.719.530	31.606.171	N/A	177.793	4.038.108
2019	35.644.279	23.719.530	31.606.171	N/A	177.793	4.038.108
2020	42.058.336	13.700.000	36.406.355	N/A	238.524	5.746.068

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka Tahun 2019; 2020 & 2021 (Diolah Kembali)

Infrastruktur Perhubungan

Kinerja perhubungan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari kinerja Sub Sektor Angkutan dan Masih relatif kecilnya kontribusi sub sektor angkutan pada PDRB Kabupaten Morowali Utara menunjukkan masih rendahnya tingkat aksesibilitas dan mobilitas yang terjadi di daerah setempat.



a) Rasio Panjang Jalan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan, Ketersediaan sarana jalan memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi serta aktivitas lainnya, Meningkatnya kebutuhan perhubungan atau transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.112
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2020



Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021 (diolah kembali)

b) Arus Lalu lintas Pelabuhan

Fungsi perhubungan laut adalah untuk memperlancar arus aksesibilitas antar daerah termasuk dalam hal pemasokan barang-barang kebutuhan dan pengiriman hasil produksi daerah, Sarana perhubungan laut di Kabupaten Morowali Utara berfungsi untuk transportasi penumpang dan barang, Tinggi rendahnya arus penumpang dan barang dalam suatu daerah memberikan gambaran dinamika perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial daerah tersebut, Suatu daerah yang frekuensi arus perpindahan orang, barang dan jasanya rendah akan mengakibatkan daerah tersebut semakin tertutup, demikian pula sebaliknya. Secara lebih jelasnya data mengenai Arus Lalu Lintas Melalui Pelabuhan di Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut.



Tabel 2.122
Arus Lalu Lintas Melalui Pelabuhan Per tahun
Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kapal					
- Datang	723	652	...	...	...
- Berangkat	731	664	...	...	...
Jumlah Orang					
- Turun	23.953	22.632	28.663	23.796	20.616
- Naik	19.565	22.789	26.090	18.346	12.375
Jumlah Barang					
- Bongkar	1.930.892.459	19.337.489	47.137.686	48.719.781	4.960.878
- Muat	149.092.484	1.643.094	2.279.588	4.659.628	1.716.053

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2018 (diolah kembali); Kabupaten Morowali Dalam Angka, 2020; Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2021



Tabel 2.123
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.1.1	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas	Triliun Rp.	7,8-8	8,3	8-8,5	8,9	8,5-9	10,1	10,1-10,5	11,09	10,5 -11	11,2
1.1.2	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas	Triliun Rp.	7,2-7,5	8,1	7,5-8	8,8	8-8,5	10,1	10,1-10,5	11,09	10,5 -11	11,2
1.1.3	PDRB-ADH Konstan dengan Migas	Triliun Rp.	5,8-6	6,2	6-6,5	6,58	6,5-7	7,69	7,1-7,5	8,09	7,5-8	8,07
1.1.4	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas	Triliun Rp.	5-5,5	6,0	5,5-6	6,48	6-6,6	7,69	7,5-8	8,09	8-8,5	8,07
1.1.5	Kontribusi Sektor PDRB-ADH Seri 2010											
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	35-36,64	35,19	34-35	35,01	33-34	32,31	32,55-33	32,08	33-34	31,37
	Pertambangan dan Pengalihan	Persen	18,54-19	19,58	19-20	27,06	20-21	32,27	33,1-34	32,33	34-35	32,74
	Industri Pengolahan	Persen	1,04-1,05	1,17	1,04-1,05	1,54	1,05-1,06	2,36	1,5-1,9	2,35	1,9-2,3	2,51
	Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0,01-0,02	0,01	0,01-0,02	0,01	0,018-0,019	0,01	0,1-0,2	0,01	0,1-0,2	0,01



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persen	0,05-0,07	0,05	0,07-0,09	0,06	0,09-0,1	0,06	0,6-0,65	0,06	0,65-0,7	0,06
	Konstruksi	Persen	27,98-28	27,18	28-28,1	18,95	28,1-28,2	16,01	15,58-15,68	16,21	15,68-15,78	16,29
	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	6,36-6,96	6,88	6,96-7,26	7,15	7,26-7,56	7,09	7,13-7,15	7,03	7,15-7,18	6,88
	Transportasi dan Pergudangan	Persen	0,32-0,34	0,34	0,30-0,32	0,35	0,28-0,30	0,31	0,35-0,37	0,32	0,37-0,39	0,24
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	0,24-0,27	0,24	0,27-0,30	0,24	0,30-0,33	0,23	0,24-0,27	0,24	0,27-0,30	0,22
	Informasi dan Komunikasi	Persen	1,92-1,94	1,95	1,94-1,96	2,03	1,96-1,98	1,99	2-2,02	2,05	2,02-2,04	2,18
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	0,35-0,45	0,42	0,45-0,55	0,45	0,55-0,65	0,45	0,45-0,55	0,46	0,55-0,65	0,49
	Real Estate	Persen	1,79-1,80	1,81	1,80-1,82	1,79	1,82-1,84	1,70	1,7-1,72	1,65	1,72-1,74	1,66
	Jasa Perusahaan	Persen	0,01-0,02	0,01	0,02-0,03	0,02	0,03-0,04	0,02	0,02-0,03	0,02	0,03-0,04	0,02
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	2,02-2,04	2,22	2,04-2,06	2,29	2,06-2,08	2,28	2,29-2,31	2,34	2,31-2,33	2,41
	Jasa Pendidikan	Persen	1,40-1,45	1,50	1,45-1,50	1,53	1,50-1,55	1,44	1,49-1,54	1,38	1,54-1,59	1,39
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	Persen	0,77-	0,83	0,87-0,97	0,84	0,97-1,07	0,81	0,81-0,91	0,83	0,91-1,01	0,91



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	Sosial		0,87									
	Jasa Lainnya	Persen	0,56-1	0,62	1-2	0,68	2-3	0,66	0,72-0,82	0,65	0,82-0,92	0,64
1.1.6	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku 2010 dengan Migas	Persen	7,76-11	15,63	11-15	7,83	15-17	13,30	6,49-7,49	9,15	7,49-8,49	1,01
1.1.7	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku 2010 tanpa Migas	Persen	8,12-12	12,83	12-15	8,94	15-18	14,93	8,09-10,09	9,15	10,09-12,09	1,01
1.1.8	Nilai PDRB Per Kapita ADH Berlaku	Jutaan Rp.	65-70	83,17	70-75	89,69	75-80	101,61	80,312-85	110,91	85-90	112,04
1.1.9	Nilai PDRB Per Kapita ADH Konstan	Jutaan Rp.	50-55	61,05	55-60	65,79	60-65	76,92	56-70	80,90	70-75	80,73
1.1.10	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Berlaku	Persen	0.08-0.12	0,066	0.08-0.12	0,078	0.08-0.12	0,133	8,10- 8.12	0,092	8.12-8.14	0,010
1.1.11	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Konstan	Persen	0.08-0.10	0,041	1,00	0,078	0.08-0.10	0,169	3,95-3.95	0,052	3,95-3,96	(0,002)
1.1.12	Laju inflasi	Persen	4-5	6,13	4-5	6,13	4-5	3,62	3,62-4,6	2,37	4,6-5,6	4,6-5,6
1.1.13	Gini Rasio	Indeks	0.36-0.37	0,340	0.35-0.36	0,336	0.34-0.35	0,314	0.40-0.43	0,314	0.43-0.46	0,314
1.1.14	Kemiskinan	Persen	14-15	16,07	13-14	15,73	12-13	15,53	15,53-14	15,08	14-13	14,41
1.1.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68-70	66,57	68-70	67,35	68-70	67,95	67,95-68,25	68,45	68,25-68,50	68,36
1.1.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3-4	5,43	3-4	2,0	3-4	2,16	2,12-1,65	3,12	1,65-1,12	5,16



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
2.	ASPEK PELAYANAN UMUM											
2.1.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.1.1	Pendidikan											
2.1.1.1	Pendidikan dasar:											
	- Tingkat SD/MI	Persen	63-65	89,36	65-68	90,78	68-72	90,39	55-55,75	91,35	55,75-60	91,05
	- Tingkat SMP/MTs	Persen	22-23	85,13	23-24	83,42	24-25	85,50	20,81-21	84,55	21-22	84,35
2.1.1.1.1	- Jumlah Sekolah SD/MI	Unit	142-144	155	144-146	152	146-148	152	152-155	156	152-155	155
	- Jumlah Murid SD/MI	Ribu Orang	19.5-20	12.947	20-20.5	14.312	20.5-21	14.551	13,899-14	14.272	14-15	13.608
	- Rasio SD/MI	Per 10.000	70-80	119,72	70-80	106,20	70-80	104,46	109,36-111,68	109,30	111,68 - 114	113,90
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	Unit	46-49	48	49-51	48	51-54	51	48-52	51	48-52	51
	- Jumlah Murid SMP/MTs	Ribuan Orang	6-6.2	6.221	6.3-6.5	5.911	6.5-6.7	6.585	5,9-7	6.808	7-7.5	6.801
	- Rasio SMP/MTs	Per 10.000	70-80	77,16	70-80	81,20	70-80	77,45	80,05 – 80,12	74,91	80,12 – 80,14	74,99
2.1.1.1.2	Rasio Guru terhadap murid											
	- Jumlah Guru SD/MI	Orang	850-860	1.351	860-870	1.410	870-880	1.238	1,410-1,420	1.360	1.420-1.430	1.388



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Jumlah Murid SD/MI	Orang	15.5-16 Ribu	12.947	16-16.5 Ribu	14.312	16.5-17 Ribu	14.551	13-14 Ribu	14.272	14-15 Ribu	13.608
	- Rasio SD/MI	Per 1.000	50-60	104.35	50-60	98,52	50-60	85,08	101-102	95,29	102-103	102,00
	- Jumlah Guru SMP/MTs	Orang	290-300	607	300-310	588	310-320	573	527-537	728	537-567	731
	- Jumlah Murid SMP/MTs	Orang	5.2-5.3 Ribu	6.221	5.3-5.4 Ribu	5.911	5.4-5.5 Ribu	6.585	5.6-5.7 Ribu	6.808	5.7-5.8 Ribu	6.801
	- Rasio SMP/MTs	Per 10.000	500-600	975,73	500-600	994,76	500-600	870,16	800-900	1.069,33	900-1000	1.074,84
	- Jumlah Guru Pendidkan Dasar	Orang	1.3-1.4 Ribu	1.958	1.4-1.5 Ribu	1.998	1.5-1.6 Ribu	1.811	1.9-2.0 Ribu	2.088	2.0-2.1 Ribu	2.119
	- Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs)	Orang	21-22 Ribu	19.168	22-23 Ribu	20.223	23-24 Ribu	21.136	19-20 Ribu	21.080	20-21 Ribu	20.409
	- Rasio Pendidikan Dasar	Per 10.000	600-700	1.021,49	600-700	987,98	600-700	856,83	973-1000	990,51	900-1000	1.038,27
2.1.1.1.3	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata											
	- Jumlah Guru SD/MI Per Kelas	Orang	160-170	219	170-180	235	180-190	235	235-245	235	235-245	235
	- Jumlah Murid Pendidikan Dasar	Orang	26-27 Ribu	12.947	26-27 Ribu	14.312	27-28 Ribu	14.551	13-14 Ribu	14.272	14-15 Ribu	13.608
	- Rasio SD/MI	Per 1.000	9-10	16,91	9-10	16.42	9-10	16,15	16 – 17	16,47	17 – 17,50	17,27
	- Jumlah Guru SMP/MTs Per Kelas	Orang	380-400	607	400-480	588	480-500	527	527-580	527	580-600	527
	- Jumlah Murid SMP/MTs	Orang	5.2-5.3 Ribu	6.221	5.3-5.4 Ribu	5.911	5.4-5.5 Ribu	6.585	5.996-6.0 Ribu	6.808	6.0-6.2 Ribu	6.801



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Rasio SMP/MTs	Per 1.000	60-70	97,57	60-70	99,48	60-70	80,03	87,89-90	77,41	87,89-90	77,49
	- Jumlah Guru Pendidikan Dasar Per Kelas	Orang	550-600	826	600-650	823	650-700	762	762-800	762	800-850	762
	- Jumlah Murid Pendidikan Dasar	Orang	21-21.5 Ribu	19.168	21.5-22 Ribu	20.223	22-22.5 Ribu	21.136	19,895-20 Ribu	21.080	20-20.5 Ribu	20.409
	- Rasio Pendidikan Dasar	Per 1.000	25-30	43,09	25-30	40,70	25-30	36,05	38,30-40	36,15	40-42	37,34
2.1.1.2	Fasilitas Pendidikan/Jumlah Sekolah											
	- Jumlah Sekolah SD/MI	Unit	142-144	155	143-145	152	145-147	152	152-154	156	154-156	155
	- Jumlah Sekolah SMP/MTs	Unit	46-49	48	49-51	48	51-54	51	48-50	51	48-50	51
	- Jumlah Sekolah SMU/SMK/MA	Unit	17-19	13	19-21	13	21-23	21	15-20	22	15-20	23
2.1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):											
	- Jumlah Siswa	Orang	4000-4150	4.005	4150-4300	4.750	4300-4450	4.056	2.854-3.500	5.060	2.854-3.500	3.926
	- Jumlah Sekolah	Orang	125-130	145	130-135	148	135-140	228	236-240	221	236-240	127
	- Jumlah Guru	Orang	250-300	343	250-300	323	250-300	358	347-397	423	347-397	370
	- Rasio Sekolah	Per 10.000	300-400	362,05	300-400	311,58	300-400	562,13	826,91-850	436,76	826,91-850	323,48
	- Rasio Guru	Per 1.000	60-70	85,64	60-70	68,00	60-70	88,26	120-130	83,60	130-140	94,24



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
2.1.1.4	Angka Kelulusan:											
	- Jumlah Lulusan SD/MI	Orang	2100-2200	2.155	2200-2300	2.292	2300-2400	2.219	2320-2500	2.404	2500-2600	2500-2600
	- Jumlah Siswa kelas tertinggi SD/MI	Orang	2080-2200	2.155	2180-2300	2.292	2280-2400	2.322	2368-2500	2.404	2500-2600	2500-2600
	- Angka Kelulusan SD/MI	Persen	99.50-100.00	100	99.50-100.00	100	99.50-100.00	95,56	97-100	100,00	97-100	97-100
	- Jumlah Lulusan SMP/MTs	Orang	1600-1700	1.979	1700-1900	1.968	1900-2000	1.804	1751-2000	1.777	1751-2000	1751-2000
	- Jumlah Siswa kelas tertinggi SMP/MTs	Orang	1560-1700	1.991	1660-1900	1.968	1860-2000	1.845	1779-2000	1.806	1779-2000	1779-2000
	- Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	98.00-100.00	99.40	98.00-100.00	100	98.00-100.00	99,78	98.00-100	98,39	98.00-100	98.00-100
	- Jumlah Lulusan SMU/SMK/MA	Orang	570-600	1.420	600-630	1.163	630-660	1.289	1048-1500	1.386	1048-1500	1048-1500
	- Jumlah Siswa kelas tertinggi SMU/SMK/MA	Orang	550-600	1.430	580-630	1.169	610-660	1.318	1067-1400	1.396	1067-1400	1067-1400
	- Angka Kelulusan SMU/SMK/MA	Persen	97.00-100.00	99,30	97.00-100.00	99,49	97.00-100.00	97,80	98.22-100	99,28	98.22-100	98.22-100
2.1.1.5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8-9	8,16	8-9	8,39	9-10	8,58	8 – 9	8,70	9 – 10	8,71
2.1.2.	Kesehatan											
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita											
	- Jumlah Posyandu	Unit	220-240	187	240-260	167	260-280	186	167-170	183	167-170	180
	- Jumlah Balita	Unit	13200-13500	7.791	13500-13700	8.688	13700-13900	9.688	9500-10000	9500-10000	10000-10500	10000-10500



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Rasio posyandu	Per 1.000	13-14	14,39	14-15	12,78	15-16	14,15	17-18	13,84	18-19	18-19
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk											
	- Jumlah Puskesmas	Unit	13-14	13	14-15	13	15-16	13	>13	14	>14	14
	- Jumlah Pustu	Unit	50-51	49	51-52	47	52-53	42	47-55	45	47-55	49
	- Jumlah Polindes	Unit	77-82	57	82-87	69	87-91	69	69-75	98	69-75	95
	- Jumlah Sarana Kesehatan	Unit	137-143	119	143-148	129	148-153	124	127-135	157	135-140	158
	- Jumlah Penduduk	Jiwa	120-123 Ribu	120.322	123-125 Ribu	122.985	125-128 Ribu	125.624	125-130 Ribu	128.323	130-135 Ribu	120.789
	- Rasio Puskesmas	Per 1.000	0,11-0,12	0,11	0,11-0,12	0,11	0,11-0,12	0,10	0,10-0,11	0,11	0,10-0,11	0,12
	- Rasio Pustu	Per 1.000	0,41-0,42	0,41	0,41-0,42	0,38	0,41-0,42	0,33	0,37-0,40	0,35	0,37-0,40	0,41
	- Rasio Polindes	Per 1.000	0,65-0,75	0,47	0,65-0,75	0,56	0,65-0,75	0,55	0,55-0,60	0,76	0,60-0,65	0,79
	- Rasio Puskesmas, Polindes dan Pustu	Per 1.000	1,15-1,25	0,99	1,15-1,25	1,05	1,15-1,25	0,99	1,01-1,05	1,22	1,05-1,10	1,31
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1.000	0.008-0.009	0,0083	0.008-0.009	0,0081	0.008-0.009	0,0080	0.008-0.009	0,0078	0.008-0.009	0,0083
2.1.2.4	Rasio Dokter per satuan penduduk	Per 1.000	0.23-0.25	0,27	0.23-0.25	0,41	0.23-0.25	0,37	0.41-0.42	0,44	0.42-0.43	0,61
2.1.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1.000										
	- Jumlah Tenaga Medis	Orang	340-380	360	380-400	904	400-420	481	955-960	1.037	960-965	941



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Jumlah Penduduk	Orang	120-123 Ribu	120.322	123-125 Ribu	122.985	125-128 Ribu	125.624	125-127 Ribu	128.323 Ribu	127-129 Ribu	120.789 Ribu
	- Rasio tenaga medis	Per 1.000	28-30	2,99	28-30	7,35	28-30	3,83	7.60-7.80	8,08	7.80-8	7,79
2.1.2.14	Cakupan puskesmas (Persen)											
	- Jumlah Puskesmas	Unit	11-13	13	11-13	13	11-13	13	11-13	14	11-13	14
	- Jumlah Kecamatan	Kec	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Persentase Cakupan Puskesmas	Persen	110-130	130	110-130	130	110-130	130	110-130	140	110-130	140
2.1.2.15	Cakupan pembantu puskesmas											
	- Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	50-52	49	50-52	47	50-52	42	47	45	47	49
	- Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	Desa	125-130	125	125-130	125	125-130	125	125-130	125	125-130	125
	- Persentase Cakupan Puskesmas Pembantu	Persen	40-50	39,20	40-50	37,60	40-50	33,60	37,6	36,00	37,6	39,20
2.1.2.16	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68-68,50	68,24	68,50-69	68,33	69,00-69,50	68,76	68,36-68,40	69,14	68,40-68,45	69,61
2.1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2.1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik											
	- Panjang jalan kondisi baik	Km	460-	120,4	460-480	305,58	460-480	281,54	4705-4725	328,65	4725-4750	52,54



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
			480									
	- Panjang jalan keseluruhan	Km	900-1000	938,76	900-1000	938,76	900-1000	938,76	>13809	938,76	>13809	938,76
	- Persentase	Persen	50-60	12,83	50-60	32,55	50-60	29,99	>34.08	35,01	>34.08	5,60
2.1.3.2	Panjang jalan dilalui Roda 4											
	- Jumlah Panjang Jalan	Km	2100-2200	938,76	2200-2300	938,76	2300-2400	938,76	>9684.25	938,76	>9684.25	938,76
	- Jumlah Penduduk	Ribu Orang	120-123	120.322	123-125	122.985	125-128	125.624	125-127 Ribu	128.323	127-129 Ribu	120.789
	- Rasio Jalan Per Penduduk	Per 10.000	0.02-0.04	0,00000078	0.02-0.04	0,00000076	0.02-0.04	0,00000075	0.08-0.09	0,00000073	0.09-0.10	0,00000078
2.1.3.3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1.3.4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)											
	- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	700-1000	120,4	1000-1300	305,58	1300-1600	281,54	>397,35	328,65	>397,35	52,54
	- Panjang seluruh jalan kabupaten	Km	1600-1800	938.76	1800-2000	938.76	2000-2200	938.76	>938.76	938.76	>938.76	938.76
	- Persentase	Persen	45-50	12,83	50-55	32,55	55-60	29,99	>42,33	35,01	>42,33	5,60



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
2.1.4.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;											
2.1.4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	Persen	70-75	65,57	75-80	82,64	75-80	78,63	88,92 - 88,95	82,70	88,95 - 88,97	88,95 - 88,97
	- Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	RT	20-21 Ribu	18.798	21-22 Ribu	24.217	22-23 Ribu	23.552	21-22 Ribu	24.856	22-23 Ribu	22-23 Ribu
	- Jumlah Rumah Tangga	RT	28-28.5 Ribu	28.670	28.5-29 Ribu	29.305	29-29.5 Ribu	29.954	29-30 Ribu	30.056	30-30.5 Ribu	30-30.5 Ribu
2.1.4.2	Rumah tangga pengguna listrik	Persen	70-75	41,55	75-80	40,64	75-80	74,22	78,63- 78,65	73,97	78,65- 78,70	78,65- 78,70
	Jumlah RT Menggunakan Listrik	RT	20-21 Ribu	11.911	21-22 Ribu	11.911	22-23 Ribu	22.231	23-24 Ribu	22.231	24-25 Ribu	16.778
	Jumlah Rumah Tangga	RT	28-28.5 Ribu	28.670	28.5-29 Ribu	29.305	29-29.5 Ribu	29.954	29-30 Ribu	30.056	30-30.5 Ribu	30-30.5 Ribu
2.1.4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	Persen	70,80- 71,80	58,66	71,80- 72,80	61,45	72,80- 73,80	62,81	73,80 – 74,80	71,07	74,80 – 75,80	74,80 – 75,80
2.1.4.4	Rumah layak huni	Persen	68,50- 70,50	69,45	70,50- 71,50	70,48	71,50- 72,50	71,25	72,50- 73,50	72,35	<72,35	N/A
2.1.5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;											
2.1.6.	Sosial											



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
2.1.6.1	Sarana sosial seperti Panti Asuhan	Persen	8-10	2	10-12	3	12-14	4	4-6	3	4-6	2
	- Rumah Kumuh	Unit	300-350	N/A	250-300	N/A	200-250	N/A	100-200	N/A	100-200	N/A
	- Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KAT	100-200	100-200	100-200	5.670	100-200	6.237	0.03-0.05	N/A	0.05-0.10	NA
2.1.6.2	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per 1.000	0.33-0.35	3,1333	0.35-0.37	3,0654	0.37-0.39	3,2398	377-380	3,1015	377-380	3,5930
	- Jumlah Rumah Ibadah	Unit	400-410	377	410-420	377	420-430	407	430-440	398	440-450	434
	- Jumlah Penduduk	Orang	120-123 Ribu	120.322	123-125 Ribu	122.985	125-128 Ribu	125.624	100	128.323	100	120.789
2.1.6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
2.2.1.	Perhubungan											
2.2.1.1	Jumlah Arus Penumpang Kapal Laut											
	- Jumlah Kapal Berangkat	Unit	830-860	731	860-900	664	900-930	664	>664	664	>664	664
	- Jumlah Penumpang Turun	Orang	20-22 Ribu	23.953	22-24 Ribu	22.632	24-26 Ribu	28.663	15-16 Ribu	23.796	16-17 Ribu	20.616
	- Jumlah Penumpang Naik	Orang	23-26 Ribu	19.565	26-29 Ribu	22.789	29-31 Ribu	26.090	18-19 Ribu	18.346	19-20 Ribu	12.375



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Jumlah Barang Bongkar	Ton	384.073	1.930.892.459	393.154	19.337.489	402.235	47.137.686	15-16 Ton	48.719.781	16-17 Ton	4.960.878
	- Jumlah Barang Muat	Ton	5-5.5 Juta	149.092.484	5.5-6 Juta	1.643.094	6-6.5 Juta	2.279.588	4-5 Juta	4.659.628	5-5.5 Juta	1.716.053
2.2.1.2	Rasio ijin trayek		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.1.3	Jumlah uji kir Kendaraan											
	- Jumlah Kendaraan Bermotor yang di Uji Kir	Unit	350-400	48,00	400-450	48,00	450-500	48,00	>48-50	N/A	50-55	
	- Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kir	Unit	570-600	295,00	630-660	295,00	660-690	48,00	>48-50	NA	50-55	N/A
	- Jumlah Angkutan Umum yang di Uji Kir	Unit	60-65	17,00	65-70	17,00	70-75	48,00	>48-50	NA	50-55	N/A
2.2.1.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	4-5	5	5-6	5	6-7	5	>7	5	>7	5
2.2.1.5	Angkutan darat	Unit	2	4343	2	4343	2	4343	>4343	>4343	>4343	>4343
2.2.1.6	Kepemilikan KIR Kendaraan	Persen	10-20	16,27	20-30	16,27	30-40	16,27	16-17	NA	17-18	N/A
2.2.7.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
2.2.7.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	0.5-0.6	0,47	0.6-0.7	0,47	0.7-0.8	2,00	2-2.1	N/A	2.1-2.2	N/A
	- Jumlah anak	Orang	20-24 Ribu	12.779	24-26 Ribu	12.779	26-28 Ribu	71.352	>71 Ribu	N/A	>71 Ribu	N/A
	- Jumlah Keluarga	Orang	45-50 Ribu	27.417	50-55 Ribu	27.417	55-60 Ribu	35.676	>35 Ribu	N/A	>35 Ribu	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
2.2.7.2	Cakupan akseptor KB	Persen	65-70	32,87	70-75	32,87	75-80	32,87	32-35	N/A	35-40	N/A
	- Jumlah Akseptor KB	Orang	20-25 Ribu	6.277	25-30 Ribu	6.277	30-35 Ribu	6.277	6-7 Ribu	N/A	7-8 Ribu	N/A
	- Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	30-35 Ribu	19.098	35-40 Ribu	19.098	40-45 Ribu	19.098	19-19,5 Ribu	N/A	19,5-20 Ribu	N/A
2.2.7.3	Cakupan peserta KB aktif	Persen	65-70	65,73	70-75	65,73	75-80	65,73	65-70	N/A	70-75	N/A
	- Jumlah Peserta Program KB Aktif	Orang	20-25 Ribu	12.554	25-30 Ribu	12.554	30-35 Ribu	12.554	12-13 Ribu	N/A	13-14 Ribu	N/A
	- Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	30-35 Ribu	19.098	35-40 Ribu	19.098	40-45 Ribu	19.098	19-19.5 Ribu	N/A	19.5-20 Ribu	N/A
2.2.7.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.8.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
2.2.8.1	Persentase koperasi aktif	Persen	85-88	69,84	88-90	18,68	90-93	66,67	>85.83	22,02	>85.83	33,61
	- Jumlah Koperasi Aktif	Unit	290-300	37	300-320	37	320-350	37	109-110	41	109-110	41
	- Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	335-400	53	400-435	198	435-470	56	>127	N/A	>127	N/A
2.2.14.	Lingkungan Hidup											
2.2.14.1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum											
	- Penduduk berakses air minum	Orang	70-72 Ribu	78.895	72-74 Ribu	101.634	74-76 Ribu	98.778	76-78 ribu	106.123	>106.123	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Jumlah Penduduk	Orang	120-123 Ribu	120.322	123-125 Ribu	122.985	125-128 Ribu	125.624	125-127 Ribu	128.323	127-129	120.789
	- Persentase	Persen	60-62	65,57	62-64	82,64	64-66	78,63	5-6	82,70	6-7	N/A
2.2.17.	Statistik											
2.2.17.1	Indikator Pertumbuhan Ekonomi	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.17.2	Kinerja Pembangunan Manusia	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.17.3	Profil Kabupaten	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.17.4	Profil Kecamatan	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.17.5	Profil Kesejahteraan Rakyat	Dok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan yang Berkaitan Pelayanan Dasar											
2.3.1.	Kelautan dan Perikanan											
2.3.1.1	Produksi Perikanan (Ton)	Ton	20-25 Ribu	3.166,00	25-30 Ribu	1.787,00	30-35 Ribu	1.833,80	18-19 Ribu	3.380,80	19-20 Ribu	N/A
	- Produksi Perikanan Tangkap	Ton	5-10 Ribu	1.198,00	10-15 Ribu	1.339,70	15-20 Ribu	1.499,20	3-4 Ribu	1.874,6	4-5 Ribu	N/A
	- Produksi Perikanan Budidaya	Ton	15-20 Ribu	1.968,00	20-25 Ribu	447,30	25-30 Ribu	334,60	44,3-44,4 Ribu	1.506,2	44,4-44,5 Ribu	N/A
2.3.1.2	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	190-210	607,71	210-230	672,26	230-250	745,66	271-280	750,52	280-290	3.514,66*
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp	74-75	433,55	75-76	467,60	76-77	474,39	61,7-61,8	498,60	61,8-61,9	2.452,79*



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	4-4.5	7,31	4.5-5	7,50	5-5.5	7,38	2-3	6,38	3-4	31,37*
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	4-5	6,99	4-5	7,11	4-5	6,62	0.87-1	6,30	1-2	30,38*
2.3.2.	Pariwisata											
2.3.2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	14-15	20,10	15-16	21,81	16-17	23,91	12-13	26,78	13-14	24,12
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Juta Rp.	7.648	13.828	8.116	14,779	8.584	15.940	6-7	16.842	7-8	14.122,1
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	0,34-0,36	0,24	0,36-0,38	0,24	0,38-0,4	0,24	0,31-0,35	0,23	0,35-0,37	0,22
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	0,47-0,5	0,22	0,5-0,53	0,22	0,53-0,55	0,22	0,42-0,44	0,21	0,44-0,46	0,17
2.3.3.	Pertanian											
2.3.3.1	Luas Tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ha)											
	- Padi	Ha	14-16 Ribu	611,15	14-16 Ribu	352,36	14-16 Ribu	203,16	>203,16	7.563,75	>203,16	7.727,65
	- Jagung	Ha	800-1000	919,6	800-1000	1.085,57	800-1000	1.281,50	1000-1200	N/A	1200-1300	N/A
	- Ubi Kayu	Ha	140-160	56,92	140-160	54,92	140-160	52,99	52-53	N/A	53-54	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Ubi Jalar	Ha	80-100	29,92	80-100	24,19	80-100	19,56	19-20	N/A	20-21	N/A
	- Kacang Hijau	Ha	20-25	0,26	20-25	0,07	20-25	0,02	0.02-0.05	N/A	0.05-0.10	N/A
	- Kacang Kedelai	Ha	160-180	1345,98	160-180	3750,86	160-180	10452,58	10-11	N/A	11-12	N/A
	- Kacang Tanah	Ha	180-200	145,34	180-200	160,03	180-200	176,20	176-178	N/A	178-180	N/A
2.3.3.2	Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton)											
	- Padi	Ton	50-55 Ribu	52.026,00	50-55 Ribu	54.409,00	50-55 Ribu	73.382,00	97-98 Ribu	76.514,63	98-98,5 Ribu	34.133,56
	- Jagung	Ton	4-4.5 Ribu	17.462	4-4.5 Ribu	17.108	4-4.5 Ribu	20.391	6-7 Ribu	15.003.93	7-8 Ribu	N/A
	- Ubi Kayu	Ton	2-3 Ribu	1.258	2-3 Ribu	927	2-3 Ribu	1.899,00	2-3 Ribu	1.516,00	2-3 Ribu	N/A
	- Ubi Jalar	Ton	800-1000	419	800-1000	361	800-1000	215	4-4.5 Ratus	355	4,5-5 Ratus	N/A
	- Kacang Hijau	Ton	16-19	0,29	16-19	0,08	16-19	0,02	>0.02	NA	>0.02	N/A
	- Kacang Kedelai	Ton	180-200	1.049	180-200	214	180-200	2.131	36-37	641,35	37-38	N/A
	- Kacang Tanah	Ton	250-300	340	250-300	128	250-300	66	144-146	130	146-148	N/A
2.3.3.3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Ha)											
	- Padi	Ton/Ha	4-5	85,13	4-5	154,41	4-5	361,20	>481,92	10,12	>481,92	4,42



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Jagung	Ton/Ha	5-7	18,99	5-7	15,76	5-7	15,91	5-7	N/A	5-7	N/A
	- Ubi Kayu	Ton/Ha	25-30	22,10	25-30	16,88	25-30	35,84	39-40	N/A	39-40	N/A
	- Ubi Jalar	Ton/Ha	18-20	14,00	18-20	14,92	18-20	10,99	21-22	N/A	21-22	N/A
	- Kacang Hijau	Ton/Ha	1-2	1,12	1-2	1,14	1-2	1,00	1-2	N/A	1-2	N/A
	- Kacang Kedelai	Ton/Ha	1-2	0,78	1-2	0,06	1-2	0,20	3-4	N/A	3-4	N/A
	- Kacang Tanah	Ton/Ha	2.1-2.2	2,34	2.1-2.2	0,80	2.1-2.2	0,37	0.82-1	N/A	1-1.82	N/A
2.3.3.4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Triliun Rp.	1.8-2	2.93	2-2.2	3.14	2.2-2.4	3.29	2.4-2.6	3.59	2.6-2.8	3.51
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	820-270	2.150,93	870-920	2.150,93	920-960	2.335,11	1-2	2.498,73	1-2	2.452,79
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	33-35	35,19	33-35	35,01	33-35	32,62	27-28	30,50	28-29	31,37
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	40-42	34,66	40-42	34,12	40-42	32,60	14-15	31,58	15-16	30,38
2.3.3.5	Kontribusi Sub Sektor Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	125-135	130.659	135-145	141.749	145-155	152.918	155-165	155-165	165-175	165-175
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	49-50	42.324	50-51	40.885	51-52 R	38.565	38-39	38-39	39-40	39-40
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku (%)	Persen	2-3	0,02	2-3	0,02	2-3	0,02	0.02-1	68,81	0.02-1	0.02-1
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan (%)	Persen	1-2	0,01	1-2	0,01	1-2	0,01	0.01-1	72,54	0.01-1	0.01-1
2.3.3.6	Jumlah Pohon Tanaman Perkebunan											



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Kelapa	Pohon	1150-1200	778,20	1150-1200	778,20	1150-1200	778,20	1150-1200	1150-1200	1150-1200	1150-1200
	- Kopi	Pohon	360-400	31,20	360-400	31,20	360-400	31,20	360-400	360-400	360-400	360-400
	- Cengkeh	Pohon	600-700	268,50	600-700	268,50	600-700	268,50	600-700	600-700	600-700	600-700
	- Kelapa Sawit	Pohon	23-27 Ribu	4.628,00	27-31 Ribu	4.628,00	31-35 Ribu	4.628,00	35-39 Ribu	35-39 Ribu	39-43 Ribu	39-43 Ribu
	- Kakao	Pohon	17-19 Ribu	15.152,00	17-19 Ribu	15.152,00	17-19 Ribu	15.152,00	17-19 Ribu	17-19 Ribu	17-19 Ribu	17-19 Ribu
	- Pala	Pohon	300-500	246,00	300-500	246,00	300-500	246,00	300-500	300-500	300-500	300-500
	- Lada	Pohon	130-150	53,30	130-150	53,30	130-150	53,30	130-150	130-150	130-150	130-150
	- Karet	Pohon	8-10 Ribu	5.576,00	8-10 Ribu	5.576,00	8-10 Ribu	5.576,00	8-10 Ribu	8-10 Ribu	8-10 Ribu	8-10 Ribu
	- Jambu Mente	Pohon	250-300	20,00	250-300	20,00	250-300	20,00	250-300	250-300	250-300	250-300
	- Vanili	Pohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sagu	Pohon	250-300	237,00	250-300	237,00	250-300	237,00	250-300	250-300	250-300	250-300
	- Nilam	Pohon	100-130	-	100-130	-	100-130	-	100-130	100-130	100-130	100-130
	- Kemiri	Pohon	50-100	55,00	50-100	55,00	50-100	55,00	50-100	50-100	50-100	50-100
2.3.3.7	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)											
	- Kelapa	Ton	600-	415,60	600-700	442,4	600-700	388,94	>442,4	403,64	>442,4	>442,4



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
			700									
	- Kopi	Ton	80-90	-	80-90	-	80-90	17,85	80-90	26,4	80-90	80-90
	- Cengkeh	Ton	20-26	26,82	20-26	22,5	20-26	18,008	20-26	22,76	20-26	20-26
	- Kelapa Sawit	Ton	25-30 Ribu	383.378,5	30-35 Ribu	10.032,89	35-40 Ribu	13.167,21	40-45 Ribu	13.694,63	45-50 Ribu	45-50 Ribu
	- Kakao	Ton	7-8 Ribu	7.149,57	7-8 Ribu	6.248	7-8 Ribu	5.869,85	6-7 Ribu	6.314,1	7-8 Ribu	7-8 Ribu
	- Pala	Ton	2-3	2,8	2-3	3,4	2-3	3,4	2-3	4,2	3-4	3-4
	- Lada	Ton	80-100	10,17	80-100	12,90	80-100	29,03	>12,90	39,92	>12,90	>12,90
	- Karet	Ton	3-4 Ribu	3.337,09	3-4 Ribu	2.275,05	3-4 Ribu	2.460,2	2,2-3 Ribu	2.558,8	3-4 Ribu	3-4 Ribu
	- Jambu Mente	Ton	25-30	3,10	25-30	3,10	25-30	3,10	3-5	N/A	3-5	N/A
	- Vanili	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sagu	Ton	150-180	184,55	150-180	184,55	150-180	184,55	>184,55	N/A	>184,55	N/A
	- Nilam	Ton	18-20	-	18-20	-	18-20	-	18-20	N/A	18-20	N/A
	- Kemiri	Ton	3-4	3,83	3-4	3,83	3-4	3,83	3-4	3-4	3-4	3-4
2.3.3.8	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ha/Pohon)											
	- Kelapa	Ton/Pohon	0.7-0.9	0,51	0.7-0.9	0,49	0.7-0.9	0,49	0.4-0.5	0.4-0.5	0.5-0.6	0.5-0.6
	- Kopi	Ton/Pohon	0.45-0.50	0	0.45-0.50	0	0.45-0.50	0,57	0.45-0.50	0.45-0.50	0.45-0.50	0.45-0.50
	- Cengkeh	Ton/Pohon	0.09-0.15	0,09	0.09-0.15	0,07	0.09-0.15	0,07	0.07-0.15	0.07-0.15	0.07-0.15	0.07-0.15
	- Kelapa Sawit	Ton/Pohon	1.65-1.70	10,04	1.65-1.70	1,89	1.65-1.70	1,89	1.89-1.70	1.89-1.70	1.89-1.70	1.89-1.70
	- Kakao	Ton/Pohon	0.95-	0,48	0.95-0.99	0,42	0.95-0.99	0,42	0.95-0.99	0.95-0.99	0.95-0.99	0.95-0.99



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
			0.99									
	- Pala	Ton/Pohon	0.01-0.02	0,003	0.01-0.02	0,002	0.01-0.02	0,002	0.01-0.02	0.01-0.02	0.01-0.02	0.01-0.02
	- Lada	Ton/Pohon	0.66-0.89	0,08	0.66-0.89	0,08	0.66-0.89	0,08	0.08-0.09	0.08-0.09	0.09-0.10	0.09-0.10
	- Karet	Ton/Pohon	1-2	0,45	1-2	0,39	1-2	0,39	1-2	1-2	1-2	1-2
	- Jambu Mente	Ton/Pohon	0.5-0.6	0	0.5-0.6	0	0.5-0.6	0	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6
	- Vanili	Ton/Pohon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Sagu	Ton/Pohon	0.78-0.80	0	0.78-0.80	0	0.78-0.80	0	0.78-0.80	0.78-0.80	0.78-0.80	0.78-0.80
	- Nilam	Ton/Pohon	0.5-0.7	300	0.5-0.7	300	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7	0.5-0.7
	- Kemiri	Ton/Pohon	0.07-0.08	152	0.07-0.08	700	0.07-0.08	0.07-0.08	0.07-0.08	0.07-0.08	0.07-0.08	0.07-0.08
2.3.3.9	Kontribusi Sub Sektor Sektor Perkebunan terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Triliun Rp.	1,4-1,5	1,86	1,5-1,6	1,96	1,6-1,7	1,98	2,2-2,3	2,27	2,4-2,4	2,4-2,4
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	435-440	1.378,05	440-445	1.415,41	445-450	1.471,24	348-350	1.602,37	350-375	350-375
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	27-28	22,35	27-28	21,87	27-28	19,67	22-23	19,27	23-24	23-24
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	19-20	22,21	19-20	21,52	19-20	20,54	4-5	20,25	5-6	5-6
2.3.3.10	Populasi Ternak Besar/Kecil (ekor)											
	- Sapi	Ekor	25-29 Ribu	0	29-34 Ribu	24.726	34-39 Ribu	24.726	24-24.8 Ribu	33.865	24.8-24.9 Ribu	30.826



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Kerbau	Ekor	600-650	459	600-650	509	600-650	509	>509	598	>509	277
	- Kuda	Ekor	2-3	1	2-3	3	2-3	3	3-4	N/A	3-4	N/A
	- Kambing	Ekor	7-8 Ribu	4.417	8-9 Ribu	5.052	9-10 ribu	5.052	5-6 Ribu	6.306	6-7 Ribu	7.696
	- Babi	Ekor	17-20 Ribu	10.091	20-24 Ribu	8.381	24-27 Ribu	8.381	8-9 Ribu	10.279	9-10 Ribu	11.873
	- Domba	Ekor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.11	Populasi Unggas (ekor)											
	- Ayam Kampung	Ekor	150-180 Ribu	99.062	180-210 Ribu	88.602	210-230 Ribu	99.851	88-90 Ribu	107.019	90-100 Ribu	119.374
	- Ayam Pedaging	Ekor	7-8 Ribu	3.344	8-9 Ribu	5.722	9-10 Ribu	5.722	5-6 Ribu	0	6-7 Ribu	3.276
	- Ayam Petelur	Ekor	2.5-3 Ribu	652	3-3.5 Ribu	652	3.5-4 Ribu	6.991	0.6-1 Ribu	8.709	1-2 Ribu	13.742
	- Itik	Ekor	14-17 Ribu	10.708	17-20 Ribu	7.406	20-23 Ribu	10.369	7-8 Ribu	13.365	8-9 Ribu	15.007
2.3.3.12	Kontribusi Sub Sektor Sektor Peternakan terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	41-44	44.093	44-47	49.134	47-50	54.833	54-55	N/A	55-56	N/A
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	16-16.1	14.819	16.1-16.3	14.611	16.3-16.5	14.124	14-15	N/A	15-16	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	0,75-0,77	0,53	0,75-0,77	0,54	0,75-0,77	0,54	0,54-0,55	1,2	0,55-0,56	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	0,69-0,72	0,24	0,69-0,72	0,22	0,69-0,72	0,20	0,20-0,40	1,09	0,40-0,50	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
2.3.3.13	Cakupan bina kelompok petani Peternak	Kelompok	30	N/A	60	N/A	90	96	N/A	N/A	N/A	N/A
2.3.4.	Kehutanan											
2.3.4.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis											
2.3.4.2	Kerusakan Kawasan Hutan											
2.3.4.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	125-130	127.388	130-135	131.679	135-138	136.356	136-140	N/A	140-145	N/A
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	60-61	59.313	60-61	59.114	60-61	58.791	58-60	N/A	60-61	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	1-2	1,53	1-2	1,44	1-2	1,35	1-2	27,30	1-2	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	0.5-1	0,96	0.5-1	0,88	0.5-1	0,82	0.8-1	60,48	0.8-1	N/A
2.3.5	Energi dan Sumber Daya Mineral											
2.3.5.1	Pertambangan tanpa ijin											
2.3.5.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Triliun Rp.	2.2-2.4	2.103.017	2.4-2.6	2.316.458	2.6-2.8	2.447.238	2.8-3	N/A	3-3.2	N/A
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	615-650	532.776	650-685	539.370	685-715	534.742	534-550	N/A	550-588	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	44-46	25,28	44-46	25,35	44-46	25,35	25-27	36,41	27-28	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH	Persen	31-32	8,39	31-32	8,05	31-32	7,50	7-8	38,83	8-9	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	Konstan											
2.3.6.	Perdagangan											
2.3.6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	450-500	571.958	500-550	641.277	550-600	721.382	>749	786.448	>749	770.821,8
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	200-220	393.551	220-240	414.272	240-260	434.899	287-290	444.071	290-300	415.665,6
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	7-8	6,88	7-8	7,15	7-8	7,14	7-8	6,68	7-8	6,88
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	9-10	6,34	9-10	6,3	9-10	6,07	4-5	5,61	5-6	5,14
2.3.6.2	Ekspor Bersih Perdagangan											
	- Volume Ekspor	Ton	8.2-9 Ribu	1,22 Ribu	9-9.8 Ribu	1,22 Ribu	9.8-10.6 Ribu	1,22 Ribu	1.22-22 Ribu	N/A	1.22-22	N/A
	- Nilai Ekspor (000 000 US\$)	Ratusan Ribu (U\$)	180-190	797,03	190-200	1872,89	200-210	3427,33	310-320	N/A	320-330	N/A
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal											
2.3.7.	Perindustrian											
2.3.7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	90-95	97.574	95-100	137.969	100-105	152.035	105-110	166.174	110-115	280.833,8
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	47-51	76.604	51-54	97.665	54-57	103.446	63-60	107.123	60-64	155.532,2



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	1-1.2	1,17	1-1.2	1,54	1-1.2	1,51	1-1.3	1,41	1-1.4	2,50
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	2.1-2.2	1,23	2.1-2.2	1,48	2.1-2.2	1,44	0.89-1	2,10	0.89-1	2,51
2.3.7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri											
	- Nilai Kontribusi ADH Berlaku	Miliar Rp.	23-26 Ribu	28030	26-28 Ribu	33061	28-30 Ribu	39370	39-40 Ribu	N/A	40-41 Ribu	N/A
	- Nilai Kontribusi ADH Konstan	Miliar Rp.	12-13	13630	13-14	15424	14-15	17464	>17	N/A	>17	N/A
	- Persentase Kontribusi ADH Berlaku	Persen	0.35-0.37	0,34	0.35-0.37	0,36	0.35-0.37	0,39	0.35-0.37	118,51	0.35-0.37	0.35-0.37
	- Persentase Kontribusi ADH Konstan	Persen	0.55-0.57	0,22	0.55-0.57	0,23	0.55-0.57	0,25	0.25-0.27	78,06	0.27-0.29	0.27-0.29
2.3.7.3	Pertumbuhan Industri	Persen	3-5	N/A	3-5	N/A	3-5	9,04	3-5	35,10	3-5	32,65
	- Jumlah Industri Tahun Berkenan	Industri	750-760	724	760-770	723	770-780	723	770-780	723	770-780	723
	- Jumlah Industri Tahun Sebelum	Industri	1.1-1.2 Ribu	709	1.2-1.4 Ribu	724	1.4-1.5 Ribu	723	1.4-1.5 Ribu	723	1.4-1.5 Ribu	723
2.3.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	DAYA SAING DAERAH											



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
3.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
3.1.1	Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan											
	- Pengeluaran Rp > 100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengeluaran Rp 100.000-149.999	Persen	3-3.5	1.34	3.5-4	1.34	4-4.5	1.34	1.3-2	N/A	2-3	N/A
	- Pengeluaran Rp 150.000-199.999	Persen	10-11	0.04	11-12	0.03	12-13	0.03	0.03-0.04	N/A	0.04-0.05	N/A
	- Pengeluaran Rp 200.000-299.999	Persen	50-55	2.67	55-60	0.31	60-65	0.31	0.31-0.41	N/A	0.41-0.51	N/A
	- Pengeluaran Rp 300.000-499.999	Persen	40-45	21.14	45-50	20.37	40-45	20.37	20-25	N/A	25-30	N/A
	- Pengeluaran Rp 500.000-749.999	Persen	35-30	32.23	30-35	31.83	35-40	31.83	31-35	N/A	35-40	N/A
	- Pengeluaran Rp 750.000-999.000	Persen	5-10	16.29	5-10	17.33	5-10	17.33	17-18	N/A	18-19	N/A
	- Pengeluaran Rp 1000.000 <	Persen	1-5	17.43	1-5	20.70	1-5	20.70	20-21	N/A	21-23	N/A
3.1.2	Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Non Makanan											
	- Pengeluaran Rp > 100.000	Persen	7-8	0.01	8-9	0.01	9-10	0.01	0.01-0.02	N/A	0.02-0.03	N/A
	- Pengeluaran Rp 100.000-149.999	Persen	8-10	0.02	8-10	0.02	8-10	0.02	0.02-0.03	N/A	0.03-0.04	N/A
	- Pengeluaran Rp 150.000-199.999	Persen	9-10	0.14	9-10	0.14	9-10	0.14	0.14-0.15	N/A	0.15-0.16	N/A
	- Pengeluaran Rp 200.000-299.999	Persen	20-25	0.76	20-25	0.76	20-25	0.76	0.76-0.77	N/A	0.77-0.78	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	- Pengeluaran Rp 300.000-499.999	Persen	15-20	3.61	15-20	3.61	15-20	3.61	3,61-3.65	N/A	3.65-3.75	N/A
	- Pengeluaran Rp 500.000-749.999	Persen	12-15	6.64	12-15	6.64	12-15	6.64	6-15	N/A	6-15	N/A
	- Pengeluaran Rp 750.000-999.000	Persen	10-12	10.36	10-12	10.36	10-12	10.36	10-12	N/A	10-12	N/A
	- Pengeluaran Rp 1000.000 <	Persen	8-10	78.63	8-10	78.63	8-10	78.63	>78,63	N/A	>78,63	N/A
3.1.3	Produktivitas Total Daerah		85-100	54.56	100-105	54,56	105-115	54,56	>54,56	179.85	>54,56	N/A
	- Pertanian	Juta Rp.	35-40	21.57	35-40	21.57	35-40	21.57	21-25	59.14	25-30	N/A
	- Penggalian	Juta Rp.	40-50	21.60	40-50	21.60	40-50	21.60	21-25	70.60	25-30	N/A
	- Industri Pengolahan	Juta Rp.	2-5	1.03	2-5	1.03	2-5	1.03	1-2	2.74	2-3	N/A
	- Listrik dan Air Bersih	Juta Rp.	0.2-0.4	0.13	0.2-0.4	0.13	0.2-0.4	0.13	0.13-0.4	0.12	0.13-0.4	N/A
	- Bangunan	Juta Rp.	1.5-2.5	1.15	1.5-2.5	1.15	1.5-2.5	1.15	1.15-2.5	29.63	1.15-2.5	N/A
	- Perdagangan, Hotel & Restoran	Juta Rp.	7-8	5.13	8-9	5.13	9-10	5.13	5-8	6.68	8-11	N/A
	- Angkutan dan Komunikasi	Juta Rp.	0.3-0.7	0.24	0.3-0.7	0.24	0.3-0.7	0.24	0.24-0.28	1.09	0.28-0.32	N/A
	- Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	Juta Rp.	1.5-2.5	0.90	1.5-2.5	0.90	1.5-2.5	0.90	0.90-2.5	0.03	0.90-2.5	N/A
	- Jasa-Jasa	Juta Rp.	4-5	2,81	5-6	2,81	6-7	2,81	2-3	9.82	3-4	N/A
3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
3.2.1.	Aksesibilitas daerah											
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Per 1.000	0.3-0.5	0.21	0.3-0.5	0.087	0.3-0.5	0.085	0.21-0.5	0.082	0.21-0.5	0.081
	- Panjang Jalan	Km	2100-	938,76	2200-	938,76	2300-	938,76	>914	938,76	>914	938,76



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
			2200		2300		2400					
	- Jumlah Kendaraan	Unit	6.5-7 Ribu	4.343	7-7.5 Ribu	4.343	7.5-8 Ribu	4.343	4-8.5 Ribu	N/A	8.5-9 Ribu	N/A
3.2.1.2	Arus Lalulintas Pelabuhan											
	- Jumlah Kapal Berangkat	Unit	830-860	731	860-900	664	900-930	664	>664	664	>664	664
	- Jumlah Penumpang Turun	Orang	20-22 Ribu	23.953	22-24 Ribu	22.632	24-26 Ribu	28.663	15-17 Ribu	23.796	17-19 Ribu	20.616
	- Jumlah Penumpang Naik	Orang	23-26 Ribu	19.565	26-29 Ribu	22.789	29-31 Ribu	26.090	18-21 Ribu	18.346	21-24 Ribu	12.375
	- Jumlah Barang Bongkar	Ton	384.073	1.930.892.459	393.154	19.337.489	402.235	47.137.686	15-16	48.719.781	16-17	4.960.878
	- Jumlah Barang Muat	Ton	5-5.5 Juta	149.092.484	5.5-6 Juta	1.643.094	6-6.5 Juta	2.279.588	4-7 Juta	4.659.628	7-7.5 Juta	1.716.053
3.2.2.	Fasilitas Daerah											
	- Jumlah Bank	Unit	15-20	5	15-20	5	15-20	5	>5	N/A	>5	N/A
	- Jumlah Penginapan/Hotel	Unit	16-20	24	16-20	24	16-20	24	>24	25	>24	N/A
3.2.3.	Lingkungan Hidup											
3.2.3.1	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih	Persen	70-75	69,18	75-80	70,95	75-80	73,73	73-85	82,70	73-85	N/A
	- Jumlah RT Menggunakan Air Bersih	Jumlah RT	20-21 Ribu	18.798	21-22 Ribu	24.217	22-23 Ribu	23.552	21-22 Ribu	24.856	22-23 Ribu	22-23 Ribu
	- Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RT	28-28.5 Ribu	28.670	28.5-29 Ribu	29.305	29-29.5 Ribu	29.954	29-30 Ribu	30.056	30-30.5 Ribu	30-30.5 Ribu



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
3.2.3.2	Produksi Air minum dan Penyalurannya											
	- Produksi	M ³	1.4-1.7 Juta	948.640	1.7-2 Juta	948.640	2-2.3 Juta	948.640	0.9-2.5 Juta	N/A	2.5-2.8 Juta	N/A
	- Disalurkan	M ³	1.1-1.3 Juta	712.317	1.3-1.5 Juta	712.317	1.5-1.7 Juta	712.317	0.7-1.9 Juta	N/A	1.9-2.2 Juta	N/A
	- Hilang/Bocor	M ³	300-400 Ribu	308.263	300-400 Ribu	308.263	300-400 Ribu	308.263	308-400 Ribu	N/A Ribu	300-400 Ribu	N/A Ribu
	- Terjual	M ³	650-750 Ribu	404.054	750-900 Ribu	404.054	900 Ribu-1 Juta	404.054	0.4-1.1 Juta	N/A	1.1-1.2 Juta	N/A
	- Nilai Terjual	Rupiah	600-700Juta	417.830.630	700-800 Juta	258.531.830	800-900 Juta	258.531.830	0.2-1.1 Miliar	N/A	1.1-1.2 Miliar	N/A
3.2.2.3	Produksi, Daya Terpasang dan Penggunaan Listrik PLN											
	- Produksi	Kwh	32-35 Juta	21.614,015	35-38 Juta	3.090.220	38-41 Juta	35.644.279	3-4 Juta	35.644.279	4-5 Juta	42.058.336
	- Daya Terpasang	Kwh	13-14 Ribu	9.900	14-15 Ribu	7.000	15-16 Ribu	23.719.530	>7 Ribu	23.719.530	>7 Ribu	13.700.000
	- Terjual	Kwh	32-35 Juta	15,403,475	35-38 Juta	3.088.366	38-41 Juta	31.606.171	3-4 Juta	31.606.171	4-5 Juta	36.406.355
	- Nilai Terjual (Rp)	Rupiah	25-30	11,72	30-35	12,5	35-40	12,5 Miliar	12-13	N/A	13-14	N/A



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
			Miliar	Miliar	Miliar	Miliar	Miliar		Miliar		Miliar	
3.2.2.4	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	Persen	70-75	59,19	75-80	67,59	75-80	73,73	73-85	92,46	73-85	N/A
	- Jumlah RT Menggunakan Listrik	Jumlah RT	20-21 Ribu	11.911	21-22 Ribu	11.911	22-23 Ribu	22.231	23-24 Ribu	22.231	24-25 Ribu	16.778
	- Jumlah Rumah Tangga	Jumlah RT	28-28.5 Ribu	28.670	28.5-29 Ribu	29.305	29-29.5 Ribu	29.954	29-30 Ribu	30.056	30-30.5 Ribu	30-30.5 Ribu
3.3.	Iklim Berinvestasi											
3.3.1	Angka Kriminalitas		8-16	213	8-16	158	8-16	115	<27	114	<27	84
	- Kasus Kesusilaan	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A
	- Kasus Penganiayaan	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A
	- Kasus Pembunuhan	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	<2	N/A	<2	N/A
	- Kasus Penggelapan	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A
	- Kasus Narkoba	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	<6	N/A	<6	N/A
	- Kasus Korupsi	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	<5	N/A	<5	N/A
	- Perlindungan Anak	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	<12	N/A	<12	N/A
	- Kasus KDRT	Kasus	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A	1-2	N/A
3.3.2	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi daerah											
	- Jumlah Pajak daerah	Jenis	9-10	9	9-10	9	9-10	9	9-10	9	9-10	9
	- Jumlah Retribusi daerah	Jenis	13-15	17	13-15	17	13-15	12	12-18	16	12-18	16



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja									
			Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia											
3.4.1	Tingkat Ketergantungan											
	- Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	Orang	31-32 Ribu	34.655	30-31 Ribu	35.166	29-30 Ribu	35.921	35-36 Ribu	36.219	36-37 Ribu	34.145
	- Jumlah penduduk Usia > 64 tahun	Orang	5.7-6.3 Ribu	6.483	5.3-5.7 Ribu	6.778	4.6-5.2 Ribu	6.924	6-7 Ribu	7.447	7-8 Ribu	6.339
	- Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	Orang	41-42 Ribu	41.138	41-42 Ribu	41.944	41-42 Ribu	42.845	42-43 Ribu	43.666	42-43 Ribu	40.484
	- Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun	Orang	78-81 Ribu	79.184	81-84 Ribu	81.041	84-87 Ribu	82.779	82-90 Ribu	84.657	90-92 Ribu	80.305
	- Jumlah Penduduk Keseluruhan	Orang	120-123 Ribu	120.322	123-125 Ribu	122.985	125-128 Ribu	125.621	125-131 Ribu	128,323	131-134 Ribu	120,789
	- Rasio Ketergantungan	Rasio	50-52	51,95	48-50	51,76	46-48	51,76	49-51	51,58	47-49	50,41



2.5. Evaluasi Capaian Visi dan Misi RPJMD Periode 2016-2021

2.5.1 Evaluasi Capaian Indikator Visi

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sebagai ukuran pencapaian Visi daerah, yang terdiri atas beberapa indikator seperti: Pertumbuhan Ekonomi; Income Perkapita ADH; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS); Angka Melek Huruf (APM); Rata-rata Lama Sekolah (RLS); Usia Harapan Hidup (UHH); Presentase Penduduk Miskin; Gini Ratio; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Nilai Tukar Petani (NTP); Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah; Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi Tangkap Darurat Bencana; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hasil evaluasi capaian indikator makro visi RPJMD Kabupaten Morowali Utara diukur berdasarkan capaian Tahun 2019 terhadap target akhir makro RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Rangkuman hasil evaluasi terhadap indikator makro atau Visi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 menunjukkan, sebanyak 10 indikator atau sebesar 66,67% target indikator tercapai, kemudian 1 indikator atau 6,67% status capaian akan tercapai, dan 1 indikator atau 6,67% status capaian perlu upaya keras, dan 3 indikator atau 20% status capaian indikator tidak dapat diketahui. Hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.124
Evaluasi Capaian Terhadap Target Akhir Indikator Makro RPJMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021

No	Indikator	Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Tahun				% Capaian 2019 terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
			2016	2017	2018	2019			
1	Pertumbuhan Ekonomi	6-7%	5,76	6,02	8,89	10,45	174,50		Tingginya tingkat investasi dan kegiatan pertambangan yang besar di Kabupaten Morowali Utara berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap Tahunnya dan salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Capaian indikatro pertumbuhan ekonomi tahu 2019 sudah melampaui target akhir RPJMD Tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara. Hal ini menunjukan kinerja disektor ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2016-2019 sudah sangat baik.
2	Income Perkapita ADH Berlaku	63,00-65,00 jt	69,308	72,911	80,151	91,93	145,92		Nilai PDRB yang sangat besar dan tumbuh sangat tinggi berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Status capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara sudah melampaui target. Kinerja ekonomi sudah sangat baik. Namun masih perlu memperhatikan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang tumbuh selama ini.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator	Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Tahun				% Capaian 2019 terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
			2016	2017	2018	2019			
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,00-70,00	66,57	67,35	67,95	68,45	100,00		IPM Kabupaten Morowali Utara meningkat setiap Tahunnya. Hingga capaian pada Tahun 2019 sebesar 68,45 poin sudah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Pencapaian ini di dukung oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, kesehatan dan pendidikan.
4	Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,00-14,00	-	12,48	12,49	12,5	96,15		Tingkat capaian Rata-rata lama sekolah sebesar 12,5 Tahun pada Tahun 2019, dengan status capaian terhadap target akhir tercapai yakni sebesar 96,15%. Namun perkembangan harapan lama sekolah masih cukup lambat dan masih rendah.
5	Angka Melek Huruf (APM)	98,00-99,00	95,63	97,16	97,24	97,73	99,72		Sudah mencapai target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 99,72%. Dimana capaian pada Tahun 2019 tersebt sebesar 97,72% atau selisih 0,08%.
6	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,00-11,50	8,16	8,39	8,58	8,70	79,09		Status capaian rata-rata lama sekolah yakni akan tercapai. Ini menunjukan target akhir 2021 RPJMD Morowali Utara dapat dicapai hingga 2 Tahun masa RPJMD periode 2016-2021. Hal tersebut juga terlihat dari tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Morowali Utara yang semakin meningkat setiap Tahunnya.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator	Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Tahun				% Capaian 2019 terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
			2016	2017	2018	2019			
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,50-71,00 thn	-	68,34	68,77	69,14	98,06		Usia harapan hidup meningkat setiap Tahunnya. Capaian target 2019 telah mencapai target akhir 2021 RPJMD Kabupaten Morowali Utara.
8	Presentase Penduduk Miskin	11,00-11,50	16,07	15,73	15,18	15,08	37,09		Persentase penduduk miskin menurun setiap Tahunnya, namun penurunan yang terjadi masih rendah. Hingga Tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 15,08%, masih jauh dari target RPJMD. Status capaian terhadap target RPJMD “perlu upaya keras”. Target sulit dicapai.
9	Gini Ratio	0.30-0,34	0,340	0,336	0,314		4,67		Target tercapai, tingkat capaian 4,67%. Menunjukkan ketimpangan yang ada di Kabupaten Morowali Utara mengalami perkembangan yang baik.
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,00-4,00		2,00	2,12	3,12	-22,00		Capaian Tahun 2019 telah melampaui target akhir 2021 RPJMD Kabupaten Morowali Utara.
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Diatas 100 %		100,27	104,12	104,12	100,00		Capaian Tahun 2019 telah melampaui target akhir 2021 RPJMD Kabupaten Morowali Utara.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator	Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Tahun				% Capaian 2019 terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
			2016	2017	2018	2019			
12	Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WTP	100,00		Opini Audit BPK atas LKPD Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, setelah disclaimer Tahun 2015 s/d Tahun 2016 kemudian WDP dan Tahun 2019 telah mencapai target akhir 2021 RPJMD Kabupaten Morowli Utara yakni memperoleh opini audit WTP.
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Rata-rata Baik	NA	NA	NA	NA	NA		Status capaian tidak dapat diketahui, data capaian tidak tersedia.
14	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi Tangkap Darurat Bencana	80-95 %	NA	NA	NA	NA	NA		Status capaian tidak dapat diketahui, data capaian tidak tersedia.



No	Indikator	Target Akhir RPJMD 2021	Capaian Tahun				% Capaian 2019 terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
			2016	2017	2018	2019			
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80-85 %	NA	NA	NA	NA	NA		Status capaian tidak dapat diketahui, data capaian tidak tersedia.

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Morowali Utara, Tahun 2020

Keterangan:

-  Tercapai/Melampaui
-  Akan Tercapai
-  Perlu Upaya Keras
-  Data Capaian Tidak Tersedia/Target Belum Ditetapkan/Target Kualitatif



2.5.2. Evaluasi Capaian Indikator Misi

Total indikator misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 sebanyak 232 Indikator. Hasil evaluasi terhadap seluruh capaian indikator setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125

Rekap Capaian Indikator Misi s/d Tahun 2019 Terhadap Target Akhir 2021 RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2016-2021

No	Misi	Status Capaian				Jumlah
1	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional	24	4	4	1	33
2	Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan Secara Berkelanjutan	27	0	2	5	34
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melalui Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif	11	1	4	7	23
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan	34	8	17	8	67
5	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah yang Inklusif	8	0	3	0	11
6	Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Keagamaan	21	5	7	2	35
7	Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran	13	7	6	3	29
Total		138	25	43	26	232
Persentase		59,48	10,78	18,53	11,21	100,00

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJMD Morowali Utara, Tahun 2020

Merujuk pada tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar target akhir 2021 indikator misi Kabupaten Morowali Utara telah tercapai/melampaui yakni sebanyak 138 indikator atau sebesar 59,48%. Hal ini menunjukkan kerja pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara sudah cukup berhasil untuk mencapai target akhir RPJMD yang ditetapkan, meskipun masih ada 2 Tahun periode RPJMD 2016-2021 berakhir. Selanjutnya untuk status capaian akan tercapai yakni interval capaian antara 76%-90% sebanyak 25 indikator atau sebanyak 10,78%. Untuk status capaian perlu upaya keras yakni interval 50%-65% sebanyak 43 indikator atau sebesar 18,53%. Dan untuk indikator yang tidak dapat diukur tingkat capaiannya sebanyak 26 indikator atau sebesar 11,21%.

Hal evaluasi secara umum menunjukkan bahwa indikator



dibidang ekonomi, cenderung capaiannya sudah tinggi, namun pada indikator pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yakni masalah kemiskinan masih memerlukan upaya keras dari pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui penangannan yang fokus dan menyeluru. Masalah kemiskinan yang mendasar di Kabupaten morowali Utara salah satu dikarenakan adanya masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Hasil evaluasi capaian Indikator Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut:



Tabel 2.126
Evaluasi Capaian Indikator Misi

Misi 1: Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan kompeten	1 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level “memuaskan”	1 Indeks kepuasan pelayanan publik	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	100%		Indeks kepuasan pelayanan public telah mencapai target akhir RPJMD yakni memuaskan. Hal menunjukkan pelayanan publik di Kabupaten Morowali semakin baik.
			2 Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	80-90	100%	100%	100%	100%	100%		Tingkat layanan administrasi telah melampaui target akhir RPJMD, tingkat capaian 100%. Kedepan perlu menerapkan sistem administrasi berbasis online dan dilengkapi dengan SOP yang jelas dalam rangka penerap teknologi informasi.
			3 Rata-rata lama proses perizinan	3-4 Hari	3-4 Hari	3-4 Hari	3-4 Hari	3-4 Hari	100%		Proses perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali Utara telah efektif dan efisien. Hal ini diperlukan mengingat Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu tujuan investasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Kedepan perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi lebih baik lagi.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				4	Jumlah Aparatur yang terkena sanksi (<i>punishment</i>)	Menurun setiap Tahun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	100		Reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui penegakan disiplin ASN. Jumlah ASN yang terkena saksi semakin menurun setiap Tahunnya, sejalan dengan target akhir RPJMD.
				5	Cakupan penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK	100	-	72,03%	77,60%	89,22%	89,22		Tingkat capaian indikator 89,22% atau akan tercapai. Memaksimalkan pelayanan perekaman KTP perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
				6	Peresentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	85	-	33,42%	94,00%	34,68%	40,8		Target sulit untuk tercapai dan memerlukan upaya keras Dinas terkait. Lakukan sosialisasi dan penerapaan sistem dan SOP yang baik untuk meningkatkan persentase penduduk yang berakte kelahiran.
				7	Persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga (KK)	100	-	81,95%	30,00%	30,21	30,21		Target sulit tercapai atau perlu upaya keras untuk mencapai target. Sosialisasi dan pendataan yang menyeluruh perlu dilakukan. Juga perlu melakukan pendapataan berbasis online.
				8	Persentase pengelolaan arsip sesuai standar	75-80	-	-	97,99%	-	NA		Data tidak dapat diolah dikarenakan data capaian tidak dapat diketahui. Perlu diperhatikan oleh bidang terkait



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
											untuk mengupayakan ketersediaan data capaian indikator RPJMD, agar dapat dilakukan evaluasi dan pengendalian.
			9 Persentase PAD terhadap Pendapatan	3-4	4,28	6,14	4,05	4,50	112,5		Capaian Tahun 2019 telah melampaui target. Kinerja maksimalisasi penerimaan PAD tetap harus diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Morowali Utara.
			10 Jumlah aparat pemerintah desa yang mendapat pelatihan teknis dan fungsional	80-90	100%	100%	100%	100%	111,11		Target telah tercapai, perlu dipertahankan dan tetap melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa. Pelatihan pemanfaatan TI, pengelolaan BUMDES dan lainnya perlu untuk ditingkatkan.
			11 Jumlah anggota dewan yang mengikuti diklat	Meningkat	-	-	25 orang	25 orang	100%		25 Anggota DPRD di Kabupaten Morowali Utara telah mengikuti diklat, target RPJMD tercapai.
			12 Jumlah informasi dan izin yang dikeluarkan	Meningkat	-	-	128 izin	-	75%		Target akan dicapai. Perlu mendorong OPD terkait untuk fokus mencapai target akhir RPJMD.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
		2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	1 Jumlah evaluasi kelembagaan SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan	23	-	-	37 OPD	34 OPD	147,82		Seluruh OPD di Kabupaten Morowali Utara telah dilakukan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya dilaksanakan oleh Bappelitabangda Kabupaten Morowali Utara. Capaian Tahun 2019 telah melampaui target akhir RPJMD.
			2 Persentase produk hukum yang difasilitasi per Tahun	50 (10 Raperda per Tahun)	-	-	75,75%	136%	136		Target telah tercapai. Produk hokum yang telah ditetapkan perlu ditingkatkan pengawasan dan kepatuhannya.
			3 Nilai dan pemeringkatan LPPD	A	-	-	2,2502/ Tinggi	-	Sulit Tercapai		Target sulit dicapai atau perlu upaya keras. OPD terkait perlu didorong untuk memaksimalkan pencapaian hingga akhir periode RPJMD.
			4 Ketepatan waktu penyerahan LKPJ	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%		Setiap Tahunnya selalu tepat waktu, target tercapai. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.
			5 Persentase distribusi informasi hasil pembangunan	85%	100%	100%	100%	100%	117,64		Capaian setiap Tahunnya mencapai 100%, artinya target akhir 2021 RPJMD telah tercapai. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				6	Persentase pengendalian administrasi pembangunan daerah	90%	90%	90%	90%	90%	100		Target akhir periode RPJDM diTahun 2019 telah tercapai. Capaian dipertahankan dan ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD 2016-2021.
				3	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	1	Jumlah SDM aparatur yang studi lanjut	25 orang (5 orang per Tahun)	5	5	5	5	80%
			2	Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat struktural dan fungsional		Diklat PIM II 25 org, PIM III 50 org PIM IV 120 org	-	-	-	-	NA		Data capaian tidak diketahui, status capaian tidak diketahui. Perlu dorong OPD terkait untuk menyediakan dapat capainnya indikator tersebut.
		4	Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur	1	Jumlah aparatur yang menerima <i>reward</i>	25 orang (5 orang per Tahun)	5	5	5	5	80		Target Tahunnya tercapai, yakni 5 SDM Aparatur yang menerima award. Capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD Akan tercapai.
		2		Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti.	100	-	-	100%	100%	100		Opini audit LKPD Kabupaten Morowali Utara telah WTP di Tahun 2019, hal ini salah satunya diakibatkan komitmen pemerintah daerah menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari pemeriksa/auditor.	
		3		Jumlah aparatur yang	25	-	-	100%	200%	100		Target akhir periode RPJMD telah tecapai.	



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			mengikuti pelatihan pengawasan								
			4 Jumlah Aparatur yang terkena sanksi (<i>punishment</i>)	Menurun setiap Tahun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	100%		Semakin meningkatnya disiplin aparatur akan berdampak pada jumlah Aparatur yang melakukan pelanggaran, sehingga sanksi yang diberikan juga menurun. Capaian terhadap target akhir RPJMD telah tercapai.
		5 Meningkatnya kinerja PNS	1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan sesuai kompetensi	85%	-	-	79,29%	100%	117,64		Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja PNS adalah mereka ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Persentase PNS yang menduduki jabatan sesuai kompetensi telah mencapai target akhir RPJMD. Capaian ini pertahankan dan ditingkatkan.
			2 Persentase jabatan Struktural yang terisi	100%	-		83%	100%	100		Target telah tercapai.
			3 Persentase PNS yang tamat pendidikan sesuai jenjang pendidikan	85%	100%	100%	100%	100%	117,64		Target telah tercapai. Namun tetap perlu memotivasi PNS untuk melanjutkan studi lanjut untuk meningkatkan kompetensinya.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				4	Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	75%-85%	-	-	100%	100%	117,64		Target telah tercapai.
2	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah	6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level “rata-rata baik” untuk seluruh SKPD, dan LAKIP/SAKIP daerah dengan nilai B	1	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai B	-	60/C	45,91%/C	CC	50%		Target sulit tercapai dan perlu upaya keras. Perlu dilakukan identifikasi kelemahan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui Bappelitbangda dan OPD terkait.
		7	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”	1	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WTP	DISCLAIMER	DISCLAIMER	WDP	WTP	100%		Penatausahaan keuangan Kabupaten Morowali Utara mengalami perbaikan yang positif. Hasilnya Tahun 2019 memperoleh opin WTP dan sesuai dengan target akhir 2021 RPJMD.
				2	Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan asset	25-30	32	43	43	46	153,33		Penatusahaan pengelolaan asset di Kabupaten Morowali Utara semakin baik setiap setiap Tahunnya. Hingga 2019 target akir RPJMD telah tercapai. Kinerja perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			3	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Keuangan	100	100%	100%	100%	100%	100	● Target akhir periode RPJMD telah tercapai. Pelatihan kompoetensi aparatur dalam manajemen keuangan semakin ditingkatkan.
			4	Persentase Laporan keuangan dan pengelolaan aset sesuai standar teknis	95-100	100%	100%	100%	100%	100	● Target akhir periode RPJMD telah tercapai.

Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan Secara Berkelanjutan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Morowali Utara	1 Meningkatkan proporsi panjang jalan kantong produksi dan daerah terisolir dalam kondisi mantap	1 Persentase panjang jalan kantong produksi dalam kondisi baik dan sedang	Baik=62%-65%	-	31,55%	99,76%	100%	153,85	●	Persentase jalan produksi dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Capaian Tahun 2019 telah melampaui target RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Pengembangan jalan kantong produksi dibangun di wilayah-wilayah dengan potensi



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
													pertanian dan perkebunan yang besar.
		2	Meningkatnya jumlah jembatan dalam kondisi mantap	1	Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik dan sedang	Baik=65%-70%	-	100%	99,77%	100%	100%		Peningkatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang semakin meningkat setiap Tahunnya. Capaian pada Tahun 2019 telah mencapai target RPJMD. Perbaikan infrastruktur jalan kedepan masih menjadi masalah yang perlu ditangani.
				2	Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi	65%-75%	-	-	99,29%	85,57%	114,09		Rehabilitas jalan dan jembatan juga meningkat setiap Tahunnya. Capaian Tahun 2019 sebesar 85,57%, telah melampaui target akhir 2021 RPJMD.
				3	Persentase saluran drainase/ gorong-gorong yang dibangun	65%-70%	-	100%	100%	100%	142,86		Saluran gorong-gorong yang dibangun telah sesuai dengan target akhir 2021 RPJMD yakni 100%.
				4	Persentase sarana dan prasarana kebinamagaan yang disediakan	60%-65%	-	-	-	-	NA		Indikator tidak diketahui capaiannya. Data tidak tersedia. Perlu mendorong OPD terkait untuk menyediakan data capaian RPJMD.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				5	Persentase jasa konstruksi yang dibina	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100,00		Target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 100%.
				6	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	20 DI	-	-	83 D.I	83 D.I	415,00		Jumlah D.I di Kabupaten Morowali Utara hingga Tahun 2019 sebanyak 83 D.I, telah melampaui target akhir RPJMD.
2	Meningkatkan sarana prasarana publik, informasi dan komunikasi	3	Meningkatnya ketersediaan pasar rakyat (tradisional)	1	Jumlah pasar rakyat (tradisional)	13-15	20	20	20	20	133,33		Jumlah pasar tradisional Morowali Utara sebanyak 20 pasar. Telah mencapai target akhir RPJMD.
			Meningkatnya wilayah yang mendapatkan akses komunikasi dan informasi	4	Rasio desa/kecamatan yang mendapatkan akses komunikasi dan informasi (internet)	65%	70%	75%	80%	85%	130,77		Sebanyak 85% desa di Kabupaten Morowali Utara dapat mengakses komunikasi dan infomasi (internat), capaian telah melampaui target akhir RPJMD.
		5	Meningkatnya infrastruktur perhubungan	1	Jumlah pelabuhan laut	Meningkat (Tipenya)	3	4	4	4	100,00		Target telah tercapai. Hingga Tahun 2019 terdapat 4 pelabuhan laut. Dan Pelabuhan Kolonodale salah satu yang kegiatan ekspornya terbesar di Sulawesi tengah.
				2	Persentase sarana perhubungan yang dibangun	60-70	-	93%	99,90%	11,11%	18,52		Capaian indikator hingga Tahun 2019 sebesar 11,11% ddengan tingkat capaian sebesar 18,52%. Sehingga perlu upaya keras untuk mencapai target akhir 2021 RPJMD. OPD fokus untuk mencapai target yang ditetapkan.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				3	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi baik	60-70	-	-	100%	90,74%	129,63		Fasilitas sarana perhubungan yang berfungsi baik mencapai 90,74%, telah melampaui target akhir 2021 RPJMD Morowali Utara. Kinerja di pertahankan dan ditingkatkan.
				4	Jumlah terminal	Meningkat (Statusnya)	-	-	1	5	100,00		Target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 100%.
		6	Tersedianya perumahan dan pemukiman kota bagi warga	1	Rasio pemukiman layak huni	65%-75%	-	97%	542	-	NA		Capaian indikator tidak dapat diukur, data capaian tidak tersedia.
				2	Persentase rumah tangga (RT) yang mendapatkan sanitasi layak	60-70	58,66	61%	63%	71%	102,43		Target akhir RPJMD telah tercapai di Tahun 2017, dan meningkat setiap Tahunnya hingga Tahun 2019 menjadi 71%. Tingkat capaian 102,43%. Namun masih ada 29% penduduk Morowali Utara belum akses sanitasi layak. Perlu ditindaklanjuti dan ditingkatkan.
		7	Meningkatnya kapasitas energi	1	Persentase elektrifikasi	62%-65%	71,55	73,55	81,66%	92,46%	142,25		Terget akhir 2021 RPJMD Morowali Utara telah tercapai bahkan telah melampaui target. Namun masih ada sekitar 7,54% masyarakat belum memiliki akses listrik, terutama diwilayah pedalaman dan kepualauan di Morowali Utara.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
3	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan	8	Meningkatnya kebersihan lingkungan	1	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100,00		Target RPJMD tercapai. Tempat pembuangan sampah di Kabupaten Morowali Utara telah tersedia.
		10	Menurunnya kasus <i>illegal fishing</i>	1	Persentase <i>illegal fishing</i>	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	100,00		Target tercapai, kegiatan <i>illegal fishing</i> menurun setiap Tahunnya. Pengawasan yang dilakukan cukup berhasil.
		11	Meningkatnya Ruang Terbuka (RTH)	1	Luas ruang terbuka	Meningkat	-	99%	60%	-	100,00		Target akhir 2021 RPJMD telah tercapai. Ruang Terbuka di Kabupaten Morowali Utara semakin meningkat. Jumlah RTH yang dikembangkan berdampak positif pada kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat.
		12	Meningkatnya luas taman kota	1	Luas taman kota	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100,00		Target akhir RPJMD telah tercapai, Luas taman kota di Kabupaten Kolonodale (Ibu Kota Morowali Utara) telah berkembang, dan juga terdapat di beberapa Ibukota Kecamatan. Namun taman kota masih perlu ditambah dan dikembangkan penatannya.
		13	Meningkatnya intensifikasi, ekstensifikasi, eksplorasi dan tata guna lahan (<i>land use</i>)	1	Tingkat produktifitas total daerah dari sektor Pertambangan/penggalan	Meningkat	29,78	36,52	48,11	70,60	100,00		Sektor pertambangan dan penggalan telah menjadi sektor andalan di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2019 adalah yang tertinggi. Hal ini berdampak pada tingka produktivitasnya.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan	
					Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019				
			pertambahan secara bijaksana dan lestari										
		14	Meningkatnya akses air bersih dan sanitasi layak	1	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	Meningkat	65,57	82,64	79%	82,70%	100,00		Persentase RT yang menggunakan air bersih semakin meningkat setiap Tahun. Hingga Tahun 2019 mencapai 82,70%. Sesuai dengan target akhir RPJMD yang ditetapkan.
				2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	30%-40%	58,66	61%	63%	71%	177,50		Target akhir RPJMD telah tercapai di Tahun 2017, dan meningkat setiap Tahunnya hingga Tahun 2019 menjadi 71%. Tingkat capaian 102,43%. Namun masih ada 29% penduduk Morowali Utara belum akses sanitasi layak yang perlu diselesaikan.
		15	Meningkatnya pengelolaan SDA yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Persentase pengelolaan Sumber daya alam yang sesuai dengan UKL/UPL/AMDAL, SPPLH	Meningkat	-	99%	40%	-	NA		Capaian indikator tidak dapat diukur, data capaian tidak tersedia.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
4	Mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana	16 Meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	1 Persentase Desa yang telah mengikuti kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB)	Meningkat	-	7,8%	50%	51,20%	100,00		Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) meningkat tiap Tahun. Hal ini sejalan dengan target akhir 2021 RPJMD.
			2 Jumlah desa yang tangguh terhadap bencana	Meningkat	-	-	36 Desa	-	NA		Capaian indikator tidak dapat diukur, data capaian tidak tersedia.
			3 Jumlah bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat	Meningkat	-	-	90%	-	NA		Capaian indikator tidak dapat diukur, data capaian tidak tersedia.
			4 Persentase aparaturnya yang bersertifikat Pelatihan Tanggap Bencana	Meningkat	-	48,78%	32%	29,26%	50		Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan tanggap bencana masih rendah. Tingkat capaian indikator sebesar 50% (perlu upaya keras). Perlu mendorong aparaturnya untuk mengikuti pelatihan tanggap bencana. Mengingat Kabupaten Morowali Utara adalah wilayah rawan bencana.
5	Mewujudkan pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana di Kabupaten Morowali Utara	17 Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	Meningkat	-	-	99,81%	100%	100,00		Target akhir RPJMD tercapai. Hingga Tahun 2019 sebesar 99,81%
		18 Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian	1 Ketaatan terhadap RTRW	Meningkat	-	-	99,79%	35,28%	100,00		Target akhir RPJMD tercapai. Capaian hingga Tahun 2019 sebesar 35,25%.
			2 Persentase luas wilayah produktif	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100,00		target akhir RPJMD tercapai. Namun kedepan target perlu ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, agar tingkat capaian



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			bangunan (permukiman)										dapat diukur dengan akurat.
				3	Persentase luas wilayah industri	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100,00		arget akhir RPJMD tercapai. Namun kedepan target perlu ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, agar tingkat capaian dapat diukur dengan akurat.
				4	Persentase luas wilayah banjir	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	100,00		arget akhir RPJMD tercapai. Namun kedepan target perlu ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, agar tingkat capaian dapat diukur dengan akurat.
				5	Persentase luas wilayah kekeringan	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	100,00		arget akhir RPJMD tercapai. Namun kedepan target perlu ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, agar tingkat capaian dapat diukur dengan akurat.

Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi	10%-13%	5,76	6,02	8,89	10,45	104,50		Pertumbuhan ekonomi meningkat hingga Tahun 2019 sebesar 10,45% dengan % capaian terhadap target akhir sebesar 104,50% atau melampaui target. Pertumbuhan ekonomi Morowali Utara salah satu yang tertinggi, namun pertumbuhan ini masih ditopang sebagian besar oleh sektor pertambangan dan penggalan, sedangkan



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan	
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019				
											sektor lainnya cenderung tetap bahkan menurun.	
			2	Jumlah wilayah cepat tumbuh yang berkembang	3-4 Kawasan	-	3	7	10	250		Capaian Tahun 2019 sebanyak 10 kawasan cepat tumbuh berkembang. Kawasan cepat tumbuh berkembang sebagian besar pada wilayah pertambangan. Status capaian telah melampaui target akhir RPJMD 2021.
			3	Persentase peningkatan produksi padi dan bahan utama lokal	20-25	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	14,9		Persentase capaian indikator sangat rendah yakni hanya 14,90% dan perlu upaya keras untuk mencapai target dikahir periode RPJMD 2021.
			4	Persentase peningkatan populasi ternak perTahun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100		Capaian meningkat setiap Tahunnya, sesuai dengan target yang ditetapkan.
			5	Persentase ketersediaan informasi pemasaran, distribusi dan harga prodak pertanian	70-90	100%	100%	100%	100%	111,11		Ketersediaan informasi pemasaran, distribusi dan harga prodak pertanian di Kabupaten Morowali Utara setiap Tahunnya mencapai 100%, dan telah melampaui target akhir 2021 RPJMD. Namun pengendalian harga hasil petani masih sering rendah ketika masa panen tiba. Perlu dilakukan pengendalian harga komoitas pertanian agar tidak merugikan petani.
			6	Peningkatan skor pola pangan harapan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100		Capaian meningkat setiap Tahunnya, sesuai dengan target yang ditetapkan.
			7	Rasio produksi dan konsumsi penduduk	100	NA	NA	NA	NA	NA		Data capaian tidak tersedian, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan		
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019					
											perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.		
			8	Persentase sampel pangan yang segar yang aman dari pencemaran	70-85	100%	100%	100%	100%	117,65		Capaian indikator dari Tahun 2016-2019 yakni 100%, telah melampaui target akhir RPJMD 2021. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.	
		2	Meningkatnya PDRB per kapita	1	PDRB per kapita ADH Berlaku	Rp. 38 juta-Rp. 40 juta	41,15	45,26	49,84	54,49	136,22		PDRB perkapita ADH Berlaku meningkat setiap Tahun. Tahun 2019 sebesar 54,49 juta, % capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 136,22% atau telah melampaui target akhir RPJMD.
			2	PDRB per kapita ADH Konstan		Rp. 20 juta-Rp. 25 juta	31,17	32,89	34,41	36,35	145,39		PDRB perkapita ADH Konstan 2010 meningkat setiap Tahun. Tahun 2019 sebesar 36,35 juta, % capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 145,39% atau telah melampaui target akhir RPJMD.
			3	Persentase koperasi aktif		50-60	69,84	18,68	66,67	22,02	44,04		Perkembangan koperasi aktif fluktuatif (anik turun), diTahun 2019 sebesar 22,02%, masih jauh dari target akhir RPJMD 2021. Perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.
			4	Persentase pertumbuhan industri		25	-	0,00	-9,04	-35,10	-140,40		Pertumbuhan industri menurun setiap Tahunnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus OPD terkait, mendorong kerjasama sektor pertambangan dengan industri. Agar industri tumbuh dan target akhir RPJMD dapat dicapai.
			5	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB		10-12	6,88	7,15	7,14	6,68	66,83		Status capaian indikator akan tercapai yakni sebesar 66,83%. Namun kontribusi sektor perdagngan menurun setiap Tahunnya. Melihat tren data tersebut, kemungkinan besar target tercapai diakhir



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
													RPJMD. Untuk perlu upaya keras pemerintahd aerah.
				6	Persentase terawasinya barang strategis yang beredar	70-80	NA	NA	NA	NA	NA		Data capaian tidak tersedian, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.
				7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Meningkat	-	-	21%	-	NA		Data capaian tidak tersedian, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.
				8	Tingkat inflasi daerah	4-5	6,13%	6,13%	3,62%	2,37%	-40,75		Pengendalian Inflasi sangat baik, TPID berhasil mengendalikan inflasi daerah. Capaian Tahun 2019 telah melampaui target akhir RPJMD. Kinerja dipertahankan sehingga target akhir tetap dapat dicapai.
2	Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri dan investasi daerah	3	Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA)	1	Realisasi PMDN dan PMA	PMDN= Rp. 70 milyar- Rp. 75 milyar	-	Rp 5.3 Triliun	-	Rp 3.8 Triliun	5.134,45		Realisasi investasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Target RPJMD telah dicapai.
				2	Jumlah investasi	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA		Data capaian tidak tersedian, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.
				3	Jumlah kerjasama yang dilakukan	Meningkat	NA	NA	NA	NA	NA		Data capaian tidak tersedian, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
		4	Meningkatnya informasi pelayanan terpadu satu pintu	1	Jumlah informasi dan ijin yang dikeluarkan	Meningkat	-	-	128 Izin	-	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.
3	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	5	Meningkatnya kunjungan wisata	1	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Morowali Utara	Meningkat	1.865	4.405	4.506	5.010	100%		Jumlah wisatawan berkunjung meningkat setiap Tahunnya. Capaian tersebut sejalan dengan target akhir RPJMD 2021.
		6	Tertatanya destinasi wisata dengan baik	1	Jumlah destinasi wisata yang tertata baik	15 DTW	-	3 DTW	3 DTW	4 DTW	26,67		Indikator perlu upaya keras untuk dicapai. Penitng untuk menata destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
				2	Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan kepariwisataan	50%	NA	NA	NA	NA	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Meningkatkan derajat pendidikan	1	Meningkatnya IPM	1	IPM	68-70	66'57	67,35	67,95	68,45	100,66		Capaian meningkat setiap Tahunnya, hingga Tahun 2019 meningkat menjadi 68,45 poin dan telah menjadi target akhir 2021 RPJMD. Capaian IPM ini adalah akumulasi dari indikator pendidikan dan



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
													kesehatan serta ekonomi, masih terdapat beberap indikator tersebut yang capaiannya masih rendah, dan dibawah rata-rata provinsi dan Nasional.
				2	Persentase aparat pemerintah desa yang memperoleh layanan jaminan kesehatan	70%	100%	100%	100%	100%	142,86		Aparat pemerintah desa secara langsung akan memperoleh jaminan kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tingkat capain 142,86% atau telah melampaui target akhir 2021 RPJMD.
		2	Meningkatnya harapan rata-rata lama sekolah	1	Harapan rata-rata lama sekolah	12-13 Tahun	12,22	12,22	12,3	12,38	103,17		Harapan lama sekolah capaiannya telah melampaui target akhir RPJMD 2021. Hal ini berdampak pada peningkat nilai IPM Kabupaten Morowali Utara.
		3	Meningkatnya keterjangkauan pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah	10-11 Tahun	8,16	8,39	8,58	8,7	87,00		Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah yakni hanya 8,7 Tahun atau hanya sampai kelas 2 SMP. Perlu diupayakan kedepan minimal 12 Tahun sesuai dengan program pemerintah, melalui peningkatan akses pendidikan, kualitas guru dan lainnya.
				2	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD, SD, SMP, SMA.								



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			- SD	100	99,12	103,89	105,17	103,25	103,25		Capaian masih di atas 100%. Capaian Tahun 2019 mencapai target akhir 2021 RPJMD. Namun angka ini masih perlu diturunkan agar siswa SD yang sekolah sesuai dengan usianya.
			- SMP	100	104,83	96,79	102,89	109,00	109		Capaian masih di atas 109%. Capaian Tahun 2019 mencapai target akhir 2021 RPJMD. Namun angka ini masih perlu diturunkan agar siswa SMP yang sekolah sesuai dengan usianya.
			- SMA	100	79,7	91,49	71,15	74,65	74,65		APK jenjang pendidikan SMA Tahun 2019 sebesar 74,65%, masih jauh dari target akhir RPJMD. Kedepan sebaiknya indikator terkait dihilangkan, tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah TK II.
			3 Angka pendidikan yang ditamatkan	100%	-	-	100%	15,70%	15,7		% capaian sangat rendah yakni 15,70% atau perlu upaya keras. Perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
			4 Angka partisipasi sekolah								
			- SD	35-45	95,1	96,4	96,1	94,42	269,77		% capaian sebesar 269,77%. Target yang ditetapkan sebelumnya kemungkinan pesimis. Kedepan target



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
											indikator ditetapkan lebih rasional dan sesuai dengan kemampuan daerah.
			- SMP	60-65	95,27	94,98	96,27	92,72	154,53		% capaian sebesar 154,53%. Kedepan target indikator ditetapkan lebih rasional dan sesuai dengan kemampuan daerah.
		4	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan	1	Angka partisipasi murni (APM)SD, SMP						
			- SD	100	94,99	90,57	90,39	86,41	86,41		Capaian APM SD menurun setiap Tahunnya. Hingga Tahun 2019 sebesar 86,41% atau akan tercapai.
			- SMP	90	82,01	83,42	85,5	67,24	74,71		Capaian APM SMP juga menurun setiap Tahunnya. Hingga Tahun 2019 sebesar 86,41% atau akan tercapai.
			2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah							
			SD	95-100	92,73	92,73	109,36	106,2	106,2		% capaian target akhir 2021 RPJMD sebesar 106,20% atau telah melampaui target.
			SMP	70-80	73,79	73,79	80,05	81,2	101,31		% capaian target akhir 2021 RPJMD sebesar 101,31% atau telah melampaui target.
			3	Rasio guru terhadap murid							



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			- SD	10,12	10,43	9,85	8,51	8,26	81,58		Rasio semakin baik setiap Tahunnya. % capaian sebesar 81,58% atau target akan tercapai.
			- SMP	65,67	9,76	9,95	8,70	8,98	13,68		% capaian indikator sangat rendah yakni hanya sebesar 13,68%. Perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir Tahun 2021.
			4 Persentase sekolah dalam kondisi baik								
			- SD	65-70%	-	-	100%	41,97%	64,57		% capaian indikator masih rendah yakni hanya sebesar 64,57%. Perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir Tahun 2021.
			- SMP	70-75%	-	-	100%	41,97%	59,96		% capaian indikator masih rendah yakni hanya sebesar 59,96%. Perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir Tahun 2021.
			- SMA	75-80%	-	-	100%	41,97%	55,96		% capaian indikator masih rendah yakni hanya sebesar 55,96%. Perlu upaya keras untuk mencapai target diakhir Tahun 2021.
			5 Jumlah perpustakaan	Meningkat	0	80	93	99	100		Jumlah perpustakaan bertambah setiap Tahunnya. Capaian tersebut sejalan dengan target yang ditetapkan.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan	
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019				
				6	Rata-rata jumlah kunjungan ke perpustakaan perTahun	Meningkat	0	513 Orang	719 Orang	1086 Orang	100		Jumlah kunjungan perpustakaan meningkat setiap Tahun. Hal ini sejalan dengan target akhir 2021 RPJMD.	
		5	Meningkatnya kuantitas dan mutu pendidikan	1	Persentase guru yang bersertifikat pada semua jenjang (PAUD, SD, SMP)	100%	-	-	100%	45,04%	45,04		Target sulit dicapai, perlu upaya keras untuk mencapai indikator. Penambahan guru dan kualitas guru perlu ditingkatkan.	
				2	2	Persentase guru yang berpendidikan S1 dan S2								
					- S1	70-75%						NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Bappalitbangda perlu mengkomunikasikan kepada OPD terkait.
					- S2	30-35%						NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui.
				3	Persentase jumlah sekolah yang berstandar nasional	4-5 sekolah	1	1	1	1	100		Jumalh sekolah berstandar nasional bertambah setiap Tahunnya. Hingga Tahun 2019 sebanyak 4 sekolah berstandar nasional, dan telah mencapai target akhir RPJMD 2021.	
2	Meningkatkan upaya kesehatan	6	Meningkatnya Usia Harapan Hidup	1	Usia Harapan Hidup	68-70	68,24	68,33	68,76	69,14	101,67		Target akhir RPJMD telah tercapai. UHH meningkat setiap Tahun.	



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				2	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	Meningkat	-	-	10	167	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Pembangunan sarana kesehatan penting untuk dikembangkan ditengah pandemic covid 19.
				3	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang direhabilitasi	Meningkat	-	-	25	-	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Rehabilitasi sarana kesehatan penting untuk dikembangkan ditengah pandemic covid 19.
				4	Jumlah alat kesehatan yang memenuhi standar	Meningkat	-	-	38,46	-	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui.
		7	Meningkatnya upaya kesehatan	1	Status rumah sakit	C	C	C	C	C	100		Status RS Kolonodale yakni “C”. Sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedepan status dan kualitas sarana serta prasarana ditingkatkan dalam rangka menghadirkan layanan kesehatan yang baik.
		8	Meningkatnya pelayanan screening dan pelayanan	2	Cakupan kunjungan ibu hamil	95%	-	80%	75%	56%	58,95		% capaian target akhir 2021 RPJMD sebesar 58,95%. Perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD 2021.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
		kesehatan berdasar daur kehidupan	3 Cakupan ibu hamil yang ditangani	80%	-	95%	75%	93%	116,25		Capaian Tahun 2019 telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 116,25%. Layanan kunjungan ibu hamil semakin ditingkatkan kedepan.
			4 Cakupan pertolongan persalinan	90%	-	70%	98%	82%	91,11		Capaian Tahun 2019 telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 91,11%. Layanan pertolongan persalinan semakin ditingkatkan kedepan. Meningkatkan peran bidan desa dan kader kesehatan yang ada di desa.
			5 Cakupan pelayanan ibu nifas	90%	-	55%	98%	83%	92%		Capaian Tahun 2019 telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 92%. Layanan ibu nifas semakin ditingkatkan kedepan.
			6 Cakupan neo-natal dengan komplikasi yang ditangani	80%	-	23%	94%	100%	125%		Target tercapai 125%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
			7 Cakupan kunjungan bayi	90%	-	59%	98%	98,07%	109%		Target tercapai 125%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
			8 Cakupan universal care immunization (UCI)	100%	-	86,90%	82%	100%	100%		Capaian Tahun 2019 telah mencapai target akhir RPJMD sebesar 100%. Cakupan UCI semakin ditingkatkan kedepan.
			9 Cakupan pelayanan anak balita	90%	-	46%	50%	26,98%	30%		% capaian target hingga Tahun 2019 sebesar 30%, perlu upaya keras untuk mencapai



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
											target s/d Tahun 2021.
			10 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	-	42%	78%	100%	100%		Target tercapai 125%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
			11 Cakupan balita gizi buruk	0.020%	-	-	100%	1.00%	400		% capaian target hingga Tahun 2019 masih sangat jauh dari akhir RPJMD, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021.
			12 Persentase kecamatan bebas rawangizi	70%	-	40%	80%	50%	-28,57		Target tercapai. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan. Perlu melibatkan peran desa untuk menjadi ketersediaan gizi di setiap wilayah.
			13 Cakupan jaringan kesehatan siswa SD	85%	-	92%	89%	19,96%	23,48%		% capaian target hingga Tahun 2019 sebesar 23,48%, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021. Mengajarkan pola hidup sehat sejak pendidikan SD sangat penting ditengah wabah Covid 19.
			14 Cakupan peserta KB aktif	75%	71,41	78,25	77,15	76,14	101,52		Target telah tercapai. Kinerja dipertahankan. Namun masih ada 23,86% PUS yang belum aktif ber KB. Perlu dilakukan sosialisasi lebih masiv lagi.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				15	Cakupan peserta pelayanan kontrasepsi aktif	65%	-	-	75%	76,61%	117,86%		Target tercapai 117,86%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
		9	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan	1	AV-LOS (Average Lenght Of Stay)/rata-rata lama rawat seorang pasien pada waktu tertentu	3 Hari	-	4 Hari	4 Hari	3 Hari	100		Target tercapai 100%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
				2	Persentase pasien gawat darurat yang puas dengan layanan	95%	-	-	98%	-	103%		Target tercapai 103%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
				3	Persentase pengunjung yang puas dengan layanan RSUD	95%	-	-	98,75%	-	104%		Target tercapai 104%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
				4	Persentase ketersediaan obat yang terjangkau (generik)	95%	-	99,30%	95%	96,2%	101,26%		Target tercapai 101,26%. Perlu memastikan ketersediaan obat genering hingga ke wilayah terpencil. Kerjasama desa untuk menjamin ketersediaan.
				5	Persentase tingkat kehadiran dokter dan paramedis saat dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	73,09%	73,09%		% capaian 73,09%, pengawasan terhadap kehadiran dokter perlu ditingkatkan sehingga target akhir 2021 RPJMD dapat dicapai.
		10	Meningkatnya upaya promosi kesehatan	1	Jumlah desa siaga terbentuk	125	20 Desa	20 Desa	125 Desa	50 Desa	40		Perlu upaya keras untuk mencapai target akhir 2021 RPJMD. Pemerintah desa perlu diarahkan untuk membentuk desa siaga kesehatan.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				2	Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	80%	-	70%	50%	72%	90%		Persentase capaian target sebesar 90%. Perlu memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya rumah sehat.
				3	Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan laboratorium kesehatan	65%	-	40%	50%	91,01%	140%		Target tercapai 140%/melampaui target. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.
				4	Rasio puskesmas persatuan penduduk	0.5	0,09%	0,11%	0,10%	0,11%	2,2		% capaian target hingga Tahun 2019 masih sangat jauh dari akhir RPJMD, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021.
				5	Rasio poliklinik persatuan penduduk	0.6	0,02	0,03	0,03	0,01	16,67		% capaian target hingga Tahun 2019 masih sangat jauh dari akhir RPJMD, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021.
				6	Persentase rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat	60%	-	61%	7,40%	24%	40		% capaian target hingga Tahun 2019 masih sangat jauh dari akhir RPJMD, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021.
		11	Meningkatnya pelayanan pemeriksaan penyakit menular	1	Jumlah kesakitan malaria per - 1000 penduduk	10	-	-	0,166	0,01	0,1		% capaian target hingga Tahun 2019 masih sangat jauh dari akhir RPJMD, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021.
				2	Prevalensi HIV (persentase kasus	Menurun	-	4%	1,11%	-	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
					terhadap penduduk beresiko)								indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui. Perlu meningkatkan pengetahuan tentang HIV.
				3	Angka kesembuhan penderita TB dengan angka kesakitan demam berdarah per 100 penduduk	95%	-	70%	41,94%	69%	73%		Target akan tercapai dengan persentase sebesar 73%. Namun tetap perlu upaya untuk mencapai target. Sosialisasi pola hidup sehat ke masyarakat perlu ditingkatkan.
				4	Cakupan penyakit yang dicegah dengan imunisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Target tercapai 100%. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan. Imunisasi sangat penting dilakukan. Kedepan vaksinisasi Covid 19 disegerahkan saat vaksin telah tersedia.
				5	Persentase desa yang terkena kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani dibawah 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Target telah dicapai. 100%.
				12	Meningkatnya pelayanan kesehatan lingkungan	1	Rasio posyandu persatuan balita	35	23,1	20,71	17,24	-	49,26
			2	Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan	80%	100%	100%	100%	100%	125%		Target telah dicapai. 125%.	



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				3	Persentase desa/kelurahan yang stop membuang air besar sembarangan	70%	-	29%	78%	28%	40%		% capaian target hingga Tahun 2019 masih sangat jauh dari akhir RPJMD, perlu upaya keras untuk mencapai target s/d Tahun 2021.
				4	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	90%	-	90%	200%	68,06%	75,62%		Target akan tercapai dengan persentase sebesar 75,62%. Namun tetap perlu upaya untuk mencapai target. Sosialisasi dan pengawasan makanan kepada pelaku usaha makanan untuk memenuhi syarat kesehatan
				5	Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi	60	100%	100%	100%	100%	166,67		Target telah dicapai. 166,67%. 10 Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara 100% cukup bebas dari rawan gizi. Perlu ada sinkronisasi program anatar pemda, kecamatan dan pemerintahan desa.
				6	Persentase balita gizi buruk	1-2	-	0,47%	-	-	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui.
		13	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1	Jumlah kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha yang terlibat dalam bidang kesehatan	Meningkat	-	-	8 Klp	-	NA		Data capaian tidak tersedia, sehingga tingkat capaian indikator hingga Tahun 2019 tidak dapat diketahui.



Misi Kelima: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	1 Meningkatkan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan	1 Persentase masyarakat yang mengikuti Musrenbang (Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten)	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100		Partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musrenbang pada setiap tingkatan meningkat setiap Tahunnya. Usulan kegiatan yang semakin banyak menjadi gambaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Target tercapai 100%.
			2 Pembangunan yang bersifat <i>bottom-up</i> (Rata-rata surat aduan masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100		Proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan melibatkan peran serta masyarakat. Target indikator tercapai 100%. Kedepan penggunaan sistem perencanaan dan pembangunan online perlu dikembangkan.
			3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	70-85	-	-	24%	25%	35,71		% capaian indikator hingga Tahun 2019 sebesar 35,71%. Perlu upaya keras untuk mencapai target. OPD terkait perlu didorong untuk mengupayakan target tercapai s/d Tahun 2021.
			4 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100		Target telah dicapai. 100%.
			5 Persentase PKK aktif	Meningkat	136	136	136	136	100		Target telah dicapai. 100%. Peningkatan peran PKK dalam pembangunan perlu dilakukan mulai dari tingkat Desa s/d Kabupaten.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan		
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019					
		2	Optimalnya mekanisme dan sistem perencanaan yang komprehensif dan partisipatif	1	Jumlah dokumen perencanaan pemda yang tersusun	80-100	-	-	48 Dok	48 Dok	60		Jumlah dokumen yang tersusun yang mandatory dari perundang-undangan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Bappelitbangda sebagai penanggungjawab urusan perencanaan. Perlu mendorong OPD lain untuk menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan urusan. Perlu upaya keras untuk encapai target, % capaian sebesar 60%.
				2	Persentase usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti dalam RKPD	90-100	80%	85%	100%	100%	100		Usulan musrenbang yang tindaklanjuti adalah yang prioritas dan mendesak untuk diselesaikan. % capaian indikator sebesar 100%.
				3	PDRB perkapita	50-60 jt	Rp41	45	50	54	108,98		Nilai PDRB yang sangat besar dan tumbuh sangat tinggi berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Status capaian Tahun 2019 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara sudah melampaui target. Kinerja ekonomi sudah sangat baik. Namun masih perlu memperhatikan inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang tumbuh selama ini.
				4	Persentase pelaksanaan program kegiatan dalam APBD sesuai dengan dokumen perencanaan	60-75	100%	100%	50,89%	67,80%	113		Evaluasi RKPD dilakukan setiap Tahun oleh Bapelitbangda. Hingga Tahun 2019 sebesar 67,80%. Kondisi telah mencapai target akhir periode 2021 RPJMD. Kinerja dipertahankan



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan	
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019				
											dan ditingkatkan.	
			5	Persentase hasil money yang ditindaklanjuti	80-90	60%	60%	100%	100%	125		Temuan hasil evaluasi yang dilakukan selalui ditindaklanjuti kepada OPD terkait.
			6	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK/Inspektorat Kabupaten/Inspektorat Provinsi	85-100	100%	100%	100%	35%	41,18		Opini audit LKPD Kabupaten Morowali Utara telah WTP di Tahun 2019, hal ini salah satunya diakibatkan komitmen pemerintah daerah menindaklanjuti temuan atau rekomendasi dari pemeriksa/auditor.

Misi Keenam: Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Meningkatkan pelayanan bagi pemuka agama dan pembangunan masyarakat (toleransi, gotong royong dan rasa	1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	1	Indeks Pembangunan Masyarakat	68-70	66,57	67,35	67,95	68,45	100,66		% capaian Tahun 2019 sebesar 68,45%. Tingkat capaian terhadap akhir RPJMD 100,66% atau melampaui target. Kinerja dipertahankan dan ditingkatkan.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
	aman)	2	Terjaminnya pengelolaan rumah ibadah	1	Rasio tempat ibadah yang layak	10-15	3,13%	3,06%	3,06%	3,19%	-68,10		Target telah tercapai, jauh melampaui target.
				2	Jumlah pengurus organisasi keagamaan yang mendapatkan pelatihan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100,00		Capaian meningkat setiap Tahun. Sejalan dengan target akhir periode RPJMD. Target tercapai. Pengembangan kapasita organisasi keagamaan penting untuk dilakukan.
2	Meningkatkan kerukunan intra dan antar umat beragama	3	Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama	1	Rasio pemuka agama yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah		-	-	12%	38,56%	NA		Target tidak diketahui, sehingga status capaian tidak dapat diketahui. Kedepan sebaiknya dihilangkan target yang kondisi data tidak tersedia.
				2	Jumlah FKUB Kecamatan yang terbentuk	100	-	6 Kec	9 Kec	10 Kec	100,00		Semua kecamatan telah terbentuk FKUB. Target tercapai. Peran FKUB lebih ditingkatkan dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Morowali Utara.
				3	Rasio pos siskamling per 10.000 penduduk	Meningkat	20,78	20,33	19,90	19,48	50,00		Capaian menurun setiap Tahun. Tidak sejalan dengan tarhet yang ditetapkan. Pengaktifkan pos siskamling sebaiknya ditingkatkan kembali.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			4 Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kabupaten dan kecamatan	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	100,00		10 Kecamatan yang ada telah ada FKDM. Target akhir tercapai. Penting untuk memaksimalkan peran forum tersebut.
			5 Meningkatkan Kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit masy. (Pekat).	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	10 Kec	100,00		Target telah tercapai. Kesadaran tentang penyakit pekat meningkat. Ini berdampak pada konflik antar masyarakat telah berkurang signifikan.
			6 Jumlah kriminalitas	Menurun	27	27	27	-	75,00		Target akan dicapai. Keamanan ditingkatkan. Koordinasi semua stakeholder terkait penting dilakukan.
			7 Berdayanya fakir miskin dan KAT serta PKMS lainnya	500 KK	19336 Jiwa	19346 Jiwa	19509 Jiwa	19351 Jiwa	3870,20		Target telah tercapai, jauh melampaui target.
			8 Persentase penduduk miskin	8-9	16,91%	15,73%	15,53%	15,73%	96,63		Target sulit untuk dicapai. Persentase penduduk miskin masih cukup ditinggi. Program pengentasan kemiskinan yang lebih fokus perlu dilakukan. Bappelitabangda perlu menyusun RKPd.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				9	Jumlah korban bencana alam dan pekerja migran PMKS yang memperoleh askessos	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100,00		% Capaian target sebesar 100%.
				10	Jumlah anak terlantar yang dibina	Meningkat	-	1 Orang	2 Orang	3 Orang	100,00		% Capaian target sebesar 100%. Capaian setiap Tahun sejalan dengan target yang ditetapkan.
3	Menciptakan sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan hamoni	4	Terwujudnya sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan harmoni	1	Persentase alokasi anggaran pendidikan non formal trdp anggaran pendidikan	10	-	-	10%	10%	100,00		% Capaian target sebesar 100%. Anggaran pendidikan non formal dipertahankan dan ditingkatkan perannya dalam mencetak generasi yang berkompeten.
				2	Jumlah kelompok seni budaya yang dibina	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100,00		% Capaian target sebesar 100%.
				3	Jumlah pagelaran/vestifal seni budaya yang dilaksanakan setiap Tahun	5 Keg	1	1	1	1	20,00		Pergelaran seni hanya 1 setiap Tahunnya. Masih jauh dari target yang ditetapkan. Perlu upaya keras untuk mencapai target. Pergelaran atau festival seni dapat dijadikan daya tarik wisata Morowali Utara kedepan.
				4	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Keamanan,	90-100	100%	100%	100%	100%	100,00		% Capaian target sebesar 100%.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
					Ketertiban dan Keindahan)								
4	Meningkatkan kesetaraan gender	5	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan	1	Rasio KDRT	Menurun	0,004	0,025	0,025	-	50,00		Rasio KDRT masih jauh daeri target. Perlu upaya keras untuk mencapai target.
				2	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	Meningkat	12	21	21	-	100,00		Jumlah kasus kekerasan yang terjadi selalu diselesaikan melalui jalur Hukum, target akhir tercapai.
				3	Jumlah koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan	15	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	6,67		Jumlah sosilisasi masih sangat terbatas. Perlu melakukan sosialisasi yang kreatif melaui medsos, melibatkan milenial dan influencer.
				4	Persentase perempuan yang mendapatkan kesempatan diklat	35%	-	-	93,33%	-	NA		Target tidak diketahui, sehingga status capaian tidak dapat diketahui. Kedepan sebaiknya dihilangkan target yang kondisi data tidak tersedia.
				5	Partisipasi perempuan yang mengikuti musrembang desa dan kec.	50	20%	30%	40%	50%	100,00		Peran perempuan melalui PKK semakin meningkat dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa. Target tercapai 100%.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
		6	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	1	Jumlah KDRT	Menurun	1	21	21	-	50,00		Rasio KDRT masih jauh dari target. Perlu upaya keras untuk mencapai target.
		7	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam KB dan terciptanya keluarga sejahtera yang berkualitas	1	Rasio akseptor peserta KB Aktif	70-80	71,41	78,25	77,15	76,14	95,18		Target telah tercapai. Kinerja dipertahankan. Namun masih ada 23,86% PUS yang belum aktif ber KB. Perlu dilakukan sosialisasi lebih masiv lagi.
				2	Persentasi Cakupan peserta KB aktif	80-95	65,73%	71,68%	76,90%	99,71%	124,64		Target telah tercapai. % capaian 99,71%. Penggunaan KB semakin digalakkan.
				3	Rata-rata anak per keluarga	2-3 Anak	0,47	0,47	2	2	100,00		Peningkatan peserta KB aktif, berdampak pada tingkat kelahiran yang dapat dikendalikan. Target tercapai 100%.
5	Menumbuhkembangkan kreativitas minat dan bakat pemuda	8	Meningkatnya pemuda yang berprestasi dalam bidang olahraga	1	Jumlah klub Olahraga	Meningkat	250	250	250	250	80,00		Jumlah klub olahraga tidak mengalami peningkatan. Jumlah klub olahraga ditingkatkan hingga akhir periode. Penting untuk dilakukan pembinaan, agar klub olahraga dapat berprestasi.
				2	Jumlah gedung Olahraga	2	1	1	1	1	1	50,00	



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			4 Jumlah Organisasi Olahraga	Meningkat	44	47	42	45	85,00		Target akan tercapai. Kondistensi dalam pembinaan organisasi olahraga untuk mendorong prestasi yang diraih.
			5 Jumlah Kegiatan Olahraga	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100,00		% Capaian target sebesar 100%.
		9 Meningkatnya pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan	1 Jumlah Organisasi Pemuda	Meningkat	125	125	125	125	100,00		% Capaian target sebesar 100%. Pembinaan terhadap organisasi pemuda penting untuk ditingkatkan.
		10 Meningkatnya pemuda yang berpartisipasi dan berprestasi dalam bidang seni/budaya	1 Jumlah grup kesenian	Meningkat	44	47	42	45	100,00		% Capaian target sebesar 100%.
			2 Jumlah gedung kesenian	1	10	10	10	10	1000,00		% Capaian target sebesar 100%. Sebaiknya Ruang terbuka dapat juga menyediakan panggung kesenian, sehingga kegiatan kesenian tidak hanya dilakukan di gedung kesenian.
			3 Jumlah sanggar seni	Meningkat	2	2	2	2	75,00		Target akan tercapai. Kondistensi dalam pembinaan sanggar seni untuk mendorong prestasi yang diraih.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
					Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				4 Jumlah kegiatan seni	Meningkat	5	5	5	5	75,00		Target akan tercapai. Pergelaran seni ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan. Perlu juga mengikutikan pada kegiatan-kegiatan seni baik skala provinsi, nasional dan provinsi. Untuk itu penting pembinaan dilakukan kedepan.

Misi Ketujuh: Mengentaskan kemiskinan dari pinggiran.

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
					Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	1	Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin	1 Jumlah penduduk miskin	11-10	19.220,00	19.250,00	19.401,00	19.250,00	75		Penurunan jumlah penduduk miskin masih sangat rendah tiap Tahun. Capaian masih jauh dari target. Program penanggulangan kemiskinan tidak efektif. Perlu upaya keras untuk mencapai target.
				1 Persentase penduduk miskin	8%-10%	16,07	15,73	15,18	15,08	37,09		Persentase penduduk miskin menurun setiap Tahunnya, namun penurunan yang terjadi masih rendah. Hingga Tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 15,08%, masih jauh dari target RPJMD. Status capaian terhadap target RPJMD “perlu upaya keras”. Target sulit dicapai.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			2 Indeks kedalaman kemiskinan	2,4-2	2,28	2,57	1,76	2,9	12,08		Perkembangan fluktuatif. Hingga Tahun 2019 sebesar 2,9 masih cukup jauh dari target akhir. Bantuan sosial dapat dilakukan, ditengah pandemic kemungkinan meningkat. Program yang tepat harus dilakukan.
			3 Indeks keparahan kemiskinan	0,5-0,3	0,6	0,63	0,43	0,77	54		Indeks keparahan cenderung meningkat, tingkat keparahan kemiskinan memprihatinkan. Perlu langkah yang tepat.
			4 Jumlah lokasi transmigrasi yang disiapkan	1-2 Lokasi	1	1	0	0	100		Target tercapai.
			5 Bantuan sarana prasarana kegiatan usaha bagi transmigran yang mendapatkan bantuan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100		Capaian sejalan dengan target akhir RPJMD. % capaian 100%.
			6 Persentase penduduk miskin yang mendapatkan layanan kesehatan	Meningkat	16,07	15,73	15,53	15,34	100		Salah satu upaya mengatasi kemiskinan yang dilakukan dan berlaku nasional adalah layanan kesehatan gratis yang diberikan kepada masyarakat miskin.
			7 Jumlah para penyandang cacat dan trauma yang dibina	Meningkat		3	3		NA		Capaian indikator tidak dapat diukur. Sebaiknya kedepan target terkait dihilangkan.
			8 Jumlah panti asuhan lanjut usia/jompo yang	Meningkat	2	100%	2		NA		Capaian indikator tidak dapat diukur. Sebaiknya kedepan tidak dijadikan target misi, didorong



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
					ditangani							menjadi target OPD.	
				9	Nilai tukar petani (NTP)	100-110		100,27	104,12	104,12	104,12		Target tercapai. Capaian dipertahankan dan ditingkatkan. Bantuan dan perlindungan ke petanni perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagian besar TK bekerja di sektor pertanian.
				10	Jumlah anak terlantar yang dibina	25-50		1 Orang	100%	3 Orang	12		Perlu upaya keras mencapai taret. % capaian hanya 12%. Cukup sulit untuk dicapai.
				11	Persentasi balita 6-24 bulan yang mendapatkan ASI	30-40	100%	100%	100%	100%	333,33		
		2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	3,00-4,00		2,00	2,12	3,12	-22,00		Capaian Tahun 2019 telah melampaui target akhir 2021 RPJMD Kabupaten Morowali Utara. Namun pengangguran berpendidikan menengah keatas, cukup banyak, perlu fasilitas dari OPD terkait dalam pengembangan kompetensi dll.
				2	Jumlah penduduk yang bekerja	Meningkat		51,70	65,13	65,13	100		Target tercapai, % capaian sebesar 100%. Perlu dipikirkan dan difasilitasi penduduk yang belum bekerja, khusus pengangguran yang berpendidikan menengah keatas.
				3	Rasio penduduk yang bekerja	80	94,57	98	97,84	96,88	121,1		Target telah tercapai. Namun mayoritas masih bekerja pada sektor informal. Perlu ada kerjasama dengan DUDI untuk memprioritaskan TK Lokal.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
				4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85%	-	65,16	75,30	75,30	87,41		Target akan tercapai. TPAK 2019 yakni 75,30%.
		3	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP=100)	1	Nilai Tukar Petani (NTP)	105,56		100,27	104,12	104,12	104,12		Target tercapai. Capaian dipertahankan dan ditingkatkan. Bantuan dan perlindungan ke petanni perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagian besar TK bekerja di sektor pertanian.
				2	Persentase berfungsinya kelembagaan tani sebagai wahana pembelajaran dilama mengadopsi inovasi tehnologi pertanian, perikanan dan kehutanan dan tumbuhnya kerjasama dalam meningkatkan produksi dan pendapatan	100	100%	100%	100%	100%	100		Target tercapai. Penggunaan TTG dalam pertanian membantu meningkatkan produksi dan Nilai Tukar Petani. Penggunaan berdampak pada efisiensi dan peningkatkan pendapatan.
				3	Persentase kontak tani yang menggunakan ceyberth an E-petani untuk mengadopsi informasi tehnologi	100	100%	100%	100%	100%	100		Target telah tercapai. Kedepan perlu mendorong peran BUMDES dan Pemerintah Desa untuk mendampaingi petani dalam pemanfaatan teknologi, baik untuk produksi dan pemasaran.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target akhir	Status Capaian	Penjelasan
				Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
			1 Jumlah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar								
			Padi	5,92-6,22	4,36	4,36	4,36	4,36	73,65		Persentase capaian indikator cukup tinggi yakni 73,65%. Namun perlu upaya keras untuk mencapai target akhir RPJMD, mengingat produktivitas pertanian justru tumbuh negative setiap Tahunnya. Ketersediaan jaringan irigasi pada lahan pertanian sawah harus segera dikerjakan.
			Jagung	6,05-6,35	4,23	4,23	4,23	4,23	69,92		Persentase capaian indikator cukup tinggi yakni 69,92%.
			Kedelai	1,93-2,03	1,06	1,06	1,06	1,06	54,92		Produktivita kedelai menurun setiap Tahunnya dan semakin jauh dari target akhir RPJMD.
			Kacang Tanah	1,72-1,81	1,51	1,51	1,51	1,51	87,79		Persentase capaian indikator cukup tinggi yakni 87,79%.
			Kacang	1,11-1,17	0,88	0,88	0,88	0,88	79,28		Persentase capaian indikator cukup tinggi yakni 79,25%.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran		Indikator		Target	Capaian Tahun				% Capaian terhadap target Akhir	Status Capaian	Penjelasan
						Tahun Akhir 2021	2016	2017	2018	2019			
					Ubi Kayu	3,32 - 3,49	20,11	20,11	20,11	20,11	622,60		Dari keseluruhan tanamanpangan utama, hanya produksi ubi kayu yang telah mencapai target akhir periode RPJMD. Industri pengolahan terhadap tanaman perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah.
					Ubi Jalar	17,25-18,11	12,30	12,30	12,30	12,30	80,66		Persentase capaian indikator cukup tinggi yakni 80,66%.
2	Meningkatkan ketahanan pangan	4	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Jumlah cadangan pangan yang tersedia di lumbung pangan	35.000-37.000	-	-	-	-	NA		Data capaian tidak tersedia. Status capaian indikator terkait tidak dapat diketahui.
				2	Persentase desa yang memasuki tahap kemandirian pangan	100	100%	100%	100%	100%	100		Target tercapai. Namun masih terdapat beberapa Desa yang memiliki potensi pertanian pangan tang tinggi, namun infrastruktur penduduk tidak tersedia. Perlu diprioritaskan kedepan. Mengingat produksi semakin menurun.
				3	Persentase ketersediaan informasi pasar, harga dan akses pangan daerah dikecamatan	100	100%	100%	100%	100%	100		Target telah tercapai, % capaian sebesar 100%.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk satu periode mendatang. Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan program-program pembangunan daerah, maka diperlukan pengelolaan keuangan daerah secara tepat dan berkelanjutan

Pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya menggambarkan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan dalam



bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kondisi neraca daerah. Gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah yang akan disusun dalam bab ini selanjutnya digunakan untuk menentukan kerangka pendanaan yang meliputi pengidentifikasian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, alokasi belanja serta pengeluaran daerah yang lebih optimal dan sesuai kebutuhan terutama untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah lima tahun kedepan. Kerangka pendanaan juga mencakup potensi pembiayaan daerah jika terdapat defisit anggaran serta kondisi aset dan kewajiban daerah yang harus dipenuhi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan komprehensif tentang kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Morowali Utara, maka dilakukan analisis terhadap perkembangan pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam kurun Tahun 2015-2019 serta perkembangan tahun 2020.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan pusat yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada Daerah. Karenanya, atas perimbangan keuangan tersebut maka pendapatan daerah dapat digolongkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta



pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Selama periode 2015-2019 dan tahun 2020, realisasi pendapatan mengindikasikan tingkat efektivitas terhadap pencapaian rencana pendapatan masih cukup baik hampir mendekati realisasi 100 persen meskipun dalam kondisi perekonomian global yang berfluktuasi serta dan kebijakan nasional terkait dana perimbangan yang berubah-ubah (Tabel 3.1).

Tabel 3.1.
Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Rencana
Pendapatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara 2015-2019

Tahun	Rencana Pendapatan (Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Terhadap Rencana Pendapatan
2015	729,497,516,665.00	681,053,111,342.00	93.36
2016	869,765,981,216.00	869,147,172,888.00	99.93
2017	915,144,923,314.00	889,947,144,145.00	97.25
2018	1,004,625,627,200.00	989,137,928,966.00	98.46
2019	1,107,355,537,644.00	1,041,522,465,663.82	94.05
2020	1,120,772,923,182.00	1,020,924,861,346.63	91.09

Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-
2019 Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam
Angka 2021

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang sangat rendah dalam penyusun pendapatan daerah. Besaran proporsi rata-rata pendapatan asli daerah selama tiga tahun yaitu 2017-2019 hanya sebesar 4,53 persen. Meskipun demikian, nilai absolut pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya cenderung berfluktuasi. Pendapatan asli daerah mengalami penurunan pada tahun 2018, namun secara umum tumbuh dengan rata-rata sebesar 12,36 persen per tahun. Pertumbuhan PAD ini diakibatkan karena rata-rata pertumbuhan pendapatan pajak daerah dalam kurun 2017-2019 sebesar 4.20 persen, retribusi daerah sebesar 17.90 persen,



hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 10.34 persen serta lain-lain PAD yang sah sebesar 36.94 persen.

Tabel 3.2.
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Rencana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020

Tahun	Rencana Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	% Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Rencana Pendapatan
2015	22,661,705,495.00	20,000,000,000.00	88.25
2016	28,253,840,719.00	37,206,044,507.00	131.68
2017	67,692,312,818.98	54,607,359,267.72	80.67
2018	45,269,387,117.00	40,010,721,336.59	88.38
2019	48,371,664,117.00	46,834,234,593.82	96.82
2020	69,278,256,665.00	53,830,505,828.63	77.70

Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019 Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang tertinggi yaitu sekitar 82 persen dan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan selama 2017-2019 adalah sebesar 5.24 persen. Peningkatan tertinggi di komponen Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus dengan rata-rata tumbuh sebesar 13.46 persen dan 18.20 persen dalam kurun 2017-2019. Sementara Dana Alokasi Umum tumbuh sebesar 2.52 persen (lihat Tabel 3.3).



Tabel 3.3.
Persentase Realisasi Dana Perimbangan Terhadap
Rencana Dana Perimbangan Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015-2020

Tahun	Rencana Dana Perimbangan (Rupiah)	Realisasi Dana Perimbangan (Rupiah)	% Realisasi Dana Perimbangan Terhadap Rencana Dana Perimbangan
2015	600,614,420,661.00	596,496,168,211.00	99.31
2016	747,905,149,126.00	736,790,833,657.00	98.51
2017	718,866,878,000.00	709,105,746,760.00	98.64
2018	815,652,154,000.00	806,178,364,072.00	98.84
2019	909,740,907,000.00	852,854,630,806.00	93.75
2020	900,816,164,000.00	804,877,989,977.00	89.35

Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019 Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah juga didukung oleh komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan dapat mencakup: (i) hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; (ii). Dana darurat dari pemerintah pusat dalam bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD; (iii). Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; (iv). Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota; dan (v). Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah pada komponen ini paling besar berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sekitar 75 persen. Sementara untuk Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 15 persen. Meski terjadi penurunan pendapatan yang bersumber dari dana BOS, namun secara umum komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tumbuh dengan rata-rata sebesar 15.04 dengan tingkat realisasi terhadap rencana yang cukup tinggi (lihat Tabel 3.4).



Tabel 3.4.
Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Rencana Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020

Tahun	Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rupiah)	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rupiah)	% Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2015	106,221,390,509.00	64,556,943,131.00	60.78
2016	93,606,991,371.00	95,150,294,724.00	101.65
2017	128,585,732,495.00	126,234,038,118.00	98.17
2018	143,704,086,083.00	142,948,843,548.00	99.47
2019	149,242,966,527.00	141 833 600 264,00	95.04
2020	150,678,502,527.00	162 216 365 541,00	107.66

Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPS
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019 Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

Komposisi jenis pendapatan daerah dibandingkan total pendapatan daerah, sebagaimana pada Tabel 3.5, menunjukkan bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah kabupaten Morowali Utara hanya berkisar antara 4.85 persen. Komposisi terbesar bersumber dari pendapatan dana perimbangan, yaitu berkisar antara 81.34 persen, sedangkan komposisi pendapatan yang bersumber dari lain- lain pendapatan daerah yang sah berkisar antara 13.82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah pada Kabupaten Morowoli Utara dalam kategori rendah, sehingga pendanaan pelaksanaan dan aktivitas pembangunan daerah masih lebih sangat bertumpu pada pendanaan yang bersumber dari dana perimbangan.



Tabel 3.5
Perkembangan Pendapatan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 s/d Tahun 2020

No	Uraian	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	2018 (Rupiah)	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)	Rata-rata Pertumbuhan 2017-2019 (%)
1	PENDAPATAN	681,035,111,342.00	869,147,172,888.00	889,947,144,145.72	989,137,928,956.59	1,041,522,465,663.82	1,020,924,861,346.63	6.28
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20,000,000,000.00	37,206,044,507.00	54,607,359,267.72	40,010,721,336.59	46,834,234,593.82	53,830,505,828.63	12.36
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4,895,000,000.00	9,565,923,299.00	9,637,182,352.00	14,862,695,349.00	8,566,086,631.00	9,733,853,374.00	4.20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10,800,500,000.00	15,406,009,057.00	15,607,728,401.00	13,671,532,255.00	22,528,897,552.00	27,680,326,460.00	17.90
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	566,004,120.00	493,140,198.00	658,609,145.00	1,235,683,087.00	10.34
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,284,500,000.00	12,234,112,151.00	28,796,444,394.72	10,983,353,534.59	15,080,641,265.82	15,180,642,907.63	36.94
1.2	DANA PERIMBANGAN	596,496,168,211.00	736,790,833,657.00	709,105,746,760.00	806,178,364,072.00	852,854,630,806.00	804,877,989,977.00	5.24
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	57,255,409,211.00	30,320,567,555.00	38,132,592,400.00	39,967,194,111.00	43,882,006,525.00	42,869,399,439.00	13.46
1.2.2	Dana Alokasi Umum	499,809,149,000.00	548,263,034,000.00	547,360,397,000.00	558,773,483,000.00	583,567,690,000.00	539,257,727,000.00	2.12
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	39,431,610,000.00	158,207,232,102.00	123,612,757,360.00	207,437,686,961.00	225,404,934,281.00	222,750,863,538.00	18.20
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65,556,943,131.00	95,150,294,724.00	126,234,038,118.00	142,948,843,548.00	141,833,600,264.00	162,216,365,541.00	15.04
1.3.1	Pendapatan Hibah	7,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	10,750,000,000.00	7,730,605,000.00	18,961,800,000.00	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15,511,828,131.00	18,884,580,492.00	20,611,818,927.00	20,537,590,548.00	21,606,273,264.00	20,413,146,941.00	4.66
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	38,480,115,000.00	75,807,999,419.00	96,622,219,191.00	95,403,798,000.00	111,846,722,000.00	121,936,998,600.00	14.47
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,625,000,000.00	457,714,813.00	-	185,100,000.00	650,000,000.00	904,420,000.00	-
1.3.5	Pendapatan Lainnya	-	-	4,000,000,000.00	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Dana BOS	-	-	-	16,072,355,000.00	-	-	-

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019,
Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021



B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Wajib terdiri atas Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak terkait langsung dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pilihan merupakan urusan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan pendanaan Urusan yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan urusan pilihan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Selain itu, dalam rangka penentuan rencana kerja dan anggaran Belanja Daerah juga harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan data pada Tabel 3.6 di bawah menunjukkan bahwa secara umum realisasi belanja terhadap rencana belanja cukup tinggi diatas 90 persen. Berdasarkan analisis proporsi realisasi terhadap perencanaan. Rata-rata realisasi belanja langsung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja



tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengoptimalkan belanja bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.6.
Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap
Rencana Belanja Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

Tahun	Rencana Belanja (Rupiah)	Realisasi Belanja (Rupiah)	% Realisasi Belanja Terhadap Rencana Belanja
2015	764,016,916,121.00	687,053,111,342.00	89,92
2016	914,171,385,995.00	846,561,507,690.00	92,60
2017	976,108,606,681.00	937,077,581,668.00	96,00
2018	1,041,484,871,532.00	976,426,203,331.00	93,75
2019	1,119,001,382,107.00	1,050,111,394,746.90	93,84
2020	1,146,261,996,764.00	1,022,884,709,470.20	89,24

Sumber: Dinas Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019 Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Melalui analisis ini dapat terlihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah pada periode tahun 2015-2019 digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang.

Analisis pertumbuhan merupakan salah satu analisis lain dalam melihat kinerja belanja daerah selain menggunakan analisis efektivitas. Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara cenderung meningkat. Belanja daerah kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan dari periode Tahun 2017-2019 rata-rata pertumbuhan sebesar 7,49 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada belanja tidak langsung maupun tidak langsung, yaitu masing-masing sebesar 8,98 persen dan 6,24 persen. Untuk kelompok belanja langsung, peningkatan terbesar terjadi pada belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja tidak langsung, peningkatan terbesar terjadi pada belanja modal. Sementara belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,76 persen.

Terkait dengan komposisi masing-masing jenis belanja daerah dibandingkan total belanja daerah pada tahun 2017-2019, komposisi belanja terbesar adalah belanja langsung sekitar 55 persen,



sementara belanja tidak langsung sebesar 45 persen. Dari komposisi belanja tindak langsung, belanja pegawai yang berkisar antara 60-63 persen. Sementara untuk belanja langsung, komposisi terbesar disumbang oleh belanja modal diikuti belanja barang dan jasa.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup deficit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, selama tahun 2015-2019 tergambar dalam Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Persentase Realisasi Pembiayaan Daerah
terhadap Rencana Pembiayaan Daerah
Kabupaten Morowali Utara 2015-2020

Tahun	Rencana Pembiayaan (Rupiah)	Realisasi Pembiayaan (Rupiah)	% Realisasi Pembiayaan Terhadap Rencana Pembiayaan
2015	6.000.000.000,00	34.519.399.456,00	575,32
2016	14.326.807.450,00	44.405.404.779,00	309,95
2017	57.082.147.559,00	60.963.683.367,39	106,80
2018	36.859.244.332,00	3.737.617.021,11	10,14
2019	11.645.844.463,00	13.100.038.882,92	112,49
2020	-	-	-

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Morowali Utara 2015-2019; Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021



Tabel 3.8
Perkembangan Realisasi Belanja dan Pembiayaan APBD Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2015 s/d 2020

No	Uraian	2015 (Rupiah)	2016 (Rupiah)	2017 (Rupiah)	2018 (Rupiah)	2019 (Rupiah)	2020 (Rupiah)	Rata-rata Pertumbuhan 2017-2019 (%)
2	BELANJA	687,053,111,342.00	846,561,507,696.00	937,077,581,668.00	976,426,203,331.33	1,050,111,394,746.90	1,022,884,709,470.20	8,61
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	347,813,341,149.00	384,376,650,503.00	429,003,624,490.00	442,890,660,711.00	496,434,575,956.00	592,188,452,212.00	11,35
2.1.1	Belanja Pegawai	265,070,235,328.00	243,756,287,823.00	265,959,120,059.00	279,749,896,617.00	304,855,976,842.00	316,905,202,593.00	3,84
2.1.2	Belanja Hibah	17,200,000,000.00	1,538,500,000.00	2,263,350,000.00	2,433,850,000.00	6,030,943,000.00	58,164,007,000.00	195,16
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1,640,100,000.00	320,000,000.00	77,000,000.00	1,839,200,000.00	3,076,100,000.00	4,624,950,000.00	449,95
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	1,571,550,000.00	1,478,983,017.00	270,440,349.00	225,232,294.00	423,135,951.00	341,265,795.00	-7,16
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	56,331,455,821.00	134,829,351,663.00	158,841,487,082.00	156,940,867,800.00	179,890,716,163.00	171,051,028,470.00	33,13
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	4,000,000,000.00	2,453,528,000.000	1,592,227,000.00	1,701,614,000.00	2,157,704,000.00	41,101,998,354.00	12595,37
2.2	BELANJA LANGSUNG	341,239,770,195.00	462,184,857,193.00	508,073,957,178.00	533,535,542,620.33	553,676,818,790.90	430,696,257,258.20	6,39
2.2.1	Belanja Pegawai	31,519,122,750.00	34,789,971,192.00	47,008,044,231.00	46,864,565,561.00	42,615,252,606.00	41,973,664,960.00	6,92
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117,195,283,149.00	154,068,323,152.00	217,593,192,199.00	221,958,702,194.33	232,244,590,218.42	171,401,756,521.00	10,63
2.2.3	Belanja Modal	192,525,369,299.00	273,326,562,849.00	243,472,720,748.00	264,712,274,865.00	278,816,975,966.48	217,320,835,777.20	4,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.519.399.456,00)	(44.405.404.779,00)	(47,130,437,522.28)	12,711,725,625.26	(13.100.038.882,92)	(4.406.777.382,13)	-72,32
3	PEMBIAYAAN	34.519.399.456,00	44.405.404.779,00	61,934,967,363.39	5,474,511,220.66	13.100.038.882,92	4.406.777.382,13	9,98
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.213.738.855,00	48.228.632.343,00	67,593,181,996.39	14,893,991,220.66	18.186.236.845,92	4.406.777.382,13	-14,31
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40.213.738.855,00	48.228.632.343,00	67,593,181,996.39	14,893,991,220.66	18.186.236.845,92	4.406.777.382,13	-14,31
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.694.339.399,00	3.823.227.564,00	5,658,214,633.00	9,419,480,000.00	5.086.197.963,00	0,00	-12,88
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	2.000.000.000,00	2.749.700.000,00	3,500,000,000.00	5,100,000,000.00	5.086.197.963,00	0,00	2,04
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	3.694.339.399,00	1.073.527.564,00	2,158,214,633.00	4,319,480,000.00	0,00	0,00	6,05
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	14,804,529,841.11	18,186,236,845.92	0,00	0,00	-15,43

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara 2015-2019, Survey Statistik Keuangan Daerah, Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Neraca daerah sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, karena memberikan informasi kepada manajemen Pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, memberikan informasi kepada manajemen Pemerintah Daerah tentang fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) dan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara, maka disajikan data rata-rata pertumbuhan neraca daerah periode Tahun 2017-2019

Tabel 3.9
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Morowali Utara Tahun 2017-2019

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	18,54
1.1.	ASET LANCAR	(27,61)
1.1.1.	Kas	(44,95)
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00
1.1.3.	Piutang	(23,51)
1.1.4.	Beban dibayar dimuka	(100,00)
1.1.5.	Persediaan	6,76
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	72,45
1.2.1.	Investasi Non Permanen	0,00
1.2.2.	Investasi Permanen	72,45
1.3.	ASET TETAP	19,07
1.3.1.	Tanah	40,29
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	27,59
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	13,61
1.3.4.	Jalan, irigasi dan jaringan	18,73
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	23,04
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39,88
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	20,27
1.4.	DANA CADANGAN	0,00
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00
1.5.	ASET LAINNYA	182,05
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(15,28)
1.5.3.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	63,26
1.5.5.	Aset Lain-lain	193,68
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	18,54



Berdasarkan data pada Tabel 3.9 di atas, dimana posisi aset daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 18,54 persen selama periode Tahun 2017–2019. Hal tersebut disebabkan tingginya rata-rata pertumbuhan investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Meski, pertumbuhan aset lancar mengalami pertumbuhan negatif sebesar (-27,61) persen. Pada sisi kewajiban dan ekuitas Kabupaten Morowali Utara, juga terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 18,54 persen selama periode Tahun 2017–2019. Pada sisi kewajiban, pertumbuhan rata-ratanya sebesar 101,14 persen, sedangkan ekuitas Kabupaten Morowali Utara bertumbuh dengan rata-rata sebesar 18,22 persen.

3.1.2.1. Analisis Neraca Daerah

Selain itu, metode untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (berarti). Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan, termasuk untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Beberapa rasio keuangan yang relevan dengan aktivitas Pemerintah Daerah diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, seperti metode Current ratio dan Quick ratio. Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, seperti rasio total utang terhadap total aset dan rasio total utang terhadap ekuitas. Sedangkan rasio aktivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitas tertentu, seperti rata-rata umur piutang pendapatan. Adapun hasil analisis rasio keuangan Kabupaten Morowali Utara selama periode Tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 3.10 sebagai berikut.



Tabel 3.10.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2017-2019

No	Uraian	2017	2018	2019
1.	Rasio Cepat (<i>Current Ratio</i>)	5,48	121,94	0,99
2.	Rasio Lancar (<i>Quick Ratio</i>)	4,46	92,48	0,48
3.	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset	0,01	0,00	0,01
4.	Rasio Total Utang Terhadap Total Ekuitas	0,01	0,00	0,01
5.	Rata-Rata Umur Piutang Pendapatan	6,90	6,25	4,31

Rasio likuiditas menunjukkan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah sudah membuat anggaran kas, namun perlu ditunjang oleh analisis likuiditas, dimana untuk dapat memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah harus mempunyai alat-alat yang dapat digunakan untuk membayar yang berupa aktiva-aktiva lancar yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kewajiban yang harus diselesaikan.

Rasio lancar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar yang datanya diperoleh dari neraca. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun pemerintahan daerah. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, oleh karena itu kondisi keuangan daerah dapat dikatakan sehat apabila rasio lancarnya berada di atas 1 , atau dengan kata lain jumlah aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar.

Rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, dimana indikator ini mengindikasikan pemerintah daerah dapat membayarkan utangnya dengan cepat. Rasio *quick* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (*inventory*), dengan kata lain dalam perhitungan rasio ini mengabaikan nilai sediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan. Standar nilai untuk rasio *quick* adalah sebesar >1, semakin tinggi besaran nilai rasio ini maka semakin tinggi likuiditasnya, namun tidak boleh terlalu besar karena



menunjukkan besarnya aset yang tidak tersalurkan sehingga terjadi kelebihan likuiditas.

Rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari rasio utang terhadap modal dan rasio utang terhadap aset modal.

Rasio utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Indikator rasio utang terhadap modal merupakan perbandingan antara total utang dengan jumlah ekuitas dana. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemerintah daerah kemungkinan berada pada fase kelebihan utang (*over leverage*), sehingga perlu mencari upaya untuk mengurangi dan/atau melunasi utang tersebut. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang yang semakin besar, atau dengan kata lain kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap modal yang dicapai ini kurang dari satu.

Rasio utang terhadap aset modal ini digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal diproksikan dengan aset tetap. Rasio ini didapatkan dari perbandingan antara total utang dengan total aset modal. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila rasio utang terhadap total aset modal yang dicapai kurang dari atau sama dengan 0,45.

Merujuk data pada Tabel 3.10 di atas, bahwa rasio solvabilitas Kabupaten Morowali Utara selama periode Tahun 2017-2019 menggunakan metode rasio total utang terhadap total aset, maupun metode rasio total utang terhadap total ekuitas, nilainya masih jauh di bawah angka 0,5 yaitu berkisar antara 0,00–0,01. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan aset Kabupaten Morowali Utara mayoritas dibiayai oleh ekuitas (modalnya sendiri). Selain itu, juga dapat diartikan Kabupaten Morowali Utara telah memiliki kemampuan yang besar untuk membayar seluruh utangnya. Namun, jika berdasarkan rasio likuiditas yang nilainya di bawah angka 1 (baik menggunakan rasio cepat dan rasio lancar), khususnya pada Tahun 2019, maka dapat diartikan bahwa pada Tahun 2019 tersebut, terdapat permasalahan likuiditas di Kabupaten Morowali Utara. Dimana hal ini dapat berdampak pada ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk membayar utang-utang jangka pendek. Sementara itu, jika



berdasarkan rasio umur piutang yang menunjukkan nilai yang semakin kecil yaitu sebesar 4,31, maka dapat dikatakan bahwa penagihan piutang pendapatan semakin efektif dilakukan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menjaga *sustainable budget* (keberlanjutan anggaran) di dalam anggaran periode mendatang, dimana penganggaran yang dilakukan dalam belanja daerah akan dijamin keberlangsungan pembiayaannya dan diperbaiki strukturnya agar lebih efisien, produktif, dan resiko yang dihadapi tetap terkendali, serta untuk mendorong kualitas belanja yang dilakukan agar lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Efisiensi alokasi diartikan bahwa belanja daerah harus sesuai kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor prioritas, dan dilakukan sesuai dengan fungsi pokok (*money follow function*), serta menekankan akurasi pengalokasian. Secara sederhana, analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mengetahui gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya dasar bahwa keuangan daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan jaminan sosial. Analisis kebijakan pengelolaan keuangan kemudian dilakukan dengan analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis sumber penutup defisit riil, analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.



3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Morowali Utara, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan.

Pada realisasi belanja daerah, terdapat kelompok belanja yang khusus diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan aparatur, baik untuk membiayai pembayaran gaji tunjangan, tambahan penghasilan, insentif, honorarium, lembur, pendidikan, kursus, biaya operasional kantor maupun untuk pembelian fasilitas kerja aparatur. Jika dibandingkan antara kelompok belanja langsung dengan belanja tidak langsung tersebut di atas, dapat dilihat bahwa meski belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari periode Tahun 2017-2019, namun belanja langsung tidak demikian, karena pada Tahun 2019, terjadi penurunan realisasi belanja langsung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aparatur. Penurunan realisasi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi belanja untuk aparatur, khususnya pada tahun 2019.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat efisiensi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Morowali Utara, maka perlu dilakukan perbandingan antara proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah (akumulasi dari total belanja daerah ditambah dengan pembiayaan pengeluaran) sebagaimana terdapat pada Tabel 3.11 sebagai berikut.

Tabel 3.11
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019

No	Tahun Anggaran	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Rasio (%)
1.	2017	496,054,323,329.00	942,735,796,301.00	52.62
2.	2018	519,245,274,672.00	985,845,683,331.33	52.67
3.	2019	538,682,568,076.05	1,071,229,548,399.81	50.29



Berdasarkan data pada Tabel 3.11 di atas, menunjukkan bahwa total pengeluaran daerah maupun total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan selama periode Tahun 2017-2019. Namun demikian, dapat terlihat bahwa terjadi penurunan persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah, dari sebesar 52,62 persen pada Tahun 2017 turun menjadi hanya sebesar 50,29 persen pada Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mampu melakukan peningkatan efisiensi belanja daerah, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan aparatur daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah diantaranya bersumber dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diantaranya dapat digunakan untuk: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa analisis pembiayaan adalah analisis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah ini dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil anggaran, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, dan analisis proyeksi pembiayaan daerah.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Tujuan utama pembiayaan adalah untuk menutup defisit atau memanfaatkan seefektif mungkin surplus anggaran, sehingga untuk menentukan nilai defisit riil dilakukan dengan cara mengurangi



pendapatan daerah dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Analisis sumber penutup defisit riil dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran pemerintah daerah. Analisis sumber penutup defisit ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai defisit riil anggaran, yang kemudian dilihat ada atau tidaknya penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil anggaran tersebut, sehingga akan diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran. Adapun gambaran tentang penutup defisit riil anggaran Kabupaten Morowali Utara tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 3.12 sebagai berikut.

Tabel 3.12
Analisis Defisit Riil Anggaran Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	889.947.144.145,72	989.137.928.956,59	1.057.111.163.817,82
2.	Dikurangi realisasi:			
3.	Belanja Daerah	(937.077.581.668,00)	976.426.203.331,33)	(1.066.143.350.436,81)
4.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	(5.658.214.633,00)	(9.419.480.000,00)	(5.086.197.963,00)
	Defisit Riil	(52.788.652.155,28)	3.292.245.625,26	(14.118.384.581,99)

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Morowali Utara mengalami fluktuatif selama tahun 2017-2019. Pada tahun 2018 defisit riil anggaran menunjukkan angka yang positif sebesar Rp. 3.292.245.625,26, sedangkan pada tahun 2017 dan 2019, defisit riil anggaran negatif masing-masing sebesar Rp.- 52.788.652.155,28, dan Rp.- 14.118.384.581,99.

B. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran anggara (belanja) selama satu periode anggaran. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,



penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga disebutkan bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa yang dimaksudkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran pada periode tahun sebelumnya, sementara itu pada poin ini akan dibahas mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan. SiLPA merupakan selisih antara sulus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto di tahun berkenaan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, analisis SiLPA bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Komposisi penutup defisit riil terdapat pada Tabel 3.13 sebagai berikut.

Merujuk data pada Tabel 3.13 di bawah, bahwa defisit riil anggaran Kabupaten Morowali Utara selama periode Tahun 2017-2019 maka ditutup seluruhnya dengan menggunakan SiLPA, khususnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2019, sisa dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya tersebut menjadi SiLPA tahun berkenaan (berjalan), yaitu masing-masing sebesar 28,04 persen untuk Tahun 2017 dan sebesar 31,21 persen untuk Tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2018, karena defisit riilnya surplus maka setelah ditambahkan dengan SiLPA tahun anggaran



sebelumnya menyebabkan jumlah jumlah SiLPA tahun anggaran berkenaan menjadi sebesar 522,40 persen dari defisit riil.

Tabel 3.13
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2019

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (%)		
		2017	2018	2019
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	(128,04)	452,40	(131,21)
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah bahwa SiLPA bersumber dari: (i). Pelampauan penerimaan PAD; (ii). Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; (iii). Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; (iv). Pelampauan penerimaan Pembiayaan; (v). penghematan belanja; (vi). kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau (vii). sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Adapun gambaran sumber SiLPA Kabupaten Morowali Utara selama periode Tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 3.14 di bawah. Dimana, ditunjukkan bahwa pada Tahun 2017 dan Tahun 2018, SiLPA Kabupaten Morowali Utara hanya bersumber dari sisa penghematan belanja dan adanya kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan. Sedangkan pada Tahun 2019, selain bersumber dari kedua hal tersebut, SiLPA Tahun 2019 juga bersumber dari adanya pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2.223.200.491,00. Selain itu juga ditunjukkan rata-rata pertumbuhan dari masing-masing jenis sumber SiLPA pada periode Tahun 2017-2019. Hasilnya menunjukkan bahwa sisa penghematan belanja mengalami pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30,72 persen, yang mana kondisi ini dapat diartikan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan efektivitas pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Kabupaten Morowali Utara. Data realisasi Sisa



Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Morowalii Utara periode Tahun 2017-2019 terdapat pada Tabel 3.14 sebagai berikut.



Tabel 3.14
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 s/d Tahun 2019

No	Uraian	2017		2018		2019		Rata-rata pertumbuhan (%)
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	14.804.529.841,11	100,00	18.186.236.845,92	100,00	4.406.777.382,13	100,00	(26,46)
1.	Pelampauan Penerimaan PAD	(13.084.953.551,26)	(88,38)	(29.257.014.150,41)	(160,87)	(14.770.593.532,18)	(335,18)	37,04
2.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(9.761.131.240,00)	(65,93)	(9.554.788.928,00)	(52,54)	(49.531.040.245,00)	(1.123,97)	208,14
3.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(2.351.694.377,00)	(15,88)	(407.525.535,00)	(2,24)	2.223.200.491,00	50,45	(364,10)
4.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	39.031.025.013,37	263,64	55.668.671.259,78	306,10	66.146.285.550,11	1.501,01	30,72
5.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	6.432.556.759,05	43,45	315.338.228,00	1,73	15.979.241.474,20	362,61	2.436,12
6.	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	



3.3. Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi kepala daerah serta target pembangunan daerah.

Perhitungan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Morowali Utara berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom baru, pembangunan di Kabupaten Morowali Utara masih dilakukan secara masif di berbagai bidang sehingga memerlukan dukungan kemampuan penganggaran daerah dan kerjasama investasi.

Dalam lima tahun mendatang (2021-2026), proyeksi APBD Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan perkembangan penerimaan daerah dan belanja daerah selama lima tahun ke belakang (2015-2020). Dari segi penerimaan daerah, proyeksi disusun dengan memperhatikan kebijakan penganggaran dan asumsi kecenderungan pertumbuhan ekonomi makro daerah terutama perkembangan nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah disusun berdasarkan pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan prioritas daerah. Sementara, pembiayaan daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan badan usaha, dan perluasan kerjasama dan kemitraan investasi.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama selain belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama, seperti belanja untuk urusan wajib yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar serta belanja untuk urusan pilihan, yang sebagian besarnya merupakan kelompok belanja tidak langsung. Untuk mendapatkan gambaran terkait kerangka pendanaan untuk periode Tahun 2021-2026 di Kabupaten Morowali Utara maka diperlukan perhitungan terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang didasarkan pada proyeksi APBD 2021-2026.

Seiring dengan ditetapkannya Pandemi *Covid-19* sebagai bencana non alam nasional pada tahun 2020, maka arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan tema



“Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi”, dengan uraian sebagai berikut:

(1) Reformasi Pendapatan

Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;

(2) Reformasi Belanja

Reformasi kebijakan belanja antara lain:

- a. Pendidikan: peningkatan kualitas SDM, ICT Litbang dan infrastruktur pendidikan menuju industri 4.0;
- b. Kesehatan: pemulihan dan penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;
- c. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mendorong Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan, pendidikan;
- d. Fokus program prioritas, berorientasi hasil, efisiensi dan antisipatif.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 dan seterusnya perlu melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan terkait dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Covid-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2021-2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- (2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, termasuk visi, misi, tujuan dan program strategis daerah;
- (4) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



3.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan secara bertahap meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peningkatan penerimaan daerah pada PAD diharapkan akan semakin terus meningkat dengan menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaannya yang potensial untuk memperbesar keuangan daerah. Peningkatan penerimaan daerah tersebut juga memperhitungkan perubahan besaran penerimaan daerah yang dipengaruhi oleh besaran dana perimbangan yang merupakan kewenangan pusat, dan sumber-sumber pendapatan daerah yang berubah karena adanya perubahan kebijakan pajak dan retribusi.

Selain itu, alokasi belanja daerah yang mendukung masifnya pembangunan diharapkan akan mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Kegiatan ekonomi yang semakin maju berdampak positif pada pendapatan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah diproyeksikan semakin meningkat. Sementara itu, rencana belanja daerah diproyeksikan dengan menggunakan tren proporsi belanja pada lima tahun terakhir. Belanja daerah di Kabupaten Morowali Utara juga diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya seiring dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan kesenjangan wilayah. Begitu pula dengan pembiayaan netto yang besarnya direncanakan dengan tren meningkat yang didasarkan pada pembiayaan netto dalam lima tahun terakhir.

Belanja daerah diproyeksikan meningkat dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara, dimana untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi dan dana yang besar pula. Beberapa program pembangunan yang diupayakan untuk dilakukan percepatan diantaranya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, baik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, lapangan terbang, serta proyek infrastruktur lainnya. Selanjutnya, dialokasikan pula untuk pembangunan infrastruktur pendukung bidang sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Selain untuk membangun infrastruktur fisik, belanja daerah tersebut digunakan pula untuk penanganan kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara. Selanjutnya, untuk dapat mencapai pemerataan pendapatan masyarakat perdesaan maka diperlukan biaya yang lebih tinggi, salah satunya untuk meningkatkan



anggaran subsidi ongkos angkut baik untuk angkutan orang maupun barang. Hal tersebut bertujuan untuk dapat pemeratakan hasil pembangunan sampai ke perdesaan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, perkiraan kebutuhan anggaran selama lima (5) tahun disusun dengan mengacu pada pendekatan penganggaran jangka menengah. Pendekatan penganggaran jangka menengah ini diharapkan mendorong perencanaan berbasis kinerja, memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah dan swasta, serta memberikan kepastian dan kejelasan pola belanja dan investasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama lima tahun ke depan. Dengan pendekatan penganggaran jangka menengah tersebut, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan menyusun program dan kegiatan yang tercantum secara lebih cermat, akurat dan berbasis kinerja.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Morowali Utara selama periode tahun 2021-2026 diarahkan pada hal-hal berikut.

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan perpajakan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara



- paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah seperti gedung, asrama, aula dan asset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan asset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus bagi percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. Mendorong perubahan perhitungan Dana Alokasi Umum.
- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai asset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan meliputi :
- a. Potensi *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang ditujukan untuk mendukung pembangunan daerah yang bersifat ekonomi, sosial dan



lingkungan terhadap masyarakat setempat. Beberapa potensi bentuk CSR antara lain : (1) pemberian bantuan sosial, (2) Aktivitas bakti sosial; (3) pemberdayaan masyarakat; (4) penyelenggaraan pendidikan; (5) pembangunan fasilitas public; (6) rehabilitasi alam.

- b. Pinjaman daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman ini dapat digunakan untuk membangun dan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap infrastruktur jalan dan jembatan dengan nilai total sebesar Rp 135.216.175.000. Selain itu pinjaman ini juga akan melakukan rehabilitasi terhadap infrastruktur kesehatan di Morowali Utara mencakup 22 puskesmas pembantu, 2 pos kesehatan desa, 1 rumah sakit umum daerah termasuk 25 dokumen kajian lingkungan dengan nilai total sebesar Rp 64.783.825.000. Kehadiran infrastruktur jalan dan kesehatan yang layak di Kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi dalam agenda pemulihan ekonomi nasional. Secara khusus, pasca konstruksi dan rehabilitasi infrastruktur jalan, diharapkan dapat menurunkan waktu tempuh pengangkutan, sehingga dapat menurunkan ongkos angkut komoditas dan meningkatkan daya saing harga komoditas pertanian dan perikanan. Melalui infrastruktur kesehatan yang layak di Kabupaten Morowali Utara diharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin prima apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 diperkirakan akan terus meningkat. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah; serta kenaikan daan perimbangan. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diperkirakan akan meningkat.

Sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah diperkirakan akan meningkat. Sementara, sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tetap masih tinggi. Dengan kata lain, dana perimbangan masih menjadi sumber utama bagi pendapatan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan daerah diarahkan agar mendorong percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya perkembangan ekonomi yang semakin cepat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha dan pada akhirnya akan memberikan pendapatan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah.



Berdasarkan atas asumsi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2025 diperkirakan akan terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Morowali Utara diperkirakan sekitar 4,00 persen pertahun sehingga akan meningkat dari Rp 1,03 triliun pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 1,26 triliun pada tahun 2026.



Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	1,032,677,095,527.00	1,073,984,179,348.08	1,116,943,546,522.00	1,161,621,288,382.88	1,208,086,139,918.20	1,256,409,585,514.93
I. Pendapatan Asli Daerah	87,148,500,000.00	90,634,440,000.00	94,259,817,600.00	98,030,210,304.00	101,951,418,716.16	106,029,475,464.81
1, Pendapatan Pajak Daerah	41,656,743,345.00	43,323,013,078.80	45,055,933,601.95	46,858,170,946.03	48,732,497,783.87	50,681,797,695.22
2, Pendapatan Retribusi Daerah	27,958,500,000.00	29,076,840,000.00	30,239,913,600.00	31,449,510,144.00	32,707,490,549.76	34,015,790,171.75
3, Pendapatan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	1,000,000,000.00	1,040,000,000.00	1,081,600,000.00	1,124,864,000.00	1,169,858,560.00	1,216,652,902.40
4, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,533,256,655.00	17,194,586,921.20	17,882,370,398.05	18,597,665,213.97	19,341,571,822.53	20,115,234,695.43
II, Pendapatan Transfer	929,879,393,527.00	967,074,569,268.08	1,005,757,552,038.80	1,045,987,854,120.36	1,087,827,368,285.17	1,131,340,463,016.58
1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-Daerah Perimbangan	910,344,949,000.00	946,758,746,960.00	984,629,096,838.40	1,024,014,260,711.94	1,064,974,831,140.41	1,107,573,824,386.03
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	19,534,444,527.00	20,315,822,308.08	21,128,455,200.40	21,973,593,408.42	22,852,537,144.76	23,766,638,630.55
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	15,649,202,000.00	16,275,170,080	16,926,176,883.20	17,603,223,958.53	18,307,352,916.87	19,039,647,033.54
(1) Pendapatan Hibah	15,649,202,000.00	16,275,170,080	16,926,176,883.20	17,603,223,958.53	18,307,352,916.87	19,039,647,033.54

Sumber: Hasil Analisis 2021



3.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan melakukan perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan dengan berbagai program unggulan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Mendukung pelaksanaan program unggulan sebagai prioritas daerah yang sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 dan dilaksanakan dalam Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah;
- (2) Mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat dan daerah;
- (3) Mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan dan kecamatan antara lain melalui perluasan jangkauan dan akses pelayanan dasar, pengembangan ekonomi dan penyediaan subsidi ongkos angkut baik angkutan orang maupun barang untuk mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan;
- (4) Mempercepat pembangunan infrastruktur secara menyeluruh baik yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, lapangan terbang dan proyek infrastruktur lainnya; serta pembangunan infrastruktur pendukung bidang sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya.
- (5) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten sehingga setiap belanja yang dilakukan seluruh perangkat daerah harus dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Oleh sebab itu, pelaksanaan program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus mampu menghasilkan keluaran, hasil dan dampak positif dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- (6) Mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang teadur sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 2021-2026.



Strategi ini dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan;

- (7) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, terukur, masuk akal, dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata;
- (8) Memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam pelaksanaan berbagai urusan, program dan kegiatan pembangunan melalui pendelegasian berbagai urusan, program dan kegiatan pembangunan dari perangkat daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, dan kecamatan; peningkatan jumlah dan kapasitas aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan kecamatan; penyiapan tenaga pendamping pembangunan desa dan kecamatan, baik dari perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kebijakan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2021-2026 mengutamakan pada pencapaian hasil program prioritas daerah melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut.

- (1) Meneruskan dan mempertajam melaksanakan program pembangunan periode sebelumnya yang belum tuntas;
- (2) Melaksanakan program unggulan sesuai dengan prioritas daerah;
- (3) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diterapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, peningkatan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penyebaran tenaga pendidik;
- (5) Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang baik, cepat, bermutu, dan terjangkau melalui



program berobat gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, dan pelaksanaan jaminan sosial;

- (6) Mengoptimalkan belanja modal yang dapat memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan khususnya yang berkaitan dengan prasarana dasar bagi masyarakat secara umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, sarana transportasi dan lainnya, termasuk dengan keberpihakan terhadap kemiskinan khusus (budaya/kultur) terkait dengan Kawasan Adat Tepencil;
- (7) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan, bantuan sosial dan belanja hibah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Meningkatkan efektivitas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang diberikan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah;
- (9) Meningkatkan sinergi anggaran melalui dana sharing antara APBD Kabupaten Morowali Utara, APBD Provinsi dan APBN.
- (10) Mengembangkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lebih efektif dan efisien terutama kegiatan yang lebih dari 1 tahun (*multiyears*) yang berbasis kinerja dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku.

Kebijakan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2021-2026 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Mendorong inovasi, efektivitas dan efisiensi berbagai program dan kegiatan organisasi perangkat daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah dan peningkatan mutu pelayanan umum dan administrasi pemerintahan;
- (2) Mengoptimalkan pelayanan umum dan administrasi pemerintahan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan kesesuaian antara masukan dan daya dukung setiap unit kerja, antara keluaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat, serta antara dampak dan nilai tambah bagi kemajuan daerah;
- (3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dengan kriteria kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja,



tidak terjadi tumpang tindih, dan dapat mendorong keteaduan tindakan antarunit.

Merujuk pada data Tabel 3.16 di bawah, untuk belanja daerah, Dengan asumsi terdapat rata-rata pertumbuhan sebesar 4,00 persen pertahun, belanja daerah Kabupaten Morowali Utara diperkirakan akan meningkat dari Rp1,03 Trilyun pada tahun 2021 menjadi Rp1,25 trilyun pada tahun 2026. Sementara itu, seluruh surplus yang terjadi setiap tahun akan dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan, sehingga SILPA diasumsikan sebesar Rp.0,00 setiap tahun.



Tabel 3.16
Perkiraan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1,027,677,095,527.00	1,068,784,179,348.08	1,111,535,546,522.00	1,155,996,968,382.88	1,202,236,847,118.20	1,250,326,321,002.93
I. Belanja Tidak Langsung	561,127,919,054.73	583,573,035,815.92	606,916,957,249.60	631,192,595,539.58	656,440,229,361.16	682,697,838,535.61
1. Belanja Pegawai	348,712,433,055.73	362,660,930,377.96	377,167,367,593.08	392,254,062,296.80	407,944,224,788.67	424,261,993,780.22
2. Belanja Hibah	6,311,795,603.92	6,564,267,428.07	6,826,838,125.19	7,099,911,650.20	7,383,908,116.21	7,679,264,440.86
3. Bantuan Sosial	4,392,873,679.00	4,568,588,626.16	4,751,332,171.21	4,941,385,458.05	5,139,040,876.38	5,344,602,511.44
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	442,840,802.07	460,554,434.16	478,976,611.52	498,135,675.98	518,061,103.02	538,783,547.14
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	188,267,975,914.01	195,798,694,950.57	203,630,642,748.60	211,775,868,458.54	220,246,903,196.88	229,056,779,324.76
6. Belanja Tidak Terduga	13,000,000,000.00	13,520,000,000.00	14,060,800,000.00	14,623,232,000.00	15,208,161,280.00	15,816,414,931.19
II. Belanja Langsung	466,549,176,472.27	485,211,143,531.16	504,619,589,272.41	524,804,372,843.31	545,796,547,757.04	567,628,409,667.32
1. Belanja Pegawai	50,729,071,017.27	52,758,233,857.96	54,868,563,212.28	57,063,305,740.77	59,345,837,970.40	61,719,671,489.22
2. Belanja Barang dan Jasa	265,631,444,934.00	276,256,702,731.36	287,306,970,840.61	298,799,249,674.24	310,751,219,661.21	323,181,268,447.66
3. Belanja Modal	150,188,660,521.00	156,196,206,941.84	162,144,055,19.51	168,941,817,428.29	175,699,490,125.43	182,727,469,730.45

Sumber: Hasil Analisis 2021



Dengan kebijakan belanja daerah tersebut, dalam periode 2021-2026 total belanja daerah meningkat rata-rata 4 persen pertahun, belanja langsung sekitar 4 persen pertahun, dan belanja tidak langsung sekitar 4 persen. Struktur belanja daerah Kabupaten Morowali Utara dalam lima tahun akan semakin condong pada belanja langsung. Persentase belanja langsung terhadap total belanja daerah akan meningkat. anggaran daerah akan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sementara, belanja tidak langsung diperkirakan akan menurun.

Perubahan struktur belanja merupakan upaya mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan partisipatif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Selain itu, perubahan struktur belanja daerah tersebut merupakan bagian dari upaya dan tekad yang kuat dan bulat Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah lebih beihak kepada masyarakat.

3.3.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara teadur dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja;



- b. Mengembangkan skema kerjasama pemerintah dan swasta untuk membiayai program dan kegiatan prioritas daerah terutama pembangunan infrastruktur publik dan kegiatan strategis lainnya.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan;
- b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran;
- c. Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi sulus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan Dana Masyarakat dan Mitra Pihak Ketiga

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan terus mengoptimalkan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga untuk mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Kebijakan pengelolaan dana masyarakat dan mitra pihak ketiga Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 diarahkan untuk membangun kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Kebijakan peningkatan investasi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menyederhanakan proses perizinan;
- b. Melakukan harmonisasi peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Morowali Utara;



- c. Mengelola kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati bersama;
- d. Meningkatkan kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
- e. Mendorong kemitraan dan kerjasama investasi regional, nasional dan internasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kegiatan yang melibatkan peran masyarakat luas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; pariwisata serta industri pertambangan;
- f. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pungutan, dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat;
- g. Mengembangkan promosi secara aktif melalui penguatan jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka dilakukan proyeksi terhadap kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Dalam menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, proyeksi pendapatan daerah akan dikurangkan dengan belanja periodik yang wajib dan mengikat yang merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya, termasuk untuk bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang keseluruhannya termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung.

Selain belanja tidak langsung, untuk mendapatkan nilai kapasitas riil, proyeksi Pendapatan daerah juga perlu dikurangkan dengan rencana pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga dana kapasitas riil dapat menggambarkan dana riil yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2021-2025. Adapun gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Morowali Utara yang diproyeksikan pada periode tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.17 sebagai berikut.



Tabel 3.17
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021 s/d Tahun 2026

No.	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	1,032,677,095,527.00	1,073,984,179,348.08	1,116,943,546,522.00	1,161,621,288,382.88	1,208,086,139,918.20	1,256,409,585,514.93
2.	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	-	-
	Total Penerimaan	1,032,677,095,527.00	1,073,984,179,348.08	1,116,943,546,522.00	1,161,621,288,382.88	1,208,086,139,918.20	1,256,409,585,514.93
	Dikurangi						
1.	Belanja Tidak Langsung	(561,127,919,054.73)	(583,573,035,816.92)	(606,915,957,249.60)	(631,192,595,539.58)	(656,440,299,361.16)	(682,697,838,535.61)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	(5,000,000,000.00)	(5,200,000,000.00)	(5,408,000,000.00)	(5,624,320,000.00)	(5,849,292,800.00)	(6,083,264,512.00)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	466,549,176,472.27	485,211,143,531.16	504,619,589,272.41	524,804,372,843.31	545,796,547,757.04	567,628,482,467.32



Kapasitas riil keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2025 diproyeksikan meningkat setiap tahun, dari sebesar Rp 466,549,176,472.27 pada tahun 2021, diproyeksikan meningkat menjadi Rp 567,628,482,467.32 pada tahun 2026. Nilai kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diproyeksikan tersebut, selanjutnya menjadi dasar untuk mengalokasikan dana dalam rangka mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah, yang mana prioritas tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu prioritas I dan prioritas II.

Prioritas I merupakan program dan kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan wajib mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah. Begitupula dalam rangka peningkatan pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji. Sedangkan prioritas II merupakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi serta unggulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan pada asumsi pembagian 60 persen untuk pendanaan prioritas I dan 40 persen untuk pendanaan prioritas II maka gambaran rencana pendanaan prioritas I dan II pada Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 3.18 sebagai berikut.



Tabel 3.18
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s/d Tahun 2026

No	Uraian	Proyeksi (Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	466,549,176,472.27	485,211,143,531.16	504,619,589,272.41	524,804,372,843.31	545,796,547,757.04	567,628,482,467.32
		-	-	-	-	-	
2.	Prioritas I	279,929,505,883.36	291,126,686,118.70	302,771,753,563.45	314,882,623,705.98	327,477,928,654.22	340,577,089,480.39
3.	Prioritas II	186,619,670,588.91	194,084,457,412.47	201,847,835,708.96	209,921,749,137.32	218,318,619,102.82	227,051,392,986.93



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab IV ini menjelaskan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Penjelasan isu strategis daerah didasarkan pada analisis hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan daerah dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025; hasil telaah terhadap RPJMD Kabupaten Sulawesi Tengah 2016-2021; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, serta lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1. Permasalahan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Permasalahan pokok pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan ditetapkan. Permasalahan pembangunan juga dimaknai sebagai gambaran kesenjangan antara harapan pembangunan dan realitas pembangunan tersebut. Dasar identifikasi permasalahan pembangunan daerah adalah tujuan pembangunan daerah yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 258 Ayat 1, yaitu: (1) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; (2) kesempatan kerja, (3) lapangan berusaha, (4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public, dan (5) daya saing daerah.

Uraian berikut berisi permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara untuk empat atau lima tahun mendatang. Permasalahan yang disampaikan merupakan butir-butir hasil analisis pada Bab II, sedangkan isu strategis merupakan pengerucutan berbagai permasalahan yang dianggap penting menjadi beberapa butir pokok yang dianggap strategis untuk dijadikan dasar program pembangunan yang akan datang.



Konsep yang digunakan dalam perumusan ini memberi batasan bahwa permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan harapan seperti yang direncanakan. Dalam hal ini beberapa dokumen rencana dijadikan acuan antara lain RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025, terutama jabaran sasaran dan arah kebijakan prioritas pembangunan tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Morowali Utara, dan beberapa dokumen lainnya. Berdasar pada kondisi yang ada pada saat ini dan dinamika perkembangannya dalam beberapa tahun sebelumnya seperti diuraikan dalam Bab II dan III, maka dapat dirumuskan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara. Secara umum permasalahan disimpulkan dari pencermatan trend yang ada; untuk unsur bersifat baik yang cenderung menurun atau unsur tidak baik yang cenderung meningkat. Keduanya merupakan hal yang diangkat sebagai permasalahan. Demikian pula kondisi yang tidak sesuai atau di bawah standar adalah permasalahan. Kemudian kondisi yang jauh dari aspirasi yang ada, termasuk aspirasi resmi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, merupakan permasalahan pembangunan.

Permasalahan terbagi menurut aspek yakni: (1) Aspek Kesejahteraan (2) Aspek Lingkungan Hidup (3) Aspek Pelayanan Umum, serta (4) Permasalahan Spesifik Kabupaten Morowali Utara.

4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan di suatu wilayah. Secara sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan ditempatkan menjadi tujuan pertama dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni tanpa kemiskinan – mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Kemiskinan selalu menjadi fokus intervensi pemerintah daerah dan menjadi salah satu prioritas dalam menjalankan pembangunan.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara masih sangat tinggi, yaitu sebesar 15,08 persen. Fakta dan Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara antara lain adalah tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara yang berada di atas Rata- Rata Kabupaten dan Nasional.

Garis kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara dari Tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019



mencapai Rp441.554. Hal ini disebabkan oleh tingkat inflasi daerah yang tinggi, harga kebutuhan pokok tinggi, terbatasnya ketersediaan produksi kebutuhan pokok, terhambatnya distribusi kebutuhan pokok. Selain itu, bantuan sosial belum semuanya tepat sasaran karena belum optimalnya verifikasi dan validasi PKH bagi rumah tangga miskin serta adanya data Inklusi dan eksklusi salah bagi rumah tangga miskin. Kurangnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat miskin juga merupakan permasalahan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga, masyarakat miskin tidak memiliki *asset liability*, banyaknya rumah tidak layak huni rumah tangga miskin, dan rendahnya akses atas infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin (Air Bersih, Listrik, Sanitasi).

Ditambah lagi dengan sulitnya akses di kantong-kantong kemiskinan karena kondisi geografis dan topografi, terutama di Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara, kondisi masyarakat miskin yang berada di pedalaman sebagai Suku Terasing/ Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang sulit ditemui, pola hidup penduduk asli (Suku Asli) yang tidak dapat memenuhi dengan standar dan indikator Kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal yang masih tinggi yaitu 49 pada Tahun 2019.

B. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta dan permasalahan tata Kelola di Kabupaten Morowali Utara, antara lain dengan masih rendahnya kinerja aparatur yang ditunjukkan dengan nilai SAKIP tahun 2019 masih berkategori C yang terjadi karena belum optimalnya penerapan kerja aparatur berbasis kinerja dan masih rendahnya kualitas ASN dan tenaga honorer. Selain itu, masih rendahnya kinerja pelayanan publik juga masih dirasakan dengan masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik serta masih ditemukan keluhan-keluhan pada sektor pelayanan publik karena kurangnya sektor layanan publik yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

C. Infrastruktur Dasar

Ketimpangan pemenuhan infrastruktur dasar antarwilayah masih sangat tinggi. Fakta dan permasalahan infrastruktur dasar di Kabupaten Morowali Utara, antara lain adalah:

1. Kurangnya panjang jalan dan rendahnya kualitas kemantapan jalan.



- a. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, namun masih rendah sebesar 25,44 persen pada tahun 2019
- b. Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam) tahun 2019 baru mencapai 35,01 persen
- c. Kualitas jalan antar desa yang kurang baik, termasuk beberapa desa yang memerlukan akses jalan baru
- d. Jalan menuju kantong produksi yang belum optimal, bahkan sebagai kantong produksi memiliki akses yang buruk

2. Rendahnya pemenuhan sanitasi

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Morowali Utara meningkat dari 63,75 persen pada tahun 2018 menjadi 71,07 persen pada tahun 2019, namun masih kategori rendah.

3. Cakupan Layanan Telekomunikasi Belum memadai

- a. Sebagian wilayah sulit diakses layanan telekomunikasi
- b. Masih adanya daerah blank-spot Jaringan Komunikasi

4. Kurangnya ketersediaan air bersih

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Morowali Utara periode waktu 2015-2019 meningkat dari 65,57 persen pada tahun 2016 menjadi 82,70 persen pada tahun 2019.

5. Kurangnya jaringan irigasi

Sarana Pengairan yang ada, jumlahnya belum mencukupi, termasuk pengelolaan yang masih buruk.

D. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Kualitas pendidikan dan kesehatan masih merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara khususnya pendidikan inklusif masih belum merata dan layanan kesehatan belum memadai. Fakta dan permasalahan kualitas Pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang ditandai dengan:
 - a. Angka melek huruf rendah, khususnya masyarakat di daerah-daerah terpencil (daerah tertinggal), dan khususnya KAT
 - b. Angka putus sekolah masih tinggi



- c. Bantuan beasiswa Pemerintah dan CSR untuk antisipasi angka putus sekolah sangat diperlukan
 - d. Pembelajaran kebencanaan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran sehingga diperlukan kurikulum lokal.
2. Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai yang ditunjukkan dengan:
 - a. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai,
 - b. Pemeliharaan gedung sekolah yang belum memadai.
 - c. Teknologi pembelajaran masih lemah dan belum mendukung model/sistem belajar berbasis daring.
3. Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai dikarenakan:
 - a. Pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal
 - b. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga honorer yang belum ada
 - c. Tingkat kesejahteraan guru belum maksimal
4. Usia Harapan Hidup (UHH) Masih rendah yang disebabkan oleh:
 - a. Manajemen pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu belum optimal
 - b. Akses masyarakat terhadap Rumah Sakit yang jauh dari jangkauan masyarakat (sulit dijangkau)
 - c. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
 - d. Rujukan bagi pengguna BPJS masih memberatkan pasien
 - e. Masih tingginya angka *stunting*
 - f. Masih tinggi Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
5. Tenaga Medis dan non medis masih minim karena:
 - a. Jumlah medis dan non medis perawat yang terbatas
 - b. Jumlah tenaga dokter terbatas, khususnya Dokter Spesialis
6. Sarana Prasarana Kesehatan Belum Memadai
 - a. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana puskesmas



- b. Belum tersedianya Puskesmas pembantu di desa-desa terpencil atau desa-desa tertinggal

E. Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Morowali Utara masih sangat terbatas sehingga belum secara optimal dapat mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakta dan permasalahan keuangan daerah di Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Rasio Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Total belanja sebesar 54,60 persen (33,93% Gaji), sementara belanja Langsung (BL) sebesar 45,40 persen
 - a. Masih rendahnya kinerja Pajak dan retribusi daerah.
 - b. Belum optimalnya inovasi dan kreatifitas dalam mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.
 - c. Alokasi DBH Morut Masih Rendah
 - d. Belum optimalnya tatakelola pendapatan daerah.
 - e. Sumber pembiayaan lain dalam pembangunan belum optimal

F. Lingkungan hidup

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara terus menurun. Fakta dan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Rendahnya Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup
 - a. Sering terjadinya Bencana banjir di beberapa tempat masih sering terjadi
 - b. Belum tertatanya pengelolaan limbah berbahaya
 - c. Terbatasnya Prasarana TPA masih terbatas
 - d. Belum berjalanya mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga
 - e. Belum adanya Bank Sampah Berbasis Desa atau Rumah Tangga
 - f. Menurunnya kualitas sumber air tanah dan pencemaran air
 - g. Pencemaran air laut di kawasan teluk dan sekitar pelabuhan
2. Kerusakan Hutan Meningkat



- a. Terbatasnya Pengetahuan masyarakat tentang kerusakan hutan
 - b. Adanya kasus pembabatan hutan dan pembalakan liar (illegal logging)
 - c. Belum optimalnya sistem Pengelolaan Pertambangan sebagai penyebab hutan gundul dan degradasi kondisi hutan
 - d. Adanya petani yang membuka hutan dengan cara berpindah-pindah
3. Mitigasi Bencana
- a. Pemetaan risiko bencana, mitigasi dan sistem informasi kebencanaan

4.1.2 Pelayanan Umum

Berbagai permasalahan yang terkait urusan pemerintahan konkuren baik yang bersifat wajib terkait pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

A. Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara cenderung masih rendah atau tertinggal. Pertama, berkaitan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan yang berujung pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya gedung sekolah yang tidak layak huni, tidak tersedia media belajar yang baik, serta tidak tersedia perpustakaan bagi siswa. Selain itu, di Kabupaten Morowali Utara, setiap wilayah belum tentu memiliki buku pelajaran dan referensi yang sama, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang buku-bukunya tidak lengkap. Belum lagi ada sekolah-sekolah yang fasilitas lab, komputer dan kelasnya masih belum memadai.

Kedua, belum meratanya tenaga guru dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah. Seringkali jumlah tenaga pengajar tetap tidak memadai, sehingga sangat dibutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut. Terjadinya pemusatan guru di daerah perkotaan menyebabkan tidak terlayannya daerah yang lebih terpencil di Kabupaten Morowali Utara. Disamping itu, mutu dan kualitas pembelajaran juga sangat kurang karena banyak guru yang mengajar tidak pada kompetensinya.

Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru yang mengajar di Kabupaten Morowali Utara berpengaruh terhadap rendahnya



pemerataan kualitas Pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Masalah kesejahteraan dan biaya hidup yang tinggi merupakan salah satu penyebab banyak guru yang tidak mau mengajar atau ditempatkan di daerah non perkotaan dimana kesempatan untuk mencari penghasilan sampingan lebih kecil.

Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau budaya pendidikan masih rendah. Faktor sosial yang berkaitan dengan kultur masyarakat, baik yang berupa pandangan, adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang melekat di dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali menjadi faktor penghambat bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak para orang tua siswa yang lebih memilih untuk memperkerjakan anak-anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan tentu sangat membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi usia anak-anak yang tidak lagi berada pada usia sekolah juga menjadi penghambat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun.

2. Kesehatan

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat menjadi permasalahan utama. Usia Harapan Hidup atau UHH di Morowali Utara masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, terkait dari pihak individu atau keluarga yaitu kemungkinan faktor tingkat pengetahuan, ekonomi, budaya, perilaku dan kesadaran kesehatan serta nutrisi yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka *stunting* dan kematian ibu yang masih tinggi. Faktor kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, sarana pelayanan yang belum mencukupi, serta akses menuju tempat kesehatan tidak mudah, sehingga identifikasi faktor risiko kegawatdaruratan atau penyakit, deteksi awal pencegahan komplikasi penyakit, dan pertolongan kurang optimal. Termasuk didalamnya keterbatasan sarana prasarana RSUD Kolonodale dan jumlah ketersediaan Puskesmas Pembantu.

Pencegahan, pengendalian serta penanganan Triple Burden Diseases perlu perhatian serius, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang harusnya bisa dicegah, misalnya dengan imunisasi. Akan tetapi dengan gaya hidup masyarakat, tidak hanya usia lanjut yang menderita, tetapi ada kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan lain-lain juga dialami pada masyarakat dewasa bahkan usia muda. Kasus pandemi yang sedang terjadi saat ini juga menjadi



permasalahan yaitu dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, sehingga ke depannya perlu persiapan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabah yang tiba-tiba muncul dan berdampak luas.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan penting pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dipilahkan menjadi tiga kelompok: ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, akses terhadap layanan ke-PUan seperti drainase, air baku, air minum, perumahan dan irigasi, serta permasalahan terkait penataan ruang.

Permasalahan berupa aksesibilitas rendah terhadap layanan transportasi, pokok masalahnya adalah konektivitas antar wilayah rendah disebabkan antara lain oleh belum memadainya infrastruktur jalan dan jembatan. Sedangkan, terkait layanan ke-PUan pelayanan air bersih masih terkendala kualitas air baku berfluktuasi. Timbunan sampah juga merupakan permasalahan yang disebabkan belum optimalnya pengelolaan sampah yang disebabkan oleh berkurangnya fasilitas pengurangan sampah dan jumlah TPS menurun. Terkait hal tersebut, permasalahan drainase juga belum memadai sehingga jika digabungkan permasalahan sampah dan drainase dapat meningkatkan resiko bencana alam seperti bencana alam banjir.

Selain itu, akses terhadap irigasi juga menjadi permasalahan. Hal ini tidak hanya akan berakibat pada produktifitas kegiatan pertanian, namun akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian. Terkait dengan permasalahan penataan ruang, Kabupaten Morowali Utara adalah Peningkatan status hukum dokumen perencanaan penataan ruang sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), belum adanya Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTL), Rencana Detail Tata Lingkungan (RDTL), rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kabupaten Morowali Utara, masuknya sebagian wilayah Kabupaten Morowali Utara menjadi Kawasan Cagar Alam (CA) Morowali.

4. Penyediaan Perumahan Rakyat

Terkait dengan layanan perumahan, saat ini terdapat ketimpangan penyediaan rumah layak untuk rakyat khususnya antar desa-kota serta masih tingginya permasalahan perumahan kumuh. Keberadaan permukiman kumuh di Kabupaten Morowali Utara dikarenakan masih banyaknya kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani dan belum optimalnya cakupan hunian yang layak huni dan terjangkau. Persoalan permukiman kumuh pada umumnya akan terkait pula dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang menjadi tujuan ke 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).



Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dikarenakan berbagai faktor, utamanya belum ada pendataan rumah tangga tidak layak huni sehingga untuk mengatasi persoalan yang ada menjadi terkendala. Persoalan kawasan permukiman kumuh juga terlihat dari belum optimalnya cakupan hunian yang layak huni dan terjangkau. Bantuan peningkatan kualitas rumah telah diberikan pemerintah belum bisa merata. Disamping itu perbedaan tingkat edukasi masyarakat perdesaan dengan perkotaan tentang kebersihan maupun kesehatan berdampak pada pemahaman dan kesadaran masyarakat yang berbeda pula. Kesulitan mendapatkan lahan permukiman bagi sebagian masyarakat menyebabkan munculnya hunian-hunian yang tidak tertata

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan yang penting dari urusan ketentraman dan ketertiban umum berupa kurangnya jumlah Satuan Polisi Pamong Praja, terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban, belum optimalnya penegakkan Perda dan Perkada dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, menurunnya spirit nasionalisme di kalangan masyarakat, minimnya pengetahuan tentang pentingnya pembauran bagi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, tumbuhnya sifat dan sikap individualistik di tengah masyarakat, belum tuntasnya pelaksanaan seluruh tahap-tahap program ketahanan masyarakat, belum optimalnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan, serta rendahnya kemampuan pencegahan dini.

6. Sosial

Permasalahan sosial yang ada antara lain hubungan disharmonis antar warga masyarakat, perlunya penanganan khusus dengan adanya Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Wana (Tau Ta'a), belum memadainya pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta tingginya penggunaan NAPZA di kalangan generasi muda.

Khusus terkait belum tertanganinya penyandang PMKS secara komprehensif, kompleksitas permasalahannya ini terkait mutu layanan, keterbatasan Sarpras rehabilitasi sosial, serta intervensi kebijakan penanganan PMKS yang harus lintas sektoral, terbatasnya sumber daya daerah dalam penanganan panti asuhan dan panti jompo, belum optimalnya pelayanan, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, dan belum jelasnya kebijakan penanganan PMK.

B. Pelayanan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja



Permasalahan pengangguran di Kabupaten Morowali Utara merupakan dampak dari rendahnya penyerapan tenaga kerja. Dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh belum seimbangnya permintaan dan penawaran tenaga kerja dan rendahnya kompetensi calon tenaga kerja. Adanya *miss-match* tersebut terjadi karena tidak cocoknya persediaan/ penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja.

Upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dilakukan melalui membangun kompetensi tenaga kerja yang unggul, baik melalui jalur lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Jalur lembaga pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul sebelum menjadi angkatan kerja, sedangkan jalur lembaga pelatihan merupakan lembaga yang mempersiapkan sumber daya manusia unggul bagi angkatan kerja baik yang belum bekerja maupun yang sedang bekerja.

Pendidikan vokasi formal (SMK) yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyiapan tenaga kerja terdidik dan terlatih hingga saat ini belum mampu menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja. Begitu pula dengan keberadaan lembaga pelatihan vokasi informal (BLK) yang masih belum memadai sehingga menyebabkan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Seirama dengan semakin dikembangkannya industri berteknologi tinggi saat ini, maka standar kompetensi kerja juga harus semakin tinggi menyesuaikan dengan tuntutan industri berteknologi tinggi. Hingga saat ini, jalinan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (dunia usaha – dunia industri) masih belum optimal yang diduga berkorelasi dengan rendahnya rasio kesempatan kerja dan rendahnya pencari kerja yang ditempatkan.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja daerah. Ditambah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap relasi pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, yang kemudian berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara belum didukung oleh kelembagaan pengarusutamaan gender yang efektif. Pemahaman terhadap pentingnya pengarusutamaan gender belum menjadi keberpihakan para pengambil kebijakan. Selain itu, permasalahan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara antara lain lemahnya kapasitas jaringan pemberdayaan perempuan dan adalah pengembangan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan belum terfasilitasi.



Hal ini ditunjukkan dengan Rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah dan DPRD kabupaten, belum tersedianya data potensi kelembagaan perempuan dan anak, belum kuatnya jaringan kerja sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dan belum adanya sistem informasi gender dan anak.

3. Pangan

Urusan pangan dalam hal ini adalah urusan pelayanan umum wajib non dasar. Permasalahan urusan pangan dalam hal ini adalah adanya wilayah rawan pangan dan belum sepenuhnya terjamin keamanan pangan masyarakat. Selain itu angka kecukupan gizi rendah menjadi permasalahan pangan lainnya khususnya mutu dan gizi pangan terkait KAT Suku Wana. Angka kecukupan gizi yang rendah merupakan salah satu faktor yang akan mengakibatkan ketahanan pangan dan penguatan cadangan pangan yang rendah. Rendahnya angka kecukupan gizi ini disebabkan oleh ketersediaan energi dan protein per kapita rendah. Selain itu dipengaruhi juga oleh budaya konsumsi pangan masyarakat untuk energi dan protein yang rendah khususnya protein hewani. Hal ini semua berujung pada rendahnya tingkat ketahanan pangan

4. Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan adalah Terbatasnya data tentang pertanahan dan status kepemilikan tanah, belum optimalnya pemanfaatan dan penataan tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah hutan akibat pembalakan dan penebangan liar.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup adalah terjadinya Menurunnya kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi ikan maupun penambangan liar. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan sehingga masyarakat juga terus melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan konsekuensinya. Hal ini berujung pada tingginya kerusakan lahan yang berujung pada meningkatnya resiko bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Sedangkan, belum optimalnya penanganan dan pengendalian bencana banjir, longsor, dan kekeringan juga merupakan permasalahan yang mendasar.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah rendahnya tingkat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, kurangnya validitas data monografi kependudukan. Selain itu, belum optimalnya



pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil terkait dengan permasalahan standar mutu layanan administrasi kependudukan terkait dengan komponen software, hardware, dan manware sangat penting. Ditambah dengan belum optimalnya kesiapan sumber daya daerah dalam mengimplementasi program nasional e-KTP.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama urusan pemberdayaan masyarakat desa antara lain adalah Kurangnya usaha mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa yang diperparah dengan tingginya kesenjangan pembangunan antar desa. Selain itu, rendahnya prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa masih memperlambat progress kegiatan pemberdayaan. Ditambah dengan belum optimalnya Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa dan belum optimalnya pengelolaan kelembagaan masyarakat desa.

Dari sisi kreatifitas masyarakat Kurangnya inovasi dan kreativitas kelompok usaha masyarakat dalam meningkatkan produktivitas usahanya juga masih menjadi titik lemah yang perlu segera ditangani. Rendahnya peran serta (keterlibatan) masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan yang seharusnya bersifat partisipatif juga menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan pemberdayaan di masyarakat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah masih rendahnya kepesertaan pasutri menjadi akseptor keluarga berencana pada daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini berdampak pada meningkatnya tren Pertumbuhan jumlah anak/keluarga. Selain itu, permasalahan krusial lainnya yang terkait erat dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kurang memadainya sarana pelayanan kontrasepsi di Puskesmas.

9. Perhubungan

Permasalahan terkait urusan perhubungan adalah belum tertatanya Sistem jaringan telekomunikasi dan perhubungan, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, adanya kesenjangan moda transportasi antar desa, antar kecamatan dan antar kabupaten, dan belum optimalnya pemanfaatan fungsi terminal penumpang.

10. Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan yang tersimpul antara lain Rendahnya akses komunikasi dan informasi, dan terbatasnya kapasitas SDM pengelola informasi dan komunikasi. Hal ini dikarenakan sarana



komunikasi data/akses internet belum memadai. Permasalahan ini terjadi karena beberapa hal yaitu: kurangnya infrastruktur komunikasi data dan *bandwidth* yang memadai di seluruh wilayah serta SDM TIK kurang memadai.

Demikian pula kesiapan masyarakat masuk ke era informasi masih rendah. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena kepekaan masyarakat terhadap informasi masih belum memadai, literasi informasi dan pengetahuan di masyarakat masih kurang juga permasalahan sebaran layanan jaringan informasi belum merata disebabkan oleh akses fisik geografis wilayah masih sulit sulit.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berikut adalah beberapa permasalahan dalam urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah yaitu Kurangnya jumlah koperasi aktif, belum optimalnya Pembinaan koperasi dan UKM, belum terbentuknya kelembagaan pemerint- ntah daerah yang menangani Koperasi dan UKM, rendahnya kemampuan SDM, manajemen, akses permodalan dan pasar bagi komponen usaha kecil menengah.

12. Penanaman Modal

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang berkenaan dengan urusan penanaman modal yaitu rendahnya realisasi nilai investasi di bidang agribisnis dan pariwisata, belum memadainya daya dukung jalan, pasokan energi dan faktor-faktor non teknis lainnya antara lain isu keamanan, dan perizinan, serta belum optimalnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan pemuda dan olahraga bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab belum meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan serta prestasi olahraga yang belum stabil. Sementara dikatakan sebagai permasalahan lintas sektoral karena permasalahannya terdapat hampir semua sektor, oleh karenanya penanganannya harus melibatkan semua sektor. Secara rinci permasalahan yang terjadi adalah kurangnya organisasi kepemudaan dan olah raga yang dibina Pemda, terbatasnya Sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan, kurangnya pembinaan dan aktivitas yang dapat mendorong prestasi olah raga daerah, rendahnya peran pemuda dalam seni, budaya, olahraga, dan pembangunan pada umumnya, dan adanya pengaruh dan dampak negatif narkoba dan rendahnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda.

14. Statistik

Permasalahan terkait statistik di Kabupaten Morowali Utara adalah Kurangnya kelengkapan dokumen statistik daerah,



terbatasnya data dan informasi pembangunan daerah, kurangnya pemahaman aparat tentang pentingnya data, kurangnya kerja sama antar SKPD dalam penyediaan data.

15. Persandian

Permasalahan terkait persandian di Kabupaten Morowali Utara adalah belum adanya Lembaga persandian di daerah dan belum terselenggaranya persandian skala kabupaten.

16. Kebudayaan

Permasalahan utama yang terjadi adalah belum optimalnya pelestarian benda purbakala, situs dan cagar budaya Suku Mori dan Suku Wana serta lainnya dan belum berkembangnya pelembagaan nilai-nilai sadar wisata di tingkat masyarakat

17. Perpustakaan

Permasalahan yang perlu disiapkan pemikiran pemecahannya adalah rendahnya minat baca masyarakat, belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan, belum adanya sumber daya pustakawan daerah. Permasalahan ini terjadi karena disebabkan oleh kepekaan masyarakat terhadap informasi masih belum memadai literasi informasi dan pengetahuan di masyarakat masih kurang. Berbagai hal tersebut diperkirakan merupakan hambatan dalam pengembangan perpustakaan digital di masa depan di Kabupaten Morowali Utara.

18. Kearsipan

Permasalahan pokok di dalam pelaksanaan urusan kearsipan mirip dengan beberapa urusan lain yang terkait teknologi informasi, yakni belum tertatanya pengelolaan kearsipan daerah dan kurangnya SDM berkualitas yang menguasai bidang kearsipan

C. Pelayanan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dalam urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Morowali Utara secara spesifik antara lain terbatasnya pendaratan ikan (TPI), belum berkembangnya budidaya perikanan tangkap dan air tawar, adanya praktek dan tindakan penangkapan ikan liar, belum optimalnya pengembangan budidaya rumput laut, belum optimalnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan perikanan tangkap maupun nelayan budidaya.

2. Pariwisata

Permasalahan spesifiknya antara lain belum tertatanya Daerah Tujuan Wisata (DTW), belum optimalnya pengembangan potensi obyek wisata, kurangnya promosi pariwisata daerah, belum terbentuknya kelembagaan yang menangani pariwisata, belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pariwisata.



3. Pertanian

Meskipun antara tahun 2017-2019 NTP sudah di atas 100, namun masih ada kemungkinan bahwa nilai tersebut menurun kembali di bawah 100. Keberlanjutan peningkatan NTP diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Permasalahan utama pada penyelenggaraan urusan pertanian adalah rendahnya taraf hidup petani, rendahnya daya saing komoditas pertanian, tingginya alih fungsi lahan pertanian, belum optimalnya fungsi kelembagaan petani, rendahnya daya saing produk hasil pertanian, terbatasnya sumber daya petani, terbatasnya sarana prasarana penunjang produksi, adanya serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan penurunan produktivitas ternak, kurangnya adopsi dan transformasi teknologi pengembangan peternakan, serta kurangnya kemampuan dan keterampilan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian/perkebunan, dan penganekara- gaman tanaman pertanian.

4. Kehutanan

Permasalahan utama penyelenggaraan urusan kehutanan adalah belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis, meluasnya kerusakan hutan, adanya alih fungsi lahan hutan di Kawasan Cagar Alam (CA) Morowali, tingginya illegal logging, belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pengolahan hutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat lingkaran hutan tentang arti penting hutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan terkait urusan energi dan sumberdaya mineral adalah adanya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), adanya tumpang tindih izin usaha pertambangan, belum optimalnya Pengelolaan sumber daya alam, terbatasnya sumber energi yang dikembangkan belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Perdagangan

Permasalahan dominan dari urusan perdagangan adalah terbatasnya sarana dan prasarana pusat (sentra) perdagangan, belum tertatanya pasar kecamatan dan desa dengan baik, belum optimalnya promosi produk unggulan daerah, dan rendahnya akses pasar dan panjangnya matarantai jalur distribusi produk daerah.

7. Perindustrian

Pelaku industri kecil di Kabupaten Morowali Utara belum memiliki daya saing dan ketahanan bisnis untuk melakukan kegiatan ekonomi secara berkesinambungan. Hal tersebut terlihat dari jumlah industri kecil sangat dinamis, dimana hal ini terjadi karena dalam kondisi tertentu jumlah industri kecil ini akan meningkat dengan signifikan dan kemudian dapat menurun dengan jumlah signifikan



pula. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan konsumen secara berkelanjutan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kecil tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas komoditas unggulan daerah, kurang optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, dan belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di desa.

8. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi bidang transmigrasi di Kabupaten Morowali Utara adalah belum adanya penempatan dan pengembangan transmigran untuk mendukung percepatan pembangunan wilayah Kabupaten Morowali Utara dan belum tersedianya dokumen rencana lokasi dan tata ruang kawasan transmigrasi.

9. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Morowali Utara dalam perencanaan pembangunan adalah belum optimalnya sinkronisasi dan sinergi pembangunan, partisipatif perencanaan antara perencanaan pada level teknokratik dengan perencanaan *top down* dan *bottom-up*, terbatasnya data dasar perencanaan dalam mendukung sistem perencanaan pembangunan ideal, belum optimalnya koordinasi lintas OPD dalam merespons isu-isu strategis dan permasalahan perencanaan pembangunan, belum terintegrasinya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap, akurat, dan update, dan belum optimalnya Keterpaduan program dan kegiatan pada sistem perencanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota rendahnya kemampuan SDM perencana di daerah.

4.1.3. Penunjang Urusan

Penyelenggaraan pelayanan umum dapat berjalan dengan baik jika dilengkapi dengan penunjang urusan yang tangguh. Kelembagaan pemerintahan secara umum mengemban tugas dalam rangka menyediakan sistem yang baik dan lancar sehingga memberikan prakondisi dalam pelaksanaan tupoksi secara optimal. Salah satu penunjang urusan adalah kelembagaan yang tertata dengan sistem dan tata kelola efisien dan efektif. Dengan kelembagaan yang baik maka semua urusan akan dapat dilayani dengan baik, jelas dan akuntabel. Penunjang lainnya adalah sistem dan tata kelola perencanaan.

A. Perencanaan Pembangunan

Saat ini Kabupaten Morowali Utara masih memiliki kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang memerlukan perhatian khusus. Sistem kelembagaan dan tata kelola perencanaan



masih belum optimal. Ketersediaan dokumen yang belum teridentifikasi secara jelas menunjukkan salah satu bukti pentingnya memperhatikan proses pendokumentasian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan data, keterbatasan dalam pendokumentasian, sistem informasi manajemen belum optimal, keterbatasan dalam koordinasi dan komunikasi antar OPD dan dengan kabupaten/kota, serta luasnya wilayah dan keterbatasan akses. Guna mencapai sinkronisasi dan keterpaduan suatu rencana membutuhkan juga koordinasi yang intensif. Konektivitas dan akses terbatas serta jaringan internet yang kurang memadai, menyulitkan proses koordinasi dengan kabupaten/kota sehingga sinkronisasi dan konsolidasi data juga tidak bisa berjalan secara optimal.

Penyebab sistem kelembagaan dan tata kelola perencanaan belum optimal adalah sistem monitoring dan evaluasi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pelembagaan sistem pelaporan belum optimal, belum adanya prosedur pelayanan baku (SOP) dalam monitoring dan evaluasi, luasnya wilayah dan keterbatasan akses. Keterbatasan akses juga menjadi kendala sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau semua kabupaten/kota sehingga sistem monitoring dan evaluasi kurang dapat berjalan optimal. Dengan demikian sistem kelembagaan dan tata kelola perencanaan belum optimal menjadi permasalahan utama.

B. Keuangan Daerah

Kabupaten Morowali Utara sebagai daerah otonom baru di Indonesia hingga saat ini memiliki nilai PAD yang relatif kecil, dimana dengan nilai PAD yang kecil mengakibatkan sulitnya melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, oleh karena itu hingga saat ini pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih sangat bergantung dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Rendahnya PAD disebabkan karena belum optimalnya penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari pungutan pajak, retribusi, maupun PAD lainnya yang sah. Selanjutnya, dalam lima tahun terakhir besaran ketergantungan fiskal menunjukkan besaran yang semakin meningkat dan rasio derajat desentralisasi fiskal yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kedua kondisi tersebut menempati posisi terbawah apabila dibandingkan dengan empat Kabupaten lain di Pulau Morowali.

C. Kepegawaian

Permasalahan manajemen dan sumberdaya manusia Aparatur Sipil Negara belum berjalan optimal disebabkan oleh empat butir permasalahan yang pokok. Pertama adalah sistem manajemen kepegawaian masih terbatas, sistem manajemen karier terbatas, sistem administrasi dan pencatatan data terbatas serta sistem manajemen jabatan struktural terkendala kuantitas dan kualitas.



Keterbatasan sistem manajemen kepegawaian disebabkan adanya keterbatasan anggaran, sehingga tidak mampu mencakup keseluruhan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara utuh. Hal ini menjadikan ASN yang terfasilitasi kurang merata. Di samping itu beberapa jabatan kosong menjadikan kurang efektifnya manajemen kepegawaian.

Kedua, di samping kekeosongan jabatan, ada juga kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi secara merata. Kondisi tersebut menjadikan beban kerja pegawai juga kurang merata. Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan menjadi salah satu permasalahan yang secara nyata di dalam sistem manajemen kepegawaian. Permasalahan serumpun dalam hal ini juga belum tersedianya analisis kompetensi jabatan struktural dan fungsional yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan. Sedangkan untuk melakukan analisis prestasi dan kapasitas pegawai secara umum diperlukan evaluasi. Namun belum tersedia sistem evaluasi kepegawaian dan belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menghadapi masalah keterbatasan dalam manajemen karier pegawai. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang kurang mendukung (tidak ada gedung) serta keterbatasan anggaran. Permasalahan lainnya adalah untuk jabatan fungsional dan belum tersedia rencana pengembangan pegawai. Sistem diklat teknis dan fungsional tertentu juga belum tertata. Hal ini juga ditambah dengan masalah pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi. Bahkan dalam sistem rotasi, mutasi dan promosi juga terkendala dengan belum sesuainya kompetensi dalam syarat jabatan.

Ketiga, basis data kepegawaian dengan sistem informasi dan administrasi kepegawaian yang tertata dan terkelola menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem manajemen kepegawaian daerah. Sistem manajemen kepegawaian ini masih terkendala oleh database pegawai yang absah, menyeluruh dan lengkap; belum real time. Sistem administrasi kepegawaian belum real time dan integratif, sehingga update data belum berjalan lancar. Permasalahan kompleks ini juga terhubung secara logis mengingat sistem koordinasi untuk pembaruan data kepegawaian belum simultan, terkendala masalah ruang, waktu, keterbatasan informatika serta keterbatasan SDM.

Keempat, belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian juga berkenaan dengan jabatan struktural. Pengisian jabatan struktural biasanya dilakukan secara terbuka melalui lelang jabatan. Kurang optimalnya manajemen kepegawaian disebabkan oleh keterbatasan kompetensi calon untuk pengisian jabatan struktural pimpinan tinggi melalui lelang terbuka. Hal ini kurang dapat berlangsung optimal sebab ada keterbatasan jumlah peserta lelang



jabatan yang memenuhi kriteria jabatan. Permasalahan ini juga terkait erat dengan masalah sistem pengembangan karier struktural masih belum akomodatif terhadap perubahan status jenjang pendidikan pasca ijin belajar/tugas belajar. Belum tersedianya sistem informasi jabatan secara lengkap dan belum tertatanya sistem pengembangan karier struktural secara komprehensif mulai jabatan pengawas, administrator hingga jabatan tinggi juga menjadi penyebab penting terhadap keterbatasan sistem manajemen kepegawaian ini.

D. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten masih menghadapi permasalahan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terutama dalam sistem manajemennya. Sistem manajemen penelitian dan pengembangan (litbang) belum optimal disebabkan oleh belum ada perencanaan kebutuhan litbang terintegrasi dan terpadu, keterbatasan SDM serta belum optimalnya sistem informasi data penelitian dan pengembangan. Ketiga, masalah pokok ini cukup menentukan kinerja dari penelitian dan pengembangan. Perencanaan kebutuhan litbang sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan penelitian dan pengembangan yang perlu diprioritaskan. Tentu saja semua sektor membutuhkan untuk ditunjang data dan informasi yang memadai sehingga perlu penapisan kebutuhan secara efektif. Sedangkan SDM sebagai penggerak dan pelaku utama juga secara kuantitas dan kualitas perlu dipenuhi, agar semua fungsi litbang dapat berjalan lancar. Hal ini juga penting untuk dilengkapi dengan sistem informasi data yang kapabel dan handal guna memberikan pelayanan kepada seluruh sektor dan seluruh OPD.

Permasalahan lain adalah kapasitas dan kualitas SDM litbang terbatas. Untuk menjalankan tugas litbang membutuhkan kompetensi khusus yang terkait dengan pemahaman konsep, metodologi, instrumentasi, pengukuran, pengolahan data, penyajian dan analisis data. Guna memperkaya pengetahuan, kemampuan teknis operasional litbang dibutuhkan diklat. Namun diklat teknis terkait litbang belum ada.

Sebuah pusat litbang membutuhkan sistem informasi data yang memadai, terpadu terintegrasi dan real time. Sistem informasi ini dapat terbuka dikases untuk berbagai kepentingan termasuk untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masih memiliki permasalahan dalam penyediaan sistem informasi data litbang ini. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya database litbang, sehingga hasil penelitian yang dilakukan kurang terwadahi dengan optimal. Penyajian data dan fasilitasi kepada sektor lain yang membutuhkan tidak dapat secara otomatis diperoleh. Keadaan ini juga disebabkan oleh belum tersedia manajemen pengelolaan data dan dokumentasi hasil penelitian yang terprogram.



E. Pengawasan

Sistem pengawasan internal belum berjalan optimal disebabkan oleh fasilitasi untuk pengawasan internal belum terpenuhi optimal, sistem koordinasi, konsultasi yang tidak terintegrasi dan belum tersedia sistem informasi dan administrasi data. Belum terpenuhi fasilitas untuk menjalankan tugas dalam pengawasan ini cukup mengganggu. Demikian juga untuk melakukan koordinasi dan konsultasi akan mengalami kesulitan juga dengan berbagai keterbatasan ini. Administrasi data sebagai penunjang dalam pelaksanaan pengawasan penting untuk dipenuhi. Jika hal ini juga belum tersedia secara memadai maka pelaksanaan fasilitasi dalam pengawasan internal juga menjadi kurang optimal.

Belum tersedia sistem informasi dan administrasi data dalam pelaksanaan pengawasan ini disebabkan oleh tidak ada manajemen data base hasil pengawasan kabupaten/kota dan Kabupaten, Identifikasi dan sistem administrasi data temuan masih belum optimal dan tidak ada monitoring data kabupaten/kota dan Kabupaten yang terpadu dan terintegrasi. Tidak adanya manajemen data base menjadikan kurang lengkapnya penyediaan data dari waktu ke waktu, sehingga data kurang terinformasikan dengan baik. Belum optimalnya data hasil temuan juga menjadikan data base kurang lengkap dalam memberikan informasi terhadap kebutuhan perbaikan sistem pengawasan yang diperlukan. Di samping itu sebab lain adalah kurang termonitornya data pengawasan di kabupaten/kota menjadikan up date data Kabupaten kurang terpenuhi pada kurun waktu tertentu.

F. Sekretariat Dewan

Kapasitas Setwan dalam fasilitasi DPRD masih terkendala dalam sistem tata kelola pelayanan. Sistem tata kelola pelayanan belum optimal ini disebabkan oleh Sistem tata kelola pelayanan belum optimal yang bersifat terbatas dan sistem informasi data yang belum optimal juga. Kompleksitas kegiatan DPRD ini semestinya diikuti dengan fasilitasi yang memadai. Di samping itu sistem informasi data juga menjadi kendala yang penting untuk diberikan solusi. Sebuah tata kelola pelayanan secara umum perlu memiliki fasilitasi yang bagus dan lengkap, Demikian juga ditunjang dengan sistem informasi data yang informatif. Namun pada realisasinya Setwan ini masih menghadapi kendala penting dan sangat berarti.

Keterbatasan fasilitasi disebabkan oleh keterbatasan kemampuan SDM, sementara harus menyelenggarakan persidangan DPRD yang cukup banyak jenis rapatnya yang beragam dan sering dilakukan ini, membutuhkan kesipan setwan, baik secara teknis operasional penyelenggaraan rapat, maupun secara substansial perlu



menyiapkan data, dokumen penunjang serta materi yang penting untuk dibahas.

Administrasi persidangan, administrasi perkantoran dan sistem data base sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD melalui fasilitasi dari setwan. Namun, jika tertib administrasi ini belum terwujud, maka fasilitas menjadi kurang efektif dan efisien. Integrasi data menjadi sebuah kebutuhan yang dapat memperbaiki sistem informasi, sehingga menyempurnakan fasilitasi. Jika ini belum terwujud maka fasilitasi belum optimal.

4.1.4. Aspek Daya Saing

Perkembangan global semakin mendorong perubahan dunia. Kemajuan teknologi semakin mendekatkan dunia. Loncatan perkembangan menjadikan tata kehidupan menjadi berubah. Cepatnya perubahan ini menjadikan semua harus memikirkan inovasi dan akselerasi. Inovasi dengan memanfaatkan perubahan sebagai bagian yang harus dieksplorasi. Setiap perubahan itu mengandung inovasi atau sebaliknya menawarkan banyak kebutuhan inovasi. Hanya dengan inovasi maka akan terbangun perubahan yang kondusif dan nyata, sehingga mudah untuk diikuti oleh masyarakat. Sedangkan untuk mendorong setiap daerah dalam membangun dalam konteks perubahan dunia, dipaksa untuk harus mengikuti proses akselerasi. Hanya dengan proses akselerasi maka daerah akan dapat mengikuti irama perubahan dalam suasana global. Dengan inovasi dan akselerasi maka daya saing akan tumbuh.

Daya saing merupakan suatu iklim yang harus ditumbuhkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara. Kemampuan daya saing wilayah sebagai salah satu tantangan besar di masa depan. Permasalahan daya saing daerah provinsi nampak dari nilai tukar petani yang masih fluktuatif, angka kriminalitas yang masih relatif tinggi, dan tingginya rasio ketergantungan

A. Pengeluaran Per Kapita

Meskipun pengeluaran per kapita di Kabupaten Morowali Utara semakin meningkat, namun peningkatan tersebut masih belum merata. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara, terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Selain itu, jumlah desa tertinggal di Kabupaten Morowali Utara juga masih tergolong tinggi, yaitu 49 desa pada tahun 2019.

B. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani di Kabupaten Morowali utara cenderung meningkat antara tahun 2017-2019. Meskipun begitu, para petani



tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari resiko ketidakpastian harga panen. Produksi pertanian pada umumnya termasuk komoditas yang bersifat mudah rusak tidak tahan lama (perisable) dan dalam usaha tani konvensional yang mengikuti pola iklim dan budaya petani menyebabkan harga yang diterima petani tidak pernah baik.

Secara umum setiap terjadi musim panen raya suatu komoditas meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas harga jual rendah akibat melimpahnya barang yang dihasilkan. Berbeda apabila petani berani mengambil resiko dengan menanam di luar musim (off season) yang menghasilkan produk yang biasanya mempunyai harga jual yang tinggi, namun tantangan yang dihadapi sangat tinggi apabila gagal panen. Rendahnya nilai jual produksi pertanian berarti rendah pula nilai yang diterima petani yang kadang lebih kecil dibanding harga yang dibayar untuk memproduksi hasil tersebut. Hal ini menjadi masalah pokok penyebab $NTP < 1$. Masalah pokok ini disebabkan oleh daya tawar yang rendah akibat melimpahnya produksi pada musim tanam (serempak) dan mudah rusaknya produksi pertanian.

C. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2015 sebesar Rp335.038,00, meningkat hingga Tahun 2019 menjadi Rp451.871,00, rata peningkatan dalam kurun Tahun 2015-2019 sebesar 7,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat secara umum semakin membaik dan dapat menyisihkan pengeluarannya untuk menabung, investasi, pendidikan, hiburan, kesehatan, dan lainnya. Namun, peningkatan kesejahteraan yang inklusif masih menjadi permasalahan yang ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan.

D. Angka Kriminalitas

Stabilitas dan keamanan merupakan daya ungkit terhadap tumbuhnya daya saing. Jika keamanan terjaga dengan baik, maka seluruh aktivitas produksi, jasa, perdagangan sebagai indikator dinamika perekonomian suatu wilayah maka akan dapat berjalan dengan optimal. Namun sebaliknya jika Kondisi keamanan kurang kondusif maka seluruh sektor akan terganggu di dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini tentu memiliki dampak pada kurang produktif dan kurang lancarnya laju pertumbuhan perekonomian, distribusi barang dan jasa, kelangkaan sumber daya dan kepercayaan investor rendah. Dengan demikian tingkat kriminalitas akan menimbulkan permasalahan dalam meningkatkan kemampuan wilayah dari berbagai segi.



Angka kriminalitas di Kabupaten Morowali Utara cenderung menurun dalam periode 2016-2019, yang menunjukkan semakin meningkatnya keamanan masyarakat. Namun apabila dilihat persebarannya masih terdapat dua kecamatan dengan angka kriminalitas yang tinggi, yaitu di Kecamatan Petasia dan Mori Atas. Tingginya angka kriminalitas mengindikasikan rawannya tingkat keamanan. Keamanan yang rawan mengakibatkan investasi menjadi terhambat di kedua kecamatan tersebut. Tingkat keamanan yang baik merupakan prasyarat bagi dunia usaha untuk melakukan investasi di suatu daerah. Tingginya kriminalitas dapat mengancam kegiatan ekonomi maupun pelaku dunia usaha untuk beraktivitas dengan aman.

E. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan di Kabupaten Morowali Utara tergolong masih cukup tinggi, yaitu sebesar 51,58 di tahun 2019. Hal ini menunjukkan setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 51,58 penduduk usia belum produktif dan penduduk usia tidak produktif. Meskipun begitu, diharapkan rasio ketergantungan akan semakin menurun dengan adanya bonus demografi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa bonus demografi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan menyiapkan angkatan kerja yang berkualitas.

4.2. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang perumusannya mempertimbangkan permasalahan masing-masing perangkat daerah, termasuk di dalamnya telaah tentang norma dan standar, juga proses dan prosedur yang harus diikuti, serta memperhatikan dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan isu strategis satuan kerja perangkat daerah. Isu internasional, nasional, dan regional, serta dokumen perencanaan lain yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut.

4.2.1. Isu Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang dideklarasikan Tahun 2015, berorientasi pada peningkatan martabat dan kualitas hidup manusia melalui: (1) Perubahan konsep dan fokus isu yang mendasar secara signifikan terhadap isu-isu permasalahan lingkungan; (2) Perkembangan pembangunan menjadi siklus yaitu *economic development - population development - environment development*.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki 6 aspek yang perlu dicapai dalam dunia global antara lain: kehidupan yang sehat dan layak, keamanan dan ketahanan pangan, sumber air bersih, energi yang aman, ekosistem yang produktif dan sehat, serta kebijakan yang berpihak terhadap komunitas.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target, untuk mengukur pencapaian target TPB/SDGs. Target TPB Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebanyak 220 indikator.

2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat memungkinkan terjadinya pengembangan dan peningkatan layanan pemerintah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara intensif, termasuk jaringan komputer, sensor, teknologi kecerdasan buatan, big data dan informasi geospasial. Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah dirasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat dan dinamis.

Fenomena disrupti yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, membawa pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja, dan cara relasi sosial berhubungan satu sama lain. Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi sosial tersebut sebagai konsekuensi terjadinya Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan, sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan termasuk pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

3. Pandemi Covid-19

Penyebaran virus Corona atau Covid-19 telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11



Maret 2020. Pandemi merujuk pada penyakit yang menyebar ke banyak orang di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Jumlah penyebaran Covid-19 sangat signifikan. Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Pandemi terakhir terjadi di dunia Tahun 2009, akibat flu babi yang menewaskan ratusan ribu orang. Ciri-ciri pandemi meliputi: jenis virus baru, menginfeksi banyak orang dengan mudah, serta menyebar antar manusia secara efisien. Covid-19 memiliki ketiga karakteristik tersebut.

Covid-19 telah menginfeksi puluhan juta orang di sebanyak 123 negara. Covid-19 sebagai pandemi global telah berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Hal ini telah mengguncang pasar global yang saat ini sedang rapuh dengan pembatasan perjalanan dan perdagangan yang lebih ketat. Semua negara sedang berupaya untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus ini, serta memproduksi vaksin anti Covid-19.

4. Krisis Perekonomian Global

Perekonomian global sampai akhir Tahun 2020 ditandai ketidakpastian, dan menuju krisis ekonomi global dengan berbagai kejutan telah menghantam dunia, salah satunya adalah akibat penyebaran virus SARS-CoV-2 atau Covid-19. Penyebaran Covid-19 telah menyebabkan sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah maupun kebijakan jaga jarak fisik warganya. Kebijakan lockdown di sejumlah negara ini, telah memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian, karena beberapa sektor tidak beroperasi secara normal. Akibatnya, terjadi pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas.

Berbagai negara mengalami kelesuan ekonomi. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada Indonesia yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah-daerah.

Di negara berkembang, tantangan terbesar dalam kebijakan ekonomi adalah dalam mengoptimalkan populasi. Kerja sama internasional juga diperkuat baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerjasama internasional ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, dan berkesinambungan, dengan tetap menjaga resiliensi perekonomian.

5. Degradasi Lingkungan Hidup

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh makhluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan, serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut. Salah satu penyebabnya



adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik moderen, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya. Perlindungan lapisan ozon dan perubahan iklim (*Kyoto Protocol*), keanekaragaman hayati, desertifikasi (degradasi lahan, lahan kering semakin gersang, kehilangan badan air, vegetasi, dan kehidupan liar), limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), polusi dari kapal, dan perlindungan kehidupan laut.

Berdasarkan *Copenhagen Accord*, rangkaian pembahasan sebanyak 26 negara termasuk Indonesia, mengenai perubahan iklim dalam *Conference of the Parties (COP) ke-15 United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Copenhagen, Denmark, telah disepakati bahwa upaya mitigasi global secara suka rela/tidak mengikat dibutuhkan untuk membatasi peningkatan suhu global. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan penurunan emisi GRK oleh semua pihak, dimana pelaksanaan di negara-negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan.

Untuk membatasi peningkatan suhu global dilakukan berbagai upaya untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca oleh semua pihak, dengan catatan pelaksanaan di negara berkembang harus sesuai dengan usaha pembangunan ekonomi, sosial dan pengentasan kemiskinan. Upaya mempertahankan lingkungan hidup agar kondisi lingkungan hidup yang baik dapat dinikmati oleh generasi saat ini hingga generasi mendatang. Oleh karena itu, isu lingkungan hidup menjadi isu utama dalam agenda TPB.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

1. Isu dalam RPJMN 2020-2024

Secara nasional yang harus diperhatikan, atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah sinkronisasi dan sinergi dengan Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2025. Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;



- (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan **5 (lima) arahan utama** sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Secara lebih jelas diuraikan sebagai berikut.

(1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

(2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

(3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM

(4) Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

(5) Transformasi Ekonomi

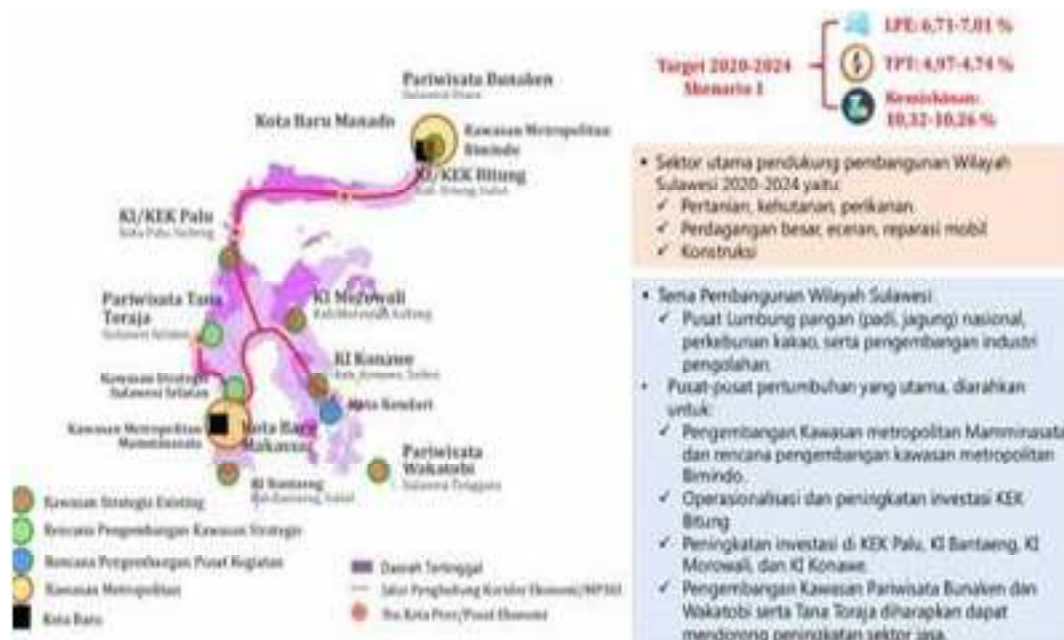
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut.

- (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar. 4.1



Rencana Pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024 juga memuat skenario rencana pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2020-2024 yaitu “Pusat lumbung pangan (padi dan jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan” dimana sektor utama pendukung pembangunan wilayah difokuskan pada pertanian,



kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan konstruksi.

Berdasarkan tema pembangunan wilayah Sulawesi tersebut, skenario pengembangan wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kawasan Tolitoli dan sekitarnya, Kawasan Poso dan sekitarnya dititik beratkan pada Sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Untuk arah kebijakan untuk pengembangan Sulawesi Tengah dengan fokus pada kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan dan industri pengolahan. Secara khusus, Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian dari PKW Poso sehingga dapat mengambil peran dalam pengembangan pertanian, pariwisata, perkebunan dan industri pengolahan.

Gambar 4.2



Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pulau Sulawesi

2. Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemulihan Kesehatan nasional

Di Indonesia, penyebaran kasus Covid-19 dimulai pada awal Maret 2020 dan terus berkembang mengikuti pola alamiahnya, meningkat secara eksponensial. Penyebaran virus secara cepat seiring dengan pergerakan penduduk yang intensif, diduga sebagai pencipta meningkatnya Covid-19 dengan perkembangan pesat dari waktu ke waktu.

Pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas pemerintah saat mengupayakan kerja sama dengan sejumlah pihak dalam pengadaan vaksin Covid-19 sebagai langkah penanganan



pandemi. Sembari fokus pada sektor kesehatan, pemerintah terus berupaya menangani sisi ekonominya.

3. Kondisi Perekonomian Nasional

Dampak pandemi virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia dimana pengangguran meningkat sebanyak Pandemi Covid-19 berdampak terhadap ketenagakerjaan Indonesia.

Krisis ekonomi Nasional akibat Covid-19 saat ini telah menimbulkan kerusakan ekonomi nasional yang parah, karena runtuhnya permintaan agregat, sehingga menjumpai ciri-ciri ekonomi seperti; menurunnya daya beli secara drastis, lenyapnya minat investasi dan meningkatnya kapasitas yang menganggur di berbagai sektor. Produktivitas UMKM menurun karena terjadinya pembatasan pergerakan manusia. Krisis pandemi Covid-19 telah mengubah secara signifikan pada sisi pengeluaran pelaku ekonomi. Perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi karena penurunan agregat demand dari pelaku ekonomi. Bila COVID-19 tak meredas ampai awal tahun 2021, maka pemulihan ekonomi daerah menjadi semakin tak pasti.

Kebijakan fiskal dalam bentuk stimulus fiskal ditempuh otoritas kebijakan pemerintah, untuk mendorong bergeraknya aktivitas ekonomi melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, dan menurunkan target penerimaan pajak, atau kombinasi keduanya. Bentuk dari peningkatan pengeluaran pemerintah, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara langsung melalui tambahan pembayaran barang dan jasa, atau secara tidak langsung melalui transfer anggaran. Sebaliknya, pemerintah juga dapat menggunakan stimulus fiskal melalui penurunan penerimaan pajak secara tidak langsung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sektor swasta.

4. Perkembangan Teknologi Informasi

Saat ini dunia berada pada Industri 4.0 dimana industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Sebagian orang membandingkan Industri 4.0 dengan Revolusi Industri Generasi Keempat. Revolusi Industri Generasi Keempat sendiri merupakan transformasi sistemik yang lebih luas cakupannya daripada Industri 4.0, yang mana didalamnya mencakup dampak terhadap masyarakat, struktur pemerintahan dan peranan manusia itu sendiri dalam struktur ekonomi dan manufaktur.

Tujuan utama dari industri 4.0 ini adalah kestabilan distribusi barang dan kebutuhan. Industri 4.0 memungkinkan pendataan kebutuhan masyarakat secara real time, dan mengirim data tersebut ke produsen. Sehingga, para produsen dapat memproduksi dengan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan. Tentunya secara ekonomi, hal



ini dapat menjaga kestabilan harga. Secara bisnis, hal ini dapat memperluas pasar. Pelacakan produk dan transparansi akan semakin mengarah ke layanan baru. Hal ini dimungkinkan karena mekanisme Industri 4.0 mengintegrasikan produsen dengan jalur pasokan tanpa batas geografis.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.

5. Ketimpangan Infrastruktur

Buruknya infrastruktur di Indonesia mengakibatkan daya saing bangsa secara keseluruhan rendah. Infrastruktur berada di posisi ketiga sebagai masalah utama yang mengganggu kemudahan berbisnis, selain itu birokrasi yang tak efisien dan korupsi. Meski demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur. Dimana, posisi Infrastruktur Indonesia urutan ke-82, dibandingkan Cina urutan ke-74, Thailand ke-61 dan Malaysia ke-25. Indonesia pun jauh dari Singapura yang berada di urutan ke-5.

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pemerintah berpandangan, selain itu untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.

6. Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta, karena meningkatnya suplai angkatan kerja, tabungan, dan kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen Tahun 2012, dan titik terendah sebesar 46,9 persen antara Tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi memanfaatkan bonus demografi.

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas sumber



daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan (trade openness) dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana. Upaya pemerintah adalah mendorong dan mempersiapkan lapangan kerja yang luas melalui keterbukaan investasi di daerah.

7. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup secara nasional meliputi meningkatnya perusakan/kebakaran hutan, terjadinya banjir/tanah longsor, musim kemarau yang panjang, terjadinya perburuan/perdagangan hewan dilindungi, aktivitas penghancuran terumbu karang, polusi air dari limbah industri, polusi udara, limbah B3, pembuangan sampah tanpa pengolahan, serta RAN-GRK sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RAN-GRK merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim, untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen dengan usaha sendiri.

8. Potensi dan Ancaman Bencana Alam

Data menunjukkan Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986). Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami Tsunami. Tsunami yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994).

Pemahaman informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami di masyarakat masih belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya potensi dampak akibat ancaman gempa bumi dan Tsunami. Kurang optimalnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini Tsunami kepada masyarakat serta masih kurangnya penelitian 'prekursor' (pratanda) untuk peramalan kejadian gempa bumi pada sesar aktif di sekitar kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat.

9. Korupsi

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum,



melainkan sekedar suatu kebiasaan. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi isu nasional dan menjadi komitmen RPJM nasional 2020-2024 hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang.

Transparency International (TI) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi terganggu dan upaya pemberantasan korupsi akan melemah, ketika penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan dana publik, Terutama negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat makin rentan korupsi khususnya Indonesia. Laporan TI menyebutkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi yang menolak transparansi dan menoleransi korupsi, menciptakan kebudayaan impunitas yang pada gilirannya mendorong meluasnya korupsi. Korupsi tidak hanya merampok hak asasi masyarakat miskin, melainkan juga menciptakan masalah pemerintahan dan instabilitas.

Di Indonesia, pemerintahan kini sedang berusaha membenahi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Revolusi mental. TI mengalang kampanye "unmask the corrupt" yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan membeberkan tindakan-tindakan korupsi yang selama ini terselubung.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi

Isu strategis Sulawesi Tengah diperlukan sebagai sumber referensi perencanaan yang bersifat top-down, tetapi juga sebagai upaya sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara Kabupaten Morowali Utara dengan Propinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan holistik-integratif dari perencanaan pembangunan, bertujuan untuk memperhatikan aktifitas daerah lain, sebagai mitra maupun sebagai pesaing dalam peningkatan daya saing daerah. Isu-isu tersebut juga menjadi bahan penting bagi kerja sama antara daerah. Adapun isu-isu Strategis di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

1. Menghentikan Penyebaran Covid-19 dan Upaya Pemulihan Kesehatan

Wabah Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal 2020 telah menjadi ancaman serius dan mengakibatkan kerugian baik materi maupun korban jiwa yang cukup besar. Pemerintah sendiri melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid 19 sebagai bencana non alam di Indonesia yang penyebarannya telah terjadi 34 Provinsi dan 501 Kabupaten/Kota.

Pendapat para epidemiologi, puncak pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi, karena kasusnya sangat dinamis dengan perilaku



masyarakat. Namun, pada kondisi Sulawesi Tengah dimana terjadi peningkatan rendah dari bulan kebulan terhadap penemuan kasus sejak ditemukan pada maret sampai Juli 2020 menjelaskan kondisi ini justru mencerminkan penanganan yang cukup efektif, karena masih dapat terkendali. Untuk kasus Provinsi Sulawesi Tengah dari perkiraan tidak tercapai puncak seperti yang diprediksi banyak pihak.

2. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kondisi empiris ini ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah. Pada Tahun 2016 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 67,47 serta pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi 68,11 hingga Tahun 2020 nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah meningkat sebesar 69,55. Dalam perspektif regional Sulampua Tahun 2020, IPM Sulawesi Tengah menempati ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, angka IPM kabupaten dan kota hanya satu daerah yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Kota Palu. Untuk daerah kabupaten, Tahun 2020 pada umumnya termasuk dalam kategori menengah ke atas. IPM Kota Palu mencapai 81,47 lalu diikuti Kabupaten Morowali sebesar 72,21 dan Kabupaten Poso 71,28 berada pada urutan ke-tiga. Sementara Kabupaten Morowali Utara dengan capaian 68,39 berada pada peringkat ke-5 dari 13 Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Dilihat dari sisi pencapaiannya, peningkatan tertinggi pada indeks pendidikan, diikuti indeks daya beli dan kesehatan. Indikator (indeks) ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada aspek pendidikan dan ekonomi di kabupaten/kota maupun Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Era Industri 4.0

Motor pemulihan ekonomi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami transformasi dari ekonomi tradisional ke arah ekonomi digital karena berbagai alasan. Pertama, penggunaan teknologi digital akan memperbaiki proses produksi dan pemasaran sehingga meningkatkan efisiensi, dimana biaya produksi dan pemasaran menjadi lebih murah dan keuntungan semakin meningkat. Kedua, ketergantungan manusia pada teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga mau tidak mau sebanyak mungkin aktivitas manusia dilakukan melalui teknologi digital. Ketiga, faktor social distancing di era normal baru membuat *physical contactless* semakin diminati masyarakat, sehingga korporasi termasuk UMKM berlomba-lomba mengembangkan inovasi dan proses bisnis yang berbasis teknologi digital. Keempat, bukti empiris dari berbagai studi dan penelitian



memperlihatkan bahwa adopsi teknologi digital memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dunia.

Prospek ekonomi digital sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah adalah jalan keluar baru ditengah dan pasca pandemi Covid-19. Kelima, globalisasi ekonomi saat ini menemukan titik keseimbangan baru, dimana semua daerah berlomba memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya sehingga ke depan ekonomi digital akan menjadi fondasi konektivitas dan perdagangan antar wilayah dan lintas negara, dimana peran pemerintah daerah mempersiapkan masyarakat untuk meleak teknologi informasi.

4. Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi

Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalami penurunan periode 2013-2020. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah Maret 2020 mencapai 398,73 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 5,30 ribu orang dibandingkan September 2019, jika dibandingkan Maret 2018, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 11,63 ribu orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotatan Sulawesi Tengah turun sebesar 0,73 ribu orang, dan daerah perdesaan turun sebesar 4,57 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun 8,90 persen menjadi 8,76 persen, sedangkan di perdesaan turun dari 15,01 persen menjadi 14,69 persen. Persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah Maret 2020 turun menjadi sebesar 12,92 persen.

Tabel 4.1
Capaian Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah 2019-2020

Daerah/Tahun (1)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) (2)	Persentase Penduduk Miskin (3)
Perkotaan		
Maret 2018	84,78	9,32
September 2019	81,46	8,90
Maret 2020	80,73	8,76
Perdesaan		
Maret 2018	325,62	15,26
September 2019	322,57	15,01
Maret 2020	318,00	14,69
Total		
Maret 2018	410,40	13,48
September 2019	404,03	13,18
Maret 2020	398,73	12,92

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Suseknas)
Maret 2018, September 2019, Maret 2020

Meningkatnya jumlah penduduk miskin tentu saja akan mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah, yang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin, maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan memberikan indikasi



bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicapai tersebut belum memberikan dampak perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlunya pemerintah daerah menyiapkan mekanisme transmisi secara langsung maupun tidak secara langsung yang menyentuh kepada masyarakat atau rumah tangga miskin.

5. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Berkualitas

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka peningkatan daya saing serta untuk pemeratakan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota secara berkeadilan. Meski pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di atas rata-rata nasional, namun masih bertumpu pada Sektor Pertambangan dan Penggalian serta Sektor Industri Pengolahan. Dimana, pertumbuhannya tinggi, tetapi relatif belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Tantangan terbesar yang dihadapi Sulawesi Tengah saat ini adalah permasalahan pengendalian harga- harga barang dan jasa. Inflasi pada November 2019 tercatat sebesar 7,27 persen (yoy), atau secara akumulatif telah mencapai 5,29 persen (ytd), dan menurun pada Oktober 2020 menjadi 0,41 persen. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga barang dan jasa konstruksi, seperti; jasa tukang bukan mandor, besi beton, seng, dan semen, yang disebabkan oleh tingginya permintaan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk renovasi atau pembangunan infrastruktur pasca bencana, dan infrastruktur pasca terjadinya bencana alam. Sementara itu, sisi penawaran, terdapat hambatan dalam proses distribusi barang dikarenakan bongkar muat barang di pelabuhan masih terkendala karena kerusakan beberapa fasilitas penunjang bongkar muat akibat Tsunami.

Sementara itu, stabilitas keuangan di Provinsi Sulawesi Tengah masih terjaga baik. Dari sisi keuangan korporasi, potensi sumber kerentanan terpantau aman, yang terindikasi dan perkembangan harga komoditas andalan di pasar global (nikel dan gas) dan kondisi negara mitra dagang cukup stabil. Dengan demikian, kinerja ekspor ke depan diperkirakan tetap positif. Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan menurunnya harga komoditas di Sektor Pertanian seperti kelapa sawit, dan kakao. Sementara itu, dari sisi sektor rumah tangga, kondisinya terpantau sedikit mengalami pelemahan seiring dengan terjadinya bencana.

6. Pembangunan Infrastruktur

Kondisi wilayah geografis dan topografi Provinsi Sulawesi Tengah yang sangat luas dan tidak merata sebaran penduduk, terutama pada daerah-daerah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil serta



pulau-pulau, sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi, serta kelistrikan.

7. Reformasi Birokrasi, Penegakkan Supremasi Hukum Dan HAM Belum Optimal

Prinsip implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel masih menghadapi beberapa permasalahan dan diperlukan penanganan secara mendasar, terencana, dan sistematis. Kondisi kelembagaan pemerintah daerah dari aspek struktur maupun fungsi belum sepenuhnya efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga kualitas pelayanan publik (public services) belum optimal. Selain itu, rendahnya citra dan kinerja aparatur sipil negara di pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dari sisi hukum dan penegakkan hak asasi manusia, masih dirasakan budaya taat hukum masyarakat rendah sebagai akibat dari rendahnya pemahaman, kesadaran, dan ketaatan hukum masyarakat serta kepastian dan keadilan hukum masih rendah dan belum merata, selain itu, kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama fungsional penegakkan, serta penyerasian tugas-tugas antara semua unsur aparatur pemerintah daerah di bidang pembinaan tertib hukum dalam usaha terselenggaranya ketertiban, dan kepastian hukum masyarakat. Masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai kasus hukum sehingga perlu upaya yang terus menerus untuk memperbaikinya.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Lingkungan Dan Berkelanjutan Belum Optimal

Pengelolaan sumberdaya alam yang belum memperhatikan fungsi dan tata kelola lingkungan hidup mengakibatkan daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumberdaya alam semakin berkurang. Penurunan kualitas sumberdaya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi hutan, akibat terjadinya pembalakan liar, penambangan liar, rusaknya wilayah laut akibat penangkapan ikan yang melanggar dan merusak. Selain itu, meningkatnya konservasi hutan dan meluasnya alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk kegiatan ekonomi lainnya dan perumahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan



tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya perikanan dibanding potensinya.

9. Potensi Bencana Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah adalah wilayah yang memiliki risiko tinggi terhadap multi ancaman, termasuk juga epidemi dan pandemi penyakit, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem dan abrasi, banjir bandang, tanah longsor, dan gempa bumi, serta likuifaksi. Berdasarkan rencana nasional penanggulangan bencana Tahun 2015-2020 dikeluarkan BNPB, beberapa kabupaten dan kota yang memiliki risiko ancaman sedang dan tinggi, termasuk juga diantaranya: Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Poso, Kabupaten Kepulauan Banggai, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Sigi, serta wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat risiko tinggi akan ancaman gempa bumi. Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampo dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara Kota Palu;
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah;
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.

Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR. Pasca gempa bumi ini, terdapat beberapa kejadian gempa bumi lainnya, sebagai berikut:

1. Tsunami

Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki ancaman risiko tinggi akan Tsunami, beberapa peristiwa Tsunami yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah tersebut:

- a. 30 Januari 1930, gempa di Pantai Barat Kabupaten Donggala yang disertai Tsunami setinggi dua meter;



Gambar 4.3
Wilayah Terdampak Gempa Dan Tsunami



Sumber: BIG, LAPAN dan BNPB

- b. 14 Agustus 1938, gempa berkekuatan 6 SR berpusat di Teluk Tambu Kecamatan Balaesang Donggala dan menyebabkan Tsunami setinggi 8 hingga 10 meter di Pantai Barat Kabupaten Donggala. Akibat dari kejadian ini ratusan orang meninggal dunia dan seluruh desa di pesisir pantai barat Donggala hampir tenggelam;
- c. 1 Januari 1996, gempa berkekuatan 7,4 SR berpusat di Selat Makassar sehingga mengakibatkan Tsunami di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala dan Tolitoli.

2. Likuifaksi

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Donggala dan Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah disekitarnya mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuifaksi. Wilayah Balaroa dan Patobo di Kota Palu, serta Desa Jono Oge dan Desa Sibalaya Selatan di Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami likuifaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblasnya wilayah tersebut. Terjadinya likuifaksi dimana hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

4.2.4. Isu Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode Ke-Empat Kabupaten Morowali Utara.

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan



langkah- langkah per lima Tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai “Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penganggaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berdasarkan kebutuhan daerah, Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 Tahun. Dengan demikian Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 disusun mengikuti periodisasi RPJPD Kabupaten Morowali Utara yaitu periode ke-4 (empat) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Berikut ini adalah uraian mengenai sasaran pokok yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam tahap ke-4 RPJPD atau lima Tahun ke-empat pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali Utara. Prioritas Pembangunan Pada Tahap Ke-4 Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Peningkatan Ekonomi dan peningkatan investasi daerah;
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kompetensi sumber daya aparatur;
4. Peningkatan Infrastruktur;
5. Tertatanya Sarana dan Prasarana pelabuhan laut sebagai gerbang ekonomi maritim;
6. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal;
7. Pembangunan inklusif dan lingkungan berkelanjutan.



Gambar 4.4
Tahapan dan Prioritas Pembangunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD
Tahun 2021-2026



Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahap 4 (2021- 2025) sebagai berikut.

1. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
2. Terbentuknya sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dari kabupaten sampai desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
5. Meningkat daya saing daerah;
6. Meningkatnya investasi daerah;
7. Pembangunan inklusif yang merata;
8. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan supremasi hukum;
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
10. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah;
11. Tersedianya akses informasi dan komunikasi;



12. Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
13. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
14. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan alam;
15. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana;
16. Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana.

Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahap 4 (2021- 2025) sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Membentuk sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
4. Memantapkan pembangunan Infrastruktur daerah;
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
6. Peningkatan daya saing daerah;
7. peningkatan investasi daerah;
8. Pembangunan inklusif yang merata;
9. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
10. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar SKPD dalam perencanaan daerah;
11. Penegakan supremasi hukum dan jaminan kepastian hukum;
12. Pelibatan semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan secara berjenjang;
13. Membangun dan memperluas jejaring bisnis dan investasi dengan berbagai pihak;
14. Peningkatan kualitas dan intensitas promosi investasi daerah di berbagai media/event;
15. Penataan infrastruktur wisata dan mengoptimalkan memasarkan pariwisata Morowali Utara;
16. Peningkatan aksesibilitas (transportasi dan komunikasi) menuju Daerah Tujuan Wisata (DTW);
17. Penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penataan tata ruang Ibukota kabupaten;
18. Memfasilitasi pembangunan partisipatif dan pengembangan desa secara mandiri berbasis sumber daya lokal;



19. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan pengorganisasian masyarakat desa;
20. Pengendalian dan pemanfaatan potensi pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kearifan tradisional;
21. Pengelolaan sumberdaya alam secara profesional dan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang efisien;
22. Pengelolaan Tata Ruang/Wilayah Kabupaten Morowali Utara, terutama daerah kawasan cagar alam;
23. Penegakan hukum perlindungan kawasan hutan dan asset tambang;
24. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana;
25. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana;
26. Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana

4.2.5. Penelaahan RTRW Kabupaten Morowali Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036 menjadi regulasi dan dokumen yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026. Perumusan substansi RTRW Kabupaten Morowali Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, dimaksudkan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Morowali Utara, arah pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 20 tahun kedepan adalah menuju Kabupaten Agraris dan Maritim yang terpadu dengan memprioritaskan pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Oleh karena itu visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara kedepan adalah Kabupaten Morowali Utara sebagai **Kabupaten Agraris dan Maritim dengan berbasiskan pertanian, perkebunan dan kelautan yang terpadu dan berkelanjutan.**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi dari Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka dirumuskan sebuah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Morowali Utara, sebagai berikut :



“Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan dukungan sarana dan prasarana yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibawah semboyan TEPO ASA AROA”

Adapun poin-poin penting yang terkandung dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan Kawasan Agropolitan yang menaungi kegiatan agribisnis pertanian, perikanan dan perkebunan;
- 2 Mewujudkan pusat pengolahan hasil pertambangan dan pengembangan kawasan pariwisata;
- 3 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas SDM;

Kabupaten Morowali Utara dalam mengembangkan wilayahnya tidak akan terlepas dari menumbuhkembangkan sector ekonomi umumnya sektor pengembangan pangan sebagai keunggulan Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian diharapkan dalam Rencana Tata Ruang ini, Kabupaten Morowali Utara akan menjadi wilayah Kabupaten yang efisien dan mewujudkan Kabupaten Morowali Utara sebagai penghasil pangan terbesar di Provinsi Sulawesi tengah.

- 4 Mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat melayani masyarakat, akan diwujudkan dalam Tata Ruang Kabupaten Morowali Utara.

Rumusan strategi merupakan langkah operasional dari kebijakan penataan ruang yang sudah dirumuskan yang dapat dituangkan secara spasial. Strategi yang akan diterapkan dan dilaksanakan tentunya harus mengacu kepada kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga strategi yang akan digunakan akan lebih tepat sasaran. Adapun strategi-strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Pengembangan. wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat kawasan agropolitan, terdiri atas :
 - a. mengembangkan kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur;



- b. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pusat agroindustri dari pusat produksi menuju pusat distribusi;
 - c. mencetak sawah baru pada kawasan potensial;
 - d. mengembangkan jaringan irigasi & bendungan untuk sumber air irigasi sawah
 - e. menetapkan sawah irigasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. membangun jalan produksi pada kawasan perkebunan rakyat;
 - g. memberikan insentif usaha pada kawasan perkebunan rakyat;
 - h. mengarahkan pembangunan kawasan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan pada Kawasan Agropolitan di Ronta dan Lembobelala Kecamatan Lembo Raya; Londi Kecamatan Mori Atas dan Bunta Kecamatan Petasia Timur; dan
 - i. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kawasan perkebunan.
2. Pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai pusat Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
- a. menata dan mengembangkan kawasan pesisir disekitar Teluk Tolo, baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 - b. Mengembangkan kawasan minapolitan di Kecamatan Petasia Timur, dan Petasia Timur ;
 - c. membuka peluang investasi yang seluas-luasnya bagi usaha di bidang perikanan dan kelautan dengan pemberian insentif usaha bidang perikanan; dan
 - d. menciptakan dan mengembangkan peluang pasar yang seluas- luasnya bagi produk perikanan dengan komoditas unggulan dengan cara promosi produk perikanan Kabupaten Morowali Utara.
3. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pertambangan , terdiri atas :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;
 - b. Memfasilitasi peningkatan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral;



- c. Mendorong penyelidikan/pemetaan geologi, energi dan sumber daya mineral untuk menyiapkan data cadangan potensi serta melakukan inventarisasi dan pemuktakhiran data potensi geologi, energi dan sumberdaya mineral;
 - d. Meningkatkan pelayanan informasi geologi, energi dan sumberdaya mineral baik untuk keperluan explorsasi, penataan ruang, mitigasi bencana alam geologi dan konservasi;
 - e. Mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan pengawasan pelaksanaan “good mining practic” serta reklamasi dan pasca tambang;
 - f. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan; dan
 - g. membangun smelter pada sekitar kawasan pertambangan.
4. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam pariwisata, terdiri atas :
- a. meningkatkan promosi obyek wisata alam dan bahari di Teluk Tolo;
 - b. mengembangkan kawasan Teluk Tolo dan sekitarnya sebagai pusat pelayanan serta salah satu daya tarik rekreasi dan pariwisata daerah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi dan infrastruktur dari dan menuju Teluk Tolo untuk mengembangkan pariwisata daerah;
 - d. mengembangkan potensi desa disekitar Teluk Tolo untuk dikembangkan sebagai desa wisata; dan
 - e. mengembangkan dan melestarikan wisata sejarah budaya.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana, terdiri atas :
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, pertambangan dan bidang bidang pendukung lainnya;
 - b. Mengembangkan sistem usaha pertanian, perkebunan, pariwisata dan kelautan berbasis masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna.
6. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah, terdiri atas :



- a. memantapkan pengembangan PKW didukung oleh pusat kegiatan PKL, PPK dan PPL yang saling berhirarki dan saling interdependen;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan Kolonodale untuk mendukung fungsi Kawasan Andalan Teluk Tolo yang didukung oleh pembangunan terminal peti kemas di Tanjung Koya desa Koya (kec. Petasia);
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Kolonodale untuk mendukung fungsinya sebagai pusat distribusi dan outlet perdagangan di Kawasan Andalan Teluk Tolo;
 - d. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan menuju ke pusat agroindustri;
 - e. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda dari lokasi pusat agroindustri menuju pusat distribusi;
 - f. mengembangkan sistem transportasi intermoda pada kawasan pariwisata;
 - g. mengembangkan jaringan dan sumber energi alternatif;
 - h. mengembangkan dan merehabilitasi sarana prasarana sumber daya air baku dan air minum;
 - i. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah kabupaten;
 - j. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
 - k. mengembangkan sarana prasarana pengolahan limbah;
 - l. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan; dan
 - m. mengembangkan kawasan permukiman yang layak huni.
7. Pembangunan wilayah yang berkelanjutan, terdiri atas :
- a. melaksanakan rehabilitasi dampak perusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya pada Cagar Alam Morowali ;
 - c. menetapkan batas kawasan konservasi terutama Cagar Alam Morowali ;
 - d. melindungi pelestarian ekologi pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan perlindungan bencana pesisir; dan
 - e. mengoptimalkan fungsi hutan bakau.



- f. menegaskan garis sempadan pantai dan membangun jaringan jalan inspeksi pantai diluar garis sempadan pantai
 - g. merelokasi permukiman yang termasuk kedalam garis sempadan pantai; dan
 - h. menetapkan kawasan rawan bencana pada wilayah-wilayah yang sering terjadi bencana dan terancam bencana.
8. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara mempertimbangkan potensi pengembangan wilayah belakang ibukota kecamatan. Potensi wilayah belakang ibukota kecamatan yang membentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut.

Tabel 4.2
Potensi Pengembangan Wilayah Belakang Kota Kecamatan

No	Ibukota Kecamatan	Kecamatan	Potensi pengembangan wilayah belakang
1	Beteleme	Lembo	Tanaman pangan (padi), peternakan (ayam petelur, ayam pedaging, itik), perikanan
2	Tomata	Mori Atas	Tanaman pangan (padi), perkebunan kelapa dalam, kelapa hibrida, cengkeh, kakao, kemiri), hortikultura (durian), peternakan (ayam buras, sapi), kehutanan (rotan),



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Ibukota Kecamatan	Kecamatan	Potensi pengembangan wilayah belakang
3	Mayumba	Mori Utara	Tanaman pangan (padi), perkebunan kelapa dalam, kelapa hibrida, cengkeh, kakao, kemiri), hortikultura (durian), peternakan (ayam buras, sapi), kehutanan (rotan),
4	Kolonodale	Petasia	Tanaman pangan (Padi, kedelai), perkebunan (kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, lada), hortikultur (durian), peternakan (sapi),
5	Lembah Sumara	Soyo Jaya	Tanaman pangan (padi), perkebunan (kelapa hibrida, lada),
6	Baturube	Bungku Utara	Peternakan (kambing, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging), hortikultura (durian)
7	Tanasumpu	Mamosalato	Kelapa dalam, kelapa hibrida, kakao, cengkeh, perikanan(tangkap), peternakan (itik), hortikultura (durian, langsung)

Sumber: RTRW Morowali Utara, 2016-2036

Rencana Pusat Kegiatan

Pusat permukiman sebagai pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara yang dituju hingga akhir tahun perencanaan tahun 2031 terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai berikut.



Tabel 4.3

Rencana Pusat Kegiatan Kabupaten Morowali Utara 2016-2036

No.	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
1	Kolonodale	PKW	Petasia	• Ibukota kabupaten • Pusat pelayanan regional • Pusat distribusi barang • Perdagangan & jasa • Simpul transportasi regional • Permukiman perkotaan
2	Beteleme	PKL	Lembo	• Ibukota kecamatan • Permukiman perkotaan • Perdagangan & jasa • Pengolahan hasil pertanian • Pusat pelayanan local antar kecamatan
3	Tomata	PPK	Mori Atas	• Ibukota kecamatan • Simpul transportasi • Permukiman perkotaan • Pusat pelayanan desa
4	Mayumba	PPK	Mori Utara	• Ibukota kecamatan • Perkebunan • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa
5	Lembah Sumara	PPK	Soyo Jaya	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No.	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
6	Baturube	PPK	Bungku Utara	• Ibukota kecamatan • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa • Simpul transportasi penyeberangan
7	Tanasumpu	PPK	Mamosalato	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan • Pusat pelayanan desa
8	Bungintimbe	PPL	Petasia Timur	• Ibukota kecamatan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan
9	Towara Pantai	PPL	Petasia Timur	• Kawasan Minapolitan • Permukiman perdesaan
10	Bunta	PPL	Petasia Timur	• Kawasan Agropolitan • Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan
11	Bahoue	PPL	Petasia	• Kawasan Minapolitan • Permukiman perkotaan
12	Ronta	PPL	Lembo Raya	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
13	Lembobelala	PPL	Lembo	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
14	Ensa	PPL	Mori Atas	• Perkebunan • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa
15	Londi	PPL	Mori Atas	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan



No.	Desa/ Kelurahan	Pusat Kegiatan	Kecamatan	Fungsi
16	Lembontonara	PPL	Mori Utara	• Perkebunan • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa
17	Bau Molino	PPL	Soyo Jaya	• Perkebunan • Permukiman perdesaan
18	Tokala Atas	PPL	Bungku Utara	• Permukiman perdesaan • Kebun
19	Siliti	PPL	Bungku Utara	• Kawasan Agropolitan • Permukiman perdesaan
20	Pandauke	PPL	Mamosalato	• Pertanian lahan basah • Permukiman perdesaan

Sumber: RTRW Morowali Utara, 2016-2036

4.2.6. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

Hasil rumusan isu strategis Daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah ini akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan berikut program-program pembangunannya. Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya memperhatikan penelaan Isu-Isu strategis KLHS RPJMD 2021-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah sebagai mana dalam Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5
Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun



Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, *tracing*, *testing*, *treatment*, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja (Indonesia, 2020).



Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah-langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar.

Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengaman sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara.

Tahun 2020, stimulus fiskal juga diterapkan oleh pemerintah Pusat untuk mengerakkan ekonomi Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp. 695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakan untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel.

Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak dan hubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.



2. Peningkatan Ekonomi yang Inklusif dan Pengetasan Kemiskinan

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berkualitas atau inklusif jika pertumbuhan ekonomi berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadi pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir di tengah masyarakat.

Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.

Kabupaten Morowali Utara masih memiliki isu strategis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun penurunan angka kemiskinannya cenderung melambat. Pada sisi lain, Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu tantangan penurunan angka kemiskinan adalah masih banyaknya masyarakat miskin, atau golongan menengah kebawah, yang termasuk masyarakat miskin berbasis Komunitas Adat Terpencil (KAT). Hal ini terlihat dari periode tahun 2015-2019, penurunan persentase penduduk miskin yang sangat kecil yakni hanya sebesar 1,83 persen. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 19.810 orang atau sebesar 16,91 persen. Setiap Tahun angka kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 15,08 persen atau



sebanyak 19.250 jiwa. Faktor penyebab tingginya kemiskinan di Kabupaten Morowali Utara adalah masalah kultur/budaya.

Sejalan dengan hal itu konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali Utara.

3. Era Industri 4.0 dan Teknologi Digital

Saat ini merupakan era *“sharing & platform based”*. Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi dan, (2) model bisnis berbasis platform. Model bisnis platform based misalnya; (1) Perusahaan ‘transportasi’ tanpa kendaraan, (2) Penyedia *“breaking news”* tanpa menyusun berita, (3) Penyedia *photosharing* tanpa membuat foto, (4) Jasa komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi, (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki inventory, (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar, (7) Media populer tanpa membuat content, (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapat virtual dan pengelolaan kantor dari jarak jauh, (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.

Tantangan saat ini adalah untuk mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah, maupun Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, juga diperlukan Langkah-langkah mengkombinasikan industri 4.0 dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online.



Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online, *Work from Home* (WFH) dan budaya rapat daring (*online*) menjadi sebuah kebiasaan baru didalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan. Transaksi ekonomi juga dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidaklah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital ini berhasil mengurangi kecepatan laju penularan virus corona ke seluruh umat manusia, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali Utara akan berjalan seiring dengan adaptasi pada teknologi Pendidikan saat ini.

4. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdataman, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.

Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik.

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2015 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 409,88 Km atau 44,84 persen dari panjang jalan keseluruhan 921,39 Km, data menurun sangat signifikan Tahun 2016 menjadi sebesar 12,67 persen atau sepanjang 120,4 Km dari panjang jalan 950,30 Km. Hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,44 persen.

Perkembangan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Morowali Utara befluktuatif. Hal ini ditunjukan pada Tahun 2015 jaringan irigasi sebesar 38,29 persen, meningkat Tahun 2017



menjadi sebesar 48,77 persen, dan menurun pada periode Tahun 2018-2019 masing-masing menjadi sebesar 47,58 persen dan sebesar 47,09 persen. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, disisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat diperlukan.

Pembangunan sarana dan Prasarana perkantoran dan Pelayanan publik juga masih diperlukan dimasa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali Utara baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupun di desa.

5. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas

Perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di masa mendatang.

Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam periode Tahun 2021-2026.

Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan: 1) standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2) rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmented dan mengedepankan ego-sektoral; 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi



dunia bisnis/ pelaku swasta dalam bentuk kelembagaan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut; 5) aplikasi layanan online tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini.

Di samping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN

Kualitas Sumberdaya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), dan aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

IPM Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari



peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah terjadi perbaikan besar- besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan. Kondisi IPM kabupaten Morowali Utara 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 IPM Kabupaten Morowali Utara sebesar 66,00; Tahun 2016 menjadi sebesar 66,57; Tahun 2017 menjadi sebesar 67,35 dan hingga Tahun 2019 sebesar 68,45.

Gambar 4.6
Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

Pada akhir Tahun 2020, sejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Morowali Utara telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada seluruh aspek pembangunan, sehingga diperkirakan dampak dari COVID-19 tersebut akan mempengaruhi terhadap sasaran pembangunan kemungkinan terkoreksi, termasuk juga Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali Utara juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi dan industri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif,



simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

7. Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut.

Kabupaten Morowali Utara memiliki curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa. Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana antara lain:

1. Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Kawasan rawan gelombang pasang rawan berada di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.
3. Kawasan Rawan Banjir. Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
4. Kawasan Rawan Gempa Bumi. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup terkait dokumen perencanaan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif



untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 telah diselenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah. Namun, terdapat penurunan kualitas lingkungan (*environmental degradation*), di daerah Kabupaten Morowali Utara ditemukan pada daerah eks tambang yang tidak direklamasi, sehingga menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor dan banjir (khususnya pada musim penghujan) daerah rawan bencana tersebut dapat di masukkan ke dalam daerah lahan kritis, maupun ditetapkan menjadi daerah rawan bencana.

8. Pelaksanaan dan Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDG's).

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. Pertama, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki aspek-aspek yang perlu diselesaikan secara bersama oleh dunia global antara lain: kehidupan yang sehat dan layak, keamanan dan ketahanan pangan, sumber air bersih, energi yang aman, ekosistem yang produktif dan sehat, kebijakan yang berpihak terhadap komunitas. Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali Utara pada khususnya.

Metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan



agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJM Nasional 2020-2040 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat.

Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara guna mendukung Pencapaian RAD SDGs Provinsi Sulawesi Tengah antara lain terkait angka stunting yang masih tinggi dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah Morowali Utara siap mendukung Major Project Stunting dan mengikuti SE Mendagri No. 440/2701/SJ Ttg Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan penyusunan Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.



Gambar 4.7
Keterkaiatan Isu-Isu startegis International, Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara



BAB V

VISI, MISI DAN TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menegaskan semangat, tekad yang kuat dan bulat, cita-cita dan harapan rakyat Morowali Utara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera sebagai dasar perumusan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, skenario pembangunan, dan prioritas daerah lima tahun ke depan sebagai acuan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan.

5.1 Visi dan Misi

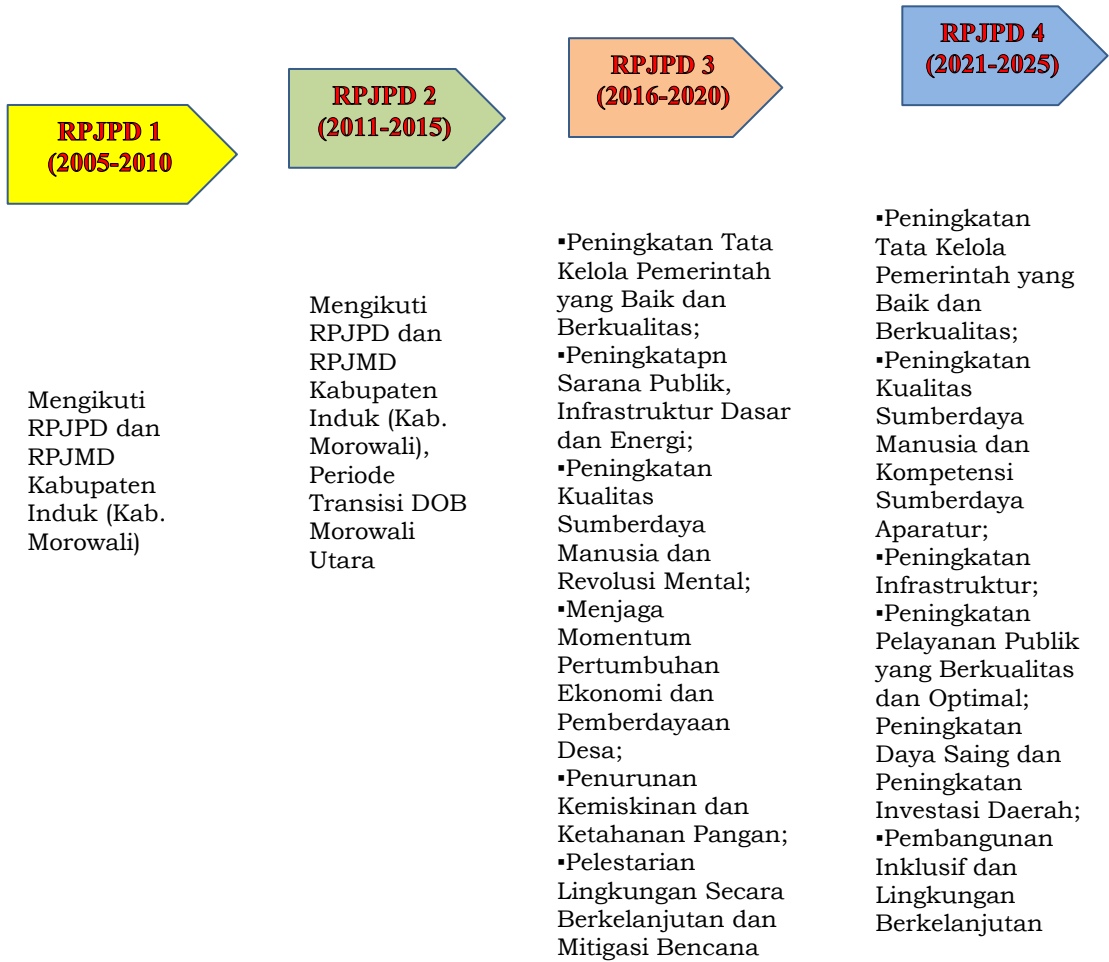
5.1.1 Visi

Perumusan visi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, khususnya pada tahapan pembangunan jangka panjang. Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai “Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penganggaran.

Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berdasarkan kebutuhan daerah, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 merupakan tahap terakhir dalam pentahapan pembangunan dalam RPJPD 2005-2025, dimana telah dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disajikan dalam gambar 5.1 sebagai berikut.



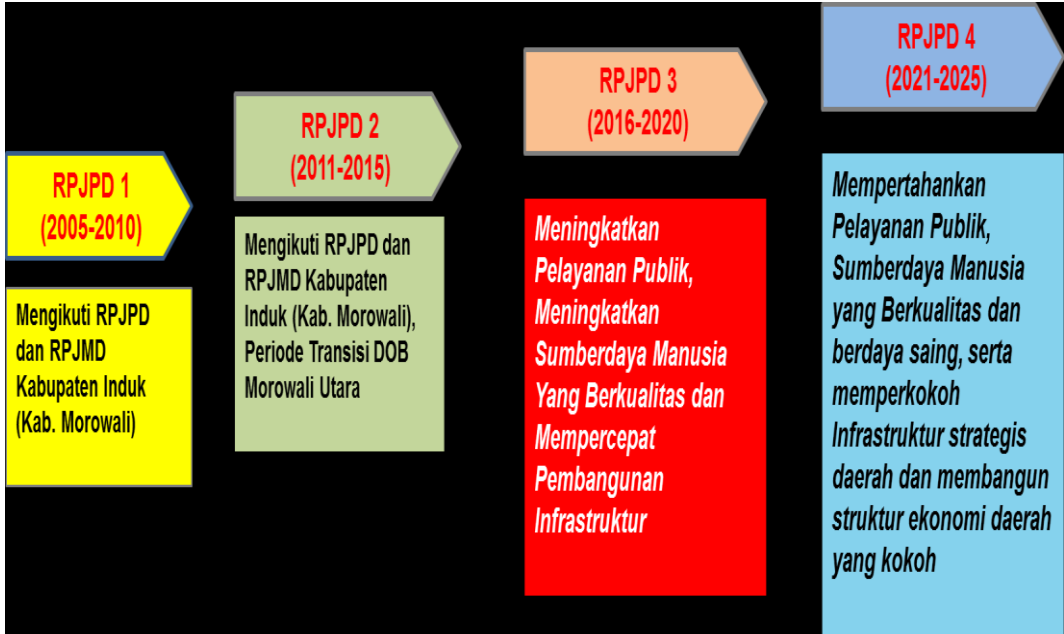
Gambar 5.1
Tahapan dan Prioritas Pembangunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025



Agar memiliki arah dan fokus yang jelas, pembangunan jangka panjang di Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan tema pembangunan di masing-masing tahapan pembangunan. Perumusan tema pembangunan sesuai prioritas dan arah kebijakan pembangunan disajikan dalam Gambar 5.2 sebagai berikut. Adapun Tema Pembangunan Lima Tahun Ke-4 (2021-2025) adalah “Mempertahankan Pelayanan Publik, Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Memperkokoh Infrastruktur Strategis Daerah dan Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh”. Tema tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yang kemudian disinergikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yang memiliki tekad dan semangat yang sejalan dengan arahan pembangunan jangka panjang daerah.



Gambar 5.2
Tema Pembangunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025



Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Di samping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujudkan dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.



Tabel 5.1
Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara

Visi RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025	RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Gerak Cepat Menuju Suawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

Penjelasan rinci dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar. Serta didukung dengan pendidikan



Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Sejahtera	karakter. Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

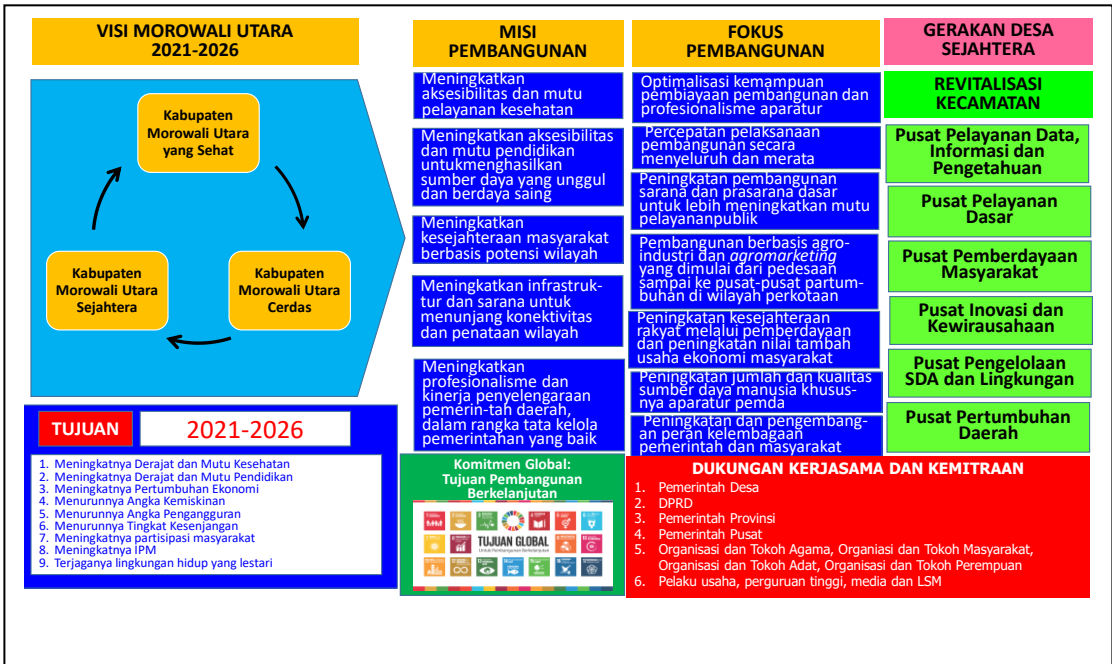
5.1.2 Misi

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
- (2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
- (4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
- (5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 5.3.
Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan
Kabupaten Morowali 2021-2026



Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk :
 - meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata di semua kecamatan.
 - memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
 - menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
 - memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.
- Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :
 - menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
 - mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
 - meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.



- d. meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :
 - a. meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
 - b. memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
 - c. meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.
 - d. meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan.
- (4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk :
 - a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
 - b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
 - c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
 - d. meningkatkan integrasi antarmoda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya di pusat-pusat kegiatan lokal.
 - e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.
- (5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
 - b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
 - c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
 - d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah,

- organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
- e. meningkatkan kerjasama pembangunan antardaerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Gambar 5.4.
Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026



Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, disajikan pada Tabel 5.3, sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
	2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah



Visi	Misi
	4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
	5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian Misi yang menjadi penjabaran dari Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 yaitu “Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan”, sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Periode 2005-2025.

Berikut ini adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahap ke-4 RPJPD atau lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali Utara.

- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
- Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kompetensi sumber daya aparatur;
- Peningkatan Infrastruktur;
- Tertatanya Sarana dan Prasarana pelabuhan laut sebagai gerbang ekonomi maritim;
- Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal;
- Peningkatan daya saing dan peningkatan investasi daerah;
- Pembangunan inklusif dan lingkungan berkelanjutan.

Sementara sasaran pokok RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahap 4 (2021-2025) adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas;
- Terbentuknya sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;
- Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dari kabupaten sampai desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
- Meningkat daya saing daerah;
- Meningkatnya investasi daerah;
- Pembangunan inklusif yang merata;
- Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan supremasi hokum;



- i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- j. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah;
- k. Tersedianya akses informasi dan komunikasi;
- l. Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- m. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- n. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan alam;
- o. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana;
- p. Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana.

Keterkaitan misi RPJDD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.4, sebagai berikut:

Tabel 5.4
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025	Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis (good governance),	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 2: Mewujudkan pelayanan publik (public services) yang merata, terjangkau dan berkualitas	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), produktivitas daerah (regional productivity) dan iklim investasi (investment climate),	Misi 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Misi 4: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang baik dan memadai,	Misi 4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
Misi 5: Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,	Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
Misi 6: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam(natural resources) dan lingkungan yang berkelanjutan	Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah



Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, di samping berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, maka perlu pula memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJM Nasional 2020-2024, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara menjadi bagian integral dari program provinsi dan nasional. Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 sebagai arah dan kebijakan pembangunan yang selaras, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.5 dan Tabel 5.6, sebagai berikut:

Tabel 5.5
Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026
Misi 1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	Misi 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan	Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Misi 4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
Misi 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.	Misi 4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
Misi 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.	Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
Misi 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.



Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026
Misi 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.	Misi 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Misi 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 5.6
Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026
Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.	Misi 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
Misi 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Misi 4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 8. Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Morowali Utara 2021-2026, maka keterkaitan antara agenda pembangunan nasional



RPJMN 2020-2024, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

- (1) Misi Kesatu: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga, kelima, keenam, dan kesepuluh;
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keempat, kelima, dan kesepuluh;
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu dan kedua dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh;
- (4) Misi Keempat: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional kelima dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, kesepuluh, dan kesebelas;
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional keempat dan ketujuh dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, ketiga, keempat, kesepuluh dan kesebelas;

5.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

5.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Makro Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran makro daerah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah



2021-2026 dan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang menekankan perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur strategis, pemerataan pembangunan antarwilayah; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan.

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan daerah Morowali Utara selama 2016-2020, pembangunan ekonomi daerah disusun dengan skenario optimis yang didukung dengan pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

- (1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
- (2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
- (3) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih dan meningkat dari minus 0,2 persen pada tahun 2020 menjadi 8,8 persen pada tahun 2026;
- (4) Tingkat pengangguran terbuka akan menurun dari 5,2 persen pada tahun 2020 menjadi 4,3 persen pada tahun 2026;
- (5) Tingkat kemiskinan akan menurun 14,1 persen pada tahun 2020 menjadi 8,5 persen pada tahun 2026;
- (6) Nilai IPM akan meningkat dari 68,5 pada tahun 2019 menjadi 72,6 pada tahun 2026.
- (7) Rasio Gini akan stabil di angka 0,30 pada tahun 2019 menjadi 0,30 pada tahun 2026.

Tabel 5.7
Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021-2026

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Jumlah penduduk	000 jiwa	122,7	124,5	126,4	128,3	130,2	132,2	134,2
2. Pertumbuhan Penduduk	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,2	5,0	6,8	7,2	7,7	8,2	8,8
4. Pertumbuhan PDRB perkapita	%	-1,7	3,5	5,3	5,7	6,2	6,7	7,2
5. Jumlah Angkatan Kerja	jiwa	67436	68447	69474	70516	71574	72647	73737



Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6. Pertumbuhan Angkatan	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	6395 9	6500 5	6613 9	6720 2	6835 3	6945 1	7056 6
8. Jumlah Pengangguran	jiwa	3507	3422	3335	3314	3221	3196	3171
9. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3
10. Jumlah penduduk Miskin	000 jiwa	18,3 8	14,9 4	14,4 1	13,4 7	12,6 3	11,9 0	11,4 1
11. Tingkat Kemiskinan	%	14,1	12,0	11,4	10,5	9,7	9,0	8,5
12. Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,5	69,0	69,7	70,4	71,1	71,8	72,6
13. Rasio Gini	indeks	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

5.2.2 Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara selama Periode 2021-2026, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata

Tujuan 1.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran:

- 1.1.1. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat;
- 1.1.2. Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat ;
- 1.1.3. Meningkatnya status gizi masyarakat;
- 1.1.4. Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- 1.1.5. Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik;
- 1.1.6. Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan.

Misi 2: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

Tujuan 2.1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran:

- 2.1.1. Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah;
- 2.1.2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah;
- 2.1.3. Meningkatnya minat baca masyarakat.

Tujuan 2.2. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja, dengan sasaran:

- 2.2.1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja;
- 2.2.2. Berkembangnya kewirausahaan;



2.2.3. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja;

2.2.4. Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan.

Tujuan 2.3 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, dengan sasaran:

2.3.1. Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga.

Tujuan 2.4 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender, dengan sasaran:

2.4.1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

Tujuan 3.1. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing, dengan sasaran:

3.1.1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata;

3.1.2. Meningkatnya kemudahan berinvestasi.

Tujuan 3.2. Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat, dengan sasaran:

3.2.1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

Tujuan 3.3. Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, dengan sasaran:

3.3.1. Meningkatnya kemandirian desa.

Tujuan 3.4. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan, dengan sasaran:

3.4.1. Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;

3.4.2. Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

3.4.3. Meningkatnya kewaspadaan, kesiap siagaan, dan mitigasi bencana;

Tujuan 3.5. Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten, dengan sasaran:

3.5.1. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah;

3.5.2. Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.

Misi 4 Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah



Tujuan 4.1. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, dengan sasaran:

- 4.1.1. Tersedianya prasarana dan sarana air baku;
- 4.1.2. Tersedianya prasarana dan sarana air bersih;
- 4.1.3. Tersedianya prasarana dan sarana listrik;
- 4.1.4. Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kecamatan.

Tujuan 4.2. Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman, dengan sasaran:

- 4.2.1. Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum.

Tujuan 4.3. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya, dengan sasaran:

- 4.3.1. Terbangunnya jaringan transportasi darat;
- 4.3.2. Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi.

Misi 5 Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan 5.1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan sasaran:

- 5.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif;
- 5.1.2. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- 5.1.3. Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan;
- 5.1.4. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan
- 5.1.5. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau;
- 5.1.6. Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

Tujuan 5.2. Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis, dengan sasaran:

- 5.2.1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

Selanjutnya misi dan tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel 5.8 berikut.



**Tabel 5.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026**

VISI: TERWUJUDNYA MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Misi 1: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52,00	52,00	51,00	49,00	48,00	47,00	46,00	46,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Angka kesakitan per 100 penduduk	12,00	12,00	11,00	10,00	9,00	9,00	8,00	8,00
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,80	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	71,20	71,20



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	98,75%	98,75%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
				Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93,00%	93,00%	94,00 %	95,00 %	95,00%	95,00%	95,00%	95,00 %



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	78,12%	80,33 %	81,53 %	82,74%	83,94%	85,15%	85,15 %
			Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
				Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120,00	120,00	110,00	105,00	100,00	95,00	90,00	90,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70,00	70,00	72,50	74,00	76,50	78,00	80,00	80,00
2	Misi 2: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,30	12,30	12,40	12,50	12,60	12,70	12,80	12,80



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,80	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20	9,30	9,30
				Angka melek huruf	98,12	98,12	98,58	98,58	98,75	99,25	99,50	99,50
			Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SD/MI	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Angka kelulusan SMP/MTs	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Angka kelulusan SMA/ MA/ SMK	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	1,50	1,50	1,80	2,00	2,30	2,60	2,80	2,80
		Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja terampil (tingkat pendidikan diatas SMA/SMK)	29000,00	29000,00	29200,00	29400,00	29600,00	29800,00	30000,00	30000,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pertumbuhan jumlah lulusan Balai Latihan Kerja (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan jumlah wirausahawan baru	100	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	5	5	5	5	5	5	5	5



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	Jumlah teknologi tepat guna yang didiseminasi kan kepada petani, nelayan, dan UMKM	2	2	2	3	3	4	4	4
			Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil	35,12%	40,27%	45,31 %	50,12 %	55,80%	60,31%	60,31%	60,31 %



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Jumlah Dokumen Perencanaan Data dan Informasi Ketersediaan /Penggunaan Material dan Peralatan	35,12%	40,27%	45,31 %	50,12 %	55,80%	60,31%	60,31%	60,31 %
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga	Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi nasional dan internasional	5	5	5	10	10	20	20	20



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender	Meningkatnya partisipasi perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,25	9,25	9.50	9.50	9.75	10.00	10.00	10.00
3	Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah											



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	31,37	31,00	30,56	30,05	29,61	29,15	28,68	28,68
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tahun)	2,51	2,83	2,99	3,20	3,44	3,64	3,85	3,85



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,01	10,05	10,35	10,75	11,25	11,85	12,55	12,55
				Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	5.716	5.716	6.068	6.447	6.812	7.184	7.552	7.552
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN) (persen)	5,41	5,41	5,85	6,27	6,88	7,01	7,21	7,21



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persentase peningkatan produktivitas dan nilai tukar perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM (persen)	5,00	5,00	5,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	12	12	11	10	9	8	8	8
				Jumlah BUMDesa yang aktif	20	20	25	30	35	40	50	50
		Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Air (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Indeks Kualitas Udara (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
				Indeks Tutupan Lahan (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase penyelesaian kasus kerusakan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten	Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Persentase tanah dengan sertifikat								



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase kasus sengketa tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah											



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersedianya prasarana dan sarana air baku	Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik								
				Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	47,09	48,50	50,00	51,50	52,00	53,50	55,00	55,00
			Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	Persentase desa dengan akses air bersih								
				Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	55,50	56,50	57,50	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedianya prasarana dan sarana listrik	Persentase desa dengan akses listrik	93,00	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	95,00
				Persentase rumah tangga dengan akses listrik	93,00	93,00	93,50	94,00	94,30	94,80	95,00	95,00
			Tersedianyan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Pengelolaan Air Limbah	40%	40%	43,89 %	45,37 %	50,45%	55,37%	60,24%	60,24 %



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedianyan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Terhambat	64%	64	65	67	69	71	73,50	73,50
			Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Geudng Kantor yang Terbangun dan Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	61,98%	61,98	63	65	67	69	71	71



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum	Persentase rumah sehat dan layak huni	72,35	73,00	74,00	76,00	78,00	79,00	80,00	80,00
				Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	71,07	72,00	73,00	75,00	77,00	79,00	80,00	80,00
			Tersedianya Pengembangan Permukiman	Jumlah Pembangunan Infrastruktur yang Dibangun	47,98%	47,98	49	51	53	55	57,50	57,50



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun	0%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%
			Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	Panjang Jalan dan Luas Lahan Perumahan	0%	0%	13%	18%	23%	28%	33%	33%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan	0%	0%	5%	10%	15%	20%	25%	25%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Terbangunnya jaringan transportasi darat	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	38%	38%	40%	44%	48%	55%	60%	60%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				Persentase desa dengan akses angkutan darat	48,00	48,00	51,00	56,00	60,00	65,00	70,00	70,00
			Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan internet	7,50	7,50	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
				Persentase Rumah Tangga yang menggunakan handphone/ telpon	5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Misi 5: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik											
		Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Predikat SAKIP	C	CC	B	B	BB	A	A	A
				2. Nilai LPPD	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
				3. Indeks RB								



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
				4. Indeks Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
			Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Indeks Maturitas SPBE								



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	76,61-88,30/ B (baik)	76,61-88,30/ B (baik)	76,61-88,30/ B (baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)
			Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	20 %	20 %	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %	100 %



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10,00%	10,00%	10,00 %	15,00 %	20,00%	25,00%	30,00%	100,00%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
			Implementatif									
				Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Jumlah konflik di masyarakat								
				Jumlah korban kriminalitas								

TABEL TC-14 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF																		
Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Misi 1. : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata																	
1 1	Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																	
1 1 1	Sasaran 1 Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		52,00		51,00		49,00		48,00		47,00		46,00		46,00		
		Angka kesakitan per 100 penduduk		12,00		11,00		10,00		9,00		9,00		8,00		8,00		
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial	100,00%	100,00%	452.618.622,00	0,00%	-	100,00%	276.097.188,18	100,00%	310.128.159,46	100,00%	357.779.824,28	100,00%	364.653.323,06	100,00%	1.308.658.494,98	DINAS SOSIAL DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) Data Kemiskinan Per Tahun	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	93.038.447,84	100,00%	119.259.941,43	100,00%	168.301.533,72	100,00%	380.599.922,98	DINAS SOSIAL DAERAH		
1	1	2	Sasaran 2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20	71,20			
				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	98,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	100,00%	100,00%	88.045.640.410,00	100,00%	91.359.750.416,21	100,00%	81.017.198.643,26	100,00%	98.673.337.310,72	100,00%	83.857.265.740,51	100,00%	87.211.556.370,13	100,00%	442.119.108.480,83	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100,00%	100,00%	96.922.000,00	100,00%	65.159.973,18	100,00%	306.251.531,34	100,00%	244.190.050,54	100,00%	354.010.341,02	100,00%	368.170.754,66	100,00%	1.337.782.650,73	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00%	100,00%	274.043.200,00	100,00%	599.778.446,72	100,00%	604.842.135,14	100,00%	482.271.650,70	100,00%	699.165.060,78	100,00%	727.131.663,21	100,00%	3.113.188.956,56	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	71.935.800,00	100,00%	54.645.143,22	100,00%	180.790.045,03	100,00%	144.153.173,83	100,00%	208.983.593,36	100,00%	217.342.937,10	100,00%	805.914.892,54	DINAS KESEHATAN DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pembangunan gedung rumah sakit	100,00%	100,00%	15.101.299.387,00	100,00%	8.631.585.572,35	100,00%	6.675.588.102,34	100,00%	6.942.611.626,44	100,00%	7.220.316.091,49	100,00%	7.509.128.735,15	100,00%	36.979.230.127,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	0,00%	0,00%	-	100,00%	346.721.528,20	100,00%	822.616.329,59	100,00%	855.520.982,78	100,00%	889.741.822,09	100,00%	925.331.494,97	100,00%	3.839.932.157,64	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	224.671.213,96	100,00%	266.957.556,93	100,00%	277.635.859,21	100,00%	288.741.293,58	100,00%	300.290.945,32	100,00%	1.358.296.868,99	PUSKESMAS LEE
v	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	523.917.913,98	100,00%	546.812.788,93	100,00%	568.685.300,48	100,00%	591.432.712,50	100,00%	615.090.021,00	100,00%	2.845.938.736,90	PUSKESMAS TOMATA
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	696.546.269,45	100,00%	718.629.115,60	100,00%	747.374.280,22	100,00%	777.269.251,43	100,00%	808.360.021,49	100,00%	3.748.178.938,19	PUSKESMAS BETELEME
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	492.521.811,94	100,00%	506.390.264,21	100,00%	526.645.874,78	100,00%	547.711.709,77	100,00%	569.620.178,16	100,00%	2.642.889.838,86	PUSKESMAS PETUMBEA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	485.812.819,53	100,00%	536.269.210,63	100,00%	557.719.979,06	100,00%	580.028.778,22	100,00%	603.229.929,35	100,00%	2.763.060.716,78	PUSKESMAS MOLINO
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	689.382.272,32	100,00%	717.090.561,14	100,00%	745.774.183,58	100,00%	775.605.150,93	100,00%	806.629.356,96	100,00%	3.734.481.524,93	PUSKESMAS KOLONODALE
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	808.583.185,38	100,00%	817.828.192,15	100,00%	850.541.319,84	100,00%	884.562.972,63	100,00%	919.945.491,54	100,00%	4.281.461.161,54	PUSKESMAS BATURUBE
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	242.040.974,24	100,00%	275.323.807,28	100,00%	286.336.759,57	100,00%	297.790.229,95	100,00%	309.701.839,15	100,00%	1.411.193.610,18	PUSKESMAS PANCAMAKMUR
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	639.509.634,86	100,00%	671.773.035,95	100,00%	698.643.957,39	100,00%	726.589.715,69	100,00%	755.653.304,32	100,00%	3.492.169.648,21	PUSKESMAS PANDAUKE
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	143.724.669,48	100,00%	178.177.362,77	100,00%	185.304.457,29	100,00%	192.716.635,58	100,00%	200.425.301,00	100,00%	900.348.426,12	PUSKESMAS WONGKONDAYA

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	231.419.047,21	100,00%	286.580.657,88	100,00%	298.043.884,20	100,00%	309.965.639,56	100,00%	322.364.265,15	100,00%	1.448.373.494,00	PUSKESMAS TAMBAYOLI
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	174.571.945,67	100,00%	236.341.830,07	100,00%	245.795.503,28	100,00%	255.627.323,41	100,00%	265.852.416,34	100,00%	1.178.189.018,77	PUSKESMAS ANUTOLUWU
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	110.890.937,77	100,00%	136.553.835,45	100,00%	142.015.988,87	100,00%	147.696.628,42	100,00%	153.604.493,56	100,00%	690.761.884,08	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	0,00%	-	100,00%	253.216.945,36	100,00%	300.151.078,90	100,00%	312.157.122,06	100,00%	324.643.406,94	100,00%	337.629.143,22	100,00%	1.527.797.696,48	PUSKESMAS MAYUMBA
1	1	3	Sasaran 3 Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100,00%			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
				Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100,00%			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
1	1	4	Sasaran 4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3,00			3,00		3,00		2,00		2,00		2,00				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	1	5	Sasaran 5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004		0,004	
				Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120,00		110,00		105,00		100,00		95,00		90,00		90,00	
1	1	6	Sasaran 6 Meningkatnya mutu keschatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70,00		72,50		74,00		76,50		78,00		80,00		80,00	
2			Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing															
2	1		Tujuan 1 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat															
2	1	1	Sasaran 1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,30		12,40		12,50		12,60		12,70		12,80		12,80	
				Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,80		8,90		9,00		9,10		9,20		9,30		9,30	
				Angka melek huruf	98,12		98,58		98,58		98,75		99,25		99,50		99,50	

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase rata-rata lama sekolah melanjutkan sekolahAPS Angka Putus Sekolah APM APK tingkat SD/MI SMP/Mts	100,00%	100,00%	45.044.699.093,00	100,00%	55.066.854.770,30	100,00%	48.744.329.636,09	100,00%	50.694.102.821,53	100,00%	52.721.866.934,39	100,00%	54.830.741.611,77	100,00%	262.057.895.774,07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase APS dan APK PAUD	100,00%	100,00%	458.695.666,00	100,00%	500.809.572,77	100,00%	459.867.087,51	100,00%	478.261.771,01	100,00%	497.392.241,85	100,00%	517.287.931,53	100,00%	2.453.618.604,67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2	1	2	Sasaran 2 Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SD/MI		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
				Angka kelulusan SMP/MTs		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
				Angka kelulusan SMA/MA/SMK		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guruSD/SDLB SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/S2 dan bersertifikasi pendidik	100,00%	100,00%	1.150.309.637,00	100,00%	1.258.669.448,67	100,00%	1.158.577.522,74	100,00%	1.204.920.623,65	100,00%	1.253.117.448,59	100,00%	1.303.242.146,54	100,00%	6.178.527.190,18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2	1	3	Sasaran 3 Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan		1,50		1,80		2,00		2,30		2,60		2,80		2,80		
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	100,00%	100,00%	95.560.700,00	100,00%	82.064.606,30	100,00%	78.000.000,00	100,00%	81.120.000,00	100,00%	84.364.800,00	100,00%	87.739.392,00	100,00%	413.288.798,30	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Capaian Pemberdayaan UMKM	100,00%	100,00%	777.984.128,00	100,00%	198.214.600,35	100,00%	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	1.148.214.600,35	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2	2	3	Sasaran 3 Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00				
	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Besaran Sengketa Pengusahan Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%	152.887.400,00	100,00%	105.660.385,42	100,00%	24.274.377,58	100,00%	25.245.352,68	100,00%	26.228.640,40	100,00%	27.277.786,02	100,00%	208.686.542,10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
	2	4	Sasaran 4 Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	Jumlah teknologi tepat guna yang didiseminasikan kepada petani, nelayan, dan UMKM		2,00		2,00		3,00		3,00		4,00		4,00				
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tingkat capaian pengembangan UMKM	100,00%	100,00%	581.631.308,00	100,00%	987.459.639,57	100,00%	75.000.000,00	100,00%	140.243.808,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	125.000.000,00	100,00%	1.427.703.447,57	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2	2	5	Sasaran 5 Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil	35,12%	40,27%		45,31%		50,12%		55,80%		60,31%		60,31%				

Kode	Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	35,12%	40,27%		45,31%		50,12%		55,80%		60,31%		60,31%		60,31%			
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga terampil Konstruksi	35,12%	35,12%	175.295.278,90	40,27%	207.898.111,41	45,31%	209.778.028,72	50,12%	216.996.953,99	55,80%	223.580.065,77	60,31%	234.585.828,46	60,31%	1.092.838.988,36	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
2	3		Tujuan 3 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan																	
2	3	1	Sasaran 1 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olahraga	Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi nasional dan internasional		5,00		5,00		10,00		10,00		20,00		20,00		20,00		
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Benda/situs cagar budaya yang dilestarikan	4 kegiatan	4 kegiatan	274.065.322,00	100,00%	259.580.138,66	100,00%	277.866.388,40	100,00%	288.981.043,94	100,00%	300.540.285,70	100,00%	312.561.897,13	100,00%	1.439.529.753,82	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	100,00%	100,00%	377.744.004,00	100,00%	366.260.856,28	100,00%	418.389.581,90	100,00%	435.125.165,18	100,00%	452.530.171,79	100,00%	470.631.378,66	100,00%	2.142.937.153,81	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

[illegible]

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
241	Sasaran 1 Meningkatnya partisipasi perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		9,25		9,50		9,50		9,75		10,00		10,00		10,00		
282	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan Kesetaran Gender dalam Pembangunan	100,00%	100,00%	250.000.037,50	100,00%	54.710.138,74	100,00%	214.195.557,36	100,00%	224.763.379,65	100,00%	235.753.914,84	100,00%	247.184.071,43	100,00%	976.607.062,01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
283	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00%	100,00%	75.000.050,00	100,00%	54.710.029,32	100,00%	52.839.111,47	100,00%	54.952.675,93	100,00%	57.150.782,97	100,00%	59.436.814,29	100,00%	279.089.413,97	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
284	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0,00%	0,00%	-	100,00%	10.942.005,86	100,00%	9.158.779,32	100,00%	9.525.130,49	100,00%	9.906.135,71	100,00%	10.302.381,14	100,00%	49.834.432,54	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
285	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	100,00%	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

[illegible]

Kode	Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	1	1	Sasaran 1 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	31,37	31,00		30,56		30,05		29,61		29,15		28,68		28,68		
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00%	100,00%	11.483.653.070,00	100,00%	962.024.175,53	100,00%	3.801.177.208,05	100,00%	4.457.313.542,44	100,00%	4.227.298.912,13	100,00%	4.806.549.356,66	100,00%	18.254.363.194,81	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00%	100,00%	9.102.072.715,00	100,00%	7.419.597.916,86	100,00%	4.682.218.215,05	100,00%	4.837.765.499,18	100,00%	4.646.555.915,33	100,00%	4.873.066.339,72	100,00%	26.459.203.886,13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	56.613.968,00	100,00%	40.716.133,89	100,00%	260.751.696,74	100,00%	265.936.642,83	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	567.404.473,45	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	0,00%	0,00%	-	100,00%	27.355.014,66	100,00%	722.615.074,47	100,00%	779.327.331,80	100,00%	970.092.434,17	100,00%	1.045.705.336,00	100,00%	3.545.095.191,10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tahun)	2,51	2,83		2,99		3,20		3,44		3,64		3,85		3,85		
				Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,01	10,05		10,35		10,75		11,25		11,85		12,55		12,55		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
302	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100,00%	100,00%	25.000.000,00	100,00%	27.354.850,53	100,00%	59.333.919,00	100,00%	56.097.523,00	100,00%	66.297.073,00	100,00%	75.217.043,00	100,00%	284.300.408,53	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	267.002.635,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	320.000.000,00	100,00%	1.087.002.635,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
304	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat capaian stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	100,00%	25.000.000,00	100,00%	76.593.825,49	100,00%	186.901.845,00	100,00%	196.341.332,00	100,00%	196.239.336,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	856.076.338,49	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	0,00%	0,00%	-	100,00%	26.008.874,39	100,00%	89.000.878,00	100,00%	98.170.666,00	100,00%	106.075.317,00	100,00%	112.825.564,00	100,00%	432.081.299,39	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
306	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standarisasi metrologi legal	0,00%	0,00%	-	100,00%	27.354.467,56	100,00%	89.000.878,00	100,00%	84.146.285,00	100,00%	92.815.902,00	100,00%	100.289.390,00	100,00%	393.606.922,56	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

Kode	Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
307	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100,00%	100,00%	3.429.878.626,00	100,00%	179.416.998,03	100,00%	118.667.838,00	100,00%	112.195.047,00	100,00%	119.334.731,00	100,00%	150.434.086,00	100,00%	680.048.700,03	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN DAERAH
3312	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat cakupan perencanaan dan Pembangunan Industri	100,00%	100,00%	49.999.727,00	100,00%	79.236.684,27	100,00%	200.000.000,00	100,00%	228.183.232,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	275.000.000,00	100,00%	1.032.419.916,27	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN DAERAH
3313	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pengendalian usaha industri	0,00%	0,00%	-	100,00%	29.682.418,70	100,00%	89.000.824,00	100,00%	84.146.285,00	100,00%	92.815.902,00	100,00%	87.753.216,00	100,00%	383.398.645,70	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN DAERAH
3314	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan SIINas	100,00%	100,00%	47.933.250,00	100,00%	44.862.005,20	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	113.924.691,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	478.786.696,20	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN DAERAH
		Jumlah kunjungan wisatawan (orang)		5716,00		6068,00		6447,00		6812,00		7184,00		7552,00		7552,00		
3262	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100,00%	100,00%	1.463.123.211,00	0,00%	-	100,00%	841.409.411,48	100,00%	875.065.787,94	100,00%	910.068.419,46	100,00%	946.471.156,24	100,00%	3.573.014.775,11	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3263	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	100,00%	100,00%	205.408.309,00	100,00%	87.535.937,49	100,00%	118.125.721,12	100,00%	122.850.749,97	100,00%	127.764.779,96	100,00%	132.875.371,16	100,00%	589.152.559,71	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
3312	Sasaran 2 Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN) (persen)	5,41	5,41		5,85		6,27		6,88		7,01		7,21		7,21		
22182	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi; Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	100,00%	100,00%	59.281.500,00	100,00%	64.715.180,64	100,00%	61.652.760,00	100,00%	64.118.870,40	100,00%	66.683.625,22	100,00%	69.350.970,22	100,00%	326.521.406,48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
22183	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100,00%	100,00%	143.638.000,00	100,00%	146.598.806,16	100,00%	139.337.120,00	100,00%	144.910.604,80	100,00%	150.707.028,99	100,00%	156.735.310,15	100,00%	738.288.870,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
22184	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	100,00%	100,00%	63.997.500,00	100,00%	41.188.172,02	100,00%	39.093.080,00	100,00%	40.656.803,20	100,00%	42.283.075,33	100,00%	43.974.398,34	100,00%	207.195.528,89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
22185	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100,00%	100,00%	415.089.000,00	100,00%	513.132.680,80	100,00%	487.717.638,72	100,00%	507.226.344,27	100,00%	527.515.398,04	100,00%	548.616.013,96	100,00%	2.584.208.075,79	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan publik	100,00%	100,00%	21.465.800,00	100,00%	24.753.826,32	100,00%	23.502.960,00	100,00%	24.443.078,40	100,00%	25.420.801,54	100,00%	26.437.633,60	100,00%	124.558.299,85	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
32	Tujuan 2 Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat																	
321	Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
292	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100,00%	100,00%	28.857.250,00	100,00%	21.883.902,31	100,00%	110.958.168,82	100,00%	159.561.985,70	100,00%	177.534.416,28	100,00%	171.830.624,54	100,00%	641.769.097,65	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
293	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00%	100,00%	100.838.205,00	100,00%	278.665.206,07	100,00%	202.792.031,50	100,00%	249.140.509,96	100,00%	334.874.434,74	100,00%	418.102.301,05	100,00%	1.483.574.483,33	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
294	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan angka kerawanan pangan setiap tahun	0,00%	0,00%	-	100,00%	45.244.920,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	45.244.920,70	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	0,00%	0,00%	-	100,00%	38.098.423,12	100,00%	66.574.901,29	100,00%	85.099.725,70	100,00%	118.356.277,52	100,00%	137.464.499,63	100,00%	445.593.827,27	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	2	2	Sasaran 2 Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persentase peningkatan produktivitas dan nilai tukar perikanan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tingkat Produktivitas Perikanan Tangkap	100,00%	100,00%	1.466.088.858,00	100,00%	2.150.000.000,00	100,00%	1.305.596.347,34	100,00%	1.357.820.201,23	100,00%	1.416.133.009,28	100,00%	1.476.778.329,66	100,00%	7.706.327.887,51	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tingkat Produksi Perikanan budidaya	100,00%	100,00%	1.924.967.824,00	100,00%	1.013.750.798,00	100,00%	1.054.300.829,92	100,00%	1.096.472.863,12	100,00%	1.140.331.777,64	100,00%	1.185.945.048,75	100,00%	5.490.801.317,43	DINAS PERIKANAN DAERAH
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas	0 Kelompok	0 Kelompok	-	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya ragam produksi hasil perikanan, Meningkatnya nilai produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing, Kelompok usaha pengelola hasil perikanan	100,00%	100,00%	528.131.950,00	100,00%	419.715.850,00	100,00%	436.504.484,00	100,00%	453.964.663,36	100,00%	472.123.249,89	100,00%	491.008.179,89	100,00%	2.273.316.427,14	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	2	3	Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM (persen)		5,00		5,00		6,50		7,00		7,50		8,00		8,00		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2173	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	100,00%	100,00%	25.000.050,00	100,00%	22.033.588,95	100,00%	35.600.351,00	100,00%	44.878.018,00	100,00%	53.037.658,00	100,00%	60.173.634,00	100,00%	215.723.249,95	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2174	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi sehat	0,00%	0,00%	-	100,00%	23.267.628,37	100,00%	44.500.439,00	100,00%	56.097.523,00	100,00%	66.297.073,00	100,00%	62.680.869,00	100,00%	252.843.532,37	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2175	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Perkoperasian	0,00%	0,00%	-	100,00%	27.354.845,06	100,00%	75.000.000,00	100,00%	140.243.808,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	442.598.653,06	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2176	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	100,00%	100,00%	37.999.000,00	100,00%	27.355.014,66	100,00%	59.333.919,00	100,00%	70.121.904,00	100,00%	79.556.487,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	311.367.324,66	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
333	Tujuan 3 Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas																	
331	Sasaran 1 Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal		12,00		11,00		10,00		9,00		8,00		8,00		8,00		

[illegible]

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
341	Sasaran 1 Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Air (kategori)		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
		Indeks Kualitas Udara (kategori)		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
		Indeks Tutupan Lahan (kategori)		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
2112	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersedianya dokumen Lingkungan Hidup	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.951.556,00	100,00%	10.951.556,00	100,00%	11.951.556,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	43.854.668,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2113	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	0,00%	-	100,00%	19.938.085,40	100,00%	10.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	11.440.000,00	100,00%	11.897.600,00	100,00%	64.275.685,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2114	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.480.018,48	100,00%	9.480.018,48	100,00%	8.777.281,46	100,00%	8.480.018,48	100,00%	35.217.336,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2115	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	0,00%	-	100,00%	16.896.973,71	100,00%	16.060.044,00	100,00%	19.702.445,76	100,00%	20.490.543,59	100,00%	21.310.165,33	100,00%	94.460.172,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	46.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	29.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah yang diangkut	80,00%	80,00%	122.341.000,00	100,00%	108.152.536,68	100,00%	102.856.000,00	100,00%	105.667.502,98	100,00%	109.894.203,10	100,00%	114.289.971,22	100,00%	540.860.213,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00%	0,00%	-	100,00%	27.355.014,66	100,00%	334.261.483,58	100,00%	352.366.051,74	100,00%	430.816.850,18	100,00%	457.957.252,84	100,00%	1.602.756.653,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	4	2	Sasaran 2 Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase penyelesaian kasus perusakan lingkungan	100,00			100,00		100,00			100,00		100,00			100,00		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	0,00%	-	100,00%	61.526.242,45	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.400.000,00	100,00%	11.816.000,00	100,00%	12.288.640,00	100,00%	106.030.882,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
21110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	15.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.597.972,47	100,00%	57.597.972,47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
343	Sasaran 3 Meningkatnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana		tinggi		tinggi		tinggi		tinggi		tinggi		tinggi		tinggi		
153	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100,00%	100,00%	31.230.036.503,77	100,00%	540.782.677,71	100,00%	538.368.357,41	100,00%	559.903.091,70	100,00%	582.299.215,37	100,00%	605.591.183,99	100,00%	2.826.944.526,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
166	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tingkat cakupan penanganan bencana	100,00%	100,00%	208.158.950,00	100,00%	135.680.763,29	100,00%	230.429.685,08	100,00%	229.849.066,38	100,00%	238.860.429,61	100,00%	252.772.690,60	100,00%	1.087.592.634,96	DINAS SOSIAL DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3	5	Tujuan 5 Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten																	
3	5	1 Sasaran 1 Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah	100,00%	100,00		100,00		100,00			100,00			100,00		100,00		
1	3	12 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	30,00%	30,00%	1.937.224.063,00	45,00%	2.790.192.787,69	55,00%	1.968.766.799,54	70,00%	2.036.516.412,96	85,00%	2.098.298.919,34	100,00%	2.201.587.994,88	100,00%	11.095.362.914,40	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
3	32	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100,00%	100,00%	9.766.401.572,00	100,00%	2.915.234.950,55	100,00%	3.477.598.809,88	100,00%	3.662.702.762,28	100,00%	3.857.744.629,49	100,00%	4.152.454.414,69	100,00%	18.065.735.566,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
3	5	2 Sasaran 2 Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Persentase tanah dengan sertifikat																
			Persentase kasus sengketa tanah		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4	1	2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00%	100,00%	6.339.281.586,00	100,00%	335.919.580,01	100,00%	1.643.437.047,66	100,00%	1.709.174.529,57	100,00%	1.777.541.510,75	100,00%	1.848.643.171,18	100,00%	7.314.715.839,18	BAGIAN PEMERINTAHAN

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4		Misi 4 : Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah																		
4	1	Tujuan 1 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar																		
4	1	1	Sasaran 1 Tersedianya prasarana dan sarana air baku	Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik																
				Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	47,09%	48,50	50,00	51,50	52,00	53,50	55,00	55,00								
				Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	37,00%	37,00%	18.618.083.865,00	42,00%	11.279.858.753,22	47,00%	12.381.556.841,91	52,00%	12.915.599.066,01	57,00%	13.206.109.787,68	67,00%	13.838.569.017,86	67,00%	63.621.693.466,68	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
				Persentase Kawasan Permukiman Terlindungi infrastruktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	67,5%	67,5%		72,5%	7.824.366.146,72	75,5%	8.365.478.342,75	78,5%	8.545.387.420,05	81,50%	8.905.946.106,33	85,00%	9.361.956.162,57	85,00%	43.003.134.178,42	

[illegible]

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Jumlah kecamatan dengan gedung kantor dan peralatan baik																		
4	1	5	Sasaran 5 Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Pengelolaan Air Limbah	40,00%	40,00	43,89	45,37		50,45		55,37		60,24		60,24				
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan air Limbah Domestik	40,00%	40,00%	2.277.512.900,00	43,89%	2.255.357.495,02	45,37%	2.441.576.693,15	50,45%	2.710.396.500,90	55,37%	2.996.960.991,30	60,24%	3.374.571.251,67	60,24%	13.778.862.932,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	1	6	Sasaran 6 Tersedianyan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Terhambat	64,00%	64,00	65,00	67,00		69,00		71,00		73,50		73,50				
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	64,00%	64,00%	1.360.719.500,00	65,00%	3.009.051.612,51	67,00%	1.100.166.060,95	69,00%	1.332.322.190,47	71,00%	1.607.111.780,23	73,50%	1.974.113.677,87	73,50%	9.022.765.322,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	1	7	Sasaran 7 Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Geudng Kantor yang Terbangun dan Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	61,98%	61,98	63,00	65,00		67,00		69,00		71,00		71,00				

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung yang laik fungsi	61,00%	61,00%	6.201.560.854,00	63,00%	1.422.460.762,28	65,00%	6.191.521.769,61	67,00%	6.560.795.115,42	69,00%	6.924.706.195,17	71,00%	7.442.785.070,32	71,00%	28.542.268.912,79	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	2		Tujuan 2 Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman																	
4	2	1	Sasaran 1 Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum	Persentase rumah sehat dan layak huni	72,35	73,00		74,00		76,00		78,00		79,00		80,00		80,00		
				Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	71,07	72,00		73,00		75,00		77,00		79,00		80,00		80,00		
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	35,92%	35,92%	3.943.048.703,00	40,21%	3.799.064.301,28	45,52%	3.649.523.715,25	50,19%	4.235.491.384,74	55,89%	4.896.178.247,05	60,19%	5.763.680.354,88	60,19%	22.343.938.003,21	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	2	2	Sasaran 2 Tersedianya Pengembangan Permukiman	Jumlah Pembangunan Infrastruktur yang Dibangun	47,98%	47,98		49,00		51,00		53,00		55,00		57,50		57,50		

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	47,00%	47,00%	7.546.278.610,10	49,00%	6.291.653.371,61	51,00%	7.127.336.439,19	53,00%	7.552.423.432,59	55,00%	7.971.337.682,16	57,50%	8.567.721.347,09	57,50%	37.510.472.272,65	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	2	3	Sasaran 3 Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun	0,00%	0,00%		5,00%		10,00%		15,00%		20,00%		25,00%		25,00%		
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	0,00%	0,00%	-	5,00%	273.550.146,59	10,00%	97.214.208,43	15,00%	186.403.094,33	20,00%	356.010.080,61	25,00%	692.405.841,95	25,00%	1.605.583.371,90	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	2	4	Sasaran 4 Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	Panjang Jalan dan Luas Lahan Perumahan	0,00%	0,00%		13,00%		18,00%		23,00%		28,00%		33,00%		33,00%		
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	0,00%	0,00%	-	13,00%	120.362.064,50	18,00%	1.097.497.247,82	23,00%	1.661.362.758,99	28,00%	2.505.020.632,06	33,00%	3.846.337.537,34	33,00%	9.230.580.240,71	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Kode	Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	2	5	Sasaran 5 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan	0,00%	0,00%		5,00%		10,00%		15,00%		20,00%		25,00%		25,00%		
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan dokumen sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi permahan dan kawasan permukiman	0,00%	0,00%	-	5,00%	186.014.044,97	10,00%	337.282.137,88	15,00%	476.530.990,84	20,00%	670.617.315,16	25,00%	961.053.634,25	25,00%	2.631.498.123,10	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
4	3		Tujuan 3 Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya																	
4	3	1	Sasaran 1 Terbangunnya jaringan transportasi darat	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	38,00	38,00		40,00		44,00		48,00		55,00		60,00		60,00		
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	58,00%	58,00%	61.708.520.920,00	60,74%	38.811.546.053,17	63,06%	66.333.526.477,60	65,37%	66.942.643.535,34	67,69%	67.291.225.155,66	70,00%	65.339.552.677,76	70,00%	304.718.493.899,54	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

[illegible]

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
5	1	1	Sasaran 1 Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Predikat SAKIP	C	CC		B		BB		A		A		A					
				2. Nilai LPPD	Memuaskan	Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan		Memuaskan					
				3. Indeks RB																	
				4. Indeks Profesionalitas ASN	-	Sangat Rendah		Rendah		Rendah		Sedang		Sedang		Sedang					
	3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.426.569.369,00	100,00%	3.581.244.932,00	100,00%	1.970.537.600,93	100,00%	2.049.359.104,97	100,00%	2.131.333.469,17	100,00%	2.216.586.807,94	100,00%	11.949.061.915,01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
	4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	97,00%	100,00%	597.860.950,00	100,00%	265.017.898,68	100,00%	280.494.234,55	100,00%	291.714.913,08	100,00%	303.383.509,60	100,00%	315.518.849,98	100,00%	1.456.129.405,89	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10 Perda	10 Perda	340.099.780,00	100,00%	352.372.527,13	100,00%	615.397.917,55	100,00%	640.013.834,26	100,00%	665.614.387,63	100,00%	692.238.963,13	100,00%	2.965.637.629,70	BAGIAN HUKUM
	4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	1.707.684.074,00	100,00%	656.858.788,06	100,00%	1.248.321.882,08	100,00%	1.298.254.757,36	100,00%	1.350.184.947,66	100,00%	1.404.192.345,56	100,00%	5.957.812.720,73	BAGIAN ORGANISASI

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.900.059.473,00	100,00%	4.737.176.800,88	100,00%	5.807.874.757,59	100,00%	6.040.189.747,89	100,00%	6.281.797.337,81	100,00%	6.533.069.231,32	100,00%	29.400.107.875,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA N, PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	874.908.000,00	100,00%	124.219.121,57	100,00%	91.205.002,35	100,00%	94.853.202,44	100,00%	98.647.330,54	100,00%	102.593.223,76	100,00%	511.517.880,65	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.776.869.919,00	100,00%	7.772.098.340,72	100,00%	3.256.875.894,72	100,00%	3.501.826.964,40	100,00%	2.420.327.097,19	100,00%	2.504.629.475,43	100,00%	19.455.757.772,46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN	97,00%	97,00%	1.073.801.600,00	100,00%	1.141.236.056,90	100,00%	1.532.287.692,05	100,00%	1.571.491.298,35	100,00%	2.339.011.311,97	100,00%	2.479.106.388,18	100,00%	9.063.132.747,45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.399.018.836,51	100,00%	1.362.391.457,46	100,00%	1.933.799.699,86	100,00%	1.977.127.769,77	100,00%	6.672.337.763,60	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	5.441.431.998,00	100,00%	5.285.000.947,14	100,00%	5.095.235.821,24	100,00%	5.299.045.254,09	100,00%	5.511.007.064,25	100,00%	5.731.447.346,82	100,00%	26.921.736.433,53	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	3.151.366.441,00	100,00%	3.402.013.129,61	100,00%	3.283.068.543,07	100,00%	3.399.021.741,55	100,00%	3.473.676.800,18	100,00%	3.631.591.729,74	100,00%	17.189.371.944,15	KECAMATAN LEMBO
5	1	2	Sasaran 2 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100,00%	100,00%	224.725.250,00	100,00%	376.429.457,09	100,00%	433.179.401,45	100,00%	450.505.668,36	100,00%	468.525.895,10	100,00%	487.266.930,90	100,00%	2.215.907.352,91	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA N
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya pengembangan data/informasi	100,00%	100,00%	889.882.800,00	100,00%	344.771.334,50	100,00%	880.665.941,14	100,00%	915.892.578,79	100,00%	952.528.281,94	100,00%	990.629.413,21	100,00%	4.084.487.549,57	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	413.730.300,00	100,00%	274.894.632,43	100,00%	236.578.160,00	100,00%	246.041.286,40	100,00%	255.882.937,86	100,00%	266.118.255,37	100,00%	1.279.515.272,06	BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	182.133.787.801,80	100,00%	196.268.989.484,80	100,00%	238.368.683.274,92	100,00%	247.903.430.605,92	100,00%	257.819.567.830,15	100,00%	268.132.350.543,36	100,00%	1.208.493.021.739,14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100,00%	100,00%	1.344.928.023,00	100,00%	506.056.446,22	100,00%	577.514.310,84	100,00%	600.614.883,27	100,00%	624.639.478,60	100,00%	649.625.057,75	100,00%	2.958.450.176,69	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5	1	3	Sasaran 3 Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Indeks Maturitas SPBE																
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	100,00%	100,00%	3.580.863.454,00	100,00%	1.437.077.203,13	100,00%	1.925.414.247,69	100,00%	2.002.430.817,64	100,00%	2.082.528.050,34	100,00%	2.165.829.172,34	100,00%	9.613.279.491,14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0,00%	0,00%	-	100,00%	75.372.913,19	100,00%	140.217.281,16	100,00%	145.825.972,41	100,00%	151.659.011,31	100,00%	157.725.371,99	100,00%	670.800.550,06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0,00%	0,00%	-	100,00%	73.910.623,53	100,00%	263.894.972,22	100,00%	274.450.771,17	100,00%	285.428.801,77	100,00%	296.845.953,89	100,00%	1.194.531.122,58	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00%	100,00%	3.943.268.750,00	100,00%	3.100.710.607,23	100,00%	3.241.280.777,68	100,00%	3.370.932.008,79	100,00%	3.505.769.289,14	100,00%	3.646.000.060,70	100,00%	16.864.692.743,53	INSPEKTORAT DAERAH
5	1	4	Sasaran 4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	76,61- 88,30/B (Baik)	76,61- 88,30/B (Baik)		76,61- 88,30/B (Baik)	88,31- 100/A (Sangat Baik)		88,31- 100/A (Sangat Baik)	88,31- 100/A (Sangat Baik)		88,31- 100/A (Sangat Baik)		88,31- 100/A (Sangat Baik)	88,31- 100/A (Sangat Baik)			

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	172.770.857.019,00	100,00%	184.988.844.844,67	100,00%	174.437.953.870,83	100,00%	181.415.472.025,66	100,00%	188.672.090.906,69	100,00%	196.218.974.542,95	100,00%	925.733.336.190,79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	57.910.031.391,00	100,00%	53.331.710.454,76	100,00%	56.801.111.001,71	100,00%	44.922.648.904,95	100,00%	65.125.840.398,70	100,00%	67.730.874.014,64	100,00%	287.912.184.774,77	DINAS KESEHATAN DAERAH
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	56.107.718.202,00	100,00%	55.670.825.687,05	100,00%	60.154.235.848,94	100,00%	62.560.405.282,90	100,00%	65.062.821.494,22	100,00%	67.665.334.353,99	100,00%	311.113.622.667,10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	212.765.366,19	100,00%	252.810.857,95	100,00%	262.923.292,27	100,00%	273.440.223,96	100,00%	284.377.832,92	100,00%	1.286.317.573,28	PUSKESMAS LEE
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	610.400.907,72	100,00%	635.318.284,83	100,00%	660.731.016,23	100,00%	687.160.256,88	100,00%	714.646.667,15	100,00%	3.308.257.132,81	PUSKESMAS TOMATA
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	583.646.592,77	100,00%	602.150.141,60	100,00%	626.236.147,27	100,00%	651.285.593,16	100,00%	677.337.016,88	100,00%	3.140.655.491,68	PUSKESMAS BETELEME

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	422.811.992,97	100,00%	467.603.015,79	100,00%	486.307.136,42	100,00%	505.759.421,88	100,00%	525.989.798,75	100,00%	2.408.471.365,82	PUSKESMAS PETUMBEA
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	192.302.085,29	100,00%	212.255.668,81	100,00%	220.745.895,56	100,00%	229.575.731,38	100,00%	238.758.760,64	100,00%	1.093.638.141,68	PUSKESMAS MOLINO
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	469.686.293,23	100,00%	488.564.220,62	100,00%	508.106.789,45	100,00%	528.431.061,03	100,00%	549.568.303,47	100,00%	2.544.356.667,80	PUSKESMAS KOLONODALE
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	497.239.784,94	100,00%	527.317.999,85	100,00%	548.410.719,84	100,00%	570.347.148,63	100,00%	593.161.034,58	100,00%	2.736.476.687,84	PUSKESMAS BATURUBE
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	313.979.413,91	100,00%	357.154.436,00	100,00%	371.440.613,44	100,00%	386.298.237,98	100,00%	401.750.167,50	100,00%	1.830.622.868,85	PUSKESMAS PANCAMAKMUR
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	398.015.190,84	100,00%	418.358.604,05	100,00%	435.092.948,21	100,00%	452.496.666,14	100,00%	470.596.532,78	100,00%	2.174.559.942,01	PUSKESMAS PANDAUKE

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	142.232.740,11	100,00%	249.615.405,23	100,00%	259.600.021,43	100,00%	269.984.022,29	100,00%	280.783.383,18	100,00%	1.202.215.572,25	PUSKESMAS WONGKO NDAYA
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	129.821.428,57	100,00%	160.765.982,12	100,00%	167.196.621,40	100,00%	173.884.486,26	100,00%	180.839.865,71	100,00%	812.508.384,06	PUSKESMAS TAMBAYOLI
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	147.761.146,99	100,00%	200.024.681,29	100,00%	208.025.668,54	100,00%	216.346.695,28	100,00%	225.000.563,09	100,00%	997.158.755,19	PUSKESMAS ANUTOLUWU
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	257.106.334,96	100,00%	319.277.730,87	100,00%	332.048.840,10	100,00%	345.330.793,71	100,00%	359.144.025,46	100,00%	1.612.907.725,09	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	390.904.538,17	100,00%	468.064.499,10	100,00%	486.787.079,06	100,00%	506.258.562,22	100,00%	526.508.904,71	100,00%	2.378.523.583,27	PUSKESMAS MAYUMBA
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	9.127.045.383,00	100,00%	11.877.426.356,28	100,00%	14.659.608.057,27	100,00%	15.164.077.546,26	100,00%	15.624.115.438,37	100,00%	16.393.214.877,59	100,00%	73.718.442.275,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	12.372.745.952,00	100,00%	12.865.007.536,37	100,00%	11.431.607.924,96	100,00%	11.752.483.544,84	100,00%	12.058.947.483,23	100,00%	12.434.439.362,78	100,00%	60.542.485.852,19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.915.182.462,23	100,00%	3.171.095.493,25	100,00%	3.145.676.448,59	100,00%	3.271.503.506,54	100,00%	3.402.363.646,80	100,00%	3.538.458.192,67	100,00%	16.529.097.287,84	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	2.907.960.091,00	100,00%	3.321.434.592,15	100,00%	2.155.869.113,16	100,00%	2.170.897.116,19	100,00%	2.206.450.800,51	100,00%	2.188.053.424,49	100,00%	12.042.705.046,50	DINAS SOSIAL DAERAH
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	3.424.680.858,00	100,00%	3.367.702.073,93	100,00%	3.184.991.160,48	100,00%	3.266.390.806,90	100,00%	3.348.646.439,18	100,00%	3.342.192.296,74	100,00%	16.509.922.777,23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	6.184.715.219,00	100,00%	5.840.634.477,40	100,00%	5.422.280.118,32	100,00%	5.639.171.323,05	100,00%	5.864.738.175,97	100,00%	6.099.327.703,01	100,00%	28.866.151.797,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.080.301.280,00	100,00%	2.688.637.682,02	100,00%	5.037.187.737,59	100,00%	5.737.992.790,59	100,00%	6.786.255.782,14	100,00%	8.173.024.001,95	100,00%	28.423.097.994,28	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA DAERAH

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.321.614.241,00	100,00%	4.164.159.305,43	100,00%	3.672.864.049,92	100,00%	3.819.778.611,92	100,00%	3.972.569.756,39	100,00%	4.131.472.546,65	100,00%	19.760.844.270,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2122	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	100,00%	1.561.479.232,00	100,00%	2.004.506.977,27	100,00%	1.870.300.560,96	100,00%	1.945.112.583,40	100,00%	2.022.917.086,73	100,00%	2.103.833.770,20	100,00%	9.946.670.978,57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2123	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00%	100,00%	84.415.120,00	100,00%	45.666.253,57	100,00%	67.918.041,36	100,00%	70.634.763,01	100,00%	73.460.153,53	100,00%	76.398.559,68	100,00%	334.077.771,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2124	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	133.253.424,00	100,00%	90.395.740,14	100,00%	87.047.376,00	100,00%	90.529.271,04	100,00%	94.150.441,88	100,00%	97.916.459,56	100,00%	460.039.288,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2125	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningktanya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntabel	100,00%	100,00%	43.237.000,00	100,00%	26.509.525,87	100,00%	44.966.480,00	100,00%	46.765.139,20	100,00%	48.635.744,77	100,00%	50.581.174,56	100,00%	217.458.064,39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
2141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	5.769.184.639,50	100,00%	6.781.725.813,35	100,00%	5.744.010.959,86	100,00%	5.973.771.398,26	100,00%	6.212.722.254,19	100,00%	6.461.231.144,36	100,00%	31.173.461.570,03	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Kode	Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	5.004.065.618,00	100,00%	5.528.830.502,76	100,00%	5.271.266.872,02	100,00%	5.482.117.546,90	100,00%	5.701.402.248,77	100,00%	5.929.458.338,72	100,00%	27.913.075.509,17	DINAS PERHUBUNGA N DAERAH
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	2.927.632.682,00	100,00%	3.286.957.378,82	100,00%	1.882.389.071,97	100,00%	1.957.684.634,74	100,00%	2.035.992.020,37	100,00%	2.117.431.700,93	100,00%	11.280.454.806,82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	2.755.419.358,00	100,00%	3.065.481.245,89	100,00%	2.913.503.536,80	100,00%	2.975.055.514,31	100,00%	2.990.963.613,12	100,00%	3.012.078.292,44	100,00%	14.957.082.202,56	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN DAERAH
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.943.544.726,00	100,00%	5.687.850.939,86	100,00%	5.066.775.752,48	100,00%	5.269.446.782,58	100,00%	5.480.224.653,88	100,00%	5.699.433.640,04	100,00%	27.203.731.768,84	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	3.287.107.267,00	100,00%	2.314.585.817,76	100,00%	2.106.950.564,16	100,00%	2.191.228.586,73	100,00%	2.278.877.730,20	100,00%	2.370.032.839,40	100,00%	11.261.675.538,24	DINAS PERPUSTAKAA N DAERAH
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.653.577.595,00	100,00%	4.923.527.423,79	100,00%	4.401.143.328,02	100,00%	4.581.189.061,14	100,00%	4.764.436.623,59	100,00%	4.955.014.088,55	100,00%	23.625.310.525,10	DINAS PERIKANAN DAERAH

Kode	Misi/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	14.779.889.084,00	100,00%	17.865.621.108,43	100,00%	8.251.271.371,09	100,00%	7.965.738.833,63	100,00%	8.924.513.394,95	100,00%	8.697.356.286,85	100,00%	51.704.500.994,95	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	28.290.075.590,00	100,00%	21.515.603.070,21	100,00%	20.066.228.822,64	100,00%	20.868.877.975,55	100,00%	21.703.633.094,57	100,00%	22.571.778.418,35	100,00%	106.726.121.381,32	BAGIAN UMUM
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	476.826.368,00	100,00%	457.180.042,28	100,00%	2.230.376.848,50	100,00%	2.319.591.922,44	100,00%	2.412.375.599,34	100,00%	2.508.870.623,31	100,00%	9.928.395.035,86	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	353.161.146,00	100,00%	454.035.688,39	100,00%	219.226.114,52	100,00%	234.374.761,92	100,00%	263.122.288,97	100,00%	273.647.180,53	100,00%	1.444.406.034,34	BAGIAN KESEJAHTERA N RAKYAT
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	612.209.400,00	100,00%	558.137.220,95	100,00%	978.010.293,65	100,00%	1.017.130.705,39	100,00%	1.057.815.933,61	100,00%	1.100.128.570,95	100,00%	4.711.222.724,55	BAGIAN HUKUM
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	418.392.995,00	100,00%	358.254.730,64	100,00%	827.536.138,86	100,00%	860.637.584,41	100,00%	895.063.087,79	100,00%	930.865.611,30	100,00%	3.872.357.153,01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	534.981.125,00	100,00%	422.939.109,54	100,00%	426.688.986,88	100,00%	443.756.546,36	100,00%	461.506.808,21	100,00%	479.967.080,54	100,00%	2.234.858.531,52	BAGIAN PEREKONOMIA N DAN SUMBER DAYA ALAM

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	1.387.304.582,00	100,00%	832.074.441,00	100,00%	1.414.858.120,00	100,00%	1.471.452.444,80	100,00%	1.530.310.542,59	100,00%	1.591.522.964,30	100,00%	6.840.218.512,69	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUKASI PIMPINAN
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	25.685.255.450,00	100,00%	28.507.485.858,29	100,00%	27.029.411.339,20	100,00%	28.110.587.792,76	100,00%	29.235.011.304,47	100,00%	30.404.411.756,65	100,00%	143.286.908.051,38	SEKRETARIAT DPRD
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	20 Perda	20 Perda	6.808.094.700,00	100,00%	8.105.012.861,86	100,00%	4.170.588.660,80	100,00%	4.337.412.207,24	100,00%	4.510.908.695,53	100,00%	4.691.345.043,35	100,00%	25.815.267.468,77	SEKRETARIAT DPRD
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	19.374.233.821,20	100,00%	9.713.984.768,81	100,00%	19.617.992.764,69	100,00%	20.402.712.475,28	100,00%	21.218.820.974,29	100,00%	22.067.573.813,26	100,00%	93.021.084.796,34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	5.089.436.147,00	100,00%	5.618.723.213,72	100,00%	5.645.551.243,32	100,00%	5.871.373.293,05	100,00%	6.106.228.224,77	100,00%	6.350.477.353,77	100,00%	29.592.353.328,63	BADAN PENDAPATAN DAERAH
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	4.287.704.265,00	100,00%	6.056.485.527,54	100,00%	6.691.437.604,60	100,00%	6.959.095.108,79	100,00%	7.237.458.913,14	100,00%	7.526.957.269,66	100,00%	34.471.434.423,73	KECAMATAN PETASIA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.277.466.609,00	100,00%	2.591.252.035,34	100,00%	2.456.568.902,99	100,00%	2.554.831.659,11	100,00%	2.657.024.925,48	100,00%	2.763.305.922,50	100,00%	13.022.983.445,42	KECAMATAN PETASIA BARAT

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.593.338.225,00	100,00%	3.752.709.519,80	100,00%	2.763.698.227,91	100,00%	2.874.246.157,02	100,00%	2.989.216.003,30	100,00%	3.108.784.643,44	100,00%	15.488.654.551,47	KECAMATAN PETASIA TIMUR
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	3.436.966.427,00	100,00%	4.030.717.704,38	100,00%	3.560.013.863,07	100,00%	3.702.414.417,59	100,00%	3.850.510.994,30	100,00%	4.004.531.434,07	100,00%	19.148.188.413,41	KECAMATAN BUNGKU UTARA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.732.860.941,00	100,00%	3.010.619.089,87	100,00%	2.962.780.414,76	100,00%	3.081.291.631,35	100,00%	3.204.543.296,61	100,00%	3.332.725.028,47	100,00%	15.591.959.461,05	KECAMATAN MAMOSALATO
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.080.089.835,00	100,00%	2.333.416.964,99	100,00%	2.313.840.522,05	100,00%	2.406.394.142,93	100,00%	2.502.649.908,64	100,00%	2.602.755.904,99	100,00%	12.159.057.443,60	KECAMATAN SOYO JAYA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.278.569.081,00	100,00%	2.622.516.172,42	100,00%	2.492.308.094,56	100,00%	2.592.000.418,35	100,00%	2.695.680.435,08	100,00%	2.803.507.652,48	100,00%	13.206.012.772,89	KECAMATAN LEMBO RAYA
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.569.392.895,00	100,00%	3.018.888.298,52	100,00%	2.772.254.674,29	100,00%	2.883.144.861,26	100,00%	2.998.470.655,71	100,00%	3.118.409.481,94	100,00%	14.791.167.971,72	KECAMATAN MORI ATAS
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.458.914.984,00	100,00%	2.769.369.851,81	100,00%	2.655.817.484,94	100,00%	2.762.050.184,33	100,00%	2.872.532.191,71	100,00%	2.987.433.479,38	100,00%	14.047.203.192,17	KECAMATAN MORI UTARA

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
811	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	2.535.755.259,00	100,00%	2.905.027.732,95	100,00%	2.968.503.485,91	100,00%	3.087.243.625,34	100,00%	3.210.733.370,36	100,00%	3.339.162.705,17	100,00%	15.510.670.919,73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
2242	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	0,00%	0,00%	-	100,00%	75.978.301,55	100,00%	72.301.817,12	100,00%	75.193.889,80	100,00%	78.201.645,40	100,00%	81.329.711,21	100,00%	383.005.365,08	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
515	Sasaran 5 Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		20,00%		20,00%		40,00%		60,00%		80,00%		100,00%		100,00%		
713	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	2.657.394.780,00	100,00%	274.437.770,86	100,00%	365.923.965,88	100,00%	380.560.924,51	100,00%	395.783.361,49	100,00%	411.614.695,95	100,00%	1.828.320.718,70	KECAMATAN PETASIA
713	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	81.420.000,00	100,00%	23.197.052,43	100,00%	23.013.233,73	100,00%	23.933.763,08	100,00%	24.891.113,60	100,00%	25.886.758,14	100,00%	120.921.920,98	KECAMATAN PETASIA BARAT
713	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	0,00%	0,00%	-	100,00%	29.871.676,01	100,00%	29.496.493,29	100,00%	30.676.353,03	100,00%	31.903.407,15	100,00%	33.179.543,43	100,00%	155.127.472,91	KECAMATAN PETASIA TIMUR
713	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	59.480.335,25	100,00%	61.859.548,66	100,00%	64.333.930,61	100,00%	66.907.287,83	100,00%	252.581.102,35	KECAMATAN BUNGKU UTARA

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	69.250.000,00	100,00%	75.609.260,52	100,00%	74.573.418,52	100,00%	77.556.355,26	100,00%	80.658.609,47	100,00%	83.884.953,85	100,00%	392.282.597,61	KECAMATAN MAMOSALATO
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	169.303.193,00	100,00%	111.704.413,54	100,00%	110.946.371,31	100,00%	115.384.226,17	100,00%	119.999.595,21	100,00%	124.799.579,02	100,00%	582.834.185,26	KECAMATAN SOYO JAYA
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	150.917.000,00	100,00%	210.633.612,88	100,00%	209.373.291,89	100,00%	233.117.766,81	100,00%	303.748.288,51	100,00%	296.930.362,50	100,00%	1.253.803.322,59	KECAMATAN LEMBO
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	21.850.000,00	100,00%	35.452.099,00	100,00%	23.703.802,80	100,00%	24.651.954,91	100,00%	25.638.033,10	100,00%	26.663.554,43	100,00%	136.109.444,23	KECAMATAN LEMBO RAYA
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	82.350.000,00	100,00%	75.609.260,52	100,00%	78.608.782,19	100,00%	81.753.133,48	100,00%	85.023.258,82	100,00%	88.424.189,17	100,00%	409.418.624,18	KECAMATAN MORI ATAS
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	47.800.000,00	100,00%	48.801.346,15	100,00%	51.697.795,14	100,00%	53.765.706,95	100,00%	55.916.335,23	100,00%	58.152.988,64	100,00%	268.334.172,11	KECAMATAN MORI UTARA
5	1	6	Sasaran 6 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			100,00%			

Kode				Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
5	2	1	Sasaran 1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Jumlah konflik di masyarakat																	
			Jumlah korban kriminalitas																		
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Kecamatan	10 Kecamata n	70.279.050,00	10 Kecamat an	109.419.730,38	10 Kecamatan	426.925.308,40	10 Kecamata n	547.525.793,10	10 Kecamat an	690.538.719,69	10 Kecamata n	763.004.345,15	10 Kecamata n	2.537.413.896,71	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	95,00%	95,00%	35.000.200,00	95,00%	54.709.701,06	96,00%	336.090.136,40	97,00%	382.398.966,61	98,00%	440.218.433,80	99,00%	519.849.114,28	99,00%	1.733.266.352,15	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00%	100,00%	7.685.545.966,00	100,00%	5.452.716.625,38	100,00%	2.458.719.285,48	100,00%	2.550.688.454,08	100,00%	2.633.343.455,67	100,00%	2.738.677.193,89	100,00%	15.834.145.014,49	BAGIAN KESEJAHTERA N RAKYAT	
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Jumlah ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan Ormas, Ormas Asing di daerah	100,00%	100,00%	83.094.950,00	100,00%	52.500.000,00	100,00%	66.788.576,72	100,00%	81.953.410,92	100,00%	98.037.170,77	100,00%	115.084.421,59	100,00%	414.363.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
815	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	100,00%	100,00%	25.000.000,00	100,00%	66.217.590,00	100,00%	67.873.029,75	100,00%	69.569.855,49	100,00%	71.309.101,88	100,00%	73.091.829,43	100,00%	348.061.406,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
816	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya masyarakat yang sadar dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100,00%	100,00%	244.891.650,00	100,00%	29.769.691,09	100,00%	30.513.933,37	100,00%	31.276.781,70	100,00%	32.058.701,24	100,00%	32.860.168,78	100,00%	156.479.276,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	TOTAL				1.082.413.746.563,00		1.068.784.179.348,08		1.111.535.546.522,01		1.155.996.968.382,87		1.202.236.847.118,20		1.250.326.321.002,93		5.788.879.862.374,08	



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan.

Strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 menekankan pada perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi daerah dengan mewujudkan misi pembangunan, memperkuat pembangunan wilayah, serta melaksanakan program unggulan terutama Gerakan Desa Sejahtera dan penguatan peran kecamatan.

6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi

Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan urusan wajib pemerintah daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah.

6.1.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kesatu: **Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), affordability (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, ketiga, kelima, dan kesepuluh; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kesatu
RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.1 Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan dasar kesehatan	• Peningkatan Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar kesehatan • Perluasan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan
	1.2 Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	• Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas • Meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan melalui pembinaan • Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk masyarakat (BPJS/Kartu Indonesia Sehat)
	1.3 Meningkatnya status gizi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat	• Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam manajemen kesehatan • Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan gizi masyarakat
	1.4 Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB	• Sosialisasi penggunaan KB terhadap Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) • Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mensukseskan program KB • Mengembangkan Kampung KB • Mengembangkan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	- basis data keluarga terpadu - Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi - Meningkatkan promosi, edukasi dan literasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana
	1.5 Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan	- Peningkatan mutu kesehatan lingkungan termasuk penatalaksanaan kasus dan keputusan rantai penularan - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan lingkungan - Peningkatan peran masyarakat pengelolaan kesehatan lingkungan - Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait penyakit menular dan penyakit tidak menular
	1.6 Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan	- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam manajemen kesehatan lingkungan - Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan

6.1.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kedua

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kedua: **Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, keempat, kelima, kedelapan dan kesepuluh; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kedua
RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
2. Meningkatkan Derajat pendidikan masyarakat	2.1 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Meningkatkan akses pelayanan Pendidikan dasar dan menengah	• Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan dasar dan menengah pendukung pembelajaran yang memadai • Peningkatan perluasan dan akses Pendidikan dasar dan menengah
		Percepatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah	• Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah • Mengembangkan Desa Cerdas • Meningkatkan cakupan jaminan asuransi pendidikan masyarakat (Kartu Indonesia Pintar) • Mengembangkan beasiswa bagi pelajar dari rumah tangga miskin • Mengantisipasi penyediaan dukungan akses data bagi proses belajar daring (<i>online</i>)
	2.2 Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	• Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik
		Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah	• Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga pengajar • Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan • Memperkuat manajemen sekolah • Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar • Meningkatkan pemberian penghargaan bagi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi • Meningkatkan kapasitas antisipatif sekolah dalam penyelenggaraan sistem belajar daring
	2.3 Meningkatnya minat baca masyarakat	Peningkatan standar pelayanan perpustakaan umum	• Meningkatkan promosi minat baca • Meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan dan kearsipan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja			• Mengembangkan perpustakaan berbasis komunitas
		Peningkatan literasi digital masyarakat	• Meningkatkan fasilitas publik yang mendukung literasi digital • Meningkatkan pelatihan literasi digital masyarakat • Memperluas promosi penggunaan internet yang benar
	3.1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian dan Balai Latihan Kerja	• Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan • Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh • Meningkatkan kerjasama skema “on the job training” dengan swasta
	3.2. Berkembangnya kewirausahaan	Meningkatkan daya tarik dan minat para pelaku usaha pemula dalam kewirausahaan	• Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha kewirausahaan • Perluasan jangkauan dan kemudahan akses pemuda terhadap sarana dan prasarana kewirausahaan • Peningkatan kapasitas pelaku usaha pemula dalam kewirausahaan melalui pembinaan
		Pengembangan sistem inkubasi bisnis	• Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dalam pola bapak asuh • Meningkatkan promosi UMKM dan menyediakan akses lahan untuk UMKM
	3.3. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja	Pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja	• Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja
	3.4. Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	Revitalisasi pusat-pusat penelitian dan inovasi	• Mengembangkan pusat data dan informasi daerah • Mengembangkan teknologi tepat guna • Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan pusat penelitian lainnya • Mengembangkan kerjasama dengan swasta • Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan koperasi dan UMKM • Pembinaan untuk penciptaan jiwa entrepreneur dan kemandirian masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			untuk berwira usaha
	3.5 Terlaksananya Pengembangan Jasa Kontruksi	Pembinaan pengembangan Jasa Kontruksi	• Meningkatkan Jumlah Tenaga Terampil Kontruksi • Meningkatkan Kerjasama Strategis Dengan Lembaga Pemerintahan Dan Masyarakat dalam SDM KontruksiYang Kompeten • Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembinaan Kontruksi • Meningkatkan Mutu Pembinaan Jasa Kontruksi • Pelaksanaan Pemberdayaan, Pengawasan serta pengendalian mutu dalam peningatan kapasitas jasa kontruksi • Pengelolaan informasi teknologi kontruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan jasa kontruksi • Pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan kontruksi
4. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	4.1 Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga	Meningkatkan prestasi pemuda dalam seni, budaya dan olah raga	• Peningkatan peyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seni, budaya dan olah raga • Pemantapan program seni, budaya, dan olah raga di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan • Peningkatan keterampilan dan keahlian pemuda dalam seni, budaya dan olah raga • Peningkatan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarna penunjang kegiatan kepemudaan	• Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender	5.1. Meningkatnya partisipasi perempuan	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas Lembaga / kelompok masyarakat serta gender	• Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan • Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan • Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan
		Pengarusutamaan keadilan dan kesetaraan gender	• Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gender • Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan pembangunan • Memperkuat organisasi perempuan

6.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mendukung terwujudnya Misi Ketiga: **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, kelima, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, keduabelas, keduabelas, ketigabelas dan keempatbelas dan kelimabelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga
RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	6.1 Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Revitalisasi Pertanian	• Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan • Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan • Mengembangkan kerjasama usaha kelompok tani dan pelaku usaha
		Penguatan Rantai Nilai	• Mengembangkan hilirisasi pengolahan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Industri	hasil pertanian Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertambangan
		Optimalisasi Jasa Perdagangan dan Pariwisata	- Mengembangkan Desa Wisata - Memperluas kerjasama perdagangan antardaerah
	6.2. Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pengembangan Investasi Daerah	- Meningkatkan sistem pelayanan terpadu dalam penanaman modal (<i>Online Single Submission</i>) - Mengembangkan promosi dan kerjasama investasi
		Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduated dan pengangguran sesuai potensi	- Peningkatan dan pengembangan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran - Peningkatan program kerjasama dengan Lembaga dan instansi swasta dalam penyerapan tenaga kerja
7. Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	7.1. Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan produksi dan diversifikasi produk pangan	- Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian - pemberdayaan dan peran masyarakat petani ketahanan pangan - Meningkatkan produksi pangan lokal - Meningkatkan pengamanan pasokan pangan - Meningkatkan pengendalian harga pangan
	7.2. Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Meningkatkan SDM pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	- Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan - Peningkatan pemberdayaan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan
		Peningkatan produksi dan produktivitas produk perikanan	- Peningkatan upaya perlindungan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan - Penyediaan inovasi teknologi guna peningkatan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk perikanan - Peningkatan penyediaan dan penjaminan ketersediaan sarana dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			prasarana pengembangan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan
	7.3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Meningkatkan daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	• Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan koperasi dan UMKM • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya pelaku usaha koperasi dan UMKM • Peningkatan kemitraan strategis antara koperasi, UMKM dengan pengusaha besar
8. Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas	8.1. Meningkatnya kemandirian desa	Percepatan pengurangan kemiskinan	• Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin Mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha
		Meningkatkan Peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	• Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes • Peningkatan kemitraan strategis antara BUMDes dengan pelaku usaha
		masyarakat Meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa	• Peningkatan kapasitas kelembagaan • Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa • Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan • Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna • Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan
		Optimalisasi Jasa Perdagangan dan Pariwisata	• Mengembangkan Desa Wisata
9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	9.1. Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	• Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu • Mempertahankan daya dukung lahan • Meningkatkan pencegahan dan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penanganan lahan kritis • Meningkatkan pencegahan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
	9.2. Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Penegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	• Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup • Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan
	9.3. Meningkatnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana	Penguatan Ketahanan dan Ketangguhan Bencana	• Mengembangkan Desa Tangguh Bencana • Menyiapkan peta rawan bencana • Mengembangkan prasarana dan sarana pencegahan dan penanganan bencana • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana
10. Mewujudkan penataan ruang wilayah dan pengelolaan pertanahan secara terpadu dan konsisten	10.1. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RRTR secara konsisten	• Melakukan percepatan Penyusunan dokumen RTRW dan RRTR • Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang • Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan tata ruang • Melaksanakan Penataan Bangunan Gedung Sesuai Pemanfaatan Ruang dan Peruntukannya
	10.2 Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Percepatan Reforma Agraria dan Penataan Pertanahan	• Meningkatkan dukungan akses pertanahan • Meningkatkan pencegahan konversi lahan produktif • Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran pertanahan

6.2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keempat: **Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah**; dan mendukung



terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, kesebelas, ketigabelas, keempatbelas, dan kelimabelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Keempat
RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
11. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	11.1 Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Baku	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air baku	• Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air baku • Peningkatan kualitas layanan dan akses terhadap air baku • Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur pengendalian banjir • Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur penangaman pantai
	11.2. Tersedianya prasarana dan sarana air minum	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat serta Peningkatan kualitas Sistem Penyediaan Air Minum	• Meningkatkan prasarana dan sarana Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat • Meningkatkan pembangunan, perluasan dan pemeliharaan jaringan SPAM • Menyusun dokumen pengelolaan SPAM
	11.3 Tersedianya prasarana dan sarana listrik	Perluasan jaringan listrik	• Mengembangkan sumber pembangkit listrik mikrohidro dan sumber lainnya • Meningkatkan pemeliharaan jaringan listrik
	11.4 Tersedianya prasarana dan sarana pemerintah desa dan kecamatan	Meningkatkan ketersediaan dan sarana penunjang layanan pemerintah desa dan kecamatan	• Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan
	11.5 Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyediaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	• penyediaan dan Peningkatan pengelolaan sistem air limbah dan sanitasi • Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan • Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah • Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi • Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	11.6 Tersediannya pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase	Penyediaan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah
	11.7 Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Penyediaan Dan Penataan Bangunan Gedung	• Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi • Mengembangkan pembangunan dan pengelolaan sistem drainase • Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung daerah • Pemeliharaan dan Perawatan bangunan gedung daerah
12. Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman	12.1 Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum	Percepatan penyediaan perumahan dan penataan lingkungan permukiman	• Pembangunan rumah layak huni • Mengurangi backlog perumahan • Meningkatkan Infrastruktur penunjang Kawasan Permukiman • Membangun prasarana, sarana dan utilitas Perumahan • Menyusun dokumen penataan dan pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman
	12.2 Tersediannya Pengembangan Permukiman	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	• secara bertahap terhadap permukiman layak dan aman untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
	12.3 Tersediannya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan Dokuen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman	• Meningkatkan kerjasama atau sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha • Pemanfaatan ruang kawasan permukiman, rencan struktur ruang dan rencan pola ruang
	12.4 Tersedianya Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan	• Menigkatkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dikawsan perumahan
	12.5 Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Percepatan Peningkatan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Pemanfaan teknologi dan sitem dalam penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dan kawsan permukiman



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
13. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/ kota lainnya	13.1 Terbangunnya jaringan transportasi darat	Pengembangan sistem transportasi terpadu	• Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat • Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut • Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Jalan dan jembatan • Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamagaaan • Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamagaaan
		Pembinaan pengembangan Jasa Konstruksi	• Meningkatkan Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi • Meningkatkan Kerjasama Strategis dengan Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat dalam SDM Konstruksi yang Kompeten. • Meningkatkan Mutu Pembinaan Jasa Konstruksi • Pengelolaan informasi teknologi konstruksi dan pelaksanaan fasilitas
	13.2 Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi terpadu	• Mengembangkan Desa Digital • Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana telekomunikasi • Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap informasi telekomunikasi • Memperluas kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi

6.2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kelima: **Misi 5: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**; dan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terutama tujuan kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, kesepuluh, ketigabelas, keenambelas dan ketujuhbelas; maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Kelima
RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
14. Meningkatkan kinerja pelayanan publik	14.1 Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur • Meningkatkan pengendalian dan pengawasan
	14.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	• Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah • Memperkuat pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
	14.3 Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	• Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu
	14.4 Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	• Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi • Meningkatkan kapasitas aparat PD • Mengembangkan satu PD satu Inovasi
	14.5 Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penerapan Layanan Jemput Bola dan Layanan Basis Online	• Penyediaan Fasilitas penunjang demi kelancaran kegiatan administrasi perkantoran • Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Penduduk langsung kepada masyarakat • Meningkatkan Mutu Pelayanan pencatatan sipil • Pengembangan sistem informasi kependudukan • Penyusunan profil kependudukan
	14.6 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemantapan system brokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	• Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	14.7 Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Revitalisasi pusat-pusat penelitian dan inovasi	• Menyelenggarakan festival teknologi tepat guna
15. Mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan demokratis	15.1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil	• Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban lingkungan • Percepatan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban • Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban lingkungan

6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Mengembangkan Wilayah

Dengan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan desa/kelurahan, penguatan peran kecamatan, dan pengembangan kawasan strategis.

6.1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa

Dengan memperhatikan pelaksanaan otonomi desa, maka strategi pembangunan wilayah desa/kelurahan di Morowali Utara diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan Desa Sejahtera; (2) peningkatan kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan; (3) peningkatan ketahanan pangan; (4) pengembangan inovasi dan keunggulan desa/kelurahan; (5) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (6) peningkatan konektivitas antar desa/kelurahan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan; (2) memberdayakan masyarakat desa/kelurahan; (3) membangun prasarana dasar tingkat desa/kelurahan; (4) membangun prasarana ekonomi pedesaan; (5) mengembangkan ekonomi kreatif pedesaan; dan (6) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan. Pembangunan kawasan perdesaan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemandirian desa, terutama diprioritaskan pada desa-desa yang statusnya sangat tertinggal dan tertinggal.



6.1.2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Strategi pembangunan wilayah kecamatan diarahkan untuk: (1) mendukung pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan; (2) pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal yang unggul dan berdaya saing; (3) peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; (4) peningkatan ketahanan pangan; (5) pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; (6) peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta (7) meningkatkan konektivitas antar desa/kelurahan dan antarkecamatan.

Gerakan Desa Sejahtera merupakan gerakan bersama yang didasarkan pada semangat, harapan dan tindakan meraih masa depan membangun desa yang produktif, adaptif, partisipatif dan emansipatif. Gerakan Desa Sejahtera Kita didasarkan pada visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera yang memuat gelora dan getaran semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan daerah. Gerakan Desa Sejahtera juga sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs-*Sustainable Development Goals*) khususnya SDGs Desa dengan prinsip pengutamaan nilai-nilai kemanusiaan, mengikutsertakan semua (*leave no one behind*), dan mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Gerakan Revitalisasi Kecamatan diarahkan untuk mendukung penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pengembangan kawasan ekonomi daerah.

Arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain adalah: (1) meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; (2) membangun prasarana dasar wilayah kecamatan; (3) membangun prasarana ekonomi kecamatan; (4) mengembangkan ekonomi kreatif tingkat kecamatan; dan (5) memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.

(1) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mori Atas

Kecamatan Mori Atas terdiri dari 14 desa. Luas wilayah adalah 15,08 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 10,809 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.29 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah cabai, kakao dan kelapa sawit. Hasil perikanan utama adalah perikanan darat. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah atraksi seni.



Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Mori Atas pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Mori Atas Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	• Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan



(2) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lembo

Kecamatan Lembo terdiri dari 14 desa. Luas wilayah adalah 6,75 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 15,853 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 21.32 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah Petani Karet, petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah karet, kakao dan kelapa sawit. peternakan yang dikembangkan adalah sapi, kambing dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Lembo pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Lembo Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dna kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	• Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
ketangguhan sosial masyarakat			dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(3) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Lembo Raya

Kecamatan Lembo Raya terdiri dari 10 desa. Luas wilayah adalah 6,57 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,821 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 12.53 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah petani karet, petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah cabai, Karet, kakao dan kelapa sawit. Hasil perikanan utama adalah perikanan darat. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Lembo Raya pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Lembo Raya Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan	• Mendukung pengembangan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		ketersediaan listrik	listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	• Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(4) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Petasia Timur

Kecamatan Petasia Timur terdiri dari 12 desa. Luas wilayah adalah 5,10 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 17,997 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 32.23 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah kelapa sawit. Hasil perikanan utama adalah Perikanan tambak. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi potong, babi, kambing, ayam kampung dan itik. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Petasia Timur pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Petasia Timur Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dna



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	• Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(5) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Petasia

Kecamatan Petasia terdiri dari 7 desa. Luas wilayah adalah 6,46 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 7,711 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 27.84 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah Kakao dan pala. Hasil perikanan utama adalah perikanan darat. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi, kambing dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.



Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Petasia pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Petasia Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	• Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan



(6) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Petasia Barat

Kecamatan Petasia Barat terdiri dari 10 desa. Luas wilayah adalah 4,80 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 16,428 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 16.05 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah petani dan palawija.

Hasil produksi utama adalah Kelapa sawit, kakao dan kelapa dalam. Hasil Perikanan adalah perikanan darat. Peternakan yang dikembangkan adalah sapi potong, kerbau, kambing, babi dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Petasia Barat pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Petasia Barat Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dna kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		aman	
		Perluasan akses transportasi	Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(7) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mori Utara

Kecamatan Mori Utara terdiri dari 8 desa . Luas wilayah adalah 10,48 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,023 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7.65 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah petani dan palawija.

Hasil produksi utama adalah jahe, Kelapa sawit, kakao. Hasil perikanan utama adalah Perikanan perairan umum. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi potong, babi dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Mori Utara pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Mori Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dna kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan	• Meningkatkan pelayanan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(8) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Soyo Jaya

Kecamatan Soyo Jaya terdiri dari 10 desa. Luas wilayah adalah 6,05 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,821 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14.57 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah Kakao, Kelapa sawit dan kopi. Hasil perikanan utama adalah perikanan darat kolam. Selain itu, peternakan yang dikembangkan adalah sapi potong, kambing dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Soyo Jaya pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 6.13
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	• Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(9) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Bungku Utara

Kecamatan Bungku Utara terdiri dari 23 desa. Luas wilayah adalah 24,06 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 15,853 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 6,59 jiwa perkm². Sebagian besar



penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah Kelapa dalam, Kakao, Pala dan kelapa sawit. Hasil peternakan yang dikembangkan adalah Sapi dan ayam Kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Bungku Utara pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Bungku Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dna kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat dan aman	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman
		Perluasan akses transportasi	Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakkan Siskamling • Menggerakkan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu	Meningkatnya kepuasan	Pengembangan pelayanan	• Mengelola basis data kependudukan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	masyarakat	prima	• Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

(10) Strategi dan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Mamosalato

Kecamatan Mamosalato terdiri dari 14 desa. Luas wilayah adalah 14,64 persen dari luas Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 10,809 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7.38 jiwa perkm². Sebagian besar penduduk mata pencaharian adalah nelayan dan petani padi dan palawija.

Hasil produksi utama adalah Cabai, tomat, Kelapa dalam, kakao dan pala. Hasil peternakan yang dikembangkan adalah sapi potong, kambing dan ayam kampung. Potensi pariwisata adalah wisata bahari dan atraksi seni.

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Mamosalato pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
Kecamatan Mamosalato Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan	Percepatan pengembangan ekonomi desa	• Mengembangkan komoditas unggulan • Memperkuat pemberdayaan masyarakat • Mengembangkan desa wisata • Mengembangkan BUMDes • Memperluas kerjasama dna kemitraan dalam pengembangan usaha desa
		Perluasan jangkauan dan mutu pelayanan pendidikan	• Meningkatkan pelayanan pendidikan anak usia dini • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan sekolah • Meningkatkan promosi Pendidikan
		Peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu dan di desa • Mendukung pemeliharaan dan pengelolaan Puskesmas • Meningkatkan promosi kesehatan
Meningkatkan kemajuan desa	Meningkatnya akses prasarana dasar	Peningkatan ketersediaan air bersih	• Meningkatkan pemeliharaan sumber dan jaringan air bersih
		Peningkatan ketersediaan listrik	• Mendukung pengembangan listrik energi terbarukan
		Pengelolaan lingkungan perumahan dan permukiman yang bersih,	• Mewujudkan gerakan kebersihan lingkungan perumahan dan permukiman • Mewujudkan gerakan ketertiban dan keamanan lingkungan perumahan dan permukiman



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		sehat dan aman	
		Perluasan akses transportasi	Mendukung pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan desa berbasis masyarakat
Meningkatkan solidaritas, ketahanan dan ketangguhan sosial masyarakat	Meningkatnya rasa aman masyarakat	Pengembangan seni, budaya dan olah raga	• Mengembangkan gerakan sadar budaya • Menyelenggarakan pertunjukan dan festival seni dan budaya • Menyelenggarakan pertandingan dan kompetisi olah raga
		Penguatan ketahanan dan ketangguhan masyarakat	• Menggerakan Siskamling • Menggerakan kegiatan kepemudaan • Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang cepat, mudah dan berkualitas	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan pelayanan prima	• Mengelola basis data kependudukan • Meningkatkan mutu administrasi pemerintahan • Meningkatkan mutu administrasi perijinan

6.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, yaitu meliputi:

- (1) Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- (2) Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik;
- (3) Pembangunan secara menyeluruh dan merata;
- (4) Pembangunan berbasis *agroindustri* dan *agromarketing* yang dimulai dari pedesaan sampai ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan;
- (5) Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat;
- (6) Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
- (7) Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom.

Dalam mendukung prioritas daerah, maka dalam lima tahun ke depan akan dilaksanakan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah. Gerakan Desa Sejahtera merupakan gerakan bersama yang didasarkan pada semangat, harapan



dan tindakan meraih masa depan membangun desa yang produktif, adaptif, partisipatif dan emansipatif. Gerakan Desa Sejahtera Kita didasarkan pada visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera yang memuat gelora dan getaran semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan daerah. Gerakan Desa Sejahtera juga sejalan dengan komitmen global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs- *Sustainable Development Goals*) khususnya SDGs Desa dengan prinsip pengutamaan nilai-nilai kemanusiaan, mengikutsertakan semua (*leave no one behind*), dan mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Gerakan Revitalisasi Kecamatan diarahkan untuk mendukung penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat; pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pengembangan kawasan ekonomi daerah.

Gerakan Inovasi Daerah diarahkan untuk setiap perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan; meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik; mengembangkan inovasi, daya saing dan keunggulan daerah di setiap desa/kelurahan dan kecamatan; serta menjamin kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pendampingan, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah; serta perluasan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, media dan mitra pembangunan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah tersebut, maka tahapan pembangunan dalam lima tahun ke depan Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut.

(1) Tema Pembangunan Tahun 2021

Tahun 2021 adalah masa transisi pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara yang menekankan konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan melalui penyusunan dokumen perencanaan, penataan organisasi dan sekaligus penyiapan rencana tindak Gerakan Desa Sejahtera, Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah. Selain itu, tahun 2021 merupakan masa transisi pemulihan pandemi Covid-19 dengan fokus pada pemulihan kesehatan dan kegiatan ekonomi pasca Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021, adalah “Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan”.

(2) Tema Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan masa pemantapan pemulihan ekonomi dan kesehatan, dan sekaligus menegaskan komitmen membangun desa dan daerah yang sehat, cerdas dan sejahtera



melalui Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah. Tema pembangunan tahun 2022 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan Yang Inklusif” dengan prioritas pada pelaksanaan protokol kesehatan, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa, pengembangan UMKM, pengembangan inovasi daerah dan peningkatan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

(3) Tema Pembangunan Tahun 2023

Tahun 2023 menjadi landasan untuk mendorong transformasi dan percepatan pembangunan dengan meningkatkan manfaat dari pelaksanaan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Tema pembangunan tahun 2023 adalah “Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal” dengan prioritas pada pengembangan keunggulan desa dan kecamatan, peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan yang didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah, peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.

(4) Tema Pembangunan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan pemantapan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Tema pembangunan tahun 2024 adalah “Pemantapan dan Perluasan Rantai Nilai Ekonomi untuk Memperkuat Daya Saing Daerah” dengan prioritas pada pengembangan dan penguatan inovasi daerah oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, pengembangan keunggulan desa dan kecamatan, perluasan kerjasama dan kemitraan dalam perdagangan dan investasi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, peternakan, pertambangan, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, serta pariwisata yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan dan pemerataan konektivitas transportasi dan informasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

(5) Tema Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 memastikan bahwa sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dapat tercapai. Oleh sebab itu, tahun 2025



meneruskan dan menegaskan pencapaian pembangunan pada tahun sebelumnya dengan meningkatkan kualitas dan manfaat dari pelaksanaan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah. Tema pembangunan tahun 2025 adalah “Perluasan Kerjasama dan Kemitraan dalam Memperkuat Rantai Nilai Daerah” dengan prioritas pada peningkatan pemantapan dan perluasan inovasi daerah oleh seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, pengembangan keunggulan desa dan kecamatan, perluasan kerjasama dan kemitraan dalam perdagangan dan investasi dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, peternakan, pertambangan, industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, serta pariwisata yang didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, perluasan konektivitas transportasi dan informasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

(6) Tema Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 memastikan bahwa semua prioritas pembangunan sudah dapat diselesaikan, semua target pembangunan yang ditetapkan dapat tercapai secara tuntas, dan visi Kabupaten Morowali Utara Sehat, Cerdas dan Sejahtera dapat diwujudkan. Hal ini ditandai dengan perubahan dan kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dan daerah Kabupaten Morowali Utara yang lebih maju, berkembang, sejahtera dan bermartabat sebagian landasan pembangunan berikutnya. Oleh sebab itu, tema pembangunan 2026 adalah “Perwujudan Perubahan, Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Pembangunan yang Berkelanjutan”.

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan jangka menengah. Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada program yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan dan penetapan program pembangunan daerah 2021-2026 mempertimbangkan prioritas daerah dalam mengatasi permasalahan dan isu strategis daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah secara nyata, merata dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan tahunan, program prioritas



dapat dimutakhirkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan pendanaan.

Rincian program prioritas beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan adalah sebagai berikut.

Tabel 6.5
Program Pembangunan Daerah
RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata								
01.01	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
01.01.01	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat				Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52,00	46,00		
					Angka kesakitan per 100 penduduk	12,00	8,00		
					Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100,00%	100,00%		
					Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100,00%	100,00%		
		Meningkatkan akses pelayanan dasar kesehatan	Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar kesehatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perluasan jangkauan dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar kesehatan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) Data Kemiskinan Per Tahun	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL DAERAH
01.01.02	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat				Angka harapan hidup	69,80	71,20		
					Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	98,75%	100,00%		
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Meningkatkan kualitas SDM bidang kesehatan melalui pembinaan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KESEHATAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk masyarakat (BPJS/Kartu Indonesia Sehat)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KESEHATAN DAERAH
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pembangunan gedung rumah sakit	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS LEE
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS TOMATA

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS BETELEME
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS PETUMBEA
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS MOLINO
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS KOLONODALE
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS BATURUBE

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS PANCAMAKMUR
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS PANDAUKE
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS WONGKO NDAYA
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS TAMBAYOLI
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS ANUTOLUWU

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS POTOWE INDO LLJO
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS MAYUMBA
01.01.03	Meningkatnya status gizi masyarakat				Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100,00%	100,00%		
					Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100,00%	100,00%		
01.01.04	Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana				Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3,00	2,00		
					Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93,00%	95,00%		
					Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12%	85,15%		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB	Sosialisasi penggunaan KB terhadap Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan peserta KB Rasio Akseptor KB Rata-rata jumlah anak per jumlah Umur perempuan menurut umur perkawinan Distribusi Alat Pembentukan Kampung Persentase Klinik KB yang dibentuk	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
			Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mensukseskan program KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase klinik KB yang dibentuk	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Meningkatnya Pembinaan Pelatihan Bagi Keluarga Sejahtera	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.01.05	Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik				Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,40%	0,40%		
					Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120,00	90,00		
01.01.06	Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan				Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70,00	80,00		
2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
02.02	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat								
02.01.01	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah				Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,30	12,80		
					Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,80	9,30		
					Angka melek huruf	98,12	99,50		
		Meningkatkan akses pelayanan Pendidikan dasar dan menengah	Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan dasar dan menengah pendukung pembelajaran yang memadai	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase rata-rata lama sekolah melanjutkan sekolahAPS Angka Putus Sekolah APM APK tingkat SD/MISMP/Mts	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan perluasan dan akses Pendidikan dasar dan menengah						
		Percepatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah	Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah						
			Mengembangkan Desa Cerdas						
			Meningkatkan cakupan jaminan asuransi pendidikan masyarakat (Kartu Indionesia Pintar)						
			Mengembagkan beasiswa bagi pelajar dari rumah tangga miskin Mengantisipasi penyediaan dukungan akses data bagi proses belajar daring (online)	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase APS dan APK PAUD	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.01.02	Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah				Angka kelulusan SD/MI	100,00%	100,00%		
					Angka kelulusan SMP/MTs	100,00%	100,00%		
					Angka kelulusan SMA/MA/SMK	100,00%	100,00%		
		Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat	Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guruSD/SDLB SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/S2 dan bersertifikasi pendidik	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
		Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga pengajar						
			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan						
			Menguatkan manajemen sekolah						
			Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan pemberian penghargaan bagi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi						
			Meningkatkan kapasitas antisipatif sekolah dalam penyelenggaraan sistem belajar daring						
02.01.03	Meningkatnya minat baca masyarakat				Jumlah pengunjung perpustakaan	1,50	2,80		
		Peningkatan standar pelayanan perpustakaan umum	Meningkatkan promosi minat baca	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
02.03	Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja								
02.01.01	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja				Pertumbuhan jumlah tenaga kerja terampil (tingkat pendidikan diatas SMA/SMK)	29000,00	30000,00		
					Pertumbuhan jumlah lulusan Balai Latihan Kerja (%)	10,00	10,00		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian dan Balai Latihan Kerja	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
			Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
02.01.02	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula				Pertumbuhan jumlah wirausahawan baru	100,00%	100,00%		
		Meningkatkan daya tarik dan minat para pelaku usaha pemula dalam kewirausahaan	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha kewirausahaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan UMKM	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Perluasan jangkauan dan kemudahan akses pemula terhadap sarana dan prasarana kewirausahaan						
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha pemula dalam kewirausahaan melalui pembinaan						
		Pengembangan sistem inkubasi bisnis	Meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dalam pola bapak asuh						
			Meningkatkan promosi UMKM dan menyediakan akses lahan untuk UMKM						
02.01.03	Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja				Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	100,00%	100,00%		
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Besaran Sengketa Pengusahan Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.01.04	Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan				Jumlah teknologi tepat guna yang didiseminasikan kepada petani, nelayan, dan UMKM	2,00	4,00		
		Revitalisasi pusat-pusat penelitian dan inovasi	Mengembangkan pusat data dan informasi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tingkat capaian Pengembangan UMKM	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
02.01.05	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi				Jumlah Tenaga Terampil	35,12%	60,31%		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	35,12%	60,31%		
		Pembinaan pengembangan Jasa Kontruksi	Meningkatkan Jumlah Tenaga Terampil Kontruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga terampil Konstruksi	35,12%	60,31%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan Kerjasama Strategis Dengan Lembaga Pemerintahan Dan Masyarakat dalam SDM Kontruksi Yang Kompeten						
			Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembinaan Kontruksi						
			Meningkatkan Mutu Pembinaan Jasa Kontruksi						
			Pelaksanaan Pemberdayaan, Pengawasan serta pengendalian mutu dalam peningatan kapasitas jasa kontruksi						
			Pengelolaan informasi teknologi kontruksi dan pelaksanaan fasilitasi pengembangan jasa kontruksi						
			Pendayagunaan dan pengelolaan data dan aset bidang material dan peralatan kontruksi						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02.04	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan								
02.01.01	Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga				Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi nasional dan internasional	5,00	20,00		
		Meningkatkan prestasi pemuda dalam seni, budaya dan olah raga	Peningkatan peyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seni, budaya dan olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Benda/situs cagar budaya yang di lestarikan	4 kegiatan	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
			Pemantapan program seni, budaya, dan olah raga di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan keterampilan dan keahlian pemuda dalam seni, budaya dan olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
			Peningkatan organisasi kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarna penunjang kegiatan kepemudaan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang- undangan bidang politik	100,00%	100,00%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
02.05	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender								
02.01.01	Meningkatnya partisipasi perempuan				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,25	10,00		
		Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas Lembaga / kelompok masyarakat serta gender	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan Kesetaran Gender dalam Pembangunan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Tersedianya Perlindungan Khusus Anak	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
			Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah								
03.01	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing								
03.01.01	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata				Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	31,37	28,68		
		Revitalisasi Pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
			Mengembangkan kerjasama usaha kelompok tani dan pelaku usaha	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
			Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertanian	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
					Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tahun)	2,51	3,85		
					Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,01	12,55		
		Penguatan Rantai Nilai Industri	Mengembangkan hilirisasi pengolahan hasil pertambangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Memperluas kerjasama perdagangan antar daerah	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat capaian stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standariasi metrologi legal	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tingkat cakupan perencanaan dan Pembangunan Industri	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pengendalian usaha industri	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan SIINas	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	5716,00	7552,00		
		Optimalisasi Jasa Perdagangan dan Pariwisata	Mengembangkan Desa Wisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
03.01.02	Meningkatnya kemudahan berinvestasi				Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN) (persen)	5,41	7,21		
		Pengembangan Investasi Daerah	Meningkatkan sistem pelayanan terpadu dalam penanaman modal (Online Single Submission)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi. / Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
			Mengembangkan promosi dan kerjasama investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan publik	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
03.02	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat								
03.01.01	Meningkatnya ketahanan pangan				Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00%	100,00%		
		Meningkatkan produksi dan diversifikasi produk pangan	Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			pemberdayaan dan peran masyarakat petani ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
			Meningkatkan produksi pangan lokal	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan angka kerawanan pangan setiap tahun	0,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
			Meningkatkan pengamanan pasokan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	0,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
03.01.02	Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan								
		Meningkatkan SDM pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Peningkatan upaya perlindungan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tingkat Produktivitas Perikanan Tangkap	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERIKANAN DAERAH
			Penyediaan inovasi teknologi guna peningkatan kualitas, kuantitas dan keberlanjutan produk perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tingkat Produksi Perikanan budidaya	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERIKANAN DAERAH
			Peningkatan penyediaan dan penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana pengembangan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas	6 kelompok	10 kelompok	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERIKANAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya ragam produksi hasil perikanan, Meningkatnya nilai produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing, Kelompok usaha pengelola hasil perikanan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERIKANAN DAERAH
03.01.03	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM				Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM (persen)	5,00	8,00		
		Meningkatkan daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya pelaku usaha koperasi dan UMKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi sehat	0,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengembangan usaha dan diversidikasi produk koperasi dan UMKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI	Persentase Peningkatan Perkoperasian	0,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
			Peningkatan kemitraan strategis antara koperasi, UMKM dengan pengusaha besar	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	100,00%	100,00%	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
03.03	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas								
03.01.01	Meningkatnya kemandirian desa				Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	12,00	8,00		
					Jumlah BUMDesa yang aktif	20,00	50,00		
		Percepatan pengurangan kemiskinan	Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatkan Peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Mengembangkan kapasitas usaha BUMDes	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Peningkatan kemitraan strategis antara BUMDes dengan pelaku usaha						
		Meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa	Peningkatan kapasitas kelembagaan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Optimalisasi Jasa Perdagangan dan Pariwisata	Mengembangkan Desa Wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03.04	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan								
03.01.01	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan				Indeks Kualitas Air (kategori)	Baik	Baik		
					Indeks Kualitas Udara (kategori)	Baik	Baik		
					Indeks Tutupan Lahan (kategori)	Baik	Baik		
		Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersedianya dokumen Lingkungan Hidup	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah yang diangkut	80,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03.01.02	Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan				Persentase penyelesaian kasus perusakan lingkungan	100,00	100,00		
		Penegakkan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
			Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
03.01.03	Meningkatnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana				Indeks Risiko Bencana	tinggi	tinggi		
		Penguatan Ketahanan dan Ketangguhan Bencana	Mengembangkan Desa Tangguh Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
			Menyiapkan peta rawan bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Tingkat cakupan penanganan bencana	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL DAERAH
			Mengembangkan prasarana dan sarana pencegahan dan penanganan bencana						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana						
03.05	Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten								
03.01.01	Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah				Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah	100,00	100,00		
		Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan RRTR secara konsisten	Melakukan percepatan Penyusunan dokumen RTRW dan RRTR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	30,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
			Mengembangkan sistem informasi berbasis spasial						
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang						
			Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan tata ruang	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
03.01.02	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah				Persentase tanah dengan sertifikat				
					Persentase kasus sengketa tanah	0,00	0,00		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PEMERINTAHAN
4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah								
04.01	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar								
04.01.01	Tersedianya prasarana dan sarana air baku				Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik	42,00%	67,00%		
					Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	48,50	55,00		
		Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penyediaan air baku	Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air baku	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	37,00%	67,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
			Peningkatan kualitas layanan dan akses terhadap air baku		Persentase Kawasan Permukiman Terlindungi infrastruktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	67,5%	100,00%		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur pengendalian banjir						
			Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur pengaman pantai	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
04.01.02	Tersedianya prasarana dan sarana air bersih				Persentase desa dengan akses air bersih	57,50	65,00		
					Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	56,50	65,00		
		Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat serta Peningkatan kualitas Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatkan prasarana dan sarana Penyediaan Air Minum berbasis masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Melalui SPAM di seluruh Kabupaten	56,50%	65,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
			Meningkatkan pembangunan, perluasan dan pemeliharaan jaringan SPAM						
			Menyusun dokumen pengelolaan SPAM						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.03	Tersedianya prasarana dan sarana listrik				Persentase desa dengan akses listrik	93,00	95,00		
					Persentase rumah tangga dengan akses listrik	93,00	95,00		
		Perluasan jaringan listrik	Mengembangkan sumber pembangkit listrik mikrohidro dan sumber lainnya						
			Meningkatkan pemeliharaan jaringan listrik						
04.01.04	Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kecamatan				Jumlah desa dengan gedung kantor dan peralatan baik				
					Jumlah kecamatan dengan gedung kantor dan peralatan baik				
04.01.05	Tersedianyan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				Jumlah Rumah Tangga Penggunaan Pengelolaan Air Limbah	40%	60,24		
		Penyediaan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	penyediaan dan Peningkatan pengelolaan sistem air limbah dan sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan air Limbah Domestik	40,00%	60,24%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
			Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah						
			Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi						
04.01.06	Tersedianyan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				Panjang Drainase Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Terhambat	64,00%	73,50		
		Penyediaan pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karateristik dan kebutuhan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	64,00%	73,5%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
04.01.07	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung				Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun dan Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	61,98%	71,00%		
		Penyediaan Dan Penataan Bangunan Gedung	Peningkatan perubahan perilaku masyakat dalam mencapai akses aman sanitasi	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung yang laik fungsi	61,00%	71,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Mengembangkan pembangunan dan pengelolaan sistem drainase						
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan bangunan gedung daerah						
			Pemeliharaan dan Perawatan bangunan gedung daerah						
04.02	Meningkatkan mutu perumahan dan permukiman								
04.01.01	Terbangunnya perumahan dan permukiman sesuai standar minimum				Persentase rumah sehat dan layak huni	73,00	80,00		
					Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	72,00	80,00		
		Percepatan penyediaan perumahan dan penataan lingkungan permukiman	Pembangunan rumah layak huni	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni	35,92%	60,19%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
			Mengurangi backlog perumahan						
			Meningkatkan Infrastruktur penunjang Kawasan Permukiman						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Membangun prasarana, sarana dan utilitas Perumahan						
			Menyusun dokumen penataan dan pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman						
04.01.02	Tersedianya Pengembangan Permukiman				Jumlah Pembangunan Infrastruktur yang Dibangun	47,98%	57,50		
		Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	secara bertahap terhadap permukiman layak dan aman untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	47,00%	57,50%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
04.01.03	Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun	0,00%	25,00%		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman	Meningkatkan kerjasama atau sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	0,00%	25,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
			Pemanfaatan ruang kawasan permukiman, rencana struktur ruang dan rencan pola ruang						
04.01.04	Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan				Panjang Jalan dan Luas Lahan Perumahan	0,00%	33,00%		
		Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Perumahan	Menigkatkan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum dikawsan perumahan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU)	Persentase terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	0,00%	33,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.05	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Perumahan	0,00%	25,00%		
		Percepatan Peningkatan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemanfaatan teknologi dan sitem dalam penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dan kawsan permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan dokumen sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi permahan dan kawasan permukiman	0,00%	25,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
04.03	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota								
04.01.01	Terbangunnya jaringan transportasi darat				Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	38,00	60,00		
					Persentase desa dengan akses angkutan darat	48,00%	70,00		
		Pengembangan sistem transportasi terpadu	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	58,00%	70,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tersedianya Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
			Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan						
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transpotasi Jalan dan jembatan						
			Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamagaan						
		Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana system transportasi	Peningkatan dan penyediaan prasarana lalu lintas						
			Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi laut (pelabuhan)						

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
04.01.02	Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi				Persentase Rumah Tangga yang menggunakan internet	7,50	30,00		
					Persentase Rumah Tangga yang menggunakan handphone/telpon	5,00	30,00		
		Pembinaan pengembangan Jasa Konstruksi Pengembangan sistem jaringan te lekomunikasi dan informasi terpadu	Mengembangakn Desa Digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana telekomunikasi						
			Meningkatkan jangkauan dan akses masyarakat terhadap informasi telekomunikasi						
			Memperluas kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi						
5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik								
05.01	Meningkatkan kinerja pelayanan publik								
05.01.01	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif				1. Predikat SAKIP	C	A		
					2. Nilai LPPD	Memuaskan	Memuaskan		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					3. Indeks RB				
					4. Indeks Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Sedang		
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penataan organisasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
			Meningkatkan kapasitas aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10 Perda	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN HUKUM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN ORGANISASI
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN	97,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah	0,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN LEMBO
05.01.02	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel				Opini BPK	WTP	WTP		
		Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten	Meningkatkan mutu laporan kinerja keuangan daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Memperkuat pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya pengembangan data/informasi	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pendapatan dari sektor Pajak, Jumlah dan persentase PAD (Persen)	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05.01.03	Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan				Indeks Maturitas SPBE				
		Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara terpadu	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00%	100,00%	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH
05.01.04	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau				Tingkat kepuasan masyarakat	76,61-88,30/B (Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)		
		Penerapan Manajemen Pelayanan Prima	Mengembangkan satu Perangkat Daerah Satu Inovasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Meningkatkan kapasitas aparat PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Mengembangkan satu PD satu Inovasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS LEE
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS TOMATA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS BETELEME
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS PETUMBEA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS MOLINO
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS KOLONODALE
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS BATURUBE

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS PANCAMAKMUR
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS PANDAUKE
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS WONGKO NDAYA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS TAMBAYOLI
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS ANUTOLUWU
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	PUSKESMAS MAYUMBA

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS SOSIAL DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningktanya Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningktanya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntabel	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERIKANAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN UMUM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PEMERINTAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN KESEJAHTERAN RAKYAT

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN HUKUM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUKASI PIMPINAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	20 Perda	100%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN PETASIA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN PETASIA BARAT
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN PETASIA TIMUR
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN BUNGKU UTARA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN MAMOSALATO
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN SOYO JAYA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN LEMBO RAYA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN MORI ATAS

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN MORI UTARA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	0,00%	100,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
05.01.05	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau				Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	20,00%	100,00%		
		Penerapan Layanan Jemput Bola dan Layanan Basis Online	Penyediaan Fasiilitas penunjang demi kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN PETASIA
			Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendaftaran Penduduk langsung kepada masyarakat	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN PETASIA BARAT
			Meningkatkan Mutu Pelayanan pencatatan sipil	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	0,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN PETASIA TIMUR

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Pengembangan sistem informasi kependudukan	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	0,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN BUNGKU UTARA
			Penyusunan profil kependudukan	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN MAMOSALATO
				PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN SOYO JAYA
				PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN LEMBO
				PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN LEMBO RAYA
				PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN MORI ATAS
				PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN MORI UTARA

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05.01.06	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah				Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100,00%	100,00%		
					Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100,00%	100,00%		
		Pemantapan system brokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
05.01.07	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif				Pertumbuhan Inovasi Daerah	10,00%	100,00%		
					Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	100,00%	100,00%		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Revitalisasi pusat-pusat penelitian dan inovasi	Menyelenggarakan festival teknologi tepat guna	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
05.02	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman dan demokratis								
05.01.01	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah				Jumlah konflik di masyarakat				
					Jumlah korban kriminalitas				
		Meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil	Percepatan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Kecamatan	10 Kecamatan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	95,00%	99,00%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00%	100,00%	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Menumbuhkan rasa kesetiakawanan social, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan Ormas, Ormas Asing di daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
			Pembinaan dan pengembangan forum kerukunan umat beragama	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	100,00%	100,00%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
			Peningkatan jaminan kemanan dan ketertiban lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya masyarakat yang sadar dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100,00%	100,00%	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjelaskan kapasitas fiskal daerah dan prioritas belanja daerah, serta pola kerjasama dan kemitraan dalam pendanaan pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026.

Kebijakan fiskal daerah Kabupaten Morowali 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan potensi sumberdaya alam melalui pengaturan pola hubungan kerjasama investasi di daerah yang lebih adil dan berkelanjutan, serta pengendalian dampak lingkungan untuk menjaga keseimbangan sistem produksi dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- (2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- (3) Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
- (4) Pengembangan desa, kecamatan dan sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- (5) Pengelolaan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- (6) Pembangunan prasarana diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, bermutu,



merata, dan berkeadilan;

- (7) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (*money follow program*);
- (8) Pelaksanaan rekomendasi rencana tindak perbaikan sumber penerimaan daerah (*Revenue Improvement Action Plans-RIAPs*);
- (9) Pengembangan skema kerjasama pendanaan bersama (*sharing*) antara sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta investor;
- (10) Peningkatan investasi swasta dilakukan melalui penyusunan rencana induk dan rencana investasi, disertai dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif.

7.1.1 Perkiraan Belanja Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan daerah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, alokasi belanja daerah diarahkan pada optimalisasi belanja daerah selama lima (5) tahun. Perkiraan alokasi belanja daerah tersebut termasuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Perkiraan alokasi belanja daerah bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026
(Dalam Rp.)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BELANJA DAERAH	1,027,677,095,527.00	1,068,784,179,348.08	1,111,535,546,522.00	1,155,996,968,382.88	1,202,236,847,118.20	1,250,326,321,002.93
I. Belanja Tidak Langsung	561,127,919,054.73	583,573,035,815.92	606,916,957,249.60	631,192,595,539.58	656,440,229,361.16	682,697,838,535.61
1. Belanja Pegawai	348,712,433,055.73	362,660,930,377.96	377,167,367,593.08	392,254,062,296.80	407,944,224,788.67	424,261,993,780.22
2. Belanja Hibah	6,311,795,603.92	6,564,267,428.07	6,826,838,125.19	7,099,911,650.20	7,383,908,116.21	7,679,264,440.86
3. Bantuan Sosial	4,392,873,679.00	4,568,588,626.16	4,751,332,171.21	4,941,385,458.05	5,139,040,876.38	5,344,602,511.44
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	442,840,802.07	460,554,434.16	478,976,611.52	498,135,675.98	518,061,103.02	538,783,547.14
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	188,267,975,914.01	195,798,694,950.57	203,630,642,748.60	211,775,868,458.54	220,246,903,196.88	229,056,779,324.76
6. Belanja Tidak Terduga	13,000,000,000.00	13,520,000,000.00	14,060,800,000.00	14,623,232,000.00	15,208,161,280.00	15,816,414,931.19
II. Belanja Langsung	466,549,176,472.27	485,211,143,531.16	504,619,589,272.41	524,804,372,843.31	545,796,547,757.04	567,628,409,667.32
1. Belanja Pegawai	50,729,071,017.27	52,758,233,857.96	54,868,563,212.28	57,063,305,740.77	59,345,837,970.40	61,719,671,489.22
2. Belanja Barang dan Jasa	265,631,444,934.00	276,256,702,731.36	287,306,970,840.61	298,799,249,674.24	310,751,219,661.21	323,181,268,447.66
3. Belanja Modal	150,188,660,521.00	156,196,206,941.84	162,144,055,19.51	168,941,817,428.29	175,699,490,125.43	182,727,469,730.45

Sumber : Hasil Analisis 2021



7.2 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan program strategis yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung prioritas daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dan program operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai urusan pemerintahan daerah dan sekaligus memenuhi standar pelayanan minimal. Program-program yang disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra PD termasuk rincian kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Rincian rencana program perangkat daerah dengan pagu anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel T-C.16. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kabupaten Morowali Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	184.988.844.844,67	100,00%	174.437.953.870,83	100,00%	181.415.472.025,66	100,00%	188.672.090.906,69	100,00%	196.218.974.542,95	100,00%	925.733.336.190,79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase rata-rata lama sekolah melanjutkan sekolahAPS Angka Putus Sekolah APM APK tingkat SD/MISMP/Mts	100,00%	100,00%	55.066.854.770,30	100,00%	48.744.329.636,09	100,00%	50.694.102.821,53	100,00%	52.721.866.934,39	100,00%	54.830.741.611,77	100,00%	262.057.895.774,07	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase APS dan APK PAUD	100,00%	100,00%	500.809.572,77	100,00%	459.867.087,51	100,00%	478.261.771,01	100,00%	497.392.241,85	100,00%	517.287.931,53	100,00%	2.453.618.604,67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guruSD/SDLB SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/S2 dan bersertifikasi pendidik	100,00%	100,00%	1.258.669.448,67	100,00%	1.158.577.522,74	100,00%	1.204.920.623,65	100,00%	1.253.117.448,59	100,00%	1.303.242.146,54	100,00%	6.178.527.190,18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	
1	2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	53.331.710.454,76	100,00%	56.801.111.001,71	100,00%	44.922.648.904,95	100,00%	65.125.840.398,70	100,00%	67.730.874.014,64	100,00%	287.912.184.774,77	DINAS KESEHATAN DAERAH	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tingkat Pemenuhan Upaya Kesehatan	100,00%	100,00%	91.359.750.416,21	100,00%	81.017.198.643,26	100,00%	98.673.337.310,72	100,00%	83.857.265.740,51	100,00%	87.211.556.370,13	100,00%	442.119.108.480,83	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100,00%	100,00%	65.159.973,18	100,00%	306.251.531,34	100,00%	244.190.050,54	100,00%	354.010.341,02	100,00%	368.170.754,66	100,00%	1.337.782.650,73	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00%	100,00%	599.778.446,72	100,00%	604.842.135,14	100,00%	482.271.650,70	100,00%	699.165.060,78	100,00%	727.131.663,21	100,00%	3.113.188.956,56	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	tingkat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	100,00%	54.645.143,22	100,00%	180.790.045,03	100,00%	144.153.173,83	100,00%	208.983.593,36	100,00%	217.342.937,10	100,00%	805.914.892,54	DINAS KESEHATAN DAERAH	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	55.670.825.687,05	100,00%	60.154.235.848,94	100,00%	62.560.405.282,90	100,00%	65.062.821.494,22	100,00%	67.665.334.353,99	100,00%	311.113.622.667,10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pembangunan gedung rumah saki	100,00%	100,00%	8.631.585.572,35	100,00%	6.675.588.102,34	100,00%	6.942.611.626,44	100,00%	7.220.316.091,49	100,00%	7.509.128.735,15	100,00%	36.979.230.127,78	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	0,00%	100,00%	346.721.528,20	100,00%	822.616.329,59	100,00%	855.520.982,78	100,00%	889.741.822,09	100,00%	925.331.494,97	100,00%	3.839.932.157,64	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	100,00%	212.765.366,19	100,00%	252.810.857,95	100,00%	262.923.292,27	100,00%	273.440.223,96	100,00%	284.377.832,92	100,00%	1.286.317.573,28	PUSKESMAS LEE	

[illegible]

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	11.877.426.356,28	100,00%	14.659.608.057,27	100,00%	15.164.077.546,26	100,00%	15.624.115.438,37	100,00%	16.393.214.877,59	100,00%	73.718.442.275,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentasepanjang jaringan irigasi kondisi baik	37,00%	42,00%	11.279.858.753,22	47,00%	12.381.556.841,91	52,00%	12.915.599.066,01	57,00%	13.206.109.787,68	67,00%	13.838.569.017,86	67,00%	63.621.693.466,68	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
					Persentase Kawasan Permukiman Terlindungi infrastruktur pengendalian banjir dan infrastruktur pengaman pantai	67,50%	72,50%	7.824.366.146,72	75,50%	8.365.478.342,75	78,50%	8.545.387.420,05	81,50%	8.905.946.106,33	85,00%	9.361.956.162,57	85,00%	43.003.134.178,42	
1	3	3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Melalui SPAM di seluruh Kabupaten	56,50%	57,50%	8.307.747.495,41	59,00%	6.595.060.628,90	61,00%	7.321.182.784,03	63,00%	8.095.235.957,52	65,00%	9.115.217.254,08	65,00%	39.434.444.119,94	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan air Limbah Domestik	40,30%	43,89%	2.255.357.495,02	45,37%	2.441.576.693,15	50,45%	2.710.396.500,90	55,37%	2.996.960.991,30	60,24%	3.374.571.251,67	60,24%	13.778.862.932,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	64,00%	65,00%	3.009.051.612,51	67,00%	1.100.166.060,95	69,00%	1.332.322.190,47	71,00%	1.607.111.780,23	73,50%	1.974.113.677,87	73,50%	9.022.765.322,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	3	7		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	47,00%	49,00%	6.291.653.371,61	51,00%	7.127.336.439,19	53,00%	7.552.423.432,59	55,00%	7.971.337.682,16	57,50%	8.567.721.347,09	57,50%	37.510.472.272,65	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	8		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan gedung yang laik fungsi	61,00%	63,00%	1.422.460.762,28	65,00%	6.191.521.769,61	67,00%	6.560.795.115,42	69,00%	6.924.706.195,17	71,00%	7.442.785.070,32	71,00%	28.542.268.912,79	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	58,00%	60,74%	38.811.546.053,17	63,06%	66.333.526.477,60	65,37%	66.942.643.535,34	67,69%	67.291.225.155,66	70,00%	65.339.552.677,76	70,00%	304.718.493.899,54	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga terampil Konstruksi	35,12%	40,27%	207.898.111,41	45,31%	209.778.028,72	50,12%	216.996.953,99	55,80%	223.580.065,77	60,31%	234.585.828,46	60,31%	1.092.838.988,36	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	3	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	30,00%	45,00%	2.790.192.787,69	55,00%	1.968.766.799,54	70,00%	2.036.516.412,96	85,00%	2.098.298.919,34	100,00%	2.201.587.994,88	100,00%	11.095.362.914,40	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														-	
1	4	3		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	0,00%	5,00%	273.550.146,59	10,00%	97.214.208,43	15,00%	186.403.094,33	20,00%	356.010.080,61	25,00%	692.405.841,95	25,00%	1.605.583.371,90	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.171.095.493,25	100,00%	3.145.676.448,59	100,00%	3.271.503.506,54	100,00%	3.402.363.646,80	100,00%	3.538.458.192,67	100,00%	16.529.097.287,84	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat kategori Angka Indeks Risiko Bencana	100,00%	100,00%	540.782.677,71	100,00%	538.368.357,41	100,00%	559.903.091,70	100,00%	582.299.215,37	100,00%	605.591.183,99	100,00%	2.826.944.526,19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.321.434.592,15	100,00%	2.155.869.113,16	100,00%	2.170.897.116,19	100,00%	2.206.450.800,51	100,00%	2.188.053.424,49	100,00%	12.042.705.046,50	DINAS SOSIAL DAERAH
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	100,00%	100,00%	21.883.957,02	100,00%	475.122.742,86	100,00%	459.106.688,59	100,00%	471.189.261,76	100,00%	555.500.896,02	100,00%	1.982.803.546,24	DINAS SOSIAL DAERAH
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tingkat Cakupan Rehabilitasi Sosial	0,00%	0,00%	-	100,00%	276.097.188,18	100,00%	310.128.159,46	100,00%	357.779.824,28	100,00%	364.653.323,06	100,00%	1.308.658.494,98	DINAS SOSIAL DAERAH
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) Data Kemiskinan Per Tahun	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	93.038.447,84	100,00%	119.259.941,43	100,00%	168.301.533,72	100,00%	380.599.922,98	DINAS SOSIAL DAERAH
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	tingkat cakupan penanganan bencana	100,00%	100,00%	135.680.763,29	100,00%	230.429.685,08	100,00%	229.849.066,38	100,00%	238.860.429,61	100,00%	252.772.690,60	100,00%	1.087.592.634,96	DINAS SOSIAL DAERAH
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lancarnya Administrasi Perkantoran	100,00%	100,00%	3.367.702.073,93	100,00%	3.184.991.160,48	100,00%	3.266.390.806,90	100,00%	3.348.646.439,18	100,00%	3.342.192.296,74	100,00%	16.509.922.777,23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	0,00%	0,00%	-	100,00%	6.862.014,86	100,00%	7.136.495,46	100,00%	7.414.456,65	100,00%	7.711.034,92	100,00%	29.124.001,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	0,00%	100,00%	350.000.000,00	100,00%	52.580.188,89	100,00%	54.683.396,44	100,00%	56.813.274,08	100,00%	59.085.805,04	100,00%	573.162.664,46	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	100,00%	100,00%	400.000.000,00	100,00%	38.684.608,79	100,00%	40.231.993,14	100,00%	41.798.999,36	100,00%	43.470.959,34	100,00%	564.186.560,64	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Besaran Sengketa Pengusahan Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	100,00%	100,00%	105.660.385,42	100,00%	24.274.377,58	100,00%	25.245.352,68	100,00%	26.228.640,40	100,00%	27.277.786,02	100,00%	208.686.542,10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan Kesetaran Gender dalam Pembangunan	100,00%	100,00%	54.710.138,74	100,00%	214.195.557,36	100,00%	224.763.379,65	100,00%	235.753.914,84	100,00%	247.184.071,43	100,00%	976.607.062,01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,00%	100,00%	54.710.029,32	100,00%	52.839.111,47	100,00%	54.952.675,93	100,00%	57.150.782,97	100,00%	59.436.814,29	100,00%	279.089.413,97	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0,00%	100,00%	10.942.005,86	100,00%	9.158.779,32	100,00%	9.525.130,49	100,00%	9.906.135,71	100,00%	10.302.381,14	100,00%	49.834.432,54	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	5.840.634.477,40	100,00%	5.422.280.118,32	100,00%	5.639.171.323,05	100,00%	5.864.738.175,97	100,00%	6.099.327.703,01	100,00%	28.866.151.797,76	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersedianya dokumen Lingkungan Hidup	0,00%	0,00%	-	100,00%	8.951.556,00	100,00%	10.951.556,00	100,00%	11.951.556,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	43.854.668,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	100,00%	19.938.085,40	100,00%	10.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	11.440.000,00	100,00%	11.897.600,00	100,00%	64.275.685,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Upaya Pemulihan dan Konservasi KEHATI	0,00%	0,00%	-	100,00%	8.480.018,48	100,00%	9.480.018,48	100,00%	8.777.281,46	100,00%	8.480.018,48	100,00%	35.217.336,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	100,00%	16.896.973,71	100,00%	16.060.044,00	100,00%	19.702.445,76	100,00%	20.490.543,59	100,00%	21.310.165,33	100,00%	94.460.172,40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Perusahaan Pemegang izin lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	0,00%	100,00%	61.526.242,45	100,00%	10.000.000,00	100,00%	10.400.000,00	100,00%	11.816.000,00	100,00%	12.288.640,00	100,00%	106.030.882,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA, kearifan lokal dan hak MHA yang diakui	0,00%	0,00%	-	100,00%	12.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	10.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	46.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat sadar lingkungan yang aktif	0,00%	0,00%	-	100,00%	8.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	29.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2	11	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0,00%	0,00%	-	100,00%	5.000.000,00	100,00%	8.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	0,00%	0,00%	-	100,00%	15.000.000,00	100,00%	12.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.597.972,47	100,00%	57.597.972,47	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Volume Sampah yang diangkut	80,00%	100,00%	108.152.536,68	100,00%	102.856.000,00	100,00%	105.667.502,98	100,00%	109.894.203,10	100,00%	114.289.971,22	100,00%	540.860.213,98	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.164.159.305,43	100,00%	3.672.864.049,92	100,00%	3.819.778.611,92	100,00%	3.972.569.756,39	100,00%	4.131.472.546,65	100,00%	19.760.844.270,31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tingkat Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00%	100,00%	2.004.506.977,27	100,00%	1.870.300.560,96	100,00%	1.945.112.583,40	100,00%	2.022.917.086,73	100,00%	2.103.833.770,20	100,00%	9.946.670.978,57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningktanya Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00%	100,00%	45.666.253,57	100,00%	67.918.041,36	100,00%	70.634.763,01	100,00%	73.460.153,53	100,00%	76.398.559,68	100,00%	334.077.771,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	100,00%	90.395.740,14	100,00%	87.047.376,00	100,00%	90.529.271,04	100,00%	94.150.441,88	100,00%	97.916.459,56	100,00%	460.039.288,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningktanya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Akuntabel	100,00%	100,00%	26.509.525,87	100,00%	44.966.480,00	100,00%	46.765.139,20	100,00%	48.635.744,77	100,00%	50.581.174,56	100,00%	217.458.064,39	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	2.688.637.682,02	100,00%	5.037.187.737,59	100,00%	5.737.992.790,59	100,00%	6.786.255.782,14	100,00%	8.173.024.001,95	100,00%	28.423.097.994,28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	0,00%	84,00%	3.200.000.000,00	86,00%	575.901.122,61	90,00%	564.111.082,04	95,00%	598.107.057,06	100,00%	602.194.730,08	100,00%	5.540.313.991,79	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa	100,00%	100,00%	303.335.728,71	100,00%	668.587.828,92	100,00%	2.398.459.304,81	100,00%	878.178.177,82	100,00%	1.016.806.947,92	100,00%	5.265.367.988,18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100,00%	100,00%	38.233.316.940,40	100,00%	36.635.591.944,09	100,00%	35.933.396.201,09	100,00%	38.156.776.736,64	100,00%	38.484.064.783,87	100,00%	187.443.146.606,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	6.781.725.813,35	100,00%	5.744.010.959,86	100,00%	5.973.771.398,26	100,00%	6.212.722.254,19	100,00%	6.461.231.144,36	100,00%	31.173.461.570,03	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.286.957.378,82	100,00%	1.882.389.071,97	100,00%	1.957.684.634,74	100,00%	2.035.992.020,37	100,00%	2.117.431.700,93	100,00%	11.280.454.806,82	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100,00%	100,00%	148.122.425,77	100,00%	430.156.418,40	100,00%	447.362.675,14	100,00%	465.257.182,15	100,00%	483.867.469,43	100,00%	1.974.766.170,89	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Aplikasi Informatika	100,00%	100,00%	1.437.077.203,13	100,00%	1.925.414.247,69	100,00%	2.002.430.817,64	100,00%	2.082.528.050,34	100,00%	2.165.829.172,34	100,00%	9.613.279.491,14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.065.481.245,89	100,00%	2.913.503.536,80	100,00%	2.975.055.514,31	100,00%	2.990.963.613,12	100,00%	3.012.078.292,44	100,00%	14.957.082.202,56	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase hasil evaluasi lembaga koperasi	100,00%	100,00%	22.033.588,95	100,00%	35.600.351,00	100,00%	44.878.018,00	100,00%	53.037.658,00	100,00%	60.173.634,00	100,00%	215.723.249,95	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi sehat	0,00%	100,00%	23.267.628,37	100,00%	44.500.439,00	100,00%	56.097.523,00	100,00%	66.297.073,00	100,00%	62.680.869,00	100,00%	252.843.532,37	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI	Persentase Peningkatan Perkoperasian	0,00%	100,00%	27.354.845,06	100,00%	75.000.000,00	100,00%	140.243.808,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	442.598.653,06	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan	100,00%	100,00%	27.355.014,66	100,00%	59.333.919,00	100,00%	70.121.904,00	100,00%	79.556.487,00	100,00%	75.000.000,00	100,00%	311.367.324,66	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Penignkatan Capaian Pemberdayaan UMKM	100,00%	100,00%	198.214.600,35	100,00%	200.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	1.148.214.600,35	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tingkat capaian pengembangan UMKM	100,00%	100,00%	987.459.639,57	100,00%	75.000.000,00	100,00%	140.243.808,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	125.000.000,00	100,00%	1.427.703.447,57	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	5.687.850.939,86	100,00%	5.066.775.752,48	100,00%	5.269.446.782,58	100,00%	5.480.224.653,88	100,00%	5.699.433.640,04	100,00%	27.203.731.768,84	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Dokumen Kajian Potensi sumber daya yang terkait dengan Investasi./ Persentase Pemanfaatan Dokumen RUPM Kabupaten Morut, Perda dan Dokumen Laporan Hasil Monev	100,00%	100,00%	64.715.180,64	100,00%	61.652.760,00	100,00%	64.118.870,40	100,00%	66.683.625,22	100,00%	69.350.970,22	100,00%	326.521.406,48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100,00%	100,00%	146.598.806,16	100,00%	139.337.120,00	100,00%	144.910.604,80	100,00%	150.707.028,99	100,00%	156.735.310,15	100,00%	738.288.870,10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan penanganan masalah pelayanan publik	100,00%	100,00%	41.188.172,02	100,00%	39.093.080,00	100,00%	40.656.803,20	100,00%	42.283.075,33	100,00%	43.974.398,34	100,00%	207.195.528,89	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Morut	100,00%	100,00%	513.132.680,80	100,00%	487.717.638,72	100,00%	507.226.344,27	100,00%	527.515.398,04	100,00%	548.616.013,96	100,00%	2.584.208.075,79	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan publik	100,00%	100,00%	24.753.826,32	100,00%	23.502.960,00	100,00%	24.443.078,40	100,00%	25.420.801,54	100,00%	26.437.633,60	100,00%	124.558.299,85	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100,00%	100,00%	486.919.260,93	100,00%	382.573.906,78	100,00%	397.876.863,05	100,00%	413.791.937,58	100,00%	430.343.615,08	100,00%	2.111.505.583,43	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.314.585.817,76	100,00%	2.106.950.564,16	100,00%	2.191.228.586,73	100,00%	2.278.877.730,20	100,00%	2.370.032.839,40	100,00%	11.261.675.538,24	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	100,00%	100,00%	82.064.606,30	100,00%	78.000.000,00	100,00%	81.120.000,00	100,00%	84.364.800,00	100,00%	87.739.392,00	100,00%	413.288.798,30	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	0,00%	100,00%	75.978.301,55	100,00%	72.301.817,12	100,00%	75.193.889,80	100,00%	78.201.645,40	100,00%	81.329.711,21	100,00%	383.005.365,08	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	4.923.527.423,79	100,00%	4.401.143.328,02	100,00%	4.581.189.061,14	100,00%	4.764.436.623,59	100,00%	4.955.014.088,55	100,00%	23.625.310.525,10	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Tingkat Produktivitas Perikanan Tangkap	100,00%	100,00%	2.150.000.000,00	100,00%	1.305.596.347,34	100,00%	1.357.820.201,23	100,00%	1.416.133.009,28	100,00%	1.476.778.329,66	100,00%	7.706.327.887,51	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Tingkat Produksi Perikanan budidaya	100,00%	100,00%	1.013.750.798,00	100,00%	1.054.300.829,92	100,00%	1.096.472.863,12	100,00%	1.140.331.777,64	100,00%	1.185.945.048,75	100,00%	5.490.801.317,43	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas	6 kelompok	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	100.000.000,00	10 kelompok	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat ragam produksi hasil perikanan, Meningkatnya nilai produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing, Kelompok usaha pengelola hasil perikanan	100,00%	100,00%	419.715.850,00	100,00%	436.504.484,00	100,00%	453.964.663,36	100,00%	472.123.249,89	100,00%	491.008.179,89	100,00%	2.273.316.427,14	DINAS PERIKANAN DAERAH
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	3.581.244.932,00	100,00%	1.970.537.600,93	100,00%	2.049.359.104,97	100,00%	2.131.333.469,17	100,00%	2.216.586.807,94	100,00%	11.949.061.915,01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA DAERAH
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100,00%	0,00%	-	100,00%	841.409.411,48	100,00%	875.065.787,94	100,00%	910.068.419,46	100,00%	946.471.156,24	100,00%	3.573.014.775,11	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA DAERAH
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata	100,00%	100,00%	87.535.937,49	100,00%	118.125.721,12	100,00%	122.850.749,97	100,00%	127.764.779,96	100,00%	132.875.371,16	100,00%	589.152.559,71	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA DAERAH
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00%	100,00%	131.303.552,81	100,00%	72.295.472,02	100,00%	75.187.290,90	100,00%	78.194.782,53	100,00%	81.322.573,83	100,00%	438.303.672,09	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLARAGA DAERAH
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	17.865.621.108,43	100,00%	8.251.271.371,09	100,00%	7.965.738.833,63	100,00%	8.924.513.394,95	100,00%	8.697.356.286,85	100,00%	51.704.500.994,95	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100,00%	100,00%	962.024.175,53	100,00%	3.801.177.208,05	100,00%	4.457.313.542,44	100,00%	4.227.298.912,13	100,00%	4.806.549.356,66	100,00%	18.254.363.194,81	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00%	100,00%	7.419.597.916,86	100,00%	4.682.218.215,05	100,00%	4.837.765.499,18	100,00%	4.646.555.915,33	100,00%	4.873.066.339,72	100,00%	26.459.203.886,13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp								
(1)				(2)				(3)				(4)				(5)				(6)				(7)			
3	27	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00%	100,00%	40.716.133,89	100,00%	260.751.696,74	100,00%	265.936.642,83	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	567.404.473,45	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH								
3	27	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00%	100,00%	27.355.014,66	100,00%	334.261.483,58	100,00%	352.366.051,74	100,00%	430.816.850,18	100,00%	457.957.252,84	100,00%	1.602.756.653,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH								
3	27	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	0,00%	100,00%	27.355.014,66	100,00%	722.615.074,47	100,00%	779.327.331,80	100,00%	970.092.434,17	100,00%	1.045.705.336,00	100,00%	3.545.095.191,10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH								
3	27	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluhan Pertanian	100,00%	100,00%	458.144.192,75	100,00%	405.690.804,76	100,00%	439.593.270,59	100,00%	545.474.494,02	100,00%	582.505.817,19	100,00%	2.431.408.579,33	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH								
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																							
3	30	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Tingkat cakupan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100,00%	100,00%	27.354.850,53	100,00%	59.333.919,00	100,00%	56.097.523,00	100,00%	66.297.073,00	100,00%	75.217.043,00	100,00%	284.300.408,53	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH								
3	30	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	0,00%	0,00%	-	100,00%	267.002.635,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	320.000.000,00	100,00%	1.087.002.635,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH								
3	30	4		PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat capaian stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	100,00%	76.593.825,49	100,00%	186.901.845,00	100,00%	196.341.332,00	100,00%	196.239.336,00	100,00%	200.000.000,00	100,00%	856.076.338,49	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH								

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	0,00%	100,00%	26.008.874,39	100,00%	89.000.878,00	100,00%	98.170.666,00	100,00%	106.075.317,00	100,00%	112.825.564,00	100,00%	432.081.299,39	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standariasi metrologi legal	0,00%	100,00%	27.354.467,56	100,00%	89.000.878,00	100,00%	84.146.285,00	100,00%	92.815.902,00	100,00%	100.289.390,00	100,00%	393.606.922,56	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100,00%	100,00%	179.416.998,03	100,00%	118.667.838,00	100,00%	112.195.047,00	100,00%	119.334.731,00	100,00%	150.434.086,00	100,00%	680.048.700,03	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	Tingkat cakupan perencanaan dan Pembangunan Industri	100,00%	100,00%	79.236.684,27	100,00%	200.000.000,00	100,00%	228.183.232,00	100,00%	250.000.000,00	100,00%	275.000.000,00	100,00%	1.032.419.916,27	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pengendalian usaha industri	0,00%	100,00%	29.682.418,70	100,00%	89.000.824,00	100,00%	84.146.285,00	100,00%	92.815.902,00	100,00%	87.753.216,00	100,00%	383.398.645,70	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan pengelolaan SIINas	100,00%	100,00%	44.862.005,20	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	113.924.691,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	478.786.696,20	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH		
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100,00%	100,00%	2.915.234.950,55	100,00%	3.477.598.809,88	100,00%	3.662.702.762,28	100,00%	3.857.744.629,49	100,00%	4.152.454.414,69	100,00%	18.065.735.566,89	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1		SEKRETARIAT DAERAH																	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	21.515.603.070,21	100,00%	20.066.228.822,64	100,00%	20.868.877.975,55	100,00%	21.703.633.094,57	100,00%	22.571.778.418,35	100,00%	106.726.121.381,32	BAGIAN UMUM		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	265.017.898,68	100,00%	280.494.234,55	100,00%	291.714.913,08	100,00%	303.383.509,60	100,00%	315.518.849,98	100,00%	1.456.129.405,89	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan	100,00%	100,00%	376.429.457,09	100,00%	433.179.401,45	100,00%	450.505.668,36	100,00%	468.525.895,10	100,00%	487.266.930,90	100,00%	2.215.907.352,91	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	100,00%	457.180.042,28	100,00%	2.230.376.848,50	100,00%	2.319.591.922,44	100,00%	2.412.375.599,34	100,00%	2.508.870.623,31	100,00%	9.928.395.035,86	BAGIAN PEMERINTAHAN		
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	100,00%	335.919.580,01	100,00%	1.643.437.047,66	100,00%	1.709.174.529,57	100,00%	1.777.541.510,75	100,00%	1.848.643.171,18	100,00%	7.314.715.839,18	BAGIAN PEMERINTAHAN		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	454.035.688,39	100,00%	219.226.114,52	100,00%	234.374.761,92	100,00%	263.122.288,97	100,00%	273.647.180,53	100,00%	1.444.406.034,34	BAGIAN KESEJAHTERAN RAKYAT		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap tahun	100,00%	100,00%	5.452.716.625,38	100,00%	2.458.719.285,48	100,00%	2.550.688.454,08	100,00%	2.633.343.455,67	100,00%	2.738.677.193,89	100,00%	15.834.145.014,49	BAGIAN KESEJAHTERAN RAKYAT
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	558.137.220,95	100,00%	978.010.293,65	100,00%	1.017.130.705,39	100,00%	1.057.815.933,61	100,00%	1.100.128.570,95	100,00%	4.711.222.724,55	BAGIAN HUKUM
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksanannya Kegiatan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100,00%	100,00%	352.372.527,13	100,00%	615.397.917,55	100,00%	640.013.834,26	100,00%	665.614.387,63	100,00%	692.238.963,13	100,00%	2.965.637.629,70	BAGIAN HUKUM
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	656.858.788,06	100,00%	1.248.321.882,08	100,00%	1.298.254.757,36	100,00%	1.350.184.947,66	100,00%	1.404.192.345,56	100,00%	5.957.812.720,73	BAGIAN ORGANISASI
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	358.254.730,64	100,00%	827.536.138,86	100,00%	860.637.584,41	100,00%	895.063.087,79	100,00%	930.865.611,30	100,00%	3.872.357.153,01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya pengembangan data/informasi	100,00%	100,00%	344.771.334,50	100,00%	880.665.941,14	100,00%	915.892.578,79	100,00%	952.528.281,94	100,00%	990.629.413,21	100,00%	4.084.487.549,57	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	422.939.109,54	100,00%	426.688.986,88	100,00%	443.756.546,36	100,00%	461.506.808,21	100,00%	479.967.080,54	100,00%	2.234.858.531,52	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%	274.894.632,43	100,00%	236.578.160,00	100,00%	246.041.286,40	100,00%	255.882.937,86	100,00%	266.118.255,37	100,00%	1.279.515.272,06	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

[illegible]

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia ASN Pemerintah Daerah	0,00%	0,00%	-	100,00%	1.399.018.836,51	100,00%	1.362.391.457,46	100,00%	1.933.799.699,86	100,00%	1.977.127.769,77	100,00%	6.672.337.763,60	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya hasil penelitian dan Pengembangan Daerah	100,00%	100,00%	98.477.615,09	100,00%	449.153.503,09	100,00%	467.119.643,21	100,00%	485.804.428,94	100,00%	505.236.606,10	100,00%	2.005.791.796,44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	1		INSPEKTORAT DAERAH																
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	5.285.000.947,14	100,00%	5.095.235.821,24	100,00%	5.299.045.254,09	100,00%	5.511.007.064,25	100,00%	5.731.447.346,82	100,00%	26.921.736.433,53	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00%	100,00%	3.100.710.607,23	100,00%	3.241.280.777,68	100,00%	3.370.932.008,79	100,00%	3.505.769.289,14	100,00%	3.646.000.060,70	100,00%	16.864.692.743,53	INSPEKTORAT DAERAH	
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1		KECAMATAN																
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	6.056.485.527,54	100,00%	6.691.437.604,60	100,00%	6.959.095.108,79	100,00%	7.237.458.913,14	100,00%	7.526.957.269,66	100,00%	34.471.434.423,73	KECAMATAN PETASIA	
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	274.437.770,86	100,00%	365.923.965,88	100,00%	380.560.924,51	100,00%	395.783.361,49	100,00%	411.614.695,95	100,00%	1.828.320.718,70	KECAMATAN PETASIA	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.591.252.035,34	100,00%	2.456.568.902,99	100,00%	2.554.831.659,11	100,00%	2.657.024.925,48	100,00%	2.763.305.922,50	100,00%	13.022.983.445,42	KECAMATAN PETASIA BARAT	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	23.197.052,43	100,00%	23.013.233,73	100,00%	23.933.763,08	100,00%	24.891.113,60	100,00%	25.886.758,14	100,00%	120.921.920,98	KECAMATAN PETASIA BARAT	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	3.752.709.519,80	100,00%	2.763.698.227,91	100,00%	2.874.246.157,02	100,00%	2.989.216.003,30	100,00%	3.108.784.643,44	100,00%	15.488.654.551,47	KECAMATAN PETASIA TIMUR	
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	0,00%	100,00%	29.871.676,01	100,00%	29.496.493,29	100,00%	30.676.353,03	100,00%	31.903.407,15	100,00%	33.179.543,43	100,00%	155.127.472,91	KECAMATAN PETASIA TIMUR	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	4.030.717.704,38	100,00%	3.560.013.863,07	100,00%	3.702.414.417,59	100,00%	3.850.510.994,30	100,00%	4.004.531.434,07	100,00%	19.148.188.413,41	KECAMATAN BUNGKU UTARA	
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	0,00%	0,00%	-	100,00%	59.480.335,25	100,00%	61.859.548,66	100,00%	64.333.930,61	100,00%	66.907.287,83	100,00%	252.581.102,35	KECAMATAN BUNGKU UTARA	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	3.010.619.089,87	100,00%	2.962.780.414,76	100,00%	3.081.291.631,35	100,00%	3.204.543.296,61	100,00%	3.332.725.028,47	100,00%	15.591.959.461,05	KECAMATAN MAMOSALATO	
7	1	3	PRORAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa.	100,00%	100,00%	75.609.260,52	100,00%	74.573.418,52	100,00%	77.556.355,26	100,00%	80.658.609,47	100,00%	83.884.953,85	100,00%	392.282.597,61	KECAMATAN MAMOSALATO	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	2.333.416.964,99	100,00%	2.313.840.522,05	100,00%	2.406.394.142,93	100,00%	2.502.649.908,64	100,00%	2.602.755.904,99	100,00%	12.159.057.443,60	KECAMATAN SOYO JAYA	

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp	
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	2.905.027.732,95	100,00%	2.968.503.485,91	100,00%	3.087.243.625,34	100,00%	3.210.733.370,36	100,00%	3.339.162.705,17	100,00%	15.510.670.919,73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang- undangan bidang politik	100,00%	100,00%	716.584.500,00	100,00%	734.499.112,50	100,00%	752.861.590,31	100,00%	771.683.130,07	100,00%	790.975.208,32	100,00%	3.766.603.541,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
8	1	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan Ormas, Ormas Asing di daerah	100,00%	100,00%	52.500.000,00	100,00%	66.788.576,72	100,00%	81.953.410,92	100,00%	98.037.170,77	100,00%	115.084.421,59	100,00%	414.363.580,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah	100,00%	100,00%	66.217.590,00	100,00%	67.873.029,75	100,00%	69.569.855,49	100,00%	71.309.101,88	100,00%	73.091.829,43	100,00%	348.061.406,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya masyarakat yang sadar dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100,00%	100,00%	29.769.691,09	100,00%	30.513.933,37	100,00%	31.276.781,70	100,00%	32.058.701,24	100,00%	32.860.168,78	100,00%	156.479.276,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	
			TOTAL				1.068.784.179.348,08		1.111.535.546.522,01		1.155.996.968.382,87		1.202.236.847.118,20		1.250.326.321.002,93		5.788.879.862.374,08		



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam perwujudan visi dan misi, serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Morowali Utara 2021-2026. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip “SMART”, yaitu (1) khusus (*specific*) untuk mengetahui kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang bersifat khusus dalam bidang tertentu; (2) dapat diukur (*measurable*) untuk mengetahui ukuran atau besaran pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan baik dalam bentuk volume, rasio, persentase, nilai atau kategori; (3) dapat dicapai (*achievable*) dengan sumber daya yang tersedia dan menggunakan data dan informasi yang mudah digunakan, tidak rumit dalam perhitungan, dan tersedia sumber data dan informasi yang jelas dan resmi; (4) relevan (*relevant*) untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan, urusan, serta tugas pokok dan fungsi; (5) masa waktu (*time-bound*) untuk mengetahui target waktu yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan dengan memperhatikan tingkatan dampak (*impact*) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah yang dijalankan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan keluaran (*output*) untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah; serta sekaligus menjadi dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan sebagai berikut.



8.1 Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara masa bakti 2021-2026 dilakukan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut.

Tabel. 8.1
Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	69.0	69.7	70.4	71.1	71.8	72.05
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,0	6,8	7,2	7,7	8,2	8,4
3	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	>60-70/B (baik)	>60-70/B (baik)	>70-80/BB (sangat baik)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	tanpa satuan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	tanpa satuan	>60-70/B (baik)	>60-70/B (baik)	>70-80/BB (sangat baik)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
6	Skor Nilai LPPD	tanpa satuan	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)	>80-90/A (memuaskan)
7	Level Maturitas SPIP Pemda	tanpa satuan	N/A	berkembang (2,0 - <3,0)	berkembang (2,0 - <3,0)	Terdefinisi (3,0-<4,0)	Terkelolah dan Terukur (4 - <4,5)	Optimum (4,5 -<5)
8	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas Baik	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Pertumbuhan Inovasi Daerah	Persen	10	10	15	20	25	30
11	Persentase hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Kelembagaan	tanpa satuan	28,1-37 (Sedang)	28,1-37 (Sedang)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)	37,1-46 (Tinggi)
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	tanpa satuan	N/A	2,6<3,5	2,6<3,5	2,6<3,5	2,6<3,5	2,6<3,5
14	Indeks Profesionalitas ASN	tanpa satuan	≤60 (Sangat Rendah)	61-70 (Rendah)	61-70 (Rendah)	71-80 (Sedang)	71-80 (Sedang)	71-80 (Sedang)
15	Kategori keterbukaan informasi publik	tanpa satuan	N/A	60-79 (Sedang)	80-89 (Baik)	80-89 (Baik)	80-89 (Baik)	90-100 (Baik Sekali)
16	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	tanpa satuan	76,61-88,30/B (baik)	76,61-88,30/B (baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)	88,31-100/A (sangat baik)
17	Usia Harapan Hidup	tahun	69.80	70.20	70.50	70.90	71.20	71.50



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
18	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46
19	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2
20	Prevalensi stunting	persen	21,1	18,4	16	14	12	10
21	Angka Kesakitan	Per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8
22	Persentase masyarakat yang terlindungi hak layanan kesehatan (Kepesertaan Jaminan Kesehatan)	persen	95,61	96	97	98	99	100
23	Tingkat Kemiskinan	persen	12.00	11.40	10.50	9.70	9.00	8.10
24	Indeks Gini	tanpa satuan	0.300	0.286	0.272	0.262	0.252	0.242
25	Persentase PMKS yang memperoleh bansos untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	71,55	83,48	83,48	85,50	85,50	85,50
26	Indeks Kesejahteraan Sosial	tanpa satuan	(Sedang)	(Sedang)	(Sedang)	(Tinggi)	(Tinggi)	(Tinggi)
27	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	persen	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
28	Pengeluaran perkapita	Juta Rp./org /thn	9,206	9,330	9,454	9,579	9,703	9,827
29	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	8.48	9.05	9.70	10.45	11.31	12.26
30	Nilai investasi swasta dan masyarakat	Juta Rp.	4.383.000.000 (5%)	4.602.150.000 (5%)	4.832.247.500.000 (5%)	5.073.870.375.000 (5%)	4.383.000.000 (5%)	4.602.150.000 (5%)
31	Nilai PDRB pertanian (ADHK)	Rp. Triliun	2.63	2.77	2.92	3.09	3.30	3.52
32	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	0.24	0.27	0.31	0.36	0.22	0.41
33	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2
34	Kemantapan jalan kabupaten	persen	58,43	60.74	63.06	65.37	67.69	70.00
35	Rasio Konektivitas	persen	50.76	60.15	70.30	73.65	79.60	80.15
36	Proposi lahan sawah beririgasi baik	persen	48,50	50,00	51,50	52,00	53,50	55,00
37	Indek kualitas lingkungan hidup	tanpa satuan	80.62	80.84	81.06	81.28	81.5	81.72
38	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	orang	297	307	317	327	337	347
39	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1500	3000	5000	8000	10.000	12.000
40	Lama tinggal wisatawan	hari	1000	1200	1300	1600	1800	2000



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
41	Peningkatan SDM pelaku usaha ekonomi kreatif	Orang	20	30	40	50	60	70
42	Persentase pemenuhan 8 standar pendidikan	persen	64,5%	65%	65,5%	66%	66,5%	67%
43	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.30	12.40	12.50	12.60	12.70	12.80
44	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8.80	8.90	9.00	9.10	9.20	9.30
45	Jumlah siswa jenjang PAUD, SD dan SMP yang berprestasi di segala perlombaan minimal tingkat provinsi	orang	23	45	65	65	65	65
46	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	tanpa satuan	N/A	Sedang (1,26-2,50)	Sedang (1,26-2,50)	Sedang (1,26-2,50)	Tinggi (2,51-3,75)	Tinggi (2,51-3,75)
47	Jumlah prestasi Keagamaan tingkat provinsi dan nasional	Prestasi	N/A	5	5	5	5	5
48	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	N/A	50-55	55-60	65-70	70-75	>75
49	Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	persen	12	<12	<12	<12	<12	<12
50	Persentase kasus perceraian terhadap jumlah keluarga	persen	N/A	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
51	Indeks Perlindungan Anak	tanpa satuan	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00
52	Jumlah kecamatan yang mandiri dalam penanggulangan bencana	Kecamat an	10	10	10	10	10	10
53	Proporsi penduduk yang menjadi korban kekerasan kejahatan	persen	0,05	0,03	0,05	0,02	0,04	0,05
54	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	tanpa satuan	9	12	15	16	17	18
55	Rumah tangga dengan Akses Air Minum	persen	56,6	57,5	59,00	61,00	63,00	65,00
56	Rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	persen	40,30	43,89	45,37	50,45	55,37	60,24
57	Rumah sehat dan layak huni	persen	73,00	74,00	76,00	78,00	79,00	80,00
58	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	Persen	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50
59	Ketaatan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah	Persen	100	100	100	100	100	100



8.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah indikator kinerja berbentuk hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penetapan target kinerja dari setiap Indikator Kinerja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemampuan SDM, dan tingkat kinerja efektif, serta kemampuan inovasi dan kerjasama dan kemitraan setiap perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung berbagai program guna tercapainya target kinerja sasaran. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghalangi bagi setiap perangkat daerah dalam mencapai target kinerja. Perangkat daerah terus menerus perlu melakukan inovasi dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan daerah; memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah; memperluas kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan media dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam lima tahun mendatang.

Indikator Kinerja Daerah atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	INDIKATOR KINERJA MAKRO								
1	Indek Pembangunan Manusia	68.36	69.0	69.7	70.4	71.1	71.8	72.05	72.05
	a. Usia Harapan Hidup (Tahun)	69.61	69.80	70.20	70.50	70.90	71.20	71.50	71.50
	b. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,71	8,80	8,90	9,00	9.10	9.20	9.30	9.30
	c. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.24	12.30	12.40	12.50	12.60	12.70	12.80	12.80
	d. Pengeluaran Perkapita (ribu Rp/org /thn)	8,853	9,206	9,330	9,454	9,579	9,703	9,827	9,827
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.04	2-5	5-6	6-7	7-7.5	7.5-8	>8	8.4
3	PDRB harga konstan (Rp.Triliun)	8.07	8.48	9.05	9.70	10.45	11.31	12.26	12.26
4	Indek Gini	0.314	0.300	0.286	0.272	0.262	0.252	0.242	0.242
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.16	5.0	4.8	4.7	4.5	4.4	4.2	4.2
6	Tingkat Kemiskinan (%)	14.41	12.00	11.40	10.50	9.70	9.00	8.10	8.10
B									
I	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
1	Urusan Pendidikan								
a	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
b	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SD	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
c	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam	98%	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pendidikan Menengah Pertama								
d	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	N/A	5%	50%	95%	95%	95%	95%	95%
2	Urusan Kesehatan								
a	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (1 : 1.000 TT)	0,89	0,91	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
b	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi (1 RS)	1	1	1	1	1	1	1	1
c	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota yang Terakreditasi	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Persalinan	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
f	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
g	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	80%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%
h	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
i	Pesentase Orang Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	75%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
j	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas yang mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	53,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
k	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	55%	30%	40%	50%	60%	70%	100%	100%
l	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	37%	20%	30%	40%	50%	60%	100%	100%
m	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
n	Persentase Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	80%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
o	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
a	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab / Kota	65%	70%	73%	77%	80%	83%	85%	85%
b	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi,Erosi,dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Penanganan Pantai di WS Kewenangan Kab / Kota	70%	75%	78%	80%	83%	87%	90%	90%
c	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab / Kota yang Dilayani oleh Jaringan	35%	37%	42%	47%	52%	57%	67%	67%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Irigasi								
d	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kab / Kota	55,5%	56,5%	57,5%	59%	61%	63%	65%	65%
e	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	40,30%	43,89%	45,37%	50,45%	55,37%	60,24%	60,24%	60,24%
f	Persentase Program Penataan Gedung Kantor dalam Kondisi Layak Fungsi	58.7%	61%	63%	65%	67%	69%	71%	71,00
g	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten / Kota	56,112 %	58,43%	60.74%	63.06%	65.37%	67.69%	70.00%	70,00%
h	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	30,20%	35,12%	40,27%	45,31%	50,12%	55,80%	60,31%	60,31%
i	Persentase Ketaatan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Urusan Perumahan Rakyat								
a	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	20,20%	25,12%	30,17%	35,01%	40,72%	50,82%	55,32%	55,32%
b	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten / Kota	15,12%	20,22%	25,32%	30,17%	35,22%	40,72%	45,12%	45,12%
c	Persentase Kawasan Pemukiman Kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang Ditangani	40,02%	45,02%	50,82%	55,22%	60,12%	65,25%	70,20%	70,20%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
d	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	30,32%	35,92%	40,21%	45,52%	50,19%	55,89%	60,19%	60,19%
e	Jumlah Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	20,32%	25,25%	30,22%	35,26%	40,26%	45,76%	50,16%	50,16%
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
a	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	20 %	25 %	35 %	50 %	57 %	60 %	70 %	70 %
d	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	10 %	15 %	18 %	25 %	40 %	45 %	50 %	50 %
e	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 %	25 %	40 %	50 %	55 %	60 %	80 %	80 %
f	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
g	Persentase Pelayanan, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Urusan Sosial								
a	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yan Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II	LAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	Urusan Tenaga Kerja								
a	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	N/A	60-63	63-65	65-67	67-69	69-71	>71	>71
c	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Pesentase Perusahaan yang menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP / PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (di dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten / Kota	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a	Persentase ARG pada Belanja APBD	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
b	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten / Kota	0,028%	0,030%	0,032%	0,034%	0,036%	0,038%	0,040%	0,040%
c	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk	30%	32%	35%	38%	36%	35%	30%	30%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Perempuan)								
3	Urusan Pangan								
a	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras / Jagung sesuai Kebutuhan)	10%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Urusan Pertanahan								
a	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukan Tanahnya diatas Izin Lokasi dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
c	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
d	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	N/A	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
e	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui Mediasi	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Urusan Lingkungan Hidup								
a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab / Kota	80.4	80.62	80.84	81.06	81.28	81.5	81.72	81.94
	Indeks Kualitas Air	65.09	65.19	65.29	65.39	65.49	65.59	65.69	65.79
	Indeks Kualitas Udara	89.43	89.53	89.63	89.73	89.83	89.93	90.03	90.13
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	90.01	90.66	91.3	91.95	92.6	93.25	93.9	94.55
b	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab / Kota	12.75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
c	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota	12 Keg/Usaha	17 Keg/Usaha	141 Keg/Usaha	142 Keg/Usaha	143 Keg/Usaha	145 Keg/Usaha	146 Keg/Usaha	146 Keg/Usaha
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
a	Perekaman KTP Elektronik	85%	88%	90%	92%	95%	97%	100%	100%
b	Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	30%	40%	55%	70%	80%	95%	100%	100%
c	Kepemilikan Akta Kelahiran	80%	83%	85%	89%	92%	95%	100%	100%
d	Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	25%	35%	45%	55%	65%	75%	90%	100%
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
a	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	49	40	30	25	15	10	8	8
b	Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	3	4	5	6	7	8	9	9
8	Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana								
a	TFR (Angka Kelahiran Total)	0,58 / Perempuan Usia 15-19 Tahun	1,5%	1,35%	1,05%	0,95%	0,86%	0,7%	0,7%
b	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	75,5%	79,2%	81%	83%	85%	87%	89%	89%



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
c	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,6%	10,9%	9,9%	8,9%	7,9%	6,9%	5,9%	5,9%
9	Urusan Perhubungan								
a	Rasio Konektivitas Kabupaten / Kota (%)	50.76	60.15	70.30	73.65	79.60	80.15	85.15	85.15
b	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota (DS)	0.45	0.40	0.39	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30
10	Urusan Komunikasi dan Informatika								
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	17,39%	23,91%	30,43%	36,96%	43,48%	50,00%	56,52%	56,52%
b	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	6,52%	13,04%	19,57%	26,09%	32,61%	39,13%	45,65%	45,65%
c	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik , Mengetahui Kebijakan, dan Program Proritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	40,00%
16	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
a	Meningkatnya Koperasi Sehat	N/A	15	15	25	25	25	25	25
b	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	N/A	150	150	150	150	150	150	150
17	Urusan Penanaman Modal								
a	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten / Kota	2.632.669.32 2.000	4.383.000.00 0.000 (5%)	4.602.150.000. 000 (5%)	4.832.247.50 0.000 (5%)	5.073.870.37 5.000 (5%)	5.327.563.89 3.750 (5%)	5.593.942.08 8.437 (5%)	5%
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	30	40	55	60	75	80	85	100
b	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	40	50	60	65	70	80	90	100
c	Peningkatan Prestasi Olahraga	45	50	55	60	65	75	85	100
19	Urusan Statistik								
a	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	10,00%	19,00%	30,00%	42,00%	50,00%	50,00%
b	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	0	0	10,00%	19,00%	30,00%	42,00%	50,00%	50,00%
20	Urusan Persandian								
a	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	50,00%
21	Urusan Kebudayaan								
a	Terlestarikannya Cagar Budaya	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Urusan Perpustakaan								
a	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	N/A	6.11	7.28	8.25	9.33	10	11.23	11.23
b	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5
23	Urusan Kearsipan								
a	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah,	N/A	35	38	47	54	58	62	62



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan								
b	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	30	38	46	55	65	70	70
III	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	Urusan Kelautan dan Perikanan								
a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten / Kota	3.380,8 ton	3.386,82 ton	3.389 ton	3.392 ton	3.394 ton	3.397 ton	3.400 ton	3.400 ton
2	Urusan Pariwisata								
a	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	10%
b	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	31%	35%	45%	55%	65%	75%	80%	100%
c	Tingkat Hunian Akomodasi	500	1000	1200	1300	1600	1800	2000	2500
d	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	10,52%	37,16%	49,55%	61,94%	74,32%	86,71%	97,86%	99,10%
e	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	850.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.900.000.000	8.000.000.000
3	Urusan Pertanian								
a	Produktivitas Pertanian Per Hektare Per	625,76	628,26	630,76	633,26	635,76	638,26	640,76	643,26



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Tahun								
b	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	50%	40%	30%	25%	20%	15%	10%	10%
4	Urusan Kehutanan								
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
a	Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi yang Memiliki Izin di Kabupaten / Kota	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Urusan Perdagangan								
a	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	N/A	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase Jumlah Pengadaan Pupuk dan perstisida bersubsidi	N/A	10	13	15	15	20	20	20
c	Persentase Meningkatnya Standarisasi Hasil Ukur	N/A	100	100	100	100	100	100	100
7	Urusan Perindustrian								
a	Persentase meningkatnya pengembangan, Penyebaran, Perwilayahan Industri dan Peran Serta Masyarakat	N/A	100	100	100	100	100	100	100
b	Jumlah perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI dan SIINas yang terintegrasi secara elektronik	N/A	100	100	100	100	100	100	100
c	Meningkatnya jumlah diseminasi publikasi data informasi dan analisa Industri Kabupaten Kota dalam SIINas	N/A	100	100	100	100	100	100	100



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8	Urusan Transmigrasi								
	Jumlah transmigrasi yang di siapkan	N/A	1	1	1	1	1	1	1
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
1	Urusan Perencanaan dan Keuangan								
a	Persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Persentase RENJA Perangkat Daerah berkualitas baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23
d	Rasio PAD	13%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
e	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
f	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1+	2+	3%	3%	3%	3%	3%	3%
g	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditure)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23
h	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
i	Manajemen Resiko Indeks	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
j	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
k	Pertumbuhan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
l	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Urusan Pengadaan								



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a	Persentase Jumlah Total Proyek Kontruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
b	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
a	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (%)	Tidak diketahui	70	75	80	85	90	95	95
b	Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3 (%)	65,33	66,21	68,19	70,24	72,34	74,51	76,75	76,75
c	Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi (%)	Tidak diketahui	55	65	75	80	85	90	90
d	Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,04	0,1	0,2	0,3	0,5	1	1,5	1,5
e	Persentase penilaian kinerja pegawai yang bernilai sangat baik (%)	4,47	4,9	5,4	5,9	6,5	7,1	7,9	7,9
f	Persentase penerapan sanksi pelanggaran disiplin (kasus)	Tidak diketahui	60%	75%	80%	85%	90%	95%	95%
g	Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi (%)	0	2,92	3,5	4,2	5,0	6,0	7,26	7,26
h	Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (Kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan) (%)	0,04	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	2
4	Urusan Manajemen Keuangan								



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	BASELINE 2020	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
a	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	92.31%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	35,66%	65%	70%	70%	70%	70%	80%	80%
c	Manajemen Aset	60%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5.84%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
5	Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik								
a	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Kegiatan
b	Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara 2021-2026, dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPABD) Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya. RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 juga menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan pembangunan, dan sekaligus menjadi perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan lima tahun ke depan.

Guna menjamin pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 secara konsisten, efisien, efektif, adil, partisipatif, transparan, inovatif dan berkelanjutan, maka perlu pedoman transisi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

9.1 Pedoman Transisi

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara untuk masa bakti 2021-2026 atau setelah Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara terpilih masa bakti periode berikutnya, dan sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, maka dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 Tahun 2005-2025.



9.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, arah kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah;
- (2) Dokumen RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 oleh Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dengan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara dipublikasikan dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- (3) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Morowali Utara;
- (4) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- (5) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 ini. Dalam penyusunan Renstra, setiap Perangkat Daerah setiap tahun sekurang-kurangnya menyiapkan dan melaksanakan satu (1) inovasi di bidang pemerintahan, pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- (6) Setiap Pemerintah Desa perlu menyusun dan atau melakukan pembaharuan RPJMDesa dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebagai dasar penyusunan dokumen RKPDesa dan RAPBDesa, dan melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Dalam penyusunan RPJMDesa, setiap Pemerintah Desa setiap tahun sekurang-kurangnya menyiapkan dan melaksanakan satu (1) inovasi yang bermanfaat secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa; serta mendukung kebijakan



Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dalam memajukan pelayanan, pemberdayaan, pemerintahan dan pembangunan di tingkat RT/RW, dan desa;

- (7) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara;
- (8) Penyusunan RKPD Kabupaten Morowali Utara harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- (9) RKPD Kabupaten Morowali Utara harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (10) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Morowali Utara merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- (11) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (Renja-SKPD);
- (12) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil.

9.3 Pengendalian dan Evaluasi

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 sangat ditentukan oleh pengendalian dan evaluasi melalui penerapan manajemen berbasis kinerja secara konsisten; pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi secara terpadu; pengembangan inovasi dan manajemen pengetahuan; peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparat; penguatan peran desa dan kecamatan; pengendalian dan pengawasan secara terus menerus; serta pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan media yang solid dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, pengendalian dan



evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dan indikator kinerja program pada setiap tahun dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD;
- (2) Pembentukan dan penataan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang efisien, efektif dan berbasis kompetensi;
- (3) Pengembangan manajemen berbasis kinerja dalam seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;
- (4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, pengendalian dan evaluasi (*e-Governance*) sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- (5) Penguatan peran Pemerintah Desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembedayaan masyarakat;
- (6) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen sumber daya alam dan lingkungan hidup, manajemen infrastruktur, dan manajemen keuangan;
- (7) Pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi dan media yang solid dan berkelanjutan;
- (8) Pengendalian pelaksanaan Renstra OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD;
- (9) Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (10) Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Rencana Kerja dan Anggaran OPD periode sebelumnya;
- (11) Kepala Bappeda Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi OPD yang dilakukan oleh Kepala OPD. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.



RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Morowali Utara untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

BUPATI MOROWALI UTARA,



DEUS JULKARSON HEHI

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD										
No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA									
	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata									
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,80	70,20	70,50	70,90	71,20	71,20	71,20
		Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD	98,75	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya status gizi masyarakat	Persentase Kecamatan Bebas Rawan Gizi Buruk	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka kesakitan per 100 penduduk	12	11	10	9	9	8	8
		Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Cakupan masyarakat yang memiliki jaminan pelayanan kesehatan	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	52	51	49	48	47	46	46
		Meningkatnya mutu kesehatan lingkungan	Persentase desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	70,00	72,50	74,00	76,50	78,00	80,00	80,00
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	3	3	3	2	2	2	2
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	93	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Berkembangnya layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Rasio Peserta (akseptor) KB Aktif terhadap pasangan usia subur	78,12	80,33 %	81,53 %	82,74 %	83,94 %	85,15 %	85,15 %
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
		Berkurangnya kasus penyakit menular dan penyakit endemik	Prevalensi TBC per 100.000 penduduk	120	110	105	100	95	90	90
	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing									
		Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat								
		Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20	9,30	9,30
		Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,30	12,40	12,50	12,60	12,70	12,80	12,80
		Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah	Angka melek huruf	98,12	98,58	98,58	98,75	99,25	99,50	99,50
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	1,50	1,80	2,00	2,30	2,60	2,80	2,80
		Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SD/MI	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SMP/MTs	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah	Angka kelulusan SMA/MA/SMK	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja								
		Berkembangnya kewirausahaan	Pertumbuhan jumlah wirausahawan baru	100	100	100	100	100	100	100
		Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi terapan	Jumlah teknologi tepat guna yang didiseminasikan kepada petani, nelayan, dan UMKM	2	2	3	3	4	4	4
		Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja	Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	5	5	5	5	5	5	5
		Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja terampil (tingkat pendidikan diatas SMA/SMK)	29000	29200	29400	29600	29800	30000	30000
		Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja	Pertumbuhan jumlah lulusan Balai Latihan Kerja (%)	10	10	10	10	10	10	10
		Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil	40,27	45,31 %	50,12 %	55,80 %	60,31 %	60,31 %	60,31 %

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD										
No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	40,27	45,31 %	50,12 %	55,80 %	60,31 %	60,31 %	60,31 %
		Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan								
		Meningkatnya prestasi pemuda di bidang Pendidikan, seni, budaya dan olah raga	Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi nasional dan internasional	5	5	10	10	20	20	20
		Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan jender								
		Meningkatnya partisipasi perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	9,25	9,50	9,50	9,75	10,00	10,00	10,00
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah									
		Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing								
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN) (persen)	5,41	5,85	6,27	6,88	7,01	7,21	7,21
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	31,00	30,56	30,05	29,61	29,15	28,68	28,68
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tahun)	2,83	2,99	3,20	3,44	3,64	3,85	3,85
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,05	10,35	10,75	11,25	11,85	12,55	12,55
		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, industri pengolahan, dan jasa perdagangan dan pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	5.716	6.068	6.447	6.812	7.184	7.552	7.552
		Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat								
		Meningkatnya kesejahteraan pembudidaya, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan	Persentase peningkatan produktivitas dan nilai tukar perikanan	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM (persen)	5,00	5,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00
		Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas								
		Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	8,00	8,00
		Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah BUMDesa yang aktif	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	50,00	50,00
		Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan								
		Meningkatnya kewaspadaan, kesiap siagaan, dan mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Air (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Udara (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Tutupan Lahan (kategori)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Terwujudnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan	Persentase penyelesaian kasus perusakan lingkungan	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Mewujudkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah dan pertanahan secara terpadu dan konsisten								
		Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Persentase kasus sengketa tanah	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD										
No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Persentase tanah dengan sertifikat	0						0
		Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah	Persentase ketaatan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah										
		Meningkatkan Mutu Perumahan dan Permukiman	1	0	0	0	0	0	0	0
		Terbangunnya Perumahan dan Permukiman sesuai standar minimum	Persentase RUMah sehat dan layak huni	73	74	76	78	79	80	80
		Terbangunnya Perumahan dan Permukiman sesuai standar minimum	Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	72	73	75	77	79	80	80
		Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan	Panjang Jalan dan Luas Lahan Perumahan	0	13 Persen	18 Persen	23 Persen	28 Persen	33 Persen	33 Persen
		Tersedianya rencana pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun	0	5 Persen	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen
		Tersedianya Pengembangan Permukiman	Jumlah Pembangunan Infrastruktur yang dibangun	47.98	49.00 Persen	51.00 Persen	53.00 Persen	55.00 Persen	57.50 Persen	57.50 Persen
		Terwujudnya Peningkatan pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen sertifikasi dan registrasi perumahan	0	5 Persen	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	25 Persen
		Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar								
		Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Gedung Kantor yang Terbangun dan Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	61.98	63	65	67	69	71	71
		Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Pengelolaan Air Limbah	40.00	43.89 Persen	45.37 Persen	50.45 Persen	55.37 Persen	60.24 Persen	60.24 Persen
		Tersedianya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Drainase Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Terhambat	64	65 Persen	67 Persen	69 Persen	71 Persen	73.50 Persen	73.50 Persen
		Tersedianya prasarana dan sarana air baku	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	48,50	50,00	51,50	52,00	53,50	55,00	55,00
		Tersedianya prasarana dan sarana air baku	Jumlah waduk dan embung dalam kondisi baik	0						0
		Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	56,50	57,50	59,00	61,00	63,00	65,00	65,00
		Tersedianya prasarana dan sarana air bersih	Persentase desa dengan akses air bersih	0						0
		Tersedianya prasarana dan sarana listrik	Persentase desa dengan akses listrik	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00	95,00
		Tersedianya prasarana dan sarana listrik	Persentase rumah tangga dengan akses listrik	93,00	93,50	94,00	94,30	94,80	95,00	95,00
		Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kecamatan	Jumlah desa dengan gedung kantor dan peralatan baik	0						0
		Tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kecamatan	Jumlah kecamatan dengan gedung kantor dan peralatan baik	0						0
		Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardesa dan antarkecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya								
		Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan internet	7,50	12,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
		Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan handphone/telpon	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
		Terbangunnya jaringan transportasi darat	Persentase Jalan Kabupaten dengan kondisi baik (persen)	38,00	40,00	44,00	48,00	55,00	60,00	60,00
		Terbangunnya jaringan transportasi darat	Persentase desa dengan akses angkutan darat	48	51	56	60	65	70	70
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik										
		Meningkatkan kinerja pelayanan publik								
		Meningkatnya Hasil Kelibngan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	10	10 Persen	15 Persen	20 Persen	25 Persen	30 Persen	100 Persen
		Meningkatnya Hasil Kelibngan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase Hasil Kelibngan yang Diimplementasikan	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD										
No	Visi & Misi	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke -					Kondisi Akhir
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	100	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
		Terwujudnya pelaksanaan sistem informasi pemerintahan yang transparan	Indeks Maturitas SPBE	0						0
		Terwujudnya pelayanan publik di desa dan kecamatan yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	20,00	20,00 %	40,00 %	60,00 %	80,00 %	100,00 %	100,00 %
		Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Tingkat kepuasan masyarakat	76,61-88,30/B (Baik)	76,61-88,30/B (Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)	88,31-100/A (Sangat Baik)
		Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	CC	B	B	BB	A	A	A
		Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai LPPD	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
		Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks RB	0						0
		Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis								
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Jumlah konflik di masyarakat	0						0
		Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Jumlah korban kriminalitas	0						0

